

**MENJADI PERUSAHAAN TEKNOLOGI TERPERCAYA
DENGAN CAKUPAN INDUSTRI YANG LUAS
UNTUK MEWUJUDKAN #INTIREBORN**



ANNUAL REPORT
LAPORAN TAHUNAN

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)



ANNUAL REPORT

LAPORAN TAHUNAN

Sangkalan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer and Limitation of Liability

Laporan ini berisi pernyataan-pernyataan yang dapat dianggap sebagai pandangan masa depan (*forward-looking statements*) sehingga hasil-hasil nyata Perseroan, pelaksanaan atau pencapaian-pencapaiannya dapat berbeda dari hasil yang diperoleh melalui pandangan masa depan (*forward looking statements*) yang antara lain merupakan hasil dari perubahan-perubahan ekonomi dan politik, baik nasional maupun regional, perubahan nilai tukar valuta asing, perubahan harga dan permintaan dan penawaran pasar komoditas, perubahan kompetisi perusahaan, perubahan undang-undang atau peraturan dan prinsip-prinsip akuntansi, kebijakan-kebijakan dan pedoman-pedoman, serta perubahan-perubahan asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat pandangan masa depan (*forward-looking statements*).

* Dalam Laporan Tahunan ini nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia selanjutnya disingkat "PT INTI (Persero)" atau Perseroan.

This report contains certain statements that can be considered forward-looking statements so that the Company's actual results, implementation, or achievements could differ materially from those projected in the forward-looking statements which among others are the results of economic and political changes both national and regional, changes in foreign exchange rates, changes in the prices and supply and demand on the commodity markets, changes in corporate competition, changes in laws or regulations and accounting principles, policies and guidelines, and changes in the assumptions used in making forward-looking statements.

** In this Annual Report, the name of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, hereinafter abbreviated as "PT INTI (Persero)" or the Company.*



Menjadi Perusahaan Teknologi Terpercaya dengan Cakupan Industri yang Luas untuk Mewujudkan #IntiReborn

Becoming a Trusted Technology Company with Wide Industry Coverage to Realize #IntiReborn

Di tengah tantangan yang terjadi pada tahun 2023 PT INTI (Persero) masih dipercaya dan mendapatkan dukungan penuh dari para stakeholder untuk tetap berkarya dan bertransformasi menuju arah perusahaan yang lebih baik.

Perseroan terus berusaha mengeksplorasi peluang-peluang baru, roadmap yang telah ditetapkan untuk masing-masing portofolio bisnis telah dilaksanakan dengan sasaran untuk memperluas cakupan pasar ke industri-industri lain di luar telekomunikasi. Perseroan tidak lagi membatasi hanya pada industri telekomunikasi, roadmap tersebut disusun dengan harapan Perseroan dapat bertransformasi menjadi perusahaan teknologi yang mampu mendukung berbagai industri vertikal baik di Indonesia maupun mancanegara. Menuju visi PT INTI (Persero) **"Menjadi Perusahaan Teknologi Terpercaya dengan Cakupan Industri yang Luas"**.

In the midst of the challenges that occurred in 2023, PT INTI (Persero) is still trusted and has full support from stakeholders to continue working and transforming towards a better company.

*The Company continues to strive to explore new opportunities, the roadmap that has been determined for each business portfolio has been implemented with the aim of expanding market coverage to other industries outside telecommunications. The Company is no longer limited only to the telecommunications industry, the roadmap has been prepared with the hope that the Company can transform into a technology company that is able to support various vertical industries both in Indonesia and abroad. Towards PT INTI (Persero)'s vision **"To Become a Trusted Technology Company With Broad Industry Coverage"**.*

Kesinambungan Tema

Continuity of Theme

2023

Menjadi Perusahaan Teknologi Terpercaya dengan Cakupan Industri yang Luas untuk Mewujudkan #IntiReborn

Becoming a Trusted Technology Company with Wide Industry Coverage to Realize #IntiReborn



Di tengah tantangan yang terjadi pada tahun 2023 PT INTI (Persero) masih dipercaya dan mendapatkan dukungan penuh dari para stakeholder untuk tetap berkarya dan bertransformasi menuju arah perusahaan yang lebih baik.

Perseroan terus berusaha mengeksplorasi peluang-peluang baru, roadmap yang telah ditetapkan untuk masing-masing portofolio bisnis telah dilaksanakan dengan sasaran untuk memperluas cakupan pasar ke industri-industri lain di luar telekomunikasi. Perseroan tidak lagi membatasi hanya pada industri telekomunikasi, roadmap tersebut disusun dengan harapan Perseroan dapat bertransformasi menjadi perusahaan teknologi yang mampu mendukung berbagai industri vertical baik di Indonesia maupun mancanegara. Menuju visi PT INTI (Persero) "Menjadi Perusahaan Teknologi Terpercaya Dengan Cakupan Industri yang Luas".

In the midst of the challenges that occurred in 2023, PT INTI (Persero) is still trusted and has full support from stakeholders to continue working and transforming towards a better company.

The Company continues to strive to explore new opportunities, the roadmap that has been determined for each business portfolio has been implemented with the aim of expanding market coverage to other industries outside telecommunications. The Company is no longer limited only to the telecommunications industry, the roadmap has been prepared with the hope that the Company can transform into a technology industry that is able to support various vertical industries both in Indonesia and abroad. Towards PT INTI (Persero)'s vision "To Become a Trusted Technology Company with Broad Industry Coverage".



2022

Menciptakan Nilai Tambah dan Memperluas Cakupan Bisnis dalam Mendukung Kedaulatan Industri Teknologi Dalam Negeri #INTIREborn

Creating Added Value and Expanding Business Coverage in Supporting Domestic Technology Industry Sovereignty #INTIREborn



Tahun 2022 Perseroan dihadapkan pada program akselerasi transformasi digital nasional sebagai potensi daya saing global serta pemulihan pasca pandemi Covid-19. Menghadapi tantangan global yang ada, Perseroan fokus untuk mempertahankan kinerja operasi dan keuangan, dengan mengedepankan strategi penjualan melalui penguatan basis pelanggan, terutama untuk segmen *Manufacture*, *System Integrator*, dan *Digital*.

Kerja keras manajemen PT INTI (Persero) dalam melakukan transformasi dan membenahi tata kelola perusahaan berbuah manis. Pelan tapi pasti, kinerja keuangan berangsur membaik.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, *recurring* bisnis merupakan salah satu strategi untuk mengupayakan *recurring income* yang berkelanjutan dengan menangkap peluang pasar yang ada melalui pengembangan produk-produk baru sehingga mampu memberikan kontribusi laba yang optimal bagi perusahaan.

PT INTI (Persero) berupaya membangun fundamental bisnis yang sehat dengan meningkatkan *recurring business* untuk mewujudkan #INTIREborn.

In 2022 the Company is faced with a national digital transformation acceleration program as a potential for global competitiveness and recovery after the Covid-19 pandemic. Facing existing global challenges, the Company focuses on maintaining operational and financial performance, by maintaining sales strategies through strengthening the customer base, especially for the Manufacture, System Integrator, and Digital segment.

The hard work of PT INTI (Persero)'s management in transforming and improving corporate governance has paid off. Slowly but surely, financial performance is improving.

In facing these challenges, recurring business is one of the strategies to seek sustainable recurring income by capturing existing market opportunities through the development of new products so as to be able to provide optimal profit contribution for the company.

PT INTI (Persero) strives to build sound business fundamentals by increasing recurring business to realize #INTIREborn.

2021

Meraih Peluang dan Mengatasi tantangan untuk mencapai #INTIBangkit

Becoming a Trusted Technology Company with Wide Industry Coverage to Realize #IntiReborn



Dengan adanya pandemi Covid-19, perkembangan telekomunikasi dan transformasi digital bergerak lebih cepat. Hal ini menjadi peluang pada seluruh lini bisnis Perseroan sebagai satu-satunya badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri telekomunikasi dengan *value chain* yang *end-to-end* melalui portfolio *Manufacture & Assembly*, *System Integrator*, *Digital Service*, dan *Managed Service* (MSDM) dan mengoptimalkan hasil-hasil inovasi Perseroan di berbagai bidang, baik inovasi produk, model bisnis, serta semua sumber daya yang dimiliki demi memberikan kontribusi yang tinggi bagi pencapaian tujuan strategis Perseroan.

Perseroan menyadari bahwa PT INTI (Persero) berada di sektor industri yang lincah dan begitu banyak tantangan yang harus diatasi pada masa pandemi Covid-19. Untuk itu Perseroan terus berupaya untuk mengikuti perubahan industri serta berkomitmen untuk terus menciptakan peluang pada seluruh lini bisnis dan akan terus berupaya mengatasi tantangan baik dari sisi bisnis, keuangan dan perencanaan strategi yang *agile* guna keberlangsungan usaha.

Secara umum, Perseroan fokus untuk terus meningkatkan penjualan dengan tetap mempertimbangkan laba bersih, menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran rutin, serta melakukan persiapan untuk perbaikan kinerja keuangan secara berkesinambungan dengan upaya-upaya penyelesaian dan restrukturisasi utang nonproduktif demi mewujudkan INTI BANGKIT.

With the Covid-19 pandemic, the development of telecommunications and digital transformation is moving faster. This is an opportunity for all of the Company's as the only state owned enterprise (SOE) engaged in the telecommunications industry with an end-to-end value chain through the portfolio Manufacture & Assembly, System Integrator, Digital Service, and Managed Service (MSDM) by optimizing the results of the Company's innovations in various fields, both product innovation, business models, and all available resources in order to make a high contribution to the achievement of the Company's strategic goals.

The Company realizes that PT INTI (Persero) is in an agile industrial sector and there are so many challenges that must be overcome during the Covid-19 pandemic. For this reason, the Company continues to strive to keep up with industry changes and is committed to continuing to create opportunities in all business lines and will continue to strive to overcome challenges in terms of agile business, finance and corporate strategic planning for business continuity.

In general, the Company focuses on continuing to increase sales by considering net income, balancing routine income and expenses, as well as making preparations for continuous improvement of financial performance with efforts to settle and restructure non-productive debt in order to realize INTI BANGKIT.

2020

Membentuk Kembali Masa Depan Melalui Restrukturisasi Perseroan

Reshaping the Future Through Corporate Restructuring



Tahun ini, PT INTI (Persero) membangun dan memperkuat pondasi bisnis untuk memanfaatkan kesempatan dengan mengoptimalkan hasil-hasil inovasi Perseroan di berbagai bidang, baik inovasi produk, proses, model bisnis, maupun pemasaran, serta semua sumber daya yang dimiliki demi memberikan kontribusi yang tinggi bagi pencapaian tujuan strategis Perseroan.

Dengan meletakkan pondasi-pondasi manajemen bisnis yang ramping dan efisien, tentunya Perseroan terus berupaya untuk mengikuti perubahan industri. Perseroan menyadari bahwa berada di sektor industri yang lincah, menunjukkan bahwa Perseroan harus terus berinovasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

Secara umum, Perseroan fokus untuk terus meningkatkan penjualan dengan tetap mempertimbangkan laba bersih, menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran rutin, serta melakukan persiapan untuk perbaikan kinerja keuangan secara berkesinambungan dengan upaya-upaya penyelesaian dan *reprofiling* utang nonproduktif demi mewujudkan INTI BANGKIT.

Within this year, PT INTI (Persero) builds and strengthens the business foundation to take advantage of opportunities by optimizing the Company's innovation results in various fields, both product innovation, process, business models, and marketing, as well as all available resources will provide a high contribution to the achievement of the Company's strategic objectives.

By laying the foundations for lean and efficient business management, it is important for the Company to keep up with the changes in the industry. The Company realizes that being in an agile industry, it means Companies must continue to innovate to continuously improve service to customers.

In general, the Company is focusing on continuing to increase sales while taking into account net income and targeting to balance income and routine expenses, and also making preparations to continuously improve financial performance with efforts on unproductive debt reprofiling/settlements to achieve INTI BANGKIT.

2019

Membangun Kembali Pondasi yang Kuat untuk Keberlanjutan Jangka Panjang

Rebuilding Solid Foundations for Long Term Sustainability



Dengan berbagai tantangan yang dihadapi pada tahun 2019, Perseroan dihadapkan pada kondisi sulit untuk akhirnya mengambil tindakan strategis dalam meningkatkan kualitas fundamental Perseroan. Dengan Empat Strategi Utama yang dijalankan selama tahun 2019 yaitu keseimbangan penerimaan dan pengeluaran rutin, pertumbuhan penjualan dan laba bersih, penyelesaian hutang nonproduktif, dan investasi selektif untuk pengembangan usaha, diharapkan Perseroan mencapai target yang ditetapkan.

Tahun ini, Perseroan telah dapat mencapai kesepakatan dengan Perbankan dan beberapa mitra utama untuk melakukan reprofiling hutang nonproduktif. Pencapaian ini menjadi pijakan untuk pengelolaan arus kas yang lebih efektif dan efisien di kemudian hari, dan diharapkan secara bertahap menjadi generator bagi peningkatan kinerja Perseroan secara menyeluruh. Di sisi pengeluaran, Perseroan telah berhasil menerapkan efisiensi melalui penghematan biaya operasional dan biaya tenaga kerja.

Tahun 2019, ditutup dengan kontrak proyek system integrator dan managed service dengan Telkom dan PLN sebagai modal untuk penjualan tahun 2020.

With the various challenges faced in 2019, the Company faces challenging conditions to finally take strategic actions to improve the Company's fundamental quality. With Four Main Strategies implemented during 2019, i.e., the balance of routine revenue and expenditure, sales growth and net profit, non-productive debt settlement, and selective investment for business development, the Company is expected to achieve the target set.

This year, the Company has agreed with banks and several major partners to reprofile non-productive debt. This achievement is a foundation for managing cash flow more effectively and efficiently in the future and is expected to gradually become a generator to increase the Company's overall performance. On the expenditure side, the Company has succeeded in implementing efficiency by saving operating costs and labor costs.

In 2019, it was closed with a system integrator and managed a service contract with Telkom and PLN as saving for sales in 2020.



Ikhtisar Pencapaian Tahun 2023

Achievement Highlights in 2023

Selama tahun 2023, Perseroan mencatatkan sejumlah pencapaian sebagai berikut:

Selama tahun 2023, Perseroan mencatatkan sejumlah pencapaian sebagai berikut:

Realisasi nilai Penjualan sebesar Rp 503,68 miliar atau 145,76% terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023, naik sebesar Rp 194,65 miliar atau tumbuh 62,99% terhadap periode yang sama tahun 2022.

Realized Sales value of Rp 503.68 billion or 145.76% against Company Work Plan and Budget in 2023, increased by Rp 194.65 billion or grow 62.99% against the same period in 2022.

Realisasi Rugi Tahun Berjalan dan Total Kerugian Komprehensif Konsolidasian sebesar Rp 96,56 miliar atau 103,32% terhadap RKAP tahun 2023, bertambah 11,63% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rugi Rp 86,50 miliar.

Realized Loss for the Year and a Consolidated Total Comprehensive Loss of Rp 96.56 billion or 103.32% against Company Work Plan and Budget in 2023, increase by 11.63% from the realization in 2022 of a Loss of Rp 86.50 billion.

Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) sebesar minus Rp 41,26 miliar atau menurun 209,13% terhadap realisasi periode yang sama tahun 2022 sebesar minus Rp 13,35 miliar atau minus 71,90% terhadap RKAP tahun 2023.

Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) of minus Rp 41.26 billion or decrease 209.13% against the realization of the same period in 2022 of minus Rp 13.35 billion or minus 71.90% of the 2023 Company Work Plan and Budget.

Kontrak Penjualan Konsolidasi

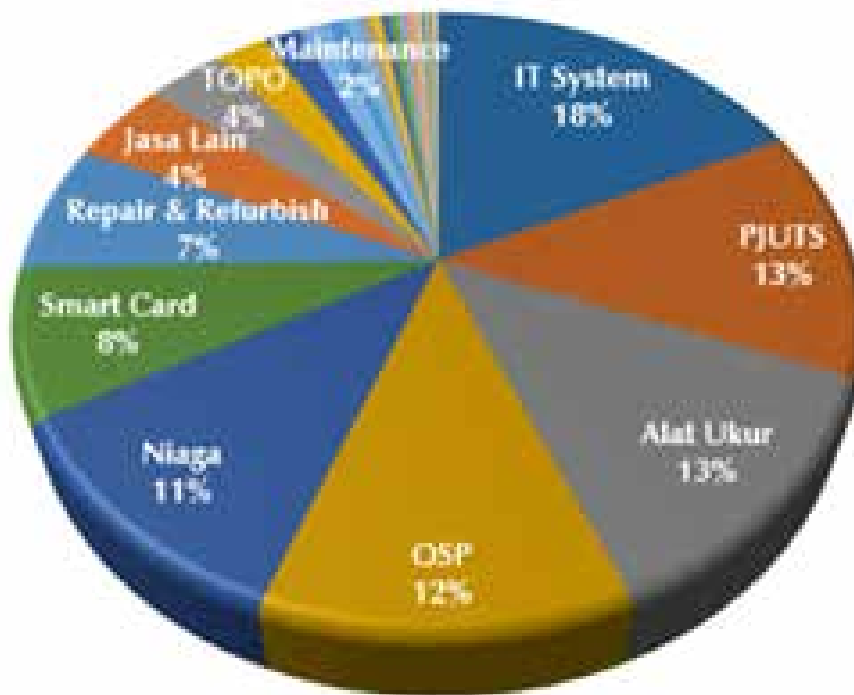
Consolidated Sales Contract

Perolehan Kontrak Penjualan Konsolidasi tahun 2023 sebesar Rp 527,91 miliar, naik Rp 258,28 miliar atau naik 95,79% dari periode yang sama tahun 2022 atau 183,74% dari RKAP tahun 2023.

Realisasi perolehan Kontrak tahun 2023 adalah sebesar Rp 527,91 miliar, terutama berasal dari proyek IT System Rp 93,95 miliar, Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Rp 69,44 miliar, Alat Ukur Rp 67,73 miliar, Outside Plant (OSP) Rp 62,86 miliar, Niaga Rp 59,39 miliar, Smart Card Rp 40,51 miliar, Repair & Refurbish Rp 35,44 miliar, Jasa Lain Rp 23,75 miliar, Tower Power Rp 18,97 miliar, Maintenance Rp 12,38 miliar, Manajemen Sampah Zero (MASARO) Rp 8,91 miliar, Service Handling Rp 7,34 miliar, e-KTP Reader Rp 3,92 miliar, Jasa Integrasi Rp 3,69 miliar, dan proyek-proyek lainnya Rp 19,60 miliar, sehingga Total Perolehan Kontrak adalah Rp 527,91 miliar.

The acquisition of Consolidated Sales Contracts in 2023 amounted to Rp 527.91 billion, an increase of Rp 258.28 billion or 95.79% from the same period in 2022 or 183.74% from the Company Work Plan and Budget in 2023.

Realization of Contract acquisition in 2023 is Rp 527.91 billion, mainly coming from IT System project Rp 93.95 billion, Solar Powered Public Street Lighting Rp 69.44 billion, Measuring Equipment Rp 67.73 billion, Outside Plant (OSP) Rp 62.86 billion, Commerce projects Rp 59.39 billion, Smart Card projects Rp 40.51 billion, Repair & Refurbish projects Rp 35.44 billion, Other Services Rp 23.75 billion, Tower Power Rp 18.97 billion, Maintenance Rp 12.38 billion, Zero Waste Management (MASARO) Rp 8.91 billion, Service Handling projects Rp 7.34 billion, e-KTP Reader Rp 3.92 miliar, Integration Services Rp 3.69 billion, and other projects Rp 19.60 billion, bringing the Total Contract Acquisition to Rp 527.91 billion.



Penjualan Konsolidasi

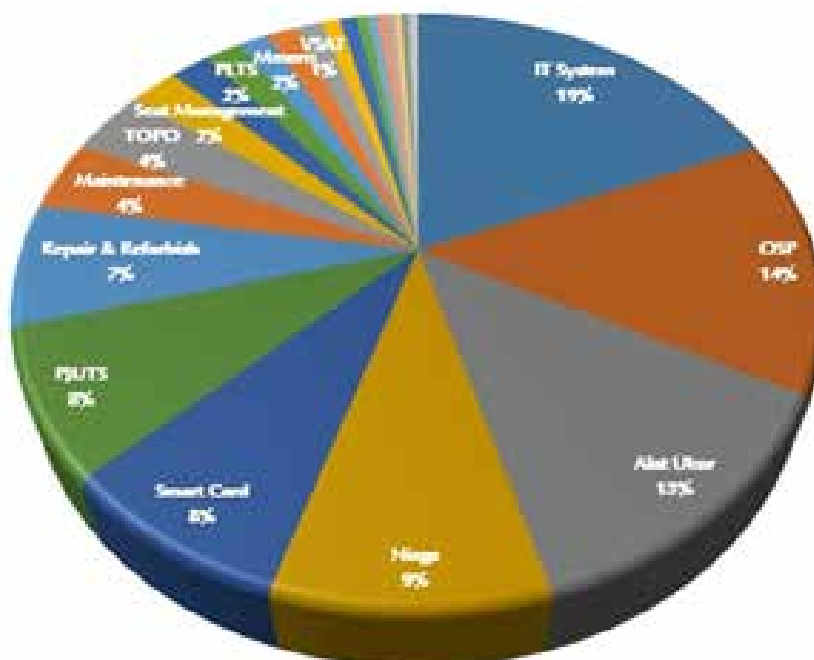
Consolidated Sales

Penjualan Konsolidasi tahun 2023 sebesar Rp 503,68 miliar, naik Rp 194,65 miliar atau meningkat 62,99% dari periode yang sama tahun 2022 atau 145,76% terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023.

Realisasi perolehan Penjualan tahun 2023 adalah sebesar Rp 503,68 miliar, terutama berasal dari proyek IT System Rp 93,92 miliar, *Outside Plant* (OSP) Rp 70,50 miliar, Alat Ukur Rp 65,32 miliar, Niaga Rp 46,57 miliar, *Smart Card* Rp 40,51 miliar, Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Rp 40,41 miliar, *Repair & Refurbish* Rp 33,35 miliar, *Maintenance* Rp 19,52 miliar, Tower Power Rp 18,58 miliar, *Seat Management* Rp 11,64 miliar, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rp 9,50 miliar, Manajemen Sampah Zero (MASARO) Rp 8,91 miliar, *Service Handling* Rp 7,34 miliar, *Very Small Aperture Terminal* (VSAT) Rp 7,31 miliar, Jasa Lain Rp 6,54 miliar, Jasa Integrasi Rp 4,48 miliar, e-KTP Reader Rp 4,08 miliar, *Mobile Point of Sales* (MPOS) Rp 2,79 miliar, *Set Top Box* (STB) Rp 2,47 miliar, *Spare Part Management System* (SPMS) Rp 2,37 miliar, *Material Outside Plant* (OSP) Rp 1,87 miliar, e-Voting Rp 1,79 miliar, dan proyek lainnya senilai Rp 3,90 miliar, sehingga Total Perolehan Penjualan adalah Rp 503,68 miliar.

Consolidated Sales in 2023 amounted to Rp 503.68 billion, increased by Rp Rp 194.65 billion or 62.99% from the same period in 2022 or 145.76% of the 2023 Company Work Plan and Budget.

Realization of Sales in 2023 amounted to Rp 503.68 billion, mainly coming from IT System projects Rp 93.92 miliar, Outside Plant (OSP) Rp 70.50 billion, Measuring Equipment Rp 65.32 billion, Commerce Rp 46.57 billion, Smart Card Rp 40.51 billion, Solar Powered Public Street Lighting Rp 40.41 billion, Repair & Refurbish Rp 33.35 billion, Maintenance projects Rp 19.52 billion, Tower Power Rp 18.58 billion, Seat Management Rp 11.64 billion, Solar Power Plant Rp 9.50 billion, Zero Waste Management (MASARO) Rp 8.91 billion, Service Handling Rp 7.34 billion, Very Small Aperture Terminal (VSAT) Rp 7.31 billion, Other Services Rp 6.54 billion, Integration Services Rp 4.48 billion, e-KTP Reader Rp 4.08 billion, Mobile Point of Sales (MPOS) Rp 2.79 billion, Set Top Box (STB) Rp 2.47 billion, Spare Part Management System (SPMS) Rp 2.37 billion, the Outside Plant (OSP) Material Rp 1.87 billion, the e-Voting Rp 1.79 billion, and other projects worth Rp 3.90 billion, bringing the Total Sales Revenue was Rp 503.68 billion.



Kinerja Keuangan Perusahaan Konsolidasi

Consolidated Company Financial Performance

Realisasi Penjualan tahun 2023 adalah sebesar Rp 503,68 miliar atau 145,76% terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023, naik sebesar Rp 194,65 miliar atau 62,99% dari periode yang sama tahun 2022. Dengan Total Beban Rp 87,10 miliar (Beban Pokok Penjualan, Beban Penjualan, Beban Umum dan Administrasi, Beban Pengembangan, Beban Pendanaan, ditambah Pendapatan dan Beban Lain-Lain serta Beban Pajak Final) Perusahaan mengalami Rugi Usaha Setelah Beban Pendanaan sebesar Rp 97,14 miliar.

Maka Perusahaan membukukan Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp 96,28 miliar atau 103,60% terhadap RKAP tahun 2023 atau Rugi bertambah 17,08% dari realisasi pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rugi Rp 82,23 miliar dan Total Kerugian Komprehensif Konsolidasian sebesar Rp 96,56 miliar atau 103,32% terhadap RKAP tahun 2023 atau Rugi bertambah 11,63% dari realisasi pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rugi Rp 86,50 miliar.

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa untuk dapat lebih meningkatkan profitabilitas Perusahaan, ukuran proyek yang lebih besar menjadi salah satu solusi yang perlu dukungan Pemegang Saham.

Sales realization in 2023 amounted to Rp 503.68 billion or 145,76% of the 2023 Company Work Plan and Budget, which increased by Rp Rp 194.65 billion or 62,99% compared to the same period in 2022. With the Total Expense of Rp 87.10 billion (Cost of Goods Sold, Selling Expenses, General and Administrative Expenses, Development Expenses, Financing Expenses, plus Other Income and Expenses and also Final Tax Expense), the Company experienced an Operating Loss after Financing Expenses of Rp 97.14 billion.

Then the company posted a Loss for the Year of Rp 96.28 billion or 103,60% of the 2023 Company Work Plan and Budget or an increased by 17.08% from the realization in the same period in 2022 which amounted to a Loss of Rp 82.23 billion and a Total Consolidated Comprehensive Loss of Rp 96.56 billion or 103.32% against 2023 Company Work Plan and Budget or an increase in loss of 11.63% from the realization in the same period in 2022 amounting to a Loss of Rp 86.50 billion.

Thus, it can be said that in order to further increase the Company's profitability, a larger project size is one solution that needs the support of Shareholders.

Realisasi Investasi Konsolidasi

Consolidated Investment Realization

Realisasi Investasi Konsolidasi tahun 2023 sebesar Rp 3,85 miliar atau 4,91% terhadap RKAP tahun 2023, atau naik 180,28% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Realisasi Investasi berasal dari Alat Olah Data (AOD) sebesar Rp 1,64 miliar, Inventaris Kantor & Gudang sebesar Rp 8,00 juta, dan Aset Dalam Pengembangan Produk sebesar Rp 2,17 miliar.

Realization of Consolidated Investment in 2023 amounted to Rp 3.85 or 4,91% against 2023 Company Work Plan and Budget, or increased by 180.28% compared to the same period in 2022. Investment realization came from Data Processing Tools Rp 1.64 million, Office & Warehouse Inventory Rp 8.00 million, and Assets in Product Development Rp 2.17 million.

Manajemen Risiko

Risk Management

Telah dilakukan pengukuran *maturity level* dengan *self-assessment* risiko pada tahun 2023 dari divisi. Kegiatan Sosialisasi Manajemen Risiko diadakan sejak awal tahun hingga saat ini. Improvement untuk proses evaluasi sedang dilaksanakan yaitu berupa template evaluasi yang baru dan *improvement dashboard assessment* manajemen risiko yang

Maturity level measurement was carried out with a risk self-assessment in 2023 from the Division. Risk Management Socialization activities have been held since the beginning of the year until now. Improvements for the evaluation process are being carried out, namely in the form of new evaluation templates and improvement dashboards for risk management

sedang ditindaklanjuti oleh tim *Information Technology*. Selain itu juga telah dilaksanakan evaluasi terhadap Kebijakan (Komitmen) Manajemen Risiko.

assessment which are being followed up by the Information Technology team. In addition, an evaluation of the Risk Management Policy (Commitment) has also been carried out.

Manajemen Kualitas

Quality Management

PT INTI (Persero) telah melaksanakan re-sertifikasi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016, ISO 45001:2018, dan PP 50/2012 (SMK3). Untuk mempertahankan sertifikat dan mengimplementasikan standar manajemen kualitas sehingga dapat mendorong kinerja Perusahaan, PT INTI (Persero) selalu melaksanakan audit internal, eksternal, dan evaluasi ketaatan terhadap perundangan yang relevan dengan perusahaan secara konsisten yaitu 1 kali dalam setahun.

Dalam mendukung implementasi sistem manajemen terintegrasi, pihak manajemen kualitas selalu melaksanakan sosialisasi, monitoring implementasi, dan evaluasi.

PT INTI (Persero) has carried out re-certification to ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016, ISO 45001:2018, and PP 50/2012 (SMK3) certificates. To maintain the certificate and implement quality management standards to encourage the company's performance, PT INTI (Persero) consistently carries out internal and external audits and evaluates compliance with laws and regulations that are relevant to the company once a year.

In supporting the implementation of an integrated management system, quality management always carries out socialization, implementation monitoring, and evaluation.

Informasi Corporate Action

Corporate Action Information

Uraian Aksi Korporasi

Description of Corporate Action

PT INTI (Persero) telah melaksanakan berbagai upaya dan aksi korporasi untuk meningkatkan kinerja tahun 2023, di antaranya sebagai berikut:

1. Permohonan Persetujuan Opsi Restrukturisasi Loan PT INTI (Persero).

2. Permohonan Fasilitas Kredit dan Dana Talangan.

3. Restrukturisasi Utang Vendor

Telah dilakukan restrukturisasi utang vendor dengan opsi:

- Diangsur selama 4 tahun.
- Diangsur melalui kerja sama kembali.
- Dilakukan haircut hingga 50% dengan angsuran lebih cepat.

4. Restrukturisasi Bisnis

Mengelompokkan lini bisnis Perusahaan, menjadi *System Integrator*, *Manufacture*, dan *Digital*, dengan fokus penguatan pada produk *genuine* (INTI Set Top Box DVBT2, KTP Reader, Laptop) dan digital (INTICloud, INTI Blockchain, dan INTI Apps).

PT INTI (Persero) has carried out various efforts and corporate actions to improve its 2023 performance, including the following:

1. Application for Approval of PT INTI (Persero) loan Restructuring Option.

2. Application for Credit Facilities and Bailout Funds.

3. Restructuring of Vendor Debt

Vendor debt restructuring has been carried out with the following options:

- Installments for 4 years.
- Installments through cooperation again.
- Do the haircut up to 50% with faster installments.

4. Business Restructuring

Grouping the Company's business lines into *System Integrator*, *Manufacture*, and *Digital*, with a focus on strengthening *genuine* products (INTI Set Top Box DVBT2, KTP Readers, Laptops) and digital (INTICloud, INTI Blockchain, and INTI Apps).



5. **Cost Leadership**

Melakukan efisiensi biaya pada seluruh bidang operasional, termasuk melakukan pengadaan material-material dengan harga kompetitif.

6. **Program Penguatan Frontliner**

Telah diimplementasikan program penguatan frontliner berbanding back office sehingga efektivitas pola kerja yang optimal.

7. **Program Pensiun Dini dan Program Dirumahkan**

Telah dirilis Program Pensiun Dini dan Program Dirumahkan, sehingga dapat menekan *fixed cost* tenaga kerja.

8. **Redefine Visi, Misi, dan Arah Pengembangan Jangka Panjang**

Telah disusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dengan visi, misi, dan arah pengembangan jangka panjang yang terstruktur yang mengambil tema INTI Reborn.

9. **Optimalisasi Aset**

Pendayagunaan aset telah dilakukan melalui penyewaan lahan dan bangunan yang *idle*, sehingga dapat menambah penerimaan lain-lain perusahaan.

10. **Lelang atas Aset Non-Operasional**

Dilakukan lelang atas aset yang sudah dinyatakan non-operasional dan tidak akan digunakan kembali.

11. **Peningkatan Recurring Business**

Memperbesar porsi *recurring business* sehingga diperoleh pendapatan yang rutin setiap bulan, tidak lagi bergantung pada proyek-proyek non-rutin.

12. **Fokus pada Proyek-Proyek Marjin Besar**

Telah dipilih proyek-proyek yang memiliki marjin besar dan menegosiasi ulang atau menghentikan proyek-proyek marjin negatif sehingga profitabilitas Perusahaan meningkat.

5. **Cost Leadership**

Conduct cost efficiency in all operational areas, including procuring materials at competitive prices.

6. **Frontliner Strengthening Program**

A frontliner strengthening program has been implemented compared to the back office so that the effectiveness of work patterns is optimal.

7. **Early Retirement Program and Laid Off Program**

The Early Retirement Program and Laid Off Program have been released, so as to reduce the fixed cost of labor.

8. **Redefine the Vision, Mission, and Long-Term Development Direction**

The Company Long Term Plan has been prepared with a structured vision, mission and long term development direction with the theme INTI Reborn.

9. **Asset Optimization**

Asset utilization has been carried out through the leasing of idle land and buildings, so as to increase the company's other income.

10. **Auctions on Non-Operational Assets**

Auctions are conducted on assets that have been declared non-operational and will not be reused.

11. **Increasing Business Recurring**

Enlarge the portion of recurring business so that regular income is obtained every month, no longer depending on non-routine projects.

12. **Focus on High Margin Projects**

Projects with large margins have been selected and renegotiated or terminated projects with negative margins so that the Company's profitability increases.

Ikhtisar Kinerja Tahun 2023

Performance Overview in 2023

Realisasi Rencana Kerja Perusahaan Tahun 2023 per bidang dapat dijelaskan sebagai berikut:

The realization of the Company's 2023 Work Plan per sector can be explained as follows:

Pemasaran dan Penjualan

Marketing and Sales

1. Merealisasikan perolehan Kontrak Konsolidasi tahun 2023 sebesar Rp 527,91 miliar dengan margin positif. Porsi terbesar dari lini bisnis *System Integrator* sebesar 88,78%, kemudian *Manufacture* sebesar 10,50%, dan *Digital Services* sebesar 0,72%.
2. Merealisasikan Penjualan Konsolidasi tahun 2023 sebesar Rp 503,68 miliar, dengan penjualan *recurring* sebesar 12,52%. Adapun Laba Kotor terbesar terutama dari proyek *Repair & Refurbish*, Alat Ukur, dan *Service Handling*. Sementara berdasarkan margin Laba Kotor terbesar terutama dari proyek Optimalisasi Material, *Service Handling*, dan *Access Point*. Salah satu produk *genuine* berkontribusi dalam perolehan margin yang tinggi.
3. Merealisasikan kontrak sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di antaranya proyek *Outside Plant* (OSP) dengan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., *Smart Card* dengan

1. Realizing Consolidated Contract acquisition in 2023 of Rp 527.91 billion with a positive margin. The largest portion of the *System Integrator* business line was 88.78%, then *Manufacture* was 10.50%, and *Digital Services* was 0.72%.
2. Realizing Consolidated Sales in 2023 of Rp 503.68 billion, with recurring sales of 12.52%. The largest Gross Profit is mainly from the *Repair & Refurbish*, *Measuring Equipment*, and *Service Handling* projects. Meanwhile, based on the largest gross profit margin, it is mainly from the *Material Optimization*, *Service Handling*, and *Access Point* projects. One of the *genuine* products contributed to the high margin.
3. Realizing State Owned Enterprises (SOEs) synergy contracts, including *Outside Plant* (OSP) with PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., *Smart Card* project with

Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), *Repair & Refurbish* dengan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., proyek OSP dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, *Maintenance* dengan PT Persada Sokka Tama.

Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Repair & Refurbish with PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, OSP project with PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Maintenance project with PT Persada Sokka Tama.

4. Berupaya meningkatkan pelaksanaan proyek tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat biaya sesuai dengan *Project Charter* yang diterima.
5. Merealisasikan kontrak dan penyelesaian pekerjaan dari pelanggan Government berbasis dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tahun 2023 di antaranya proyek IT System dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Alat Ukur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tower Power dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, proyek e-Voting dari Pemerintah Kabupaten Bantaeng DPMD dan PPDP, proyek *Set Top Box* dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan proyek e-KTP Reader dari PT Indotek Buana Karya.
6. Melaksanakan pengelolaan risiko terkait pemasaran dan pengembangan usaha secara konsisten.
7. Meningkatkan kepuasan pelanggan dan menghindari resiko denda.
8. Melakukan proses pengujian dan sertifikasi yang diperlukan untuk pemasaran produk/jasa.

4. *Strive to improve project implementation on time, on quality, and on the cost by Project Charter received.*
5. *Realizing contracts and completing work from Government customers based on funds from the Regional Revenue and Expenditure Budget and the State Revenue and Expenditure Budget, in 2023 including the IT System project from the Indonesian National Police Traffic Corps, Powered Public Street Lighting Surya from the Ministry of Energy and Mineral Resources, Measuring Instruments from the Ministry of Communication and Information, Tower Power from the Telecommunications and Information Accessibility Agency, e-Voting project from the Bantaeng Regency Government DPMD and PPDP, Set Top Box project from the Ministry of Communication and Informatics, and the e-KTP Reader project from PT Indotek Buana Karya.*
6. *Implement risk management related to marketing and business development consistently.*
7. *Increase customer satisfaction and avoid the risk of fines.*
8. *Carry out the testing and certification process required for the marketing of products or services.*

Pengadaan

Procurement

1. Memaksimalkan upaya proses pengadaan material dengan pola pembayaran yang mendukung perputaran modal kerja perusahaan yang baik (*back to back*).
2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan registrasi dan pemeliharaan data vendor secara mandiri oleh vendor, serta pemeliharaan dan evaluasi katalog produk dan pemasok atau mitra dalam rangka meningkatkan kualitas pasokan barang dan/atau jasa.
3. Peningkatan kemampuan negosiasi dalam rangka menekan Biaya Pokok Penjualan dan/atau penghematan anggaran.
4. Mengatur ulang penataan material, monitoring transaksi material gudang dan inventarisasi material secara periodik, serta memasang *Closed Circuit Television*

1. *Maximizing the efforts of the material procurement process with a payment pattern that supports good company working capital turnover (back to back).*
2. *Utilize information technology in the registration and maintenance of vendor data independently by vendors, as well as maintenance and evaluation of product catalogs and suppliers or partners to improve the quality of supply of goods and/or services.*
3. *Improved negotiation ability to reduce the Cost of Goods Sold and/or budget savings.*
4. *Rearrange material arrangement, monitor warehouse material transactions and material inventory periodically, and install Closed-Circuit Television (CCTV) cameras if*

(CCTV) jika diperlukan.

5. Pemanfaatan Sinergi Badan Umum Milik Negara (BUMN) untuk penguatan *supply chain*. Melaksanakan pengelolaan risiko secara efektif terkait kegiatan pengadaan.
6. Membuat kontrak harga satuan untuk barang/jasa utama yang dibutuhkan rutin oleh Perusahaan.
7. Rutin memelihara data persediaan di gudang kantor pusat dan gudang proyek dengan menggunakan aplikasi.
8. Menggunakan aplikasi *e-procurement* dalam semua transaksi pengadaan yang sudah terintegrasi dengan *System Application and Processing* (SAP) yang didalamnya memuat *vendor management*, *contract management*, *product management*, dan *tender management*.
9. Menggunakan *Dashboard Monitoring* untuk *Partnership* yang akan dievaluasi secara berkala.

needed.

5. *Utilization of State Owned Enterprises (SOEs) Synergy to strengthen the supply chain. Carry out effective risk management related to procurement activities.*
6. *Make a unit price contract for the main goods or services that are needed routinely by the Company.*
7. *Regularly Maintain inventory data in the head office warehouse and project warehouse using the application.*
8. *Using e-procurement applications in all procurement transactions integrated with System Application and Processing (SAP), including vendor management, contract management, product management, and tender management.*
9. *Using a monitoring dashboard for Partnerships which will be evaluated periodically.*

Produksi dan Kualitas Produk

Production and Product Quality

1. Membangun kembali kompetensi manufaktur dalam rangka mendukung proses produksi produk-produk hasil inovasi atau *genuine products*, dengan di antaranya membangun fasilitas *Electronics Manufacturing Services* beserta sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk Proses dan Sistem Kerja yang terkait.
2. Melaksanakan manajemen material dengan perencanaan dan pengelolaan material yang akurat.
3. Meningkatkan kualitas manajemen produksi melalui perbaikan Proses dan Sistem Kerja, penggunaan tools, dan aplikasi pendukung produksi atau pergudangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga tercapai tingkat kecepatan produksi yang tinggi dengan tingkat kesalahan atau kerusakan (*defect*) yang rendah.
4. Melaksanakan kerja sama produksi dengan mitra-mitra strategis yang memiliki kompetensi manufaktur, penguasaan teknologi atau brand yang kuat.
5. Melaksanakan kajian risiko untuk mengidentifikasi setiap risiko terkait kegiatan proses produksi.
6. Melakukan kegiatan purna jual untuk produk yang masih dalam masa garansi dan mengembangkan layanan *Call Center*.

1. *Rebuilding manufacturing competence to support the production process of innovative or genuine products by building electronics manufacturing services facilities and the required facilities and infrastructure, including related work processes and systems.*
2. *Implement material management with accurate material planning and management.*
3. *Improving the quality of production management through improving work processes and systems, using tools and applications to support production or warehousing, and improving the quality of human resources to achieve a high production speed with a low production speed level of error or damage.*
4. *Carry out production cooperation with strategic partners who have manufacturing competence, mastery of technology, or strong brands.*
5. *Carry out risk assessment to identify any risks related to production process activities.*
6. *Carry out after-sales activities for products that are still under warranty and develop call center services.*



7. Menggunakan aplikasi *proline* yang salah satu fungsinya adalah monitoring dan *material management* untuk meningkatkan produktivitas produksi.

7. Using the *Proline* application, one of its functions is monitoring and *material management* to increase production productivity.

Teknik dan Teknologi

Engineering and Technology

1. Membangun dan meningkatkan kerja sama strategis dengan prinsipal atau pemilik teknologi dalam rangka membangun kompetensi.
2. Melaksanakan pengelolaan risiko secara efektif terkait kegiatan pembangunan kemitraan dan investasi di bidang teknologi informasi.
3. Program keamanan data elektronik dengan merumuskan Kebijakan dan Prosedur terkait *Information Technology*.
4. Pembangunan *Knowledge Management System* dengan berbasis pada *Online Database*.
5. Pembangunan aplikasi *executive sales & project dashboard*.

1. Build and enhance strategic partnership with principals or technology owners in order to build competency.
2. Carry out effective risk management related to partnership development activities and investments in information technology.
3. Electronic data security program by formulating *Information Technology*-related policies and procedures.
4. Development of knowledge management system based on an online database.
5. Development of executive sales & project dashboard applications.

Keuangan dan Akuntansi

Finance and Accounting

1. Perusahaan melakukan tindak lanjut terhadap kajian Kajian Restrukturisasi Utang, Bisnis, dan Optimalisasi Aset yang dibantu oleh Konsultan Restrukturisasi PT PPA (Persero) yang dilakukan pada tahun 2020, sehingga harapannya dapat memperbaiki rasio-rasio keuangan seperti *Debt to Equity Ratio* dan *financial covenant* lainnya, diantaranya:
 - a. Restrukturisasi/relaksasi utang bank non-produktif dan utang usaha non produktif serta kewajiban non produktif lainnya agar dapat diselesaikan secara bertahap;
 - b. Rencana untuk melakukan *refinancing* utang bank eksisting dengan menggunakan instrument keuangan lainnya;
 - c. Rencana untuk melakukan *bridging finance* untuk utang usaha dan utang kepada pihak lainnya.
2. Menyediakan modal kerja yang cukup untuk bisnis perusahaan baik yang bersifat *recurring* maupun *project based* dengan cara:
 - a. Mengembangkan model-model pendanaan baru seperti kerjasama pendanaan dengan mitra.
 - b. Tetap menjaga kerja sama pendanaan dengan

1. The Company is following up on the study of Debt Restructuring, Business, and Asset Optimization assisted by the Restructuring Consultant PT PPA (Persero) conducted in 2020, so that it hopes to improve financial ratios such as the *Debt to Equity Ratio* and other financial covenants, including :
 - a. Restructuring or relaxing non-productive bank loans and non-productive trade payables, and other non-productive liabilities so that they can be settled in stages.
 - b. Plans to refinance existing bank loans using other financial instruments.
 - c. Plans to carry out bridging finance for trade payables and payables to other parties.
2. Provide sufficient working capital for the company's business, both recurring and project based by:
 - a. Develop new funding models such as co-financing with partners.
 - b. Continue to maintain funding cooperation with banks

pihak perbankan atau lembaga keuangan non-bank, baik berupa kredit modal kerja maupun instrumen keuangan lainnya.

or non-bank financial institutions, both in the form of working capital loans and other financial instruments.

3. Berkoordinasi dengan unit-unit terkait dalam rangka rencana optimalisasi aset.
4. Pengendalian *cash flow* Perseroan secara ketat dengan melaksanakan koordinasi secara berkala kepada unit bisnis dan unit kerja lainnya terkait rencana *cash in*, *cash out*, dan pemanfaatan anggaran.
5. Pelaporan dan penyetoran pajak tepat waktu untuk mempertahankan kredibilitas perusahaan berisiko rendah.
6. Menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen Konsolidasi Perusahaan bulanan, triwulanan, dan tahunan secara akurat dan tepat waktu.

3. *Coordinate with related units in the framework of asset optimization plan.*
4. *Strict control of the Company's cash flow by conducting regular coordination with business units and other work units related to cash in, cash out, and budget utilization plans.*
5. *Timely tax reporting and deposit to maintain the credibility of low-risk companies.*
6. *Prepare monthly, quarterly, and annual Consolidated Financial Statements and Company Management Reports in an accurate and timely manner.*

Sistem dan Organisasi

System and Organization

1. Melaksanakan kajian risiko untuk mengidentifikasi setiap resiko yang ada serta mengurangi atau meminimalkan dampak negatif untuk setiap proses bisnis.
2. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik untuk mempertahankan skor perusahaan dalam penilaian *Good Corporate Governance* (GCG), serta memperbaiki opportunity for improvement untuk mempertahankan skor Perseroan dalam Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU).
3. Strategi komunikasi eksternal PT INTI (Persero) di semua media Perseroan untuk membangun image perusahaan sesuai dengan visi dan misi.
 - a. Optimalisasi website dan media sosial sebagai media komunikasi resmi Perseroan.
 - b. Optimalisasi marketing kit (video profile, *company profile*, brosur, banner, poster, backdrop, video, animasi, dan lainnya).
4. Melakukan dukungan hukum dalam perikatan, litigasi, dan kajian hukum dalam setiap aspek kegiatan perusahaan.

1. *Carry out a risk assessment to identify any existing risks and reduce or minimize the negative impact for each business process.*
2. *Implement good corporate governance to maintain the company's score in the Good Corporate Governance (GCG) Assessment, as well as improve opportunities for improvement to maintain the Company's score in the Superior Performance Assessment Criteria.*
3. *PT INTI (Persero) external communication strategy in all the Company's media to build the company's image in accordance with the vision and mission.*
 - a. *Optimization of website and social media as the Company's official communication media.*
 - b. *Optimization of marketing kit (video profile, company profile, brochure, banner, poster, backdrop, video/animation, and many more).*
4. *Provide legal support in engagement, litigation, and legal studies in every aspect of the company's activities.*



Pengembangan Sumber Daya Manusia

Human Resource Development

1. Membangun <i>Integrated Talent Management System</i> (ITMS) dan mengirimkan talenta perusahaan ke dalam talent pool di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri dari minimal 20% dari seluruh pejabat satu level di bawah Direksi dan kandidat Calon Direksi, minimal 3 (tiga) orang suksesor per posisi Direksi. 2. Melakukan pengembangan kompetensi sesuai bisnis perusahaan terutama kepemimpinan <i>engineering</i>, manajemen proyek, dan <i>account management</i>. 3. Pengembangan kompetensi <i>leadership</i>, melalui pelatihan (<i>directorship training</i>, <i>finance for non-finance manager</i>, dan lainnya). 4. Pengembangan sumber daya manusia melalui: a. Pelatihan dan Sertifikasi, terutama di bidang telekomunikasi dan energi, serta kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sebagai pendukung. b. <i>Focus Group Discussion</i> atau <i>Sharing Session</i>. c. Mengintensifkan <i>Knowledge Management System</i> diantaranya melalui <i>Sharing Session</i>/Webinar INTI (Internal). 5. Pemenuhan Tenaga Kerja (internal & eksternal) sesuai kebutuhan organisasi. 6. Membangun <i>employee wellbeing</i> untuk memperkuat proses transisi dari transformasi Perusahaan.	1. <i>Build an Integrated Talent Management System (ITMS) and send company talents to the talent pool at the Ministry of State Owned Enterprises (SOEs), which consists of a minimum of 20% of all officials one level below the Board of Directors and candidates for the Board of Directors, at least 3 (three) successors per position of the Board of Directors.</i> 2. <i>Develop competencies according to the company's business, especially engineering leadership, project and account management.</i> 3. <i>Development of leadership competencies, through training (directorship training, finance for non-finance managers, and many more).</i> 4. <i>Human resource development through:</i> a. <i>Training and Certification, especially in the field of Telecommunications and Energy as well as occupational health and safety as support.</i> b. <i>Focus Group Discussion or Sharing Session.</i> c. <i>Intensifying the knowledge Management System including through the INTI (Internal) Sharing Session/ Webinars.</i> 5. <i>Fulfillment of Manpower (internal & external) according to the needs of the organization.</i> 6. <i>Building employee wellbeing to strengthen the transition process of the Company's transformation.</i>

Penelitian dan Pengembangan

Research and Development

1. Pengembangan produk baru dan existing sesuai dengan kebutuhan pasar (<i>Market Driven</i>). 2. Membangun dan meningkatkan kerja sama strategis dengan pemilik teknologi ataupun lembaga penelitian dasar dan terapan, serta institusi pendidikan dalam rangka membangun sinergi inovasi untuk menghasilkan produk-produk hasil rekayasa dalam negeri. 3. Mengusulkan alternatif pengembangan bisnis baru (<i>new revenue stream</i>) untuk mempercepat perbaikan kondisi finansial perusahaan. 4. Melakukan kajian bisnis, termasuk kajian risiko untuk menguji kelayakan dan mengidentifikasi risiko untuk bisnis	1. <i>Development of new and existing products according to market needs (Market Driven).</i> 2. <i>Build and enhance strategic cooperation with technology owners or basic and applied research institutions and, educational institutions in order to build innovation synergies to produce domestically engineered products.</i> 3. <i>Propose new business development alternatives (new revenue stream) to accelerate the improvement of the company's financial condition.</i> 4. <i>Conduct business studies, including risk assessments to test feasibility and identify risks for the company's new</i>

baru perusahaan.

5. Melakukan kegiatan-kegiatan pendukung pengembangan produk seperti:
 - a. Pendaftaran paten untuk hasil-hasil inovasi perusahaan.
 - b. Sertifikasi produk atau jasa yang diperlukan.
 - c. Uji coba lapangan.
6. Melakukan manajemen produk baik yang akan atau sedang dikembangkan maupun telah dirilis.

business.

5. Carry out supporting activities for product development such as:
 - a. Patent registration for the company's innovations.
 - b. Product or service certification required.
 - c. Field trials.
6. Perform product management both to be or under development and have been released.

Corporate Social Responsibility (CSR), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dan Pelestarian Lingkungan Penelitian dan Pengembangan

Corporate Social Responsibility (CSR), Partnership and Community Development Program, and Environmental Preservation

Melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sesuai dengan peraturan yang berlaku serta senantiasa menerapkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang mendukung program pemerintah secara efektif dan tepat sasaran. Program tersebut antara lain Program Bidang Pendidikan, Program Bidang Lingkungan, Program Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil, serta Program *Creating Shared Value*.

Implement Corporate Social Responsibility (CSR) programs in accordance with applicable regulations and always implement the Partnership and Community Development Programs (PKBL) that supports government programs effectively and on target. These programs include the Education Sector Program, the Environment Sector Program, the Micro and Small Enterprises Development Program, and the Creating Shared Value Program.

Investasi

Investment

1. Melaksanakan investasi pembangunan kompetensi Perusahaan di bidang manufaktur, termasuk:
 - a. Pembangunan fasilitas produksi elektronika (perbaikan gedung, mesin-mesin, dan sebagainya), khususnya *smart digital device*, secara bertahap sesuai pertumbuhan bisnis perusahaan, dengan berbagai skema investasi yang menguntungkan perusahaan (*Built Operation Transfer* dan lainnya).
 - b. Sertifikasi, lisensi, dan hak cipta khususnya untuk *product genuine*.
 - c. Server, aplikasi piranti lunak, dan alat olah data lainnya untuk keperluan manufaktur.
2. Melaksanakan pengelolaan risiko secara efektif terkait seluruh kegiatan investasi.
3. Kerja sama investasi industri manufaktur produk-produk telekomunikasi, elektronika, dan pendukungnya.

1. Implementing the Company's competency development investment in manufacturing, including:
 - a. The construction of electronic production facilities (building repairs, machines, and so on), especially *smart digital devices*, is gradually being developed according to the company's business growth, with various investment schemes that benefit the company (*Built Operation Transfer* and many more).
 - b. Certifications, licenses, and copyrights, especially for *genuine products*.
 - c. Servers, software applications, and other data processing tools for manufacturing purposes.
2. Implement effective risk management related to all investment activities.
3. Investment cooperation in manufacturing telecommunications, electronics, and supporting products.



Daftar Isi

Table of Content

Sangkalan dan Batasan Tanggung Jawab <i>Disclaimer and Limitation of Liability</i>	002	Mekanisme Pengawasan dan Penasihatannya Dewan Komisaris atas Direksi 2023 <i>Mechanism of Supervision and Advice of the Board of Commissioners on the Board of Directors 2023</i>	036
Prolog Tema Tahunan <i>Annual Theme Prologue</i>	003	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris 2023 Berdasarkan Kinerja Komite Penunjang Dewan Komisaris dan Direksi <i>Performance Assessment of the Board of Commissioners 2023 Based on the Performance of the Supporting Committees of the Board of Commissioners and the Board of Directors</i>	037
Kesinambungan Tema <i>Sustainable Theme</i>	004	Aspek Pengembangan Usaha : Eksplorasi dan Penyelesaian Proyek Strategis <i>Business Development Aspect: Strategic Project Exploration and Completion</i>	038
Ikhtisar Pencapaian Tahun 2023 <i>Achievement Highlights in 2023</i>	009	Penilaian Tata Kelola Perusahaan : Upaya Peningkatan Implementasi Tata Kelola Perusahaan sebagai "On Going Strategy" <i>Corporate Governance Assessment: Efforts to Improve Corporate Governance Implementation as an "On Going Strategy"</i>	039
Informasi Corporate Action <i>Corporate Action Information</i>	014	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023 <i>Company Work Plan and Budget in 2023</i>	039
Ikhtisar Kinerja 2023 <i>Performance Overview in 2023</i>	016	Pandangan atas Prospek 2023 <i>Outlook on the 2023 Prospects</i>	040
Daftar Isi <i>Table of Content</i>	023	Pandangan atas Penerapan Whistle-Blowing System <i>Overview on the Implementation of the Whistle-Blowing System</i>	041
Ikhtisar Keuangan Penting <i>Summary of Key Financial Information</i>		Perubahan Komposisi Dewan Komisaris <i>Changes in the Composition of the Board of Commissioners</i>	042
Potret Kinerja Lima Tahun <i>Five Year Performance Portrait</i>	029	Laporan Direksi <i>Board of Director Report</i>	043
Informasi Saham & Obligasi <i>Stock and Bond Information</i>	033	Tinjauan Makro Ekonomi Tahun 2023 <i>Macroeconomic Overview in 2023</i>	044
Laporan Dewan Komisaris & Direksi <i>Board of Commissioners & Directors Report</i>		Analisis atas Kinerja Perusahaan <i>Analysis of Company Performance</i>	045
Laporan Dewan Komisaris <i>The Board of Commissioners' Report</i>	035		
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk Tahun Buku 2022 <i>Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for Fiscal Year 2022</i>	035		

Perbandingan Antara Hasil yang Dicapai Dengan yang Ditargetkan (Kinerja Perseroan) **048**
Comparison Between Achieved and Targeted Results (Company Performance)

Kendala-Kendala yang Dihadapi Perusahaan dan Langkah-Langkah Penyelesaiannya **051**
Constraints Faced By The Company and The Solution Steps

Gambaran dan Analisis Tentang Prospek Usaha **053**
Overview and Analysis of Business Prospects

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik **054**
Development of Good Corporate Governance Implementation

Pengelolaan Human Capital **055**
Human Capital Management

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pengelolaan Lingkungan **055**
Corporate Social Responsibility and Environmental Management

Penilaian atas Kinerja Komite-Komite yang Berada di Bawah Direksi **056**
Assessment of The Performance of The Committees Under The Board of Directors

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya **056**
Changes in The Composition of The Members of The Board of Directors and The Reasons for The Changes

Ucapan Terima Kasih **057**
Acknowledgements

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas Laporan Tahunan **058**
Statement Letters of The Member of The Board of Commissioners and Board of Directors

Profil Perusahaan

Company Profile

Identitas Perusahaan **060**
Corporate Identity

Informasi Umum **062**
General Information

Riwayat Singkat Perusahaan **063**
Company Brief History

Kegiatan dan Bidang Usaha **068**
Activities and Fields of Business

Wilayah Operasional **073**
Operational Area

Struktur Organisasi **074**
Organizational Structure

Keanggotaan Asosiasi **076**
Association Membership

Visi, Misi & Strategi **077**
Company Vision, Mission and Strategy

Budaya dan Nilai Perusahaan **080**
Corporate Culture and Values

Profil Dewan Komisaris **084**
Board of Commissioners Profile

Profil Direksi **092**
Board of Directors Profile

Profil Senior Leader **102**
Senior Leader Profile

Pengelolaan Sumber Daya Manusia **108**
Human Capital Management

Demografi Karyawan **121**
Employee Demography

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan **124**
Employee Competency Training and Development Program

Informasi Pemegang Saham & Obligasi **129**
Information for Shareholders and Bondholders

Struktur Grup Perusahaan **131**
Structure of Company Group

Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi **132**
List of Subsidiaries and/or Associated Entities

Alamat Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi **136**
Address of Subsidiaries and/or Associated Entities

Pemegang Saham Utama, Entitas Anak & Entitas Asosiasi **137**
Major Shareholder, Subsidiaries & Associates

Jejak Langkah <i>Milestones</i>	138	Investasi Barang Modal <i>Investment In Capital Goods</i>	192
Penghargaan, Sertifikasi, dan Lisensi <i>Awards, Certifications and Licenses</i>	141	Target Perusahaan di Awal Tahun 2023 Dibandingkan Realisasi Tahun 2023 <i>Company Targets in Early 2023 Compared to Realization in 2023</i>	193
Informasi pada Situs Web Perusahaan <i>Information on Company Websites</i>	156	Target Tahun 2024 <i>Targets for 2024</i>	201
Transparansi Penyampaian Laporan <i>Transparency of Report Submission</i>	157	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan <i>Material Information and Facts That Happened After The Accountant's Report Date</i>	202
Peristiwa Penting 2023 <i>Important Events in 2023</i>	158	Uraian Tentang Prospek Usaha Perusahaan <i>Description of The Company's Business Prospects</i>	204
Analisis dan Diskusi Manajemen <i>Management Analysis and Discussion</i>		Uraian Tentang Aspek Pemasaran <i>Description of Marketing Aspect</i>	206
		Kebijakan dan Pembayaran Dividen <i>Dividend Policy and Payment</i>	208
Gambaran Umum <i>Overview</i>	164	Tingkat Kesehatan Perusahaan <i>Company Health Level</i>	209
Gambaran Kinerja Perseroan Dibandingkan Industri Global <i>Company Performance Overview Compared to Global Industry</i>	166	Pembelian Kembali Saham Perusahaan <i>Company Share Buyback</i>	211
Kinerja Operasi Per Segmen Usaha <i>Operational Performance Per Business Segment</i>	168	Informasi Material Terkait Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, atau Restrukturisasi Hutang/Modal <i>Material Information Related to Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, or Debt/Capital Restructuring</i>	212
Uraian atas Kinerja Keuangan Perusahaan <i>Description of The Company's Financial Performance</i>	178	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Afiliasi <i>Material Transaction Information That Contains Conflict of Interest and/or Affiliated Transaction</i>	214
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian <i>Consolidated Statement of Comprehensive Income</i>	181	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perseroan <i>Changes in Legislation That Has Significant Influence on The Company</i>	215
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian <i>Consolidated Statements of Financial Position</i>	183	Perubahan Kebijakan Akuntansi <i>Changes in Accounting Policies</i>	216
Laporan Arus Kas Konsolidasian <i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>	186	Kelangsungan Usaha <i>Business Continuity</i>	218
Kemampuan Membayar Utang <i>Ability to Pay Debt</i>	188		
Tingkat Kolektibilitas Piutang <i>Receivables Collectibility</i>	189		
Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal <i>Capital Structure and Capital Structure Policy</i>	190		
Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal <i>Material Commitment for Investments in Capital Goods</i>	191		



Informasi Keuangan yang Telah Dilaporkan yang
Mengandung Kejadian yang Sifatnya Luar Biasa dan
Jarang Terjadi

220

*Financial Information Which Has Been Reported
Contains Extraordinary and Rare Events*

Profitabilitas
Profitability

221

Informasi Mengenai Perpajakan
Information Regarding Taxation

222

Investasi
Investment

224

Proyek Pengembangan dan/atau Kerja Sama Korporasi
Development Project and/or Corporate Cooperation

226

Tata Kelola Perusahaan

Company Profile



Pendahuluan
Preliminary

241

Capaian Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Tahun 2023
*Good Corporate Governance Assessment
Achievements in 2023*

243

Jejak Langkah Implementasi Tata Kelola Perusahaan
Milestones of Corporate Governance Implementation

248

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
*Objectives of Implementing Good Corporate
Governance*

250

Implementasi Good Corporate Governance
Good Corporate Governance Implementation

251

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure

252

Dasar Penerapan Good Corporate Governance
Good Corporate Governance Implementation Basis

256

Prinsip Dasar Tata Kelola Perusahaan
Basic Principles of Corporate Governance

257

Internalisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Internalization of Good Corporate Governance

259

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

260

Uraian Tentang Dewan Komisaris
Description on Board of Commissioners

264

Uraian Tentang Direksi
Description on Board of Directors

288

Hubungan Afiliasi Antara Anggota Dewan Komisaris,
Direksi, dan Pemegang Saham Utama, dan/atau
Pengendali

308

*Affiliation Between Members of The Board of
Commissioners, The Board of Directors, and Major and/
or Controlling Shareholders*

Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Dewan
Komisaris dan Direksi

309

*Nomination and Remuneration Policy for the Board of
Commissioners and Board of Directors*

Komite Audit

318

Audit Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi

324

Nomination and Remuneration Committee

Komite Manajemen Risiko

328

Risk Management Committee

Uraian Tentang Sekretaris Perusahaan

329

Description on Corporate Secretary

Uraian Tentang Audit Internal

333

Description on Internal Audit

Manajemen Risiko

345

Risk Management

Pengadaan Barang dan Jasa

362

Procurement of Goods and Services

Akuntan Perseroan

366

Corporate Accountant

Kebijakan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Kreditur

368

Policy on Fulfillment of Creditor's Rights

Bahasan Mengenai Kode Etik

370

Discussion on Code of Conduct

Independensi, Benturan Kepentingan, dan
Pengungkapan Hubungan Afiliasi

377

*Independency, Conflict of Interest, and Disclosure of
Affiliation*

Pencegahan Transaksi Orang Dalam

379

Insider Trading Prevention



Pengendalian Gratifikasi <i>Gratification Control</i>	380
Sistem Manajemen Anti Penyuapan <i>Anti-Bribery Management System</i>	382
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) <i>Management of State Administrators Wealth Reports</i>	385
Pengungkapan Mengenai <i>Whistle-Blowing System</i> <i>Disclosure of Whistle-Blowing System</i>	387
Perkara Penting yang Sedang Dihadapi <i>Important Matters That are Being Faced</i>	397

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan <i>Social and Environmental Responsibility</i>	400
Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia (HAM) <i>Social Responsibility Related to Human Rights</i>	411
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Praktik Operasi yang Adil <i>Corporate Social Responsibility Related to Fair Operating Practices</i>	412
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup <i>Corporate Social Responsibility Related to The Environment</i>	413
Tanggung Jawab Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) <i>Responsibility for Employment, Occupational Health and Safety</i>	414
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen <i>Corporate Social Responsibility to Consumers</i>	417
Tanggung Jawab Sosial Terhadap Sosial dan Masyarakat <i>Social Responsibility to Social and Community</i>	420

Laporan Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Statements



Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan <i>Statement of Responsibility for Annual Report</i>	422
Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal & Entitas Anak <i>Statement of Directors regarding Responsibility for Risk Management and Internal Control & Subsidiaries</i>	

IKHTISAR KEUANGAN PENTING

Summary of Key Financial Information



Potret Kinerja Lima Tahun

Five Year Performance Portrait

Pendapatan

Sales

CAGR
4,96%

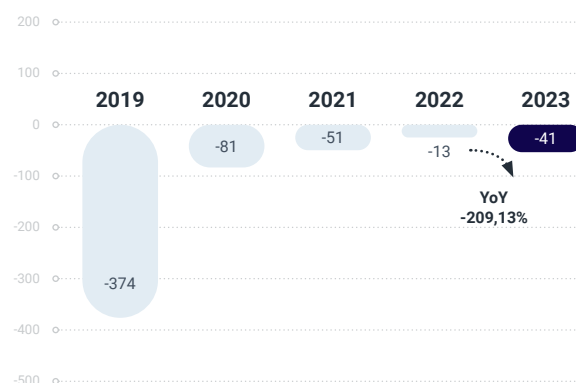
Dalam Miliar Rupiah
In Billion Rupiah



Earning Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization

CAGR
-35,65%

Dalam Miliar Rupiah
In Billion Rupiah

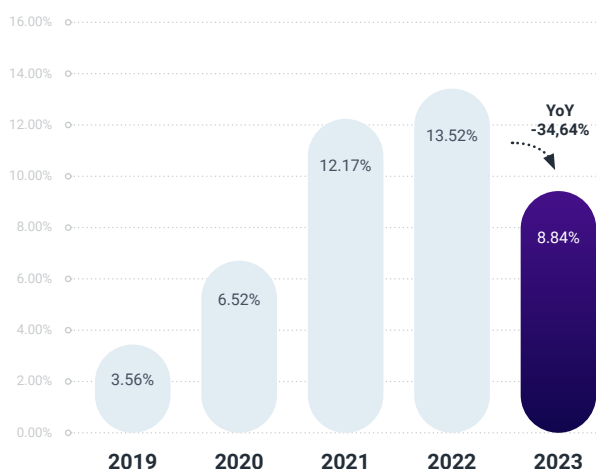


Gross Profit Margin

Gross Profit Margin

CAGR
19,91%

Dalam Miliar Rupiah
In Billion Rupiah

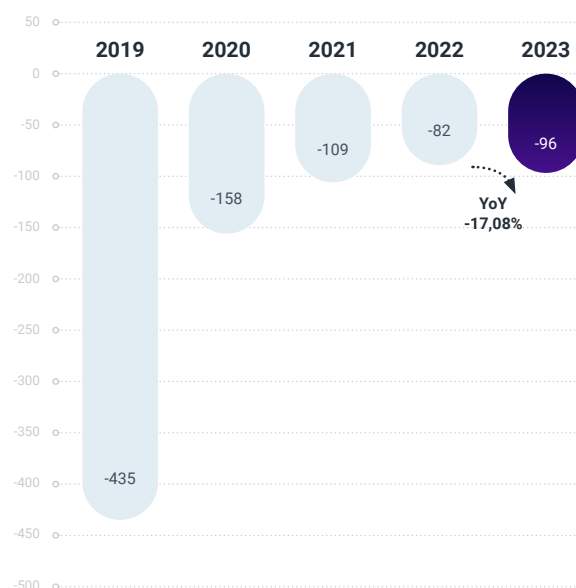


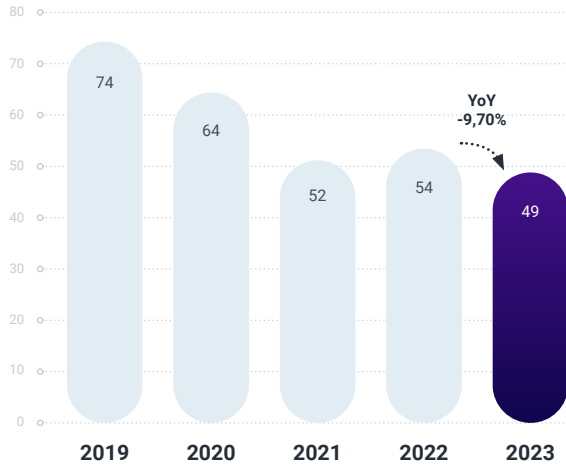
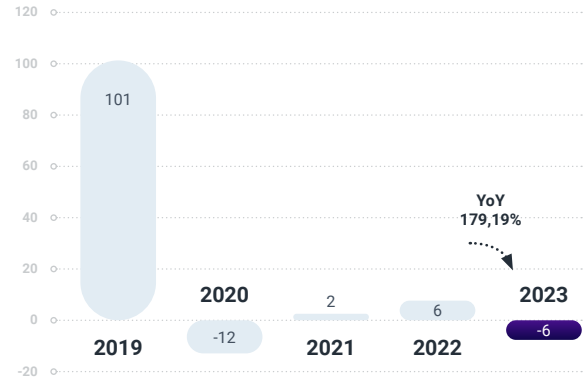
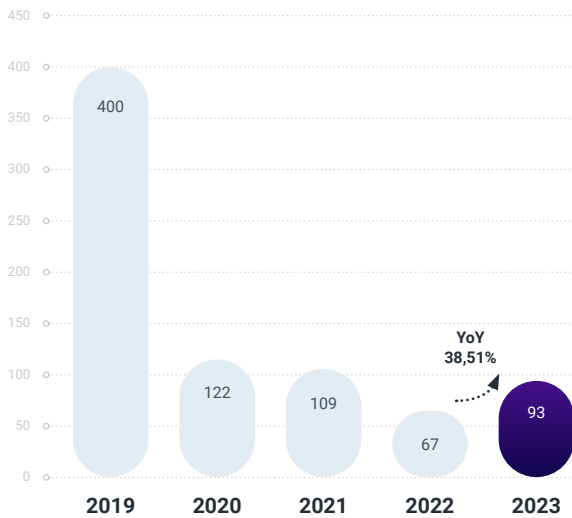
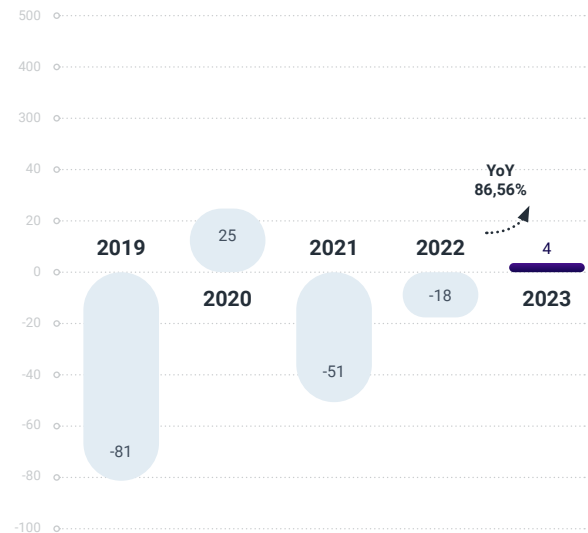
Lab (Rugi) Tahun Berjalan

Net Income (Loss) for The Year

CAGR
-26,03%

Dalam Miliar Rupiah
In Billion Rupiah



Beban Pendanaan*Finance Expenses***CAGR**
-8,01%Dalam Miliar Rupiah
In Billion Rupiah**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan***Cash Flows from Financing Activities***CAGR**
-157,52%Dalam Miliar Rupiah
In Billion Rupiah**Beban Usaha***Operating Expenses***CAGR**
-25,35%Dalam Miliar Rupiah
In Billion Rupiah**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional***Cash Flows from Operating Activities***CAGR**
-154,25%Dalam Miliar Rupiah
In Billion Rupiah

Keterangan <i>Description</i>	2019	2020	2021	2022	2023	YoY	CAGR
Total Aset <i>Total Assets</i>	1,385,182	1,236,627	1,204,755	1,184,268	1,257,834	6.21%	-1.91%
Aset Lancar <i>Current Assets</i>	473,548	328,568	300,159	281,623	352,945	25.33%	-5.71%
Aset Tidak Lancar <i>Non Current Assets</i>	911,635	908,059	904,596	902,644	904,889	0.25%	-0.15%
Total Liabilitas <i>Total Liabilities</i>	1,653,820	1,686,104	1,743,754	1,809,770	1,974,397	9.10%	3.61%
Liabilitas Jangka Pendek <i>Current Liabilities</i>	796,712	627,795	684,251	702,921	818,183	16.40%	0.53%
Liabilitas Jangka Panjang <i>Non-Current Liabilities</i>	857,108	1,058,309	1,059,503	1,106,849	1,156,214	4.46%	6.17%
Ekuitas <i>Equity</i>	-268,637	-449,477	-538,999	-625,502	-716,563	-14.56%	21.68%
Pendapatan <i>Revenues</i>	395,378	427,247	371,731	309,029	503,680	62.99%	4.96%
Beban Pokok Penjualan <i>Cost of Revenues</i>	381,287	399,379	326,497	267,248	459,172	71.82%	3.79%
Laba Kotor <i>Gross Profit</i>	14,091	27,868	45,234	41,781	44,508	6.52%	25.86%
Beban Usaha <i>Operating Expense</i>	400,338	121,637	108,582	66,986	92,783	38.51%	-25.35%
Earning Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization (EBITDA) <i>Earning Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization (EBITDA)</i>	-373,911	-81,082	-50,538	-13,346	-41,257	-209.13%	-35.65%
Laba Sebelum Pajak <i>Loss Before Tax</i>	-460,444	-157,339	-115,421	-79,317	-97,138	-22.47%	-26.74%
Laba Tahun Berjalan <i>Net Income (Loss) for The Year</i>	-434,765	-158,434	-109,424	-82,234	-96,280	-17.08%	-26.03%

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional*Cash Flows from Operating Activities*

-81,052	25,251	-51,333	-17,675	3,807	121.54%	-154.25%

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi*Cash Flows from Investing Activities*

2,385	-428	-1,248	-206	-142	30.89%	-156.91%

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan*Cash Flows from Financing Activities*

101,345	-11,523	2,430	7,783	-6,383	-182.01%	-157.52%

Penambahan (Pengurangan) Kas*Increase (Decrease) in Cash on Hand and In Banks*

22,678	13,300	-50,152	-10,099	-2,718	73.09%	-165.42%

Margin Laba Kotor (%)*Gross Profit Margin (%)*

3.56%	6.52%	12.17%	13.52%	8.84%	-34.64%	19.91%

Margin Laba Bersih (%)*Net Income Margin (%)*

-109.96%	-37.08%	-29.44%	-26.61%	-19.12%	28.17%	-29.53%

EBITDA Margin (%)*EBITDA Margin (%)*

-94.57%	-18.98%	-13.60%	-4.32%	-8.19%	-89.67%	-38.69%

Laba (Rugi) Bersih Terhadap Ekuitas (%)*Net Profit (Loss) to Equity (%)*

161.84%	35.25%	20.30%	13.15%	13.44%	2.20%	-39.21%

Laba (Rugi) Bersih Terhadap Aset (%)*Net Profit (Loss) to Assets (%)*

-31.39%	-12.81%	-9.08%	-6.94%	-7.65%	-10.23%	-24.59%

Rasio Lancar (%)*Current Ratio (%)*

59.44%	52.34%	43.87%	40.06%	43.14%	7.67%	-6.21%

Liabilitas Terhadap Ekuitas (%)*Liabilities to Equity (%)*

-615.63%	-375.13%	-323.52%	-289.33%	-275.54%	4.77%	-14.85%

Liabilitas Terhadap Aset (%)*Liabilities to Assets (%)*

119.39%	136.35%	144.74%	152.82%	156.97%	2.72%	5.62%



Informasi Saham & Obligasi

Stock and Bond Information

Informasi Saham

Stock Information

Perseroan **100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia** dan hingga akhir tahun 2023, tidak mendaftarkan diri di Bursa Efek, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

The Company is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia and until the end of 2023, it is not listed on the Stock Exchange, either in Indonesia or abroad.

Informasi Obligasi

Bond Information

Perseroan hingga akhir tahun 2023 tidak menerbitkan obligasi di Bursa Efek manapun, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri.

The Company until the end of 2023 did not issue bonds on any Stock Exchange, both in Indonesia and abroad.



LAPORAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Board of Commissioners & Directors Report



Laporan Dewan Komisaris

The Board of Commissioners' Report

Yth. Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Dear Stakeholders of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk Tahun Buku 2022

Annual General Meeting of Shareholders (RUPS) for Fiscal Year 2022

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Pengganti Warda Sungkar Alurmei, S.H. Nomor 322 tertanggal 30 Desember 1974 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Muhammad Hanafi, SH Nomor 41 tertanggal 20 Oktober 2020, pelaksanaan RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2022 diselenggarakan pada 11 April 2023, dengan keputusan antara lain:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022 serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir, Abadi, Jusuf, Mawar dan Rekan;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil Tahun Buku 2022;

Based on the Articles of Association of the PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) outlined in Substitute Notarial Deed of Warda Sungkar Alurmei, S.H. Number 322 dated December 30, 1974 which has been amended several times, most recently by notary deed of Muhammad Hanafi, S.H. Number 41 dated October 20, 2020, the implementation of the Annual GMS for Fiscal Year 2022 held on 11 April 2023, with the following decisions:

1. *Approved the Company's Annual Report for Fiscal Year 2022 including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2022 as well as ratified the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2022 which had been audited by the Public Accounting Firm Amir, Abadi, Jusuf, Mawar and Rekan;*
2. *Ratify the Financial Report for the Micro and Small Business Funding Program for the 2022 Fiscal Year;*

3. Tidak ada penetapan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan karena Perseroan mengalami Rugi Bersih Perseroan Tahun Buku 2022;
4. Penetapan tentang Gaji atau Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2022;
5. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil Tahun Buku 2023.

3. There was no determination on the use of the Company's Consolidated Net Profit because the Company had Net Loss for Fiscal Year 2022;
4. Determination of Salaries or Honorarium, Benefits, and Facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for 2022;
5. Appoint Public Accounting Firm that will audit the Consolidated Financial Statements and Financial Statements of the Partnership and Community Development Program (PKBL) for Fiscal Year 2023.

Mekanisme Pengawasan dan Penasihatian Dewan Komisaris atas Direksi Tahun 2023

Board of Commissioners Supervision and Advisory Mechanism for the Board of Directors in 2023

Pengawasan terhadap implementasi strategi Direksi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, laporan pengawasan yang dilakukan Komite di bawah Dewan Komisaris, serta kegiatan-kegiatan Dewan Komisaris lainnya melalui kunjungan kerja atau pertemuan dengan organ-organ pengelola lainnya yang dilakukan secara fisik maupun virtual.

Supervision of the implementation of the Board of Directors' strategy is carried out through meetings at Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors, monitoring reports carried out by Committees under the Board of Commissioners, as well as other activities of the Board of Commissioners through work visits or meetings with other organs which are carried out physically and virtual.

Sampai dengan akhir tahun buku 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat seperti:

Until the end of the 2023 financial year, the Board of Commissioners has carried out supervisory and advisory activities such as:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan peraturan perundang-undangan, terutama dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Meneliti dan menelaah RKAP yang disusun oleh Direksi, kemudian menyampaikan Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP tersebut serta memberikan pendapat dan saran pada RUPS.
3. Meneliti dan menelaah laporan berkala (bulanan, triwulanan) dan laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi. Laporan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik disampaikan pada RUPS, disertai Tanggapan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga memberikan penjelasan, pendapat dan saran pada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
4. Memantau dan memastikan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diterapkan secara efektif dan berkelanjutan di dalam Perseroan, serta memperhatikan dan mengadakan perbaikan sesuai

1. Provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company in accordance with the Company's Long Term Plan and the Company's Work Plan and Budget, as well as the provisions of the Articles of Association and Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) and laws and regulations, especially in Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors.
2. Research and review the Company's Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, then Responses the Company's Work Plan and Budget as well as provide opinions and recommendations at the GMS.
3. Research and review periodic reports (monthly, quarterly) and annual reports prepared by the Board of Directors. The annual report that has been audited by the Public Accounting Firm is presented at the GMS, accompanied by the Board of Commissioners' response. The Board of Commissioners also provides explanations, opinions and recommendations at the GMS regarding the Annual Report.
4. Monitor and ensure that good corporate governance (*Good Corporate Governance*) is implemented effectively and sustainably within the Company, as well as taking into and make improvements according to recommendations



rekomendasi atas hasil *assessment* penerapan GCG tahun sebelumnya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya operasional Perseroan tahun 2023, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, dalam memberikan berbagai masukan kebijakan kepada Direksi untuk pembenahan dan perbaikan kinerja Perseroan agar tetap bertahan dalam menghadapi kendala modal kerja dan bisnis yang sangat berat. Dewan Komisaris juga terus mendorong Direksi untuk memupuk budaya kekompakan tim dan profesionalisme di lingkungan Perseroan agar dapat terwujud tata kelola perusahaan yang lebih baik di masa mendatang.

Dewan Komisaris juga telah melakukan monitoring tindak lanjut atas hasil temuan baik audit internal (Internal Audit Group/IAG) maupun audit eksternal (Kantor Akuntan Publik/KAP).

Untuk lebih mendapatkan gambaran atas kegiatan usaha Perseroan, Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023 beberapa kali melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pabrik atau proyek, sehingga dapat memberikan arahan dan nasihat yang tepat saat diperlukan.

on the results of the previous year's GCG implementation assessment.

In carrying out the supervisory function of the Company's operations in 2023, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, in providing various policy recommendations to the Board of Directors to repair and improve the Company's performance so that can survive in the face of working capital constraints and very tough business. The Board of Commissioners also continues to encourage the Board of Directors to foster a culture of teamwork and professionalism within the Company so that better corporate governance can be realized in the future.

The Board of Commissioners has also monitored the follow-up on the findings of both internal audits (Internal Audit Group/IAG) and external audits (Public Accountant Firm).

In order to get a better picture of the Company's business activities, the Board of Commissioners throughout 2023 made several visits to factory or project locations, so that they can provide the right direction and advice when needed.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris 2023 Berdasarkan Kinerja Komite Penunjang Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Assessment of the Board of Commissioners 2023 Based on the Performance of the Supporting Committees of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Perseroan melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris baik secara kolegal maupun individu melalui mekanisme mandiri setiap tahunnya berdasarkan atas tingkat pencapaian Perseroan dibandingkan dengan target (*Key Performance Indicator*) yang telah disepakati. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Evaluasi dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris, dengan kriteria antara lain meliputi:

1. Tingkat kehadiran dalam masing-masing rapat internal maupun Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi, serta rapat dengan Komite-Komite Pendukung di bawah Dewan Komisaris.
2. Kontribusi dalam proses pengawasan dan pemberian nasihat terhadap jajaran Manajemen.

The Company evaluates the performance of the Board of Commissioners both collegially and individually through an independent mechanism every year based on the level of achievement of the Company compared to the agreed target (*Key Performance Indicator*). The performance evaluation of the Board of Commissioners is also carried out by considering the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in accordance with the laws and regulations and/or the Articles of Association of the Company.

Evaluation is carried out by each member of the Board of Commissioners, with criteria including:

1. Attendance levels in each of the internal meetings and Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as meetings with the Supporting Committees under the Board of Commissioners.
2. Contribution in the process of monitoring and providing advice to the Management.

Aspek Pengembangan Usaha : Eksplorasi dan Penyelesaian Proyek Strategis

Business Development Aspect: Strategic Project Exploration and Completion

Dewan Komisaris menilai prospek usaha Perseroan di masa mendatang sangat menjanjikan untuk segera dapat mewujudkan visi perusahaan yaitu "Menjadi Perusahaan Industri Telekomunikasi yang Terpercaya dengan Cakupan Luas", dengan kompetensi inti yaitu *system integrator*, *manufacture* dan *digital*. Disamping itu, komposisi penjualan pada kastemer pun akan difokuskan kembali melalui resegmentasi kastemer *Government, Enterprise, Small Medium Enterprise, Retail* dan *Telco*.

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan dan sejalan dengan arahan Kementerian BUMN, PT INTI (Persero) secara bertahap namun konsisten, akan menerapkan budaya AKHLAK.

Untuk mencapai sasaran Perseroan tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui tema "Menjadi perusahaan teknologi terpercaya dengan cakupan industri yang luas" untuk mewujudkan #INTIREborn dengan sasaran fokus pada restrukturisasi bisnis, finansial, capital dan organisasi untuk membentuk kinerja Perusahaan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pengembangan usaha dilakukan dengan pola kerja sama operasi (KSO) maupun *joint venture*. Dewan Komisaris menyarankan agar hasil pengembangan produk harus mendukung recurring business secara market-driven dengan tetap fokus pada pengembangan kompetensi inti (*core competences*).

Prospek usaha yang luas di berbagai sektor usaha Perseroan tersebut agar disertai dengan semakin baiknya pengelolaan risiko sejak masih dalam tahap perencanaan perolehan kontrak hingga tahap penyelesaian proyek. Risiko yang mungkin terjadi sedapat mungkin telah dikenali, dikendalikan, dan bila perlu dimitigasi sehingga kerugian yang mungkin timbul dapat diminimalisir dan/atau diantisipasi.

Dewan Komisaris menyambut baik rencana Perseroan untuk kembali merevitalisasi fasilitas manufaktur yang dimiliki, sehingga visi Perseroan sebagai penyedia perangkat cerdas digital dapat segera terwujud dan PT INTI (Persero) dapat kembali berperan sebagai penggerak utama bangkitnya industri dalam negeri dan dapat mengembalikan jati dirinya sebagai perusahaan industri manufaktur bidang telekomunikasi.

Terbangunnya kembali fasilitas manufaktur juga akan memastikan tercapainya target perolehan pendapatan pada tahun 2023 khususnya yang bersifat recurring untuk menutup biaya-biaya Perusahaan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris menyarankan agar revitalisasi tersebut dilaksanakan sesuai

The Board of Commissioners considers that the Company's business prospects in the future are very promising to immediately realize the company's vision "To be the Trusted Quality Company with Wide Industry Reach", with core competencies namely system integrator, manufacture and digital. Besides that, the composition of sales to customers will also be refocused through re-segmentation the customer become Government, Enterprise, Small Medium Enterprise, Retail and Telco.

To support the success of achieving company goals and in line with the direction of the Ministry of SOE, PT INTI (Persero) will gradually but consistently implement the AKHLAK culture.

To achieve the Company's 2023 target which has been set through "To be the Trusted Quality Company with Wide Industry Reach" theme to Realize #INTIREborn, with the target of focusing on business, financial, capital and organizational restructuring to form better Company performance in the future.

Business development is carried out using a joint operation (KSO) or joint venture pattern. The Board of Commissioners suggest that product development results should support a market-driven while keep focused on developing core competences.

The broad business prospects in various business sectors of the Company should be accompanied by better risk management since it is still in the planning stage of obtaining contracts until the project completion stage. Risks that may occur are identified, controlled and, if necessary, mitigated so the losses that may arise can be minimized and/or anticipated.

The Board of Commissioners welcomes the Company's plan to revitalize its manufacturing facilities, so that the Company's vision as a provider of digital smart devices can be realized soon and PT INTI (Persero) can return play its role as the main driver for the rise of the domestic industry and can restore its identity as a manufacturing industry company in telecommunications sector.

The rebuilding of manufacturing facilities will also ensure the achievement of revenue targets in 2023, especially those that are recurring to cover the Company's fixed costs. Therefore, the Board of Commissioners recommends that the revitalization be carried out according to the planned schedule.



jadwal yang direncanakan.

Merangkum berbagai prospek usaha di atas, dan sebagai pedoman kerja Perseroan di tahun 2023, Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023 yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham pada 7 Februari 2023.

Summarizing the various business prospects above, and as a guideline for the Company's work in 2023, the Board of Commissioners has approved the Work Plan and Corporate Budget for 2023 which were approved by the General Meeting of Shareholders on February 7, 2023.

Penilaian Tata Kelola Perusahaan : Upaya Peningkatan Implementasi Tata Kelola Perusahaan sebagai "On Going Strategy"

Corporate Governance Assessment: Efforts to Improve Corporate Governance Implementation as an "On Going Strategy"

Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di lingkungan Perseroan sepanjang 2023 telah berjalan dengan efektif dan internalisasi atas prinsip-prinsip GCG yang ada telah dilakukan dengan menyeluruh. Hal ini terbukti dengan hasil *self-assessment* GCG di Perseroan yang menunjukkan predikat "Baik".

The Board of Commissioners considers that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) within the Company throughout 2023 has been running effectively and internalization of the existing GCG principles has been thoroughly carried out. This is proven by the results of the GCG self-assessment in the Company which shows a "Good" rating.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang profesional, berkelanjutan, serta sesuai dengan pemenuhan atas prinsip-prinsip GCG, Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan dan memberikan masukan agar pemenuhan prinsip-prinsip GCG terus terjaga. Dewan Komisaris bersama Direksi terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan berdasarkan masukan-masukan hasil *self-assessment* agar penerapan GCG dapat menjadi budaya bagi seluruh insan Perseroan serta berdampak positif dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perseroan.

In order to realize corporate governance that is professional, sustainable, and in accordance with the fulfilment of GCG principles, the Board of Commissioners always supervises and provides recommendations so that the fulfilment of GCG principles is maintained. The Board of Commissioners and the Board of Directors are always committed to making improvements based on the recommendations from the self-assessment results so that the implementation of GCG can become a culture for all Company personnel and have a positive impact in realizing the Company's vision and mission.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023

Company Work Plan and Budget in 2023

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2023 merupakan pedoman bagi Manajemen dan karyawan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023. Dalam menyusun rencana kerja ini tentunya Perseroan tidak terlepas dari rencana Pemerintah, khususnya yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Tahun

The 2023 Corporate Budget Work Plan is a guideline for Management and employees in implementing 2023 activities. In preparing this work plan, of course the Company cannot be separated from the Government's plan, especially those contained in the 2023 Government Work Plan (RKP) which is an annual development planning document prepared as the elaboration of the fourth year of implementation of the 2020–2024 National Medium Term Development Plan (RPJMN). In addition, the preparation of RKP is also carried out in order to fulfil the mandate of Law (UU) Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System (SPPN) and Government Regulation (PP) Number 17 of 2017 concerning Synchronization of the National Development Planning and Budgeting Process. The 2023 Government Work Plan contains annual national policy directions in order to maintain

2023 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Sejalan dengan RJPP, tema RKAP 2023 adalah Menjadi perusahaan teknologi terpercaya dengan cakupan industri yang luas untuk mewujudkan #INTIREborn. Pada tahun ini, Perusahaan masih tetap memfokuskan pada restrukturisasi bisnis, finansial, capital dan organisasi untuk membentuk kinerja Perusahaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dengan tantangan Perusahaan untuk meyakinkan seluruh mitra usaha atas upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan, Perusahaan telah dapat menunjukkan perbaikan kinerja pada beberapa target baik yang terkait dengan bisnis, keuangan, SDM, maupun IT.

sustainable development in a planned and systematic manner that is responsive to change.

In line with the RJPP, the theme of the 2023 RKAP is "To be the Trusted Quality Company with Wide Industry Reach" to Realize #INTIREborn. This year, the Company is still focusing on business and financial restructuring to form the Company's better performance in the future. With the Company's challenge to convince all business partners of the improvement efforts that will be carried out, the Company's has been able to show performance improvements on several targets that related with business, financial, human capital, and IT.

Pandangan atas Prospek 2023

A Look at Prospects for 2023

Dampak pandemi Covid-19 diharapkan mulai mereda tahun 2023. Hal ini akan meningkatkan upaya Perusahaan yang telah menemukan peran Perusahaan dalam perkembangan ekonomi antara lain peningkatan bauran energi baru terbarukan, peningkatan komponen tingkat komponen dalam negeri (TKDN) industri manufaktur, meningkatkan penetrasi *fixed broadband*, penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam rangka transformasi digital, serta peningkatan skor Indonesia dalam *Global Cybersecurity Index*.

Perusahaan mendefinisikan ulang visinya yaitu "Menjadi Perusahaan Industri Telekomunikasi yang Terpercaya dengan Cakupan Luas", sehingga Perusahaan kembali pada kompetensi inti yaitu *system integrator*, *manufacture*, dan *digital*. Di samping itu, komposisi penjualan pada kastemer pun akan difokuskan kembali melalui resegmentasi kastemer *Government*, *Enterprise*, *Small Medium Enterprise*, *Retail* dan *Telco*.

Strategi business as usual tidak mencukupi dalam menyelesaikan permasalahan utang non produktif. Kondisi aset kantor Jalan Moch. Toha Nomor 77 Kota Bandung dan fasilitas produksi Jalan Moch. Toha Nomor 255 Kabupaten Bandung belum seluruhnya terutilisasi secara optimal (masih idle). Oleh karena itu, upaya-upaya optimalisasi asset melalui penyewaan atau kerja sama operasi lahan dan bangunan tetap dilakukan secara simultan, berdasarkan kajian restrukturisasi PT INTI (Persero) dalam opsi kedua yang disusun oleh PT Perusahaan Pengelola Aset, terdapat skenario penjualan aset kantor Jalan Moch. Toha Nomor 77 Kota Bandung dalam rangka penyehatan PT INTI (Persero).

PT INTI (Persero) akan menindaklanjuti rencana skema Penambahan Modal Kerja & Restrukturisasi Utang dalam

The impact of the Covid-19 pandemic is expected to begin to subside in 2023. This will increase the Company's efforts to identify the Company's role in economic development, including increasing the new renewable energy, increasing the domestic component level of the manufacturing industry, increasing fixed broadband penetration, completing information and communication technology (ICT) infrastructure in the context of digital transformation, as well as increasing Indonesia's score in the Global Cybersecurity Index.

The company redefines its vision, namely "To be the Trusted Quality Company with Wide Industry Reach", so that the Company returns to its core competencies, namely system integrator, manufacture and digital. Besides that, the composition of sales to customers will also be refocused through Government, Enterprise, Small Medium Enterprise, Retail and Telco.

The business as usual strategy is not sufficient to resolve non-productive debt problems. Condition of office assets on Jalan Moch. Toha Number 77 Bandung City and production facilities on Jalan Moch. Toha Number 255 Bandung Regency has not been fully utilized optimally (still idle). Therefore, efforts to optimize assets through leasing or joint operation of land and buildings are still carried out simultaneously, based on the restructuring study of PT INTI (Persero) in the second option prepared by PT Perusahaan Pengelola Aset, there is a scenario for the sale of Jalan Moch office assets. Toha Number 77 Bandung City in the context of restructuring PT INTI (Persero).

PT INTI (Persero) will follow up on plans for an Additional Working Capital & Debt Restructuring scheme in the context of



rangka penyehatan Perusahaan, melalui *strategic action* antara lain aset kantor Jalan Moch. Toha Nomor 77 Kota Bandung dengan dampak atau manfaat bagi PT INTI (Persero).

Dewan Komisaris mendukung strategi yang akan dijalankan oleh Direksi pada tahun 2023. Dengan dukungan dari Pemegang Saham dan pihak-pihak terkait lainnya (pemerintah, lembaga keuangan perbankan atau nonperbankan, vendor, dan para pemangku kepentingan lainnya) diharapkan strategi tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana, sehingga target-target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 dapat tercapai.

restructuring the Company, through strategic actions including the Jalan Moch office assets. Toha Number 77 Bandung City with impacts or benefits for PT INTI (Persero).

The Board of Commissioners supports the strategy that will be carried out by the Board of Directors in 2023. With the support of Shareholders and other related parties (government, banking or non-banking financial institutions, vendors, and other stakeholders) it is hoped that this strategy can be implemented according to plan, so that performance targets set in 2023 can be achieved.

Pandangan atas Penerapan *Whistle-Blowing System*

Company Work Plan and Budget in 2023

Whistle-Blowing System (WBS) adalah saluran untuk menerima pelaporan, mengevaluasi, menindaklanjuti dugaan adanya pelanggaran dan/atau kecurangan, atau adanya praktik yang menyimpang dan mengancam kepentingan Perseroan.

Perseroan juga telah menetapkan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor KN.006/2022 tertanggal 16 Maret 2022 tentang Kebijakan WBS yang memuat prosedur kebijakan, pelaksanaan dan pelaporan WBS, jaminan perlindungan bagi Whistle-Blower, tim WBS, dan kerahasiaan. Selain itu, Perseroan telah menyediakan sarana komunikasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan WBS berupa Kotak WBS, email gcg_wbs@inti.co.id, nomor Whatsapp, dan SMS Center. Perusahaan juga telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan telah dibuat sarana pelaporan melalui <https://wbs.inti.co.id/auth/login>.

Pada tahun 2023 tidak terdapat laporan pengaduan melalui saluran WBS terkait adanya dugaan pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh Insan PT INTI (Persero). Dewan Komisaris telah menelaah dan menyimpulkan bahwa nihilnya jumlah pengaduan yang masuk lebih disebabkan oleh tingkat kepatuhan dan kedisiplinan yang tinggi dari karyawan Perseroan dalam menjalankan kode etik kerja yang ditetapkan.

Sebagai kata penutup Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan kepada Direksi dan seluruh Insan INTI yang dengan sigap melakukan adaptasi di tengah tantangan untuk keberlanjutan bisnis PT INTI (Persero) yang lebih baik, walaupun banyak tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Terimakasih atas komitmen dan kerja keras seluruh Insan INTI yang mampu menghasilkan kinerja terbaik pada tahun 2023 ini.

Lembaran baru 2024 sudah di depan mata, mari kita semua tetap fokus untuk Mewujudkan #INTIREborn. Semoga Allah senantiasa memberkahi upaya kita ini.

The Whistle-Blowing System (WBS) is a channel for receiving reports, evaluating, following up on allegations of violations and/or fraud, or practices that deviate and threaten the interests of the Company.

The company has also established a policy for a reporting system for alleged irregularities in the company in the Decree of the Board of Directors Number KN.006/2022 dated March 16, 2022 concerning the WBS Policy. which contains policy procedures, implementation and reporting of the WBS, guarantees of protection for Whistle-Blowers, the WBS team, and confidentiality. In addition, the Company has provided communication facilities to support the implementation of the WBS policy in the form of a WBS Box, email gcg_wbs@inti.co.id, Whatsapp number and SMS Center. The company has also collaborated with the Corruption Eradication Commission, and a reporting facility has been created via <https://wbs.inti.co.id/auth/login>.

In 2023 there are no reports of complaints through the WBS channel regarding alleged violations or fraud committed by PT INTI (Persero) personnel. The Board of Commissioners has reviewed and concluded that the zero number of complaints received was more due to the high level of compliance and discipline of the Company's employees in carrying out the established work code of ethics.

In closing words, the Board of Commissioners expresses appreciation to the Board of Directors and all INTI personnel who swiftly adapt in the midst of challenges for better PT INTI (Persero) business continuity, despite the many challenges and difficulties faced. Thank you for the commitment and hard work of all INTI people who are able to produce the best performance in 2023.

The new chapter of 2024 is in sight, let's all stay focused on making #INTIREborn a reality. May Allah always bless our effort.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor SK-318/MBU/10/2020 tertanggal 08 Oktober 2020, mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Industri Telekomunikasi Indonesia dan Surat Menteri BUMN Nomor SK188/MBU/06/2021 tanggal 4 Juni 2021, susunan Dewan Komisaris PT INTI (Persero) menjadi sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Unggul Priyanto
- Komisaris :
 1. Rahmadi Murwanto
 2. Trisno Hendradi
- Sekretaris Komisaris : Suropto

Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor SK-233/MBU/10/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, susunan Dewan Komisaris PT INTI (Persero) menjadi sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Unggul Priyanto
- Komisaris :
 1. Rahmadi Murwanto
 2. Trisno Hendradi
 3. Yanuar Rokhmad Madyantoro
- Sekretaris Komisaris : Suropto

The composition of the Board of Commissioners of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia is based on the Decree of the State Minister of BUMN Number SK-318/MBU/10/2020 dated 08 October 2020 regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Indonesian Telecommunications Industry Company and the Letter of the Minister of BUMN Number SK 188/MBU/06/2021 dated 4 June 2021, the composition of the Board of Commissioners of PT INTI (Persero) is as follows:

- *President Commissioner : Unggul Priyanto*
- *Commissioner :*
 1. *Rahmadi Murwanto*
 2. *Trisno Hendradi*
- *Commissioner Secretary : Suropto*

Furthermore, based on the Letter of the Minister of SOEs Number SK-233/MBU/10/2022 dated October 21, 2022 concerning Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), the composition of the Board of Commissioners of PT INTI (Persero) is as follows:

- *President Commissioner : Unggul Priyanto*
- *Commissioner :*
 1. *Rahmadi Murwanto*
 2. *Trisno Hendradi*
 3. *Yanuar Rokhmad Madyantoro*
- *Commissioner Secretary : Suropto*



Laporan Direksi

Board of Director's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan seluruh Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Pertama-tama atas nama Direksi Perseroan, izinkan saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia dapat melalui tahun 2023 dengan sangat baik. Periode tahun 2023 bagi PT INTI (Persero) dapat terbilang cukup berat dengan adanya gugatan hukum dan tantangan lainnya.

Dedikasi, semangat, dan loyalitas yang ditunjukkan oleh seluruh insan Perseroan mempunyai peran yang besar dalam mendukung pencapaian Perseroan, di mana hal tersebut patut diberikan apresiasi tersendiri.

Selain itu apresiasi lainnya tentu saja atas dukungan dari berbagai pihak stakeholder karena kepercayaannya terhadap potensi Perseroan sehingga catatan kinerja yang cemerlang pada tahun 2023 dapat terealisasi.

Perseroan juga ingin menyampaikan bahwa sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun 2023 yang lebih baik dari tahun sebelumnya, menjadi landasan Perseroan untuk dapat meningkatkan lagi kinerja pada tahun 2024, di antaranya melalui upaya penjualan yang bersifat *recurring, product genuine* PT INTI (Persero) yang memiliki margin tinggi terutama untuk menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dear Shareholders, Board of Commissioners, and all Stakeholders,

First of all, on behalf of the Company's Directors, allow me to express my praise and gratitude to God Almighty, because of His mercy and grace, the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia can go through 2023 very well. The 2023 period for PT INTI (Persero) can be said to be quite tough with legal lawsuits and other challenges.

The dedication, passion and loyalty shown by all Company personnel play a major role in supporting the Company's achievements, which deserves special appreciation.

In addition, other appreciation is of course for the support from various stakeholders because of their trust in the Company's potential, so that a brilliant performance record in 2023 can be realized.

The Company also wishes to convey that in connection with achieving better performance in 2023 than the previous year, this is the basis for the Company to be able to improve its performance again in 2024, including through recurring sales efforts, PT INTI (Persero)'s genuine products which have high margins. especially to absorb the State Revenue and Expenditure Budget and/or Regional Revenue and Expenditure Budget.

Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Selain itu, Perseroan pun terus mengupayakan kontrak yang bersifat multiyears sehingga menjadi bekal *carry over* yang cukup di tahun mendatang, pemanfaatan Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk penguatan *supply chain*, serta membangun kembali kompetensi *manufacturing* dalam rangka mendukung proses produksi produk-produk hasil inovasi atau *genuine products*.

Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan pun menjalankan misi untuk membangun dan meningkatkan kerja sama strategis dengan prinsipal atau pemilik teknologi dalam rangka membangun kompetensi, restrukturisasi bisnis, membangun dan meningkatkan kerja sama strategis dengan pemilik teknologi ataupun lembaga penelitian dasar dan terapan, serta institusi pendidikan dalam rangka membangun sinergi inovasi untuk menghasilkan produk-produk hasil rekayasa dalam negeri, *redefine* visi, misi dan arah pengembangan jangka panjang, serta optimalisasi aset.

Apart from that, the Company continues to strive for multiyear contracts so that it provides sufficient carry over provisions for the coming year, utilizing State-Owned Enterprises (BUMN) Synergy to strengthen the supply chain, as well as rebuilding manufacturing competencies in order to support the production process of manufactured products. innovation or genuine products.

In line with this, the Company also carries out a mission to build and improve strategic cooperation with principals or technology owners in order to build competence, business restructuring, build and improve strategic cooperation with technology owners or basic and applied research institutions, as well as educational institutions in the context of building innovation synergies to produce domestically engineered products, redefining the vision, mission and long-term development direction, as well as optimizing assets.

Tinjauan Makro Ekonomi Tahun 2023

Macroeconomic Overview in 2023

Pada tahun 2023 kinerja ekonomi global melambat dan ketidakpastian tetap tinggi. disertai dengan berlanjutnya tekanan inflasi karena harga energi dan pangan dunia, serta keketatan pasar tenaga kerja di sejumlah negara maju.

Hal ini dipengaruhi faktor-faktor adanya peningkatan permintaan masyarakat yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan karena kegiatan produksi belum sepenuhnya pulih semenjak berakhirnya pandemi. Di samping itu, *El Nino* yang berkepanjangan telah menyebabkan naiknya harga komoditas pangan global. Selanjutnya, meningkatnya ketegangan geopolitik di berbagai wilayah dunia telah menyebabkan fragmentasi ekonomi yang berdampak pada gangguan rantai pasok global. Hal ini membatasi arus perdagangan dan investasi serta menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak negatif pada kinerja ekonomi global.

Sementara itu, di tengah meningkatnya risiko dan perlambatan ekonomi global, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga, dan pemulihan berlanjut meskipun pada saat bersamaan dinamika global berubah cepat dan memburuk. Penerimaan dan pengeluaran negara, pertumbuhan ekonomi, serta sektor moneter dan perbankan menjadi sorotan utama. Stabilitas nilai tukar Rupiah pun tetap terjaga dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia, di tengah kuatnya dolar AS.

Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BI) selama tahun 2023 berfokus pada menjaga stabilitas dan mendukung

In 2023 global economic performance slows and uncertainty remains high. accompanied by continued inflationary pressures due to world energy and food prices, as well as tight labor markets in a number of developed countries.

This is influenced by factors such as an increase in public demand which is not balanced by the availability of supply because production activities have not fully recovered since the end of the pandemic. Apart from that, the prolonged El Nino has caused global food commodity prices to rise. Furthermore, increasing geopolitical tensions in various regions of the world have caused economic fragmentation which has resulted in disruption of global supply chains. This limits trade and investment flows and reduces economic growth prospects, thereby having a negative impact on global economic performance.

Meanwhile, in the midst of increasing risks and a global economic slowdown, Indonesia's economic stability remains maintained, and recovery continues even though at the same time global dynamics are changing rapidly and deteriorating. State revenues and expenditures, economic growth, and the monetary and banking sectors are the main focus. The stability of the Rupiah exchange rate was maintained by the stabilization policy adopted by Bank Indonesia, amidst the strong US dollar.

Bank Indonesia (BI)'s policy mix during 2023 focuses on maintaining stability and supporting sustainable growth, in



pertumbuhan berkelanjutan, bersinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan dan strategi yang diambil Pemerintah dapat menjaga ketahanan ekonomi dari risiko global tersebut dan terus mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional tahun 2023. Hal tersebut dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), di mana Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%.

Sejalan dengan perekonomian nasional yang bertumbuh kuat, Perseroan pun mencatatkan perbaikan kinerja pada tahun 2023 dengan mencatatkan *overachievement* terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023, setelah gencar menjalankan program strategis transformasi total. Transformasi menyeluruh ini merupakan upaya Perseroan untuk membangkitkan kembali kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

close synergy with the national economic policy mix. The policies and strategies taken by the Government can maintain economic resilience from global risks and continue to support the sustainability of national economic recovery in 2023. This can be seen from data from the Central Statistics Agency, where BPS recorded that the Indonesian economy in 2023 grew by 5.05%.

In line with the strong growth of the national economy, the Company also recorded improved performance in 2023 by recording overachievement of the 2023 Company Work Plan and Budget, after intensively implementing a total transformation strategic program. This comprehensive transformation is the Company's effort to revive the trust of all stakeholders.

Analisis atas Kinerja Perusahaan

Analysis of Company Performance

Strategi dan Kebijakan Strategis

Berbagai upaya telah dan akan diambil oleh Manajemen untuk terus mengatasi masalah-masalah yang ada di Perseroan. Manajemen berkeyakinan bahwa dengan upaya-upaya yang tengah dilakukan, Perseroan akan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan tentunya, proses penyehatan tersebut tidak terlepas dari upaya maksimal jajaran Direksi dan seluruh insan Perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan. Seluruh insan Perseroan, termasuk dari entitas anak, telah dan akan terus berperan aktif dalam merealisasikan pencapaian kinerja Perseroan secara konsolidasian.

Strategi yang telah dilaksanakan di antaranya:

1. Strategi peningkatan kontribusi pendapatan dari recurring business dengan didominasi oleh proyek *Maintenance*, *Tower Power*, dan *Seat Management*.
2. Produksi produk *genuine* PT INTI (Persero) yang salah satunya adalah perangkat *Set Top Box* (STB) DVBT2 yang memiliki margin tinggi, terutama untuk menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melalui *e-Catalog*.
3. Strategi pengembangan *new revenue stream* dan model bisnis baru, contohnya pada produk STB DVBT2, dan *Low Cost Vessel Monitoring System* (LCVMS).
4. Strategi pengembangan model pendanaan baru, di

Strategy and Strategic Policy

Various efforts have been and will be taken by the Management to continue to overcome the problems that exist in the Company. Management believes that with the ongoing efforts, the Company will be able to maintain its business continuity. And of course, the restructuring process is inseparable from the maximum efforts of the Board of Directors and all employees of the Company in carrying out their mandated duties and responsibilities. All of the Company's personnel, including from subsidiaries, have and will continue to play an active role in realizing the Company's performance achievements on a consolidated basis.

The strategies that have been implemented include:

1. *The strategy to increase revenue contribution from the recurring business is dominated by the Maintenance project, Tower Power, and Seat Management.*
2. *Production of genuine PT INTI (Persero) products, one of which is the DVBT2 Set Top Box (STB) device which has high margins, especially to absorb the State Revenue and Expenditure Budget or Regional Revenue and Expenditure Budget, including through e-Catalog.*
3. *Strategy for developing new revenue streams and new business models, for example in STB DVBT2 and Low Cost Vessel Monitoring System (LCVMS) products.*
4. *Strategy development of new funding models, including*

antaranya berupa *Equity and Loan Financing* pada anak perusahaan untuk pendanaan dengan bentuk kontrak yang sesuai.

new forms of Equity and Loan Financing to subsidiaries for funding in the form of appropriate contracts.

5. Strategi investasi dengan memprioritaskan pengembalian yg cepat dan *cost of capital* rendah, direalisasikan dengan skema *Build-Operation-Transfer* (BOT) untuk revitalisasi pabrik
6. Strategi Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digunakan untuk meningkatkan penciptaan nilai, dicapai menggunakan model sinergi strategis. Misalnya, model sinergi maupun model transaksional seperti konsep sinergi dengan Telkom Group, PT Angkasa Pura II (Persero), PT Pelindo III (Persero), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
7. Strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kepemimpinan, engineering, manajemen proyek, dan *account management*, dengan realisasi pencapaian.
8. Strategi *cost behaviour* untuk efisiensi terutama dalam kontributor utama beban pokok penjualan.
9. Strategi penyelesaian hutang non-produktif, khususnya dengan perbankan, telah terealisasi melalui restrukturisasi utang Perseroan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan periode restrukturisasi selama 10 tahun. Adapun dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, telah dilakukan *reprofiling* selama 1 tahun, dan akan dilanjutkan restrukturisasi utang selama 10 tahun, sebagaimana skema dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
10. Perseroan telah melakukan kerja sama dengan konsultan PT Perusahaan Pengelola Aset dalam menyusun kajian restrukturisasi Perseroan yang terdiri dari restrukturisasi bisnis, restrukturisasi utang dan optimalisasi asset.

5. *Investment strategy by prioritizing fast returns and low cost of capital, realized with the Build-Operation-Transfer (BOT) scheme for factory revitalization*
6. *The Synergy Strategy of State-Owned Enterprises (SOEs) which is used to increase value creation, is achieved using a strategic synergy model. For example, the synergy model and transactional model such as the concept of synergy with the Telkom Group, PT Angkasa Pura II (Persero), PT Pelindo III (Persero), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*
7. *Human resources development strategy in the fields of leadership, engineering, project management, and account management, with the realization of achievements.*
8. *Cost behavior strategy for efficiency, especially in the main contributor to the cost of goods sold.*
9. *The strategy to settle non-earning debts, particularly with banks, has been realized through the restructuring of the Company's debt to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, with a restructuring period of 10 years. As for PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, reprofiling has been carried out for 1 year, and will continue debt restructuring for 10 years, as the scheme with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*
10. *The Company has collaborated with consultant PT Perusahaan Pengelola Aset in compiling a study on the restructuring of the Company which consists of business restructuring, debt restructuring and asset optimization.*

Kebijakan Strategis

Kebijakan strategi restrukturisasi bisnis meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu:

1. Aspek Pemasaran

Melakukan pengembangan portofolio pasar dan produk pada bisnis eksisting maupun bisnis baru, dan inovasi pemasaran untuk membangun image sebagai *innovation leading company*. Penciptaan pasar baru, dan memanfaatkan Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

2. Aspek Produk

Membangun kembali kompetensi manufacturing untuk mengembangkan produk-produk yang inovatif atau

Strategic Policy

The business restructuring strategy policy covers 3 (three) main aspects, namely:

1. Marketing Aspect

Developing market and product portfolios in existing and new businesses, and marketing innovations to build an image as an innovation leading company. Creation of new markets, and utilizing the Synergy of State-Owned Enterprises (BUMN).

2. Product Aspect

Develop innovative products, have high reliability and fast time to market without breaking away from the company's

genuine products yang memiliki keahlian tinggi, dan *time to market* yang cepat.

3. Teknik dan Teknologi

Membangun dan meningkatkan kerja sama strategis dengan principal atau pemilik teknologi dalam rangka membangun teknologi, dan juga pembangunan *knowledge management system* dengan berbasis pada online database.

Landasan aspek efisiensi dan optimalisasi, aspek finansial dan aspek sumber daya manusia sebagai berikut:

1. Aspek Efisiensi dan Optimalisasi

Efisiensi sumber daya dan optimalisasi semua sumber daya yang ada untuk kelangsungan hidup perusahaan.

2. Restrukturisasi Finansial

Dilakukan dengan program efisiensi keuangan, Penyelesaian hutang non produktif, percepatan perputaran modal kerja proyek, perbaikan struktur permodalan, menjaga aliran kas baik dari sisi perputaran payable maupun *receivable*, inovasi sumber pendanaan baru, serta pengendalian risiko keuangan secara konsisten.

3. Transformasi Sumber Daya Manusia

Penguatan kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja), membangun kesadaran akan manfaat dan risiko bisnis, serta budaya perusahaan. Strategi lain dari perusahaan untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan melalui inovasi cerdas bagi peningkatan kehidupan yang lebih baik adalah dengan melakukan *parenting strategy*. *Parenting strategy* dikembangkan Perseroan untuk memberdayakan secara optimal sumber daya dan kapabilitas perusahaan bagi pembangunan nilai setiap lini bisnis Perseroan dan sekaligus pula menghasilkan sinergi di antara berbagai lini bisnis tersebut. Strategi ini fokus pada kompetensi inti perusahaan induk (*parent corporation*) dan pada nilai yang diciptakan melalui hubungan antara induk dan unit-unit bisnisnya. Langkah-langkah strategis untuk mendukung transformasi sumber daya manusia antara lain menguatkan kompetensi serta budaya berbagi pengetahuan di antara karyawan melalui sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management system*).

Perusahaan menelaah dan menentukan *turnaround strategy* sejalan dengan Rencana Jangka Panjang yang telah dibuat, dengan mengedepankan *business restructuring*, *organization enablement* dan *company restructuring*, sebagai berikut:

competence in the field of telecommunications and electronics.

3. Engineering and Technology

Building and enhancing strategic partnerships with principals or technology owners in order to build technology, as well as building a knowledge management system based on an online database.

The basis for efficiency and optimization aspects, financial aspects and human resources aspects are as follows:

1. Aspects of Efficiency and Optimization

Resource efficiency and optimization of all available resources for the survival of the company.

2. Financial Restructuring

It is carried out through financial efficiency programs, accelerating project working capital turnover, improving capital structure, maintaining cash flow both in terms of payable and receivable turnover, innovating new funding sources, and controlling financial risk consistently.

3. Transformation of Human Resources

Strengthening competencies (knowledge, skills, and work attitudes), building awareness of the benefits and risks of business, as well as corporate culture. Another strategy from the company to realize sustainable growth through smart innovation for improving a better life is to carry out a parenting strategy. The parenting strategy was developed by the Company to optimally empower the company's resources and capabilities for the value development of each of the Company's business lines and at the same time generate synergies between the various business lines. This strategy focuses on the parent corporation's core competencies and on the value created through the relationships between the parent and its business units. Strategic steps to support the transformation of human resources include strengthening competence and a culture of sharing knowledge among employees through a knowledge management system.

The company reviews and determines the turnaround strategy in line with the Long Term Plan that has been made, by prioritizing business restructuring, organization enablement and company restructuring, as follows:



Perbandingan Antara Hasil yang Dicapai Dengan yang Ditargetkan (Kinerja Perseroan)

Comparison Between Achieved and Targeted Results (Company Performance)

Di tengah gejolak ekonomi global tahun 2023 yang penuh dengan tantangan yang cukup besar dan kondisi sosial ekonomi yang tidak stabil, perbaikan kinerja Perseroan terus berlanjut. Perusahaan senantiasa berusaha mencapai target kinerja berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Pada tahun 2023 PT INTI (Persero) mencatat Rugi Komprehensif sebesar Rp 96,56 miliar atau 103,60% terhadap RKAP tahun 2023, mengalami peningkatan rugi sebesar Rp 10,06 miliar atau kerugian meningkat 11,63% dari realisasi periode yang sama di tahun 2022 yaitu rugi sebesar Rp 86,50 miliar.

Secara umum dapat disampaikan, PT INTI (Persero) mencatatkan nilai Penjualan Konsolidasi Tahun 2023 sebesar Rp 503,68 miliar atau 145,76% terhadap RKAP tahun 2023, naik sebesar Rp 194,65 miliar atau naik 62,99% terhadap periode yang sama di tahun 2022.

Laba Kotor meningkat menjadi sebesar Rp 44,51 miliar atau 114,05% dari RKAP tahun 2023, naik 6,52% dari periode yang sama pada tahun 2022. Realisasi Rasio Laba Kotor terhadap Penjualan tahun 2023 adalah sebesar 8,84%, turun 4,68% dari periode yang sama tahun lalu yaitu 13,52%.

In the midst of the global economic turmoil in 2023 which was full of considerable challenges and unstable socio-economic conditions, the Company's performance improvement continues. The company always tries to achieve performance targets based on the Company's Work Plan and Budget.

PT INTI (Persero) recorded a Comprehensive Loss of Rp96.56 billion or 103.60% to the 2023 Company's Work Plan and Budget, experiencing an increase in loss of Rp10.06 billion or a loss increase 11.63% from the realization of the same period in 2022, which is a loss of Rp 86.50 billion.

In general it can be delivered, PT INTI (Persero) recorded the 2023 Consolidated Sales value of Rp 503.68 billion or 145.76% of the 2023 Company's Work Plan and Budget, an increase of Rp 194.65 billion or a decrease of 62.99% over the same period in 2022.

Gross Profit increased to Rp 44.51 billion or 114.05% of the 2023 Company's Work Plan and Budget, increase 6.52% from the same period in 2022. Ratio of Gross Profit to Sales in 2023 is 8.84%, decrease 4.68% from the same period last year, which was 13.52%.

Laba Kotor tersebut terutama berasal dari proyek Kontrak Harga Satuan *Repair & Refurbished*, Alat Ukur, dan *Service Handling Network Terminal Equipment* (NTE) Damage.

Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) sebesar negatif Rp 41,26 miliar atau 71,90% dari target RKAP tahun 2023 sebesar negatif Rp 32,21 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp 27,91 miliar dari realisasi tahun sebelumnya atau 209,13%.

Beban Penjualan, Beban Umum dan Administrasi, serta Beban Pengembangan terealisasi sebesar Rp 88,86 miliar atau 100,61% terhadap RKAP tahun 2023, Pendapatan Lain-Lain Rp 11,03 miliar atau 44,87% terhadap RKAP tahun 2023, Beban Lain-Lain Rp 12,03 miliar, dan Beban Pajak Final Rp 2,91 miliar maka Perusahaan mengalami Rugi Usaha Sebelum Beban Pendanaan sebesar Rp 48,28 miliar atau kerugian bertambah sebesar Rp 23,07 miliar atau 91,53%.

Beban Pendanaan terealisasi sebesar Rp 48,86 miliar atau 83,67% terhadap RKAP tahun 2023. Mengalami penurunan sebesar Rp 5,25 miliar atau 9,70% dari realisasi periode yang sama di tahun 2022. Pada tahun 2023, Perusahaan membukukan Rugi Tahun Berjalan Rp 96,28 miliar atau 103,60% terhadap RKAP tahun 2023, mengalami peningkatan rugi sebesar Rp 14,05 miliar atau 17,08% dari realisasi periode yang sama di tahun 2022 yaitu sebesar rugi Rp 82,23 miliar.

Dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi, tercatat per 31 Desember 2023, Total Aset sebesar Rp 1,26 triliun, Liabilitas sebesar Rp 1,97 triliun, dan Ekuitas sebesar negatif Rp 716,56 miliar. Nilai ekuitas negatifnya bertambah sebesar Rp 91,06 miliar atau 14,56% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022, akibat rugi tahun berjalan.

Perolehan Kontrak Penjualan Konsolidasian tahun 2023 sebesar Rp 527,91 miliar dengan ringkasan sebagai berikut:

1. **Manufacture** sebesar Rp 55,44 miliar, terutama berasal dari proyek *Smart Card* Rp 40,51 miliar, *e-KTP Reader* Rp 3,56 miliar, *Set Top Box* Rp 2,38 miliar, *Mobile Point of Sales* (MPOS) Rp 2,37 miliar, *Material Outside Plant* (OSP) Rp 1,77 miliar, dan proyek lainnya senilai Rp 4,85 miliar.
2. **System Integrator** sebesar Rp 468,69 miliar, berasal dari proyek *Information Technology System* Rp 93,95 miliar, *Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya* (PJUTS) Rp 69,44 miliar, *Alat Ukur* Rp 67,73 miliar, *Outside Plant* (OSP) Rp 62,89 miliar, *Niaga* Rp 59,39 miliar, *Repair & Refurbish* Rp 35,44 miliar, *Jasa Lain* Rp 22,80 miliar, *Tower Power* Rp 18,97 miliar, *Maintenance* Rp 12,38 miliar, dan proyek lainnya senilai Rp 25,70 miliar.
3. **Digital Service** sebesar Rp 3,78 miliar, terutama berasal dari proyek *Jasa Integrasi* Rp 3,69 miliar, *e-Voting* Rp 64,00 juta, dan proyek lainnya senilai Rp 3,00 juta.

The gross profit was mainly derived from the *Repair & Refurbished Contract Unit Price*, *Measuring Equipment*, and *Service Handling Network Terminal Equipment* (NTE) Damage.

Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) of negative Rp 41.26 billion or 71.90% from the 2023 Company's Work Plan and Budget target of negative Rp 32.21 billion, decreased by Rp 27.91 billion from the previous year's realization or 209.13%.

Realized Selling Expenses, General and Administrative Expenses, and Development Expenses amounted to Rp88.86 billion or 100.61% of the 2023 Company's Work Plan and Budget, *Other Income* of Rp11.03 billion or 44.87% of the 2023 Company's Work Plan and Budget, *Other Expenses* Rp12.03 billion, and a *Final Tax Expense* of Rp2.91 billion, the Company experienced an *Operating Loss Before Financing Expenses* of Rp48.28 billion or a loss increased by Rp23.07 billion or 91.53%.

Realized Funding Costs amounted to Rp 48.86 billion or 83.67% of the 2023 Company's Work Plan and Budget. A decrease of Rp 5.25 billion or 9.70% from the realization of the same period in 2022. In 2023, the Company posted *Loss of the Year* Rp 96.28 billion or 103.60% of the 2023 Company's Work Plan and Budget, experiencing an increase in loss of Rp 14.05 billion or 17.08% from the realization of the same period in 2022 which amounted to loss of Rp 82.23 billion.

From the *Consolidated Financial Position Report*, recorded as of December 31, 2023, *Total Assets* amounted to Rp 1.26 trillion, *Liabilities* amounted to Rp 1.97 trillion, and *Equity* was negative Rp 716.56 billion. The negative *Equity* value increased by Rp 91.06 billion or 14.56% compared to the position as of December 31, 2022, due to the *Current Year's Loss*.

Consolidated Contract Acquisition in 2023 amounted to Rp 527.91 billion with the summary as follows:

1. *Manufacture* amounted Rp 55.44 billion, mainly from *Smart Card* Rp 40.51 billion, *E-KTP Reader* project Rp 3.56 billion, *Set Top Box* Rp 2.38 billion, *Mobile Point of Sales* (MPOS) Rp 2.37 billion, *Outside Plant* (OSP) *Material* Rp 1.77 billion, and other projects worth Rp 4.85 billion.
2. *System Integrator* amounted Rp 468.69 billion, mainly from *Information Technology System* Rp 93.95 billion, *Solar Powered Public Street Lighting* Rp 69.44 billion, *Measuring Equipment* project Rp 67.73 billion, *Outside Plant* (OSP) Rp 62.89 billion, *Commercial* Rp 59.39 billion, *Repair & Refurbish* Rp 35.44 billion, the *Other Services* Rp 22.80 billion, *Tower Power* Rp 18.97 billion, *Maintenance* Rp 12.38 billion, and other projects worth Rp 25.70 billion.
3. *Digital Services* amounted Rp 3.78 billion, mainly from the *Integration Services* project Rp 3.69 billion, *E-Voting* project Rp 64.00 million, and other projects worth Rp 3.00

Realisasi Penjualan Konsolidasi tahun 2023 sebesar Rp 503,68 miliar dengan ringkasan sebagai berikut:

1. **Manufacture** sebesar Rp 53,69 miliar, terutama berasal dari proyek *Smart Card* Rp 40,51 miliar, *e-KTP Reader* Rp 3,28 miliar, *Material Outside Plant (OSP)* Rp 2,76 miliar, *Set Top Box* Rp 2,47 miliar, *Material Outside Plant (OSP)* Rp 1,87 miliar, dan proyek lainnya senilai Rp 2,80 miliar.
2. **System Integrator** sebesar Rp 445,40 miliar, terutama berasal dari proyek *IT System* Rp 93,92 miliar, proyek *OSP* Rp 70,50 miliar, proyek alat ukur Rp 65,32 miliar, proyek *Niaga* Rp 46,57 miliar, proyek *PJUTS* Rp 40,41 miliar, proyek *Repair & Refurbish* Rp 33,35 miliar, proyek *Maintenance* Rp 19,52 miliar, proyek *TOPO* Rp 18,58 miliar, proyek *Seat Management* Rp 11,64 miliar, dan proyek lainnya senilai Rp 45,58 miliar.
3. **Digital Service** sebesar Rp 4,59 miliar, terutama berasal dari proyek *Jasa Integrasi* Rp 4,48 miliar, proyek *e-voting* Rp 64,00 juta, proyek *MPOS* Rp 28,32 juta, proyek *E-KTP Reader* Rp 13,00 juta, dan proyek lainnya senilai Rp 2,65 juta.

Realisasi penyaluran dana program TJSL PT INTI (Persero) tahun 2023 adalah sebesar Rp 2,31 miliar atau 94,1% dari anggaran tahun 2023. Realisasi dana tersebut merupakan kegiatan penyaluran dana bergulir berupa pemberian pinjaman dana PUMK sebesar Rp 2,02 miliar dan peyaluran dana program TJSL untuk kegiatan aktivitas sosial masyarakat sebesar Rp 294,86 juta yang anggarannya berasal dari dana Perusahaan.

Berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT INTI (Persero), Perusahaan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023 berdasarkan empat pilar. Pilar Pembangunan Ekonomi sebesar Rp 1,84 miliar merupakan dana bergulir yaitu anggaran pendanaan untuk program penyaluran Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK), program SROI, serta kegiatan kolaborasi bersama BUMN dengan realisasi tahun 2023 adalah sebesar Rp 2,03 miliar.

Pilar Pembangunan Sosial menyusun anggaran untuk berbagai kegiatan sosial sebesar Rp 76,00 juta dan merealisasikan dana tersebut sebesar Rp 102,95 juta.

Lalu, Pilar Pembangunan Lingkungan merealisasikan dana sebesar Rp 1,00 juta untuk kegiatan penanaman pohon berupa bibit tanaman produktif. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Perusahaan merealisasikan dana sebesar Rp 181,02 juta.

million.

Realization of Consolidated Sales in 2023 amounted to Rp 503.68 billion with a summary as follows:

1. *Manufacture* amounted Rp 53.69 billion, mainly from *Smart Card* project Rp 40.51 billion, *e-KTP Reader* Rp 3.28 billion, *Material Outside Plant (OSP)* Rp 2.76 billion, *Set Top Box* Rp 2.47 billion, *Outside Plant (OSP) Material* Rp 1.87 billion, and other projects worth Rp 2.80 billion.
2. *System Integrator* System Integrator amounted Rp 260.87 billion, mainly from the *OSP* project Rp 118.01 billion, *Repair & Refurbish* Rp 52.20 billion, *Maintenance* Rp 25.18 billion, *Seat Management* Rp 24.03 billion, *TOPO* Rp 19.10 billion, projects *Very Small Aperture Terminal (VSAT)* Rp. 8.65 billion, and other projects worth Rp. 13.71 billion.
3. *Digital Services* amounted Rp 4.59 billion, mainly from *Integration Service* project Rp 4.48 billion, *E-voting* project Rp 64.00 million, *MPOS* project Rp 28.32 million, *E-KTP Reader* project Rp 13.00 million, and other projects worth Rp 2.65 million.

Realization of the distribution of funds for the PT INTI (Persero)'s Social and Environmental Responsibility program in 2023 is Rp 2.31 billion or 94.1% of the 2023 budget. The realization of these funds is an activity of distributing revolving funds in the form of providing Micro and Small Business Funding (PUMK) fund loans of Rp 2.02 billion and distributing TJSL program funds for community social activities of Rp 294.86 million, the budget for which comes from the Company's funds.

Based on PT INTI (Persero)'s Social and Environmental Responsibility Sustainable Development Goals, the Company has prepared a Work Plan and Budget (RKA) for 2023 based on four pillars. The Economic Development Pillar of Rp 1.84 billion is a revolving fund, namely the funding budget for the Micro and Small Business Funding (PUMK) distribution program, the SROI program, and collaborative activities with State-Owned Enterprises (SOEs) with the realization in 2023 amounted to Rp 2.03 billion.

The Social Development Pillar budgeted for social activities of Rp 76.00 billion and realizes the funds of Rp 102.95 billion.

Then, the Environmental Development Pillar realized a fund of Rp 1.00 million for tree planting activities in the form of productive plant seedlings. The Legal Development and Corporate Governance Pillar realized funds of Rp 181.02 million.



Kendala-Kendala yang Dihadapi Perusahaan dan Langkah-Langkah Penyelesaiannya

Constraints Faced By The Company and The Solution Steps

Pada tahun 2023 Perusahaan dihadapkan pada gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") karena gagal bayar atas pokok pinjaman yang jatuh tempo ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan tersebut terjadi di tengah persiapan Perusahaan menggarap program-program unggulan dalam upaya transformasi total agar *back-on-track*.

PKPU merupakan upaya debitur dan kreditur untuk menyepakati penyelesaian utang-piutang sebelum upaya terakhir berupa kepailitan dijatuhkan pengadilan. Oleh karena itu, status hukum PT INTI (Persero) saat ini berada dalam keadaan PKPU.

Gugatan PKPU tersebut berakhir dengan hasil positif. Proses yang berlangsung selama 195 hari tersebut berakhir dengan Homologasi atau Perdamaian.

Hasil keputusan tersebut merepresentasikan bahwa proses yang dijalani Perseroan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk mayoritas kreditor, yang pada akhirnya sepakat dan yakin bahwa PT INTI (Persero) pantas untuk diselamatkan, serta memiliki kemampuan pemenuhan kewajiban usaha terhadap kreditor.

Proses restrukturisasi keuangan ini tentunya memberikan multieffek yang sangat signifikan untuk Perusahaan, dengan didukung rencana bisnis ke depan, keberlangsungan perusahaan dapat dipertahankan.

Hal ini nantinya akan mempercepat transformasi arah perusahaan menuju yang lebih baik karena beriringan dengan restrukturisasi keuangan yang sudah dijalankan dari tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu juga, kendala yang dialami Perseroan dalam memperoleh proyek *government* yaitu Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan Saldo Kemampuan Nyata (SKN) yang berbanding lurus dengan *nett equity*. Namun, dikarenakan perusahaan memiliki strategi bisnis yang memfokuskan kepada proyek *recurring* sehingga hal tersebut tidak begitu berdampak signifikan terhadap kinerja Perusahaan. Salah satu opsi yang dilakukan Perseroan adalah dengan mulai masuk pada bisnis yang diselenggarakan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan mengusung *product genuine* Perseroan.

Sejak tahun 2022, investasi Perusahaan pada fasilitas manufaktur, *research and development center*, dan *repair*

In 2023, the Company was faced with a lawsuit for Postponement of Debt Payment Obligations for failing to pay the principal of the loan due to the Commercial Court at the Central Jakarta District Court.

This lawsuit occurred in the midst of the Company's preparations to work on superior programs in an effort to total transformation so that it is back-on-track.

Postponement of Debt Payment Obligations is an effort by debtors and creditors to agree on a settlement of debts and receivables before the final resort in the form of bankruptcy is imposed by the court. Therefore, the legal status of PT INTI (Persero) is currently in a Postponement of Debt Payment Obligations state.

The Postponement of Debt Payment Obligations lawsuit ended with positive results. The process which lasted for 195 days ended with Homologation or Peace.

The results of this decision represent that the process carried out by the Company received support from various parties, including the majority of creditors, who ultimately agreed and believed that PT INTI (Persero) deserved to be saved, and had the ability to fulfill its business obligations to creditors.

This financial restructuring process will certainly have very significant multi-effects for the Company, supported by future business plans, the company's sustainability can be maintained.

This will accelerate the transformation of the company's direction towards a better one because it is in line with the financial restructuring that has been carried out in previous years

Apart from that, the company experienced obstacles in obtaining government projects, namely the Company was unable to meet the Real Capability Balance requirements which were directly proportional to net equity. However, because the company has a business strategy that focuses on recurring projects, it does not have a significant impact on the Company's performance. One of the options that the Company has undertaken is to start entering into businesses organized through Government Goods/Services Procurement Policy Institute, by promoting the Company's genuine products.

In 2022, the Company's investment in manufacturing facilities, research and development centers, and repair centers is still

centre masih rendah. Perusahaan kesulitan memproduksi produk *genuine* yang seharusnya memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan profitabilitas tinggi.

Rendahnya kemampuan jasa manufaktur perangkat elektronik, baik sebagai *Original Equipment Manufacturer* (OEM) maupun *Original Design Manufacturer* (ODM). Selain itu, rendahnya kemampuan penelitian dan pengembangan serta keterbatasan *setup repair center* yang memadai menjadi kendala yang dihadapi Perusahaan.

PT INTI (Persero) menjalankan kerja sama operasi dan proyek-proyek pengembangan baik dengan lembaga pemerintahan, sesama Badan Usaha Milik Bersama (BUMN), maupun lembaga swasta dalam negeri dan asing. Bentuk kerja sama operasi dan proyek-proyek pengembangan yang dilakukan diantaranya berupa uji coba inovasi, kerja sama produksi, perakitan, serta pengembangan peralatan untuk meningkatkan TKDN, kerja sama riset, dan beberapa kerja sama operasi lainnya.

Penggunaan modal kerja dengan pola bagi hasil dengan investor menyebabkan komponen *cost of capital* yang besar. Dampak dari kondisi tersebut yaitu mengurangi daya saing perusahaan dalam perolehan pekerjaan berbasis tender. Langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan di antaranya menjalin kerja sama dengan mitra strategis dengan skema bisnis inovatif, menjalin kerja sama jangka panjang dengan mitra pendanaan, serta menjaga performansi dari proyek untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan.

Di bidang sumber daya manusia, Perseroan sejak dini juga telah menjaga keseimbangan komposisi demografi sumber daya manusia agar dapat mendukung strategi pengembangan bisnis Perseroan, terutama dengan adanya jumlah karyawan yang pensiun, Program *Right Sizing* karyawan yang berupa Program *Early Retirement Program* (ERP) dan Program Dirumahkan, Cuti di Luar Tanggungan Perusahaan (CLTP), ataupun mengundurkan diri Atas Permintaan Sendiri (APS) di tahun 2023, dan tahun-tahun selanjutnya.

Pelaksanaan Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan dapat memberikan peluang lebih besar ternyata belum menunjukkan kontribusi yang signifikan, mengingat sinergi yang terbangun masih banyak yang bersifat transaksional. Harapannya, hal tersebut dapat direalisasikan pada tahun-tahun mendatang.

low. Companies have difficulty producing genuine products that should have Domestic Component Level and high profitability.

Low capability of electronic device manufacturing services, both as Original Equipment Manufacturer (OEM) and Original Design Manufacturer (ODM). Apart from that, the low research and development capacity and the limited setup of an adequate repair center are the obstacles the company faces.

PT INTI (Persero) carries out joint operations and development projects both with government institutions, fellow State-Owned Enterprises (SOEs), as well as domestic and foreign private institutions. The forms of joint operation and development projects carried out include innovation trials, joint production, assembly, and equipment development to increase the Domestic Component Level, research cooperation, and several other joint operations.

The use of working capital with a profit sharing pattern with investors causes a large cost of capital component. The impact of these conditions is to reduce the company's competitiveness in obtaining jobs based on tenders. The steps taken by the company include cooperating with strategic partners with innovative business schemes, establishing long-term partnerships with funding partners, and maintaining project performance to increase the company's credibility.

In the field of human resources, the Company from an early age has also maintained a balanced demographic composition of human resources in order to support the Company's business development strategy, especially with the number of employees retiring, the employee Right Sizing Program in the form of the Early Retirement Program (ERP) and the Layoff Program, Leave Outside the Company's Responsibility, or resign at your own request (APS) in 2023, and subsequent years.

It is hoped that the implementation of the Synergy of State-Owned Enterprises (SOEs) will provide greater opportunities but has not shown a significant contribution, considering that many of the synergies that have been built are still transactional in nature. It is hoped that this can be realized in the coming years.



Gambaran dan Analisis Tentang Prospek Usaha

Overview and Analysis of Business Prospects

Tahun 2023 mempunyai tantangan tersendiri bagi Perusahaan, di mana Perusahaan menghadapi rintangan yang cukup besar di tengah-tengah usaha Perusahaan dalam menggarap program-program unggulan dalam upaya transformasi total agar *back-on-track*.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, Perseroan terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan kemampuan bisnis secara terus-menerus. Berbagai tantangan demi tantangan yang hadir terus Perseroan respons secara proaktif dengan memupuk semangat, kerja keras, serta optimisme kuat bahwa Perseroan mampu untuk terus maju di tengah berbagai dinamika dan tantangan melalui serangkaian terobosan bisnis baru.

Harus diakui bahwa Perseroan memerlukan beberapa perbaikan dan tantangan sehingga potensi bisnis yang luas ini dapat dikonversi menjadi penjualan dan margin yang menguntungkan. Perseroan juga telah memulai program restrukturisasi bisnis, finansial, serta optimalisasi aset, yang dapat mendukung seluruh pilar keberhasilan dalam mencapai perbaikan kinerja Perseroan di masa yang akan datang.

Perseroan berkomitmen untuk terus menciptakan pertumbuhan peluang dengan fokus pada portofolio bisnis *Manufacture, System Integrator, dan Digital*.

Guna meningkatkan probabilitas pencapaian target Kontrak, Penjualan, maupun Margin, Perseroan akan tetap fokus kepada segmen kastemer Telco, *Enterprise, Government, Small Medium Enterprise (SME), dan Retail*. Hal ini mempertimbangkan kompetensi yang saat ini telah dimiliki oleh Perseroan, adanya program Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, hubungan bisnis yang telah terbentuk selama 49 tahun Perseroan berdiri, serta Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perseroan melihat besarnya peluang pada portofolio *Manufacture* untuk produk e-KTP Reader dan Laptop. Pada portofolio *System Integrator* masih mengandalkan *OutSide Plant (OSP)* dan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS). Sementara itu, pada portofolio Digital mengandalkan *e-Voting*.

Sebagai perusahaan yang beranjak dari perusahaan manufaktur peralatan telekomunikasi, Perusahaan tetap berupaya pada *core business* yang sangat dikuasai Perusahaan dengan membangun INTI Smart Industrial Park untuk memfasilitasi kegiatan manufaktur secara terintegrasi terdiri dari produksi mekanik, plastik, elektronik dan optikal, baik *product genuine* INTI maupun produk alih teknologi dari mitra.

2023 has its own challenges for the Company, where the Company faces significant obstacles in the midst of the Company's efforts to work on superior programs in an effort to total transformation so that it is back-on-track.

As a company engaged in telecommunications and digital, the Company is committed to continuously improving its business capabilities. The various challenges that come up, the Company continues to respond proactively by fostering enthusiasm, hard work, and strong optimism that the Company is able to move forward amidst various dynamics and challenges through a series of new business breakthroughs.

It must be admitted that the Company needs several improvements and challenges so that this vast business potential can be converted into sales and profitable margins. The Company has also started a business restructuring program, financial, and asset optimization, which can support all pillars of success in achieving the Company's performance improvement in the future.

The Company is committed to continuing to create growth opportunities by focusing on the Manufacture, System Integrator, and Digital business portfolios.

In order to increase the probability of achieving Contract, Sales, and Margin targets, the Company will continue to focus on the Telco, Enterprise, Government, Small Medium Enterprise (SME), dan Retail customer segments. This takes into account the competencies that the Company currently has, the Government's program in the National Medium-Term Development Plan 2020–2024, business relationships that have been established for 49 years of the Company's existence, and the Synergy of State-Owned Enterprises (SOEs).

The company sees large opportunities in the Manufactured portfolio for e-KTP Reader and Laptop products. The System Integrator portfolio still relies on Out Site Plants (OSP) and Solar Powered Public Street Lighting. Meanwhile, the Digital portfolio relies on e-Voting.

As a company that moved from being a telecommunications equipment manufacturing company, the Company continues to strive for the core business that the Company is very well versed in by building the INTI Smart Industrial Park to facilitate integrated manufacturing activities consisting of mechanical, plastic, electronic and optical production, both INTI's genuine product and technology transfer products from partners.

Di sisi finansial, Perseroan telah mendapat kesempatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sehingga dapat mengurangi beban *cash flow* jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, harapannya hal tersebut dapat mendukung perbaikan kinerja finansial melalui alokasi modal kerja yang efektif dan efisien.

Perseroan juga telah melakukan program cost management yang akan meningkatkan kualitas struktur biaya Perseroan baik untuk komponen biaya proyek maupun biaya tenaga kerja. Hal ini sudah dapat terlihat pada tahun 2023 Perusahaan mencatatkan penghematan biaya tetap (*fixed cost*) hingga lebih dari 30%.

Selain itu, Perseroan juga memiliki aset yang dapat dioptimalkan sehingga dapat menambah komponen pendapatan lain-lain dalam struktur laba rugi Perseroan.

On the financial side, the Company has obtained the opportunity to Postpone Debt Payment Obligations, which is expected to reduce short-term and long-term cash flow expenses. In addition, it is hoped that this will support the improvement of financial performance through effective and efficient working capital allocation.

The Company has also implemented a cost management program which will improve the quality of the Company's cost structure for both project cost components and labor costs. This can be seen in 2023, the Company recorded fixed cost savings of more than 30%.

In addition, the Company also has assets that can be optimized so that it can add other income components in the Company's profit and loss structure.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Development of Good Corporate Governance Implementation

Perseroan selalu berusaha untuk mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) di setiap aktivitas bisnis dan seluruh tingkatan organisasi dari tahun ke tahun. Perseroan memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan secara maksimal dan konsisten dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Perseroan, komitmen terhadap penerapan instrumen GCG di lingkungan Perseroan tidak hanya mewakili kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Namun, hal tersebut diyakini sebagai kunci sukses dalam upaya pencapaian kinerja usaha yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, yang sangat diperlukan dalam memenangkan persaingan pasar.

Kinerja Perseroan pada tahun 2023 merupakan hasil dari penerapan GCG yang efektif. Prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan telah diterapkan dengan baik oleh Perseroan.

Prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan melalui berbagai mekanisme GCG seperti manajemen risiko, sistem pengendalian internal, *Whistle-Blowing System* (WBS), dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR).

The Company always strives to optimize the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in every business activity and at all levels of the organization from year to year. The Company is committed to implementing Corporate Governance optimally and consistently by referring to the applicable laws and regulations.

For the Company, the commitment to implementing the GCG instrument in the Company's environment does not only represent an obligation to comply with applicable regulations. However, it is believed to be the key to achieving effective, efficient, and sustainable business performance, which is indispensable in winning the market competition.

The Company's performance in 2023 is the result of the effective implementation of GCG. The GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, have been well implemented by the Company.

These principles have been implemented through various GCG mechanisms such as risk management, internal control system, Whistle-Blowing Systems (WBS), and Corporate Social Responsibility (CSR).



Pengelolaan Human Capital

Human Capital Management

Human Capital Management (HCM) merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan dan keberlanjutan bisnis Perseroan.

Langkah strategis yang dilakukan oleh PT INTI (Persero) adalah dengan melakukan sertifikasi kompetensi bagi para talenta-talenta terpilih, sehingga kompetensi yang diperoleh dapat mengerakkan produktivitas Perusahaan.

Hingga tahun 2023, karyawan telah memiliki 64 Sertifikasi Kompetensi diantaranya adalah 45 Sertifikasi di Bidang Sistem Integrator, 3 Sertifikasi Bidang Digital, dan 16 lainnya di berbagai bidang seperti *Procurement*, *Quality Management*, HCM, dan *Risk Management*.

Selain itu, PT INTI (Persero) mulai menerapkan program *rightsizing* dengan target 100 Karyawan pada Desember 2023 melalui Program *Early Retirement Program* & Program Merumahkan Karyawan. Program ini dilakukan untuk mendukung transformasi *Human Capital* dengan memilih talenta-talenta terbaik Perusahaan yang dianggap mampu mengawal Perusahaan untuk mencapai transformasi yang diharapkan.

Human Capital Management (HCM) is one of the factors that supports the success and sustainability of the Company's business.

The strategic step taken by PT INTI (Persero) is to carry out competency certification for selected talents, so that the competencies obtained can drive the Company's productivity.

Until 2023, employees have 64 Competency Certifications, including 45 Certifications in the System Integrator field, 3 Certifications in the Digital field, and 16 others in various fields such as *Procurement*, *Quality Management*, HCM, and *Risk Management*.

In addition, PT INTI (Persero) has started implementing a *rightsizing* program with a target of 100 Employees in December 2023 through the *Early Retirement Program* & *Temporary Paid Leave*. This program is carried out to support the transformation of *Human Capital* by selecting the Company's best talents who are considered capable of guiding the Company to achieve the expected transformation.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pengelolaan Lingkungan

Corporate Social Responsibility and Environmental Management

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dilakukan melalui penyaluran dana pinjaman sebagai bantuan permodalan bagi usaha kecil, dan program pembinaan berupa promosi pasar dan pelatihan kepada Mitra Binaan. Hal tersebut juga dilakukan melalui berbagai aktivitas sosial seperti kesejahteraan lingkungan, bantuan pendidikan, penghijauan lingkungan, sumbangan bencana alam, dan bantuan sarana ibadah.

Penyaluran Dana bergulir Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2023 telah tercapai, bahkan melebihi target yang telah dianggarkan pada tahun 2023.

The implementation of the Company's Social and Environmental Responsibility is carried out through channeling loan funds as capital assistance for small businesses, and coaching programs in the form of market promotions and training for Foster Partners. This is also done through various social activities such as environmental welfare, educational assistance, greening the environment, natural disaster donations, and assistance for places of worship.

The revolving fund distribution for the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Funding Program in 2023 has been achieved, even exceeding the target budgeted for 2023.

Penilaian atas Kinerja Komite-Komite yang Berada di Bawah Direksi

Assessment of The Performance of The Committees Under The Board of Directors

Pada tahun 2023, Perseroan tidak memiliki komite yang berada di bawah Direksi.

In 2023, the Company did not have committees under the Board of Directors.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya

Changes in The Composition of The Members of The Board of Directors and The Reasons for The Changes

Pada tahun 2023 tidak terdapat perubahan komposisi Direksi Perseroan.

In 2023 there were no changes to the composition of the Company's Board of Directors.

Komposisi Direksi pada saat ini dimulai pada Juli 2022 di mana terdapat pergantian Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-143/MBU/07/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia tertanggal 8 Juli 2022. Susunan Direksi PT INTI (Persero) adalah sebagai berikut:

The current composition of the Board of Directors began in July 2022, when there was a change in the President Director based on the Decree of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) number SK-143/MBU/07/2022 concerning the Dismissal and Appointment of the Main Director of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia dated July 8, 2022. Thus, the composition of the Board of Directors of PT INTI (Persero) is as follows:

- Direktur Utama : Edi Witjara
- Direktur Keuangan & Manajemen Risiko : Tri Hartono Rianto
- Direktur Bisnis : Teguh Adi Suryandono

- *President Director : Edi Witjara*
- *Director of Finance & Risk Management : Tri Hartono Rianto*
- *Director of Business : Teguh Adi Suryandono*

Lalu perubahan terakhir terjadi pada November 2022 saat terdapat pergantian Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko serta Direktur Bisnis, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-256/MBU/11/2022 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia tertanggal 14 November 2022. Maka, susunan Direksi PT INTI (Persero) menjadi sebagai berikut:

Then the last change occurred in November 2022 when there was the replacement of the Director of Finance and Risk Management and the Director of Business, based on the Decree of the Minister of SOEs Number SK-256/MBU/11/2022 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia on November 14 2022. Therefore, the composition of the Board of Directors of PT INTI (Persero) is as follows:

- Direktur Utama : Edi Witjara
- Direktur Keuangan, SDM, Hukum, dan Manajemen Risiko : Tantang Yudha Santoso
- Direktur Operasi : Ahmad Taufik

- *President Director : Edi Witjara*
- *Director of Finance, Human Capital, Legal & Risk Management : Tantang Yudha Santoso*
- *Director of Operation : Ahmad Taufik*



Ucapan Terima Kasih

Acknowledgements

Mewakili jajaran Direksi Perseroan, kami menyampaikan terima kasih kepada para pemegang saham, para pelanggan, mitra bisnis, media, serta seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan sepanjang tahun 2023. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas bantuan saran, arahan, juga pengawasan dalam rangka menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai standar yang berlaku.

Selain itu, kami juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan Perseroan atas kerja kerasnya dalam mendukung kegiatan bisnis dan pertumbuhan Perseroan.

Dengan komitmen dari seluruh Pemangku Kepentingan, kami akan terus berupaya untuk berkembang dan bertumbuh untuk mewujudkan visi perusahaan serta mendukung komitmen Pemerintah dalam percepatan digitalisasi dengan mengusung semangat sinergi para pelaku industri telekomunikasi dan digital untuk memajukan Indonesia berdaulat digital.

On behalf of the Board of Directors, we would like to express our gratitude to the shareholders, customers, business partners, media, other stakeholders for the support and trust given over the course of 2023. We also would like to express our gratitude to the Board of Commissioners for their advice, guidance, and supervision in order to implements Good Corporate Governance in accordance with applicable standards.

In addition, we would also like to extend our highest appreciation to the entire Employees of the Company who have worked hard in supporting the Company's business and the Company's growth.

With the commitment of all stakeholders, we will continue to develop and grow to realize its vision and support the government's commitment to accelerate digitization by carrying out the spirit of synergy among telecommunication and digital industry players to advance digital sovereign Indonesia.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas Laporan Tahunan

Statement Letters of The Member of The Board of Commissioners and Board of Directors

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We the undersigned declare that all the information included in the annual report 2023 of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) has been fully disclosed and we are responsible for the truthfulness of the content of the company's annual report. This is our declaration, which has been made truthfully.



Bandung, 12 Juni 2024

Bandung, 12 Juni 2024

Komisaris Utama

President Commissioner

Unggul Priyanto

Komisaris
Commissioner

Trisno Hendradi

Komisaris
Commissioner

Yanuar Rokhmad Madyantoro

Komisaris
Commissioner

Rahmadi Murwanto

Direktur Utama
President Director

Edi Witjara

Direktur Keuangan, SDM, Hukum, dan
Manajemen Risiko

*Financial, Human Capital, Legal &
Risk Management Directors*

Tantang Yudha Santoso



Direktur Operasi
Operation Director

Ahmad Taufik



PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile



Identitas Perusahaan

Corporate Identity

Nama dan Alamat Lengkap Perusahaan

Company Name and Domicile



www.inti.co.id

Perusahaan Perseroan (Persero)
Limited Liability Company (Persero)

PT Industri Telekomunikasi Indonesia

Kantor Pusat

Headquarters

Jl. Moch. Toha No. 77 Bandung 40253

Tlp : (+62-22) 5201501 (10 Saluran)

Fax : (+62-22) 5202444

E-mail : info@inti.co.id

http : www.inti.co.id

Kantor Cabang Jakarta

Representative Office

Jl. Balitung 1 No.17 (Senopati)

Jakarta Selatan 12110

Fasilitas Produksi

Production Facility

Jl. Moch. Toha No. 225 Bandung

Tlp : (+62-22) 5206510



Dasar Pendirian

Basic Establishment

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 tahun 1974 tertanggal 23 September 1974 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Telekomunikasi dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-1771/MK/IV/12/1974 tertanggal 28 Desember 1974 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan.

Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 34 of 1974 dated 23 September 1974 concerning the Capital Deposit of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Field of the Telecommunications Industry and the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. Kep-1771/MK/IV/12/1974 dated 28 December 1974 concerning the Determination of Company's Capital.

Maksud dan Tujuan Pendirian

Purpose and Objectives of Establishment

Melakukan usaha di bidang industri telekomunikasi, elektronika, kelistrikan/energi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Conducting business in the telecommunications, electronics, electricity/energy industries, as well as optimizing the utilization of the Company's resources to produce high-quality and highly competitive goods and/services to gain/pursue profits in order to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Companies.

Modal Dasar :

Rp. 1.000.000.000.000,00

(satu triliun rupiah)

Authorized Capital :

Rp. 1,000,000,000,000.00 (one trillion rupiah)

Modal Disetor :

Rp. 350.000.000.00,00

(tiga ratus lima puluh milyar rupiah)

Paid-up Capital :

Rp. 350,000,000.00 (three hundred and fifty billion rupiah)

Jumlah Karyawan :

203 Orang

Number of Employees: 203 People

Informasi Umum

General Information

Perusahaan didirikan sebagai evolusi dari kerja sama PN Telekomunikasi dan Siemens AG pada tahun 1966. Kerja sama ini berlanjut pada pembentukan Pabrik Telepon dan Telegraf (PTT) sebagai bagian dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi (LPP Postel) pada tahun 1968.

Pada tahun 1974, bagian ini dipisahkan dari LPP Postel menjadi sebuah Perseroan Terbatas yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Postel. Pendirian Perusahaan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1974 tertanggal 23 September 1974 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Industri Telekomunikasi, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-1771/MK/IV/12/1974 tertanggal 28 Desember 1974 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan.

Anggaran Dasar Perusahaan dibuat oleh Akta Notaris Pengganti Warda Sungkar Alurmei, S.H., Nomor 322 tertanggal 30 Desember 1974 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/273/10 tertanggal 1 Agustus 1975, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H., Nomor 34 tertanggal 28 Februari 2017, dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0114165, tertanggal 07 Maret 2017.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 036/MPBUMN/1988, PT INTI (Persero) dimasukkan ke dalam kelompok Industri Strategis. Pada 17 Januari 1998 diterbitkan sebuah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998 yang menghilangkan peran departemen teknis dalam mengelola badan usaha milik negara (BUMN). Sebagai tindak lanjutnya, pembinaan PT INTI (Persero) beralih ke Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN.

Pada tahun yang sama, Badan Pengelola Industri Strategis beralih status menjadi sebuah *holding company* dengan nama PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero) atau PT BPIS, dan sepuluh BUMN strategis di bawahnya menjadi anak perusahaan.

Kondisi ini berakhir pada tahun 2002, saat PT BPIS (Persero) dibubarkan pada Maret 2002 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002. Selanjutnya, pengelolaan PT INTI (Persero) beralih kembali ke Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN.

The company was founded as the evolution of PN Telecommunications and Siemens AG cooperation in 1966. This cooperation continued with the formation Telephone and Telegraph Factory as part of the Post and Telecommunications Research and Development Institute in 1968.

In 1974, this part of the Post and Telecommunications Research and Development Institute separated into a Limited Liability Company under the auspices of the Directorate General of Post and Telecommunication. The company is based on the Indonesian Government Regulation Number 34 of 1974 dated 23 September 1974 on remittance of capital for the establishment of state-owned enterprise in telecommunications industry, and the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number Kep-1771/MK/IV/12/1974 dated December 28, 1974 on the Determination of the Company's Capital.

The Articles of Association of the Company are made by a Substitute Notary Deed Warda Sungkar Alurmei, S.H., Number 322 dated December 30, 1974 and was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number Y.A.5/273/10 dated August 1, 1975, as amended several times, most recently by Deed Notary Muhammad Hanafi, S.H., Number 34 dated February 28, 2017, and was approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0114165, dated March 07, 2017.

Based on the Decree of the Minister of State Owned Enterprises Number 036/M-PBUMN/1988, PT INTI (Persero) is included in the Strategic Industry groups. On January 17, 1998 a Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 1998 was issued, which eliminated the role of the technical ministry in state-owned enterprises (SOEs) management. As a follow-up, coordination and nurture of PT INTI (Persero) was switched to the Ministry of SOE Empowerment.

In the same year, Strategic Industry Management Agency switched its status to a holding company under the name of PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero) or PT BPIS, and ten strategic SOEs became its subsidiaries.

This condition ended in 2002, where PT BPIS was dissolved in March 2002 according to Government Regulation Number 52 of 2002. Furthermore, PT INTI (Persero) nurture and coordination was reverted back to the Ministry of SOEs Empowerment.



Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of the Company

1974 - 1984

PT INTI (Persero) resmi berdiri pada 30 Desember 1974. Bidang usaha PT INTI (Persero) meliputi produk-produk Radio Sonde, radio High Frequency (HF), radio Very High Frequency (VHF), pesawat telepon, dan stasiun bumi untuk Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa. Produk stasiun bumi yang disebut terakhir ini mencatatkan sejarah dalam perkembangan PT INTI (Persero) dengan memberikan kontribusi pada prestasi penjualan tertinggi di periode ini, yaitu sebesar Rp 24,3 miliar pada tahun 1981.

Fasilitas produksi yang dimiliki PT INTI (Persero) pada periode ini antara lain:

- Pabrik Perakitan Telepon
- Pabrik Perakitan Peralatan Transmisi
- Pabrik Mekanik dan Plastik
- Laboratorium Software Komunikasi Data (PACKSATNET) bekerjasama dengan Logitech.

Kerja sama teknologi yang pernah dilakukan pada era ini antara lain dengan Siemens AG, BTM, PRX, dan JRC. Pada era tersebut, produk Pesawat Telepon Umum Koin (PTUK) PT INTI (Persero) menjadi standar Perum Telekomunikasi (sekarang Telkom).

PT INTI (Persero) was officially established on December 30, 1974. PT INTI (Persero) business line includes products Radio Sonde, Radio High Frequency (HF), Very High Frequency Radio (VHF), telephone, and satellite earth station for Domestic Satellite Communication System Palapa. This latter earth station product made history in the development of PT INTI (Persero) by contributing to the highest sales achievement in this period, amounting to Rp 24.3 billion in 1981.

Production facilities owned by PT INTI (Persero) in this period included:

- Phone Assembly Plant
- Transmission Assembly Plant Equipment
- Mechanical and Plastic Factory
- Data Communications Software (PACKSATNET) in collaboration with Logitech.

Technology collaboration undertaken in this era, among others, with Siemens AG, BTM, PRX, JRC. In this era products Coin Public Telephone PT INTI (Persero) became Perum Telekomunikasi (now Telkom) standard.

1985 - 1998

Diawali oleh rencana pemerintah untuk melakukan digitalisasi infrastruktur telekomunikasi di Indonesia dan menunjuk PT INTI (Persero) sebagai pemasok tunggal Sentral Telepon Digital Indonesia (STDI) yang dilaksanakan berdasarkan *Technical and Business Cooperation Agreement (TBCA)* dengan Siemens AG.

Fasilitas produksi terbaru yang dimiliki PT INTI (Persero) pada masa ini, di samping fasilitas-fasilitas yang sudah ada sebelumnya, yaitu pabrik Sentral Telepon Digital Indonesia (STDI) pertama di Indonesia dengan teknologi produksi *Through Hole Technology (THT)*.

Pabrik STDI berkapasitas 150.000 Satuan Sambungan Telepon (SST) ini dibangun pada tahun 1984 dan produksi pertamanya sebesar 10.000 SST diluncurkan pada tahun 1985. Di kemudian

Initiated by government plans to undertake digitization of telecommunications infrastructure in Indonesia and appointed PT INTI (Persero) as sole supplier Digital Telephone Central Indonesia carried out by the Technical and Business Cooperation Agreement (TBCA) with Siemens AG.

Latest production facilities owned by PT INTI (Persero) at this time, in addition to the facilities already existing, namely Digital Telephone Central, the first factory in Indonesia with production technology Through Hole Technology (THT).

Digital Telephone Central Plant with a capacity of 150,000 Phone Line Unit was built in 1984 and first production of 10,000 Phone Line Unit was launched in 1985. Later the plant capability was

hari, kemampuan pabrik ini dilengkapi juga dengan teknologi produksi *Surface Mounting Technology* (SMT). Produk STDI ini berkontribusi sangat signifikan bagi pertumbuhan penjualan dan laba PT INTI (Persero).

Walaupun pada tahun 1990 pemerintah membuka persaingan dengan mengizinkan dua pemasok sentral digital lainnya, yaitu AT&T dan NEC. Namun, sampai dengan tahun 1998, PT INTI (Persero) masih tetap menjadi *market leader* dalam hal pangsa pasar infrastruktur telekomunikasi, yaitu sebesar 60% dari total pasar nasional.

Dengan memanfaatkan fasilitas pabrik ini pula, ruang lingkup produk PT INTI (Persero) dilengkapi oleh *Pulse Code Modulation* (PCM), *Private Automatic Branch Exchange* (PABX), dan pesawat telepon meja INTI 111 yang semuanya merupakan produk lisensi dari Siemens AG.

Di samping itu, PT INTI (Persero) juga memproduksi perangkat-perangkat hasil pengembangan sendiri seperti Stasiun Bumi Kecil (SBK), *High Frequency* (HF) Radio, *Digital Microwave Radio* (DMR), Sistem Telepon Kendaraan Bergerak (STKB), Pesawat Telepon Umum *Coin Box*, dan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS).

Sejak tahun 1989, produk PT INTI (Persero) dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Produk Sentral
2. Produk Transmisi
3. Produk Terminal (*Customer Premises Equipment/CPE*)

Kerja sama teknologi yang pernah dilakukan pada periode ini antara lain:

- Bidang sentral dengan Siemens AG.
- Bidang transmisi dengan *Japan Radio Company*.
- Bidang CPE dengan Siemens AG, BTM, Tamura, Syapura, dan Tatung TEL.

Dari ketiga kategori produk tersebut, produk yang memberikan kontribusi terbesar dalam penjualan PT INTI (Persero) adalah produk sentral.

Pada era ini, PT INTI (Persero) memiliki reputasi dan prestasi yang signifikan, yaitu:

- Menjadi pionir dalam proses digitalisasi sistem dan jaringan telekomunikasi di Indonesia.
- Bersama Telkom telah berhasil dalam proyek otomatisasi telepon di seluruh ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan di seluruh wilayah Indonesia.

Pada periode ini, tepatnya pada 1988, berdasarkan KEPMEN 036/M-PBUMN/1988, PT INTI (Persero) masuk ke dalam Industri Strategis. Bisnis terbesar pada periode ini adalah Sentral Telepon Digital Indonesia. Pada periode ini pula PT INTI (Persero) berhasil mengembangkan produk SBK 3 Kanal dan Sentral Telepon Digital Indonesia Kecil (STDI-K).

also equipped with *Surface Mounting Technology* (SMT). These *Digital Telephone Central* products contributed significantly to PT INTI (Persero) growth in sales and profits.

Although in 1990 the government opened the competition by permitting two other digital central supplier, namely AT&T and NEC. However, until 1998 the PT INTI (Persero) still remained the market leader in terms of market share of telecommunications infrastructure, amounting to 60% of the total national market.

By utilizing this same plant facility, the scope of PT INTI (Persero) products complemented by *Pulse Code Modulation* (PCM), *Private Automatic Branch Exchange* (PABX), and INTI 111 table telephones, which are all licensed product from Siemens AG.

Besides, PT INTI (Persero) also manufactured products of its own development such as *Small Earth Stations*, *High Frequency* (HF) Radio, *Digital Microwave Radio* (DMR), Telephone System Moving Vehicle, *Coin Public Telephone Box*, and *Self Service Public Telephone*.

Since 1989, PT INTI (Persero) products were grouped into three, namely:

1. Switching Products
2. Transmission Products
3. Terminal products (*Customer Premises Equipment/CPE*).

Technology collaboration undertaken in this period include:

- Switching sector with Siemens AG.
- Transmission sector with the *Japan Radio Company*.
- CPE sector with Siemens AG, BTM, Tamura, Syapura, and Tatung TEL.

Among the three product categories, the biggest contribution in PT INTI (Persero) sales as given by the switching products.

In this era, PT INTI (Persero) had significant reputation and achievements, namely:

- Being a pioneer in the digitization of telecommunication systems and networks in Indonesia.
- Together with Telkom successfully completed telephone automation projects in almost all the district and sub-district capital throughout Indonesia.

In this period, precisely in 1988, based on KEPMEN 036/MPBUMN/1988, PT INTI (Persero) was included into the Strategic Industries. The biggest business in this period was the *Digital Telephone Central* Indonesia. At this period PT INTI (Persero) also successfully developed 3-Channels *Small Earth Station* and *Small Digital Telephone Central* products.



1998 - 2002

Dengan berakhirnya *Technical and Business Cooperation Agreement* (TBCA) dengan Siemens AG, PT INTI (Persero) mengukuhkan diri sebagai penyedia solusi engineering, terutama sebagai sistem integrator untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, tidak terkecuali pembangunan infrastruktur telekomunikasi seluler. Tidak kurang dari 2.000 *base transceiver station* (BTS) telah dibangun oleh PT INTI (Persero) di seluruh penjuru Indonesia.

Pada periode ini aktivitas manufaktur dipersiapkan untuk dipindahkan kepada anak perusahaan PT INTI (Persero). Pada tahun 2002, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2002, dilakukan pembubaran PT Bahana Pakarya Industri Strategis dan PT INTI (Persero) kembali dibina oleh Kementerian Negara Penguasaan BUMN. Bisnis terbesar pada periode ini adalah pembangunan jaringan seluler.

By the end of Technical and Business Cooperation Agreement (TBCA) with Siemens AG, PT INTI (Persero) established its position as engineering solution provider, especially as system integrator for telecommunications infrastructure development in Indonesia, including mobile telecommunications infrastructure development. Not less than 2,000 base transceiver station (BTS) have been built by PT INTI (Persero) throughout Indonesia.

In this period, manufacturing activity was prepared to be transferred to PT INTI (Persero) subsidiary. In 2002, based on Government Regulation No. 52 of 2002, PT Bahana Pakarya Industri Strategis as strategic industry holding company was dissolved and PT INTI (Persero) was developed and nurtured again by the Ministry of SOE Empowerment. The largest business in this period was the development of cellular networks.

2003 - 2008

Pada era ini kerja sama teknologi tidak lagi terkonsentrasi pada Siemens, tetapi dilakukan secara berimbang (*multiprincipal*) dengan beberapa perusahaan multinasional dari Eropa dan Asia. Aktivitas manufaktur tidak lagi ditangani sendiri oleh PT INTI (Persero), tetapi secara *spin-off* dengan mendirikan anak-anak perusahaan dan usaha patungan, seperti:

- Bidang *Customer Premises Equipment* (CPE), dibentuk anak perusahaan bernama PT Inti Pisma International yang bekerja sama dengan JItech International, bertempat di Cileungsi Bogor.
- Bidang mekanik dan plastik, dibentuk usaha patungan dengan PT PINDAD bernama PT Inti Pindad Mitra Sejati, berkedudukan di Bandung, yang resmi berdiri di Juli 2004.
- Bidang-bidang *switching*, akses dan transmisi, dirintis kerja sama dengan beberapa perusahaan multinasional seperti SAGEM, Motorola, Alcatel, Ericsson, dan Samsung.

Bisnis terbesar pada periode ini adalah *Code Division Multiple Access* (CDMA), *Regional Metro Junction* (RMJ), jaringan akses serat optik, serta *Out Site Plant* (OSP), *digital microwave link*, pembangunan tower nasional, CME dan *power supply*, serta *indoor coverage*.

In this era, technology cooperation is no longer concentrated on Siemens, but done in balanced (multiprincipal) with several multinational companies from Europe and Asia. Manufacturing activity was no longer handled by PT INTI (Persero), but through spin-off by setting up subsidiaries and joint ventures, such as:

- *Customer Premises Equipment (CPE) sector, formed a subsidiary named PT Inti Pisma Internasional with JItech International, located in Cileungsi, Bogor.*
- *Mechanics and plastic sector, formed a joint venture with PT Pindad named PT INTI Pindad Mitra Sejati, based in Bandung, which was officially established in July 2004.*
- *Switching, access and transmission sector, pioneered cooperations with some multinational companies such as SAGEM, Motorola, Alcatel, Ericsson, and Samsung.*

The largest business in this period were CDMA, Regional Metro Junction (RMJ) and fiber optic access network as well as Out Site Plant (OSP), digital microwave link, tower construction nationwide, CME and power supply, and indoor coverage.

2009 - 2013

PT INTI (Persero) menghidupkan kembali bisnis manufaktur untuk menopang keberlanjutan Perseroan. Pada periode ini, Perseroan melahirkan produk-produk genuine seperti Smart PBX, General Purpose Agent dengan produk-produk turunannya INTI Power Utilities Monitoring and Control (IPUMC), Flood Forecasting and Warning System (FFWS), I-Perisalah, KWh Meter, dan Multi Service Access Node (MSAN).

Sebagai sistem integrator, PT INTI (Persero) memfokuskan diri pada segmen pasar *Telco*, *Celco*, dan *Private Enterprise*. Untuk pasar *Telco*, PT INTI (Persero) menginisiasi ide modernisasi jaringan akses tembaga milik PT Telkom di seluruh Indonesia menjadi jaringan akses serat optik dengan menggunakan teknologi MSAN, *Gigabit Capable Passive Optical Network* (GPON), dan *Fiber to The Home* (FTTH) dengan pola *Trade in Trade off* atau lebih dikenal dengan nama proyek TITO. Proyek TITO ini telah memodernisasi jaringan akses lebih dari 400 ribu sambungan di delapan Sentral Telepon Otomat (STO) pada akhir tahun 2012.

Di sektor *Celco*, PT INTI (Persero) menginisiasi proyek Rural BTS untuk PT Indosat, membangun *Out Site Plant* (OSP) *fiber optic backbone* untuk BTS milik PT Telkomsel dan PT XL Axiata, serta menyediakan antena untuk operator selular tersebut. Untuk pelanggan korporasi, PT INTI (Persero) menyediakan layanan pengelolaan perangkat teknologi informasi bagi PT Telkom dengan pola *seat management* yang berupa pengelolaan sekitar 35.000 seat (meliputi komputer, laptop, printer, maupun proyektor) dari mulai instalasi, *application management*, hingga *dismantling*. Selain itu, PT INTI (Persero) memiliki solusi *Smart Clinic* yang diperuntukkan bagi pengelola layanan kesehatan seperti rumah sakit maupun klinik.

PT INTI (Persero) revitalized its manufacturing business to accommodate the Company's sustainability. PT INTI (Persero) delivered genuine products such as Smart PBX, General Purpose Agent and its derivatives INTI Power Utilities Monitoring and Control (IPUMC), Flood Forecasting and Warning System (FFWS), I-Perisalah, KWh Meter, dan Multi Service Access Node (MSAN).

As system integrator, PT INTI (Persero) was focusing on market segments TELCO, CELCO, and Private Enterprise. For TELCO market, PT INTI (Persero) initiated the idea of modernising copper access network owned by PT Telkom, Tbk to become fiber optic access network using MSAN, Gigabit Capable Passive Optical Network (GPON), and Fiber to The Home (FTTH) technology and with Trade in Trade off business model, better known as TITO project. This TITO project has modernized access network by over 400 thousand connections at eight Automatic Telephone Central at the end of 2012.

In Celco sector, PT INTI (Persero) initiated Rural BTS project for PT Indosat, built Out Site Plant (OSP) fiber optic backbone for BTS of PT Telkomsel and PT XL Axiata, as well as providing antennas for the cellular operators. For private enterprise customers, PT INTI (Persero) provided information technology device managed service for PT Telkom with seat management model around 35,000 seats (including computers, laptops, printers, and projectors), from installation, application management, to dismantling. In addition, PT INTI (Persero) has a Smart Clinic solution that is intended for health service managers such as hospitals and clinics.

2014 - 2019

PT INTI (Persero) memantapkan langkahnya untuk memasuki bisnis solusi *engineering*, sistem integrator dan pengembangan produk-produk *genuine*. Tidak hanya sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), PT INTI (Persero) memperluas portofolionya ke sektor Energi, *Digital Service* dan *Internet of Things*, serta merintis bisnis baru dalam bidang Pertahanan dan Keamanan, dengan tergabungnya Perseroan dalam *Cluster National Defence and Hightech Industry* (NDHI) hingga 2019.

Pengembangan produk-produk *genuine* PT INTI (Persero) lainnya masih berlanjut, seperti *Converter Kit* untuk bahan bakar minyak (BBM) ke Gas, *Smart Meter* untuk Gas dan Listrik, *Mobile Point of Sales*, Pembaca KTP Elektronik, dan

PT INTI (Persero) is stabilizing its steps to enter the business of engineering solutions, system integrators and development of genuine products. Not only in Information and Communication Technology (ICT) sector, PT INTI (Persero) is expanding its portfolio to Energy, Digital Service and Internet of Things, as well as pioneering new business in Defense sector by joining National Defence and Hightech Industry (NDHI) Cluster until 2019.

Development of PT INTI (Persero) genuine products continues, as Conversion Kit for Fuel to Gas, Smart Meters for gas and electricity, Mobile Point of Sales, Electronic ID Card Reader, etc. PT INTI (Persero) also works in cooperation for development

sebagainya. PT INTI (Persero) juga bekerja sama dalam pengembangan dan produksi untuk sistem transportasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk produk *Automatic Dependent Surveillance Broadcast* (ADSB), serta dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Sistem Informasi Dini Lalu Lintas (SINDILA) dan *Structure Health Management System* (SIMBAGAS).

Dalam sektor Energi, PT INTI (Persero) menyediakan solusi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk PT PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pada periode ini, PT INTI (Persero) juga merevitalisasi bisnis manufakturnya untuk mengakomodasi keberlanjutan perusahaan dan menstabilkan untuk memasuki bisnis solusi teknik, integrator sistem, pengembangan produk asli, dan manajemen kursi. Tidak hanya di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), PT INTI (Persero) memperluas portofolionya menjadi *Manufacture and Assembly, Managed Service, Digital Service, dan System Integrator*.

and production of transport system with Agency for Assessment and Application of Technology for Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADSB), as well as with Ministry of Public Works and People Housing for Early Traffic Information System (SINDILA) and Structure Health Management System (SIMBAGAS).

In Energy sector, PT INTI (Persero) provides Solar Power Plants for PT PLN and Ministry of Energy and Mineral Resources.

In this period, PT INTI (Persero) also revitalized its manufacturing business to accommodate the company's sustainability and stabilize to enter the business of engineering solutions, system integrators, development of genuine products, and seat management. Not only in Information and Communication Technology (ICT) sector, PT INTI (Persero) is expanding its portfolio to Manufacture and Assembly, Managed Service, Digital Service, and System Integrator.

2020-2025

Akhir tahun 2020, Perusahaan melakukan redefinisi Visi dan Misi Perusahaan dalam rangka perbaikan kinerja secara holistik. Tahun 2020 Perusahaan melakukan rolling RJPP 2020 - 2024 dengan jargon *TURN AROUND* dengan target pada tahun 2024 Perusahaan dapat menjadi Perusahaan yang dikategorikan menjadi Perusahaan yang sehat dan berkinerja baik.

Hal ini dimulai dengan memfokuskan kembali bisnis perusahaan pada portfolio MSDM (*Manufacture & Assembly - System Integrator - Digital Service -Managed Service*) dan segmen bisnis TGED (*Telco - Government - Enterprise - Defense*). Perkembangan bisnis secara porsi penjualan maupun pengembangan produk akan mengacu pada fokus portfolio dan segmen bisnis.

PT INTI (Persero) memperkuat posisinya untuk fokus pada lini bisnis di bidang Industri dan Perakitan, Layanan yang Dikelola, Layanan Digital, dan Integrator Sistem. Untuk mendukung bisnisnya, PT INTI (Persero) juga mengoperasikan INTI *Smart Industrial Park*, fasilitas produksi seluas delapan hektar di Jalan Moch Toha No 225 yang memproduksi perangkat telekomunikasi dan elektronik.

At the end of 2020, the Company redefined the Company's Vision and Mission in order to improve performance holistically. In 2020 the Company will roll out RJPP 2020 – 2024 with the jargon TURN AROUND with a target in 2024 the Company can become a company that is categorized as a healthy and well-performing company.

This started by refocusing the company's business on the MSDM portfolio (Manufacture & Assembly – System Integrator - Digital Service - Managed Service) and the TGED (Telco – Government – Enterprise – Defense) business segment. Business development in terms of sales and product development will refer to the focus of the portfolio and business segments.

PT INTI (Persero) strengthens its position to focus on business lines in the fields of Manufacture and Assembly, Managed Service, Digital Service, and System Integrator. To support its business, PT INTI (Persero) also operates INTI Smart Industrial Park, an eight hectares production facility on Jalan Moch Toha No 225 which produces telecommunications and electronic devices.

Kegiatan dan Bidang Usaha

Activities and Fields of Business



Tujuan Pendirian

Purpose of Establishment



Dalam Akta Pendirian Perusahaan dinyatakan bahwa tujuan pendirian perusahaan adalah untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang industri telekomunikasi, elektronika, informatika, kelistrikan atau energi, pertahanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT INTI (Persero) melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

In the Deed of Establishment it is stated that the purpose of establishing the company is to implement and support government policies and programs in the fields of economics and national development, particularly in the telecommunications industry, electronics, information technology, electrical or energy, defense and optimal use of company resources to make a profit by producing goods or services of high quality and strong competitiveness, in order to increase the company value by applying the principles of limited liability companies.

To achieve these aims and objectives, PT INTI (Persero) carries out the following efforts:



Produksi alat atau perangkat bidang telekomunikasi, elektronika, informatika, termasuk piranti lunak yang berkaitan, juga untuk diaplikasikan dalam bidang energi, perhubungan, infrastruktur, pertahanan keamanan, dan lain-lain.

Production of equipment or devices in the field of telecommunications, electronics, informatics, including related software, as well as for their application in the fields of energy, transportation, infrastructure, defense and security.



Perdagangan alat atau perangkat sebagaimana disebutkan di atas baik hasil produk sendiri maupun hasil produk pihak lain, juga melakukan pemasokan di bidang telematika, perhubungan, energi dan kelistrikan, serta melakukan perdagangan umum termasuk ekspor impor, distribusi, dan keagenan.

Production of equipment or devices in the field of telecommunications, electronics, informatics, including related software, as well as for their application in the fields of energy, transportation, infrastructure, defense and security.



Penyediaan jasa yang berkaitan dengan produksi dan perdagangan di atas, termasuk jasa desain dan rekayasa, perakitan, instalasi dan tes, pemborongan, konstruksi, pengangkutan, pemeliharaan, purnajual, *managed service*, penelitian dan pengembangan, konsultasi, manajemen proyek, pelatihan, dan sebagainya.

Production of equipment or devices in the field of telecommunications, electronics, informatics, including related software, as well as for their application in the fields of energy, transportation, infrastructure, defense and security.

Selain itu, sesuai dengan Anggaran Dasar, maka dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, PT INTI (Persero) dapat melakukan kegiatan usaha pendukung antara lain dalam bentuk kerja sama dan/atau penyewaan aset, lahan, gedung, gudang, ruang perkantoran, bengkel dan properti lainnya, serta kerja sama dan/atau penyewaan mesin-mesin, alat ukur, dan peralatan produksi lainnya.

PT INTI (Persero) telah memiliki rekam jejak yang panjang dalam manufaktur dan penyelesaian proyek-proyek di bidang industri telekomunikasi dan teknologi informasi.

Layanan PT INTI (Persero) cukup luas mulai dari Instalasi Kabel Rumah (IKR), pengerjaan dan pemeliharaan *Outside Plant* (OSP), *Spare Part Management System* (SPMS), Bantuan Teknis, *Site Acquisition, Repair & Maintenance*, hingga pekerjaan konektivitas pita lebar dan digitalisasi penyiaran.

Sebagai penyedia perangkat cerdas untuk sektor telekomunikasi, PT INTI (Persero) menyediakan perangkat-perangkat jaringan serat optik (*Fiber to the Home* atau FTTH) seperti *Optical Network Terminal* (ONT), *Set Top Box* (STB),

In addition, in accordance with the Articles of Association, PT INTI (Persero) may conduct supporting business activities, among others in the form of cooperation and/or leasing of assets, land, buildings, warehouses, office spaces, workshops and other property, as well as cooperation and/or rental of machines, measuring instruments, and other production equipment.

PT INTI (Persero) has a long track record in manufacturing and completing projects in the telecommunications and information technology industries.

PT INTI (Persero) services range from Home Wiring Installation or New Installation, implementation and maintenance of Outside Plant (OSP), Spare Part Management System (SPMS), Technical Assistance, Site Acquisition, Repair & Maintenance broadband connectivity and broadcasting digitalization.

As a provider of smart device for telecommunication sector, PT INTI (Persero) provides network devices for Fiber to The Home (FTTH) such as the Optical Network Terminal (ONT), the Set Top Box (STB), as well as Home Long Term Evolution (LTE), and

juga *Home Long Term Evolution* (LTE), dan Antenna untuk jaringan seluler.

Lalu untuk mendukung tantangan dunia atas perlunya alternatif penyediaan energi, sejak tahun 2011, PT INTI (Persero) telah berkontribusi sebagai *System Integrator* atau *Engineering Procurement Contractor* pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di berbagai pelosok Indonesia.

Sejak tahun 2017, PT INTI (Persero) pun mengembangkan produk-produk dengan perangkat cerdas untuk mendukung penghematan energi yaitu INTI GAS (Meter Gas Prabayar), *Converter Kit*, dan *Energy Limiter*.

Infrastruktur dan Transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas yang berperan penting dalam mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan. Menurut *World Economic Forum* (WEF), *Global Competitiveness Index* (CGI) Indonesia masih berada pada peringkat 34 dari 144 negara di dunia, di mana salah satu penyebab belum maksimalnya daya saing Indonesia adalah kualitas infrastruktur.

Mengingat pentingnya infrastruktur dan transportasi bagi negara, PT INTI (Persero) memberikan kontribusi melalui salah satu lini bisnis yang memiliki produk unggulan seperti:

1. Radar Cuaca, yaitu radar untuk mencari curah hujan, menghitung gerakannya dan memperkirakan jenisnya.
2. Sistem Informasi Dini Lalu Lintas (SINDILA).
3. SIMBAGAS, yaitu perangkat untuk memonitor kesehatan struktur jembatan.
4. *Automatic Dependent Surveillance-Broadcast* (ADS-B).

Kontribusi PT INTI (Persero) difokuskan pada bidang teknologi informasi, komunikasi dan elektronika, seperti alat komunikasi, aplikasi, *integrated communication system*, *encryption algorithm and system*, *cyber defense*, anti-jammer, dan radar.

Teknologi finansial adalah bisnis yang menyediakan jasa keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern. Dari berbagai subsektor teknologi finansial, pembayaran digital masih mendominasi transaksi teknologi finansial di dunia. PT INTI (Persero) menyediakan perangkat INTIPay yang merupakan *Mobile Point of Sales* (MPOS) dengan kemampuan membaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Perangkat ini mendukung kemudahan transaksi finansial digital yang dilengkapi dengan verifikasi data pelaku transaksi, sehingga mendukung berbagai program pemerintah seperti transaksi dalam program subsidi komoditas tertentu seperti bahan bakar minyak (BBM), serta Layanan Keuangan Tanpa Kantor untuk Keuangan Inklusif.

Pada tahun 2022 sehubungan dengan adanya program *Analog Switch Off* (ASO) atau migrasi siaran televisi analog

Antenna for cellular networks.

Then to Support the world's challenges regarding the need for alternative energy resources, since 2011, PT INTI (Persero) has contributed as a System Integrator or Engineering Procurement Contractor of Solar Power Plant and Micro Hydro Power Plant in remote areas all over Indonesia.

Since 2017, PT INTI (Persero) has also developed products with smart devices that promote energy savings such as INTI GAS (Prepaid Gas Meter), Converter Kit, and Energy Limiter.

Infrastructure and Transportation is one of the chain of goods distribution network and mobility that plays an important role in encouraging and supporting all aspects of life. According to the World Economic Forum (WEF), Indonesia's Global Competitiveness Index (CGI) is still ranked 34 out of 144 countries in the world, where one of the reasons for Indonesia's lack of competitiveness is the quality of infrastructure.

Given the importance of infrastructure and transportation for the country, PT INTI (Persero) contributes through one business line that has excellent products such as:

1. *Weather Radar*, a radar to find rainfall, calculate movement and estimate its type.
2. *Traffic Information System* (SINDILA).
3. *SIMBAGAS*, a device to monitor the health of the bridge structure.
4. *Automatic Dependent Surveillance Broadcast* (ADS-B).

PT INTI (Persero)'s contribution is focused on information technology, communication and electronics, such as communication tools, applications, integrated communication systems, encryption algorithms and systems, cyber defense, anti-jammer, and radar.

Financial technology is a business that provides financial services by utilizing modern software and technology. Of the various subsectors of financial technology, digital payments still dominate the financial technology transactions in the world. PT INTI (Persero) provides INTIPay device which is Mobile Point of Sales (MPOS) with ability to read Electronic Identity Card. It supports the ease of digital financial transactions with data verification of transaction actor, to be able to support government programs such as transactions in certain commodity subsidy programs such as fuel, as well as Officeless Finance Services for Financial Inclusion.

In 2022 due to the Analog Switch Off (ASO) program or the migration of analogue to digital television broadcasts, the



ke digital, Perseroan ikut mendukung program pemerintah tersebut dengan ikut menyediakan *Set Top Box* (STB) DVB-T2. INTI DVB-T2 1407 dibuat mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis Sistem Peringatan Dini Bencana Alam pada Alat dan Perangkat Penerima Televisi *Broadcasting Terrestrial-Second Generation*.

Selain itu PT INTI (Persero) menyediakan layanan dan perangkat seperti *Defense Information Technology System*, *Seat Management*, *Smart Health Management System* (SHMS), Sistem Informasi Dini Lalu Lintas "SINDILA", *Smart City*, *Building Energy Management System* (BEMS) dan *Smart Light*, i-Perisalah, BAP Elektronik, dan sebagainya.

Untuk mendukung perwujudan visi Perseroan "Menjadi Produsen *Smart Products* Terbaik di Sektor Telekomunikasi di Indonesia", maka revitalisasi manufaktur menjadi salah satu strategi utama perusahaan yang dilakukan mulai tahun 2017. Revitalisasi Manufaktur merupakan revitalisasi fasilitas dan aktivitas produksi dari mulai desain produk, pengadaan material, inserting komponen sampai *final assembly*, dan pengetesan produk.

Fasilitas manufaktur yang akan kembali dibangkitkan oleh PT INTI (Persero) akan menggunakan aset berupa bangunan dan tanah milik perusahaan yang berlokasi di Jalan Moch. Toha Nomor 225, Dayeuhkolot, Bandung. Area tersebut sebelumnya merupakan fasilitas manufaktur yang beroperasi pada akhir dekade 1980-an sampai dengan awal dekade 2000-an.

Saat ini, aset tersebut dioptimalisasi dengan cara disewakan kepada tenant, dan dengan dilakukannya revitalisasi terhadap fasilitas manufaktur tersebut, Perseroan akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal atas aset tetap tersebut. Dengan kembali beroperasinya fasilitas manufaktur sesuai dengan standar industri pada saat ini, diharapkan Perseroan akan mampu mewujudkan visinya Menjadi Produsen *Smart Products* Terbaik di Sektor Telekomunikasi di Indonesia.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2021-2025, pada tahun 2022 merupakan periode untuk semakin memperkuat terwujudnya visi perusahaan yaitu "Menjadi Produsen *Smart Products* Terbaik di Sektor Telekomunikasi di Indonesia".

Tahun 2022 telah dilalui Perseroan dengan mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kualitas fundamental Perseroan dimulai dari melakukan *reprofiling* utang Perseroan kepada perbankan dan mitra, memperbaiki pencatatan seluruh transaksi keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta

Company will also support the government's program by participating in providing a DVB-T2 Set Top Box (STB). INTI DVB-T2 1407 was made referring to the Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 04 of 2019 concerning Technical Requirements for Telecommunication Tools and/or Equipment for the Purposes of Broadcast Television and Broadcast Radio Operations, and Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 3 of 2014 concerning Technical Requirements for Warning Systems Early Natural Disasters in Terrestrial-Second Generation Broadcasting Television Receiving Devices and Equipment.

In addition, PT INTI (Persero) provides services and devices such as Defense Information Technology System, Seat Management, Smart Health Management System (SHMS), Early Traffic Information System "SINDILA", Smart City, Building Energy Management System (BEMS) and Smart Light, i-Perisalah, BAP Electronics, and so on.

To support the realization of the Company's vision as the "To be the Best Smart Product Manufacturer in the Telecommunications Sector in Indonesia", the revitalization of manufacturing has become one of the company's main strategies starting from 2017. Revitalization of Manufacturing is a revitalization of production activities and facilities from product design, material procurement, component inserting to final assembly, and product testing.

Manufacturing facilities to be re-generated by PT INTI (Persero) will use the assets in the form of buildings and land owned by the company located at Moch. Toha Street Number 225, Dayeuhkolot, Bandung. The area was previously a manufacturing facility that operated in the late 1980s until the early decades of the 2000s.

Currently, the assets are optimized by leasing to tenants. And with the revitalization of the manufacturing facility, the Company will obtain maximum results on the fixed assets. With the re-operation of manufacturing facilities in accordance with current industry standards, it is hoped that the Company will be able to realize its vision of becoming the best smart product manufacturer in the telecommunications sector in Indonesia.

As stated in the Company Long Term Plan 2021-2025, 2022 is the year to further strengthen the realization of the company's vision of "To Be the Best Smart Products Manufacturer in the Telecommunications Sector in Indonesia".

The year 2022 has been passed by the Company by taking strategic steps to improve the fundamental quality of the Company starting from reprofiling the Company's debt to banks and partners, improving the recording of all financial transactions using accountable accounting principles, and making efficiency efforts. These efforts will be continued in

melakukan upaya-upaya efisiensi. Upaya-upaya ini terus dilanjutkan di tahun 2022 untuk mencapai filosofi hadirnya INTI untuk Indonesia dan mencapai visi Perseroan untuk menjadi produsen *smart products* terbaik di sektor telekomunikasi di Indonesia.

Untuk itu, *Annual Message* tahun 2022 adalah “Membangun Fundamental Bisnis yang Sehat dengan Meningkatkan *Recurring Business* untuk Mewujudkan #INTIBangkit” yang menggambarkan pada tahun ini Perseroan masih tetap memfokuskan pada restrukturisasi bisnis dan finansial untuk membentuk kinerja Perseroan yang lebih baik di masa yang akan datang. Bersamaan dengan tantangan Perseroan untuk meyakinkan seluruh mitra usaha atas upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan yang diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat untuk mencapai masa depan PT INTI (Persero) yang lebih baik sesuai dengan Horizon-1 dalam rencana lima tahunan Perseroan, menjadi INTI Bangkit. Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2022 ini, Perseroan menargetkan penjualan sebesar Rp300 miliar, dengan mempertimbangkan berbagai aspek khususnya pengaruh pandemi *Covid-19* termasuk kemampuan penyelesaian proyek dan pendanaan.

Pada tahun 2022 Perseroan mencanangkan pencapaian kinerja dengan menetapkan sektor *Telco, Enterprise, Government*, dan *Defense*, sebagai kastemer utama Perseroan.

Dalam rangka mengimplementasikan rencana jangka panjang perusahaan, PT INTI (Persero) menempuh berbagai upaya dalam mengembangkan bisnisnya. Dari bisnis eksisting, ada beberapa yang tetap dipertahankan (*sustaining*). Sementara itu, bisnis eksisting yang potensial akan dijalankan dalam skala yang lebih besar (*scaling*) dengan cara memperdalam penetrasi pada pasar eksisting, maupun mengembangkan pasar baru (*market development*). Perseroan pun terus melakukan pengembangan usaha maupun produk untuk tetap mengikuti perkembangan teknologi dan trend pasar agar dapat menangkap potensi pasar baru (*scoping*).

Secara struktur organisasi, untuk dapat mencapai rencana jangka panjang tersebut, dilakukan pemisahan fungsi yaitu penetrasi pasar eksisting dan pengembangan pasar serta pengembangan portofolio baru dan diversifikasi usaha. Fungsi penetrasi pasar eksisting dan pengembangan pasar merupakan fungsi lini pemasaran. Sementara itu, fungsi pengembangan portofolio baru dan diversifikasi usaha merupakan fungsi lini pengembangan bisnis.

2022 to achieve the philosophy of INTI's presence for Indonesia and to achieve the Company's vision to become the best smart product manufacturer in the telecommunications sector in Indonesia.

For this reason, the 2022 Annual Message is “Building Healthy Business Fundamentals by Increasing Recurring Business to Realize #INTIBangkit” which illustrates that this year the Company is still focusing on business and financial restructuring to shape the Company's better performance in the future. Simultaneously with the Company's challenge to convince all business partners of the improvement efforts that will be carried out which are expected to become a strong basis for achieving a better future for PT INTI (Persero) in accordance with Horizon-1 in the Company's five year plan, becoming INTI Bangkit. In the 2022 Corporate Work Plan and Budget, the Company is targeting sales of Rp 300 billion, taking into account various aspects, especially the impact of the Covid-19 pandemic including the ability to complete projects and funding.

In 2022 the Company plans to achieve performance by establishing the Telco, Enterprise, Government and Defense sector, as the Company's main customers.

*In order to implement the company's long-term plan, PT INTI (Persero) takes various efforts to develop its business. Of the existing businesses, there are some that are maintained (*sustaining*). Meanwhile, potential existing businesses will be carried out on a larger scale (*scaling*) by deepening penetration in the existing market, as well as developing new markets (*market development*). The Company also continues to develop business and products to keep abreast of technological developments and market trends in order to capture new market potential (*scoping*).*

In terms of organizational structure, in order to achieve the long-term plan, the functions are separated, namely the function of penetrating the existing market and developing the market as well as developing a new portfolio and diversifying business. The existing market penetration and market development functions are functions of the marketing line. Meanwhile, the functions of developing new portfolios and business diversification are functions of business development lines.



Wilayah Operasional

Operational Area

Kantor Pusat PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) berada di Jl. Moch. Toha Nomor 77 Kota Bandung 40253, Jawa Barat, dan memiliki kantor cabang yang beralamat di Jl. Balitung 1 Nomor 17 (Senopati) Kota Jakarta Selatan 12110.

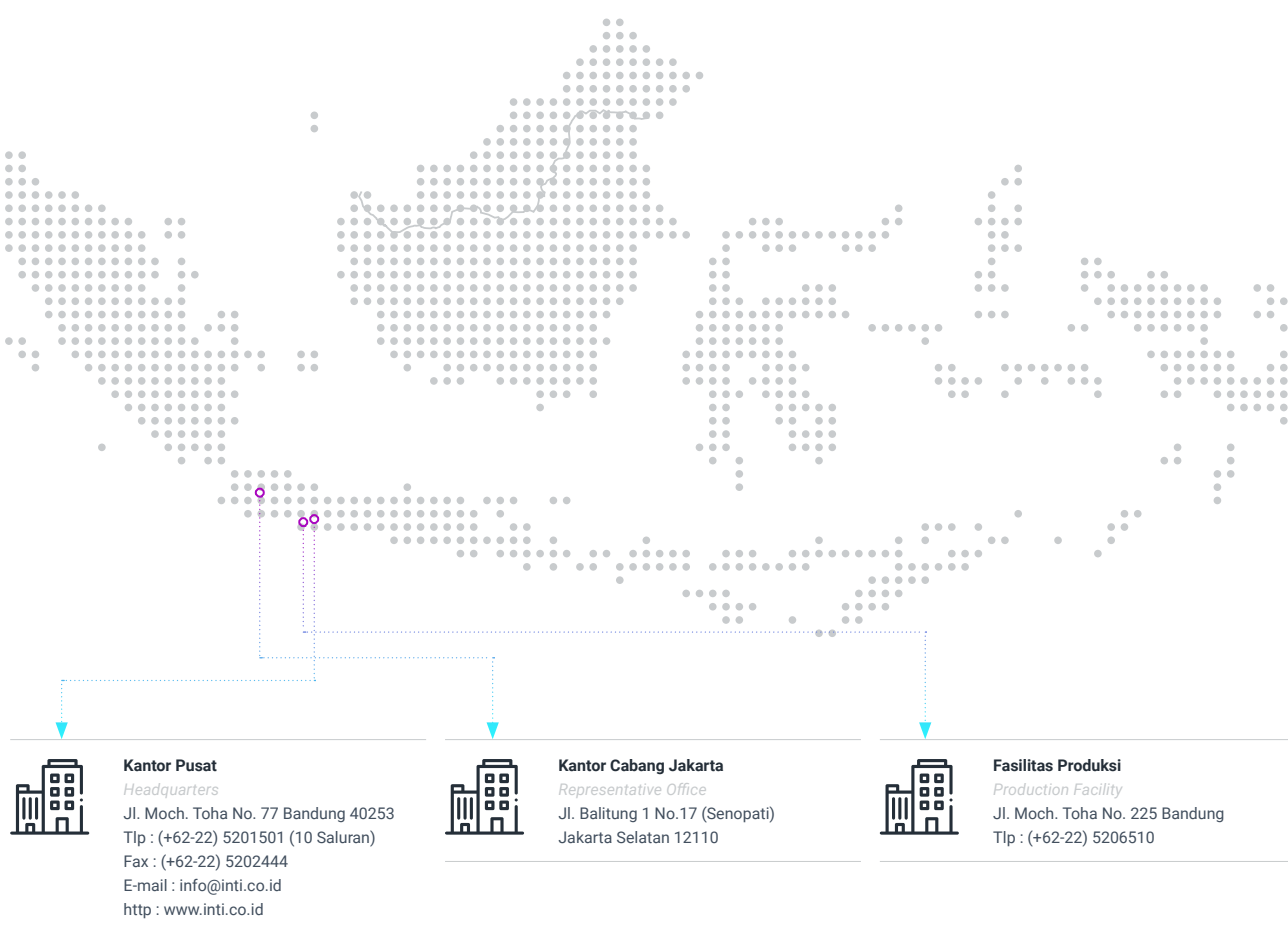
Selain itu, Perusahaan pun mempunyai Kawasan Fasilitas Produksi untuk mendukung kegiatan usahanya yang juga berlokasi di Bandung, tepatnya di Jl. Moch Toha Nomor 225 Kabupaten Bandung, tidak jauh dari lokasi kantor pusat berada.

PT INTI (Persero) pun menjalankan aktivitas kerjanya di seluruh Indonesia, sesuai dengan lokasi proyek yang ditangani oleh Perusahaan.

The Head Office of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) is on Jl. Moch Toha Number 77 Bandung City 40253, West Java, and has a branch office located at Jl. Balitung 1 Number 17 (Senopati) South Jakarta City 12110.

Apart from that, the Company also has a Production Facility Area to support its business activities which is also located in Bandung, precisely on Jl. Moch Toha Number 225 Bandung Regency, not far from where the head office is located.

PT INTI (Persero) also carries out its work activities throughout Indonesia, according to the project locations handled by the Company.



Struktur Organisasi

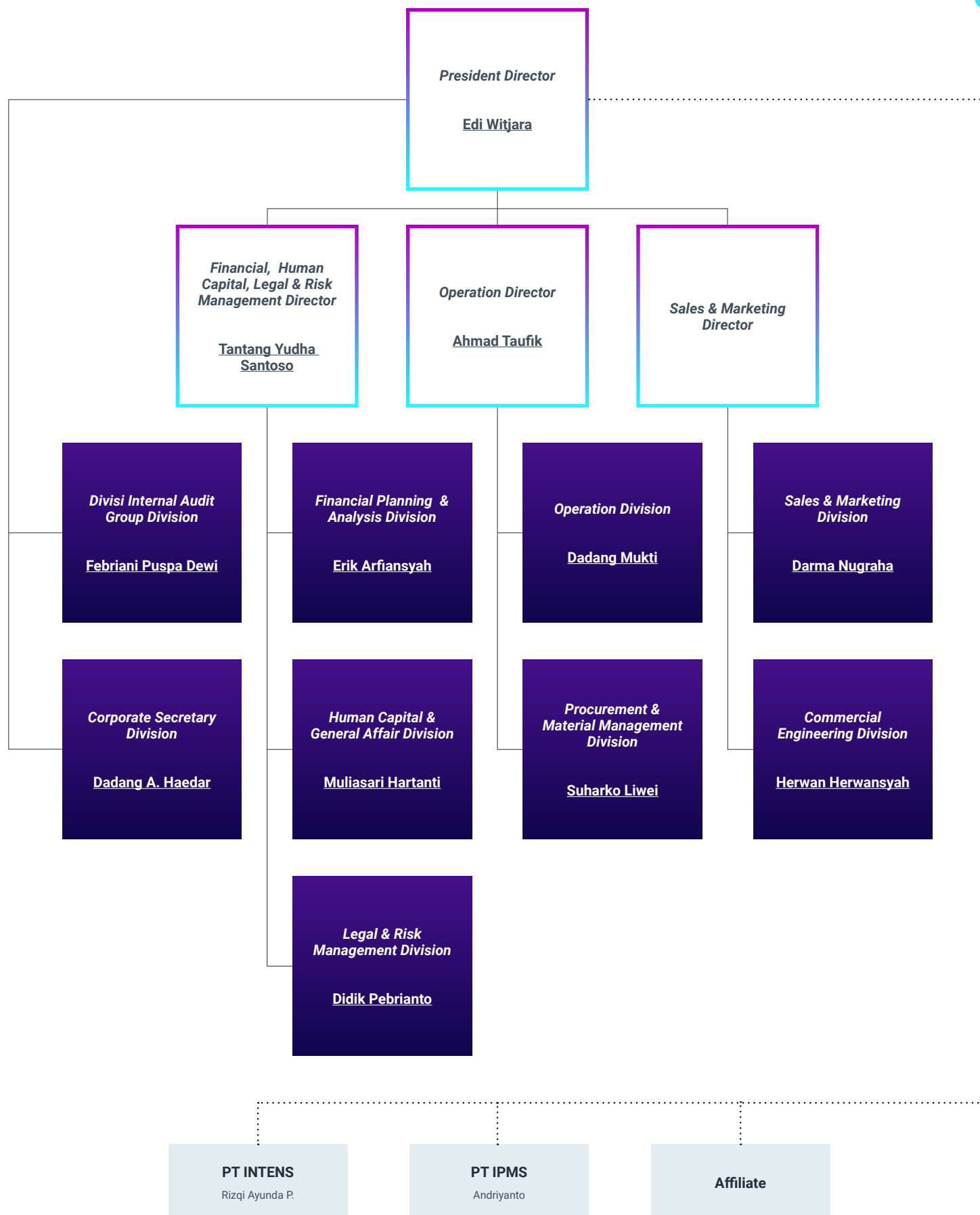
Organizational Structure

Untuk menghadapi perubahan dan persaingan yang semakin ketat dalam industri telekomunikasi serta untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan internal maupun eksternal Perseroan, diperlukan perubahan yang bersifat strategis guna mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan jangka panjang Perseroan.

Struktur Organisasi Perseroan merujuk pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-56/MBU/2014 tertanggal 18 Maret 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Selanjutnya guna mempersiapkan organisasi agar lebih lincah, maka melalui Surat Keputusan Direksi Nomor KN-022/2022 tertanggal 30 Desember 2022, telah ditetapkan perubahan struktur organisasi menjadi organisasi yang lebih customer centric yaitu sebagai berikut:

To deal with changes and increasingly fierce competition in the telecommunications industry and to adapt to the Company's internal and external environment, strategic changes are needed to support the achievement of the Company's vision, mission, and long-term goals.

The Company's organizational structure refers to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-56/MBU/2014 dated March 18, 2014, concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Furthermore, to prepare the organization to be more agile, through the Decree of the Board of Directors Number KN-022/2022 dated December 3, 2022, changes to the organizational structure have been determined to become a more customer-centric organization, as follows:



Keanggotaan Asosiasi

Association Membership

Perseroan terus berusaha memperluas jaringan bisnis dan juga menjalin komunikasi yang luas untuk dapat lebih mengikuti informasi perkembangan industri.

Hingga saat ini, Perseroan telah terdaftar dalam keanggotaan asosiasi sebagai berikut:

The Company continues to strive to expand its business network and also provide extensive communication to be able to keep up with information on industry developments.

Until now, the Company has been registered in the following associations:

Nama Asosiasi/Organisasi <i>Association/Organization Name</i>	Ruang Lingkup Asosiasi <i>Scope of Association</i>	Periode Keanggotaan <i>Membership Period</i>
Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI) <i>Association of Indonesian Electrical Equipment Manufacturers</i>	Nasional <i>National</i>	2023
Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia (ASPILUKI) <i>Indonesian Telematics Software Association</i>	Nasional <i>National</i>	2023
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) <i>Chambers of Commerce and Industry</i>	Nasional <i>National</i>	2023
Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) <i>Indonesian National Construction Implementation Association</i>	Nasional <i>National</i>	2023



Visi, Misi & Strategi

Company Vision, Mission and Strategy

Visi Perusahaan

Company Vision

MENJADI PERUSAHAAN TEKNOLOGI TERPERCAYA DENGAN CAKUPAN INDUSTRI YANG LUAS DAN BERKUALITAS

Becoming a Trusted Technology Company with Broad Industry Coverage and Quality

Untuk menyesuaikan dengan tantangan industri telekomunikasi yang sangat *volatile*, maka Perusahaan mulai tahun 2022 menyesuaikan Visi dan Misi Perusahaan. Diharapkan dengan Visi dan Misi tersebut, Perusahaan dapat mencapai kinerja yang diharapkan dan memiliki posisi yang lebih kuat dalam industri.

Visi dan Misi ini telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Direksi dan Komisaris.

To adapt to the challenges of the highly volatile telecommunications industry, the Company, starting in 2022, has adjusted the Company's Vision and Mission. It is hoped that with this Vision and Mission, the Company can achieve the expected performance and have a stronger position in the industry.

This vision and mission has been approved by the Board of Commissioners at the Joint Meeting of the Board of Directors and Commissioners.

Misi Perusahaan

Company Mission

Perwujudan Visi Perseroan sebagaimana dituangkan di atas akan dicapai melalui upaya-upaya yang terkandung dalam Misi Perseroan sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai pemangku kepentingan.
2. Menciptakan solusi produk-produk yang smart dan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan mampu menyelesaikan permasalahan pelanggan dengan efektif dan efisien, serta memaksimalkan kandungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
3. Meningkatkan *business operational excellence* perusahaan melalui pengembangan kompetensi *Human Capital*.
4. Menjadi mitra pemerintah dan sinergi sesama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

The manifestation of the Company's Vision as outlined above will be achieved through the means contained in the Company's Mission as follows:

1. *Increase stakeholder values.*
2. *Creating smart and innovative product solutions that suit market needs and are able to solve customer problems effectively and efficiently, and maximize domestic content level.*
3. *Improve the company's business operational excellence through developing Human Capital competencies.*
4. *Become a government partner and synergize with fellow State-Owned Enterprises (SOEs) in encouraging economic growth.*

Tujuan Jangka Panjang Perusahaan

Long-Term Company Objectives

Tujuan perusahaan jangka panjang yang merupakan penjabaran dari visi dan misi perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Menjadi perusahaan yang memiliki kinerja yang baik, ditinjau dari perspektif keuangan, pelanggan, proses internal maupun organisasi dan SDM.
2. Menjadi perusahaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan.
3. Memberikan nilai yang tinggi untuk produk dan jasa kepada pelanggan.
4. Memberikan nilai kembali yang memadai atas saham.
5. Turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya di bidang industri telekomunikasi, pertahanan, elektronika dan informatika dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas.

Long-term company objectives which elaborate the vision and mission of the company are as follows:

1. *To become a company with good performance, viewed from financial, customer, internal process, organizational and human resource perspectives.*
2. *To become a company which is able to improve the welfare of employees.*
3. *To deliver high values of products and services to the customers.*
4. *To provide adequate return value on shares.*
5. *To implement and support government policies and programs in the fields of economics and national development in general, particularly in the telecommunications industry, defense, electronics, information technology, electrical or energy by applying the principles of limited liability companies.*



Strategi Perusahaan

Company Strategy

Strategi Perseroan dalam jangka panjang guna mencapai target kinerja yang berkelanjutan dijabarkan dalam *Rolling Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2023-2027* dengan rumusan sebagai berikut:

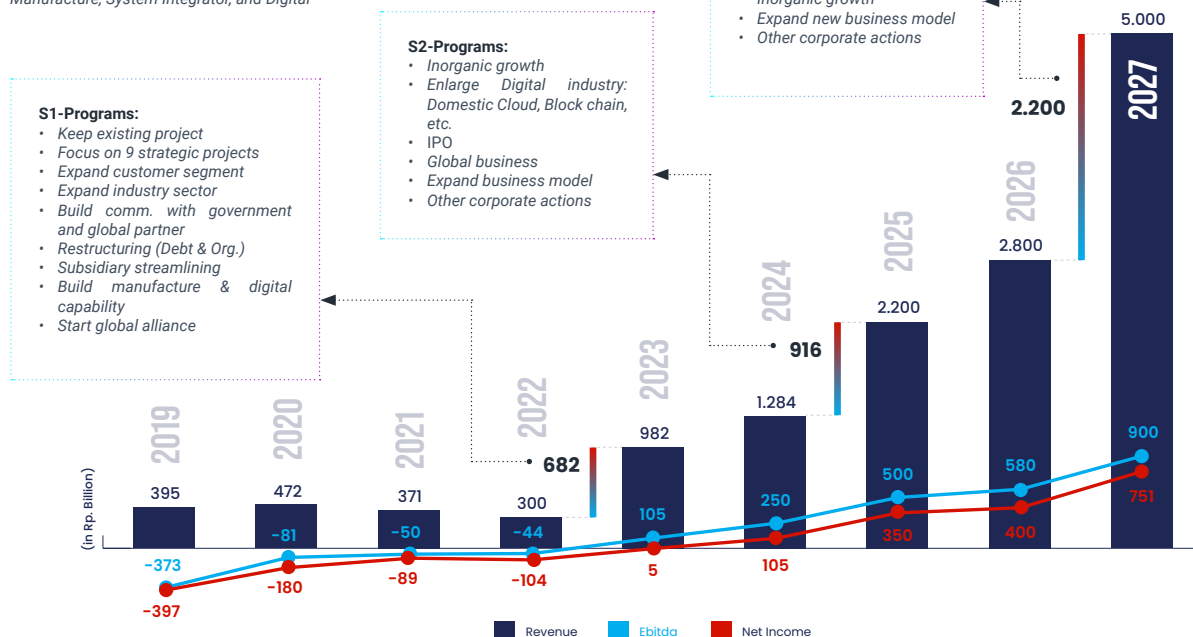
The long-term strategy of the Company in order to achieve sustainable performance targets is outlined in the Company's Long Term Plan 2023-2027 with the following formula:

Goal in 2025 : IPO

Goal in 2027 : 5T Company

Business Line :

Manufacture, System Integrator, and Digital



Budaya dan Nilai Perusahaan

Corporate Culture and Values



PT INTI (Persero) menetapkan tata nilai sebagai panduan perilaku dalam bekerja bagi seluruh karyawan Perseroan. Tata nilai tersebut merupakan salah satu aspek yang menunjang keberhasilan pencapaian tujuan Perseroan, sekaligus identitas dan budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Tata nilai INTI mengalami perubahan setelah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia BUMN pada 1 Juli 2020.

Surat Edaran ini diterbitkan sebagai panduan agar setiap BUMN dapat mengimplementasi dan menginternalisasi Core Values tersebut secara konsekuen dan berkelanjutan sehingga melahirkan perilaku keseharian dan membentuk budaya perusahaan (*corporate culture*) yang menjadi dasar pembentukan karakter sumber daya manusia di lingkungan BUMN, Anak Perusahaan, serta Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi.

Oleh karena itu, mengacu pada Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia BUMN itu, PT INTI (Persero) pun menerbitkan Keputusan Direksi Nomor KN.029/2020 tentang Budaya Perusahaan dengan Core Values AKHLAK tertanggal 29 September 2020. Keputusan Direksi ini merupakan komitmen Perseroan untuk menyelaraskan budaya perusahaan dengan Core Values AKHLAK.

Dengan demikian, sejak 29 September 2020, tata nilai Perseroan yang semula mengimplementasikan "INTI" berubah menjadi AKHLAK, dengan uraian sebagai berikut:

1. Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Panduan Perilaku :

- Memenuhi janji dan komitmen.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

2. Kompetensi

Terus belajar dan meningkatkan kapabilitas.

Panduan Perilaku :

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

3. Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan.

Panduan Perilaku :

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

PT INTI (Persero) establishes values as a behavior guide in working for all employees of the Company. These values are one of the aspects that support the achievement of the Company's goals, as well as identity and work culture that supports continuous performance improvement.

The CORE values changed after the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) issued Circular Letter Number SE-7/MBU/07/2020 concerning the Core Values of State Owned Enterprise Human Resources on July 1, 2020.

This Circular Letter is issued as a guide so that each BUMN can implement and internalize the Core Values consistently and sustainably to create daily behavior and form a corporate culture that becomes the basis for the formation of human resource character in the BUMN, Subsidiary, and Consolidated Affiliated Companies.

Therefore, referring to the Circular Letter of the Ministry of SOEs (BUMN) Number SE-7/MBU/07/2020 concerning the Core Values of SOE Human Resources, PT INTI (Persero) also issued a Board of Directors Decree Number KN.029/2020 concerning Corporate Culture with AKHLAK Core Values dated September 29, 2020. This Board of Directors Decree is the Company's commitment to align corporate culture with AKHLAK Core Values.

Thus, since 29 September 2020, the Company's values that originally implemented "INTI" have changed to AKHLAK, with the following description:

1. Trust

Uphold the trust given.

Behavioral Guidelines :

- *Keep promises and commitments.*
- *Responsible for the tasks, decisions, and actions taken.*
- *Stick to moral and ethical values.*

2. Competence

Continue to learn and improve capabilities.

Behavioral Guidelines :

- *Increase self-competence to respond to ever-changing challenges.*
- *Help others learn.*
- *Complete tasks of the highest quality.*

3. Harmonious

Caring for each other and respecting differences.

Behavioral Guidelines :

- *Respect everyone regardless of their background.*
- *Helpful to others.*
- *Build a conducive work environment.*

4. Loyal

Berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Panduan Perilaku :

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

5. Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan.

Panduan Perilaku :

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- Bertindak proaktif.

6. Kolaborasi

Senantiasa membangun kerja sama yang sinergis.

Panduan Perilaku :

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

4. Loyal

Dedicated to prioritizing the interests of the nation and state.

Behavioral Guidelines :

- *Maintain the good name of fellow employees, leaders, SOEs, and the State.*
- *Willing to sacrifice to achieve a greater goal.*
- *Obey the leadership as long as it is not against the law and ethics.*

5. Adaptive

Continue to innovate and be enthusiastic in facing change.

Behavioral Guidelines :

- *Quickly adjust to being better.*
- *Continuously making improvements by following technological developments.*
- *Be proactive.*

6. Collaboration

Always build synergistic cooperation.

Behavioral Guidelines :

- *Provide opportunities for various parties to contribute.*
- *Be open to working together to generate added values.*
- *Mobilizing the use of various resources for common goals.*

Sosialisasi dan Internalisasi Tata Nilai AKHLAK

Socialization and Internalization of AKHLAK Values



Sosialisasi dan internalisasi tata nilai AKHLAK di lingkungan PT INTI (Persero) pun dilakukan secara berkesinambungan sejak Perseroan menetapkan AKHLAK sebagai tata nilai baru. Kegiatan sosialisasi dan internalisasi yang dilakukan melalui kanal media sosial, portal perusahaan, website, video conference, konvensi inovasi, *sharing session*, pemasangan poster, video sosialisasi, hingga internalisasi secara langsung.

Selanjutnya, di tahun 2023 PT INTI (Persero) mengkombinasikan budaya AKHLAK ke dalam karakter organisasi yang ditanamkan pada seluruh karyawan sebagai agen perubahan (**CHANGE**) transformasi yang meliputi **Contribute, Humble, Agile, Networking, Growing Mindset**, dan **Endurance**.

Gabungan budaya AKHLAK menjadi karakter organisasi CHANGE itupun kemudian berlanjut diimplementasikan pada tahun 2023.

The socialization and internalization of AKHLAK values in PT INTI (Persero) have been carried out continuously since the Company established AKHLAK as a new value system. Socialization and internalization activities are carried out through social media channels, company portals, websites, video conferences, innovation conventions, sharing sessions, poster installations, socialization videos, and direct internalization.

Furthermore, in 2023 PT INTI (Persero) combines the AKHLAK culture into an organizational character that is instilled in all employees as agents of change (CHANGE) transformation, which includes Contribute, Humble, Agile, Networking, Growing Mindset, and Endurance.

The combination of AKHLAK culture became the character of the CHANGE organization and then continued to be implemented in 2023.

CHANGE

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



Komisaris Utama

President Commissioner

Unggul Priyanto

Warga Negara Indonesia, domisili di Depok.

Indonesian citizen, domiciled in Depok.

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basic Appointment

Beliau diangkat sebagai Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia sejak 23 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-99/MBU/05/2017 tertanggal 23 Mei 2017, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor 13 tertanggal 14 Juni 2017, yang sudah diterima pemberitahuan perubahan data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor AHUAH.01.03-0146488 tertanggal 15 Juni 2017.

He was appointed as President Commissioner of Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia since May 23, 2017 based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-99/MBU/05/2017 dated May 23, 2017, as stated in the Deed of Notary Iwan Yusuf Anwari, S.H. Number 13 dated June 14, 2017, which has been received notification of changes to the Company's data by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHUAH.01.03-0146488 dated June 15, 2017.

Untuk Pengangkatan Periode Kedua, beliau diangkat sebagai Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia sejak 04 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-188/MBU/06/2021 tertanggal 04 Juni 2021, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor 27 tertanggal 30 Juni 2021, yang sudah diterima pemberitahuan perubahan data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0414066 tertanggal 02 Juli 2021.

For Appointment of the Second Period, he was appointed as President Commissioner of Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia since June 04, 2021 based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-188/MBU/06/2021 dated June 04, 2021, as stated in the Deed of Notary Iwan Yusuf Anwari, S.H. Number 27 dated June 30, 2021, which has been received notification of changes to the Company's data by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0414066 dated July 02, 2021.

Tempat & Tanggal Lahir

Place & Date of Birth

Malang, 30 September 1958

Malang, September 30, 1958

Riwayat Pendidikan

Educational Background

- Sarjana S1 Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung, Bandung, 1985
- *Master of Science* di bidang *Chemical Engineering* dari Leeds University, Inggris, 1991
- Doktor di bidang *Electronic & Material* dari Kyushu University, Jepang, 2001
- *Bachelor of Chemical Engineering* from Bandung Institute of Technology, Bandung, 1985
- *Master of Science in Chemical Engineering* from Leeds University, England, 1991
- *Doctorate in Electronics & Materials* from Kyushu University, Japan, 2001

Riwayat Karir

Career History

- Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 2014 - 2019
- Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material, 2010 - 2014
- Kuasa Pengguna Anggaran, 2009
- Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Energi, 2006-2010
- *Head of the Agency for the Assessment and Application of Technology, 2014-2019*
- *Deputy for Information Technology, Energy, and Materials, 2010 -2014*
- *Budget User Authority, 2009*
- *Director of Center for Energy Resources Technology, 2006-2010*

Selain berkarier profesional, Unggul Priyanto juga berpartisipasi aktif di berbagai pelatihan regional maupun internasional, antara lain Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat 1 di LAN Jakarta (2011), *Financial Analysis of Energy Project* di Colorado, USA (1995).

In addition to his professional career, Unggul Priyanto has also actively participated in various regional and international trainings, including Level 1 Leadership Education and Training at LAN Jakarta (2011), Financial Analysis of Energy Project in Colorado, USA (1995).

Periode Menjabat

Serving Period

Berlaku efektif sejak 04 Juni 2021 hingga saat ini.

Effective from June 04, 2021 until now.



Komisaris

Commissioner

Trisno Hendradi

Warga Negara Indonesia, domisili di Bogor.

Indonesian citizen, domiciled in Bogor.

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basic Appointment

Beliau diangkat sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia sejak 8 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-318/MBU/10/2020 tertanggal 8 Oktober 2020, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 41 tertanggal 20 Oktober 2020, yang sudah diterima pemberitahuan perubahan data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0401230 tertanggal 23 Oktober 2020.

He was appointed as Commissioner of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia since October 8, 2020 based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-318/MBU/10/2020 dated October 8, 2020, as stated in the Deed of Notary Muhammad Hanafi, S.H. Number 41 dated October 20, 2020, which has been received notification of changes to the Company's data by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Number AHU-AH.01.03-0401230 dated October 23, 2020.



Tempat & Tanggal Lahir

Place & Date of Birth

Magelang, 14 Oktober 1961

Magelang, October 14, 1961

Riwayat Pendidikan

Educational Background

Akademi Angkatan Udara, 1986

Air Force Academy, 1986

Riwayat Karir

Career History

- Komandan Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (TNI) (2019)
- Kepala Sekretariat Militer Presiden (2016-2019)
- Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Udara (Kodiklatau) (2016)
- *Commander of the Indonesian National Armed Forces (TNI) Staff and Command School (2019)*
- *Head of the Presidential Military Secretariat (2016-2019)*
- *Deputy Commander of the Air Force Doctrine, Education, and Training Development Command (2016)*

Periode Menjabat

Serving Period

Berlaku efektif sejak 8 Oktober 2020 hingga saat ini.

Effective from October 8, 2020 until now.



Komisaris

Commissioner

Rahmadi Murwanto

Warga Negara Indonesia, domisili di Tangerang Selatan.

Indonesian citizen, domiciled in Tangerang Selatan.

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basic Appointment

Beliau diangkat sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia sejak 8 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-318/MBU/10/2020 tertanggal 8 Oktober 2020, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 41 tertanggal 20 Oktober 2020, yang sudah diterima pemberitahuan perubahan data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU-AH.01.03-0401230 tertanggal 23 Oktober 2020.

He was appointed as Commissioner of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia since October 8, 2020 based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-318/MBU/10/2020 dated October 8, 2020, as stated in the Deed of Notary Muhammad Hanafi, S.H. Number 41 dated October 20, 2020, which has been received notification of changes to the Company's data by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Nomor AHU-AH.01.03-0401230 dated October 23, 2020.



Tempat & Tanggal Lahir

Place & Date of Birth

Metro, 13 Maret 1970

Metro, March 13, 1970

Riwayat Pendidikan

Educational Background

- Diploma-III & Diploma-IV Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
- Strata-2 Akuntansi, *Weatherhead School of Management Case Western Reserve University*, Amerika Serikat
- Strata-3 Akuntansi, *School of Business and Commercial Law, Victoria University of Wellington*, New Zealand
- *Diploma-III & Diploma-IV Accounting, State Accounting College*
- *Master of Accounting, Weatherhead School of Management Case Western Reserve University, United State of America*
- *PhD in Accounting, School of Business and Commercial Law, Victoria University of Wellington, New Zealand*

Riwayat Karir

Career History

- Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), 2016 - 2020
- Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan, 2014
- Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, 2011
- Kepala Subbagian Organisasi Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan, 2003
- Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK) Kementerian Keuangan, 1991
- *Director of the State Accounting College, 2016-2020*
- *Head of the Organization and Administration Section of the Secretariat of the Financial Education and Training Agency Ministry of Finance, 2014*
- *Head of Performance Evaluation and Reporting of the Customs and Excise Education and Training Center Ministry of Finance, 2011*
- *Head of Organizational Subdivision of the Secretariat of the Financial Education and Training Agency (BPPK) Ministry of Finance, 2003*
- *Finance Education and Training Agency Ministry of Finance, 1991*

Periode Menjabat

Serving Period

Berlaku efektif sejak 8 Oktober 2020 hingga saat ini.

Effective from October 8, 2020 until now.



Komisaris

Commissioner

Yanuar Rokhmad Madyantoro

Warga Negara Indonesia, domisili di Tangerang.

Indonesian citizen, domiciled in Tangerang.

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basic Appointment

Beliau diangkat sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia sejak 21 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-233/MBU/10/2022 tertanggal 21 Oktober 2022, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor 02 tertanggal 01 November 2022, yang sudah diterima pemberitahuan perubahan data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-0071938 tertanggal 02 November 2022.

He was appointed as Commissioner of Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia since October 21, 2022 based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-233/MBU/10/2022 dated October 21, 2022, as stated in the Deed of Notary Iwan Yusuf Anwari, S.H. Number 02 dated November 01, 2022, which has been received notification of changes to the Company's data by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number : AHU-AH.01.09-0071938 dated November 02, 2022.



Tempat & Tanggal Lahir

Place & Date of Birth

Semarang, 6 September 1972

Semarang, September 6, 1972

Riwayat Pendidikan

Educational Background

- Strata-1 Sains Teknik Kimia dari Universitas *Purdue*, West Lafayette, Indiana, Amerika Serikat, 1996
- Bachelor of Science in Chemical Engineering from *Purdue University*, West Lafayette, Indiana, United State of America, 1985
- Strata-2 Magister Manajemen *Executive* dari Prasetya Mulya Business School, Jakarta, 2006
- Master Degree in Executive Management from Prasetya Mulya Business School, Jakarta, 2006

Riwayat Karir

Career History

- Executive Vice President atau Kepala Divisi Restrukturisasi dan Revitalisasi 3 PT Perusahaan Pengelola Aset, 2021-Sekarang
- Executive Vice President or Head of Restructuring and Revitalization Division 3 PT Perusahaan Pengelola Aset, 2021-Now
- Komisaris PT Istaka Karya (Persero), 2022
- Commissioner PT Istaka Karya (Persero), 2022
- Vice President PT Mandiri Sekuritas, 2017-2021
- Vice President PT Mandiri Sekuritas, 2017-2021
- Direktur Anak Usaha PT Trisurya Lintas Energi, 2008-2017
- Director of Subsidiaries PT Trisurya Lintas Energi, 2008-2017
- Komite Audit PT Gema Graha Sarana Tbk, 2008-2014
- Audit Committee PT Gema Graha Sarana Tbk, 2008-2014
- PT Sumber Segara Primadaya, 2003-2008
- PT Sumber Segara Primadaya, 2003-2008
- PT Geo Dipa Energi, 2003
- PT Geo Dipa Energi, 2003

Periode Menjabat

Serving Period

Berlaku efektif sejak 21 Oktober 2022 hingga saat ini.

Effective from October 22, 2022 until now.

Profil Direksi

Board of Directors Profile



Direktur Utama

President Director

Edi Witjara

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, domisili di Bandung.
Indonesian citizen, 51 years old, domiciled in Bandung.

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basic Appointment

Edi Witjara menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia terhitung sejak 08 Juli 2022, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor SK-143/MBU/07/2022 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

Edi Witjara has served as the President Director of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia as of July 08, 2022, based on the Decree of the Minister for State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, as stated in the Decree Number SK-143/MBU/07/2022 concerning the Appointment of the President Director of a Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

Tempat & Tanggal Lahir

Place & Date of Birth

Kediri, 17 November 1972

Kediri, November 17, 1972



Riwayat Pendidikan

Educational Background

- Predikat Tertinggi *Cumlaude* Doktor (S3) Strategi Bisnis dari Universitas Padjajaran, Bandung (2019)
- Magister (S2) Hukum Bisnis dari Universitas Padjajaran, Bandung (2009)
- Sarjana (S1) Teknik Listrik dari Universitas Telkom, Bandung (1995)
- *Certified Management Accounting* (CMA), 2010.
- *Summa Cum Laude - Doctoral Degree in Business Strategic from Padjajaran University, Bandung* (2019)
- *Master Degree in Business Law from Padjajaran University, Bandung* (2009)
- *Bachelor of Electrical Engineering from Telkom University, Bandung* (1995)
- *Certified Management Accounting* (CMA), 2010.

Riwayat Karir

Career History

Edi Witjara memulai karir profesionalnya di Telkom Group sebelum akhirnya berkarir sebagai Direktur Utama di PT INTI (Persero). Selama masa karirnya, beliau berhasil menduduki beberapa posisi penting, antara lain:

- Direktur *Enterprise & Business Service* PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (2020 - 2021)
- Direktur *Human Capital Officer* PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (2019 - 2020)
- Komisaris Utama PT Telkom Satelit Indonesia (2020)
- Komisaris Utama PT PINS Indonesia (2020)
- Komisaris Utama PT Multimedia Nusantara (2019 - 2020)

Edi Witjara started his professional career at the Telkom Group before finally working as the President Director at PT INTI (Persero). During his career he held several important positions, including:

- Chief of *Enterprise & Business Service* PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (2020 - 2021)
- Chief of *Human Capital Officer* PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (2019 - 2020)
- President Commissioner of PT Telkom Satelit Indonesia (2020)
- President Commissioner of PT PINS Indonesia (2020)
- President Commissioner of PT Multimedia Nusantara (2019 - 2020)

Penghargaan

Educational Background

- *International Business Award* (2021)
- *Asia Pasific Stevie Award* (2021)
- Relawan Program Vaksin Merdeka dari Kepolisian Republik Indonesia (2021)
- Layanan Konsultasi Sejiwa untuk Kantor Staf Presiden (2020)
- Satyalancana Kebaktian Sosial dari Presiden Republik Indonesia (2019)
- Satyalancana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia (2015)
- *International Business Award* (2021)
- *Asia Pasific Stevie Award* (2021)
- Relawan Program Vaksin Merdeka from Indonesian Police Force (2021)
- Layanan Konsultasi Sejiwa for Presidential Office Staff (2020)
- Satyalancana Kebaktian Sosial from President of the Republic of Indonesia (2019)
- Satyalancana Wirakarya from President of the Republic of Indonesia (2015)

Organisasi atau Lembaga Aktif

Active Organization or Institution

Selain berkariir profesional, Edi Witjara juga berpartisipasi aktif mengikuti sejumlah organisasi atau lembaga, di antaranya sebagai berikut:

- *Supervisory Board*, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Cabang Bandung (2022 - Sekarang)
- *Senate Member of Faculty*, Universitas Telkom (2022 - Sekarang)
- *Supervisory Board*, Forum Alumni Sekolah Tinggi Teknologi Telkom (2022 - Sekarang)
- *Supervisory Board*, Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (2021 - Sekarang)
- Sekretaris Jenderal Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia Angkatan II (2018 - Sekarang)
- Dosen, Universitas Telkom (2018 - Sekarang)

In addition to a professional career, Edi Witjara also actively participates in a number of organization or Institution, including the following:

- *Supervisory Board*, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Bandung Branch (2022 - Present)
- *Senate Member of Faculty*, Telkom University (2022 - Present)
- *Supervisory Board*, Telkom School of Engineering Alumni Forum (2022 - Present)
- *Supervisory Board*, Association of National Telecommunication Companies (2021 - Present)
- *Secretary General of Consolidation of National Values of the National Defense Institute of the Republic of Indonesia Batch II* (2018 - Present)
- *Lecturer*, Telkom University (2018 - Present)

Rangkap Jabatan

Concurrent Position

Penasehat Senior Kantor Staff Kepresidenan (2020 - Sekarang)

Senior Advisor Presidential Office Staff (2020 - Present)

Hubungan Afiliasi

Affiliate Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama.

Has no affiliated with other members of the Board of Commissioners and majority shareholders.

Periode Menjabat

Serving Period

Berlaku efektif sejak 04 Juni 2021 hingga saat ini.

Effective from June 04, 2021 until now.





Direktur Operasi

Operation Director

Ahmad Taufik

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, domisili di Tangerang Selatan.
Indonesian citizen, 58 years old, domiciled in South Tangerang.

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basic Appointment

Ahmad Taufik menjabat sebagai Direktur Operasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia terhitung sejak 14 November 2022, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor SK-256/MBU/11/2022 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

Ahmad Taufik has served as the Operation Director of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia as of November 14, 2022, based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, as stated in the Decree Number SK-256/MBU/11/2012 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

Tempat & Tanggal Lahir

Place & Date of Birth

Jakarta, 25 September 1965
Jakarta, September 25, 1965

Riwayat Pendidikan

Educational Background

Sarjana Teknik, Institut Teknologi Bandung (1989)

Bachelor of Technic, Bandung Institute of Technology (1989)

Riwayat Karir

Career History

Beliau memulai karir profesionalnya di Bank Mandiri sebelum akhirnya berkarir sebagai Direktur Operasi PT INTI (Persero). Selama masa karirnya beliau berhasil menduduki beberapa posisi penting, antara lain :

- Head of Business Continuity Management PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020 - 2022)
- Vice President - Strategic Project PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015 - 2020)
- Project Treasury Officer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2013 - 2014)
- Vice President - IT Strategic Wholesale Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2012 - 2013)
- Vice President - Information Management Solution PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2012)

He started his professional career at Bank Mandiri before finally having a career as Director of Operations at PT INTI (Persero). During his career, he succeeded in holding several important positions, including the following:

- Head of Business Continuity Management PT of Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2020 - 2022)
- Vice President - Strategic Project of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015 - 2020)
- Project Treasury Officer of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2013 - 2014)
- Vice President - IT Strategic Wholesale Banking of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2012 - 2013)
- Vice President - Information Management Solution of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2012)

Penghargaan

Educational Background

- Project Manager Mandiri eMAS Core Banking Bank Mandiri
- Penugasan dan Apresiasi keberhasilan Implementasi

- Project Manager Mandiri eMAS Core Banking Bank Mandiri
- Assignment and Appreciation for successful Implementation

Pendidikan atau Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi

Education or Training to Improve Competence

Selain berkarier profesional, Ahmad Taufik juga berpartisipasi aktif mengikuti sejumlah pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, di antaranya sebagai berikut:

- Management Risiko Perbankan - Level 5

In addition to a professional career, Ahmad Taufik also actively participates in a number of education or training to improve competence, including the following:

- Management Risiko Perbankan - Level 5



Rangkap Jabatan

Concurrent Position

Komisaris Utama PT INTI Pindad Mitra Sejati

President Commissioner of PT INTI Pindad Mitra Sejati

Hubungan Afiliasi

Affiliate Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama.

Has no affiliated with other members of the Board of Commissioners and majority shareholders.

Periode Menjabat

Serving Period

Berlaku efektif sejak 14 November 2022.

Effective from November 14, 2022.



Direktur Keuangan, SDM, Hukum, dan Manajemen Risiko

Financial, Human Capital, Legal & Risk Management Directors

Tantang Yudha Santoso

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, domisili di Jakarta

Indonesian citizen, 45 years old, domiciled in Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basic Appointment

Tantang Yudha Santoso menjabat sebagai Direktur Keuangan, SDM, Hukum dan Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia terhitung sejak 14 November 2022, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor SK-256/MBU/11/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

Tantang Yudha Santoso has served as Financial, Human Capital, Legal & Risk Management Directors at PT Industri Telekomunikasi Indonesia as of November 14, 2022, based on the Decree of the Minister for State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, as stipulated in Decree Number SK-256/MBU/11/2022 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.



Tempat & Tanggal Lahir

Place & Date of Birth

Samarinda, 12 Oktober 1977

Samarinda, October 12, 1977

Riwayat Pendidikan

Educational Background

Strata-1 Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Telkom, 2000

Bachelor of Industrial Engineering at Telkom School of Engineering, 2000

Riwayat Karir

Career History

Tantang Yudha Santoso memulai karir profesionalnya sejak tahun 1997, sebelum akhirnya berkarir sebagai Direktur Keuangan, SDM, Hukum dan Manajemen Risiko PT INTI (Persero). Selama masa karirnya, beliau berhasil menduduki beberapa posisi penting, antara lain:

- *Finance & Risk Management Director, PT MD Media (Agustus 2020 - Sekarang)*
- *Operation Senior Manager Leveraging Asset, PT Telkom Indonesia, Tbk. (Mei 2018 - Juli 2020)*
- *Secretary of Board Commissioner, PT Graha Sarana Duta (Mei 2018 - Juli 2020)*
- *AVP Strategic Finance, PT Telkom Indonesia, Tbk. (Desember 2017 - April 2018)*
- *Secretary of Board Commissioner, PT PINS Indonesia (Desember 2017 - April 2018)*
- *VP Strategic Planning & Management System, PT PINS Indonesia (Februari 2013 - November 2017)*
- *AVP Corporate Development, PT PINS Indonesia (Oktober 2011 - Februari 2013)*
- *Senior Officer Corporate Development, PT PINS Indonesia (Maret 2011 - Oktober 2011)*
- *Officer-1 Account Management of Carrier & Inter-carrier Service Division, PT Telkom Indonesia Tbk, Jakarta-Indonesia (Februari 2010 - Maret 2011)*
- *Assistant Manager of Carrier & Inter-carrier Service Division, PT Telkom Indonesia Tbk, Jakarta, Indonesia (Mei 2007 - Februari 2010)*
- *Officer-2 Balance Data of Carrier & Inter-carrier Service Division, PT Telkom Indonesia Tbk, Jakarta, Indonesia (Januari 2006 - Mei 2007)*
- *Officer-3 Settlement of Carrier & Inter-carrier Service Division, PT Telkom Indonesia Tbk, Jakarta, Indonesia (Mei 2004 - Januari 2007)*
- *Officer-3 Project VoIP 017, PT Telkom Indonesia Tbk., Surabaya, Indonesia, (Februari 2002 - Mei 2004)*
- *Member of Technical Drawing Laboratory, Telkom School of Engineering, Bandung, Indonesia (1997 - 2000)*

Tantang Yudha Santoso started his professional career since 1997, before finally working as Financial, Human Capital, Legal & Risk Management Directors of PT INTI (Persero). During his career, he managed to occupy several important positions, including:

- *Finance & Risk Management Director, PT MD Media (August 2020 - Present)*
- *Operation Senior Manager Leveraging Asset, PT Telkom Indonesia (May 2018 - July 2020)*
- *Secretary of Board Commissioner, PT Graha Sarana Duta (May 2018 - July 2020)*
- *AVP Strategic Finance, PT Telkom Indonesia, (December 2017 - April 2018)*
- *Secretary of Board Commissioner, PT PINS Indonesia (December 2017 - April 2018)*
- *VP Strategic Planning & Management System, PT PINS Indonesia (February 2013 - November 2017)*
- *AVP Corporate Development, PT PINS Indonesia (October 2011 - February 2013)*
- *Senior Officer Corporate Development, PT PINS Indonesia (March 2011 - October 2011)*
- *Officer-1 Account Management of Carrier & Inter-carrier Service Division, PT Telkom Indonesia Tbk, Jakarta-Indonesia (February 2010 - March 2011)*
- *Assistant Manager of Carrier & Inter-carrier Service Division, PT Telkom Indonesia Tbk, Jakarta, Indonesia (May 2007 - February 2010)*
- *Officer-2 Balance Data of Carrier & Inter-carrier Service Division, PT Telkom Indonesia Tbk, Jakarta, Indonesia (January 2006 - May 2007)*
- *Officer-3 Settlement of Carrier & Inter-carrier Service Division, PT Telkom Indonesia Tbk, Jakarta, Indonesia (May 2004 - January 2007)*
- *Officer-3 Project VoIP 017, PT Telkom Indonesia Tbk., Surabaya, Indonesia (February 2002 - May 2004)*
- *Member of Technical Drawing Laboratory, Telkom School of Engineering, Bandung, Indonesia (1997 - 2000)*

Kehormatan, Penghargaan dan Kisah Sukses

Honors, Award and Success Story

- Anggota Tim Satuan Tugas, Akuisisi 25% Saham PT Tiphone Mobile Indonesia,Tbk. (September, 2014)
- Freelance Telco & IT Content Consulting seperti Aplikasi Improvement Procurement di BTEL, Mengembangkan Triple Play di Apartment dan HRB, Founder Nengdi.org (GPS Tracking System), dan lainnya (2000 - Sekarang)
- Mengelola Entry Barrier Sales Network & IP Transit di Bakrie Tel dengan memenangkan tender IP Transit 13 STM-1 dan 1 Gbps (Mei 2010)
- Best Innovator 2008 "Intercarrier Network Service Transaction" yang berfungsi Menangani Online Billing untuk Produk Intercarrier - PT Telkom Indonesia, Tbk. (Februari 2009)
- Anggota konsultan pengembangan "Telkom Revenue Management System" untuk mengintegrasikan wholesale billing PT Telkom Indonesia, Tbk. (Juli 2008)
- Inovasi Kandidat Tahun Ini, Billing Premium Call melalui E-Matrix (Juli 2007)
- Staf Pendukung Terbaik di Divisi Carrier and Interconnection PT Telkom Indonesia, Tbk. (September 2005)
- Membuat Buku Interkoneksi & Intercarrier sebagai Buku Panduan Intercarrier (2005)
- Inisiator Telkom - Internet Goes To School (IGTS), pertama kali diadakan di Madiun Jawa Timur, berdampak pada ratusan ribu orang sebagai peserta (2004)
- Inovasi Produk Tahun Ini TelkomNet @Home, menghasilkan Rp 80 Juta setiap bulan (Juli, 2004)
- Inovasi Produk Tahun Ini (VoIP 017 Via Operator) di PT Telkom Indonesia, Tbk., menghasilkan Rp 100 juta setiap bulan (Juli 2003)
- Salah satu siswa SMA terbaik, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (Juli 1996)
- Salah satu siswa SMP terbaik, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Juli 1993)
- Siswa SD Terbaik, Kab. Surabaya, Jawa Timur (Juli 1990)
- Member of Task Force Team, Acquire 25% Share PT Tiphone Mobile Indonesia,Tbk (September, 2014)
- Freelance Telco & IT Content Consulting such as Improvement Procurement Application in BTEL, Developing Triple Play in Apartment and HRB, Founder Nengdi.org (GPS Tracking System) etc (2000 - Now)
- Manage Entry Barrier Sales Network & IP Transit in Bakrie Tel by winning tender of 13 STM-1 and 1 Gbps IP Transit (May, 2010)
- Best Innovator 2008 "Intercarrier Network Service Transaction" which has function to Handle Online Billing for Intercarrier Product - PT Telkom Indonesia, Tbk. (Feb, 2009)
- Member of consultant of development "Telkom Revenue Management System" To integrate wholesale billing PT Telkom Indonesia, Tbk. (July, 2008)
- Candidate Innovation of The Year, Billing Premium Call via E-Matrix (July, 2007)
- The Best Support Staff in Carrier and Interconnection Division PT Telkom Indonesia, Tbk. (September, 2005)
- Making Interconnection & Intercarrier Book as a Intercarrier Guide Book (2005)
- Inisiator Telkom - Internet Goes To School (IGTS), first held in Madiun Jawa Timur, impact hundred thousand People as participants (2004)
- Product Innovation of The Year TelkomNet @Home, Produce Rp 80 millions each month (July, 2004)
- Product Innovation of the Year (VoIP 017 Via Operator) in PT Telkom Indonesia, Tbk, Pproduce Rp 100 millions each month (July, 2003)
- One of the best senior high school students, district of Semarang, Central Java (July, 1996)
- One of the best junior high school students, district of Bojonegoro, East Java (July, 1993)
- The best elementary school students, district of Surabaya, East Java (July, 1990)



Pendidikan atau Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi

Education or Training to Improve Competence

Selain berkarier profesional, Tantang Yudha Santoso juga berpartisipasi aktif mengikuti sejumlah pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, di antaranya sebagai berikut:

- Pelatihan Chartered Financial Analyst, Sekolah Bisnis Bina Nusantara, 2013
- High Impact Presentation Skills, Peringkat 1, Telkom

In addition to a professional career, Tantang Yudha Santoso also actively participates in a number of education or training to improve competence, including the following:

- Chartered Financial Analyst Training, Bina Nusantara Business School, 2013
- High Impact Presentation Skills, Rank 1, Telkom Corporate

Corporate University, 2010

- Peserta Konferensi Tahunan bertajuk "Serving The Valued Customers Through Services & Network Convergence" tahun 2004
- Peserta Pelatihan Interkoneksi tahun 2004
- Peserta Pelatihan Bisnis *On Line* tahun 2002
- Aktivitas Dukungan *Account Manager* Bakrie Telecom, XL Axiata, *Mobile-8*, dan Indosat
- Terlibat dalam mengelola aktivitas akun operator lisensi lain seperti Bakrie Telecom, XL Axiata, *Mobile-8*, dan Indosat, serta pemesanan, penyediaan, dan kebutuhan layanan lainnya.
- Mempromosikan semua produk Telkom ke operator berlisensi lainnya.
- Memberikan Laporan kepada *Management Executive* tentang kinerja keseluruhan dari produk *carrier* dan *intercarrier* dan memberikan saran pengembangan.

University, 2010

- Participant of annual conference entitled "Serving The Valued Customers Through Services & Network Convergences" on 2004
- Participant of Interconnection Training on 2004
- Participant of On Line Business Training on 2002
- Support Activity Account Manager Bakrie Telecom, XL Axiata, *Mobile-8*, and Indosat.
- Involved in managing account activity of other license operator such as Bakrie Telecom, XL Axiata, *Mobile-8*, and Indosat, and also order, provisioning and other service needs.
- Promote all Telkom product to other license operator
- Give Report to Management Executive about the whole performance of carrier and intercarrier product and provide suggest development.

Rangkap Jabatan

Concurrent Position

Komisaris PT Inti Konten Indonesia (INTENS)

Chairman of PT Inti Konten Indonesia (INTENS)

Hubungan Afiliasi

Affiliate Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama.

Has no affiliated with other members of the Board of Commissioners and majority shareholders.

Periode Menjabat

Serving Period

Berlaku efektif sejak 14 November 2022.

Effective from November 14, 2022.



Profil Senior Leader

Senior Leader Profile

Delvia Damayanti

Senior Vice President Corporate Secretary

Vice President Corporate Secretary and Strategic Planning

Tempat dan Tanggal Lahir

Jakarta, 10 Juli 1987

Pendidikan

Strata-1 Public Relation, Universitas Mercu Buana

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor KD.106/KP.09/030300/2023
tentang Penetapan Karyawan Setingkat Band 6

Place and Date of Birth

Jakarta, July 10, 1987

Education

Bachelor Degree in Public Relation, Mercu Buana University

Legal Basis of Appointment

Decree of the Board of Directors Number KD.106/
KP.09/030300/2023 concerning Employee Placement in the
Company Environment, effective January 1, 2022



Febriani Puspa Dewi

Vice President Internal Audit Group

Vice President of Internal Audit Group

Tempat dan Tanggal Lahir

Bandung, 17 Februari 1989

Pendidikan

Strata-1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor KD.050/KP.09/030300/2023
tentang Penempatan Karyawan di Lingkungan Perusahaan
mulai berlaku tertanggal 1 Juni 2023

Place and Date of Birth

Bandung, February 17, 1989

Education

Bachelor Degree in Accounting, Indonesia University of
Education

Legal Basis of Appointment

Decree of the Board of Directors Number KD.050/
KP.09/030300/2023 concerning Employee Placement in the
Company Environment, effective June 1, 2023





Didik Pebrianto

Vice President Hukum dan Manajemen Risiko

Vice President of Law and Risk Management

Tempat dan Tanggal Lahir

Semarang, 12 Februari 1966

Place and Date of Birth

Semarang, February 12, 1966

Pendidikan

Strata-1 Hukum Perdata, Universitas Gadjah Mada

Education

Bachelor Degree in Civil Law, Gadjah Mada University

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor KD.164/KP.09/020800/2021 tentang Penempatan Karyawan di Lingkungan Perusahaan mulai berlaku tertanggal 1 Januari 2022

Legal Basis of Appointment

Decree of the Board of Directors Number KD.164/KP.09/020800/2021 concerning Employee Placement in the Company Environment, effective January 1, 2022



Muliasari Hartanti

Vice President Human Capital and General Affair

Vice President of Human Capital and General Affair

Tempat dan Tanggal Lahir

Bandung, 3 Desember 1969

Place and Date of Birth

Bandung, December 3, 1969

Pendidikan

Strata-1 Informatika, Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi Indonesia

Education

Bachelor Degree in Information Computer, Indonesian College of Science and Technology

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor KD.044/KP.09/030300/2023 tentang Penempatan Karyawan di Lingkungan Perusahaan mulai berlaku tertanggal 1 Juni 2023.

Legal Basis of Appointment

Decree of the Board of Directors Number KD.044/KP.09/030300/2023 concerning Employee Placement in the Company Environment, effective June 1, 2023.



Suharko Tugino

Senior Vice President Pengadaan dan Manejemen Material

Senior Vice President of Procurement & Material Management

Tempat dan Tanggal Lahir

Serang, 25 November 1969

Pendidikan

Strata-1 Ekonomi (Akuntansi), Universitas Trisakti

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor KD.107/KP.09/030300/2023 tentang Penempatan Karyawan Diperbantukan di Perusahaan mulai berlaku tertanggal 1 Juli 2023.

Place and Date of Birth

Serang, November 25, 1969

Education

Bachelor Degree in Economics (Majoring in Accountancy), University of Trisakti

Legal Basis of Appointment

Decree of the Board of Directors Number KD.107/KP.09/030300/2023 concerning Placement of Seconded Employess in the Company, effective July 1, 2023.



Erik Arfiansyah

Vice President Keuangan & Akuntansi

Vice President of Finance & Accounting

Tempat dan Tanggal Lahir

Bandung, 20 Mei 1988

Pendidikan

Strata-1 Akuntansi, Universitas Pasundan

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor KD.066/KP.09/020800/2022 tentang Penempatan Karyawan di Lingkungan Perusahaan mulai berlaku tertanggal 1 Juni 2022

Place and Date of Birth

Bandung, Mei 20, 1988

Education

Bachelor Degree in Accounting, Pasundan University

Legal Basis of Appointment

Decree of the Board of Directors Number KD.066/KP.09/020800/2022 concerning Employee Placement in the Company Environment, effective June 1, 2022





Darma Nugraha

Vice President Rekayasa & Pengembangan Produk

Vice President of Product Engineering & Development

Tempat dan Tanggal Lahir

Semarang, 16 Januari 1980

Pendidikan

S1 Teknik Telekomunikasi

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor KD.099/KP.10/020800/2021 tentang Penempatan Karyawan di Lingkungan Perusahaan mulai berlaku tertanggal 1 Oktober 2021

Place and Date of Birth

Semarang, January 16, 1980

Education

Bachelor Degree in Telecommunications Engineering

Legal Basis of Appointment

Decree of the Board of Directors Number KD.099/KP.10/020800/2021 concerning Employee Placement in the Company Environment, effective October 1, 2021



Gema Alfarisi Deri

Vice President Pengadaan dan Mitra Usaha

Vice President of Procurement and Business Partners

Tempat dan Tanggal Lahir

Bandung, 13 Desember 1990

Pendidikan

- Strata-2 Teknik Industri, Universitas Pasundan
- Strata-1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Nasional

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor KD.164/KP.09/020800/2021 tentang Penempatan Karyawan di Lingkungan Perusahaan mulai berlaku tertanggal 1 Januari 2022

Place and Date of Birth

Bandung, December 13, 1990

Education

- Master of Industrial Engineering, Pasundan University
- Bachelor Degree in Electrical Engineering, National Institute of Technology

Legal Basis of Appointment

Decree of the Board of Directors Number KD.164/KP.09/020800/2021 concerning Employee Placement in the Company Environment, effective January 1, 2022



Herwan Herwansyah

Pj. Deputy Executive General Manager Commercial Engineering

Pj. Deputy Executive General Manager Commercial Engineering

Tempat dan Tanggal Lahir

Bandung, 10 April 1987

Pendidikan

Strata-1 Informatika, Universitas Komputer Indonesia Bandung

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor KD.130/KP.09/030300/2023 tentang Pemberian Predikat Pejabat (PJ) mulai berlaku tertanggal 1 November 2023

Place and Date of Birth

Cimahi, April 21, 1971

Education

Bachelor Degree in Electrical Engineering, Bandung Institute of Technology

Legal Basis of Appointment

Decree of the Board of Directors Number KD.164/KP.09/020800/2021 concerning Employee Placement in the Company Environment, effective November 1, 2023



Dadang Mukti

Vice President System Integrator

Vice President of System Integrator

Tempat dan Tanggal Lahir

Bandung, 10 April 1969

Pendidikan

D3 Telekomunikasi, Politeknik ITB

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor KD.164/KP.09/020800/2021 tentang Penempatan Karyawan di Lingkungan Perusahaan mulai berlaku tertanggal 1 Januari 2022

Place and Date of Birth

Bandung, April 10, 1969

Education

D3 Telecommunication, ITB Polytechnic

Legal Basis of Appointment

Decree of the Board of Directors Number KD.164/KP.09/020800/2021 concerning Employee Placement in the Company Environment, effective January 1, 2022





Nurtresna Gumilar

Vice President Managed Service

Vice President of Managed Service

Tempat dan Tanggal Lahir

Rangkasbitung, 17 Juli 1986

Pendidikan

D3 Telekomunikasi, Institut Teknologi Telkom

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor KD.164/KP.09/020800/2021 tentang Penempatan Karyawan di Lingkungan Perusahaan mulai berlaku tertanggal 1 Januari 2022

Place and Date of Birth

Rangkasbitung, July 17, 1986

Education

D3 Telecommunications, Telkom Institute of Technology

Legal Basis of Appointment

Decree of the Board of Directors Number KD.164/KP.09/020800/2021 concerning Employee Placement in the Company Environment, effective January 1, 2022

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Human Capital Management

Human Capital merupakan salah satu faktor untuk mendukung keberlanjutan perusahaan. Pada tahun 2023, strategi dan pengembangan human capital PT INTI (Persero) diselaraskan dengan kebutuhan bisnis Perseroan yaitu melatih dan mengembangkan karyawan sejalan dengan kebutuhan dan membenahan sistem manajemen human capital untuk menunjang terciptanya iklim kerja yang kondusif bagi peningkatan produktivitas.

Dengan adanya perubahan pada manajemen PT INTI (Persero), selain menerapkan *Core Values* AKHLAK, Perusahaan pun membangun karakter organisasi yang disebut dengan Jargon INTI yaitu Luruskan Niat, Terus Semangat, Jadi Bermanfaat, yang pertama kali digaungkan oleh Direktur Utama PT INTI (Persero) Edi Witjara, pada momen Temu Millenials INTI, 13 Juli 2022.

Human Capital is one of the factors to support company sustainability. In 2023, PT INTI (Persero)'s strategy and development of human capital were aligned with the Company's business needs, namely training and developing employees in line with the requirements and improvement of the human capital management system to support the creation of a conducive working climate for increased productivity.

With the changes in the management of PT INTI (Persero), in addition to implementing the AKHLAK Core Values, the Company has also built an organizational character called the INTI Jargon, namely Straighten Intentions, Keep Enthusiastic, Be Beneficial, which was first echoed by the President Director of PT INTI (Persero) Edi Witjara, during the INTI Millenials Gathering, July 13, 2022.



Kesetaraan Gender dan Kesempatan Bekerja

Gender Equality and Employment Opportunity

Prinsip Kesetaraan

PT INTI (Persero) percaya bahwa keragaman Insan PT INTI (Persero) merupakan faktor penting bagi keberhasilan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan berusaha untuk memperoleh, membina, dan mempertahankan orang-orang yang memiliki kompetensi. Promosi jabatan di Perseroan pun didasarkan pada kemampuan dan kinerja.

Perseroan berkomitmen sepenuhnya untuk memberikan kesempatan kerja yang sama serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praktik ketenagakerjaan yang adil dan tanpa diskriminasi.

Kesetaraan Gender

Kebijakan non-diskriminasi menjadi Insan PT INTI (Persero) yang memiliki kesempatan sama dan setara dalam berkarir. Pada tahun 2023, Jumlah Karyawan perempuan meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 34% dibanding dengan Karyawan Laki laki.

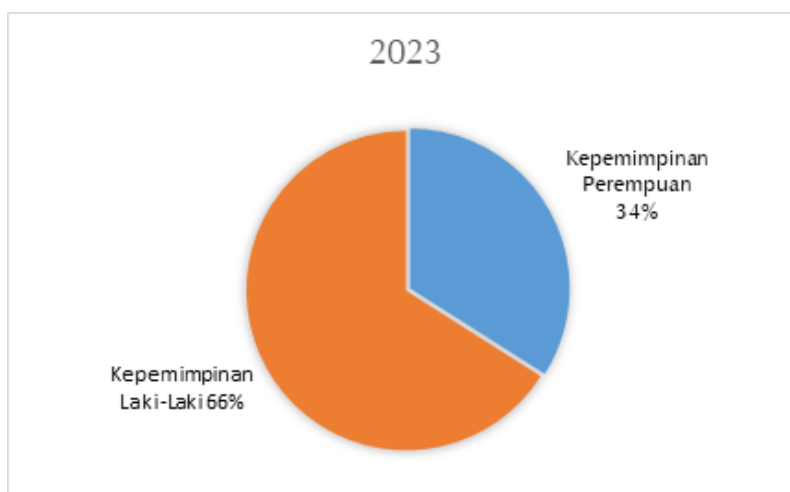
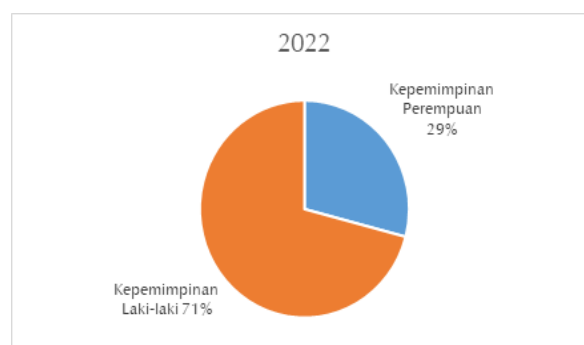
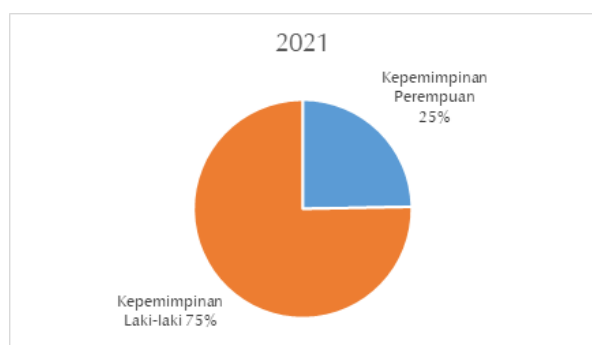
Equality Principle

PT INTI believes that human diversity PT INTI (Persero) is important factors for Company's success. Therefore, Company try to obtain, guiding, and maintain people that have competencies. Promotion in Company is based on ability and performance.

Company fully committed to providing equal employment opportunity and complying with laws and regulations related to fair employment practice and non-discrimination.

Gender Equality

Non-discrimination policy so that PT INTI (Persero) employees have equal and equal opportunities in their careers. In 2023, the number of female employees will increase from the previous year to 34% compared to male employees.



Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia*Table of Employee Composition by Age Range*

Rentang Usia <i>Age Range</i>	2022			2023		
	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total
21-25	6	8	6	3	5	8
26-30	18	15	18	11	9	20
31-35	33	25	33	25	16	41
36-40	16	6	16	17	18	35
41-45	4	0	4	10	0	10
46-50	3	1	3	3	0	3
>50	62	8	70	37	7	44
Total	144	59	203	163	64	261

Kesempatan Kerja dan Tingkat Perputaran Pegawai

Job Opportunities and Employee Turnover

Rekrutmen dilakukan secara terbuka sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diperlukan. Pada tahun 2023, Perseroan menerapkan strategi *negative growth* sehingga perputaran karyawan sangat mempertimbangkan faktor produktivitas dan posisi kunci yang dibutuhkan oleh Perseroan.

Pada tahun 2023, terdapat peningkatan turn over karyawan. Namun demikian, Perusahaan melakukan rekrutasi karyawan untuk posisi *experience hired* sejumlah sembilan orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perseroan telah berusaha untuk menambah kapasitas karyawan melalui metode *negative growth*, yang sangat mempertimbangkan aspek produktivitas karyawan.

Selama tahun 2023, Perusahaan telah berhasil menyelenggarakan empat episode Webinar INTI yang diisi oleh narasumber internal dan eksternal.

Karyawan PT INTI (Persero) juga memperoleh Pengakuan dan Penghargaan, melalui berbagai pengakuan yang didapat secara individu, maupun penghargaan yang didapatkan oleh Perseroan atas kinerja Karyawan.

Selain itu, Karyawan Perusahaan pun mendapatkan kesempatan belajar di PT INTI (Persero), melalui pelatihan, sertifikasi, maupun pendidikan lanjutan, baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu, Karyawan PT INTI (Persero) juga memiliki kesempatan pengembangan karir melalui jalur *fast track*, di mana seluruh karyawan, baik pria maupun wanita memiliki kesempatan yang luas dan sama untuk terlibat dalam jalur pengembangan karir tersebut.

Recruitment is carried out openly according to the needs and qualifications required. In 2023, the Company will implement a negative growth strategy so that employee turnover considers productivity factors and key positions needed by the Company.

In 2023, there is an increase in employee turnover. However, the Company recruited nine employees for experienced hired positions. This shows that the Company has been trying to increase employee capacity through the harmful growth method, which considers employee productivity.

During 2023, the Company has successfully held four episodes of INTI Webinars filled with internal and external speakers.

Employees of PT INTI (Persero) also receive Recognition and Awards through various recognitions received individually, as well as awards obtained by the Company for employee performance.

Apart from that, Company employees also have the opportunity to study at PT INTI (Persero), through training, certification and further education, both at home and abroad. Then, PT INTI (Persero) employees also have the opportunity to develop careers through the fast track route, where all employees, both men and women, have broad and equal opportunities to be involved in this career development pathway.

Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan, Serta Layanan Medis

Occupational Safety, Health and Environment, and Medical Services

Selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), maka PT INTI (Persero) berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dalam setiap proses bisnis Perseroan.

Sejak tahun 2010, PT INTI sudah menjalankan SMK3 dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, sehat, dan produktif. Bagi PT INTI (Persero), partisipasi semua pihak dalam mengoptimalkan pelaksanaan budaya K3 merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, sehat, dan produktif serta berusaha menekan terjadinya kecelakaan kerja (*Zero Accident*) dan penyakit akibat kerja (PAK).

Implementasi SMK3 di PT INTI (Persero) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Kesehatan Kerja. Terkait pelaksanaannya, PT INTI (Persero) telah menjalani serangkaian audit oleh auditor eksternal yaitu PT Sucofindo (Persero) yang memberikan hasil penilaian bahwa SMK3 PT INTI (Persero) Berpredikat Kategori Bendera Emas.

Selanjutnya, sebagai wujud komitmen dan konsistensi PT INTI (Persero) dalam menerapkan SMK3 itu, PT INTI (Persero) pun telah meraih Penghargaan Kecelakaan Nihil (*Zero Accident*) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sejak tahun 2010 hingga tahun 2023.

Beberapa program kerja yang telah dijalankan antara lain:

1. Pembekalan K3 pada karyawan baru untuk menyiapkan mental dan kompetensi dasar kesehatan dan keselamatan kerja di Perseroan.
2. Pelatihan bagi karyawan dan karyawan anggota Tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta Tim Tanggap Darurat Bencana (TDB) mengenai K3 dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) secara periodik.
3. Simulasi Tanggap Darurat Bencana setiap tahun untuk membekali seluruh penghuni gedung agar siap dan tanggap terhadap bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

In line with the prevailing laws and regulations and compliance with government regulations related to Occupational Health and Safety, PT INTI (Persero) is committed to implementing the Occupational Health and Safety Management System in every business process of the Company.

*Since 2010, PT INTI has implemented the Occupational Health and Safety Management System with the aim of creating a safe, comfortable, healthy, and productive work environment. For PT INTI (Persero), the participation of all parties in optimizing the implementation of the Occupational Health and Safety Management System culture is the key to creating a safe, comfortable, healthy, and productive work environment and trying to reduce the occurrence of work accidents (*Zero Accidents*) and work-related diseases.*

The implementation of the Occupational Health and Safety Management System at PT INTI (Persero) refers to Government Regulation Number 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Safety and Health Management Systems and ISO 45001:2018 concerning Occupational Safety and Health Management Systems. Regarding its implementation, PT INTI (Persero) has undergone a series of audits by an external auditor, namely PT Sucofindo (Persero), which resulted in an assessment that PT INTI (Persero)'s the Occupational Health and Safety Management System was predicated in the Gold Flag Category.

Furthermore, as a form of commitment and consistency of PT INTI (Persero) in implementing the Occupational Health and Safety Management System, PT INTI (Persero) has also won the Zero Accident Award from the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia from 2010 to 2023.

Several of the work programs that have been carried out include:

1. *Provision of OHS for new employees to prepare mental and basic competencies for occupational health and safety in the Company.*
2. *Periodic training for employees and members of the Occupational Safety and Health Committee and Disaster Emergency Response Team regarding OHS and First Aid in Accidents.*
3. *Disaster Emergency Response Simulation every year to equip all building occupants to be ready and responsive to disasters that can occur at any time.*

- Inspeksi K3 secara periodik untuk memastikan kondisi aman dalam bekerja
- Pertemuan rutin Tim P2K3 untuk membahas dan mengevaluasi program kerja SMK3 yang telah direncanakan.

- Periodic OHS inspections to ensure safe working conditions
- Regular meeting of the the Occupational Safety and Health Committee Team to discuss and evaluate the planned work program of OHS Management System.

Keikutsertaan dalam Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan

PT INTI (Persero) telah mengikuti program asuransi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak 1 Januari 2014 sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

PT INTI (Persero) telah mengikutsertakan Direksi dan Karyawan Perseroan, termasuk keluarganya pada Program BPJS Kesehatan.

Peserta BPJS Kesehatan PT INTI (Persero) Tahun 2023.

Participation in the Social Security Administration Health Program

PT INTI (Persero) has participated in the Health Social Security Administration Agency insurance program since January 1, 2014, in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, and Law Number 24 of 2014. 2011 concerning the Social Security Administrator.

PT INTI (Persero) has included the Directors and Employees of the Company, including their families, in the Health Social Security Administration Agency Program.

PT INTI (Persero) Health Social Security Administration Agency Participants in 2023.

Peserta Participant	Jumlah Amount	Total luran Tahun 2023 Total Dues for 2023 (Rp)
Direksi The Board of Directors	3	21.600.000
Keluarga Direksi Family of the Board of Directors	12	
Karyawan Tetap dan Karyawan Kontrak Permanent Employees and Contract Employees	151	924.559.629
Keluarga Karyawan Employee Family	176	

Pengembangan Kompetensi

Competency Development

Tantangan bisnis dan perkembangan teknologi menuntut penyesuaian dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan sehingga karyawan harus selalu dikembangkan agar memiliki kompetensi unggul di bidang kepemimpinan ataupun teknis sesuai arah bisnis Perseroan.

Perseroan juga memastikan bahwa kompetensi kunci perlu dipelajari dan dimiliki oleh karyawan agar hasil pembelajaran dapat membawa kontribusi bagi Perseroan.

Business challenges and technological developments require continuous adjustment and improvement of competence so that employees must always be developed so that they have superior competencies in leadership or technical fields according to the Company's business direction.

The Company also ensures that key competencies need to be learned and possessed by employees so that learning outcomes can contribute to the Company.

Pada tahun 2023, Perseroan telah merealisasikan sebesar 49,67% anggaran biaya seminar dan pelatihan, khususnya melalui sertifikasi.

In 2023, the Company realized 49,67% of the seminar and training budget, especially through certification.

Berikut merupakan pengembangan karyawan selama tahun 2023 berdasarkan Jenis Pengembangan.

The following is employee development for 2023 based on the Type of Development.

No.	Jenis Pengembangan SDM <i>Types of HR Development</i>	2022	2023
1	Knowledge Sharing	1.115	269
2	Pelatihan <i>Training (Inhouse & Public)</i>	65	247
3	Seminar/Forum	140	2
4	Sertifikasi <i>Certification</i>	22	25
5	Workshop	57	71
Jumlah <i>Total</i>		1.514	614

Selanjutnya, pada tahun 2023, Perseroan berfokus pada peningkatan kompetensi bidang-bidang kunci yang dapat mendukung peningkatan performansi Perseroan, salah satunya melalui sertifikasi di bidang *electrical*, *quality management*, *project management*, dan *finance*.

Furthermore, in 2023, the Company focuses on increasing the competence of key areas that can support the improvement of the Company's performance, one of which is through certification in the fields of electrical, quality management, telecommunication, project management, and finance.

No.	Nama Pengembangan SDM <i>Name of HR Development</i>	Jenis Pengembangan SDM <i>Type of HR Development</i>	Tanggal Mulai <i>Start Date</i>	Tanggal Selesai <i>End Date</i>	Jenis Kompetensi <i>Type Competence</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	SUPERVISOR SENIOR PEMELIHARAAN PLTS	Sertifikasi <i>Certification</i>	1/2/2023	1/2/2023	<i>Electrical</i>	1
2	SUPERVISOR SENIOR PENGOPERASIAN PLTS	Sertifikasi <i>Certification</i>	1/2/2023	1/2/2023	<i>Electrical</i>	1
3	SUPERVISOR PENGOPERASIAN PLTS	Sertifikasi <i>Certification</i>	1/2/2023	1/2/2023	<i>Electrical</i>	4
4	SUPERVISOR JUNIOR BANG & SANG PLTS	Sertifikasi <i>Certification</i>	1/2/2023	1/2/2023	<i>Electrical</i>	1
5	SUPERVISOR JUNIOR PEMELIHARAAN PLTS	Sertifikasi <i>Certification</i>	1/2/2023	1/2/2023	<i>Electrical</i>	3
6	PELAKSANA SR PEMELIHARAAN PERALATAN PLTS	Sertifikasi <i>Certification</i>	1/2/2023	1/2/2023	<i>Electrical</i>	3
7	OPERATOR SENIOR LOKAL UNIT PLTS	Sertifikasi <i>Certification</i>	1/2/2023	1/2/2023	<i>Electrical</i>	1
8	PELAKSANA SENIOR BANG&SANG LISTRIK PLTS	Sertifikasi <i>Certification</i>	1/2/2023	1/2/2023	<i>Electrical</i>	1

9	PENGETAHUAN DASAR DI BIDANG DANA PENSIUN	Sertifikasi <i>Certification</i>	1/13/2023	1/13/2023	Finance	1
10	TRAINING PRODUKSI LAPTOP TAHAP 3	Pelatihan <i>Training</i>	2/2/2023	2/2/2023	Product Knowledge	17
11	TRAINING PRODUKSI LAPTOP TAHAP 4	Pelatihan <i>Training</i>	2/3/2023	2/3/2023	Product Knowledge	18
12	SUPERVISOR PENGOPERASIAN PLTS	Sertifikasi <i>Certification</i>	2/1/2023	2/1/2023	Electrical	1
13	SUPERVISOR PENGOPERASIAN PLTS	Sertifikasi <i>Certification</i>	2/6/2023	2/6/2023	Electrical	1
14	TRAINING PRODUKSI LAPTOP TAHAP 5	Pelatihan <i>Training</i>	2/7/2023	2/7/2023	Product Knowledge	12
15	PRAKTEK ASSEMBLY INTIBOOK	Workshop	2/8/2023	2/8/2023	Production	20
16	INTRODUCTION TO PM & CAPM	Knowlegde Sharing	2/17/2023	2/17/2023	Project Management	53
17	MAN RISIKO DANA PENSIUN LEVEL UTAMA	Sertifikasi <i>Certification</i>	3/2/2023	3/2/2023	Finance	1
18	TR.TESTING & REPAIR OERLIKON S. LANJUTAN	Pelatihan <i>Training</i>	2/13/2023	3/3/2023	Repair	4
19	TRAINING TKDN & PROSES SERTIFIKASI TKDN	Knowlegde Sharing	3/15/2023	3/15/2023	Product Knowledge	14
20	TRAINING TKDN TAHAP 2	Knowlegde Sharing	3/20/2023	3/20/2023	Product Knowledge	15
21	TRAINING PRODUKSI CCTV & ACCESS POINT	Pelatihan <i>Training</i>	3/31/2023	3/31/2023	Product Knowledge	22
22	TRAINING PRODUKSI CCTV & ACCESS POINT 2	Pelatihan <i>Training</i>	4/11/2023	4/11/2023	Product Knowledge	17
23	PEND. & TRAINING AHLI KEPABEANAN (PPJK)	Pelatihan <i>Training</i>	11/7/2022	2/1/2023	Logistic	1
24	TRAINING PRODUKSI CCTV & ACCESS POINT 3	Pelatihan <i>Training</i>	5/2/2023	5/2/2023	Product Knowledge	9
25	TRAINING PRODUKSI CCTV & ACCESS POINT 4	Pelatihan <i>Training</i>	5/3/2023	5/5/2023	Product Knowledge	12
26	PRAKTEK CCTV & ACCESS POINT	Workshop	5/8/2023	5/8/2023	Product Knowledge	19
27	PRAKTEK CCTV & ACCESS POINT TAHAP 2	Workshop	5/9/2023	5/10/2023	Product Knowledge	21
28	AUDITOR SMK3	Sertifikasi <i>Certification</i>	5/13/2023	5/20/2023	Quality Management	1
29	TRAINING PRODUKSI PJU	Pelatihan <i>Training</i>	5/30/2023	5/30/2023	Product Knowledge	8
30	PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT	Pelatihan <i>Training</i>	5/3/2023	5/19/2023	Business Law	1
31	TRAINING PRODUKSI PJU 2	Pelatihan <i>Training</i>	6/5/2023	6/5/2023	Product Knowledge	9



32	COMMUNICATION IN DIGITAL WORLD	Forum	05/05/2023	06/05/2023	Corporate Communication	2
33	OBD : PENGENALAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN	Pelatihan Training	12/06/2023	12/06/2023	Business Process	2
34	GELADI RESIK TKDN PRODUKSI PJU 1	Pelatihan Training	16/06/2023	16/06/2023	Product Knowledge	7
35	GELADI RESIK TKDN PRODUKSI PJU 2	Pelatihan Training	19/06/2023	19/06/2023	Product Knowledge	8
36	VERIFIKASI TKDN PRODUKSI PJU	Workshop	6/22/2023	6/22/2023	Product Knowledge	11
37	MENGENAL PENGASUHAN B. NEUROPARENTING	Knowledge Sharing	6/21/2023	6/21/2023	Mental Health	63
38	ONBOARDING BKO SALES & MARKETING	Pelatihan Training	03/07/2023	03/07/2023	Marketing & Sales	20
39	TRAINING SMART METER	Pelatihan Training	12/07/2023	7/13/2023	Product Knowledge	21
40	RISIKO KES PEKERJA & POLA HIDUP SEHAT	Knowledge Sharing	21/07/2023	7/21/2023	Physical Health	54
41	GLOBAL PRO & BUSINESS TRANSFORMATION	Knowledge Sharing	7/27/2023	7/27/2023	Leadership of Change	2
42	PELUIT INTEGRITAS BATCH 3	Pelatihan Training	8/22/2023	8/24/2023	Audit Management	2
43	JUNIOR WEB DEVELOPER	Sertifikasi Certification	8/7/2023	8/9/2023	Information System	1
44	INTI FRIDAY FUN GAMES	Pelatihan Training	9/1/2023	9/1/2023	Physical Health	39
45	OPERATOR K3 FORKLIFT KELAS 2	Sertifikasi Certification	8/8/2023	8/10/2023	Occupational Health and Safety (OHS)	1
46	JUNIOR MOBILE PROGRAMMER	Sertifikasi Certification	10/16/2023	10/18/2023	Information System	1
47	TRAINING BASIC ACCOUNT MANAGER	Pelatihan Training	6/11/2023	8/11/2023	Account Management / Planning	9
48	PETUGAS PERAN KEBAKARAN KELAS D	Sertifikasi Certification	6/11/2023	9/11/2023	Occupational Health and Safety (OHS)	1
49	UNLOCKING CUSTOMER EXPERIENCE INSIGHTS	Knowledge Sharing	15/11/2023	15/11/2023	Marketing Research	1
50	CERTIFIED RISK MANAGEMENT OFFICER	Sertifikasi Certification	20/11/2023	22/11/2023	Risk Management	1
51	ASSEMBLY METER LISTRIK (SMART METER)	Pelatihan Training	12/12/2023	12/15/2023	Product Knowledge	9
52	PRODUCT KNOWLEDGE TRAINING	Knowledge Sharing	12/12/2023	12/12/2023	Product Knowledge	17
53	GCG & ANTI KORUPSI	Knowledge Sharing	12/19/2023	12/19/2023	GCG Knowledge	50
Total						614

Manajemen Pengetahuan

Knowledge Management

Pada tahun 2023, PT INTI (Persero) telah menyelenggarakan 16 episode Webinar INTI yang diisi oleh pemateri internal dan eksternal. Hal ini sangat mendukung proses pengembangan kompetensi karyawan yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah karyawan yang terlibat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM).

In 2023, PT INTI (Persero) successfully has held 16 episodes of INTI Webinars filled with internal and external speakers. This greatly supports the employee competency development process, as indicated by the increase in the number of employees involved in human resource development (HR).

Sistem Manajemen Unjuk Kerja

Performance Management System

PT INTI (Persero) telah melaksanakan performance appraisal 360 derajat kepada seluruh karyawan. Selain itu, setiap tiga bulan sekali, dilakukan pengukuran kinerja karyawan melalui Sasaran Kinerja Individu (SKI).

PT INTI (Persero) has conducted a 360-degree performance appraisal of all employees. In addition, every three months, employee performance is measured through Individual Performance Targets.

Kompetensi Pegawai

Employee Competence

PT INTI (Persero) menjadikan kompetensi sebagai salah satu pertimbangan dalam melaksanakan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, Perseroan juga memastikan strategi bisnis Perseroan dapat dilaksanakan sesuai dengan target, melalui tersedianya talenta-talenta yang menjadi suksesi posisi kunci Perseroan.

PT INTI (Persero) makes competence one of the considerations in implementing Human Resources (HR) development programs. In addition, the Company also ensures that the Company's business strategy can be implemented in accordance with the target through the availability of talents who become the successor of key positions of the Company.

Untuk memastikan hal tersebut, Perseroan melakukan metode pengukuran kompetensi melalui metode *assessment center*, khususnya untuk posisi Direksi Anak Perusahaan.

To ensure this, the Company conducts a competency measurement method through the assessment center method, especially for the positions of the Board of Directors of Subsidiaries.



Remunerasi

Remuneration

Perseroan memberikan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh karyawan. Remunerasi yang diberikan kepada karyawan berdasarkan pada 3P yaitu Person sesuai dengan kompetensi masing-masing karyawan dalam klasifikasi masing-masing *Band*, *Position* sesuai dengan jabatan yang disandanginya, dan *Performance* yaitu kontribusi atau kinerja yang dicapai dalam tahun berjalan.

The Company provides compensation for the work done by all employees. The remuneration given to employees is based on the 3Ps, namely Person in accordance with the competence of each employee in their Band, Position according to the position they hold, and Performance, namely the contribution or performance achieved in the current year.

Dalam menetapkan kebijakan remunerasi, PT INTI (Persero) menggunakan pertimbangan internal dan eksternal

In the setting of the remuneration policy, PT INTI (Persero) uses the Company's internal and external considerations, such as

perusahaan seperti kondisi Perseroan, rencana jangka panjang perusahaan, dan lingkungan bisnis. Remunerasi yang diberikan berupa kompensasi bulanan, kompensasi tahunan, dan fasilitas bagi karyawan sesuai band dan jabatan masing-masing.

the Company's condition, the Company's long-term plans, and the business environment. The remuneration provided is in the form of monthly compensation, annual compensation, and facilities for employees according to their respective bands and positions.

Hubungan Industrial

Industrial Relations

Perseroan berkomitmen untuk memelihara Hubungan Industrial sebagai sebuah sistem hubungan kerja yang baik, dengan tujuan untuk memastikan terwujudnya dan terpenuhinya perlindungan terhadap kepentingan, hak, serta kewajiban semua pihak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan senantiasa menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra dalam membangun dan memelihara hubungan industrial yang harmonis di lingkungan kerja melalui komunikasi secara berkala dan berkesinambungan.

Dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis antara manajemen dan karyawan maupun antar sesama karyawan, Perseroan bersama dengan Serikat Pekerja INTI (SEJATI) telah menyepakati Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang ditinjau setiap 2 (dua) tahun.

Perusahaan bersama Serikat Pekerja secara berkala melakukan pertemuan baik formal maupun informal dalam upaya membangun dan menjaga komunikasi yang lebih baik. Sepanjang tahun 2023, Perseroan dan Serikat Pekerja telah melakukan beberapa kali pertemuan formal. Melalui serangkaian pertemuan tersebut, diharapkan tercipta hubungan industrial yang harmonis sehingga dapat terbangun lingkungan kerja yang sehat dan konstruktif.

The Company is committed to maintaining Industrial Relations as a good working relationship system, with the aim of ensuring the realization and fulfillment of the protection of the interests, rights, and obligations of all parties in accordance with the applicable laws and regulations.

The Company always places the Labor Union as a partner in building and maintaining harmonious industrial relations in the work environment through regular and continuous communication.

In order to establish a harmonious relationship between management and employees as well as among employees, the Company together with the INTI Workers Union or Serikat Pekerja INTI (SEJATI) have agreed on a Collective Labor Agreement in accordance with the mandate of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which is reviewed every 2 (two) years.

The Company and the Labor Union regularly hold formal and informal meetings in an effort to build and maintain better communication. Throughout 2023, the Company and the Labor Union have held several formal meetings. Through this series of meetings, it is hoped that harmonious industrial relations will be created so that a healthy and constructive work environment can be developed.

Sinergi Manajemen dan Serikat Pekerja

Synergy of Management and Labor Union

PT INTI (Persero) menempatkan karyawan sebagai mitra strategis bagi keberlanjutan usaha. PT INTI (Persero) menjamin kebebasan karyawan untuk berserikat, yang merefleksikan kepatuhan Perseroan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh serta *International Labour Organization Convention 87* yang menjamin kebebasan semua pekerja untuk masuk dalam organisasi pekerja yang dikelola secara profesional sebagai sarana penghubung antar Pekerja dan Perusahaan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan saling

PT INTI (Persero) places employees as strategic partners for business sustainability. PT INTI (Persero) guarantees the freedom of employees to associate, which reflects the Company's compliance with Law Number 21 of 2000 concerning Trade Unions or Labor Unions and the International Labor Organization Convention 87 which guarantees the freedom of all workers to join professionally managed worker organizations as a means of liaison between Employees and the Company to create harmonious industrial relations and mutually beneficial to all parties.

menguntungkan semua pihak.

PT INTI (Persero) memiliki 1 (satu) Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja INTI (SEJATI). Untuk menjembatani kepentingan Perseroan dan kepentingan Karyawan, terutama terkait Sumber Daya Manusia (SDM), Perseroan dan SEJATI menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) setiap dua tahun dan didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. PKB berisi tentang hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan karyawan yang mengikat pada kedua belah pihak.

Perseroan menerapkan prinsip non-diskriminasi yang ketat dan konsisten dalam pengelolaan SDM. Perseroan memiliki kebijakan rekrutasi, penilaian kinerja, remunerasi, dan pengembangan karir yang profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

PT INTI (Persero) has 1 (one) Labor Union named the INTI Workers Union or Serikat Pekerja INTI (SEJATI). To bridge the interests of the Company and the interests of the Employees, especially regarding Human Resources, the Company and SEJATI draw up the Collective Labor Agreement every two years and register it with the Manpower and Transmigration Office. Collective Labor Agreement contains matters related to employee welfare that are binding on both parties.

The Company applies strict and consistent principles of non-discrimination in Human Resource management. The company has a policy of recruitment, performance appraisal, remuneration, and professional career development regardless of ethnicity, religion, race, class, gender, and physical condition.

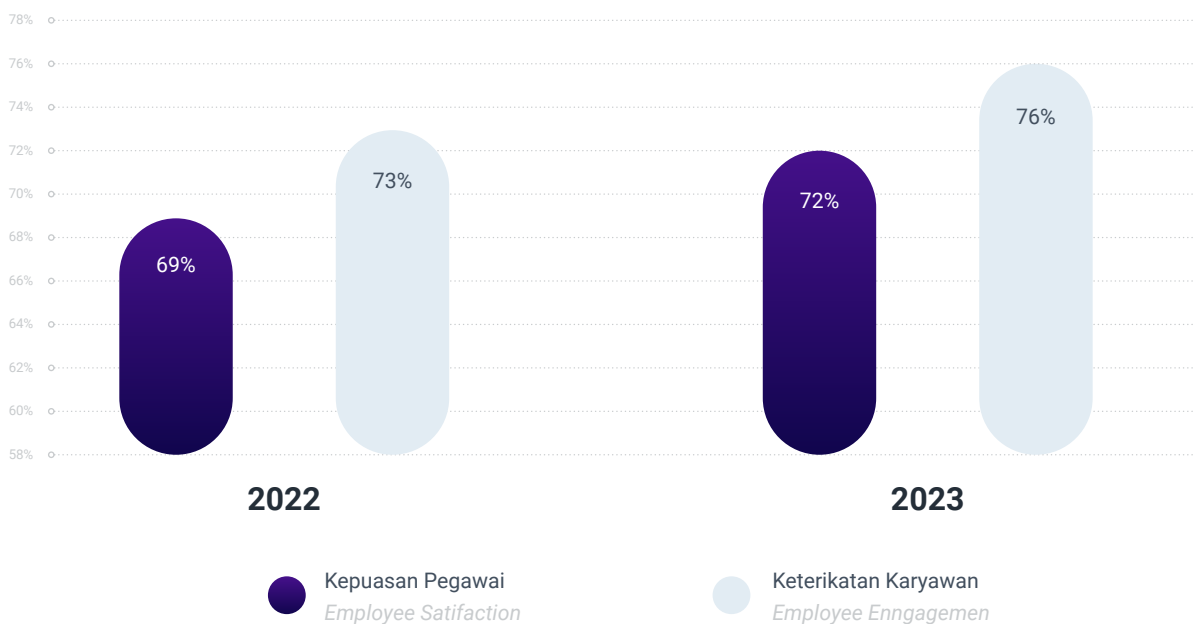
Keterikatan dan Kepuasan Pegawai

Employee Engagement and Satisfaction

Pada tahun 2023, indeks kepuasan karyawan menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 72%. Selain itu, terjadi peningkatan pula pada indeks keterikatan karyawan dari tahun sebelumnya menjadi 76%.

In 2023, the employee satisfaction index shows a decrease from the previous year to 72%. In addition, there was an increase in the employee engagement index from the previous year to 76%.

Indeks Kepuasan dan Keterikatan Pegawai
Employee Satisfaction and Engagement Index



Produktivitas Pegawai

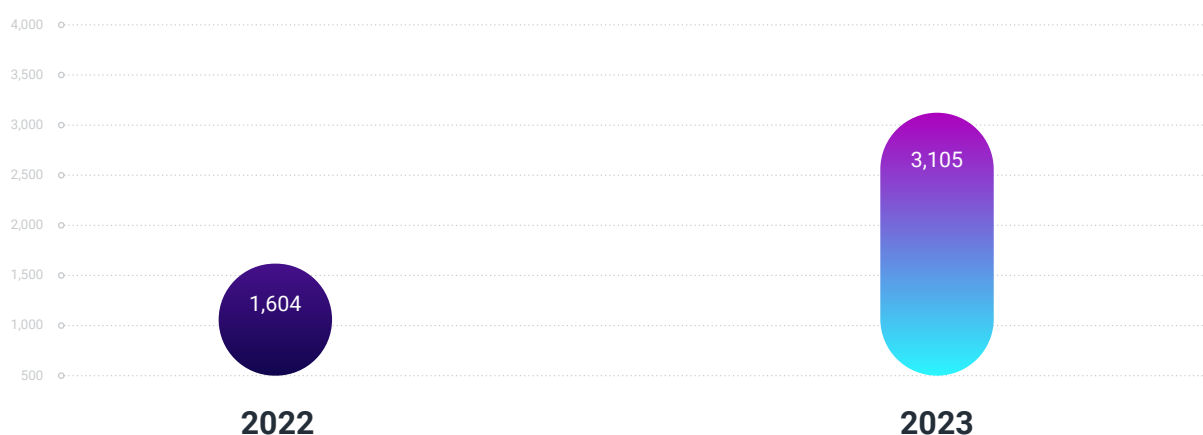
Employee Productivity

Sumber daya manusia merupakan elemen yang paling strategis di dalam organisasi, maka peningkatan produktivitas kerja merupakan fokus bagi Perseroan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, PT INTI (Persero) mengalami peningkatan produktivitas karyawan, dari Rp1.604 juta per karyawan, menjadi Rp3.105 juta per karyawan.

Human resources are the most strategic element in the organization, so increasing work productivity is a focus for the Company every year. In 2023, PT INTI (Persero) has experienced an increase in employee productivity, from Rp1,604 million per employee to Rp3,105 million per employee.

Produktivitas Karyawan (Rp. juta)

Employee Productivity (Rp. million)



Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Employment Problem Complaint Mechanism

Apabila terdapat keluhan kesah yang dialami oleh karyawan dalam pelaksanaan pekerjaan, maka karyawan PT INTI (Persero) berhak mengajukan keluhan kesahnya secara berjenjang kepada Atasan Langsung, sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama 2021-2023.

Karyawan dapat menyampaikan keluhan kesah atau pernyataan ketidakpuasan terhadap setiap tindakan dan/atau kebijakan Perseroan yang terkait dengan hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan/atau peraturan kerja.

Setiap atasan atau wakil Perseroan harus memperhatikan secara penuh atas pengaduan karyawan atau bawahannya dan berupaya untuk menyelesaikan secara tuntas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun Tata Cara Pengaduan dan Penyelesaian Keluh Kesah dapat dilakukan secara berjenjang, dengan mekanisme berikut:

If there are complaints raised by employees in carrying out their work, PT INTI (Persero) employees have the right to submit their complaints in stages to their Direct Superiors, in accordance with the 2021-2023 Collective Labor Agreement.

Employees can submit complaints or statements of dissatisfaction with any actions and/or Company policies related to employment relations, working conditions and/or work regulations.

Every supervisor or representative of the Company must pay full attention to complaints from employees/subordinates and try to resolve them completely in accordance with applicable regulations.

The Procedure for Complaints and Complaints Resolution can be carried out in stages, with the following mechanisms:

1. Penyelesaian keluhan kesah karyawan dibicarakan dan diselesaikan secara lisan atau tulisan dengan Atasan Langsung karyawan.
2. Atasan Langsung harus merespon dan memberikan jawaban tertulis atas penyelesaian keluhan kesah yang disampaikan, jika keluhan kesah tersebut didapatkan penyelesaian, maka para pihak harus segera melaksanakan hasil penyelesaian tersebut.
3. Apabila penyelesaian belum memuaskan, karyawan dapat menyampaikan keluhan kesahnya secara tertulis ke Atasan Lebih Tinggi.
4. Atasan yang Lebih Tinggi harus menjawab secara tertulis atas penyelesaian keluhan kesah disampaikan, jika atas keluhan kesah tersebut didapatkan penyelesaian, maka para pihak harus melaksanakan hasil penyelesaian tersebut.
5. Apabila penyelesaian belum juga memuaskan, karyawan dapat menyampaikan keluhan kesahnya secara tertulis kepada Serikat Pekerja dengan melampirkan bukti penyampaian keluhan kesah untuk diselesaikan secara musyawarah dengan perusahaan.
6. Jika musyawarah dicapai suatu kesepakatan, maka sejak tercapainya kesepakatan para pihak harus melaksanakan keputusan yang telah disepakati.
7. Jika musyawarah tidak dapat menyelesaikan keluhan kesah, maka selanjutnya dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

PT INTI (Persero) membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit yang berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah mengenai hal ketenagakerjaan di Perseroan yang pembentukannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Settlement of employee complaints is discussed and resolved orally or in writing with the employee's Direct Supervisor.
2. The Direct Supervisor must respond and provide a written answer to the settlement of the complaint submitted, if the complaint is resolved, then the parties must immediately implement the results of the settlement.
3. If the settlement is not satisfactory, the employee can submit his complaint in writing to the Higher Superior.
4. The Higher Superior must answer in writing for the settlement of the complaint submitted, if the complaint is resolved, then the parties must carry out the results of the settlement.
5. If the settlement is not yet satisfactory, the employee can submit his complaint in writing to the Labor Union by attaching proof of the submission of the complaint to be resolved by deliberation with the Company.
6. If an agreement is reached by deliberation, then since the agreement is reached, the parties must implement the agreed decision.
7. If the deliberation cannot resolve the complaint, then it can then be resolved in accordance with the applicable provisions in the settlement of industrial relations disputes.

PT INTI (Persero) established a Bipartite Cooperation Institution which serves as a forum for communication, consultation and deliberation on labor matters in the Company whose establishment is based on the prevailing laws and regulations.



Demografi Karyawan

Employee Demography

Sumber daya manusia diyakini merupakan aset utama yang dibutuhkan untuk menjabarkan strategi dan melaksanakan misi dalam rangka mewujudkan visi Perseroan. Dengan visi Perseroan untuk berperan Menjadi Perusahaan Teknologi Terpercaya dengan Cakupan Industri yang Luas dan Berkualitas, Perseroan membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat kompetensi dan motivasi berprestasi yang tinggi.

Dalam upaya penyediaan sumber daya manusia terhadap kebutuhan bisnis, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023, Perseroan terus melanjutkan program pengembangan sumber daya manusia secara efektif baik bagi peningkatan hard competences maupun *soft competence* yang pada akhirnya dapat berujung pada peningkatan produktivitas setiap individu karyawan.

Pengembangan kompetensi menuju peningkatan produktivitas ini juga didorong secara bersamaan dengan implementasi sistem remunerasi berbasis kinerja atau Pay for Performances yang merupakan satu komponen remunerasi karyawan di samping Pay for Person dan Pay for Position.

Pada tahun 2023, jumlah tenaga kerja Perseroan tercatat sebanyak 161 orang atau berkurang 25.82% dibanding tahun sebelumnya, yang terdiri atas Direksi, Dewan Komisaris, Staf Dewan Komisaris, Karyawan Tetap, karyawan yang dikontrak melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan Karyawan Entitas Anak.

Human resources are believed to be the main assets needed to outline strategies and carry out missions to realize the Company's vision. With the Company's vision to Becoming a Trusted Technology Company with a Wide and Quality Industry Coverage, the Company requires a workforce with a high level of competence and achievement motivation.

To provide human resources for business needs, as stated in the Company Work Plan and Budget 2023, the Company continues to develop human resource development programs effectively, both to increase hard competences and soft competencies, which in the end can lead to an increase in the productivity of each employee.

Competency development towards increasing productivity is also driven simultaneously with implementing a performance-based remuneration system or Pay for Performances, a component of employee remuneration in addition to Pay for Person and Pay for Position.

In 2023, the Company's workforce was recorded at 161 people or a decrease of 25.82% compared to the previous year, consisting of the Board of Directors, Board of Commissioners, Staff of the Board of Commissioners, Permanent Employees, employees who are contracted through a Specific Time Work Agreement, and Employees of Subsidiaries.

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Table of Employee Composition Based on Employment Status

Status Kepegawaian <i>Employment Status</i>	2023			2022		
	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total
Karyawan Tetap <i>Permanent Employees</i>	74	38	112	113	45	158
Karyawan Tidak Tetap <i>Temporary Employees</i>	23	16	39	31	14	45
Direksi, Dewan Komisaris, dan Staff Dewan Komisaris <i>Temporary Employees Board of Directors, Board of Commissioners, and Staff of Board of Commissioners</i>	9	1	10	9	1	10
Total	106	55	161	153	60	213

Sementara itu, berdasarkan usia karyawan, Perseroan terus mempertahankan karyawan di rentang usia di bawah usia 40 tahun, yang memiliki etos kerja tinggi, inovatif, dan produktif. Hal ini ditunjukkan dengan dominasi karyawan di bawah 40 tahun yang persentasenya mencapai 64.6%. Komposisi karyawan berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

Meanwhile, based on the age of employees, the Company continues to retain employees under 40 who have a high work ethic and are innovative and productive. This is indicated by the dominance of employees under 40, whose percentage reaches 64.6%. The composition of employees by age is as follows:

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia

Table of Employee Composition by Age Range

Rentang Usia <i>Age Range</i>	2023			2022		
	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total
21-25	3	5	8	8	5	13
26-30	11	9	20	13	14	27
31-35	25	16	41	37	18	55
36-40	17	17	34	17	14	31
41-45	10	0	10	6	0	6
46-50	1	0	1	1	0	1
>50	30	7	37	62	8	70
Total	106	55	151	144	59	203

Sebaran tingkat pendidikan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

The distribution of education levels in 2023 is as follows:

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Table of Employee Composition by Education Level

Pendidikan <i>Education</i>	2023			2022		
	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total
Sekolah Menengah Atas <i>Senior High School</i>	10	5	15	29	6	35
<i>Diploma</i>	11	4	15	18	4	22
Strata-1/Diploma-4 <i>Bachelor</i>	68	43	129	83	46	129
Strata-2 <i>Postgraduate</i>	8	2	16	13	3	16
Strata-3 <i>Doctoral</i>	0	0	0	1	0	1
Total	97	54	151	144	59	203

Komposisi karyawan berdasarkan level jabatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of employees based on position level in 2023 is as follows:

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan

Table of Employee Composition by Position Level

Level Jabatan <i>Position Level</i>	2023			2022		
	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total
Band 6	1	1	2	0	0	0
Band 5	12	1	13	15	1	16
Band 4	36	24	60	44	23	67
Band 3	34	14	48	57	19	76
Band 2	14	13	27	28	15	43
Band 1	0	1	1	0	1	1
Total	97	54	151	144	59	203

Komposisi karyawan berdasarkan jabatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of employees by position in 2023 is as follows:

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan

Table of Employee Composition by Position

Jabatan <i>Position</i>	2023			2022		
	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Total
Senior Vice President	0	1	1	0	0	0
Executive General Manager	2	0	2	0	0	0
Deputy Executive General Manager	3	0	3	0	0	0
Vice President	2	2	4	10	1	11
Manager	17	8	22	25	17	42
Keahlian <i>Skill</i>	33	16	49	20	5	24
Proyek <i>Project</i>	3	2	5	5	2	7
Staf	37	23	60	77	30	106
Tidak Aktif* <i>Not Active*</i>	0	2	2	7	4	11
Total	97	54	151	144	59	203

***Tidak Aktif** : Karyawan berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP), Karyawan berstatus Cuti di Luar Tanggungan Perusahaan (CLTP), dan Karyawan yang Mengikuti Program Dirumahkan.

***Not Active**: Employees with Retirement Preparation Period status, Employees with Unpaid Leave status, and Employees Participating in Temporary Paid Leave.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Employee Competency Training and Development Program

Dalam menunjang pencapaian target-target Perseroan serta meningkatkan kesesuaian kapasitas dan kapabilitas karyawan dengan kebutuhan bisnis Perusahaan dan kompetensi karyawan, Perseroan menyelenggarakan beberapa program *inhouse training* dan *public training*, serta sertifikasi yang telah dan sedang dilaksanakan.

Tantangan bisnis dan perkembangan teknologi menuntut penyesuaian dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan sehingga karyawan harus selalu dikembangkan agar memiliki kompetensi unggul di bidang kepemimpinan ataupun teknis sesuai arah bisnis Perseroan.

Perseroan juga memastikan bahwa kompetensi kunci dipelajari dan dimiliki oleh karyawan agar hasil pembelajaran dapat membawa kontribusi yang bagi Perseroan. Pada tahun 2023, Perseroan mengalokasikan biaya sertifikasi, seminar dan pelatihan sebesar Rp 510 juta, serta untuk meningkatkan kompetensi karyawan, maka pengembangan kompetensi lebih banyak ditujukan untuk sertifikasi kebutuhan bisnis Perusahaan.

Berikut merupakan pengembangan karyawan selama tahun 2023 berdasarkan Jenis Pengembangan:

In supporting the achievement of the Company's targets and increasing the suitability of employee capacity and capability with the Company's business needs and employee competence, the Company organizes several in-house and public training programs, as well as certifications that have been and are being implemented.

Business challenges and technological developments require continuous adjustment and improvement of competencies. According to the Company's business direction, employees must continuously be developed to have superior competencies in leadership or technical fields.

The Company also ensures that key competencies are learned and owned by employees so that the learning outcomes can contribute to the Company. In 2023, the Company budgeted Rp 510 million for certification, seminars and training, and to improve employee competency, competency development is more aimed at certifying the Company's business needs.

The following is employee development during 2023 by Type of Development:

No.	Jenis Pengembangan <i>Type of Development</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants</i> (orang/person)
1	Forum	2
2	Knowledge Sharing	269
3	Sertifikasi <i>Certification</i>	25
4	Training	247
5	Workshop	71
Total		614

Berikut merupakan daftar pengembangan sumber daya manusia selama tahun 2023 berdasarkan Jenis Kompetensi:

The following is a list of human resource development during 2023 by Type of Competence:

No.	Nama Pengembangan SDM <i>Name of HR Development</i>	Jenis Pengembangan SDM <i>Type of HR Development</i>	Tanggal Mulai <i>Start Date</i>	Tanggal Selesai <i>End Date</i>	Jenis Kompetensi <i>Type Competence</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	SUPERVISOR SENIOR PEMELIHARAAN PLTS	Sertifikasi <i>Certification</i>	1/2/2023	1/2/2023	Electrical	1
2	SUPERVISOR SENIOR PENGOPERASIAN PLTS	Sertifikasi <i>Certification</i>	1/2/2023	1/2/2023	Electrical	1
3	SUPERVISOR PENGOPERASIAN PLTS	Sertifikasi <i>Certification</i>	1/2/2023	1/2/2023	Electrical	4
4	SUPERVISOR JUNIOR BANG & SANG PLTS	Sertifikasi <i>Certification</i>	1/2/2023	1/2/2023	Electrical	1
5	SUPERVISOR JUNIOR PEMELIHARAAN PLTS	Sertifikasi <i>Certification</i>	1/2/2023	1/2/2023	Electrical	3
6	PELAKSANA SR PEMELIHARAAN PERALATAN PLTS	Sertifikasi <i>Certification</i>	1/2/2023	1/2/2023	Electrical	3
7	OPERATOR SENIOR LOKAL UNIT PLTS	Sertifikasi <i>Certification</i>	1/2/2023	1/2/2023	Electrical	1
8	PELAKSANA SENIOR BANG&SANG LISTRIK PLTS	Sertifikasi <i>Certification</i>	1/2/2023	1/2/2023	Electrical	1
9	PENGETAHUAN DASAR DI BIDANG DANA Pensiun	Sertifikasi <i>Certification</i>	1/13/2023	1/13/2023	Finance	1
10	TRAINING PRODUKSI LAPTOP TAHAP 3	Pelatihan <i>Training</i>	2/2/2023	2/2/2023	Product Knowledge	17
11	TRAINING PRODUKSI LAPTOP TAHAP 4	Pelatihan <i>Training</i>	2/3/2023	2/3/2023	Product Knowledge	18
12	SUPERVISOR PENGOPERASIAN PLTS	Sertifikasi <i>Certification</i>	2/1/2023	2/1/2023	Electrical	1
13	SUPERVISOR PENGOPERASIAN PLTS	Sertifikasi <i>Certification</i>	2/6/2023	2/6/2023	Electrical	1
14	TRAINING PRODUKSI LAPTOP TAHAP 5	Pelatihan <i>Training</i>	2/7/2023	2/7/2023	Product Knowledge	12
15	PRAKTEK ASSEMBLY INTIBOOK	Workshop	2/8/2023	2/8/2023	Production	20
16	INTRODUCTION TO PM & CAPM	Knowlegde Sharing	2/17/2023	2/17/2023	Project Management	53
17	MAN RISIKO DANA Pensiun LEVEL UTAMA	Sertifikasi <i>Certification</i>	3/2/2023	3/2/2023	Finance	1
18	TR.TESTING & REPAIR OERLIKON S. LANJUTAN	Pelatihan <i>Training</i>	2/13/2023	3/3/2023	Repair	4
19	TRAINING TKDN & PROSES SERTIFIKASI TKDN	Knowlegde Sharing	3/15/2023	3/15/2023	Product Knowledge	14
20	TRAINING TKDN TAHAP 2	Knowlegde Sharing	3/20/2023	3/20/2023	Product Knowledge	15
21	TRAINING PRODUKSI CCTV & ACCESS POINT	Pelatihan <i>Training</i>	3/31/2023	3/31/2023	Product Knowledge	22

22	TRAINING PRODUKSI CCTV & ACCESS POINT 2	Pelatihan <i>Training</i>	4/11/2023	4/11/2023	Product Knowledge	17
23	PEND. & TRAINING AHLI KEPABEANAN (PPJK)	Pelatihan <i>Training</i>	11/7/2022	2/1/2023	Logistic	1
24	TRAINING PRODUKSI CCTV & ACCESS POINT 3	Pelatihan <i>Training</i>	5/2/2023	5/2/2023	Product Knowledge	9
25	TRAINING PRODUKSI CCTV & ACCESS POINT 4	Pelatihan <i>Training</i>	5/3/2023	5/5/2023	Product Knowledge	12
26	PRAKTEK CCTV & ACCESS POINT	Workshop	5/8/2023	5/8/2023	Product Knowledge	19
27	PRAKTEK CCTV & ACCESS POINT TAHAP 2	Workshop	5/9/2023	5/10/2023	Product Knowledge	21
28	AUDITOR SMK3	Sertifikasi <i>Certification</i>	5/13/2023	5/20/2023	Quality Management	1
29	TRAINING PRODUKSI PJU	Pelatihan <i>Training</i>	5/30/2023	5/30/2023	Product Knowledge	8
30	PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT	Pelatihan <i>Training</i>	5/3/2023	5/19/2023	Business Law	1
31	TRAINING PRODUKSI PJU 2	Pelatihan <i>Training</i>	6/5/2023	6/5/2023	Product Knowledge	9
32	COMMUNICATION IN DIGITAL WORLD	Forum	05/05/2023	06/05/2023	Corporate Communication	2
33	OBD : PENGENALAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN	Pelatihan <i>Training</i>	12/06/2023	12/06/2023	Business Process	2
34	GELADI RESIK TKDN PRODUKSI PJU 1	Pelatihan <i>Training</i>	16/06/2023	16/06/2023	Product Knowledge	7
35	GELADI RESIK TKDN PRODUKSI PJU 2	Pelatihan <i>Training</i>	19/06/2023	19/06/2023	Product Knowledge	8
36	VERIFIKASI TKDN PRODUKSI PJU	Workshop	6/22/2023	6/22/2023	Product Knowledge	11
37	MENGENAL PENGASUHAN B. NEUROPARENTING	Knowledge Sharing	6/21/2023	6/21/2023	Mental Health	63
38	ONBOARDING BKO SALES & MARKETING	Pelatihan <i>Training</i>	03/07/2023	03/07/2023	Marketing & Sales	20
39	TRAINING SMART METER	Pelatihan <i>Training</i>	12/07/2023	7/13/2023	Product Knowledge	21
40	RISIKO KES PEKERJA & POLA HIDUP SEHAT	Knowledge Sharing	21/07/2023	7/21/2023	Physical Health	54
41	GLOBAL PRO & BUSINESS TRANSFORMATION	Knowledge Sharing	7/27/2023	7/27/2023	Leadership of Change	2
42	PELUIT INTEGRITAS BATCH 3	Pelatihan <i>Training</i>	8/22/2023	8/24/2023	Audit Management	2
43	JUNIOR WEB DEVELOPER	Sertifikasi <i>Certification</i>	8/7/2023	8/9/2023	Information System	1
44	INTI FRIDAY FUN GAMES	Pelatihan <i>Training</i>	9/1/2023	9/1/2023	Physical Health	39

45	OPERATOR K3 FORKLIFT KELAS 2	Sertifikasi <i>Certification</i>	8/8/2023	8/10/2023	Occupational Health and Safety (OHS)	1
46	JUNIOR MOBILE PROGRAMMER	Sertifikasi <i>Certification</i>	10/16/2023	10/18/2023	Information System	1
47	TRAINING BASIC ACCOUNT MANAGER	Pelatihan <i>Training</i>	6/11/2023	8/11/2023	Account Management / Planning	9
48	PETUGAS PERAN KEBAKARAN KELAS D	Sertifikasi <i>Certification</i>	6/11/2023	9/11/2023	Occupational Health and Safety (OHS)	1
49	UNLOCKING CUSTOMER EXPERIENCE INSIGHTS	Knowledge Sharing	15/11/2023	15/11/2023	Marketing Research	1
50	CERTIFIED RISK MANAGEMENT OFFICER	Sertifikasi <i>Certification</i>	20/11/2023	22/11/2023	Risk Management	1
51	ASSEMBLY METER LISTRIK (SMART METER)	Pelatihan <i>Training</i>	12/12/2023	12/15/2023	Product Knowledge	9
52	PRODUCT KNOWLEDGE TRAINING	Knowledge Sharing	12/12/2023	12/12/2023	Product Knowledge	17
53	GCG & ANTI KORUPSI	Knowledge Sharing	12/19/2023	12/19/2023	GCG Knowledge	50
54	PELATIHAN P3K DAN PEMADAM KEBAKARAN	Sertifikasi <i>Certification</i>	15.12.2022	15.12.2022	Quality Management	19
55	SOSIALISASI PRODUKSI LAPTOP INTI TAHAP 2	Sosialisasi <i>Socialization</i>	20.12.2022	20.12.2022	Product Knowledge	20
56	SUPERVISOR SENIOR PEMB ELEKTRIKAL PLTS	Sertifikasi <i>Certification</i>	19.11.2022	19.11.2022	Electrical	1
Total						614

Pada tahun 2024, Perusahaan merencanakan untuk melakukan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

In 2024, the Company plans to develop the following competencies:

Fungsi Bisnis <i>Business Function</i>	Triwulan I <i>Quarter I</i>	Triwulan II <i>Quarter II</i>	Triwulan III <i>Quarter III</i>	Triwulan IV <i>Quarter IV</i>
Pengembangan Bisnis <i>Business Development</i>	2	0	3	1
Komersial <i>Commercial</i>	0	2	1	0
Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>	0	0	1	0
Manajemen Proyek (Engineer) <i>Project Management (Engineer)</i>	1	1	1	1
Teknologi Informasi <i>Information Technology</i>	0	0	4	4
Perencanaan & Analisis Keuangan <i>Financial Planning & Analysis</i>	0	0	0	2

Audit Internal <i>Internal Audit</i>	9	7	3	6
Teknologi Informasi <i>Information Technology</i>	1	1	0	0
Kesehatan dan Keselamatan Kerja <i>Occupational Health and Safety</i>	4	4	0	1
Hukum <i>Legal</i>	0	1	0	2
Manufaktur <i>Manufacture</i>	0	0	1	0
Mekanikal <i>Mechanical</i>	0	1	0	0
Pemasaran <i>Marketing</i>	0	0	1	1
Manajemen Material <i>Material Management</i>	0	0	0	1
Pengembangan Produk <i>Product Development</i>	0	2	0	0
Manajemen Proyek <i>Project Management</i>	0	2	2	0
Hubungan Masyarakat <i>Public Relations</i>	2	0	6	5
Manajemen Risiko <i>Risk Management</i>	0	0	1	0
Penjualan <i>Sales</i>	1	1	1	1
Rekayasa Penjualan/Kemitraan <i>Sales Engineering/Partnership</i>	0	1	0	0
Perencanaan & Pengendalian Penjualan <i>Sales Planning & Control</i>	0	3	0	0
Penjualan/Rekayasa Penjualan/Pengadaan <i>Sales/Sales Engineering/Procurement</i>	0	2	0	1
Integrator Sistem <i>System Integrator</i>	3	1	0	0
Grand Total	23	29	25	26

Rencana pengembangan kompetensi tersebut akan dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, seminar, maupun melalui *platform* daring yang dimiliki oleh Perusahaan.

The competency development plan will be carried out through training, certification, and seminars, as well as through the online platform owned by the Company.

Informasi Pemegang Saham & Obligasi

Information for Shareholders and Bondholders

Komposisi Kepemilikan Saham

Composition of Share Ownership

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara dengan saham 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia is a State-Owned Enterprise with 100% shares owned by the Republic of Indonesia.

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Other Share Listing

Sampai dengan 31 Desember 2023, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) tidak mencatatkan efek lainnya pada Bursa Efek Indonesia. Oleh sebab itu, informasi kronologis pencatatan efek lainnya, tingkat bunga atau imbalan efek lainnya, tanggal jatuh tempo efek lainnya, serta jenis aksi korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya tidak tersedia.

Until December 31, 2023, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) is not listed other securities on The Indonesia Stock Exchange. Therefore, the chronological information on other securities listing, interest rates or other securities return, maturity date of other securities, and the type of corporate actions which cause any changes to the number of other securities is not available.

Kronologis Pencatatan Saham dan Aksi Korporasi

Chronology of Share Listing and Corporate Action

Sampai dengan 31 Desember 2023 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) merupakan Perusahaan Non-Listed sehingga belum melakukan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dan tidak menjual sahamnya kepada publik.

Oleh sebab itu, tidak terdapat informasi mengenai nama bursa saham, jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham, volume perdagangan saham, dan aksi korporasi yang terkait saham. Selain itu, informasi kronologis pencatatan saham dan jenis aksi korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah saham juga tidak tersedia.

Until December 31, 2023, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) is a Non-Listed Company, so it has not listed its shares on the Indonesia Stock Exchange and does not sell its shares to the public.

Therefore, there is no information on the stock exchange name, the number of outstanding shares, market capitalization, stock price, trading volume, or corporate action regarding shares. In addition, chronological information on the listing of share and the type of corporate actions that causes a changes to the number of shares is also not available.

Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (Suspension) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (Delisting)

Action of Temporary Suspension of Stock Trading (Suspension) and/or Delisting of Shares

Sampai dengan 31 Desember 2023, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) tidak pernah dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

Until December 31, 2023, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) has never been subject to sanctions for temporarily suspending stock trading and/or delisting shares.

Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

Information on Other Source of Funding

Sampai dengan 31 Desember 2023, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) tidak memiliki pendanaan lainnya yang bersumber dari publik.

Until December 31, 2023, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) did not collect other public funding sources.

Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi

Information regarding to Bonds, Sukuk, and/or Convertible Bonds

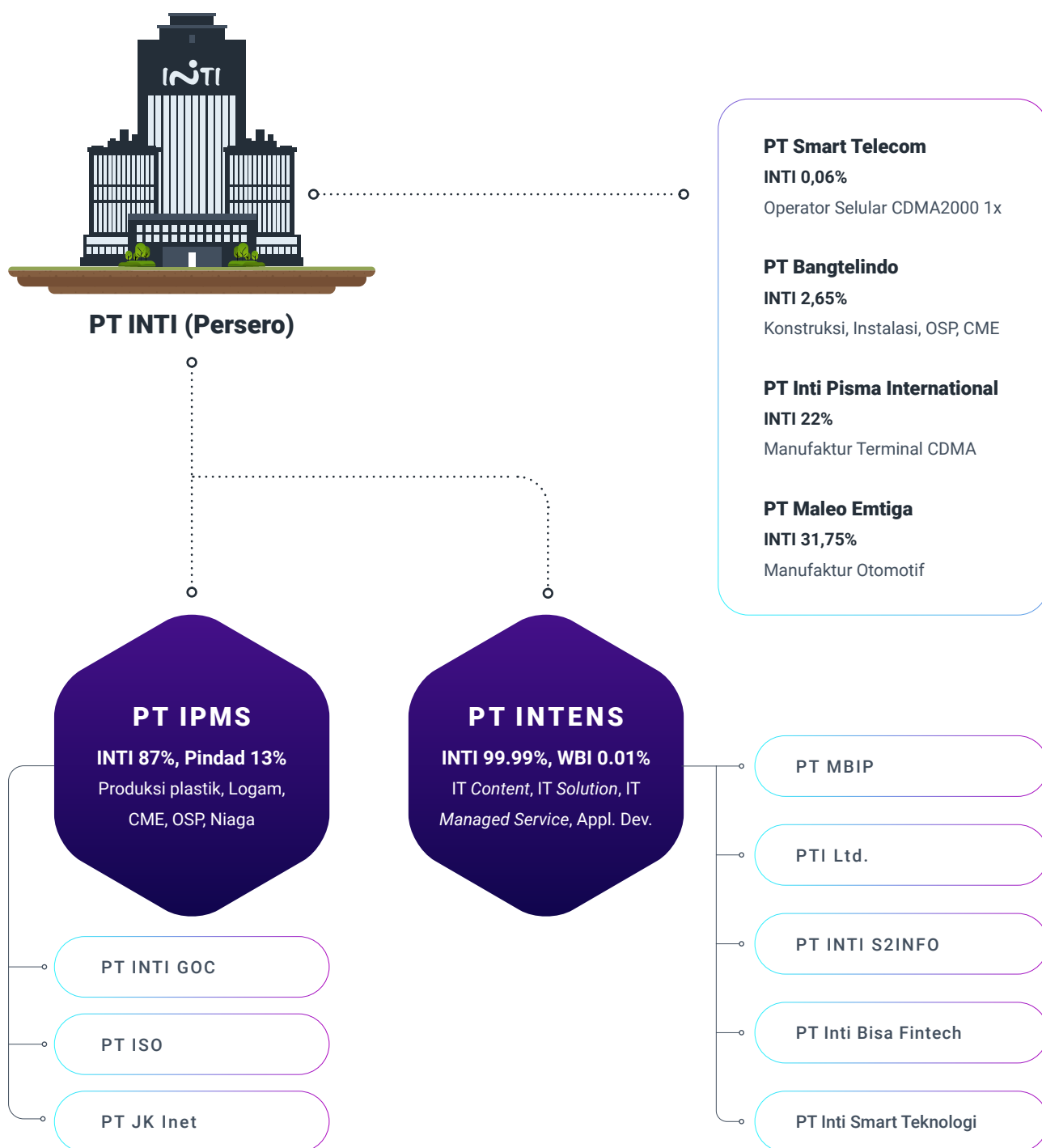
Sampai dengan 31 Desember 2023, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) tidak menerbitkan obligasi, sukuk, atau obligasi konversi sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah obligasi, sukuk, atau obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga atau imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi atau sukuk.

Until December 31, 2023, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) did not issue bonds, sukuk or convertible bonds, so there is no information regarding the number of outstanding bonds, sukuk or convertible bonds, interest or yield rates, maturity date, and bond or sukuk ratings.



Struktur Grup Perusahaan

Structure of Company Group



Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

Structure of Company Group



PT INTI Pindad Mitra Sejati (PT IPMS)

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT INTI Pindad Mitra Sejati Nomor 20 tertanggal 21 Maret 2005 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-21806.HT.01. 01.TH.2005 tertanggal 5 Agustus 2005, sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 23 tertanggal 20 Maret 2007.

Based on the Deed of Company Limited PT INTI Pindad Mitra Sejati Number 20, dated March 21, 2005 and the Decree of the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia Number C-21806.HT.01. 01.TH.2005, dated August 5, 2005 as publicly notified in State News of Republic of Indonesia Number 23 dated March 20, 2007.

Bidang Usaha

Line of Business

Produksi Plastik, Produksi Logam, SITAC, *Civil Mechanical Electrical (CME)* dan Out Site Plan.

Kondisi Perusahaan : Beroperasi

Production of Plastic, Metal Production, SITAC, Civil Mechanical Electrical (CME) and Out Site Plan.

Company Condition: Operating

Komposisi Saham

Composition of Shares

PT INTI (Persero) 86,15% = Rp. 16.800.582.000,-

PT Pindad (Persero) 13,85% = Rp. 2.700.000.000,-

Jumlah 100% = Rp. 19.500.582.000,-

PT INTI (Persero) 86.15% = Rp.16,800,582,000.-

PT Pindad (Persero) 13.85% = Rp. 2,700,000,000.-

Total 100% = Rp. 19,500,582,000.-





PT INTI Konten Indonesia (PT INTENS)

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT INTI Konten Indonesia dengan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., MKn Nomor 52 tertanggal 11 Mei 2010 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010, tertanggal 9 Februari 2010.

Based on the Deed of Company Limited PT INTI Konten Indonesia by Notary Humbert Lie, S.H., S.E., Mkn Number 52, dated May 11, 2010 and the Decree of the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia Number AHU-10.AH.02.02-Year 2010, dated February 9, 2010.

Bidang Usaha

Line of Business

Out Site Plan (OSP), Civil Mechanical Electrical (CME), Jasa Instalasi Perangkat, Maintenance dan Manage Service, Software Development, Content Management.

Kondisi Perusahaan : Beroperasi

Out Site Plan, Civil Mechanical Electrical (CME), Hardware Installation Services, Maintenance and Manage Service, Software Development, Content Management

Company Condition: Operating

Komposisi Saham

Composition of Shares

Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 20 miliar, terbagi atas 20 juta lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dengan komposisi :

PT INTI (Persero) = Rp.19.999.999.000,-

PT WBI = Rp. 1.000,-

Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 50% atau sejumlah Rp. 10 miliar.

Company's authorized capital of Rp. 20 billion, divided into 20 million shares, each share has a nominal value of Rp. 1,000,- (one thousand rupiah), with the composition:

PT INTI (Persero) = Rp.19,999,999,000.-

PT WBI = Rp. 1,000,-

Of the authorized capital has been subscribed and paid up by 50% or Rp. 10 billion.

Perusahaan Patungan

Joint Venture

PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia (BANGTELINDO)

PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia (Bangtelindo) berdiri sejak tahun 1995 dan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, jasa instalasi, sarana telekomunikasi, dan sistem jaringan kabel bawah tanah. Kepemilikan saham PT INTI (Persero) pada Bangtelindo adalah senilai 2,65% sejak Juli 2007.

Kondisi Perusahaan
Beroperasi

PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia (Bangtelindo) was founded in 1995 and is engaged in the business of construction services, installation services, telecommunications facilities, and underground cable network system. PT INTI (Persero)'s shares on Bangtelindo is valued at 2.65% since July 2007.

Company Condition
Operating

PT Smart Telecom

PT Smart Telecom (sebelumnya bernama PT Indoprima Mikroselindo atau Primasel) didirikan pada tahun 1996, merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, jasa instalasi, sarana telekomunikasi, dan sistem jaringan kabel bawah tanah. Keikutsertaan PT INTI (Persero) dilatarbelakangi oleh keberhasilan Perseroan dalam menguasai dan mengembangkan sistem telekomunikasi cordless dengan teknologi Personal Handyphone System (PHS). Kepemilikan Perseroan pada PT Smart Telecom saat ini sebesar 0,19%.

Kondisi Perusahaan
Beroperasi

PT Smart Telecom (formerly PT Indoprima Mikroselindo or Primasel) was founded in 1996, is a company engaged in the business of construction services, installation services, telecommunications facilities, and underground cable network systems. PT INTI (Persero)'s participation was motivated by the Company's success in mastering and developing a cordless telecommunications system with Personal Handyphone System (PHS) technology. The Company's current ownership in PT Smart Telecom is 0,19%.

Company Condition
Operating



PT INTI Pisma Indonesia

Pada tahun 2007 Perseroan berinvestasi pada saham PT INTI Pisma International (IPI), suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha produksi pesawat telepon tanpa kabel dan perdagangan umum, dengan kepemilikan saham sebesar 22%.

Kondisi Perusahaan
Tidak Beroperasi

In 2007, the Company invested in PT INTI Pisma International (IPI), a company engaged the production of perangkat Code Division Multiple Access (CDMA), Global System for Mobile Communication (GSM), and other devices, with 22% share ownership.

Company Condition
Not Operating

PT INTI Pisma Indonesia

PT Maleo Emtiga merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur otomotif, dengan kepemilikan saham sebesar 31,75%.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-83/MK.016/1997 tertanggal 6 Februari 1997, jumlah penyertaan Perusahaan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai berikut:

1. RUPS pada 18 April 1996 tentang Pengesahan Hasil Kegiatan Usaha tahun 1995, penyertaan Perusahaan adalah sebesar Rp10.000.000.000.
2. RUPS pada 7 November 1996 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 1997, Perusahaan menambahkan penyertaan saham sebesar Rp15.000.000.000, sehingga nilai penyertaan saham Perusahaan menjadi Rp25.000.000.000.
3. RUPS pada 4 Maret 1997 tentang Pengesahan Hasil Kegiatan Usaha tahun 1996, Perusahaan menambahkan penyertaan saham sebesar Rp5.000.000.000, sehingga nilai penyertaan saham Perusahaan menjadi Rp30.000.000.000.

Kondisi Perusahaan

Tidak Beroperasi

PT Maleo Emtiga is a company engaged in automotive manufacturing, with a share ownership of 31.75%.

Based on the letter of the Minister of Finance Number S-83/MK.016/1997 dated February 6, 1997, the Company's total investment is determined by the General Meeting of Shareholders (GMS) as follows:

1. *GMS dated April 18, 1996 concerning the Ratification of Results of Business Activities in 1995, the Company's investment is Rp10,000,000,000.*
2. *GMS dated November 7, 1996 concerning the Ratification of the Company's 1997 Work Plan and Budget, the Company added an investment in shares of Rp15,000,000,000, so that the value of the investment in the Company's shares became Rp25,000,000,000.*
3. *GMS dated March 4, 1997 concerning the Ratification of Results of Business Activities in 1996, the Company added an investment in shares of Rp5,000,000,000, so that the value of the investment in shares of the Company became Rp30,000,000,000.*

Company Condition

Not Operating

Alamat Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

Address of Subsidiaries and/or Associated Entities



PT INTI Pindad Mitra Sejati (PT IPMS)

Alamat

Gedung Kantor Pusat PT INTI (Persero) Lantai 4
Jl. Moch. Toha No. 77 Bandung 40253

Address

Gedung Kantor Pusat PT INTI (Persero) 4th Floor
Jl. Moch. Toha No. 77 Bandung 40253

Website

<http://www.ipms.co.id>

PT INTI Konten Indonesia (PT INTENS)

Alamat

Gedung Kantor Pusat PT INTI (Persero), lantai 2
Jl. Moh. Toha No. 77 Bandung 40253

Address

Gedung Kantor Pusat PT INTI (Persero), 2nd floor
Jl. Moh. Toha No. 77 Bandung 40253

Website

<http://www.intens.co.id>



Pemegang Saham Utama, Entitas Anak & Entitas Asosiasi

Major Shareholder, Subsidiaries & Associates



Jejak Langkah

Milestones

1966-1989

Fokus sebagai Perusahaan Manufaktur

Perusahaan didirikan sebagai evolusi dari kerja sama PN Telekomunikasi dan Siemens AG pada tahun 1966. Kerja sama ini berlanjut pada pembentukan Pabrik Telepon dan Telegraf (PTT) sebagai bagian dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi (LPP Postel) pada tahun 1968.

Pada tahun 1974, bagian ini dipisahkan dari LPP Postel menjadi sebuah Perseroan Terbatas yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Pendirian Perseroan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1974 tertanggal 23 September 1974 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Telekomunikasi dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP- 1771/MK/ IV/12/1974 tertanggal 28 Desember 1974 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan.

PT INTI (Persero) resmi berdiri pada 30 Desember 1974. Bidang usaha PT INTI (Persero) kala itu meliputi produk-produk *Radio Sonde*, *radio High Frequency (HF)*, *radio Very High Frequency (VHF)*, pesawat telepon, dan stasiun bumi untuk Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa.

Produk stasiun bumi yang disebut terakhir ini mencatatkan sejarah dalam perkembangan PT INTI (Persero) dengan memberikan kontribusi pada prestasi penjualan tertinggi di periode ini, yaitu sebesar Rp24,3 miliar pada tahun 1981. Fasilitas produksi yang dimiliki PT INTI (Persero) pada periode itu antara lain:

- Pabrik Perakitan Telepon
- Pabrik Perakitan Peralatan Transmisi
- Pabrik Mekanik dan Plastik
- Laboratorium *Software* Komunikasi Data (PACKSATNET) bekerja sama dengan Logitech.

Kerja sama teknologi yang pernah dilakukan pada periode ini antara lain:

- Bidang Sentral dengan Siemens AG.

Focus as Manufacture Company

The company was founded as an evolution of the cooperation between PN Telekomunikasi and Siemens AG in 1966. This cooperation continued establishing the Telephone and Telegraph Factory as part of the Research and Development Institute for Post and Telecommunications in 1968.

In 1974, this section was separated from the Research and Development Institute for Post and Telecommunications into a Limited Liability Company under the auspices of the Directorate General of Post and Telecommunication. Establishment of the Company based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 34 of 1974 dated September 23, 1974 concerning Deposit of State Capital of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Telecommunications Industry and Financial Decree of the Republic of Indonesia Number KEP-1771/MK/IV/12/1974 dated December 28, 1974 concerning Determination of the Company's Company Capital.

PT INTI (Persero) was officially established on December 30, 1974. PT INTI (Persero)'s line of business at that time includes radio sonde products, High Frequency (HF) radios, Very High Frequency (VHF) radios, telephone sets, and earth stations for Palapa Domestic Satellite Communication System.

This last-named earth station product recorded history in the development of PT INTI (Persero) by contributing to the highest sales achievement in this period, which amounted to Rp24.3 billion in 1981. Production facilities owned by PT INTI (Persero) in this period included other:

- *Phone Assembly Factory*
- *Transmission Equipment Assembly Plant*
- *Mechanical and Plastic Factory*
- *Data Communication Software Laboratory (PACKSATNET) in collaboration with Logitech.*

Technology collaborations that have been carried out during this period were as follows:

- *Switching sector with Siemens AG.*



- Bidang Transmisi dengan *Japan Radio Company*.
- Bidang *Civil, Mechanical, and Electrical (CME)* dengan Siemens AG, BTM, Tamura, Syapura, dan Tatung TEL.

Dari ketiga kategori produk tersebut, produk yang memberikan kontribusi terbesar dalam penjualan PT INTI (Persero) adalah Produk Sentral.

Pada era ini, PT INTI (Persero) memiliki reputasi dan prestasi yang signifikan, yaitu:

- Menjadi pionir dalam proses digitalisasi sistem dan jaringan telekomunikasi di Indonesia.
- Bersama Telkom telah berhasil dalam proyek otomatisasi telepon di seluruh ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan di seluruh wilayah Indonesia.

- *Transmission sector with Japan Radio Company.*
- *Civil, Mechanical, and Electrical (CME) sector with Siemens AG, BTM, Tamura, Syapura, and Tatung TEL.*

Among the three product categories, Switching made the biggest contribution to PT INTI (Persero)'s sales.

During this period, PT INTI (Persero) acquired a considerable reputation and reached several major achievements, including:

- *Being a pioneer in the process of digitizing telecommunications systems and networks in Indonesia.*
- *Together with Telkom, succeeding in the telephone automation project across all Indonesian regency capitals and sub-district capitals.*

1989-2002

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 036/MPBUMN/1988, PT INTI (Persero) dimasukkan ke dalam kelompok Industri Strategis, di bawah pengelolaan Badan Pengelola Industri Strategis berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1989 tentang Badan Pengelola Industri Strategis.

Lalu, pada 17 Januari 1998 dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) yang menghilangkan peran departemen teknis dalam mengelola BUMN.

Pada tahun yang sama, Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) beralih status menjadi sebuah *holding company* dengan nama PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero) atau PT BPIS, dan sepuluh BUMN strategis, termasuk PT INTI (Persero) berada di bawahnya menjadi anak perusahaan.

Kondisi ini berakhir pada tahun 2002, saat PT BPIS dibubarkan pada Maret 2002 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia, dan PT Len Industri, serta Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis.

Selanjutnya pengelolaan PT INTI (Persero) beralih kembali ke Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN.

Based on the Decree of the Minister of State for State-Owned Enterprises (SOEs) Number 036/MPBUMN/1988, PT INTI (Persero) was included in the Strategic Industry group under the management of the Strategic Industry Management Agency based on Presidential Decree Number 44 of 1989 concerning the Strategic Industry Management Agency.

Then, on January 17, 1998, a Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 1998 was issued concerning Limited Liability Companies (Persero), which eliminated the role of the technical department in managing SOEs.

In the same year, the Strategic Industry Management Agency changed its status to a holding company under the name PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero) or PT BPIS, and ten strategic SOEs, including PT INTI (Persero) under it became subsidiaries.

This condition ended in 2002, when PT BPIS was dissolved in March 2002 according to Government Regulation Number 52 of 2002 concerning State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia, and PT Len Industri, as well as the Dissolution of the Company (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis.

Furthermore, PT INTI (Persero) management shifted back to the Ministry of SOEs Empowerment.

2002-2019

Fokus sebagai *System Integrator*

- Jasa instalasi, pengujian, dan *commissioning* jaringan telekomunikasi seluler.
- Sipil, Mekanikal, dan Elektrikal.
- Layanan *Outside Plant* (OSP).
- Jaringan Telekomunikasi Swasta sebagai alat komunikasi industri pertahanan.

Focus as System Integrator

- *Installation services, testing, and commissioning of cellular telecommunications networks.*
- *Civil, Mechanical, and Electrical (CME).*
- *Outside Plant (OSP) Service.*
- *Private Telecommunications Network as a defence industry communication tools.*

2020-2022

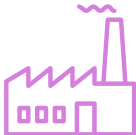
Fokus Portofolio MSDM

- *Manufacture & Assembly*
- *System Integrator*
- *Digital Service*
- *Managed Service*

Portfolio Focus MSDM

- *Manufacture & Assembly*
- *System Integrator*
- *Digital Service*
- *Managed service*

2023-2027



Manufacture



**System
Integrator**



Digital



Penghargaan, Sertifikasi, dan Lisensi

Awards, Certifications and Licenses

ISO 9001:2015



Pengertian Sertifikasi: Sistem Manajemen Mutu

Menyatakan bahwa PT INTI (Persero) telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang memenuhi persyaratan ISO 9001:2015 sebagai pengganti ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup sertifikasi sebagai berikut:

1. **Manufacture and Assembly**

Serat Optik, perangkat *Smart Energy*, tabung *Liquid Petroleum Gas Composite*, *Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B)*, *Electronic Data Capture (EDC)*, *Optical Network Termination (ONT)*, *Set Top Box (STB)*, *Over the Top (OTT) Box*, e-KTP Reader, perangkat elektronik, kartu pintar, Antenna, Meter Gas, dan Meter Listrik.

2. **Manage Service**

Maintenance & Repair of Telecommunication and Electronic Equipment, *Spare Part Management System*, *Seat Management*, dan *Share Service Operation*.

3. **Digital Service**

E-Commerce SIPLah, *Smart Hospital Management System*, *Big Data Analytic*, *Internet of Things*, *Cyber Defence*, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

4. **System Integrator**

Fiber to the Home (FTTH), *Outside Plant (OSP)* Penerangan Jalan Umum (PJU), *Building Energy Management System* atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan *Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B)*.

Badan pemberi Sucofindo International Certification Services

Nomor sertifikat QSC 01480

Mulai berlaku 16 Agustus 2017

Berlaku sampai dengan 15 Agustus 2023

Certification Definition: Quality Management System

Certifies that PT INTI (Persero) has implemented Quality Management System that complies with ISO 9001:2015 requirements as replacement to ISO 9001:2015 with the scope of certification as follow:

1. **Manufacture and Assembly**

Fibre Optic, *Smart Energy Device*, *Liquid Petroleum Gas Composite Cylinder*, *Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B)*, *Electronic Data Capture (EDC)*, *Optical Network Termination (ONT)*, *Set Top Box (STB)*, *Over the Top (OTT) Box*, e-KTP Reader, electronic devices, smart card, Antenna, Gas Meter, and Electric Meter.

2. **Manage Service**

Maintenance & Repair of Telecommunication and Electronic Equipment, *Spare Part Management System*, *Seat Management*, and *Share Service Operation*.

3. **Digital Service**

E-Commerce SIPLah, *Smart Hospital Management System*, *Big Data Analytic*, *Internet of Things*, *Cyber Defence*, and *Electronic Based Governance System*.

4. **System Integrator**

FTTH (Fiber to the Home), *Outside Plant (OSP)* Public Street Lighting, *Building Energy Management System* or Solar Power Plant, *Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B)*.

Awarder Sucofindo International Certification Services

Certificate number QSC 01480

Valid from August 16, 2017

Valid through August 15, 2023

ISO 45001:2018



Pengertian Sertifikasi: Sistem Manajemen Mutu

Menyatakan bahwa PT INTI (Persero) telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang memenuhi persyaratan ISO 45001:2018 dengan ruang lingkup sertifikasi sebagai berikut:

1. **Manufacture and Assembly**

Serat Optik, perangkat *Smart Energy*, tabung *Liquid Petroleum Gas Composite*, *Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B)*, *Electronic Data Capture (EDC)*, *Optical Network Termination (ONT)*, *Set Top Box (STB)*, *Over the Top (OTT) Box*, *e-KTP Reader*, perangkat elektronik, kartu pintar, Antenna, Meter Gas, dan Meter Listrik.

2. **Manage Service**

Maintenance & Repair of Telecommunication and Electronic Equipment, *Spare Part Management System*, *Seat Management*, dan *Share Service Operation*.

3. **Digital Service**

E-Commerce SIPLah, *Smart Hospital Management System*, *Big Data Analytic*, *Internet of Things*, *Cyber Defence*, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

4. **System Integrator**

Fiber to the Home (FTTH), *Outside Plant (OSP)* Penerangan Jalan Umum (PJU), *Building Energy Management System* atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan *Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B)*.

Badan pemberi Sucofindo International Certification Services

Nomor sertifikat QSC 01480

Mulai berlaku 16 Agustus 2017

Berlaku sampai dengan 15 Agustus 2023

Certification Definition: Quality Management System

Certifies that PT INTI (Persero) has implemented Quality Management System that complies with ISO 45001:2018 with the scope of certification as follow:

1. **Manufacture and Assembly**

Fibre Optic, *Smart Energy Device*, *Liquid Petroleum Gas Composite Cylinder*, *Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B)*, *Electronic Data Capture (EDC)*, *Optical Network Termination (ONT)*, *Set Top Box (STB)*, *Over the Top (OTT) Box*, *e-KTP Reader*, electronic devices, smart card, Antenna, Gas Meter, and Electric Meter.

2. **Manage Service**

Maintenance & Repair of Telecommunication and Electronic Equipment, *Spare Part Management System*, *Seat Management*, and *Share Service Operation*.

3. **Digital Service**

E-Commerce SIPLah, *Smart Hospital Management System*, *Big Data Analytic*, *Internet of Things*, *Cyber Defence*, and *Electronic Based Governance System*.

4. **System Integrator**

FTTH (Fiber to the Home), *Outside Plant (OSP)* *Public Street Lighting*, *Building Energy Management System* or *Solar Power Plant*, *Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B)*.

Awarder Sucofindo International Certification Services

Certificate number QSC 01480

Valid from August 16, 2017

Valid through August 15, 2023

ISO 14001:2015



Pengertian Sertifikasi: Sistem Manajemen Lingkungan

Menyatakan bahwa PT INTI (Persero) telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang memenuhi persyaratan ISO 14001:2015 sebagai pengganti ISO 14001:2004 dengan ruang lingkup sertifikasi sebagai berikut:

1. **Manufacture and Assembly**

Serat Optik, perangkat *Smart Energy*, tabung *Liquid Petroleum Gas Composite*, *Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B)*, *Electronic Data Capture (EDC)*, *Optical Network Termination (ONT)*, *Set Top Box (STB)*, *Over the Top (OTT) Box*, e-KTP Reader, perangkat elektronik, kartu pintar, Antenna, Meter Gas, dan Meter Listrik.

2. **Manage Service**

Maintenance & Repair of Telecommunication and Electronic Equipment, *Spare Part Management System*, *Seat Management*, dan *Share Service Operation*.

3. **Digital Service**

E-Commerce SIPLah, *Smart Hospital Management System*, *Big Data Analytic*, *Internet of Things*, *Cyber Defence*, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

4. **System Integrator**

Fiber to the Home (FTTH), *Outside Plant (OSP) Penerangan Jalan Umum (PJU)*, *Building Energy Management System* atau *Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)*, dan *Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B)*.

Badan pemberi Sucofindo International Certification Services

Nomor sertifikat EMS 00270

Mulai berlaku 24 September 2020

Berlaku sampai dengan 15 Agustus 2023

Certification Definition: Environment Management System

Certifies that PT INTI (Persero) has implemented Quality Management System that complies with ISO 14001:2015 requirements as replacement to ISO 14001:2004 with the scope of certification as follow:

1. **Manufacture and Assembly**

Fibre Optic, *Smart Energy Device*, *Liquid Petroleum Gas Composite Cylinder*, *Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B)*, *Electronic Data Capture (EDC)*, *Optical Network Termination (ONT)*, *Set Top Box (STB)*, *Over the Top (OTT) Box*, e-KTP Reader, electronic devices, smart card, Antenna, Gas Meter, and Electric Meter.

2. **Manage Service**

Maintenance & Repair of Telecommunication and Electronic Equipment, *Spare Part Management System*, *Seat Management*, and *Share Service Operation*.

3. **Digital Service**

E-Commerce SIPLah, *Smart Hospital Management System*, *Big Data Analytic*, *Internet of Things*, *Cyber Defence*, and *Electronic Based Governance System*.

4. **System Integrator**

FTTH (Fiber to the Home), *Outside Plant (OSP) Public Street Lighting*, *Building Energy Management System* or *Solar Power Plant*, *Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B)*.

Awarder Sucofindo International Certification Services

Certificate number EMS 00270

Valid from September 24, 2020

Valid through August 15, 2023

CIQS 2000:2018



Pengertian Sertifikasi: Jaringan Akses Telekomunikasi

Menyatakan bahwa PT INTI (Persero) telah mengimplementasikan standar sistem mutu jaringan akses telekomunikasi yang memenuhi *Cable Implementation Quality System 2000:2018* sebagai pelaksana bidang pabrikaan, distributor, dan kontrak (Jaringan Lokal Akses Tembaga, Jaringan Lokal Akses Fiber Optik, dan Jaringan Lokal Akses Radio).

Badan pemberi Telkom Professional Certification Center

Nomor sertifikat TCIQS99191

Mulai berlaku 4 September 2017

Berlaku sampai dengan 25 November 2023

Certification Definition: Telecommunication Access Network

Certifies that PT INTI (Persero) has implemented telecommunication access network quality system that complies with Cable Implementation Quality System 2000:2018 as an implementor of the field of manufacturers, distributors, and contracts (Copper Local Access Network, Fiber Optic Local Access Network, and Radio Local Access Network).

Awarder Telkom Professional Certification Center

Certificate number TCIQS99191

Valid from September 4, 2017

Valid through November 25, 2023



Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Pengertian Sertifikasi: Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Menyatakan bahwa PT INTI (Persero) telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan hasil pencapaian 85,00% untuk kategori Tingkat Lanjutan.

Badan pemberi Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia
Mulai berlaku 17 September 2020
Berlaku sampai dengan 17 September 2023

Certification Definition: Occupational Health and Safety Management System

Certifies that PT INTI (Persero) has implemented Occupational Health and Safety Management System with audit result of 85% for Advanced Level category.

Awarder Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia
Valid from September 17, 2020
Valid through September 17, 2023

ISO 37001:2016



Pengertian Sertifikasi: Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Menyatakan bahwa PT INTI (Persero) telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang memenuhi persyaratan SNI ISO 37001:2016. Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini merupakan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan perusahaan, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Badan pemberi Garuda Sertifikasi Indonesia

Nomor sertifikat G.05-ID0190-XII-2020

Mulai berlaku 22 Desember 2020

Berlaku sampai dengan 21 Desember 2023

Certification Definition: Anti-Bribery Management System

Certifies that PT INTI (Persero) has implemented an Anti-Bribery Management System that complies with the requirements of SNI ISO 37001:2016. The implementation of the Anti-Bribery Management System is an effort to prevent and eradicate corruption within the company, as a follow-up to Presidential Instruction Number 10 of 2016 concerning Corruption Prevention and Eradication Actions.

Awarder Garuda Sertifikasi Indonesia

Certificate number G.05-ID0190-XII-2020

Valid from December 22, 2020

Valid through December 21, 2023



Penghargaan

Awards

Indonesia's Popular Digital Products Awards 2023



Pengertian Penghargaan: Penghargaan Apresiasi Kerjasama yang Sangat Baik untuk PT INTI (Persero) sebagai *Most Empowering*

Penghargaan ini diberikan pada PT INTI (Persero) sebagai bentuk apresiasi kerjasama yang sangat baik untuk PT INTI (Persero) sebagai *Most Empowering*.

Badan pemberi Iconomics

Tanggal penganugerahan 17 Februari 2023

Award Definition: *Appreciation of Excellent Collaboration for PT INTI (Persero) as Most Empowering*

This award was given to PT INTI (Persero) as appreciation of excellent collaboration for PT INTI (Persero) as the Most Empowering.

Awarder Iconomics

Award date February 17, 2023

12th Anugerah BUMN dan Top Digital Innovation Awards 2023



Pengertian Penghargaan: Penghargaan Apresiasi Kerjasama yang Sangat Baik untuk PT INTI (Persero) sebagai *Most Empowering*

Penghargaan ini diberikan pada PT INTI (Persero) sebagai bentuk apresiasi kerjasama yang sangat baik untuk PT INTI (Persero) sebagai *Most Empowering*.

Badan pemberi Linknet

Tanggal penganugerahan 13 Januari 2022

Award Definition: *Appreciation of Excellent Collaboration for PT INTI (Persero) as Most Empowering*

This award was given to PT INTI (Persero) as appreciation of excellent collaboration for PT INTI (Persero) as the Most Empowering.

Awarder Linknet

Award date January 13, 2022



Indonesia Companies & Institutions Awards 2023



Pengertian Penghargaan: Penghargaan Apresiasi Kerjasama yang Sangat Baik untuk PT INTI (Persero) sebagai *Most Empowering*

Penghargaan ini diberikan pada PT INTI (Persero) sebagai bentuk apresiasi kerjasama yang sangat baik untuk PT INTI (Persero) sebagai *Most Empowering*.

Badan pemberi Iconomics

Tanggal penganugerahan 17 Februari 2023

Award Definition: *Appreciation of Excellent Collaboration for PT INTI (Persero) as Most Empowering*

This award was given to PT INTI (Persero) as appreciation of excellent collaboration for PT INTI (Persero) as the Most Empowering.

Awarder Iconomics

Award date February 17, 2023

5th Anniversary Indonesia BUMN Awards 2023: Embracing 2024 and Beyond



Pengertian Penghargaan: Penghargaan Apresiasi Kerjasama yang Sangat Baik untuk PT INTI (Persero) sebagai *Most Empowering*

Penghargaan ini diberikan pada PT INTI (Persero) sebagai bentuk apresiasi kerjasama yang sangat baik untuk PT INTI (Persero) sebagai *Most Empowering*.

Badan pemberi Linknet

Tanggal penganugerahan 13 Januari 2022

Award Definition: *Appreciation of Excellent Collaboration for PT INTI (Persero) as Most Empowering*

This award was given to PT INTI (Persero) as appreciation of excellent collaboration for PT INTI (Persero) as the Most Empowering.

Awarder Linknet

Award date January 13, 2022



Stellar Award



Pengertian Penghargaan: Penghargaan Apresiasi Kerjasama yang Sangat Baik untuk PT INTI (Persero) sebagai *Most Empowering*

Penghargaan ini diberikan pada PT INTI (Persero) sebagai bentuk apresiasi kerjasama yang sangat baik untuk PT INTI (Persero) sebagai *Most Empowering*.

Badan pemberi Iconomics

Tanggal penganugerahan 17 Februari 2023

Award Definition: *Appreciation of Excellent Collaboration for PT INTI (Persero) as Most Empowering*

This award was given to PT INTI (Persero) as appreciation of excellent collaboration for PT INTI (Persero) as the Most Empowering.

Awarder Iconomics

Award date February 17, 2023

Stellar Award



Pengertian Penghargaan: Penghargaan Apresiasi Kerjasama yang Sangat Baik untuk PT INTI (Persero) sebagai *Most Empowering*

Penghargaan ini diberikan pada PT INTI (Persero) sebagai bentuk apresiasi kerjasama yang sangat baik untuk PT INTI (Persero) sebagai *Most Empowering*.

Badan pemberi Linknet

Tanggal penganugerahan 13 Januari 2022

Award Definition: *Appreciation of Excellent Collaboration for PT INTI (Persero) as Most Empowering*

This award was given to PT INTI (Persero) as appreciation of excellent collaboration for PT INTI (Persero) as the Most Empowering.

Awarder Linknet

Award date January 13, 2022



11th BUMN Branding and Marketing Award 2023



Pengertian Penghargaan: Penghargaan Apresiasi Kerjasama yang Sangat Baik untuk PT INTI (Persero) sebagai *Most Empowering*

Penghargaan ini diberikan pada PT INTI (Persero) sebagai bentuk apresiasi kerjasama yang sangat baik untuk PT INTI (Persero) sebagai *Most Empowering*.

Badan pemberi Iconomics

Tanggal penganugerahan 17 Februari 2023

Award Definition: *Appreciation of Excellent Collaboration for PT INTI (Persero) as Most Empowering*

This award was given to PT INTI (Persero) as appreciation of excellent collaboration for PT INTI (Persero) as the Most Empowering.

Awarder Iconomics

Award date February 17, 2023

11th BUMN Branding and Marketing Award 2023



Pengertian Penghargaan: Penghargaan Apresiasi Kerjasama yang Sangat Baik untuk PT INTI (Persero) sebagai *Most Empowering*

Penghargaan ini diberikan pada PT INTI (Persero) sebagai bentuk apresiasi kerjasama yang sangat baik untuk PT INTI (Persero) sebagai *Most Empowering*.

Badan pemberi Linknet

Tanggal penganugerahan 13 Januari 2022

Award Definition: *Appreciation of Excellent Collaboration for PT INTI (Persero) as Most Empowering*

This award was given to PT INTI (Persero) as appreciation of excellent collaboration for PT INTI (Persero) as the Most Empowering.

Awarder Linknet

Award date January 13, 2022



11th BUMN Branding and Marketing Award 2023



Pengertian Penghargaan: Penghargaan Apresiasi Kerjasama yang Sangat Baik untuk PT INTI (Persero) sebagai *Most Empowering*

Penghargaan ini diberikan pada PT INTI (Persero) sebagai bentuk apresiasi kerjasama yang sangat baik untuk PT INTI (Persero) sebagai *Most Empowering*.

Badan pemberi Iconomics

Tanggal penganugerahan 17 Februari 2023

Award Definition: *Appreciation of Excellent Collaboration for PT INTI (Persero) as Most Empowering*

This award was given to PT INTI (Persero) as appreciation of excellent collaboration for PT INTI (Persero) as the Most Empowering.

Awarder Iconomics

Award date February 17, 2023

Informasi pada Situs Web Perusahaan

Information on Company Websites

Sebagai bentuk implementasi Perseroan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di seluruh aspek bisnis dan operasional terutama dalam hal transparansi informasi, Perseroan telah menyediakan situs web resmi yaitu

As a form of the Company's implementation of the principles of good corporate governance in all aspects of business and operations, especially in terms of information transparency, the Company has provided an official website, namely



www.inti.co.id

Website PT INTI (Persero) telah memenuhi informasi yang wajib dimuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

The PT INTI (Persero)'s website has fulfilled the information that must be published in accordance with Law Nomor 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure and Central Information Commission Regulation Nomor 1 of 2021 concerning Public Information Service Standards.

Melalui situs web tersebut, Perseroan mempublikasikan sejumlah informasi umum seputar Perseroan, seperti Visi & Misi, Lini Bisnis, Produk dan Jasa yang Ditawarkan, Sejarah, Tim Manajemen, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, hingga Kontak Perseroan.

Through this website, the Company publishes a number of general information about the Company, such as Vision & Mission, Business Lines, Products and Services Offered, History, Management Team, Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, and Company Contacts.

Website tersebut menjadi salah satu media komunikasi yang efektif antara Perseroan dengan pemegang saham serta pemangku kepentingan. Melalui website www.inti.co.id, PT INTI (Persero) berkomitmen untuk memberikan informasi terkini secara tepat, akurat, dan mudah untuk diakses oleh publik.

The website is one of the effective communication media between the Company with shareholders and stakeholders. Through the website www.inti.co.id, PT INTI (Persero) is committed to providing the latest information that is accurate, accurate and easily accessible to the public.

Selain melalui website, keterbukaan informasi Perseroan pun disampaikan melalui kanal informasi media sosial resmi sebagai berikut:

Apart from the website, the Company's information disclosure is also conveyed through the official social media information channels as follows:

 PT INTI Official	 @ptintiofficial	 @ptintiofficial
 @ptintiofficial	 PT INTI Official	 PPID PT INTI

Website dan media sosial Perseroan itu dikelola oleh Bagian Hubungan Masyarakat Divisi Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis.

The website and social media of the Company are managed by the Public Relations Section Corporate Secretary and Strategic Planning Division.

Transparansi Penyampaian Laporan

Transparency of Report Submission

Perseroan menetapkan pedoman dalam penyusunan Laporan Manajemen agar sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku baik bulanan, triwulan, dan tahunan. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti Upload ke Portal Kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) "Silaba".
2. Laporan Manajemen PT INTI (Persero).
3. Kajian *Debt to Equity Swap* (DES) atau Penanaman Modal Negara (PMN).
4. Laporan Keuangan Konsolidasi Triwulanan.
5. Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan Unaudit.
6. Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan Audited.
7. Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan.
8. Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan Unaudit.
9. Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan Audited.
10. Proyeksi Laporan Keuangan untuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
11. Proyeksi Laporan Keuangan untuk RKAP setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
12. Proyeksi Laporan Keuangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

The Company establishes guidelines in the preparation of Management Reports to comply with applicable standards and regulations, both monthly, quarterly and annually. The details are as follows :

1. *Upload evidence to the "Silaba" Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) Performance Portal.*
2. *PT INTI (Persero) Management Report.*
3. *Study of Debt to Equity Swap (DES) or State Investment.*
4. *Quarterly Consolidated Financial Report.*
5. *Unaudited Annual Consolidated Financial Statements.*
6. *Audited Annual Consolidated Financial Statements.*
7. *Quarterly Company Management Report.*
8. *Unaudited Annual Company Management Report.*
9. *Audited Annual Company Management Report.*
10. *Projection of Financial Statements for the Company Work Plan and Budget .*
11. *Projection of Financial Statements for Company Work Plan and Budget after the General Meeting of Shareholders (GMS).*
12. *Projection of the Company Long Term Financial Plan.*

Peristiwa Penting 2023

Important Events in 2023



16 Januari 2023

Soft Launching Beautiful Indonesia

Soft Launching Beautiful Indonesia



27 Januari 2022

Peresmian Kantor Cabang Baru Jakarta

Inauguration of the New Jakarta Branch Office



17 Februari 2023

Indonesia's Popular Digital Products Awards 2023

Indonesia's Popular Digital Products Awards 2023



20 Februari 2023

Perkuat Bisnis Digital,INTI Support Platform Paylater Marketplace Bukopin

Strengthening Digital Business, INTI Supports the Bukopin Marketplace Paylater Platform





15 Maret 2023

12th Anugerah BUMN dan Top Digital Innovation Awards 2023

12th Anugerah BUMN and Top Digital Innovation Awards 2023



07 April 2023

INTIFEST Ramadhan 2023

INTIFEST Ramadhan 2023



7 April 2023

Sehari Bersama Anak Panti & Dhuafa 2023

A Day with Orphaned Children and the Poor 2023



26 Mei 2023

Kunjungan Kerja PT PPA

PT PPA Working Visit



05 Juni 2023

Kunjungan Kerjas Botasupal

Botasupal Working Visit



07 Juni 2023

MoU PT INTI (persero) - PT IHSAN Nusantara

MoU PT INTI (Persero) - PT IHSAN Nusantara



12 Juni 2023

Pameran Smart City Solution Day 2023

Smart City Solution Day 2023 Exhibition



17 Agustus 2023

Launching 7 Digital Product

Launching 7 Digital Products



25 Agustus 2023

Ground Breaking INTI Mini Soccer

Ground Breaking INTI Mini Soccer



12 September 2023

International Smart City Conference 2023

International Smart City Conference 2023





12 Oktober 2023

Anniversary BUMN Awards 2023 The Iconomics

Anniversary BUMN Awards 2023 The Iconomics



24 Oktober 2023

RAKORNAS Dukcapil Palembang 2023

RAKORNAS Dukcapil Palembang 2023



02 November 2023

MoU INTI & Sberbank of Russia

MoU INTI & Sberbank of Russia



08 November 2023

Stellar Workplace Awards 2023

Stellar Workplace Awards 2023



09 November 2023

Launching INTI Mini Soccer

Launch of INTI Mini Soccer



17 November 2023

Penyerahan Bantuan Peduli Palestina

Delivery of Palestine Caring Aid



13 Desember 2023

BUMN Marketing Award

BUMN Marketing Award



19 Desember 2023

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Public Information Openness Award



ANALISIS & DISKUSI MANAJEMEN

Management Analysis and Discussion



Gambaran Umum

Overview

Tahun 2023, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi global mulai dari potensi pelambatan ekonomi, peningkatan tensi geopolitik, risiko inflasi, hingga perubahan iklim. Namun dengan penguatan kinerja sejumlah komponen pada sektor lapangan usaha, tahun 2023 dapat ditutup dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang positif.

Dengan capaian kondisi perekonomian nasional tersebut, Indonesia mampu menjadi salah satu negara yang tumbuh kuat dan konsisten berada di level yang tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2023 mampu melampaui beberapa negara peers seperti Malaysia dan Korea Selatan, serta lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi negara G-20 seperti Amerika Serikat, Perancis, maupun Jerman yang mengalami kontraksi.

In 2023, Indonesia faces various global economic challenges ranging from potential inflation, increasing geopolitical tensions, inflation risks, to climate change. However, by strengthening the performance of several components in the business sector, 2023 can be closed with positive economic growth achievements

With these achievements in national economic conditions, Indonesia is able to become one of the countries that grows strongly and consistently at a high level compared to a number of other countries. National economic growth throughout 2023 is able to surpass several peer countries such as Malaysia and South Korea, and is higher than the economic growth of G-20 countries such as the United State of America, France, and Germany which experienced contraction.

Guna memastikan stabilitas dan ketahanan ekonomi ke depan, Pemerintah juga akan mendorong mesin perekonomian baru melalui digitalisasi, transisi energi berkelanjutan, dan industrialisasi dengan hilirisasi yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Setelah melakukan percepatan infrastruktur yang menjadi fondasi utama dalam akselerasi transformasi digital, Pemerintah menyatakan pihaknya tengah mempersiapkan terbentuknya masyarakat digital, di antaranya Pemerintahan Digital, Ekonomi Digital, hingga Peningkatan Sumber Daya Manusia Digital.

Selain itu, kinerja manufaktur Indonesia masih mencatatkan ekspansi yang tinggi. Pada Desember 2023, *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur adalah sebesar 52,2. PMI Manufaktur ini juga naik mencapai posisi tertinggi dalam tiga bulan terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sektor manufaktur terus membaik.

Sektor manufaktur yang masih ekspansif ini didorong oleh tingkat permintaan dalam negeri yang masih kuat dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Produsen juga meningkatkan pembelian dan persediaan input sejalan dengan meningkatnya keyakinan prospek permintaan domestik yang masih kuat.

Terjaganya kinerja sektor manufaktur menandakan resiliensi ekonomi Indonesia di tengah berbagai risiko ketidakpastian dan tren perlambatan ekonomi global. Capaian ini tidak terlepas dari peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional serta mengantisipasi berbagai ketidakpastian yang masih tinggi.

In order to ensure economic stability and resilience in the future, the Government will also encourage new economic engines through digitalization, sustainable energy transition, and industrialization with downstreaming that can increase economic added value.

After accelerating the infrastructure that is the main foundation in accelerating digital transformation, the Government stated that it is preparing to form a digital society, including Digital Government, Digital Economy, and Digital Human Resource Development.

In addition, Indonesia's manufacturing performance is still recording high expansion. In December 2023, the Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) was 52.2. This Manufacturing PMI also rose to its highest position in the last three months. This shows that the condition of the manufacturing sector continues to improve.

The manufacturing sector, which is still expanding, is driven by strong domestic demand and increased employment absorption. Manufacturers are also increasing purchases and supplies of inputs in line with increasing confidence in the prospects for strong domestic demand.

The maintained performance of the manufacturing sector indicates the resilience of the Indonesian economy amidst various risks of uncertainty and the trend of global economic slowdown. This achievement cannot be separated from the role of the State Budget in maintaining people's purchasing power and national economic stability as well as anticipating various uncertainties that are still high.

Gambaran Kinerja Perseroan Dibandingkan Industri Global

Company Performance Overview Compared to Global Industry

Dalam konteks industri global, Perusahaan telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memperluas portofolio bisnisnya.

Langkah-langkah yang diambil sudah selaras dengan kebutuhan global yang tengah terjadi. Hal ini juga selaras dengan program Pemerintah guna memastikan stabilitas dan ketahanan ekonomi ke depan yaitu mendorong mesin perekonomian baru melalui digitalisasi, transisi energi berkelanjutan, dan industrialisasi dengan hilirisasi yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Menghadapi tantangan global yang ada, Perseroan fokus untuk mempertahankan kinerja operasi dan keuangan, dengan mengedepankan strategi penjualan melalui penguatan basis pelanggan, terutama untuk segmen manufaktur, sistem integrator dan digital.

Selain itu, untuk meningkatkan daya saing usaha, PT INTI (Persero) juga fokus pada upaya penurunan biaya dalam bidang operasi guna mempertahankan posisi biaya yang rendah serta mengambil kebijakan strategis untuk melakukan usaha-usaha efisiensi biaya yang tepat dan optimal.

Realisasi Penjualan Konsolidasi tahun 2023 adalah sebesar Rp 503,68 miliar atau 145,76% terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023, naik sebesar Rp 194,65 miliar atau naik 62,99% terhadap periode yang sama di tahun 2022. Laba Kotor naik menjadi sebesar Rp 44,51 miliar atau 114,05% dari RKAP tahun 2023, naik 6,52% dari periode yang sama pada tahun 2022. Realisasi rasio Laba Kotor terhadap Penjualan tahun 2023 adalah sebesar 8,84%, turun 4,68% dari periode yang sama tahun lalu yaitu 13,52%. Laba Kotor tersebut terutama berasal dari Optimalisasi Material, Service Handling, dan Access Point, sementara secara nilai terutama berasal dari proyek Repair & Refurbish, Alat Ukur, dan Service Handling.

Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) sebesar negatif Rp 41,26 miliar mengalami penurunan sebesar Rp 27,91 miliar dari realisasi tahun sebelumnya atau turun 209,13% atau 71,90% dari target RKAP tahun 2023 sebesar minus Rp 32,21 miliar.

Beban Penjualan, Beban Umum dan Administrasi, dan Beban Pengembangan terealisasi sebesar Rp 88,86 miliar atau

In the context of global industry, the Company has taken significant steps to adapt to technological developments and expand its business portfolio.

The steps taken are in line with current global needs. This is also in line with the Government's program to ensure future economic stability and resilience, namely encouraging a new economic engine through digitalization, sustainable energy transition, and industrialization with downstreaming that can increase economic added value.

Facing existing global challenges, the Company focuses on maintaining operational and financial performance, by prioritizing sales strategies through strengthening the customer base, especially for the manufacturing, systems integrator and digital segments.

Apart from that, to increase business competitiveness, PT INTI (Persero) also focuses on efforts to reduce costs in the operational sector in order to maintain a low cost position and adopt strategic policies to carry out appropriate and optimal cost efficiency efforts.

Realization of Consolidated Sales in 2023 amounted to Rp 503.68 billion or 145.76% of the 2023 Company Work Plan and Budget, increased by Rp 194.65 billion or increased 62.99% compared to the same period in 2022. Gross Profit increased to Rp 44.51 billion or 114.05% of the 2023 Company Work Plan and Budget, up 6.52% from the same period in 2022. Realization of the ratio of Gross Profit to Sales in 2023 amounted to 8.84%, down 4.68% from the previous period the same as last year, namely 13.52%. The Gross Profit mainly came from Unit Price Contract Optimization of Materials, Service Handling and Access Points, while the value mainly comes from Repair & Refurbish, Measuring Equipment and Service Handling projects.

Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) of negative Rp 41.26 billion, decreased by Rp 27.91 billion from the previous year's realization or down 209.13% or 71.90% of the 2023 Company Work Plan and Budget target of minus Rp 32.21 billion.

Realized Selling Expenses, General and Administrative Expenses, and Development Expenses amounted to Rp 88.86 billion or



100,61% terhadap RKAP tahun 2023, pendapatan lain-lain Rp 11,03 miliar atau 44,87% terhadap RKAP tahun 2023, beban lain-lain Rp 12,03 miliar, dan beban pajak final Rp 2,91 miliar maka perusahaan mengalami rugi usaha sebelum beban pendanaan sebesar Rp 48,28 miliar atau rugi naik sebesar Rp 23,07 miliar atau rugi meningkat 91,53% dibandingkan periode yang sama di tahun 2022.

Beban Pendanaan terealisasi sebesar Rp 48,86 miliar atau 83,67% terhadap RKAP tahun 2023. Mengalami penurunan sebesar Rp 5,25 miliar atau 9,70% dari realisasi periode yang sama di tahun 2022.

Hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan telah mampu melakukan program efisiensi, di mana perbaikan profitabilitas di sisi beban pokok dilakukan dengan perbaikan proses monitoring dan evaluasi proyek secara lebih intensif. Hal ini terlihat dari rasio Beban Pokok terhadap Penjualan yang menurun sebesar 4,68% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan upaya manajemen untuk melakukan perbaikan sudah membuahkan hasil. Untuk dapat lebih meningkatkan profitabilitas, Perusahaan perlu meningkatkan ukuran pekerjaan yang diperoleh.

Setelah memperhitungkan Beban Pendanaan dan Pajak Penghasilan, maka Perusahaan membukukan Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp 96,28 miliar atau 103,60% terhadap RKAP Tahun 2023, mengalami kenaikan rugi sebesar Rp 14,05 miliar atau turun 17,08% dari realisasi periode yang sama di tahun 2022 yaitu sebesar Rugi Rp 82,23 miliar. Lalu Total Rugi Komprehensif sebesar Rp 96,56 miliar atau 103,60% terhadap RKAP tahun 2023, mengalami kenaikan rugi sebesar Rp 10,06 miliar atau naik 11,63 % dari realisasi periode yang sama di tahun 2022 yaitu sebesar Rugi Rp 86,50 miliar.

Kerugian tersebut berasal dari Total Rugi Komprehensif Periode Berjalan Induk sebesar Rp 92,10 miliar dan dari Entitas Anak PT INTI Pindad Mitra Sejati (IPMS) membukukan Rugi sebesar Rp 1,72 miliar, serta PT INTI Konten Indonesia (INTENS) mencatatkan Laba sebesar Rp 217,46 juta

100.61% of the 2023 Company Work Plan and Budget, Other Income of Rp 11.03 billion or 44.87% of the 2023 Company Work Plan and Budget, Others Expenses Rp 12.03 billion, and Final Tax Expense of Rp 2.91 billion, the company experienced an Operating Loss Before Financing Expenses of Rp 48.28 billion or a loss decreased by Rp 23.07 billion or grew 91.53%, better than the same period in 2022.

Realized Funding Costs amounted to Rp 48.86 billion or 83.67% of the 2023 Company Work Plan and Budget. A decrease of Rp 5.25 billion or 9.70% from the realization of the same period in 2022.

This shows that the Company has been able to carry out an efficiency program, in which profitability improvements on the cost of goods side are carried out by improving the process of monitoring and evaluating projects more intensively. This can be seen from the decrease in the ratio of Cost of Goods to Sales which decreased by 4.68% compared to the same period in 2022. This shows that management's efforts to make improvements have produced results. To be able to further increase profitability, the Company needs to increase the size of the work obtained.

After taking into account Funding Expenses and Income Tax, the Company posted a Loss for the Year of Rp 96.28 billion or 103.60% of the 2023 Company Work Plan and Budget, experiencing a decrease in loss of Rp 14.05 billion or down 17.08% from the realization of the previous period the same in 2022, which is a Loss Rp 82.23 billion. Then a Total Comprehensive Loss of Rp 96.56 billion or 103,60% against the 2023 Company Work Plan and Budget, experienced a decrease in loss of Rp 10.06 billion or grew 11.63% from the realization of the same period in 2022, which amounted to a Loss Rp 86.50 billion.

The loss came from the Parent's Total Comprehensive Loss for the Current Period of Rp 92.10 billion and from its Subsidiary PT INTI Pindad Mitra Sejati (IPMS) which recorded a Loss of Rp 1.72 billion and PT INTI Konten Indonesia (INTENS) recorded a Profit Rp 217.46 million.

Kinerja Operasi Per Segmen Usaha

Operational Performance Per Business Segment

Pada tahun 2023, Perseroan mencanangkan pencapaian kinerja dengan menetapkan sektor *Government*, *Enterprise*, *Small and Medium Enterprise (SME)*, *Retail*, dan *Telco* sebagai pelanggan utama Perseroan.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), PT INTI (Persero) pun menempuh berbagai upaya dalam mengembangkan bisnisnya. Dari bisnis eksisting ada beberapa yang tetap dipertahankan (*sustaining*), sedangkan bisnis eksisting yang potensial akan dijalankan dalam skala yang lebih besar (*scaling*) dengan cara memperdalam penetrasi pada pasar eksisting, maupun mengembangkan pasar baru (*market development*).

Perseroan pun terus melakukan pengembangan usaha dan produk untuk tetap mengikuti perkembangan teknologi dan tren pasar agar dapat menangkap potensi pasar baru (*scoping*).

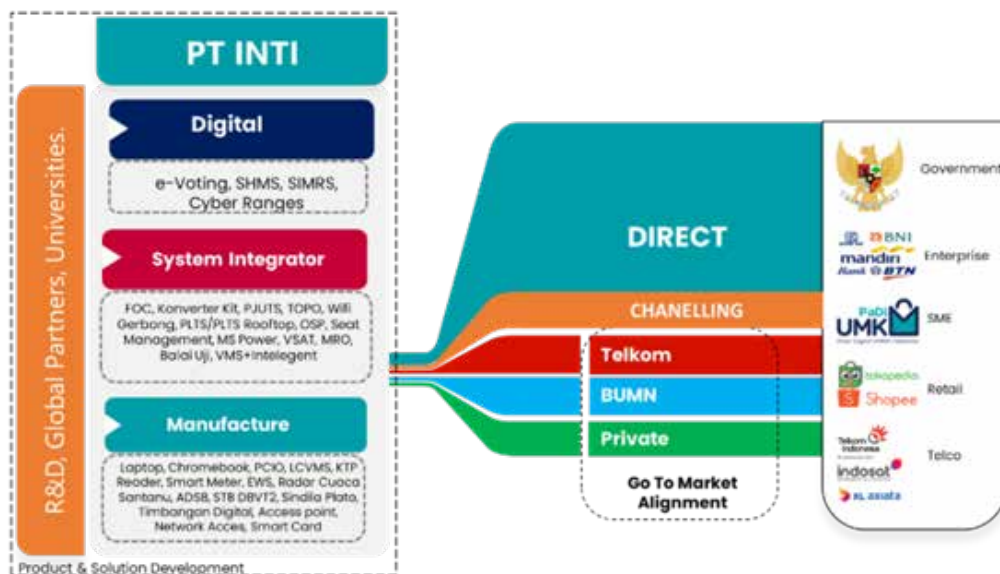
Secara struktur organisasi, untuk dapat mencapai rencana jangka panjang tersebut, Perseroan melakukan pemisahan fungsi yaitu fungsi penetrasi pasar eksisting dan pengembangan pasar, serta pengembangan portfolio baru dan diversifikasi usaha. Fungsi penetrasi pasar eksisting dan pengembangan pasar merupakan fungsi lini pemasaran. Sementara itu, fungsi pengembangan portfolio baru dan diversifikasi usaha merupakan fungsi lini pengembangan bisnis.

In 2023, the Company plans to achieve performance by establishing the Government, Enterprise, Small and Medium Enterprise (SME), Retail, dan Telco as the Company's main customers.

To implement the Company Long Term Plan, PT INTI (Persero) has made various efforts to develop its business. Of the existing businesses, some are still being maintained (sustaining), while the potential existing businesses will be carried out on a larger scale (scaling) by deepening penetration in the existing market, as well as developing new markets (market development).

The Company also continues to develop its business and products to keep abreast of technological developments and market trends to capture new market potential (scoping).

In terms of organizational structure, to achieve this long-term plan, the Company separates functions of penetrating existing markets and developing markets, developing new portfolios and diversifying businesses. The existing market penetration and market development functions are functions of the marketing line. Meanwhile, developing new portfolios and business diversification are functions of the line of business development.



PT INTI (Persero) terus bersinergi dengan seluruh stakeholder bersama-sama dalam membangun industri dan ekosistem yang kuat dan mampu diandalkan oleh pemangku kepentingan melalui strategi *direct*, *channelling*, atau *go to market alignment* bersama perusahaan yang berkompeten di bidangnya masing-masing.

PT INTI (Persero) continues to synergize with all stakeholders together in building a strong industry and ecosystem that can be relied on by stakeholders through direct, channeling, or go to market alignment strategies with companies that are competent in their respective fields.

Manufacture

Manufacture

Sebagai Perseroan yang beranjak dari perusahaan manufaktur peralatan telekomunikasi, PT INTI (Persero) tetap berupaya pada *core business* yang sangat dikuasai Perseroan dengan membangun INTI Smart Industrial Park.

Seiring adanya kebijakan Pemerintah untuk mendorong peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk mewujudkan kemandirian sektor industri dalam negeri, diharapkan upaya ini dapat memberikan hasil yang signifikan pada perbaikan margin keuntungan Perseroan.

INTI Smart Industrial Park adalah kawasan industri modern yang dirancang sebagai penggerak utama (*prime mover*) tumbuhnya kapasitas dan kapabilitas manufaktur nasional. INTI Smart Industrial Park direncanakan untuk memfasilitasi kegiatan manufaktur secara terintegrasi terdiri dari produksi mekanik, plastik, elektronik dan optikal, baik *product genuine* PT INTI (Persero) maupun produk alih teknologi dari mitra.

Hingga saat ini, PT INTI (Persero) telah bekerja sama dengan berbagai mitra untuk memproduksi barang yang sejalan dengan kebutuhan PT INTI (Persero), antara lain sebagai berikut:

1. PT INTI Pindad Mitra Sejati (IPMS)

Menghasilkan produk antara lain *Railpad* dan *Insulator* untuk kebutuhan rel kereta api, Pistol Grib, dan komponen senjata untuk PT Pindad (Persero), serta *Tower* dan *Tiang* untuk kebutuhan sektor telekomunikasi.

2. PT INTI Global Optical Communication (IGOC)

Merupakan perusahaan *join venture* antara PT INTI Pindad Mitra Sejati (IPMS) dengan *Global Optical Communication Co., Ltd. (GOC)* dari Korea Selatan yang menghasilkan produk Kabel Fiber Optik dan aksesorisnya.

Perolehan Kontrak Penjualan Konsolidasian tahun 2023 untuk portofolio bisnis *Manufacture* tercatat sebesar Rp 55,44 miliar, terutama berasal dari proyek *Smart Card* Rp 40,51 miliar, proyek *e-KTP Reader* Rp 3,56 miliar, *Set Top Box* Rp 2,38 miliar, *Mobile Point of Sales (MPOS)* Rp 2,37 miliar, *Material Outside Plant (OSP)* Rp 1,77 miliar, dan proyek lainnya senilai Rp 4,85 miliar.

As the Company that has moved from a telecommunications equipment manufacturing company, PT INTI (Persero) continues to strive for the core business which is controlled by the Company by building the INTI Smart Industrial Park.

With the Government's policy to encourage an increase in the Domestic Content Level in order to realize the independence of the domestic industrial sector, it is hoped that this effort will provide significant results in improving the Company's profit margins.

INTI Smart Industrial Park is a modern industrial area designed as a prime mover for national manufacturing capacity and capability growth. INTI Smart Industrial Park is planned to facilitate integrated manufacturing activities consisting of mechanical, plastic, electronic and optical production, both products genuine of PT INTI (Persero) and technology transfer products from partners.

Until now, PT INTI (Persero) has collaborated with various partners to produce goods that are in line with the needs of PT INTI (Persero), including the following:

1. PT INTI Pindad Mitra Sejati (IPMS)

Producing products, including Railpads and Insulators for the needs of railroads, Pistol Gribs, and weapons components for PT Pindad (Persero), as well as Towers and Poles for the needs of the telecommunications sector.

2. PT INTI Global Optical Communication (IGOC)

It is a joint venture company between PT INTI Pindad Mitra Sejati (IPMS) and Global Optical Communication Co., Ltd. (GOC) from South Korea which produces Fiber Optic Cable products and accessories.

The acquisition of Consolidated Sales Contracts in 2023 for the Manufacturing business portfolio was recorded at Rp 55.44 billion, mainly coming from the Smart Card Rp 40.51 billion, e-KTP Reader Rp 3.56 billion, Set Top Box Rp 2.38 billion, Mobile Point of Sales (MPOS) Rp 2.37 billion, Outside Plant (OSP) Material Rp 1.77 billion, and other projects worth Rp 4.85 billion.

Realisasi Penjualan Manufacture sebesar Rp 53,69 miliar, terutama berasal dari proyek *Smart Card* Rp 40,51 miliar, e-KTP Reader Rp 3,28 miliar, *Mobile Point of Sales* (MPOS) Rp 2,76 miliar, Set Top Box Rp 2,47 miliar, proyek *Material Outside Plant* (OSP) Rp 1,87 miliar, dan proyek lainnya senilai Rp 2,80 miliar.

Realization of Manufacturing Sales amounted to Rp 53.69 billion, mainly coming from the Smart Card project Rp 40.51 billion, e-KTP Reader Rp 3.28 billion, Mobile Point of Sales (MPOS) Rp 2.76 billion, Set Top Box Rp 2.47 billion, Outside Plant (OSP) Material Rp 1.87 billion, and other projects worth Rp 2.80 billion.

Digital

Digital

Bisnis Digital erat dengan perubahan lansekap bisnis telekomunikasi. Industri telekomunikasi telah mengalami dekade yang sangat menantang dengan sejumlah disrupsi yang terjadi. Revolusi smartphone telah menyebabkan ledakan dalam permintaan data, diikuti dengan pertumbuhan aplikasi seluler dengan konsep *sharing economy* dan *frictionless marketplace*. Di sinilah pemain industri disruptif menghasilkan pendapatan melalui aplikasi yang memberikan *customer experience* yang baru.

Digital business is closely related to the changing landscape of the telecommunications business. The telecommunications industry has experienced a challenging decade, with several disruptions occurring. The smartphone revolution has led to an explosion in data demand, followed by the growth of mobile apps with the concept of sharing economy and frictionless marketplace. This is where disruptive industry players generate revenue through applications that provide new customer experiences.

Sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan sektor digital, PT INTI (Persero) terus mengembangkan produk dan jasa yang terkait di sektor digital terutama pada layanan teknologi informasi *enterprise* dan *digital payments*. Selain itu, PT INTI (Persero) juga mengembangkan jasa konten melalui anak perusahaan PT INTI Konten Indonesia (INTENS), dengan target buyer dari sektor perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan instansi pemerintah, antara lain melalui produk dan jasa layanan *Mobile Point of Sales* (MPOS) INTIPay, e-Voting, e-KTP Reader, dan INTI Cloud.

In an effort to keep up with the development of the digital sector, PT INTI (Persero) continues to develop products and services related to the digital sector, especially in enterprise information technology services and digital payments. In addition, PT INTI (Persero) has also developed content services through its subsidiary PT INTI Konten Indonesia (INTENS), with a target buyer from the banking sector, State-Owned Enterprises (SOEs), and government agencies, among others through INTIPay Mobile Point of Sales (MPOS) products and services, e-Voting, e-KTP Reader, dan INTI Cloud.

Perolehan Kontrak Penjualan Konsolidasian tahun 2023 untuk portofolio Digital tercatat sebesar Rp 3,78 miliar, terutama berasal dari proyek Jasa Integrasi Rp 3,69 miliar, e-Voting Rp 64,00 juta, dan proyek lainnya senilai Rp 3,00 juta.

Consolidated Contract Acquisition in 2023 for Digital business portfolio was recorded at Rp 3.78 billion, mainly from the Integration Services Rp 3.69 billion, e-Voting Rp 64.00 million, and other projects worth Rp 3.00 million.

Realisasi Penjualan Digital sebesar Rp 4,59 miliar, terutama berasal dari proyek Jasa Integrasi Rp 4,48 miliar, e-Voting Rp 64,00 juta, *Mobile Point of Sales* (MPOS) Rp 28,32 juta, e-KTP Reader Rp 13,00 juta, dan proyek lainnya senilai Rp 2,65 juta.

Realization of Digital Sales of Rp 4.59 billion, mainly from Integration Service project Rp 4.48 billion, e-Voting Rp 64.00 million, Mobile Point of Sales (MPOS) Rp 28.32 million, e-KTP Reader Rp 13.00 million, and other projects worth Rp 2.65 million.



System Integrator

System Integrator

Perseroan telah bergelut dalam lini bisnis *System Integrator* khususnya sebagai *Engineering Procurement Construction* contractor sektor telekomunikasi sejak tahun 1994. Lingkup *System Integrator* kemudian berkembang ke sektor energi terbarukan sejak 2013.

The Company has been involved in the System Integrator business line, especially as an Engineering Procurement Construction contractor in the telecommunications sector since 1994. The scope of the System Integrator has then expanded to the renewable energy sector since 2013.

Pekerjaan *System Integrator* yang dilakukan oleh Perseroan antara lain proyek pembangunan fasilitas Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dengan pemilik modal alias *bouwheer* Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pengadaan Alat Ukur *Electromagnetic Compatibility* (EMC) dengan *bouwheer* Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan *bouwheer* Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT PLN (Persero).

Perolehan Kontrak Penjualan Konsolidasian tahun 2023 untuk portofolio *System Integrator* tercatat sebesar Rp 468,69 miliar, berasal dari proyek *Information Technology System* Rp 93,95 miliar, Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Rp 69,44 miliar, Alat Ukur *Electromagnetic Compatibility* (EMC) Rp 67,73 miliar, *Outside Plant* (OSP) Rp 62,89 miliar, Niaga Rp 59,39 miliar, *Repair & Refurbish* Rp 35,44 miliar, Jasa Lain Rp 22,80 miliar, *Tower Power* Rp 18,97 miliar, *Maintenance* Rp 12,38 miliar, dan proyek lainnya senilai Rp 25,70 miliar.

Realisasi Penjualan *System Integrator* sebesar Rp 445,40 miliar, terutama berasal dari proyek *Information Technology System* Rp 93,92 miliar, *Outside Plant* (OSP) Rp 70,50 miliar, Alat Ukur *Electromagnetic Compatibility* (EMC) Rp 65,32 miliar, Niaga Rp 46,57 miliar, Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Rp 40,41 miliar, *Repair & Refurbish* Rp 33,35 miliar, *Maintenance* Rp 19,52 miliar, *Tower Power* Rp 18,58 miliar, *Seat Management* Rp 11,64 miliar, dan proyek lainnya senilai Rp 45,58 miliar.

Perolehan Kontrak Penjualan Konsolidasi tahun 2023 sebesar Rp 527,91 miliar dengan rincian sebagai berikut:

System Integrator work carried out by the Company includes projects to build Solar Powered Public Street Lighting facilities with capital owners aka *bouwheer* of the Ministry of Energy and Mineral Resources, procurement of *Electromagnetic Compatibility* (EMC) Measuring Instruments with *bouwheer* of the Telecommunications Equipment Testing Center, as well as the construction of a Solar Power Plant with the cooperation of the Ministry of Energy and Mineral Resources and PT PLN (Persero).

The acquisition of Consolidated Sales Contracts in 2023 for the *System Integrator* portfolio was recorded at Rp 468.69 billion, originating from the *Information Technology System* project Rp 93.95 billion, Solar Powered Public Street Lighting Rp 69.44 billion, *Electromagnetic Compatibility* Measuring Instruments (EMC) Rp 67.73 billion, *Outside Plant* (OSP) Rp 62.89 billion, Commerce IDR 59.39 billion, *Repair & Refurbish* Rp 35.44 billion, Other Services Rp 22.80 billion, *Tower Power* Rp 18.97 billion, *Maintenance* Rp 12.38 billion, and other projects worth Rp 25.70 billion.

Realization of *System Integrator* Sales amounted to Rp 445.40 billion, mainly coming from the *Information Technology System* project Rp 93.92 billion, *Outside Plant* (OSP) Rp 70.50 billion, *Electromagnetic Compatibility* Measuring Instruments (EMC) Rp 65.32 billion, Commerce Rp 46.57 billion, Solar Powered Public Street Lighting Rp 40.41 billion, *Repair & Refurbish* Rp 33.35 billion, *Maintenance* Rp 19.52 billion, *Tower Power* Rp 18.58 billion, *Seat Management* Rp 11.64 billion, and other projects worth Rp 45.58 billion.

Consolidated Contract Acquisition in 2023 amounting to Rp 527.91 billion with the following details:

Dalam Rp. Juta
in Million Rupiah

Lini Bisnis Business Line	RKAP Company Work Plan and Budget 2023	Realisasi Realization 2023	Realisasi Realization 2022	% Pencapaian Achievement	% Pertumbuhan Growth
1	2	3	4	5= 3/2	6= (3-4)/4
Manufacture	36.642,03	55.438,13	32.351,24	151,30	71,36
Enterprise	19.274,03	47.107,75	6.111,94	244,41	670,75
Access Point	-	891,35	-		
Alat Olah Data Data Processing Tools	-	785,50	-		
e-Voting	4.377,03	-	325,02	-	(100,00)
e-KTP Reader	-	796,82	2.266,56		(64,84)
Laptop	-	550,75	-		
Jasa Lain Other Services	-	950,00	-		
Metal	-	16,86	38,53		(56,25)
Mobile Point of Sales	4.200,00	1.233,20	1.368,45	29,36	(9,88)

Manajemen Sampah Zero <i>Zero Waste Management</i>	2.987,00	-	-	-	
Optimalisasi Material <i>Material Optimization</i>	-	30,96	41,35		(25,14)
Plastik <i>Plastic</i>	4.605,00	372,30	175,45	8,08	112,20
Penghitung Lalu Lintas Otomatis (PLATO) <i>Automatic Traffic Counter</i>	3.105,00	-	-	-	
Smart Card	-	40.511,34	-		
Set Top Box	-	201,68	1.659,26		(87,85)
Smart Device	-	-	209,82		(100,00)
Radio Trunking	-	-	27,50		(100,00)
Vessel Monitoring System	-	767,00	-		
Retail	-	1.482,27	-	-	-
Mobile Point of Sales	-	12,16	-		
Laptop	-	352,11	-		
Set Top Box	-	986,71	-		
Camera	-	95,61	-		
Access Point	-	35,68	-		
Government	-	3.735,11	11.200,70		(66,65)
e-KTP Reader	-	2.424,15	14,00		17.215,34
Laptop	-	-	104,38		
Mobile Point of Sales	-	121,50	-		
Set Top Box	-	1.189,46	10.789,83		
e-Voting	-	-	292,50		(100,00)
Telco	17.368,00	3.113,01	15.038,59	17,92	(79,30)
Mobile Point of Sales	-	1.003,05	21,46		4.574,70
Smart Device	-	-	1.200,00		(100,00)
Set Top Box	-	-	8,55		(100,00)
e-KTP Reader	-	335,40	368,40		(8,96)
Metal	-	-	728,62		(100,00)
Material Outside Plant (OSP)	17.368,00	1.774,56	12.711,56	10,22	(86,04)
System Integrator	250.668,19	468.692,96	220.641,10	186,98	112,42
Enterprise	48.256,87	87.395,85	29.166,16	181,11	199,65
e-KTP Reader	-	346,66	-		
e-Voting	-	185,47	-		
IT System	-	4.982,25	514,94		867,53
Jasa Lain <i>Other Services</i>	2.350,00	21.849,05	4.122,87	929,75	429,95
Jasa Integrasi <i>Integration Services</i>	3.403,46	-	-	-	
Maintenance	-	-	258,25		(100,00)
Mobile Point of Sales	-	-	34,71		(100,00)
Niaga	-	58.592,17	171,34		34.097,26
Optimalisasi Material <i>Material Optimization</i>	-	66,12	-		
Outside Plant (OSP)	3.060,00	119,04	529,43	3,89	(77,52)



Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) <i>Solar Power Plant</i>	17.062,50	174,40	-	1,02	
Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) <i>Solar Powered Public Street Lighting</i>	-	148,00	-		
Power System	-	676,50	-		
Site Acquisition Civil, Mechanical, and Electrical (SACME)	2.750,00	29,11	-	1,06	
Spare Part Management System (SPMS)	-	227,07	2.454,66		(90,75)
Tower Power	19.630,91	-	19.630,91	-	(100,00)
Very Small Aperture Terminal (VSAT)	-	-	1.449,05		(100,00)
Retail	-	27,46	-		
IT System	-	27,46	-		
Government	38.594,59	258.333,75	17.594,34	669,35	1.368,28
Alat Ukur <i>Measuring Instrument</i>	-	67.726,44	-		
e-Voting	-	1.538,43	-		
Jasa Lain <i>Other Services</i>	-	-	516,47		
Laptop	-	14,32	-		
Manajemen Sampah Zero <i>Zero Waste Management</i>	-	8.913,79	4.445,51		
IT System	-	88.941,27	-		
Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) <i>Solar Powered Public Street Lighting</i>	38.594,59	69.296,09	-	179,55	
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) <i>Solar Power Plant</i>	-	2.671,76	12.532,36		(78,68)
Sewa <i>Rental</i>	-	258,95	100,00		158,95
Tower Power	-	18.972,69	-		
Telco	182.046,05	178.702,88	177.334,30	98,16	0,77
Aktivasi Pelanggan <i>Activation Customer</i>	2.378,82	660,32	65,88	27,76	902,33
Niaga <i>Commerce</i>	-	800,00	233,72		242,29
Maintenance	7.350,50	12.381,57	31.525,31		
Outside Plant (OSP)	110.123,92	62.766,53	100.849,35	57,00	(37,76)
Optimalisasi Material <i>Material Optimization</i>	-	8,40	-		
Power System	-	204,70	-		
Repair & Refurbish	43.963,50	35.439,58	40.974,27	80,61	(13,51)
Site Acquisition Civil, Mechanical, and Electrical (SACME)	-	603,14	(63,72)		1.046,58
Spare Part Management System (SPMS)	-	1.782,51	-		
Service Handling	-	7.342,75	-		
Jasa Lain <i>Other Services</i>	-	946,40	295,80		219,95

Digital Services	-	3.775,27	16.634,85	(77,31)
Enterprise	-	3.759,84	16.634,85	(77,40)
INTICloud	-	9,75	-	
Intipay Thermal	-	-	10,00	(100,00)
Jasa Integrasi <i>Integration Services</i>	-	3.685,87	2.377,23	55,05
INTIPay	-	0,22	4,26	(94,79)
Pospay	-	-	0,12	(100,00)
e-Voting	-	64,00	68,18	(6,13)
Mobile Point of Sales	-	-	6.470,31	(100,00)
Set Top Box	-	-	136,86	(100,00)
e-KTP Reader	-	-	21,12	(100,00)
Marketplace	-	-	322,15	(100,00)
Smart Clinic	-	-	15,12	(100,00)
Penerangan Jalan Umum <i>Public Street Lighting</i>	-	-	7.207,21	(100,00)
e-Commerce IP-Phone	-	-	2,30	(100,00)
Retail	-	-	53.181,99	(100,00)
Marketplace	-	2,43	-	
Government	-	13,00	-	
e-KTP Reader	-	13,00	-	
Grand Total	287.310,22	527.906,36	269.627,19	183,74
				95,79

Realisasi Penjualan Konsolidasi Tahun 2023 sebesar Rp 503,68 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Consolidated Sales realized in 2023 amounting to Rp 503.68 billion with the following details:

Dalam Rp. Juta
in Million Rupiah

Lini Bisnis <i>Business Line</i>	RKAP <i>Company Work Plan and Budget</i> 2023	Realisasi <i>Realization</i> 2023	Realisasi <i>Realization</i> 2022	% Pencapaian <i>Achievement</i>	% Pertumbuhan <i>Growth</i>
1	2	3	4	5= 3/2	6= (3-4)/4
Manufacture	37.096	53.686	39.101	144,72	37,30
Enterprise	19.728	45.851	13.421	232,41	241,64
Access Point	-	891	-		
Alat Olah Data <i>Data Processing Tools</i>	-	740	-		
e-Voting	4.377	-	370	-	(100,00)
e-KTP Reader	-	1.488	5.197		(71,36)
Laptop	-	95	-		
Jasa Lain <i>Other Services</i>	1.650	-	-		
Metal	-	-	39		(100,00)
Mobile Point of Sales	4.200	1.241	2.623	29,54	(52,70)

Manajemen Sampah Zero <i>Zero Waste Management</i>	2.987	-	-	-	
Optimalisasi Material <i>Material Optimization</i>	-	-	46		(100,00)
Plastik <i>Plastic</i>	3.409	588	550	17,24	6,90
Penghitung Lalu Lintas Otomatis (PLATO) <i>Automatic Traffic Counter</i>	3.105	-	-	-	
Smart Card	-	40.511	-		
Set Top Box	-	296	4.359		(93,20)
Smart Device	-	-	210		(100,00)
Radio Trunking	-	-	28		(100,00)
Retail	-	1.482	-	-	-
Mobile Point of Sales	-	12	-		
Laptop	-	352	-		
Set Top Box	-	987	-		
Camera	-	96	-		
Access Point	-	36	-		
Government	-	2.892	10.617		(72,76)
e-KTP Reader	-	1.581	39		3.964,13
Laptop	-	-	104		
Mobile Point of Sales	-	122	-		
Set Top Box	-	1.189	10.181		
e-Voting	-	-	292		(100,00)
Telco	17.368	3.461	15.063	19,93	(77,02)
Mobile Point of Sales	-	1.384	39		3.419,11
Smart Device	-	-	1.200		(100,00)
Set Top Box	-	-	9		(100,00)
e-KTP Reader	-	211	368		(42,83)
Metal	-	-	413		(100,00)
Material Outside Plant (OSP)	17.368	1.867	13.033	10,75	(85,68)
System Integrator	302.635	445.403	265.320	147,17	67,87
Enterprise	-	786	-		
e-KTP Reader	-	185	-		
e-Voting	-	4.982	515		867,53
IT System	3.045	5.428	2.473	178,26	119,50
Jasa Lain <i>Other Services</i>	3.403	-	-	-	
Jasa Integrasi <i>Integration Services</i>	-	-	258		
Maintenance	-	-	35		(100,00)
Mobile Point of Sales	160	45.768	171	#####	26.612,38
Niaga	-	66	68		(2,88)
Optimalisasi Material <i>Material Optimization</i>	3.060	694	17	22,69	3.896,43
Outside Plant (OSP)	17.063	174	898	1,02	(80,58)
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) <i>Solar Power Plant</i>	5.766	-	-	-	

Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) <i>Solar Powered Public Street Lighting</i>	2.490	29	-	1,17	
Site Acquisition Civil, Mechanical, and Electrical (SACME)	5.770	11.636	24.034		
Seat Management Spare Part Management System (SPMS)	1.124	830	2.597	73,85	(68,05)
Tower Power	19.631	1.610	19.096	8,20	(91,57)
Very Small Aperture Terminal (VSAT)	6.247	7.313	8.654	117,07	(15,50)
Government	38.595	231.693	9.867	600,33	2.248,20
Alat Ukur <i>Measuring Instrument</i>	-	65.319	-		
e-Voting	-	1.538	-		
Jasa Lain <i>Other Services</i>	-	-	516		(100,00)
Laptop	-	14	-		
Manajemen Sampah Zero <i>Zero Waste Management</i>	-	8.914	4.446		100,51
IT System	-	88.941	-		
Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) <i>Solar Powered Public Street Lighting</i>	38.595	40.412	-	104,71	
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) <i>Solar Power Plant</i>	-	9.325	4.663		99,99
Sewa <i>Rental</i>	-	259	242		7,00
Tower Power	-	16.970	-		
Telco	196.282	134.206	196.636	68,37	(31,75)
Aktivasi Pelanggan <i>Activation Customer</i>	2.379	216	-	9,08	
Niaga <i>Commerce</i>	-	800	234		242,29
Maintenance	19.525	19.521	24.919		
Outside Plant (OSP)	130.414	69.801	117.991	53,52	(40,84)
Repair & Refurbish	43.964	33.355	52.199	75,87	(36,10)
Site Acquisition Civil, Mechanical, and Electrical (SACME)	-	520	1.158		(55,09)
Spare Part Management System (SPMS)	-	1.537	-		
Service Handling	-	7.343	-		
Jasa Lain <i>Other Services</i>	-	1.114	135		
Digital Services	5.825	4.590	4.609	78,81	(0,40)
Enterprise	5.825	4.575	4.609	78,54	(0,73)
Intipay Thermanal	-	-	10		(100,00)
Jasa Integrasi <i>Integration Services</i>	-	4.483	1.821		146,19
INTIPay	-	0	4		(93,71)
Pospay	-	-	0		(100,00)
e-Voting	-	64	68		(6,13)
Mobile Point of Sales	5.750	28	210	0,49	(86,50)

Penghitung Lalu Lintas Otomatis (PLATO) <i>Automatic Traffic Counter</i>	75	-	1.425	-	(100,00)
<i>Set Top Box</i>	-	-	608		(100,00)
e-KTP Reader	-	-	61		(100,00)
<i>Marketplace</i>	-	-	369		(100,00)
<i>Smart Clinic</i>	-	-	33		(100,00)
Retail	-	2	-	-	-
<i>Marketplace</i>	-	2	-		
Government	-	13	-		
<i>e-KTP Reader</i>	-	13,00	-		
Grand Total	345.556,51	503.679,35	309.029,10	145,76	62,99

Uraian atas Kinerja Keuangan Perusahaan

Description of The Company's Financial Performance

Realisasi Penjualan Konsolidasi tahun 2023 adalah sebesar Rp 503,68 miliar atau 145,76% terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023, naik sebesar Rp 194,65 miliar atau 62,99% terhadap periode yang sama di tahun 2022. Laba Kotor menurun menjadi sebesar Rp 44,51 miliar atau 114,05% dari RKAP tahun 2023, naik 6,52% dari periode yang sama pada tahun 2022.

Realisasi Rasio Laba Kotor terhadap Penjualan tahun 2023 adalah sebesar 8,84% turun 4,68% dari periode yang sama tahun lalu yaitu 13,52%. Margin Laba kotor tersebut terutama berasal dari Optimalisasi Material, *Service Handling*, dan *Access Point*, sementara secara nilai terutama berasal dari proyek *Repair & Refurbish*, Alat Ukur, dan *Service Handling*.

Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) sebesar negatif Rp 41,26 miliar atau 71,90% dari target RKAP tahun 2023 sebesar negatif Rp 32,21 miliar, bertambah negatif sebesar Rp 27,91 miliar dari realisasi pada periode yang sama tahun 2022 atau menurun sebesar 209,13%.

Dengan Beban Penjualan, Beban Umum dan Administrasi, dan Beban Pengembangan terealisasi sebesar Rp 88,86 miliar atau 100,61% terhadap RKAP tahun 2023, Pendapatan Lain-Lain Rp 11,03 miliar atau 44,87% terhadap RKAP tahun 2023, Beban Lain-Lain Rp 12,03 miliar, dan Beban Pajak Final Rp 2,91 miliar maka Perusahaan mengalami Rugi Usaha Sebelum Beban Pendanaan sebesar Rp 48,28 miliar atau rugi naik sebesar Rp 23,07 miliar atau rugi meningkat 91,53% dibandingkan periode yang sama di tahun 2022.

Beban Pendanaan terealisasi sebesar Rp 48,86 miliar atau 83,67% terhadap RKAP tahun 2023, mengalami penurunan sebesar Rp 5,25 miliar atau 9,70% dari realisasi periode yang sama di tahun 2022.

Setelah memperhitungkan Beban Pendanaan dan Pajak Penghasilan, maka Perusahaan membukukan Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp 96,28 miliar atau 103,60% terhadap RKAP tahun 2023, rugi bertambah sebesar Rp 14,05 miliar. Rugi Komprehensif sebesar Rp 96,56 miliar atau 103,32% terhadap RKAP tahun 2023, rugi bertambah sebesar Rp 10,06 miliar atau meningkat 11,63% dari realisasi periode yang sama di tahun 2022 yaitu sebesar rugi Rp 86,50 miliar.

Kerugian tersebut berasal dari Total Rugi Komprehensif Periode Berjalan Induk sebesar Rp 92,10 miliar, dan dari Entitas

The Realization of Consolidated Sales in 2023 amounted to Rp 503.68 billion or 145.76% of the 2023 Company Work Plan and Budget, an increased by Rp 194.65 billion or 62.99% compared to the same period in 2022. Gross Profit decreased to Rp 44.51 billion or 114.05% of the 2023 Company Work Plan and Budget, up 6.52% from the same period in 2022.

Realization Gross Profit Margin in 2023 was 8.84% down 4.68% from the same period last year, which was 13.52%. The Gross Profit Margin mainly came from Material Optimization, Service Handling, and Access Point, while in terms of value, it primarily came from the Repair & Refurbish, Measurement Tools, and Service Handling projects.

Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) was negative Rp 41.26 billion, or 71.90% of the 2023 RKAP target of negative Rp 32.21 billion, increasing negatively by Rp 27.91 billion from the realization in the same period in 2022 or a decrease of 209.13%.

With Selling Expenses, General and Administrative Expenses, and Development Expenses realized of Rp 88.86 billion or 100.61% of the 2023 RKAP, Other Income of Rp 11.03 billion or 44.87% of the 2023 Company Work Plan and Budget, Other Expenses of Rp 12.03 billion, and a Final Tax Expense of Rp 2.91 billion, the Company experienced an Operating Loss Before Financing Expenses of Rp 48.28 billion or an increased in loss of Rp 23.07 billion or 91.53% compare the same period in 2022.

Realized Finance Expenses amounted to Rp 48.86 billion or 83.67% of the 2023 Company Work Plan and Budget, an decreased of Rp 5.25 billion or 9.70% from the same realization period in 2022.

After taking into account Finance Expenses and Income Tax, the Company posted a Loss for the Year of Rp 96.28 billion or 103.60% of the 2023 Company Work Plan and Budget, an increase in loss of Rp 14.05 billion. Comprehensive Loss amounted to Rp 96.56 billion or 103.32% of the 2023 Company Work Plan and Budget, the loss increased by Rp 10.06 billion or an increase of 11.63% from the realization for the same period in 2022, namely a loss of Rp 86.50 billion.

This Loss came from the Parent's Total Comprehensive Loss for the Current Period of Rp 92.10 billion, and the Subsidiary PT



Anak PT INTI Pindad Mitra Sejati (IPMS) membukukan Rugi sebesar Rp 1,72 miliar, sedangkan PT INTI Konten Indonesia (INTENS) mencatatkan Laba sebesar Rp 217,46 juta.

Total Aset Lancar per 31 Desember 2023 naik Rp 71,32 miliar atau 25,33% dari posisi per 31 Desember 2022, dikarenakan terdapat penambahan Piutang Usaha sebesar Rp 112,03 miliar, penambahan Pajak Dibayar di Muka sebesar Rp 21,79 miliar, penambahan Beban Dibayar di Muka dan Uang Muka sebesar Rp 3,36 miliar, dan Piutang Lainnya sebesar Rp 3,06 miliar. Di samping itu, penurunan Persediaan Rp 66,20 miliar dan penurunan Saldo Akumulatif Kas dan Setara Kas sebesar Rp 2,72 miliar.

Per 31 Desember 2023 posisi Aset sebesar Rp 1,26 triliun, Liabilitas sebesar Rp 1,97 triliun, dan Ekuitas sebesar negatif Rp 716,56 miliar. Nilai Ekuitas negatifnya bertambah sebesar Rp 91,06 miliar atau 14,56% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022, akibat Kerugian di tahun 2022 ditambah dengan Rugi Tahun Berjalan.

Dari Aktivitas Operasi surplus sebesar Rp 3,81 miliar terutama berasal dari Pembayaran kepada Pemasok yang Telah Jatuh Tempo, Kebutuhan Pembayaran dengan Pola Down Payment dan Pembayaran Utang-Utang Unsustain, Pembayaran kepada Karyawan, Pembayaran Pajak, dan Beban Pendanaan. Di sisi lain, penerimaannya bersumber dari Penerimaan dari Pelanggan, Penerimaan Restitusi Pajak, dan Penerimaan Bunga Giro serta Deposito Berjangka.

Aktivitas Investasi defisit sebesar Rp 142,36 juta berasal dari Beban Pengembangan e-KTP Reader, Laptop, Low Cost Vessel Monitoring System (LCVMS), Access Point, Internet of Things (IoT) Meter Gas Lora, dan Closed Circuit Television (CCTV).

Aktivitas Pendanaan defisit Rp 6,38 miliar, karena sumber utamanya berasal dari Penerimaan Pinjaman Lembaga Keuangan Non Bank sebesar Rp 1,25 miliar dan adanya Pembayaran Pinjaman Bank dan Non-Bank sebesar Rp 7,10 miliar, serta Kas dan Setara Kas Akhir Periode sebesar Rp 25,05 miliar.

Berdasarkan analisis atas laporan keuangan tersebut di atas yang mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002, rasio-rasio keuangan dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

INTI Pindad Mitra Sejati (IPMS) posted a Loss of Rp 1.72 billion, while PT INTI Konten Indonesia (INTENS) made a Profit of Rp 217.46 million.

The Total Current Assets as of December 31, 2022 increased by Rp 71.32 billion or 25.33 from the position as of December 31, 2022, due to a increased in Account Receivables of Rp 112.03 billion, an increase in Prepaid Taxes by Rp 21.79 billion, an increase in Prepaid Expenses and Advances by Rp 3.36 billion, and Other Receivables by Rp 3.06 billion. Additionally, there was a decrease in Inventory by Rp 66.20 billion and a decrease in the Accumulated Balance of Cash and Cash Equivalents by Rp 2.72 billion

As of December 31, 2022, the total asset position amounted Rp 1.26 trillion, Liabilities amounted Rp 1.97 trillion, and Equity amounted to negative Rp 716.56 billion. The negative Equity increased by Rp 91.06 billion or 14.56% compared to the position as of December 31, 2022, due to Losses incurred in 2022 compounded by the Current Year's Loss.

From Operating Activities was a surplus of Rp 3.81 billion, primarily stemming from Payments to Suppliers that were Due, Adjusted Payment Patterns with Down Payments, Unsustainable Debt Payments, Payments to Employees, Taxes, and Financing Expenses. On the other hand, receipts came from Customer Payments, Tax Refunds, and Interest Receipts from Current Accounts and Fixed Deposits.

The Investment Activities recorded a deficit of Rp 142.36 million came from Expenses Related to the Development of e-KTP Reader, Laptop, Low Cost Vessel Monitoring System (LCVMS), Access Points, Internet of Things (IoT) Gas Meter Lora, and Closed Circuit Television (CCTV).

The Financing Activities recorded a deficit of Rp 6.38 billion, because the main sources came from Non-Bank Financial Institution Loans amounting to Rp 1.25 billion and Payments of Bank and Non-Bank Loans totaling Rp 7.10 billion, and also The Ending Cash and Cash Equivalents amounted to Rp 25.05 billion.

Based on the analysis of the above financial statements referring to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number KEP-100/MBU/2002, the financial ratios can be described in the table below:

Uraian <i>Description</i>			Realisasi (<i>Audited</i>) <i>Realization (Audited)</i> 2023	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan <i>Revised Company Work Plan and Budget</i> 2023	Realisasi (<i>Audited</i>) <i>Realization (Audited)</i> 2022
Likuiditas <i>Liquidity</i>					
1	Cash Ratio	(%)	3,1	1,1	4,0
2	Current Ratio	(%)	43,1	22,8	40,1
Solvabilitas <i>Solvability</i>					
1	Asset to Debt Ratio	(%)	63,7	134,4	65,4
2	Debt to Equity Ratio	(%)	(275,5)	290,8	(289,3)
Rentabilitas <i>Rentability</i>					
1	Return on Equity (ROE)	(%)	15,4	(26,5)	14,9
2	Return in Interest (ROI)	(%)	(3,2)	(2,8)	(1,1)
3	Operating Margin	(%)	(19,3)	(29,3)	(25,7)
4	Earning per Share (EPS)	Rp	(275.086,1)	(285.363,4)	(234.953,6)
Aktivitas <i>Activity</i>					
1	Collection Periods	(Hari/Days)	134	89	86
2	Inventory Turnover	(Hari/Days)	75	52	200
3	Working Capital Turnover	(Kali/Time)	(1,1)	(0,6)	(0,7)



Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

Consolidated Statement of Comprehensive Income

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Consolidated Statements of Profit and Loss and Other Comprehensive Income for 2023 are as follows:

Dalam Rp. Juta
in Million Rupiah

Uraian Description	RKAP Corporate Work Plan and Budget 2023	Realisasi Audited Realization Audited 2023	Realisasi Audited Realization Audited 2022	% Pencapaian Terhadap RKAP Tahun 2023 Achievement of Corporate Work Plan and Budget Year 2023	% Pertumbuhan Growth (YoY)
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = (3-4)/4
1	3	4	6	7 = 4/3	9 = (4-5)/5
1	8	9	11	13 = 9/8	12=(9-10)/10
Pendapatan Revenues	345.556,51	503.679,77	309.029,10	145,76	62,99
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(306.531,56)	(459.172,26)	(267.247,76)	149,80	(71,82)
Laba Bruto Gross Profit	39.024,95	44.507,52	41.781,34	114,05	6,52
Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization (EBITDA)	(32.207,59)	(41.257,34)	(13.346,11)	71,90	(209,13)
Beban Penjualan Selling Expenses	(15.172,10)	(24.509,11)	(13.019,48)	161,54	(88,25)
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(66.866,59)	(60.402,69)	(48.960,77)	90,33	(23,37)
Beban Pengembangan Development Expenses	(6.284,64)	(3.953,12)	(4.641,87)	62,90	14,84
Pendapatan Lain-lain Other Income	24.581,19	11.030,49	14.722,97	44,87	(25,08)
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(4.857,46)	(2.914,89)	(5.842,17)	60,01	50,11
Beban Lain-lain Other Expenses	(13.300,87)	(12.033,40)	(9.244,48)	90,47	(30,17)
Beban Usaha (Termasuk Pendapatan (Beban) Lain-Lain dan Pajak Final) Operating Expenses (Including Other Income & Expense and Final Tax)	(81.900,46)	(92.782,71)	(66.985,80)	113,29	(38,51)
Laba (Rugi) Usaha Sebelum Beban Pendanaan Operating Profit (Loss) Before Financing Expenses	(42.875,51)	(48.275,20)	(25.204,46)	87,41	(91,53)

Beban Pendanaan <i>Funding Expense</i>	(58.401,58)	(48.863,26)	(54.112,11)	83,67	9,70
Laba (Rugi) Usaha Setelah Beban Pendanaan <i>Profit (Loss) After Financing Expenses</i>	(101.277,09)	(97.138,45)	(79.316,58)	104,09	(22,47)
Laba Entitas Asosiasi <i>Income of an Associate</i>	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak <i>Profit (Loss) Before Tax</i>	(101.277,09)	(97.138,45)	(79.316,58)	104,09	(22,47)
Manfaat (Beban) Pajak <i>Tax Benefit (Expenses)</i>	1.399,91	858,33	(2.917,17)	138,69	129,42
Laba (Rugi) Tahun Berjalan <i>Profit (Loss) Current Year</i>	(99.877,18)	(96.280,12)	(82.233,75)	103,60	(17,08)
Penghasilan Komprehensif Lain <i>Other Comprehensive Income</i>					
Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: <i>Items that Will not be Reclassified:</i>					
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap <i>Profit on Revaluation of Fixed Assets</i>	-	-	-	-	-
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti <i>Remeasurement of Defined Benefit Programs</i>	-	(359,86)	(5.473,32)	-	93,43
Dampak Pajak Tangguhan <i>Impact of Deferred Tax</i>	-	79,17	1.204,13	-	(93,43)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain <i>Total Other Comprehensive Income</i>	-	(280,69)	(4.269,19)	-	93,43
Total Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain <i>Total Other Comprehensive Income (Loss)</i>	(99.877,18)	(96.560,82)	(86.502,94)	103,32	(11,63)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: <i>Profit (Loss) for the Year Attributable to:</i>					
Pemilik Entitas Induk <i>Owner of the Parent Entity</i>	(99.527,38)	(90.541,33)	(81.744,26)	109,03	(10,76)
Kepentingan Non-Pengendali <i>Non-Controlling Interest</i>	(349,80)	(5.738,79)	(489,48)	(1.440,61)	(1.072,41)
Jumlah <i>Total</i>	(99.877,18)	(96.280,12)	(82.233,75)	103,60	(17,08)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada: <i>Total Comprehensive Profit (Loss) that Can be Attributable to:</i>					
Pemilik Entitas Induk <i>Owner of the Parent Company</i>	(99.527,38)	(90.822,03)	(86.013,45)	108,75	(5,59)
Kepentingan Non- Pengendali <i>Non-Controlling Interest</i>	(349,80)	(5.738,79)	(489,48)	(1.440,61)	(1.072,41)
Jumlah <i>Total</i>	(99.877,18)	(96.560,82)	(86.502,94)	103,32	(11,63)



Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Posisi Aset, Liabilitas, dan Ekuitas PT INTI (Persero) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Posisi Aset, Liabilitas, dan Ekuitas PT INTI (Persero) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PT INTI (Persero)'s Assets, Liabilities and Equity Positions for 2023 are as follows:

Dalam Rp. Juta
in Million Rupiah

Uraian Description	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Corporate Work Plan and Budget 2023	Realisasi Audited Realization Audited 2023	Realisasi Audited Realization Audited 2022	% Pencapaian Terhadap RKAP Tahun 2023 Achievement of Corporate Work Plan and Budget Year 2023	% Pertumbuhan Growth (YoY)
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = (3-4)/4
ASET Asset					
I Aset Lancar Current Assets					
1 Kas Setara Kas Cash on Hand and Cash in Banks	8.040,59	25.051,43	27.770,92	311,56	(9,79)
2 Piutang Usaha Accounts Receivable	84.365,82	185.161,94	73.128,67	219,48	153,20
3 Piutang Lain-lain Other Receivables	10.060,12	6.820,61	3.761,35	67,80	81,33
4 Persediaan Inventories	49.533,09	103.033,57	169.236,64	208,01	(39,12)
5 Pajak dibayar dimuka Prepaid Taxes	4.681,85	25.007,16	3.214,42	534,13	677,97
5 Beban Dibayar di Muka dan Uang Muka Prepaid Expense and Advance	2.322,58	7.870,45	4.511,38	338,87	74,46
7 Aset Keuangan Lancar Lainnya Other Current Financial Assets	1.448,58	-	-	-	-
Total Aset Lancar Total Current Assets	160.452,62	352.945,14	281.623,38	219,97	25,33
II Aset Tidak Lancar Non-Current Assets					
1 Aset Tetap Fixed Assets	847.945,92	769.221,81	768.508,6	90,72	0,09
2 Investasi pada Entitas Asosiasi Investment in Associates	(0,00)	-	-	200,00	-
3 Properti Investasi Investment properties	58.860,03	58.804,09	58.819,36	-	-
4 Aset Tidak Berwujud Intangible Assets	16.800,48	14.131,88	13.720,50	84,12	3,00
5 Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	62.287,31	62.491,62	61.406,28	100,33	1,77
6 Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	189,55	239,55	189,66	126,38	26,30

Total Aset Tidak Lancar <i>Total Non-Current Assets</i>	986.083,29	904.888,96	902.644,41	91,77	0,25
Total Aset <i>Total Assets</i>	1.146.535,91	1.257.834,10	1.184.267,79	109,71	6,21

LIABILITAS DAN EKUITAS

Liabilities and Equity

I	Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities					
1	Utang Usaha Accounts Payables	320.809,01	326.292,45	328.682,00	101,71	(0,73)
2	Beban Akrual Accrued Expenses	120.793,20	222.891,29	178.598,3	184,52	24,80
3	Utang Bank Bank Loans	27.059,63	53.009,71	51.872,25	195,90	2,19
4	Utang Lembaga Keuangan Non-Bank Financial Institutions Loans	94.626,29	39.763,85	15.794,60	42,02	151,76
5	Utang Pajak Tax Payables	66.190,32	35.160,91	33.220,18	53,12	5,84
6	Liabilitas Sewa Lease Liabilities	2.838,35	2.838,35	2.838,35	100,00	-
7	Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Other Current Financial Liabilities	72.537,70	138.226,44	91.915,28	190,56	50,38
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Short-Term Liabilities		704.854,49	818.183,00	702.921,01	116,08	16,40
II	Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities					
1	Utang Usaha Accounts Payable	2.737,61	-	-	-	-
2	Utang Bank Bank Loans	1.393,12	809.961,39	809.961,39	58.140,20	
3	Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefit Liabilities	144.194,35	141.089,40	135.677,43	97,85	3,99
5	Utang Bunga Bank Accrued interest Payable	-	205.163,02	161.209,87		27,26
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Long-Term Liabilities		148.325,08	1.156.213,81	1.106.848,68	779,51	4,46
Total Liabilitas Total Liability		853.179,57	1.974.396,82	1.809.769,69	231,42	9,10

III Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan: Equity Attributable to Owner of the Parent Entity:						
1	Modal Dasar Authorized Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-
2	Modal Belum Ditempatkan Unpaid Capital	(650.000,00)	(650.000,00)	(650.000,00)	100,00	-
	Modal Saham Capital Stock	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	-
3	Tambahan Modal Disetor Additional Paid in Capital	1.229,19	1.229,19	1.229,19	100,00	-
4	Tambahan Modal Debt to Equity Swap Debt to Equity Swap	-	-	-	-	-

	Saldo Laba <i>Retained Earnings</i>					
	Telah Ditentukan Penggunaannya: <i>Appropriated:</i>					
5	Cadangan Umum <i>General Reserves</i>	76.951,54	76.951,54	76.951,54	100,00	-
6	Cadangan Tujuan <i>Specific Reserves</i>	11.542,72	11.542,72	11.542,72	100,00	-
	Belum Ditentukan Penggunaannya: <i>Unappropriated:</i>					
7	Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu <i>Last Year's Profit (Loss)</i>	(1.825.672,90)	(1.805.203,93)	(1.723.459,67)	101,12	(4,74)
8	Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan <i>Profit (Loss) for the Year</i>	(99.527,38)	(90.541,33)	(81.744,26)	109,03	(10,76)
	Jumlah Saldo Laba <i>Total Retained Earnings</i>	(1.836.706,03)	(1.807.251,01)	(1.716.709,68)	101,60	(5,27)
	Modal Saham dan Saldo Laba <i>Capital Stock and Retained Earnings</i>	(449.756,92)	(1.456.021,83)	(1.365.480,49)	(123,74)	(6,63)
9	Komponen Ekuitas Lainnya : <i>Other Equity Components :</i>					
	• Selisih Revaluasi Aset <i>Asset Revaluation Difference</i>	802.524,61	802.524,61	802.524,61	100,00	-
	• Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pensiun <i>Gain (Loss) of Pension Benefit Program Actuary</i>	(53.385,13)	(57.935,01)	(57.654,32)	91,48	(0,49)
	Jumlah Ekuitas Lainnya <i>Total Other Equity</i>	749.139,48	744.589,60	744.870,29	99,39	(0,04)
	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan <i>Equity Attributable to Owner of the Parent Entity</i>	299.382,56	(711.432,23)	(620.610,20)	(237,63)	(14,63)
	Kepentingan Non-Pengendali <i>Non-Controlling Interests</i>	(6.026,22)	(5.130,49)	(4.891,70)	114,86	(4,88)
	Total Ekuitas <i>Total Equity</i>	293.356,34	(716.562,71)	(625.501,90)	444,26	(14,56)
	Total Liabilitas dan Ekuitas <i>Total of Liabilities and Equities</i>	1.146.535,91	1.257.834,10	1.184.267,79	109,71	6,21

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Statement of Cash Flows

Arus Kas Konsolidasi tahun 2023 positif sebesar Rp 25,05 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Consolidated Cash Flow in 2023 was positive at Rp 25,05 billion with the following details:

Dalam Rp. Juta
in Million Rupiah

Uraian Description	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Revised Corporate Work Plan and Budget 2023	Realisasi Audited Realization Audited 2023	Realisasi Audited Realization Audited 2022	% Pencapaian terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023 Achievement of Corporate Work Plan and Budget Year 2023	% Pertumbuhan Growth (YoY)
1	2	3	4	5 = 3/2	7 = (3-4)/4
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Cash Flow From Operating Activities					
Penerimaan dari Pelanggan Cash Received from Customers	365.845,93	431.007,55	393.158,59	117,81	9,63
Penerimaan Restitusi Pajak Cash Received from Tax Restitution	-	3.057,88	5.370,13		(43,06)
Penerimaan Bunga Giro dan Deposito Berjangka Interest Income from Current and Time Deposit Account	41,13	343,93	274,17	836,11	25,45
Penerimaan Lainnya Other Receipts	-	-	-	-	-
Pembayaran kepada Pemasok dan Beban Lainnya Cash Paid to Suppliers and Other Expenses	(283.713,92)	(341.547,71)	(323.234,10)	120,38	(5,67)
Pembayaran kepada Karyawan Cash Paid for Employees	(50.483,93)	(43.448,25)	(51.460,96)	86,06	15,57
Pembayaran Beban Pendanaan Cash Paid for Financing Expenses	(16.414,39)	(3.956,87)	(1.102,40)	24,11	(258,93)
Pembayaran Pajak Cash Paid for Tax	41.421,82)	(41.649,12)	(40.680,90)	100,55	(2,38)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari/ (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi Net Cash Flow Provided by/ (Used in) Operating Activities	(26.147,00)	3.807,41	(17.675,48)	214,56	121,54
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Cash Flow From Investment Activities					
Perolehan Aset tak berwujud Acquisition of Intangible Assets	(3.438,43)	(142,36)	-	4,14	121,54
Pembelian Aset Tetap Purchase of Fixed Assets	47.154,74	-	(205,98)	-	(100,00)

Arus Kas Bersih Diperoleh dari/ (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi*Net Cash Flow Provided by/ (Used in) Investing Activities*

(50.593,17)	(142,36)	(205,98)	199,72	30,89

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan*Cash Flow From Funding Activities***Penerimaan Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank***Cash Received from Financial Institution Loan*

147.931,35	1.250,00	21.844,99	0,84	(94,28)

Pembayaran Pinjaman Bank*Payment for Bank Loan*

(1.039,24)	(143,67)	(1.105,18)	13,82	87,00

Pembayaran Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank*Payment for Financial Institution Loan*

(92.441,43)	(7.104,62)	(14.175,26)	7,69	49,88

Liabilitas Keuangan Lancar Lainnya - Bersih*Other Current Financial Liabilities - Net*

-	(384,48)	1.218,17		

Arus Kas Bersih Diperoleh dari/ (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan*Net Cash Flow Provided by/ (Used in) Financing Activities*

54.450,68	(6.382,77)	7.782,72	(11,72)	(182,01)

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank*Net Increase (Decrease) in Cash on Hand and in Banks*

(22.289,48)	(2.717,72)	(10.098,73)	187,81	73,09

Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs yang Belum Direalisasi*Unrealized Gain (Loss) from Foreign Exchange*

-	(1,78)	8,25		(121,56)

Kas dan Bank pada Awal Tahun*Cash on Hand and in Banks at Beginning of Year*

30.330,07	27.770,92	37.861,41	91,56	(26,65)

Kas dan Bank Pada Akhir Tahun*Cash on Hand And in Banks at Ending of Year*

8.040,59	25.051,43	27.770,92	311,56	(9,79)

Kemampuan Membayar Utang

Ability to Pay Debt

PT INTI (Persero) melakukan pengelolaan risiko likuiditas dengan memonitor profil jatuh tempo pinjaman dan sumber pendanaan. Rasio Kemampuan Membayar Pinjaman terefleksikan dalam Rasio Likuiditas dan Solvabilitas.

PT INTI (Persero) manages liquidity risk by monitoring loan maturity profiles and funding sources. The ratio of the ability to repay loans is reflected in the Liquidity and Solvency Ratio.

Perusahaan senantiasa berusaha agar kemampuan membayar hutang jangka pendek dan jangka panjangnya bernilai positif. Rasio Likuiditas digunakan Perusahaan untuk mengukur kemampuannya dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Sementara itu, Rasio Solvabilitas digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuannya dalam melunasi hutang jangka panjang.

The Company always strives to ensure that its short-term and long-term debt repayment capabilities are positive. The Company uses the liquidity ratio to measure its ability to pay off its short-term debt. Meanwhile, the Company uses the Solvency Ratio to measure its ability to repay long-term debt.

Uraian Description	Realisasi Audited Realization Audited 2023	Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Revised Company Work Plan and Budget 2023	Realisasi Audited Realization Audited 2022
LIKUIDITAS			
Cash Ratio (%)	3,1	1,1	4,0
Current Ratio (%)	43,1	22,8	40,1
SOLVABILITAS			
Asset to Debt Ratio (%)	63,7	134,4	65,4
Debt to Equity Ratio (%)	(275,5)	(290,8)	(289,3)



Tingkat Kolektibilitas Piutang

Receivables Collectibility

Kolektibilitas Piutang Usaha dan Piutang Lain-Lain ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, selalu terus diupayakan penagihannya sampai kepada langkah-langkah yang diperlukan.

Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur dinyatakan pailit, melakukan reorganisasi keuangan dan gagal bayar, atau menunggak pembayaran merupakan indikator yang dianggap dapat menunjukkan adanya penurunan nilai piutang.

Tingkat perputaran piutang Perseroan menurun, pada tahun 2023 di mana sebesar 134 hari yang artinya mengalami penurunan 48 hari jika dibandingkan tahun 2022 yaitu selama 86 hari.

Collectibility of Accounts Receivable and Other Receivables is reviewed periodically. Receivables that are known to be uncollectible, always strive for collection to the required steps.

Significant financial difficulties experienced by the debtor, the possibility of the debtor being declared bankrupt, carrying out financial reorganization and defaulting, or arrears in payments is an indicator that is considered to indicate a decrease in the value of receivables

The company's receivables turnover rate has decreased, in 2023 which is 134 days, which means it has decrease by 48 days when compared to 2022, which is 86 days.

Uraian Description	Realisasi Audited Realization Audited 2023	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Company Work Plan and Budget 2023	Realisasi Audited Realization Audited 2022
Collection Periods (Hari/Days)	134	89	86

Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal

Capital Structure and Capital Structure Policy

Struktur Modal

Capital Structure

Berdasarkan perubahan terakhir Keputusan Rapat Perseroan dengan Akta Nomor 13 tertanggal 08 April 2021, Notaris Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor AHU-0067300.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 13 April 2021, dijelaskan bahwa modal dasar Perseroan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham, yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah); dan 999.999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B, masing-masing dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp999.999.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor sebanyak 35% atau sejumlah 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah), yang terbagi dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 349.999 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp349.999.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Based on the latest amendment to the Resolution of the Company's Meeting with Deed Number 13 dated April 08, 2021, Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., in Jakarta, has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0067300.AH.01.02.TAHUN 2021 dated April 13, 2021, it is explained that the Company's authorized capital is Rp1,000,000,000 (one trillion rupiah) which is divided into 1,000,000 (one million) shares, consisting of 1 (one) Series A Dwiwarna share, with a nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah); and 999,999 (nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine) series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah) or in total with a total nominal value of Rp 999,999,000,000 (nine hundred ninety-nine billion nine hundred ninety-nine million rupiah).

From the authorized capital, 35% have been issued and paid up or 350,000 (three hundred and fifty thousand) shares with a total nominal value of Rp350,000,000,000 (three hundred and fifty billion rupiah), which is divided into 1 (one) Series A Dwiwarna share, with a nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah) and 349,999 (three hundred forty-nine thousand nine hundred ninety-nine) Series B shares, with a total nominal value of Rp349,99,000,000 (three hundred forty-nine billion nine hundred ninety-nine million rupiah).

Kebijakan Struktur Modal

Capital Structure Policy

Tujuan Perseroan dalam mengelola permodalan adalah melindungi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi Pemegang Saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif. Dalam rangka mengelola struktur modal, Perseroan mungkin menyesuaikan jumlah dividen, menerbitkan saham baru, menambah atau mengurangi jumlah utang.

The Company's objective in managing capital is to protect the Company's ability to continue as a going concern, so that the entity can continue to provide returns for Shareholders and benefits for other stakeholders and to manage an optimal capital structure to minimize the cost of capital effectively. To manage the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends, issue new shares, increase or decrease the amount of debt.

Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal

Material Commitment for Investments in Capital Goods

Selama tahun 2023 tidak ada ikatan yang material atas investasi barang modal.

There were no material commitments for investments in capital goods throughout 2023.

Investasi Barang Modal

Investment In Capital Goods

Realisasi Investasi Konsolidasi tahun 2023 sebesar Rp 3,83 miliar atau 4,91% terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023, atau naik 180,28% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Realisasi Investasi berasal Alat Olah Data (AOD) sebesar Rp 1,64 miliar, dari Inventaris Kantor & Gudang sebesar Rp 8,00 juta, dan Aset Dalam Pengembangan Produk sebesar Rp 2,17 miliar.

Realization of Consolidated Investment in 2023 amounted to Rp 3,83 billion or 4,91% of the 2023 Company Work Plan and Budget, or increased by 180,28% when compared to the same period in 2022. Investment realization came from Data Processing Equipment Rp 1,64 billion, Office & Warehouse Inventory Rp 8.00 million, and Assets in Product Development Rp 2.17 billion.



Target Perusahaan di Awal Tahun 2023 Dibandingkan Realisasi Tahun 2023

Company Targets in Early 2023 Compared to Realization in 2023

Pemasaran

Marketing

Kontrak Penjualan

Perolehan Kontrak Konsolidasi tahun 2023 adalah sebesar Rp 527,91 miliar dengan rincian sebagai berikut:

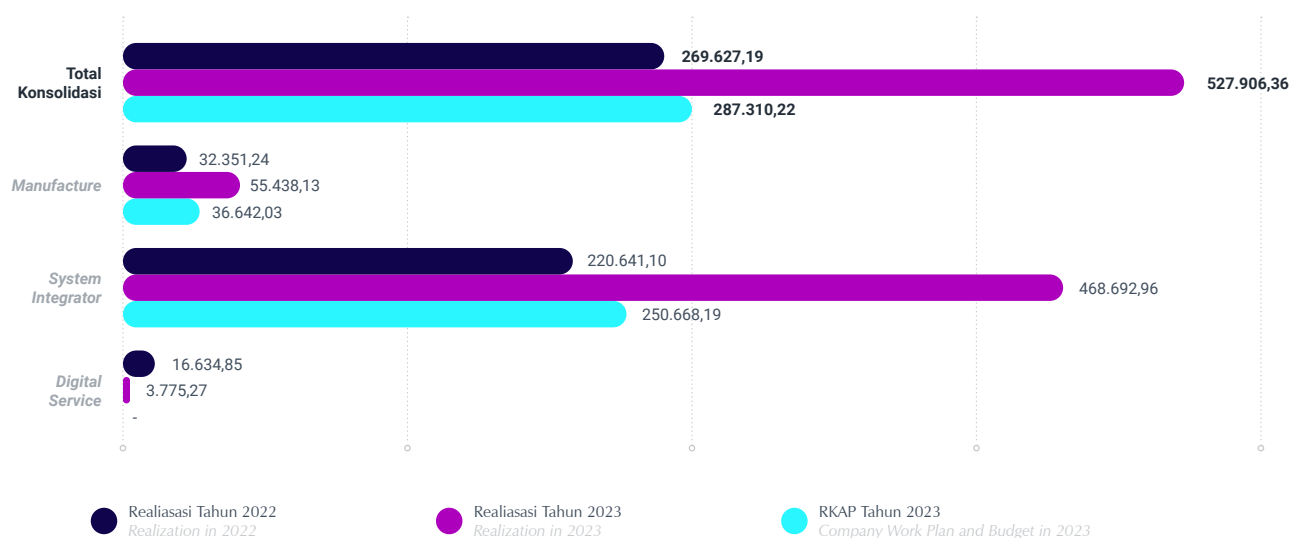
Strategy and Strategic Policy

Acquisition of Consolidated Sales Contracts for 2023 amounting to Rp 527.91 billion with details as follows:

Dalam Rp. Juta
in Million Rupiah

Lini Bisnis Business Line	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Revised Company Work Plan and Budget 2023	Realisasi Realization Audited 2023	Realisasi Realization Audited 2022	% Pencapaian Achievement	% Pertumbuhan Growth
1	2	3	4	5= 3/2	6= (3-4)/4
Manufacture	36.642,03	55.438,13	32.351,24	151,30	71,36
System Integrator	250.668,19	468.692,96	220.641,10	186,98	112,42
Digital Services	-	3.775,27	16.634,85		(77,31)
Total Konsolidasi Total Consolidation	287.310,22	527.906,36	269.627,19	183,74	95,79

Kontrak Tahun 2023



Perolehan Kontrak Penjualan Konsolidasi Perusahaan

Berikut adalah rincian realisasi perolehan Kontrak Penjualan Konsolidasi tahun 2023:

Acquisition of the Company's Consolidated Sales Contract

The following are the details of the realization of the acquisition of Consolidated Sales Contracts in 2023:

Dalam Rp. Juta
in Million Rupiah

Lini Bisnis Business Line	RKAP Company Work Plan and Budget 2023	Realisasi Realization 2023	Realisasi Realization 2022	% Pencapaian Achievement	% Pertumbuhan Growth
1	2	3	4	5= 3/2	6= (3-4)/4
Manufacture	36.642,03	55.438,13	32.351,24	151,30	71,36
Enterprise	19.274,03	47.107,75	6.111,94	244,41	670,75
Access Point	-	891,35	-		
Alat Olah Data Data Processing Tools	-	785,50	-		
e-Voting	4.377,03	-	325,02	-	(100,00)
e-KTP Reader	-	796,82	2.266,56		(64,84)
Laptop	-	550,75	-		
Jasa Lain Other Services	-	950,00	-		
Metal	-	16,86	38,53		(56,25)
Mobile Point of Sales	4.200,00	1.233,20	1.368,45	29,36	(9,88)
Manajemen Sampah Zero Zero Waste Management	2.987,00	-	-	-	
Optimalisasi Material Material Optimization	-	30,96	41,35		(25,14)
Plastik Plastic	4.605,00	372,30	175,45	8,08	112,20
Penghitung Lalu Lintas Otomatis (PLATO) Automatic Traffic Counter	3.105,00	-	-	-	
Smart Card	-	40.511,34	-		
Set Top Box	-	201,68	1.659,26		(87,85)
Smart Device	-	-	209,82		(100,00)
Radio Trunking	-	-	27,50		(100,00)
Vessel Monitoring System	-	767,00	-		
Retail	-	1.482,27	-	-	-
Mobile Point of Sales	-	12,16	-		
Laptop	-	352,11	-		
Set Top Box	-	986,71	-		
Camera	-	95,61	-		
Access Point	-	35,68	-		
Government	-	3.735,11	11.200,70		(66,65)
e-KTP Reader	-	2.424,15	14,00		17.215,34
Laptop	-	-	104,38		
Mobile Point of Sales	-	121,50	-		
Set Top Box	-	1.189,46	10.789,83		
e-Voting	-	-	292,50		(100,00)
Telco	17.368,00	3.113,01	15.038,59	17,92	(79,30)

Mobile Point of Sales	-	1.003,05	21,46		4.574,70
Smart Device	-	-	1.200,00		(100,00)
Set Top Box	-	-	8,55		(100,00)
e-KTP Reader	-	335,40	368,40		(8,96)
Metal	-	-	728,62		(100,00)
Material Outside Plant (OSP)	17.368,00	1.774,56	12.711,56	10,22	(86,04)
System Integrator	250.668,19	468.692,96	220.641,10	186,98	112,42
Enterprise	48.256,87	87.395,85	29.166,16	181,11	199,65
e-KTP Reader	-	346,66	-		
e-Voting	-	185,47	-		
IT System	-	4.982,25	514,94		867,53
Jasa Lain <i>Other Services</i>	2.350,00	21.849,05	4.122,87	929,75	429,95
Jasa Integrasi <i>Integration Services</i>	3.403,46	-	-	-	
Maintenance	-	-	258,25		(100,00)
Mobile Point of Sales	-	-	34,71		(100,00)
Niaga	-	58.592,17	171,34		34.097,26
Optimalisasi Material <i>Material Optimization</i>	-	66,12	-		
Outside Plant (OSP)	3.060,00	119,04	529,43	3,89	(77,52)
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) <i>Solar Power Plant</i>	17.062,50	174,40	-	1,02	
Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) <i>Solar Powered Public Street Lighting</i>	-	148,00	-		
Power System	-	676,50	-		
Site Acquisition Civil, Mechanical, and Electrical (SACME)	2.750,00	29,11	-	1,06	
Spare Part Management System (SPMS)	-	227,07	2.454,66		(90,75)
Tower Power	19.630,91	-	19.630,91	-	(100,00)
Very Small Aperture Terminal (VSAT)	-	-	1.449,05		(100,00)
Retail	-	27,46	-		
IT System	-	27,46	-		
Government	38.594,59	258.333,75	17.594,34	669,35	1.368,28
Alat Ukur <i>Measuring Instrument</i>	-	67.726,44	-		
e-Voting	-	1.538,43	-		
Jasa Lain <i>Other Services</i>	-	-	516,47		
Laptop	-	14,32	-		
Manajemen Sampah Zero <i>Zero Waste Management</i>	-	8.913,79	4.445,51		
IT System	-	88.941,27	-		
Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) <i>Solar Powered Public Street Lighting</i>	38.594,59	69.296,09	-	179,55	
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) <i>Solar Power Plant</i>	-	2.671,76	12.532,36		(78,68)

Sewa <i>Rental</i>	-	258,95	100,00		158,95
Tower Power	-	18.972,69	-		
Telco	182.046,05	178.702,88	177.334,30	98,16	0,77
Aktivasi Pelanggan <i>Activation Customer</i>	2.378,82	660,32	65,88	27,76	902,33
Niaga <i>Commerce</i>	-	800,00	233,72		242,29
Maintenance	7.350,50	12.381,57	31.525,31		
Outside Plant (OSP)	110.123,92	62.766,53	100.849,35	57,00	(37,76)
Optimalisasi Material <i>Material Optimization</i>	-	8,40	-		
Power System	-	204,70	-		
Repair & Refurbish	43.963,50	35.439,58	40.974,27	80,61	(13,51)
Site Acquisition Civil, Mechanical, and Electrical (SACME)	-	603,14	(63,72)		1.046,58
Spare Part Management System (SPMS)	-	1.782,51	-		
Service Handling	-	7.342,75	-		
Jasa Lain <i>Other Services</i>	-	946,40	295,80		219,95

Digital Services	-	3.775,27	16.634,85		(77,31)
Enterprise	-	3.759,84	16.634,85		(77,40)
INTICloud	-	9,75	-		
Intipay Thermal	-	-	10,00		(100,00)
Jasa Integrasi <i>Integration Services</i>	-	3.685,87	2.377,23		55,05
INTIPay	-	0,22	4,26		(94,79)
Pospay	-	-	0,12		(100,00)
e-Voting	-	64,00	68,18		(6,13)
Mobile Point of Sales	-	-	6.470,31		(100,00)
Set Top Box	-	-	136,86		(100,00)
e-KTP Reader	-	-	21,12		(100,00)
Marketplace	-	-	322,15		(100,00)
Smart Clinic	-	-	15,12		(100,00)
Penerangan Jalan Umum <i>Public Street Lighting</i>	-	-	7.207,21		(100,00)
e-Commerce IP-Phone	-	-	2,30		(100,00)
Retail	-	-	53.181,99		(100,00)
Marketplace	-	2,43	-		
Government	-	13,00	-		
e-KTP Reader	-	13,00	-		
Grand Total	287.310,22	527.906,36	269.627,19	183,74	95,79



Penjualan

Sales

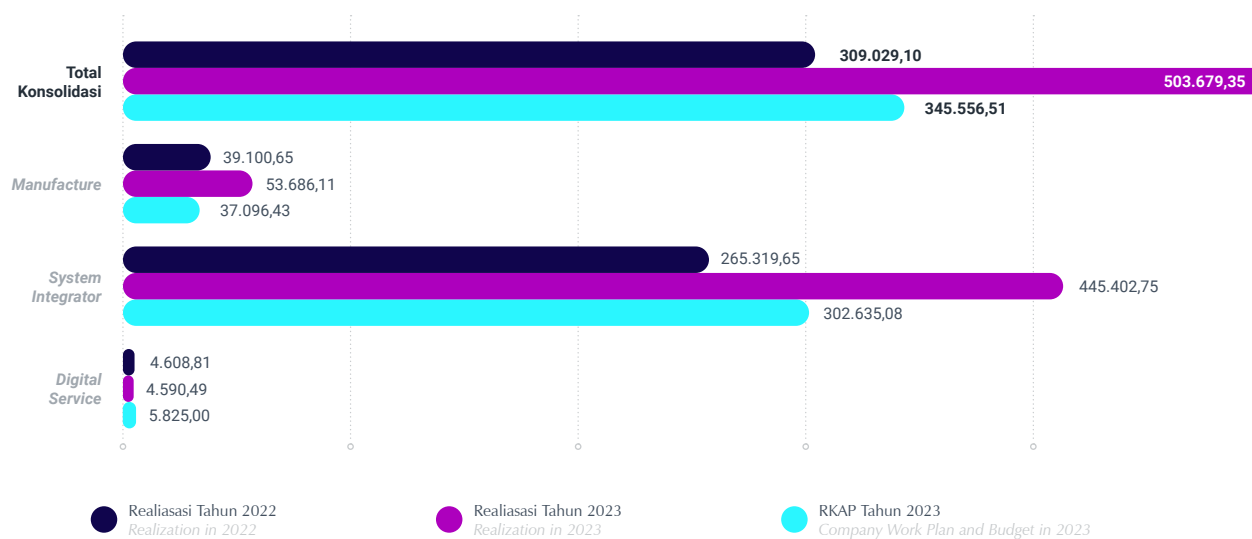
Realisasi Penjualan Konsolidasi tahun 2023 sebesar Rp 503,68 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Realization of Consolidated Sales in 2023 amounted to Rp 503.68 billion with the following details:

Dalam Rp. Juta
in Million Rupiah

Lini Bisnis Business Line	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Revised Company Work Plan and Budget 2023	Realisasi Realization Audited 2023	Realisasi Realization Audited 2022	% Pencapaian Achievement	% Pertumbuhan Growth
1	2	3	4	5= 3/2	6= (3-4)/4
Manufacture	37.096,43	53.686,11	39.100,65	144,72	37,30
System Integrator	302.635,08	445.402,75	265.319,65	147,17	67,87
Digital Services	5.825,00	4.590,49	4.608,81	78,81	(0,40)
Total Konsolidasi Total Consolidation	345.556,51	503.679,35	309.029,10	145,76	62,99

Penjualan Tahun 2023



Penjualan Konsolidasi Perusahaan

Company Consolidated Sales

Berikut adalah rincian Penjualan Konsolidasi tahun 2023:

Here are the details of the Consolidated Sales 2023:

Dalam Rp. Juta
in Million Rupiah

Lini Bisnis Business Line	RKAP Company Work Plan and Budget 2023	Realisasi Realization 2023	Realisasi Realization 2022	% Pencapaian Achievement	% Pertumbuhan Growth
1	2	3	4	5= 3/2	6= (3-4)/4
Manufacture	37.096	53.686	39.101	144,72	37,30
Enterprise	19.728	45.851	13.421	232,41	241,64
Access Point	-	891	-		
Alat Olah Data Data Processing Tools	-	740	-		
e-Voting	4.377	-	370	-	(100,00)
e-KTP Reader	-	1.488	5.197		(71,36)
Laptop	-	95	-		
Jasa Lain Other Services	1.650	-	-		
Metal	-	-	39		(100,00)
Mobile Point of Sales	4.200	1.241	2.623	29,54	(52,70)
Manajemen Sampah Zero Zero Waste Management	2.987	-	-	-	
Optimalisasi Material Material Optimization	-	-	46		(100,00)
Plastik Plastic	3.409	588	550	17,24	6,90
Penghitung Lalu Lintas Otomatis (PLATO) Automatic Traffic Counter	3.105	-	-	-	
Smart Card	-	40.511	-		
Set Top Box	-	296	4.359		(93,20)
Smart Device	-	-	210		(100,00)
Radio Trunking	-	-	28		(100,00)
Retail	-	1.482	-	-	-
Mobile Point of Sales	-	12	-		
Laptop	-	352	-		
Set Top Box	-	987	-		
Camera	-	96	-		
Access Point	-	36	-		
Government	-	2.892	10.617		(72,76)
e-KTP Reader	-	1.581	39		3.964,13
Laptop	-	-	104		
Mobile Point of Sales	-	122	-		
Set Top Box	-	1.189	10.181		
e-Voting	-	-	292		(100,00)
Telco	17.368	3.461	15.063	19,93	(77,02)
Mobile Point of Sales	-	1.384	39		3.419,11
Smart Device	-	-	1.200		(100,00)
Set Top Box	-	-	9		(100,00)

e-KTP Reader	-	211	368		(42,83)
Metal	-	-	413		(100,00)
Material Outside Plant (OSP)	17.368	1.867	13.033	10,75	(85,68)

System Integrator	302.635	445.403	265.320	147,17	67,87
Enterprise	-	786	-		
e-KTP Reader	-	185	-		
e-Voting	-	4.982	515		867,53
IT System	3.045	5.428	2.473	178,26	119,50
Jasa Lain Other Services	3.403	-	-	-	
Jasa Integrasi Integration Services	-	-	258		
Maintenance	-	-	35		(100,00)
Mobile Point of Sales	160	45.768	171	#####	26.612,38
Niaga	-	66	68		(2,88)
Optimalisasi Material Material Optimization	3.060	694	17	22,69	3.896,43
Outside Plant (OSP)	17.063	174	898	1,02	(80,58)
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Power Plant	5.766	-	-	-	
Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Solar Powered Public Street Lighting	2.490	29	-	1,17	
Site Acquisition Civil, Mechanical, and Electrical (SACME)	5.770	11.636	24.034		
Seat Management Spare Part Management System (SPMS)	1.124	830	2.597	73,85	(68,05)
Tower Power	19.631	1.610	19.096	8,20	(91,57)
Very Small Aperture Terminal (VSAT)	6.247	7.313	8.654	117,07	(15,50)
Government	38.595	231.693	9.867	600,33	2.248,20
Alat Ukur Measuring Instrument	-	65.319	-		
e-Voting	-	1.538	-		
Jasa Lain Other Services	-	-	516		(100,00)
Laptop	-	14	-		
Manajemen Sampah Zero Zero Waste Management	-	8.914	4.446		100,51
IT System	-	88.941	-		
Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Solar Powered Public Street Lighting	38.595	40.412	-	104,71	
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Power Plant	-	9.325	4.663		99,99
Sewa Rental	-	259	242		7,00
Tower Power	-	16.970	-		
Telco	196.282	134.206	196.636	68,37	(31,75)
Aktivasi Pelanggan Activation Customer	2.379	216	-	9,08	
Niaga Commerce	-	800	234		242,29

Maintenance	19.525	19.521	24.919		
Outside Plant (OSP)	130.414	69.801	117.991	53,52	(40,84)
Repair & Refurbish	43.964	33.355	52.199	75,87	(36,10)
Site Acquisition Civil, Mechanical, and Electrical (SACME)	-	520	1.158		(55,09)
Spare Part Management System (SPMS)	-	1.537	-		
Service Handling	-	7.343	-		
Jasa Lain Other Services	-	1.114	135		

Digital Services	5.825	4.590	4.609	78,81	(0,40)
Enterprise	5.825	4.575	4.609	78,54	(0,73)
Intipay Thermal	-	-	10		(100,00)
Jasa Integrasi Integration Services	-	4.483	1.821		146,19
INTIPay	-	0	4		(93,71)
Pospay	-	-	0		(100,00)
e-Voting	-	64	68		(6,13)
Mobile Point of Sales	5.750	28	210	0,49	(86,50)
Penghitung Lalu Lintas Otomatis (PLATO) Automatic Traffic Counter	75	-	1.425	-	(100,00)
Set Top Box	-	-	608		(100,00)
e-KTP Reader	-	-	61		(100,00)
Marketplace	-	-	369		(100,00)
Smart Clinic	-	-	33		(100,00)
Retail	-	2	-	-	-
Marketplace	-	2	-		
Government	-	13	-		
e-KTP Reader	-	13,00	-		
Grand Total	345.556,51	503.679,35	309.029,10	145,76	62,99

Penjualan Konsolidasi Perusahaan

Company Consolidated Sales

Berikut adalah rincian Penjualan Konsolidasi tahun 2023:

Here are the details of the Consolidated Sales 2023:

Dalam Rp. Juta
in Million Rupiah

	Uraian Description	Induk Perusahaan Parent Company	Anak Perusahaan Subsidiary	Konsolidasi Consolidation
A	Carry Over Tahun 2022 Setelah Amandemen Carry Over Year 2022 After Amendments	154.021,52	17.963,73	171.985,25
B	Kontrak 2023 Contract 2023	331.252,16	196.654,20	527.906,36
	Jumlah Kontrak Number of Contracts	485.273,68	214.617,94	699.891,61
C	Penjualan Tahun 2023 Audited Audited 2023 Sales	337.309,55	175.411,25	512.720,80
D	Penjualan Tahun 2023 Audited Setelah Eliminasi Audited 2023 Sales After Elimination	333.168,77	170.510,58	503.679,35
E	Sisa Kontrak s.d. 31 Desember 2023 Remaining Contract until December 31, 2023	152.104,90	44.107,36	196.212,26



Target Tahun 2024

Targets for 2024

Pada pertengahan tahun 2022, Manajemen mengubah visi Perseroan yaitu "Menjadi Perusahaan Teknologi Terpercaya dengan Cakupan Industri yang Luas". Selain itu, pada tahun 2023, Perseroan pun memfokuskan portofolio bisnis pada sektor *System Integrator*, *Manufacture*, dan *Digital*.

Pada tahun 2023, Penjualan berdasarkan portofolio Perseroan sebagian besar disumbang oleh proyek *System Integrator* Rp 92,40 miliar, *Manufacture* senilai Rp 3,42 miliar, dan *Digital* senilai Rp 689 juta.

Anggaran perolehan Kontrak Penjualan tahun 2024 sebesar Rp 464,6 miliar atau 92,8% dibandingkan Prognosa 2023. Sementara itu, anggaran Penjualan tahun 2024 adalah sebesar Rp 567,2 atau tumbuh 16,4% dibandingkan Prognosa 2023. Saldo Kontrak akhir tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp 84,8 miliar. Sementara itu, Profitabilitas ditargetkan lebih baik dengan *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA)* Rp 10,0 miliar atau tumbuh 130,7% dari Prognosa 2023. Laba Tahun Berjalan masih ditargetkan negatif Rp 12,6 miliar atau lebih baik 86,0% jika dibandingkan dengan Prognosa 2023.

Pada laporan Posisi Keuangan, nilai Aset ditargetkan sebesar Rp 1.142,9 miliar atau turun 2,6% terhadap Prognosa 2023. Nilai Kewajiban ditargetkan sebesar Rp 1.870,8 miliar dan Ekuitas negatif Rp 728,0 miliar.

Tingkat Kesehatan Perusahaan ditargetkan meningkat menjadi skor 51,0 atau "KURANG SEHAT BBB", dengan adanya upaya perbaikan pada rasio-rasio keuangan.

In mid-2022, Management changed the Company's vision, namely "To Become a Trusted Technology Company with a Wide Industry Coverage". In addition, in 2023, the Company will also focus its business portfolio on the System Integrator, Manufacture, and Digital sectors.

In 2023, Sales based on the Company's portfolio are mostly contributed by System Integrator projects of Rp 92,40 billion, Manufacture worth Rp 3,42 billion, and Digital worth Rp 689 million.

The budget for obtaining Sales Contracts in 2024 is Rp 464,6 billion or negative 92.8% compared to the 2023 Prognosis. Meanwhile, the 2024 Sales budget is Rp 567.2 or a growth of 16.4% compared to the 2023 Prognosis. The Contract Balance at the end of 2024 is projected to be Rp 84.8 billion. Meanwhile, Profitability is targeted to be better with Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) of Rp 10.0 billion or growth of 130.7% from the 2023 Prognosis. Profit for the Year is still targeted at negative Rp 12.6 billion or better 86.0% when compared to 2023 Prognosis.

In the Financial Position Report, the target Asset value is Rp 1,142.9 billion, a decrease of 2.6% against the 2023 Prognosis. The target Liability value is Rp 1,870.8 billion and negative Equity of Rp 728.0 billion.

The Company's Health Level is targeted to increase to a score of 51.0 or "LESS HEALTHY BBB", with efforts to improve financial ratios.



Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Fact After Accountant Reporting Date

Penyelesaian Kewajiban melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 24 Januari 2024, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dilaksanakan melalui rapat pembahasan proposal perdamaian dan pemungutan suara (*voting*) yang telah dihadiri oleh 3 Kreditor Separatis dan 358 Kreditor Konkuren.

Kreditor Separatis menyatakan setuju dengan proposal perdamaian sebanyak 3 kreditor atau setara dengan 100% kehadiran dan dengan jumlah suara 98.672 yang mewakili 100% seluruh tagihan yang diakui hadir dalam rapat tersebut dan Kreditor Konkuren yang menyatakan setuju dengan proposal perdamaian sebanyak 351 Kreditor setara dengan 98,04% dengan total suara sebesar 31.541 atau setara 94,10%, sedangkan Kreditor Konkuren menyatakan tidak setuju atau abstain dengan proposal perdamaian sebanyak 7 Kreditor setara dengan 2,96% dengan total suara sebesar 1.976 suara atau setara dengan 5,90%.

Pada 24 Januari 2024, Perusahaan telah mendapatkan keputusan homologasi atas Rencana Perdamaian yang disampaikan dalam PKPU Perusahaan.

Kewajiban-kewajiban Perusahaan yang penyelesaiannya dilakukan melalui PKPU meliputi:

1. Utang Usaha
2. Pinjaman Jangka Pendek
3. Utang Lain-Lain
4. Pinjaman Jangka Panjang
5. Liabilitas Sewa

Kewajiban-kewajiban Perusahaan yang masuk dalam PKPU adalah kewajiban Perusahaan yang terutang pada 18 Juli 2023. Kewajiban-kewajiban entitas anak Perusahaan tidak termasuk dalam penyelesaian PKPU Perusahaan.

Dalam putusan homologasi atas Rencana Perdamaian, terdapat tiga skema penyelesaian dengan para kreditur, yaitu:

1. Dilunasi bertahap melalui arus kas operasional.
2. Dimodifikasi menjadi ketentuan pembayaran baru jangka panjang.
3. Percepatan pembayaran melalui distribusi kelebihan *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA)* cash sweep.

Settlement of obligations through the Postponement of Debt Payment Obligations process on January 24 2024, at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court, was carried out through a peace proposal discussion meeting and voting which was attended by 3 Separatist Creditors and 358 Concurrent Creditors.

Secured creditors stated that they agreed with the peace proposal as many as 3 creditors or the equivalent of 100% attendance and with a total of 98,672 votes representing 100% of all recognized claims present at the meeting and unsecured creditors who agreed with the peace proposal were 351 Creditors Equivalent to 98. 04% with a total vote of 31,541 or equivalent to 94.10%, while unsecured creditors stated that they did not agree or abstained from the peace proposal, 7 Creditors equivalent to 2.96% with a total vote of 1,976 votes or equivalent to 5.90%.

On January 24, 2024, the Company obtained a homologation decision on the Company's Composition Plan which was proposed in the Company's Postponement of Debt Payment Obligations.

The Company's liabilities that are settled through Postponement of Debt Payment Obligations comprised the following:

1. Trade Payables
2. Short-Term Loans
3. Other Payables
4. Long-Term Loans
5. Lease Liabilities

The Company's obligations included in the Postponement of Debt Payment Obligations are the Company's obligations owed on July 18, 2023. The obligations of the Company's subsidiaries are not included in the Company's Postponement of Debt Payment Obligations settlement.

In the homologation decision on the Peace Plan, there are tiga settlement schemes with the directors, namely:

1. *Paid off in stages through operational cash flow.*
2. *Modified to new long-term payment terms.*
3. *Accelerated payments through distribution of excess Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) cash sweeps.*

Rincian skema restrukturisasi yang diajukan Perusahaan kepada Kreditor dalam proposal perdamaian antara lain:

1. Preferen

Pembayaran pokok utang karyawan akan dilakukan pemotongan berdasarkan kewajiban karyawan terkait dengan perpajakan, jaminan sosial, dana pensiun, keanggotaan koperasi, serta kewajiban ketenagakerjaan lainnya.

Bunga dan denda yang tertunggak akan dilakukan penghapusan yang efektif pada tanggal efektif perjanjian perdamaian.

Apabila Perusahaan tidak memiliki cukup dana untuk membayar tagihan pokok utang, maka sisa jumlah yang belum dibayar dapat ditangguhkan dan wajib dibayar bersamaan dengan jumlah yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran berikutnya dan mekanisme ini akan berlanjut hingga jadwal pelunasan akhir.

2. Separatis

Pembayaran bunga atas pokok utang dilakukan dalam suku bunga tahunan dan akan dilakukan bersama dengan pembayaran pokok utang.

Seluruh bunga dan denda yang tertunggak serta bunga dan denda yang timbul sampai dengan perjanjian perdamaian yang dihomologasi berkekuatan hukum tetap ("tunggakan bunga dan denda") ditangguhkan pembayarannya hingga tanggal jatuh tempo terakhir.

3. Konkuren

Bunga dan denda yang tertunggak oleh Kreditor Konkuren akan dihapus efektif pada tanggal efektif perjanjian perdamaian.

Apabila Perusahaan tidak memiliki cukup dana untuk membayar tagihan pokok utang Kreditor Konkuren, maka sisa jumlah yang belum dibayar dapat ditangguhkan dan wajib dibayar bersamaan dengan jumlah yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran berikutnya dan mekanisme ini akan berlanjut hingga jadwal pelunasan akhir.

Details of the restructuring scheme proposed by the Company to Creditors in the peace proposal include:

1. Preferred

The principal payment of employee debt will be deducted based on the employee's obligations related to taxation, social security, pension funds, cooperative membership and other employment obligations.

The outstanding interest and fines will be written-off effective on the effective date of the peace agreement.

If the Company does not have sufficient funds to pay the principal debt, the remaining unpaid amount can be deferred and must be paid along with the amount that must be paid on the next payment date and this mechanism will continue until the final repayment schedule.

2. Secured

Interest payments on principal debt are made at an annual interest rate and will be made together with principal debt payments.

All outstanding interest and fines as well as interest and fines that arise until the peace agreement is homologated and has permanent legal force ("arrear of interest and fines") are deferred until the final due date.

3. Unsecured

Interest and fines owed by Concurrent Creditors will be written off effective on the effective date of the settlement agreement.

If the Company does not have sufficient funds to pay the principal debt of the Concurrent Creditors, the remaining unpaid amount can be deferred and must be paid along with the amount that must be paid on the next payment date and this mechanism will continue until the final repayment schedule.

Uraian Tentang Prospek Usaha Perusahaan

Description of The Company's Business Prospects

Perusahaan menemukan beberapa prospek dimana Perusahaan dapat berpartisipasi sekaligus memperoleh keuntungan finansial dari proyek-proyek yang diturunkan dari agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024, antara lain sebagai berikut:

The Company identified several prospects where the Company could participate and obtain financial benefits from projects included in the RPJMN IV Development agenda for 2020-2024, including the following:

No.	Sasaran Target	Indikator Indicator
I.	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan <i>Increased carrying capacity and quality of economic resources as a modality for sustainable economic development</i>	
	1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru dan terbarukan (EBT). <i>Fulfillment of energy needs by prioritizing the increase in new and renewable energy.</i>	1. Porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional. <i>The share of renewable energy in the national energy mix</i> 2. Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sektor pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT). <i>Domestic Content Level in the renewable energy generation sector</i>
II.	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, serta investasi di sektor riil dan industrialisasi <i>Increased added value, employment, and also investment in the real sector and industrialization</i>	
	1. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, serta investasi di sektor riil dan industrialisasi <i>Increase in added value, employment and investment in the real sector and industrialization</i> 2. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) <i>Increasing high value-added exports and strengthening Domestic Content Level</i>	Profitabilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) <i>Profitability of State-Owned Enterprises (SOEs)</i> 1. Tingkat Kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) <i>Level of Domestic Content</i> 2. Jumlah produk tersertifikasi TKDN > 25% <i>Number of products certified with Level of Domestic Content > 25%</i>
III.	Infrastruktur untuk mendukung perkotaan <i>Infrastructure to support urban development</i>	
	1. Meningkatnya penetrasi <i>fixed broadband</i> di perkotaan <i>Increased penetration of fixed broadband in urban areas</i>	Persentase pelanggan layanan jaringan tetap <i>pitalebar</i> per 100 penduduk <i>Percentage of fixed broadband network subscribers per 100 inhabitants</i>
IV.	Transformasi Digital <i>Digital transformation</i>	
	1. Penuntasan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) <i>Completion of information and communication technologies (ICT) infrastructure</i>	Meratanya akses layanan telekomunikasi & internet di desa <i>The equitable access to telecommunications and internet services in rural areas</i>
V.	Menjaga stabilitas keamanan nasional <i>Increased carrying capacity and quality of economic resources as a modality for sustainable economic development</i>	
	1. Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber yang ditandai dengan meningkatnya skor Indonesia dalam <i>Global Cyber Security Index</i> <i>Enhancing cybersecurity and resilience, marked by Indonesia's increased score in the Global Cybersecurity Index</i>	Penguatan pengamanan infrastruktur siber <i>Strengthening cybersecurity infrastructure</i>

Oleh karena itu, berdasarkan evaluasi pasar yang dilakukan Perusahaan, tergambar potensi yang masih dapat dioptimalkan oleh Perusahaan sebagai peluang untuk meningkatkan performansi Perusahaan dengan memperbandingkan *market size* dan *market share* berdasarkan perolehan eksisting, dengan fokus pada Program Kerja Utama sebagai berikut :

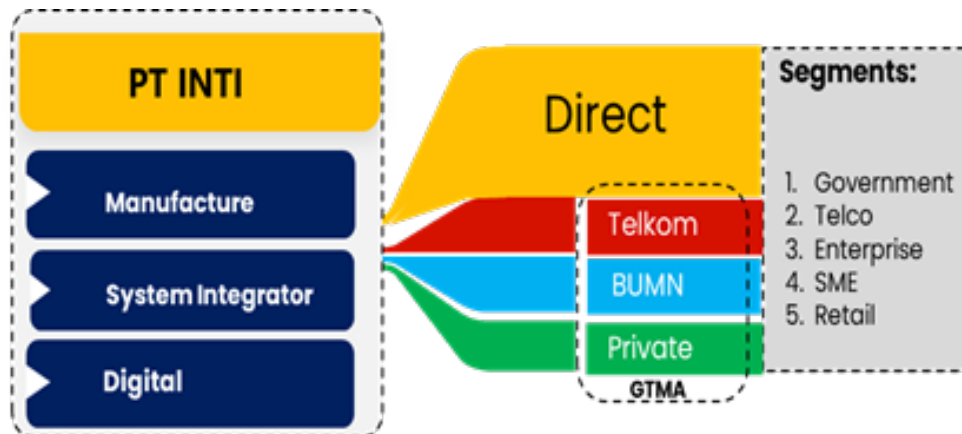
Therefore, based on the market evaluation carried out by the Company, it shows the potential that can still be optimized by the Company as an opportunity to improve the Company's performance by comparing *market size* and *market share* based on existing acquisitions, with a focus on the Main Work Program as follows:



Uraian Tentang Aspek Pemasaran

Description of Marketing Aspect

Fokus bisnis PT INTI (Persero) pada tahun 2023 berfokus pada tiga portofolio yang dijalankan melalui lima segmen. Portofolio dan Segmen yang disasar adalah seperti dijabarkan di bawah ini:



PT INTI (Persero)'s business focus in 2023 will focus on three portfolios which are run through five segments. The portfolio and segments targeted are as described below:

Perusahaan terus bersinergi dengan seluruh stakeholder bersama-sama dalam membangun industri dan ekosistem yang kuat dan mampu diandalkan oleh pemangku kepentingan melalui *strategi direct, channelling, atau go to market alignment* bersama perusahaan yang berkompeten di bidangnya masing-masing.

Company continues to synergize with all stakeholders together in building a strong industry and ecosystem that can be relied on by stakeholders through direct, channelling, or go to market alignment strategies with companies that are competent in their respective fields.

Program strategi pemasaran dan penjualan Perusahaan tahun 2023 dapat dituangkan secara ringkas sebagaimana berikut:

The Company's marketing and sales strategy program for 2023 can be summarized as follows:



1. Porsi portofolio *Manufacture, System Integrator, dan Digital*.



2. Merealisasikan Perolehan Kontrak tahun 2023 sebesar Rp 527,91 miliar, terutama berasal dari proyek *IT System* Rp 93,95 miliar, proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Rp 69,44 miliar, Alat Ukur Rp 67,73 miliar, *Outside Plant* (OSP) Rp 62,86 miliar, Niaga Rp 59,39 miliar, *Smart Card* Rp 40,51 miliar, *Repair & Refurbish* Rp 35,44 miliar, Jasa Lain Rp 23,75 miliar, *Tower Power* Rp 18,97 miliar, *Maintenance* Rp 12,38 miliar, Manajemen Sampah Zero (MASARO) Rp 8,91 miliar, *Service Handling* Rp 7,34 miliar, *e-KTP Reader* Rp 3,92 miliar, Jasa Integrasi Rp 3,69 miliar, dan proyek-proyek lainnya Rp 19,60 miliar, sehingga Total Perolehan Kontrak adalah Rp 527,91 miliar.



3. Merealisasikan Perolehan Penjualan tahun 2023 sebesar Rp 503,68 miliar, terutama berasal dari proyek *IT System*

1. *Manufacturing, System Integrator, and Digital portfolio portions.*

2. *Realizing the Acquisition of Contracts in 2023 amounting to Rp 527.91 billion, mainly coming from the IT System project Rp 93.95 billion, the Solar Public Street Lighting Rp 69.44 billion, Measuring Instruments Rp 67.73 billion, Outside Plant (OSP) Rp 62.86 billion, Commerce Rp 59.39 billion, Smart Card Rp 40.51 billion, Repair & Refurbish Rp 35.44 billion, Other Services Rp 23.75 billion, Tower Power Rp 18.97 billion, Maintenance Rp 12.38 billion, Zero Waste Management (MASARO) Rp 8.91 billion, Service Handling Rp 7.34 billion, e-KTP Reader Rp 3.92 billion, Integration Services Rp 3.69 billion, and other projects Rp 19.60 billion, so the Total Contract proceeds are Rp 527.91 billion.*

3. *Realizing Sales Revenue in 2023 of Rp 503.68 billion, mainly coming from IT System projects Rp 93.92 billion,*

Rp 93,92 miliar, *Outside Plant* (OSP) Rp 70,50 miliar, Alat Ukur Rp 65,32 miliar, Niaga Rp 46,57 miliar, *Smart Card* Rp 40,51 miliar, Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Rp 40,41 miliar, *Repair & Refurbish* Rp 33,35 miliar, *Maintenance* Rp 19,52 miliar, *Tower Power* Rp 18,58 miliar, *Seat Management* Rp 11,64 miliar, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rp 9,50 miliar, Manajemen Sampah Zero (MASARO) Rp 8,91 miliar, *Service Handling* Rp 7,34 miliar, *Very Small Aperture Terminal* (VSAT) Rp 7,31 miliar, Jasa Lain Rp 6,54 miliar, Jasa Integrasi Rp 4,48 miliar, e-KTP Reader Rp 4,08 miliar, *Mobile Point of Sales* (MPOS) Rp 2,79 miliar, *Set Top Box* (STB) Rp 2,47 miliar, *Spare Part Management System* (SPMS) Rp 2,37 miliar, *Material Outside Plant* (OSP) Rp 1,87 miliar, e-Voting Rp 1,79 miliar, dan proyek-proyek lainnya senilai Rp 3,90 miliar, sehingga Total Perolehan Penjualan adalah Rp 503,68 miliar.

4. Merealisasikan kontrak Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di antaranya proyek *Outside Plant* (OSP) dan *Managed Service* dengan PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk., serta *Vessel Monitoring System* dengan PT Biofarma (Persero).
5. Berupaya meningkatkan pelaksanaan proyek tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat biaya sesuai dengan *Project Charter* yang diterima.
6. Merealisasikan kontrak dan penyelesaian pekerjaan dari pelanggan *Government* berbasis dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 di antaranya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dan Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) dan proyek *Set Top Box* (STB) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
7. Melaksanakan pengelolaan risiko terkait pemasaran dan pengembangan usaha secara konsisten.
8. Meningkatkan kepuasan pelanggan dan menghindari resiko denda.
9. Melakukan proses pengujian dan sertifikasi yang diperlukan untuk pemasaran produk atau jasa.
10. Pemanfaatan model bisnis baru seperti *Managed Service*, *Repair & Maintenance*, dan Kerja Sama Operasi.

Outside Plant (OSP) Rp 70.50 billion, *Measuring Equipment* Rp 65.32 billion, *Commerce* Rp 46.57 billion, *Smart Card* Rp 40.51 billion, *Solar Powered Public Street Lighting* Rp 40.41 billion, *Repair & Refurbish* Rp 33.35 billion, *Maintenance* Rp 19.52 billion, *Tower Power* Rp 18.58 billion, *Seat Management* Rp 11.64 billion, *Solar Power Plant* Rp 9.50 billion, *Zero Waste Management* (MASARO) Rp 8.91 billion, *Service Handling* Rp 7.34 billion, *Very Small Aperture Terminal* (VSAT) Rp 7.31 billion, *Other Services* Rp 6.54 billion, *Integration Services* Rp 4.48 billion, e-KTP Reader Rp 4.08 billion, *Mobile Point of Sales* (MPOS) Rp 2.79 billion, *Set Top Box* (STB) Rp 2.47 billion, *Spare Part Management System* (SPMS) Rp 2.37 billion, *Outside Plant Material* (OSP) Rp 1.87 billion, e-Voting Rp 1.79 billion, and other projects worth Rp 3.90 billion, bringing the Total Proceeds Sales were Rp 503.68 billion.

4. Realizing State-Owned Enterprise (SOEs) Synergy contracts, including the *Outside Plant* (OSP) and *Managed Service* projects with PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk., as well as the *Vessel Monitoring System* with PT Biofarma (Persero).
5. Trying to improve project implementation on time, quality, and cost by the *Project Charter* received.
6. Realizing contracts and completing work from Government customers based on funds from the 2023 Regional Revenue and Expenditure Budget and State Revenue and Expenditure Budget, including the *Rooftop Solar Power Plant* and *Public Street Lighting* projects from the Ministry Energy and Human Resources and the *Set Top Box* (STB) project from the Ministry of Communication and Information.
7. Carry out risk management related to marketing and business development consistently.
8. Increase customer satisfaction and avoid the risk of fines.
9. Carry out the testing and certification process required for the marketing of products or services.
10. Utilization of new business models such as *Managed Service*, *Repair & Maintenance*, and *Joint Operations*.

Kebijakan dan Pembayaran Dividen

Dividend Policy and Payment

Sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 26, Perseroan tidak melakukan pembagian dividen pada tahun 2023 karena Perseroan masih memiliki saldo kerugian dari Rugi Bersih. Tidak adanya pembagian dividen ini juga berlaku pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022.

As stipulated in Article 26 of the Company's Articles of Association, the Company did not distribute dividends in 2023 because the Company still has a balance of losses from Net Loss. The absence of dividend distribution also occurred in the previous year, namely 2022.



Tingkat Kesehatan Perusahaan

Company Health Level

Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan berdasarkan indikator kinerja Perseroan yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor KEP-100/MBU/2002 tertanggal 4 Desember 2002, dilaporkan sebagai berikut:

Assessment of the Company's Health Level based on the Company's performance indicators referring to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number KEP-100/MBU/2002 dated December 4, 2002, reported as follows:

Uraian Description	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Corporate Work Plan and Budget 2023		Realisasi 2023 Realization 2023		Realisasi 2022 Realization 2022	
	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor
Aspek Keuangan (Financial Aspect)						
1 Return on Equity (%)	26,5	-	15,4	-	14,9	-
2 Return on Interest (%)	(2,7)	1,0	(3,3)	1,0	(1,1)	1,0
3 Cash Ratio (%)	1,1	-	3,1	-	4,0	-
4 Current Ratio (%)	22,8	-	43,1	-	40,1	-
5 Collection Periods (Hari/Days)	89,1	4,5	134,2	3,5	86	4,5
6 Perputaran Persediaan (Hari) Inventory Turnover (Days)	52,3	5,0	74,7	5,0	200	2,4
7 Perputaran Total Aset (%) Total Asset Turnover (%)	32,8	2,0	41,1	5,0	27,5	2,0
8 Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset (%)	32,8	10,0	(49,8)	-	(53,5)	-
Jumlah Aspek Keuangan Number of Financial Aspects		22,5		14,6		9,9
Aspek Operasional (Operational Aspects)						
1 Increasing Order/Contract Booked (%)	12,0	5,0	95,8	5,0	(11%)	-
2 Percentage of Government Contract (%)	85,3	5,0	79,2	4,6	17%	5,0
3 Order Fullfillment Rate (%)	22,8	5,0	49,7	5,0	66%	5,0
Jumlah Skor Aspek Operasional Total Operational Aspect Scores		15,0		14,6		10,0

Skor Aspek Administrasi (<i>Administrative Aspect Scores</i>)							
1	Laporan Keuangan Tahun Buku <i>Annual Report</i>	Maret 2023	3,0	Maret 2023 <i>March 2023</i>	3,0	Maret 2022 <i>March 2022</i>	3,00
2	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan <i>Company Work Plan And Budget</i>	Oktober 2023	3,0	Oktober 2023 <i>October 2023</i>	3,0	Oktober 2021 <i>October 2022</i>	3,00
3	Keterlambatan Laporan Manajemen Per Triwulan <i>Delay Quarterly Management Reports</i>	0 hari	3,0	0 Hari/ <i>Day</i>	3,0	0 Hari/ <i>Day</i>	3,00
4	Kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan <i>Performance of Partnership Program and Environment Development</i>						
	• Efektifitas Penyaluran Dana <i>Fund Distribution Effectiveness</i>	100,00%	3,0	89,00%	2,0	92,63%	2,8
	• Tingkat Kolektibilitas Penyaluran Dana <i>Collectibility Level of Fund Distribution</i>	73,00%	3,0	70,42%	3,0	70,89%	2,9
Jumlah Skor Aspek Operasional <i>Total Operational Aspect Scores</i>			15,0		14,0		14,7
Total Skor			52,5		43,1		34,6
Tingkat Kesehatan Perusahaan <i>Company Health Level</i>			KURANG SEHAT BBB <i>LESS HEALTHY BBB</i>	KURANG SEHAT BB <i>LESS HEALTHY BB</i>	KURANG SEHAT BB <i>LESS HEALTHY BB</i>	KURANG SEHAT BB <i>LESS HEALTHY BB</i>	



Pembelian Kembali Saham Perusahaan

Company Share Buyback

Pada tahun 2023, tidak terdapat informasi pembelian kembali saham perusahaan.

In 2023, there is no information on the buyback of company share.

Informasi Material Terkait Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, atau Restrukturisasi Hutang/Modal

Dividend Policy and Payment

Pada tahun 2023, Perusahaan melakukan Restrukturisasi Hutang melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"). Pada 5 Juni 2023, PT Redision Teknologi Indonesia sebagai kreditor, mengajukan gugatan PKPU terhadap Perusahaan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena gagal bayar oleh Perusahaan atas pokok pinjaman yang jatuh tempo.

Pada 18 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan PKPU oleh PT Redision Teknologi Indonesia terhadap Perusahaan telah mengeluarkan keputusan yang mengabulkan Permohonan PKPU dan menetapkan PKPU Sementara terhadap Perusahaan untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan tersebut, serta menunjuk dan mengangkat Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang Perusahaan, menetapkan tentang imbalan jasa Pengurus dalam pengurusan harta Perusahaan yang akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir, serta menangguhkan biaya perkara permohonan ini sampai dengan PKPU berakhir.

Pada 31 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengabulkan PKPU Tetap kepada Debitor atau PT Industri Telekomunikasi Indonesia (dalam PKPU) selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak PKPU Sementara berakhir. Adapun pertimbangan adanya perpanjangan waktu di antaranya terdapat beberapa nilai tagihan Kreditor yang belum sesuai dengan dokumen yang disampaikan kepada tim Pengurus serta berbeda juga dengan nilai pada catatan Debitor. Selain itu, Debitor memerlukan waktu untuk menyusun rencana perdamaian bersama-sama dengan Penasehat Keuangan Debitor yang kemudian akan disesuaikan dengan nilai tagihan Kreditor yang terverifikasi.

Pada 30 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan perpanjangan PKPU Tetap kepada Debitor atau PT Industri Telekomunikasi Indonesia (dalam PKPU) selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak PKPU Tetap berakhir pada 30 Oktober

In 2023, Company will carry out Debt Restructuring through Postponement of Debt Payment Obligations process. On June 5, 2023, PT Redision Teknologi Indonesia as creditor filed for a Postponement of Debt Payment Obligations file a lawsuit against the Company to the Commercial Court at the Central Jakarta District Court due to failed to pay by the Company of its outstanding principal amount on due dates.

On July 18 2023, the Panel of Judges of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court which examined and adjudicated the Postponement of Debt Payment Obligations application by PT Redision Teknologi Indonesia against the Company has issued a decision granting the Postponement of Debt Payment Obligations Application and establishing a Temporary Postponement of Debt Payment Obligations against the Company for a maximum of 45 (forty five) days starting from the decision, as well as appointing and appointing a Management Team for the Process of Suspension of Obligations and Payment of Company Debts, determining the compensation for the Management's services in managing the Company's assets which will be determined later after the Postponement of Debt Payment Obligations ends, as well as postponing the case fees for this application until the Postponement of Debt Payment Obligations ends.

On August 31 2023, the Panel of Judges at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court, granted a Permanent Postponement of Debt Payment Obligations to the Debtor or PT Industri Telekomunikasi Indonesia (in Postponement of Debt Payment Obligations) for 60 (sixty) calendar days starting from the end of the Temporary Postponement of Debt Payment Obligations. The consideration for an extension of time includes that there are several Creditor bill values that do not match the documents submitted to the Management team and are also different from the values in the Debtor's records. Apart from that, the Debtor needs time to prepare a peace plan together with the Debtor's Financial Advisor which will then be adjusted to the verified value of the Creditor's claims.

On October 30, 2023, the Panel of Judges at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court granted an extension of the Permanent Postponement of Debt Payment Obligations to the Debtor or PT Industri Telekomunikasi Indonesia (in Postponement of Debt Payment Obligations) for 45 (forty



2023.

Pada 13 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan Perpanjangan PKPU Tetap kepada Debitor atau PT Industri Telekomunikasi Indonesia (dalam PKPU) selama 44 (empat puluh empat) hari kalender terhitung sejak PKPU Tetap, yaitu berakhir pada 25 Januari 2024.

Kreditur PKPU dalam Rencana Perdamaian diklasifikasi menjadi Kreditur Separatis, Kreditur Preferen, dan Kreditur Konkuren.

Jumlah utang Perusahaan didasarkan pada Kreditur yang telah melakukan verifikasi pada batas akhir pengajuan tagihan Kreditur tertanggal 17 November 2023, dengan cut-off pada 5 Desember 2023 yang disampaikan kepada Tim Pengurus Perusahaan (dalam PKPU) ("Kreditur Terverifikasi") serta tagihan Kreditur yang belum melakukan verifikasi berdasarkan Laporan Keuangan Internal Perusahaan tertanggal 5 Desember 2023 ("Kreditur Tidak Terverifikasi").

Kreditur PKPU dalam Rencana Perdamaian yang telah mendaftarkan tagihannya yaitu 579 Kreditur Preferen, 3 Kreditur Separatis, dan 373 Kreditur Konkuren.

five) calendar days starting from the date the Permanent Postponement of Debt Payment Obligations ended on October 30, 2023.

On December 13, 2023, the Panel of Judges at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court granted an extension of the Permanent Postponement of Debt Payment Obligations to the Debtor or PT Industri Telekomunikasi Indonesia (in Postponement of Debt Payment Obligations) for 44 (forty four) calendar days starting from the Permanent Postponement of Debt Payment Obligations, namely ending on January 25, 2024.

Postponement of Debt Payment Obligations creditors in the Peace Plan are classified into Separatist Creditors, Preferred Creditors and Concurrent Creditors.

The amount of the Company's debt is based on Creditors who have verified the deadline for submitting Creditor bills on November 17, 2023, with a cut-off on December 5, 2023 which is submitted to the Company Management Team (in Postponement of Debt Payment Obligations) ("Verified Creditors") as well as Creditor bills that have not yet been paid carry out verification based on the Company's Internal Financial Report dated December 5, 2023 ("Unverified Creditors").

Postponement of Debt Payment Obligations Creditors in the Peace Plan who have registered their claims are 579 Preferred Creditors, 3 Secured Creditors, and 373 Unsecured Creditors.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Afiliasi

Material Transaction Information That Contains Conflict of Interest and/or Affiliated Transaction

Pada tahun 2023, tidak terdapat informasi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi afiliasi.

In 2023, there is no material information containing conflicts of interest and/or affiliated transactions.



Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perseroan

Changes in Legislation That Has Significant Influence on The Company

Perseroan memastikan bahwa selama tahun 2023, tidak ada perubahan Peraturan Perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan.

The Company ensures that during 2023, there are no changes to the Laws and Regulations that significantly affect the Company.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Changes in Accounting Policies

Pernyataan Kepatuhan

Statement of Compliance

Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI).

The Consolidated Financial Statements were prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board - Indonesian Institute of Accountant (DSAK - IAI).

Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Basis of Presentation and Preparation of The Consolidated Financial Statement

Laporan Keuangan Konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali Laporan Arus Kas Konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

The Consolidated Financial Statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the Consolidated Statements of Cash Flow. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

Laporan Arus Kas Konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

The Consolidated Statements of Cash Flow are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing, and financing activities.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perseroan. Setiap entitas di dalam Perseroan menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah which is the functional currency of the Company. Each entity in the Company determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif Pada Tahun Berjalan

New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in The Current Year

Berikut adalah revisi, amandemen, dan penyesuaian atas

The following are revisions, amendments, and adjustments to

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta Interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal; dan
- Revisi PSAK 107: Akuntansi Ijarah.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Financial Accounting Standards (SAK) and interpretations of Financial Accounting Standards effective for the financial year starting on or after January 1, 2023, namely:

- *Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;*
- *Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as a Current or Non-Current;*
- *Amendment to PSAK 16: Fixed Assets related to Proceeds before Intended Use;*
- *Amendments PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding Definition of Accounting Estimates;*
- *Amendments PSAK 46: Income Tax regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and*
- *Revised PSAK 107: Accounting for Ijarah.*

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial year.

Kelangsungan Usaha

Business Continuity

Dengan memperhatikan kinerja Perseroan hingga akhir tahun 2023, Perseroan mampu mencapai kinerja Penjualan melebihi dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023. Hal ini menunjukkan kinerja Perusahaan terus membaik dan Perusahaan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Tidak lepas dengan tantangan Perusahaan untuk meyakinkan seluruh mitra usaha atas upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan. Perbaikan kinerja Perusahaan pun memberikan influence positif kepada kinerja anak perusahaan yang juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan.

Langkah Perseroan untuk melanjutkan kelangsungan usaha adalah dengan gencar menjalankan program strategis transformasi total bertajuk "INTI Reborn" yang meliputi aspek transformasi *Business Alignment*, yang meliputi sisi *Expand Business Segment & Target Multi-Vertical Industry, Subsidiary Streamlining, Product Portfolio Arrangement, dan Strategic Alliance with Global Partner*.

Seiring dengan perkembangan strategi jangka panjang di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mengacu kepada Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-43/MBU/09/2020 tertanggal 30 September 2020, PT INTI (Persero) secara resmi ditunjuk sebagai salah satu anggota dari program restrukturisasi atau optimasi aspek bisnis dan scale-up di bawah naungan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan PT Danareksa (Persero) yang masih berlanjut sampai tahun 2023.

Dalam hal ini, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) diberikan kuasa khusus oleh Kementerian BUMN untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi wewenang dan/atau hak Pemegang Saham. Adapun yang menjadi fokus utama dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) terhadap BUMN yang berada di bawah naungannya adalah restrukturisasi dan optimisasi aspek bisnis perusahaan.

Pada tahun ini, Perusahaan memfokuskan pada restrukturisasi bisnis, finansial, dan capital untuk membentuk kinerja Perusahaan yang lebih baik. Kedepannya Perusahaan menetapkan untuk memperluas cakupan pasar ke industri-industri lain di luar telekomunikasi dengan berfokus pada tiga (3) lini bisnis, yaitu System Integrator, Manufacture, dan Digital. Perusahaan tidak membatasi hanya pada industri telekomunikasi, melainkan bertransformasi menjadi industri Teknologi yang mampu mendukung berbagai *industry vertical* baik di Indonesia maupun mancanegara. Adapun segmen

By paying attention to the Company's performance until the end of 2023, the Company was able to achieve Sales performance exceeding the targets set in the 2023 Company Work Plan and Budget (RKAP). This shows that the Company's performance continues to improve and the Company has the ability to maintain business continuity. This cannot be separated from the Company's challenge to convince all business partners of the improvement efforts that will be made. Improvements in the Company's performance also had a positive influence on the performance of subsidiaries which also recorded significant growth.

The Company's step to continue business continuity is to aggressively carry out a total transformation strategic program entitled "INTI Reborn" which includes the Business Alignment transformation aspect, which includes the Expand Business Segment & Target Multi-Vertical Industry, Subsidiary Streamlining, Product Portfolio Arrangement, and Strategic Alliance with Global Partners.

In line with the development of long-term strategies at the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) and referring to the Special Power of Attorney Number SKK-43/MBU/09/2020 dated 30 September 2020, PT INTI (Persero) was officially appointed as a member of the program restructuring or optimization of business aspects and scale-up under the auspices of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) and PT Danareksa (Persero) which will continue until 2023.

In this case, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) is given special powers by the Ministry of BUMN to take actions that are the authority and/or rights of the Shareholders. The main focus of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) for the BUMN under its auspices is the restructuring and optimization of the company's business aspects.

This year, the Company focused on business, financial and capital restructuring to create better Company performance. In the future, the Company is determined to expand market coverage to other industries outside of telecommunications by focusing on three (3) business lines, namely System Integrator, Manufacturing and Digital. The company is not limited to just the telecommunications industry, but is transforming into a technology industry that is able to support various vertical industries both in Indonesia and abroad. The market segments targeted are Government, Enterprise, Small Medium Enterprise



pasar yang disasar, yaitu *Government, Enterprise, Small Medium Enterprise* (SME), Retail, dan Telco.

Saat ini, Perseroan juga telah mengupayakan peningkatan Pendapatan Lain-Lain melalui Optimalisasi Aset yang ada. *Asset Occupancy Plan* melakukan upaya-upaya optimalisasi asset melalui penyewaan atau KSO lahan dan bangunan yang dilakukan secara simultan.

Kinerja Perusahaan yang berhasil menutup tahun 2023 dengan cemerlang ini akan diperkuat dengan struktur kerangka kerja yang lebih lincah pada tahun 2024.

(SME), Retail and Telco.

Currently, the Company has also made efforts to increase Other Income through Optimizing existing Assets. The Asset Occupancy Plan makes efforts to optimize assets through leasing or KSO of land and buildings which is carried out simultaneously.

The Company's performance, which succeeded in closing 2023 brilliantly, will be strengthened by a more agile framework structure in 2024.

Informasi Keuangan yang Telah Dilaporkan yang Mengandung Kejadian yang Sifatnya Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Which Has Been Reported Contains Extraordinary and Rare Events

Pada tahun 2021 terdapat rencana penjualan atau pelepasan atas aset signifikan oleh Perseroan, berupa Persediaan Usang atau *Deadstock* sebesar Rp 15.971.691.714 (harga perolehan) yang direncanakan akan diproses pada tahun 2022.

In the 2021 there was a plan to sell or dispose of significant assets by the Company, in the form of Obsolete Inventory or Deadstock amounting to Rp 15,971,691,714 (acquisition price) which is planned to be processed in 2022.

Pada tahun 2023 dan 2022, Perusahaan menjual Aset Tetap Non-Operasi dan Persediaan Usang yang Telah Dicadangkan. Pendapatan atas penjualan tersebut dicatat oleh Perusahaan pada Pendapatan Lain-Lain masing-masing sebesar Rp1.058.540.099 dan Rp287.387.388.

In 2023 and 2022, the Company sold Non-Operating Fixed Assets and Obsolete Inventory That Had Been Reserved. The Revenue from these sales was recorded by the Company as Other Income, amounted to Rp1,058,540,099 and Rp287,387,388 respectively.



Profitabilitas

Profitability

Performa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) pada 2023 sebesar negatif Rp 41,26 miliar. Angka ini bertambah negatif sebesar Rp 27,91 miliar dari tahun sebelumnya atau menurun sebesar 209,13% atau 71,90% dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023 sebesar negatif Rp 32,21 miliar.

Pertumbuhan Profitabilitas PT INTI (Persero) pada 2023 tercermin pada capaian Laba Kotor sebesar Rp 44,51 miliar atau setara dengan 8,84% dari Penjualan, mencapai target persentase Laba Kotor RKAP tahun 2023 sebesar 114,05%.

Margin Laba Kotor tersebut terutama berasal dari Optimalisasi Material, Service Handling, dan Access Point, sementara secara nilai terutama berasal dari proyek IT System, Outside Plant (OSP), Alat Ukur, dan Niaga.

Pencapaian Rugi Usaha Sebelum Beban Pendanaan tahun 2023 sebesar Rp 48,28 miliar atau rugi bertambah sebesar Rp 23,08 miliar atau rugi meningkat 91,53% dari realisasi tahun 2022. Beban Pendanaan terealisasi sebesar Rp 48,86 miliar yang setara dengan 83,67% terhadap RKAP Tahun 2023 atau mengalami penurunan sebesar Rp 5,25 miliar atau 9,70% dari realisasi tahun 2022.

Laba Kotor belum cukup untuk menutup Beban Usaha dan Beban Pendanaan, sehingga Perseroan mengalami Rugi Usaha Setelah Beban Pendanaan sebesar Rp 97,14 miliar, ditambah Beban Pajak Penghasilan, maka Perseroan membukukan Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp 96,28 miliar atau 103,60 persen terhadap RKAP tahun 2023 yang setara dengan penurunan kerugian sebesar Rp 14,05 miliar atau 17,08% dari realisasi di tahun 2022 yang sebesar Rp 82,23 miliar.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp 3,81 miliar terutama akibat defisit dari Pembayaran Kepada Pemasok yang Telah Jatuh Tempo, Pembayaran kepada Karyawan, Pembayaran Pajak, dan Beban Pendanaan, di mana sumber dana utamanya berasal dari Penerimaan dari Pelanggan, Penerimaan Restitusi Pajak, dan Penerimaan Bunga Giro.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi defisit sebesar Rp 142,36 juta karena adanya Perolehan Aset Tak Berwujud.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan pada tahun 2023 negatif sebesar Rp 6,38 miliar, karena adanya Pembayaran Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank sebesar Rp 7,10 miliar, sehingga Kas dan Bank Akhir Periode sebesar positif Rp 25,05 miliar.

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) performance in 2023 is negative Rp 41.26 billion. This figure increased negatively by Rp 27.91 billion from the previous year or decreased by 209,13% or 71,90% of the 2023 Corporate Work Plan and Budget target of negative Rp 32.21 billion.

PT INTI (Persero)'s Profitability Growth in 2023 is reflected in the achievement of Gross Profit of Rp 44.51 billion or equivalent to 8,84% of Sales, achieving the 2023 Corporate Work Plan and Budget's Gross Profit percentage target of 114.05 %.

The Gross Profit margin mainly comes from Material Optimization, Service Handling, and Access Points, while in terms of value, it primarily comes from IT System projects, Outside Plant (OSP), Measuring Instruments, and Commerce.

Achievement of Operating Loss Before Financing Expenses in 2023 amounted to Rp 48.28 billion or an increased loss by of 23,08 billion or loss increased by 91,53% from the realization in 2022. Financing Expenses was realized Rp 48.86 billion which is equivalent to 83,67% against the 2023 Corporate Work Plan and Budget or a decrease of Rp 5.25 billion or 9,70% of the 2022 realization.

Gross Profit was not sufficient to cover Operating Expenses and Financing Expenses, so the Company had Operating Loss after Financing Expenses of Rp 97.14 billion, plus Income Tax Expense, the Company recorded a Loss for the Year of Rp 96.28 billion or 103,60 percent against the 2023 Corporate Work Plan and Budget which is equivalent to a decrease in losses of Rp 14.05 billion or 17.08% of the realization in 2022 which was Rp 82.23 billion.

Cash Flows from Operating Activities amounted Rp 3.81 billion mainly due to a deficit from Payments to Suppliers that were Past Due, Payments to Employees, Tax Payments, and Financing Expenses, in which the main source of funds comes from Receipts from Customers, Tax Refund, and Current Account Interest Receipts.

Cash Flow from Investing Activities was a deficit of Rp 142.36 million due to the Acquisition of Intangible Assets.

Cash Flows from Funding Activities in 2023 was negative of Rp 6.38 billion, due to Non-Bank Financial Institution Loan Payments of Rp 7.10 billion, so End of Period Cash and Bank amounted to a positive of Rp 25.05 billion.

Informasi Mengenai Perpajakan

Information Regarding Taxation

Penerimaan negara yang berasal dari kegiatan operasional PT INTI (Persero) berupa pajak dan retribusi. Besarnya kontribusi pajak kepada Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

State revenues from PT INTI (Persero)'s operational activities are taxes and retribution. The amount of tax contributions to the Central and Regional Governments in 2023 is as follows:

Dalam Rp. Juta
in Million Rupiah

	Uraian Description	Nilai Score
I	Penerimaan Pusat Central Reception	
1.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Income Tax Article 21	681,15
2.	Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Badan Income Tax Corporate Taxpayer	
•	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor Income Tax Article 22 Import	375,12
•	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Dalam Negeri Income Tax Article 22 Domestic	473,04
•	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Wajib Bayar (WABA) Income Tax Article 23 Must Pay	1.476,96
•	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) Wajib Bayar (WABA) Income Tax Article 4 (2) Must Pay	1.777,83
3.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Wajib Pungut (WAPU) Income Tax Article 22 Must Collect	706,94
4.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Wajib Pungut (WAPU) Income Tax Article 23 Must Collect	1.516,78
5.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 (WAPU) Income Tax Article 4 (2) Must Collect	2,33
6.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran Output Value Added Tax (VAT)	38.647,70
7.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan Input Value Added Tax (VAT)	26.515,13
8.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Income Tax Article 25	-
Jumlah I Amount I		72.172,99



II	Penerimaan Daerah <i>Regional Receipt</i>	
	Pajak Bumi dan Bangunan <i>Property Tax</i>	
	• Tegallega	-
	• Palasari	968,65
	Jumlah II <i>Amount II</i>	968,65
Jumlah <i>Amount</i> (I + II)		73.141,64

Investasi

Investment

Realisasi Investasi Konsolidasi Perseroan Tahun 2023 tercatat sebesar Rp 3,85 miliar atau 4,91% terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023, dengan ringkasan sebagai berikut:

Realization of the Company's Consolidated Investment in 2023 was recorded at Rp 3.85 billion or 4.91% of the 2023 Corporate Work Plan and Budget, with the summary as follows:

Dalam Rp. Juta
in Million Rupiah

Uraian Description	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Corporate Work Plan and Budget 2023	Realisasi Audited Realization Audited 2023	Realisasi Audited Realization Audited 2022	% Pencapaian terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Achievement of Corporate Work Plan and Budget	% Pertumbuhan Growth (YoY)
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = (3-4)/4
Aset Tetap Fixed Assets					
1 Bangunan dan Emplasemen Buildings and Emplacements	4.397,23	181,55	192,00	4,13	(5,44)
2 Mesin dan Instalasi Machinery and installation	7.775,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Alat Ukur & Perkakas Kerja Measuring Tools & Work Tools	222,15	2,15	0,00	0,97	0,00
4 Alat Olah Data/Sistem informasi Data Processing Tools/Information systems	3,28	3,28	205,73	100,00	(98,41)
5 Inventaris Kantor & Gudang Office & Warehouse Inventory	19,00	19,00	0,00	100,00	0,00
6 Alat Angkut atau Kendaraan Transport Equipment or Vehicles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap Total Fixed Assets	12.416,76	205,98	397,73	1,66	(48,21)
Aset Tak Berwujud Intangible Assets					
1 Aset Dalam Pembangunan Pengembangan Produk Assets Under Construction Product Development	906,86	175,18	377,76	0,00	(53,63)
2 Software (System Application and Product) Lisensi, Merk, Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Software (System Application and Product) License, Brand, Intellectual Property Rights (IPR)	1.071,34	983,92	983,83	108,50	0,01
3 Lisensi, Merk, Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) License, Brand, Intellectual Property Rights (IPR)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Total Intangible Assets	1.978,20	1.159,10	1.361,59	58,59	(14,87)
Total	14.394,96	1.365,08	1.759,32	9,48	(22,41)

Realisasi Investasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 2,46 miliar atau naik 180,28% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022.

Realisasi Investasi berasal dari Inventaris Kantor & Gudang Rp 8,00 juta, Alat Olah Data Rp 1,64 miliar, dan Aset Dalam Pengembangan Produk sebesar Rp 2,17 miliar yang terdiri dari pengembangan *Smart Device e-KTP Reader* sebesar Rp 85,21 juta, pengembangan Laptop sebesar Rp 79,21 juta, pengembangan *Access Point* sebesar Rp 48,84 juta, pengembangan *Low Cost Vessel Monitoring System (LCVMS)* sebesar Rp 13,99 juta, pengembangan *Internet of Thing (IoT) Meter Gas Lora* sebesar Rp 25,84 juta, pengembangan Radar Hujan Santanu Insentif sebesar Rp 734,59 juta, pengembangan Smart Digital Biometrik Insentif sebesar Rp 3,17 juta, pengembangan *Enclosure SCR 2018* sebesar Rp 248,00 juta, pengembangan *Smart Device Radar Cuaca* Insentif sebesar Rp 810,00 juta, pengembangan *Closed Circuit Television* sebesar Rp 6,58 juta, dan pengembangan Laptop sebesar Rp 68,84 juta.

Investment Realization in 2023 increased by Rp 2,46 million or 180,28% compared to the same period in 2022.

Investment Realization comes from Office & Warehouse Inventory amounting to Rp 8.00 million, Data Processing Equipment Rp 1.64 billion, and Product Development Assets Rp 2.17 billion which includes of Smart Device e-KTP Reader development Rp 85.21 million, Laptop development Rp 79.21 million, Access Point development Rp 48.84 million, Low Cost Vessel Monitoring System (LCVMS) development Rp 13.99 million, Internet of Thing (IoT) Meter Gas Lora development Rp 25.84 million, Rain Radar Santanu Incentive development Rp 734.59 million, Smart Digital Biometric Incentive development Rp 3.17 million, Enclosure SCR 2018 development Rp 248.00 million, Smart Device Weather Radar Incentive development Rp 810.00 million, Closed Circuit Television development Rp 6.58 million, and Laptop development Rp 68.84 million.

Proyek Pengembangan dan/atau Kerja Sama Korporasi

Development Project and/or Corporate Cooperation

Kerja Sama Sesama Badan Usaha Milik Negara

Cooperation With State Owned Enterprises (SOEs)

1. PT Telekomunikasi Selular, Tbk.

- a. Perjanjian Pengadaan *Refurbished Network Terminal Equipment* (NTE) Indihome Segmen *Consumer* dengan Nomor K.TEL.028/HK.810/OPS-10000000/2021 tertanggal 3 November 2021.
- b. Perjanjian Kerahasiaan Informasi Pengadaan Jasa *Refurbished NTE* Indihome Segmen *Consumer* tertanggal 3 November 2021 dan berlaku sampai dengan 2 November 2026.
- c. Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan *Outside Plant Fiber Optic* (OSP-FO) Telkom Regional V Batch 2 Tahun 2021 Nomor K.Tel.00000000/HK.810/DR5-10000000/2021.
- d. Nota Kesepahaman mengenai *Joint Research* dan *Joint Innovation* dengan Nomor K.Tel.007/HK.840/TCU-00000000/2022 berlaku 3 (tiga) tahun sejak 29 Maret 2022.
- e. Amandemen Pertama terhadap Kontrak Harga Satuan (KHS) Pengadaan dan Pemasangan *Outside Plant Fiber Optic* (OSP-FO) Lokasi Telkom Regional III Jawa Barat Nomor K.TEL.00040/HK.810/DR3-10000000/2021 tertanggal 31 Maret 2021 antara PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk. dengan PT INTI (Persero) Nomor 46/HK820/DR3-10000000/2022.
- f. Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan *Outside Plant Fiber Optic* (OSP-FO) Telkom Regional Batch 2 Tahun 2021 Nomor K.Tel.00000000/HK.810/DR5-10000000/2021, dengan Nomor K.Tel 276/HK.820/DR5-10000000/2022 tertanggal 11 April 2022.
- g. Perjanjian Pengadaan Jasa Repair/Refurbished Network Terminal Equipment (NTE) Telkom serta Rekondisi Assesoris Cabutan Optical Network Terminal (ONT), Set Top Box (STB), dan Internet Protocol Camera (IP Cam) di Lokasi Telkom Regional I dengan Nomor: 36/PL.04/BAK/020900/2022 tertanggal 27 Januari 2023 dan berlaku pada 26 Januari 2024.
- h. Penetapan Pelaksana Pengadaan dan Pemasangan *Outside Plant Fiber Optic* (OSP-FO) Fiberisasi Node-B Telkomsel Paket-3, Nomor Tel.60/LG 270/GSPI00000000/2023 tertanggal 26 September 2023

1. PT Telekomunikasi Selular, Tbk.

- a. *Procurement Agreement for Refurbished Network Terminal Equipment* (NTE) Indihome Consumer Segment with Number K.TEL.028/HK.810/OPS-10000000/2021 dated November 3, 2021.
- b. *Information Confidentiality Agreement for the Procurement of Refurbished NTE Indihome Consumer Segment Services* dated November 3, 2021 and is valid until November 2, 2026.
- c. *Procurement and Installation of Outside Plant Fiber Optic* (OSP-FO) Agreement for Telkom Regional V Batch 2 of 2021 Number K.Tel.00000000/HK.810/DR5-10000000/2021.
- d. *Memorandum of Understanding regarding Joint Research and Joint Innovation* with Number K.Tel.007/HK.840/TCU-00000000/2022 is valid for 3 (three) years from March 29, 2022.
- e. *First Amendment to the Unit Price Contract Procurement and Installation of Outside Plant Fiber Optic* (OSP-FO) Location Telkom Regional III West Java Number K.TEL.00040/HK.810/DR3-10000000/2021 dated March 31, 2021 between PT Telkom, Tbk (Persero) with PT INTI (Persero) Number 46/HK820/DR3-10000000/2022.
- f. *First Amendment to the Agreement for Procurement and Installation of Outside Plant Fiber Optics* (OSP-FO) Telkom Regional Batch 2 of 2021 Number K.Tel.00000000/HK.810/DR5-10000000/2021, with Number K.Tel 276/HK.820/DR5-10000000/2022 dated April 11, 2022.
- g. *Agreement for Procurement of Telkom Network Terminal Equipment* (NTE) Repair/Refurbished Services and Reconditioning Accessories for Optical Network Terminal (ONT), Set Top Box (STB), and Internet Protocol Camera (IP Cam) at Telkom Regional I Locations with Number: 36/PL .04/BAK/020900/2022 dated January 27, 2023 and effective on January 26, 2024.
- h. *Appointment of Executor for Procurement and Installation of OSP Fiberization Node-B Telkomsel Package-3, Number Tel.60/LG 270/GSPI00000000/2023 dated September 26, 2023, valid*



berlaku 180 hari kalender.

for 180 calendar days.

2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

- Perjanjian Pengadaan Penambahan Jaringan Komunikasi Very Small Aperture Terminal (VSAT) Jupiter Fase 2B untuk Lokasi sebagai Bagian dari Surat Perintah Kerja Fase 2B INTI dengan Nomor 853.K-PLO/PSR/LEG/06/2022 tertanggal 13 Juni 2022.
- Perjanjian kerja sama tentang Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha kecil Nomor: B.08-MBD/03/2023 – 63/PR.03.01/010303/2023 tanggal 15 Maret 2023 berlaku selama 5 tahun pada 14 Maret 2028.

3. PT Indofarma, Tbk.

Nota Kesepahaman Nomor 48/HK.03/010505/2022 tertanggal 9 Maret 2022, berlaku 1 tahun sampai dengan 8 Maret 2023.

4. Perum Percetakan Republik Indonesia

- Nota Kesepahaman Kerja Sama Teknis dan Bisnis Smart Card Nomor: 258/HK.03/031000/2022 tertanggal 14 Desember 2022, berlaku selama 2 tahun hingga 13 Desember 2024.
- Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan atau Jasa antara Perum Percetakan Negara (PERUM PNRI) dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor: 001/SPPBJ/CHIP/II/2023 tertanggal 27 Februari 2023.
- Perjanjian Penyediaan Chip Smart Card tahap kedua antara Perum Percetakan Negara Republik Indonesia dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor: 003/SPPBJ/CHIP/IX/2023 tertanggal 25 September 2023, berlaku 60 hari.

2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

- Procurement Agreement for the Addition of Very Small Aperture Terminal (VSAT) Jupiter Phase 2B Communication Network for Locations as Part of the INTI Phase 2B Work Order with Number 853.K-PLO/PSR/LEG/06/2022 dated June 13, 2022.
- Cooperation Agreement on the Implementation of the Micro and Small Business Funding Program Number: B.08-MBD/03/2023 – 63/PR.03.01/010303/2023 dated March 15, 2023, valid for 5 years until March 14, 2028.

3. PT Indofarma, Tbk.

Memorandum of Understanding Number 48/HK.03/010505/2022 dated March 9, 2022, valid for 1 year until March 8, 2023.

4. Perum Percetakan Republik Indonesia

- Memorandum of Understanding on Smart Card Technical and Business Cooperation Number 258/HK.03/031000/2022 dated December 14, 2022, valid for 2 years until December 13, 2024.
- Goods and or Services Procurement Agreement between Perum Percetakan Negara (PERUM PNRI) and the State-Owned Enterprise PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Number: 001/SPPBJ/CHIP/II/2023 dated February 27, 2023.
- Second Phase SmartCard Chip Supply Agreement between Perum Percetakan Negara Republik Indonesia and PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Number: 003/SPPBJ/CHIP/IX/2023 dated September 25, 2023, valid for 60 days.

Kerja Sama Luar Negeri

Foreign Cooperation

Kerja sama mitra luar negeri yang sedang berjalan antara lain:

1. Quanta Computer Inc.

Non-Disclosure Agreement Nomor: 252/HK.03.031201/2022 tertanggal 23 November 2022, berlaku 3 tahun hingga 22 November 2025.

2. Modularsoft SDN. BHD.

Perjanjian Kerahasiaan Nomor: 54/HK.03/020300/2023 tertanggal 9 Maret 2023, berlaku 1 tahun pada 8 Maret 2024.

3. Modularsoft SDN. BHD.

Ongoing cooperation with foreign partners includes:

1. IDS Ingegneria Dei System S.P.A

Non-Disclosure Agreement Number: 252/HK.03.031201/2022 dated November 23, 2022, valid for 3 years until November 22, 2025.

2. Modularsoft SDN. BHD.

Confidentiality Agreement Number: 54/HK.03/020300/2023 dated March 9, 2023., valid for 1 year until March 8, 2024.

3. Modularsoft SDN. BHD.

Perjanjian Kerahasiaan Nomor: 54/HK.03/020300/2023 tertanggal 9 Maret 2023, berlaku 1 tahun pada 8 Maret 2024.

Confidentiality Agreement Number: 54/HK.03/020300/2023 dated March 9, 2023., valid for 1 year until March 8, 2024.

Kerja Sama Lainnya

Other Cooperation

1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

Perjanjian Lisensi Komersialisasi Sistem Pemantau Hujan dengan Nomor 4727/HK.03/010600/2019 tertanggal 13 Desember 2019 berlaku hingga 13 Desember 2024.

1. National Institute of Aeronautics and Space

Rain Monitoring System Commercialization License Agreement Number 4727/HK.03/010600/2019 dated December 13, 2019 is valid until December 13, 2024.

2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor : 03.SP/PPK.APDAL.PJUTS-5/DJE/2023 tertanggal 20 Juli 2023 tentang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 5.

2. Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia

Directorate General of New, Renewable Energy, and Energy Conservation Number: 03.SP/PPK.APDAL.PJUTS-5/DJE/2023 dated July 20, 2023 Regarding the Procurement of Construction Work of Solar Powered Public Street Lighting for the Development of Solar Powered Public Street Lighting in Indonesia Region 5.

3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

- a. Melakukan perpanjangan hak lisensi penjualan produk i-Perisalah, selama 5 Triwulan (31 Desember 2020), kerja sama pengembangan KTP-el Reader untuk e-Voting Pemilihan Kepala Desa dan pengembangan sistem *Automatic Dependent Surveillance Broadcast* (ADS-B) untuk monitoring pesawat terbang.
- b. Perjanjian Lisensi Produksi dan Komersialisasi *Elang Flight Tracker* dan *Kasuari Report Assembler* dengan Nomor 3547/HK.03/010600/2019 tertanggal 31 Oktober 2019. Lisensi berlaku mulai 9 Mei 2019 hingga 9 Mei 2023.
- c. MoU Pengkajian dan Penerapan Teknologi Dalam Rangka Mendukung Industri Telekomunikasi, Elektronika, dan Teknologi Informasi Nomor: 009/HK.03/010500/2021, tertanggal 26 Januari 2021 sampai 26 Januari 2022.
- d. Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang Pengadaan Alat Ukur *Electromagnetic Compatibility* (Chamber 10 m) Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) Nomor: 234/SPKPAUSAR/BBPPT.31/02/2023 tertanggal 10 Februari 2023.

3. Agency for the Assessment and Application of Technology

- a. Extending the license rights for the sale of the i-perisalah product, for 5 Quarters (December 31, 2020), cooperation in developing the KTP-el Reader for e-Voting Village Head Election and developing the Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) system for aircraft monitoring.
- b. Production and Commercialization License Agreement of Eagle Flight Tracker and Cassowary Report Assembler with Number 3547/HK.03/010600/2019 dated 31 October 2019. License valid from 9 May 2019 until 9 May 2023.
- c. The Memorandum of Understanding on the Assessment of Technology Application in the Context of Supporting the Telecommunication, Electronics and Information Technology Industry Number 009/HK.03/010500/2021 dated January 26, 2021 to January 26, 2022.
- d. Agreement Letter to implement the procurement work package for the procurement of Electromagnetic Compatibility Measurement Equipment (10 m Chamber) Telecommunication Equipment Testing Center Number: 234/SPK PAUSAR/BBPPT.31/02/2023 dated February 10, 2023.

4. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- a. Addendum Perjanjian Pekerjaan Jasa Lainnya: Sewa Layanan Fasilitas Pendukung *Base Transceiver Station* (BTS) *Universal Service Obligation* (USO) Blankspot untuk Wilayah Non Papua (Paket A)

4. Telecommunications and Information Accessibility Agency Ministry of Communication and Informatics.

- a. Addendum to Other Services Work Agreement: Base Transceiver Station (BTS) Universal Service Obligation (USO) Blankspot Support Facility Lease for Non-Papua Regions (Package A) for 58 (Fifty



untuk 58 (Lima Puluh Delapan) Titik Lokasi antara PT INTI (Persero) dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 0107/PKS-TOPO-BTS/BAKTI/KOMINFO/04/2022 Nomor 94/HK.03/031000/2022, berlaku sejak 1 April 2022 sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian induk.

- b. Addendum Perjanjian Pekerjaan Jasa Lainnya Sewa Layanan Fasilitas Pendukung Base Transceiver Station (BTS) Universal Service Obligation (USO) Blankspot untuk Wilayah Papua (Paket A) untuk Tiga Titik Lokasi antara PT INTI (Persero) dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 0108/PKS-TOPO-BTS/BAKTI/KOMINFO/04/2022 Nomor 95/HK.03/031000/2022, berlaku sejak 1 April 2022 hingga berakhirnya jangka waktu Perjanjian Induk.
- c. Perjanjian Kerahasiaan data dan/atau informasi antara Pejabat Pembuat Komitmen Dua Bantuan Pemerintah Set Top Box (STB) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor 13/KOMINFO/DJPPI.5.3/KS.PPK2/NDA/09/2022-184/HK.03/031000/2022 tertanggal 13 September 2022.

5. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

- a. Perjanjian Kerahasiaan dalam kerja sama yang akan dilakukan tertanggal 20 April 2018 dengan masa laku hingga 19 April 2028.
- b. Trial Agreement produk Base Transceiver Station (BTS) Small Cell 4G dengan Nomor: 3496/HK.03/010600/2019 tertanggal 8 Juli 2019 berlaku pada 7 Juli 2024.
- c. Kontrak Pengadaan E-KTP Reader Project FMC Nomor: M10005109 tertanggal 26 Juli 2023.
- d. Kontrak Pengadaan E-KTP Reader Project FMC Nomor M10005109 tertanggal 26 Juli 2023, berlaku 45 hari kalender.

6. Universitas Pendidikan Indonesia

Naskah Kesepahaman mengenai Kolaborasi Riset, Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pengabdian kepada Masyarakat, Hilirisasi Hasil Riset & Resource Sharing, dan Komersialisasi Produk dengan Nomor: 87/HK.03/010600/2019 tertanggal 20 Maret 2019 dengan masa laku sampai 19 Maret 2024.

7. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

- a. Perjanjian Kerahasiaan mengenai Uji Coba Base Transceiver Station (BTS) Small Cell 4G dengan Nomor: 3497/HK.03/010600/2019 tertanggal 8 Juli 2019 dengan masa berlaku pada tertanggal 7 Juli

Eight) Location Points between PT INTI (Persero) and the Telecommunication Accessibility Agency and Information, Ministry of Communication and Informatics Number 0107/PKS-TOPO-BTS/BAKTI/KOMINFO/04/2022 Number 94/HK.03/031000/2022, valid from April 1, 2022 until the end of the master agreement period.

- b. Addendum to Other Service Work Agreement Service Rental Support Facilities Base Transceiver Station (BTS) Universal Service Obligation (USO) Blankspot for the Papua Region (Package A) for Three Location Points between PT INTI (Persero) and the Telecommunications and Information Accessibility Agency Ministry of Communication and Informatics Number 0108/PKS-TOPO-BTS/BAKTI/KOMINFO/04/2022 Number 95/HK.03/031000/2022, valid from 1 April 2022 until the end of the Master Agreement period.
- c. Agreement on Confidentiality of data and/or information between Commitment Making Officials Two Set Top Box Government Assistance Directorate General of Post and Information Administration, Ministry of Communication and Informatics and Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telecommunications Nomor 13/KOMINFO/DJPPI.5.3/KS.PPK2/NDA/09/2022-184/HK.03/031000/2022 dated September 13, 2022.

5. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

- a. Confidentiality Agreement for the collaboration to be conducted dated April 20, 2018, valid until April 19, 2028.
- b. Trial Agreement for Base Transceiver Station (BTS) Small Cell 4G product with Number: 3496/HK.03/010600/2019 dated July 8, 2019, effective from July 7, 2024.
- c. Procurement Contract for E-KTP Reader Project FMC Number: M10005109 dated July 26, 2023.
- d. Procurement Contract for E-KTP Reader Project FMC No: M10005109 dated July 26, 2023, valid for 45 calendar days.

6. Universitas Pendidikan Indonesia

Memorandum of Understanding regarding Research Collaboration, Capacity Building, Community Service, Research Outcomes Commercialization & Resource Sharing, and Product Commercialization with Number: 87/HK.03/010600/2019 dated March 20, 2019, valid until March 19, 2024.

7. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

- a. Confidentiality Agreement regarding the Trial of Base Transceiver Station (BTS) Small Cell 4G with Number: 3497/HK.03/010600/2019 dated July 8, 2019, valid until July 7, 2024.

2024.

- b. Trial Agreement produk Base Transceiver Station (BTS) Small Cell 4G dengan Nomor: 3496/HK.03/010600/2019 tertanggal 8 Juli 2019 berlaku pada 7 Juli 2024.

8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Institut Teknologi Bandung (ITB)

Nota Kesepahaman Kerja Sama Penelitian dan Penyelenggaraan Uji Operasional dengan Pendampingan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Nomor: 296/HK.03/010600/2019 tertanggal 12 Desember 2019 berlaku hingga 12 Desember 2024.

9. PT Ekacitra Bumikarya

Mengenai Perangkat Terminal IP Radio Push-to-Talk Over Cellular Data Nomor: 122/HK.03/010600/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

10. PT Indo Pratama Teleglobal

Amandemen Keempat atas Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Pengoperasian dan Pemeliharaan Perangkat Power dan/atau Tower Nomor 35/HK.03/ 031002/2021 tertanggal 4 Januari 2021.

11. Telkom Corporate University (CORPU)

Mengenai Perjanjian Kerahasiaan Desain Produk N10b, Nomor: 008/HK.03/010500/2021 tanggal 15 Januari 2021.

12. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia

Mengenai Perjanjian Kerja sama Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Nomor: 26/HK.03/010600/2021, tanggal 2 Maret 2021. Berlaku selama 5 tahun sampai dengan 1 Maret 2026.

13. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII

Nota Kesepahaman tentang kerja sama implementasi transformasi digital pada lingkup kerja di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.

14. PT Mitra Nata Raharja

Naskah Kesepahaman mengenai Kerja Sama Assembling & Manufacturing Generator Oksigen dan Kelengkapannya dengan Nomor: 214/HK.03/03100/2021 tertanggal 19 November 2021 dan berlaku sampai dengan 18 November 2024.

15. PT Bringin Gigantara

Perjanjian Kerahasiaan Informasi mengenai kerja sama yang terkait dengan penyediaan perangkat INTI Smart Reader Modular (ISRM) guna pemenuhan kebutuhan perangkat pembaca e-KTP modular.

16. PT Sinergi Informatika Semen Indonesia

- b. Trial Agreement for Base Transceiver Station (BTS) Small Cell 4G product with Number: 3496/HK.03/010600/2019 dated July 8, 2019, effective from July 7, 2024.

8. Meteorology, Climatology and Geophysics Agency and Bandung Institute of Technology

Memorandum of Understanding on Research Collaboration and Operational Testing Support by BMKG with Number: 296/HK.03/010600/2019 dated December 12, 2019, valid until December 12, 2024.

9. PT Ekacitra Bumikarya

Regarding IP Radio Push-to-Talk Over Cellular Data Terminal Equipment Number: 122/HK.03/010600/2020 dated August 24, 2020.

10. PT Indo Pratama Teleglobal

Fourth Amendment to the Cooperation Agreement regarding Operation and Maintenance Services for Power and/or Tower Devices Number: 35/HK.03/031002/2021 dated January 4, 2021.

11. Telkom Corporate University (CORPU)

Regarding the N10b Product Design Confidentiality Agreement, Number: 008/HK.03/010500/2021 dated 15 January 2021.

12. Corruption Eradication Commission of The Republic of Indonesia

Regarding the Complaint Handling Cooperation Agreement in Efforts to Eradicate Corruption Crimes, Number: 26/HK.03/010600/2021, March 2, 2021. Valid for 5 years until March 1, 2026.

13. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII

Memorandum of Understanding on cooperation in implementing digital transformation in the scope of work at PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.

14. PT Mitra Nata Raharja

The Memorandum of Understanding regarding the Assembling & Manufacturing Cooperation of Oxygen Generators and Accessories with Number: 214/HK.03/03100/2021 dated November 19, 2021 and valid until November 18, 2024.

15. PT Bringin Gigantara

Information Confidentiality Agreement regarding cooperation related to the provision of INTI Smart Reader Modular (ISRM) devices to fulfill the need for modular e-KTP reader devices.

16. PT Sinergi Informatika Semen Indonesia



Perjanjian Pengungkapan Kerahasiaan perihal rencana kerja sama dalam bidang pengadaan jasa *Shared Service Operation*, berlaku 2 (satu) tahun sampai dengan 16 Januari 2024.

17. Universitas Padjajaran

Perjanjian Program Pemagangan/Internship (PI) dan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMB) Nomor 222/UN6.WR1/PKS/2022 berlaku 2 (dua) tahun sejak 25 Januari 2022 sampai dengan 14 Januari 2024.

18. PT Dewata Freight International, Tbk.

Perjanjian Kerahasiaan Nomor: 027/DFIJKT-II/2022 perihal rencana kerja sama pengelolaan proyek-proyek eksisting sebagai mitra transportasi yang tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pengembangan bisnis lainnya, berlaku 2 tahun sejak 18 Februari 2022 sampai dengan 17 Februari 2024.

19. PT Balai Lelang Indonesia

Addendum Pertama Lampiran Berita Acara Kesepakatan Harga Kerjasama Lelang Non-eksekusi Sukarela Nomor: 030/BLI/ADD I/LGL/II/2022, berlaku 1 tahun sejak 22 Februari 2022 sampai dengan 21 Februari 2024.

20. PT Tridaya Nusantara Internasional

Perjanjian Kerahasiaan Nomor: 36/HK.03/020900/2022 perihal rencana kerja sama sebagai mitra usaha produk INTI antara lain e-KTP Reader, Set Top Box DVBT2, Smart Meter Listrik, serta produk-produk *smart digital* dan telekomunikasi lainnya, berlaku 2 (dua) tahun sejak 24 Februari 2022 sampai dengan 23 Februari 2024.

21. PT Indonesia Comnets Plus

- a. Perjanjian tentang Pengadaan Kontrak Harga Satuan (KHS) Jasa Instalasi Aktivasi 2019 dengan Nomor: 130/PJ/08/PST/2019 tertanggal 1 Maret 2019.
- b. Amandemen I Perjanjian tentang Pengadaan KHS Jasa Instalasi Aktivasi 2019 dengan Nomor: 11-90/AMD/01/PST/2019 tertanggal 26 November 2019.
- c. Amandemen II Perjanjian tentang Pengadaan KHS Jasa Instalasi Aktivasi 2019 dengan Nomor: 02021390/AMD/01/PST/2022 tertanggal 2 Februari 2022.
- d. Amandemen II Perjanjian tentang Pengadaan KHS Jasa Instalasi Aktivasi 2019 dengan nomor: 0614190/AMD/01/PST/2022 tertanggal 14 Juni 2022.
- e. Perjanjian Jasa Borongan *Service Point Zona 4 Strategic Business Unit* (SBU) Regional Jawa Barat Tahun 2022-2024 Nomor: 05193413/PJ/01/PST/2022 tertanggal 19 Mei 2022, dengan jangka waktu 2 tahun terhitung sejak 1 Mei 2022 hingga 30 April 2024.

Confidential Disclosure Agreement regarding plans for cooperation in the procurement of Shared Service Operation services, valid for 2 (one) years until January 16, 2024.

17. Universitas Padjajaran

Agreement for Internship Program and Certified Student Internship Program Number 222/UN6.WR1/PKS/2022 is valid for 2 (two) years from January 25, 2022 to January 14, 2024.

18. PT Dewata Freightinternational, Tbk.

Confidentiality Agreement Number: 027/DFIJKT-II/2022 regarding plans for cooperation in the management of existing projects as transportation partners that do not rule out the possibility of developing other businesses, valid for 2 years from 18 February 2022 until February 17, 2024.

19. PT Balai Lelang Indonesia

First Addendum to Attachment to Minutes of Cooperation Price Agreement Voluntary Non-execution Auction Number: 030/BLI/ADD I/LGL/II/2022, valid for 1 year from February 22, 2022 to February 21, 2024.

20. PT Tridaya Nusantara Internasional

Confidentiality Agreement Number: 36/HK.03/020900/2022 regarding cooperation plans as business partners for INTI products including e-KTP Reader, DVBT2 Set Top Boxes, Electricity Smart Meters, as well as other smart digital and telecommunications products, valid for 2 (two) years from February 24, 2022 to February 23, 2024..

21. PT Indonesia Comnets Plus

- a. *Agreement on Procurement of 2019 Activation Installation Service Unit Price Contracts with Number: 130/PJ/08/PST/2019 dated March 1, 2019.*
- b. *Amendment I of the Agreement regarding the Procurement of KHS Activation Installation Services 2019 with number: 11-90/AMD/01/PST/2019 dated November 26, 2019.*
- c. *Amendment II of the Agreement regarding the Procurement of Unit Price Contracts Activation Installation Services 2019 with Number: 02021390/AMD/01/PST/2022 dated February 2, 2022.*
- d. *Amendment II of the Agreement regarding the Procurement of Unit Price Contracts Activation Installation Services 2019 with Number: 0614190/AMD/01/PST/2022 dated June 14, 2022.*
- e. *West Java Regional Strategic Business Unit (SBU) Service Point Contract Service Agreement for 2022-2024 Number: 05193413/PJ/01/PST/ 2022 dated 19 May 2022, with a period of 2 years starting from May 1, 2022 to April 30, 2024.*

- f. Perjanjian Pengadaan KHS Jasa Instalasi Aktivasi 2022 SBU Sulawesi dan IBT Nomor: 09304726/PJ/01/PST/2022 tertanggal 30 September 2022 berlaku 3 tahun sejak 1 Oktober 2022 sampai dengan 30 September 2025.
- g. Perjanjian Pengadaan KHS Jasa Instalasi Aktivasi 2022 SBU Regional Kalimantan Nomor: 09144344/PJ/01/PST/2022 tertanggal 14 September 2022 berlaku 3 tahun sejak 1 Oktober 2022 sampai dengan 30 September 2025.
- h. Perjanjian Pengadaan Jasa Instalasi Aktivasi SBU Regional Jawa Bagian Timur 2022 Nomor: 09144450/PJ/01/PST/2022 tertanggal 14 September 2022, berlaku 3 tahun sejak 1 Oktober 2022 sampai dengan 30 September 2025.
- i. Perjanjian KHS Jasa Instalasi Aktivasi SBU Regional Sumatera Bagian Utara Tahun 2022 Nomor : 09264642/PJ/01/PST/2022 Tanggal 26 September 2022 berlaku 3 tahun sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 30 September 2025.

22. PT CSM Corporatama

Perjanjian Kerja Sama Sewa Kendaraan Service Point Bengkulu. Nomor : 105/HK.03/020900/2022 tertanggal 05 Juli 2022, berlaku hingga 28 Februari 2025.

23. PT Rintisan Digital Teknologi

Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan *Outside Plant Fiber Optic* (OSP-FO) Node B Telkomsel TREG-1 Phase-2 Nomor : 113/HK.03/020900/2022 tertanggal 10 Juni 2022, masa berlaku sesuai tanggal *delivery date* pada masing-masing *Purchase Order*.

24. PT Sarana Investindo

Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan *Outside Plant Fiber Optic* (OSP-FO) Node B Telkomsel TREG-1 Phase-2 Nomor : 114/HK.03/020900/2022 tertanggal 10 Juni 2022, masa berlaku sesuai tanggal *delivery date* pada masing-masing *Purchase Order*.

25. PT Finnet Indonesia

Perjanjian Kerahasiaan dan Larangan Mengungkapkan Nomor : 929/HK.03/010500/2022 tertanggal 8 April 2022.26.

26. PT Eco Green Energy International

Perjanjian Kerahasiaan untuk Instalasi *Very Small Aperture Terminal* (VSAT) dan Operasi Jaringan di Proyek Satelit Republik Indonesia (Satria) Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: 150/HK.03/010505/2022 tertanggal 22 Agustus 2022, berlaku selama 5 tahun sampai dengan 21 Agustus 2027.

27. PT Bursa Efek Indonesia (BEI)

Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman Pasar Modal di Indonesia Nomor: 217/

- f. *Agreement for the Procurement of Contracts for Unit Price of Activation Installation Services for 2022 SBU Sulawesi and IBT Number: 09304726/PJ/01/PST/2022 dated 30 September 2022 valid 3 years from October 1, 2022 to September 30, 2025.*
- g. *Agreement for Procurement of Contract for Unit Price of Activation Installation Services 2022 SBU Regional Kalimantan Number: 09144344/PJ/01/PST/2022 dated 14 September 2022 valid 3 years from October 1, 2022 to September 30, 2025.*
- h. *Agreement for Procurement of SBU Regional Activation Installation Services for Eastern Java 2022 Number: 09144450/PJ/01/PST/2022 dated September 14, 2022, valid 3 years from October 1, 2022 to September 30, 2025.*
- i. *Contract Agreement for Unit Price Installation Service Activation of North Sumatra Regional SBU in 2022 Number: 09264642/PJ/01/PST/2022 September 26, 2022 valid for 3 years from October 1, 2022 to September 30, 2025..*

22. PT CSM Corporatama

Bengkulu Service Point Vehicle Rental Cooperation Agreement Number : 105/HK.03/020900/2022, dated 05 July 2022, valid until 28 February 2025.

23. PT Rintisan Digital Teknologi

Procurement and Installation Agreement for Outside Plant Fiber Optic (OSP-FO) Node B Telkomsel TREG-1 Phase-2 Number: 113/HK.03/020900/2022 dated 10 June 2022, validity period according to delivery date date on each Purchase Order.

24. PT Sarana Investindo

Procurement and Installation Agreement for Outside Plant Fiber Optic (OSP-FO) Node B Telkomsel TREG-1 Phase-2 Number : 114/HK.03/020900/2022 dated 10 June 2022, the validity period is according to the delivery date of each Purchase Order.

25. PT Finnet Indonesia

Confidentiality and Prohibition of Disclosure Agreement Number: 929/HK.03/010500/2022 dated April 8, 2022.

26. PT Eco Green Energy International

Confidentiality Agreement for Very Small Aperture Terminal (VSAT) installations and Network Operations at the Republic of Indonesia Satellite Project (Satria) Ministry of Communication and Informatics Number: 150/HK.03/010505/2022 dated August 22, 2022, valid for 5 years until with August 21, 2027.

27. Indonesia Stock Exchange (IDX)

Memorandum of Understanding regarding Increasing Understanding of the Capital Market in Indonesia Number:



KP.15/020800/2022 tertanggal 25 Oktober 2022, berlaku selama 3 tahun sampai dengan 24 Oktober 2025.

217/KP.15/020800/2022 dated October 25, 2022, valid for 3 years until October 24, 2025.

28. PT DesktopIP Teknologi Indonesia

Perjanjian Kerahasiaan Nomor: 167/KP.03/010505/2022 tertanggal 6 September 2022 berlaku 2 tahun sampai dengan 5 September 2024.

28. PT DesktopIP Teknologi Indonesia

Confidentiality Agreement Number: 167/KP.03/010505/2022 dated September 6, 2022 is valid for 2 years until September 5, 2024.

29. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pengadaan E-KTP Reader, e-Voting dan Visitor Management Sistem Nomor: 267/HK.03/031000/2022-8601/PC.02.02 tertanggal 30 Desember 2022, berlaku 3 tahun sampai dengan 29 Desember 2025.

29. Department of Population and Civil Registration Province of DKI Jakarta

Memorandum of Understanding regarding Cooperation in the Procurement of e-KTP Reader, e-Voting, and Visitor Management System Number: 267/HK.03/031000/2022-8601/PC.02.02 December 30, 2022, valid for 3 years until December 29, 2025.

30. PT Rohde & Schwarz Indonesia

Nota Kesepahaman tentang Kolaborasi pada Proyek DBS Nomor : 269/HK.03/031201/2022-828.T.132./RSI-L/LW/2223 tertanggal 30 Desember 2022, berlaku 1 tahun

30. PT Rohde & Schwarz Indonesia

Memorandum of Understanding regarding Collaboration on the DBS Project Number: 269/HK.03/031201/2022-828.T.132./RSI-L/LW/2223 dated December 30, 2022, valid 1 year until by December 29, 2023.

31. PT Data Nusantara Adhikarya (Caliana)

Perjanjian antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia dengan PT Data Nusantara Adhikarya tentang Kerja Sama Kemitraan dan Pemasaran Produk tertanggal 20 September 2022, berlaku 1 tahun.

31. PT Data Nusantara Adhikarya (Caliana)

Agreement between a Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia and PT Data Nusantara Adhikarya regarding Partnership and Product Marketing Cooperation dated September 20, 2022, valid for 1 year.

32. PT COMCORE TEKNOLOGI INDONESIA

- a. Perjanjian Kerahasiaan Nomor: 23/HJ.03/020300/2023 tanggal 7 Februari 2023, berlaku 1 tahun pada 6 Februari 2024.
- b. Naskah Kesepahaman Nomor: 22/HK.03/020300/2023 tanggal 7 Februari 2023, berlaku 1 tahun pada 6 Februari 2024.
- c. Perjanjian Kerjasama Operasi tentang Penyediaan Perangkat Energi di Indonesia Nomor: 64/HK.03/020300/2023 - 03.010/BD/CTI/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, berlaku 1 tahun pada 12 Maret 2024.

32. PT COMCORE TEKNOLOGI INDONESIA

- a. Confidentiality Agreement. Number: 23/HJ.03/020300/2023 dated February 7, 2023, valid for 1 year until February 6, 2024.
- b. Memorandum of Understanding. Number: 22/HK.03/020300/2023 dated February 7, 2023, valid for 1 year until February 6, 2024.
- c. Operational Cooperation Agreement on the Provision of Energy Devices in Indonesia. Number: 64/HK.03/020300/2023 - 03.010/BD/CTI/III/2023 dated March 13, 2023, valid for 1 year until March 12, 2024.

33. PT CHINA CHUAN CHENG KAI POWER

- a. Perjanjian Kerahasiaan Nomor: 13/HK.03/020300/2023 tanggal 24 Januari 2023 berlaku 1 tahun sejak 4 Januari 2023 pada 3 Januari 2024.
- b. Memorandum of Understanding tentang Penyediaan Perangkat Kelistrikan di Indonesia Nomor: 12/HK.03/020300/2023 tanggal 24 Januari 2023, berlaku 1 tahun sejak 4 Januari 2023 pada 3 Januari 2024.
- c. Perjanjian Kerjasama Operasi tentang Kerjasama Penyediaan Perangkat Kelistrikan di Indonesia Nomor: 069/HK.03/020300/2023 tanggal 3 Maret 2023, berlaku selama 1 tahun pada 2 Maret 2024.

33. PT CHINA CHUAN CHENG KAI POWER

- a. Confidentiality Agreement. Number: 13/HK.03/020300/2023 dated January 24, 2023, valid for 1 year from January 4, 2023, to January 3, 2024.
- b. Memorandum of Understanding on the Provision of Electrical Devices in Indonesia. Number: 12/HK.03/020300/2023 dated January 24, 2023, valid for 1 year from January 4, 2023, to January 3, 2024.
- c. Operational Cooperation Agreement on Cooperation in Providing Electrical Devices in Indonesia. Number: 069/HK.03/020300/2023 dated March 3, 2023, valid for 1 year until March 2, 2024.

34. PT BANK KB BUKOPIN Tbk

- a. Perjanjian Kerahasiaan Nomor: 433/HK.03/020200/2023 - 060/DKWD/II/2023 tanggal 2 Februari 2023, berlaku 2 tahun pada 1 Februari 2025.
- b. Naskah Kesepahaman tentang kerjasama platform paylater marketplace Nomor : 28/HK.03/020200/2023. - MOU.059/DKWD/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, berlaku 1 tahun pada 19 Februari 2024.

35. PT CLOUD HOSTING INDONESIA

- a. Perjanjian Kerahasiaan Nomor: 36/HK.03/020300/2023 tanggal 17 Februari 2023, berlaku 1 tahun pada 16 Februari 2024.
- b. Naskah Kesepahaman tentang Kerjasama Penyediaan Layanan Cloud Nomor: 35/HK.03/020300/2023 tanggal 17 Februari 2023, berlaku 1 tahun pada 16 Februari 2024.

36. PT GIMLE INVESTMENT GROUP

Perjanjian Kerahasiaan Nomor :29/HK.03/020307/2023 tanggal 16 Februari 2023, berlaku 3 tahun pada 2026.

37. PT AWAN KOMPUTASI TEKNOLOGI

- a. Perjanjian kerahasiaan Nomor: 2852/HK.03/031500/2022 Tanggal 9 September 2022, berlaku 1 tahun pada 8 September 2023
- b. Naskah Kesepahaman Nomor: 257/HK.03/031201/2022 - 002/MOU/AKT/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, berlaku 1 tahun pada 20 Desember 2023.

38. PT ITSEC ASIA

Naskah Kesepahaman tentang Kerjasama Solusi dan Resource Cyber Security Nomor: 50/HK.03/020300/2023 tanggal 13 Maret 2023, berlaku 1 tahun pada 12 Maret 2024.

39. SATU HARI LINGKAR DUNIA

Perjanjian Kerahasiaan nomor : 51/HK.03/020300/2023 tanggal 9 Maret 2023, berlaku 1 tahun pada 8 Maret 2024.

40. UNIVERSITAS TELKOM

Surat Perjanjian lisensi Produk antara Universitas Telkom dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia tentang Pengembangan dan/atau Komersialisasi/Bisnis Produk Hestia Smart Lighting System Nomor 109/BTP/PKS.01/0.0/2023 – 17/HK.05/020300/2023 Tanggal 11 Januari 2023, berlaku 11 bulan pada 10 Desember 2023.

41. PT HOPPECKE INDONESIA

- a. Perjanjian Kerahasiaan Nomor: 61/

34. PT BANK KB BUKOPIN Tbk

- a. Confidentiality Agreement. Number: 433/HK.03/020200/2023 – 060/DKWD/II/2023 dated February 2, 2023, valid for 2 years until February 1, 2025.
- b. Memorandum of Understanding on cooperation for the paylater marketplace platform. Number: 28/HK.03/020200/2023 – MOU.059/DKWD/II/2023 dated February 20, 2023, valid for 1 year until February 19, 2024.

35. PT CLOUD HOSTING INDONESIA

- a. Confidentiality Agreement. Number: 36/HK.03/020300/2023 dated February 17, 2023, valid for 1 year until February 16, 2024.
- b. Memorandum of Understanding on cooperation for cloud service provision. Number: 35/HK.03/020300/2023 dated February 17, 2023, valid for 1 year until February 16, 2024.

36. PT GIMLE INVESTMENT GROUP

Confidentiality Agreement. Number: 29/HK.03/020307/2023 dated February 16, 2023, valid for 3 years until 2026.

37. PT AWAN KOMPUTASI TEKNOLOGI

- a. Confidentiality Agreement. Number: 2852/HK.03/031500/2022 dated September 9, 2022, valid for 1 year until September 8, 2023.
- b. Memorandum of Understanding. Number: 257/HK.03/031201/2022 - 002/MOU/AKT/XII/2022 dated December 21, 2022, valid for 1 year until December 20, 2023.

38. PT ITSEC ASIA

Memorandum of Understanding on Cyber Security Solutions and Resource Cooperation. Number: 50/HK.03/020300/2023 dated March 13, 2023, valid for 1 year until March 12, 2024.

39. SATU HARI LINGKAR DUNIA

Confidentiality Agreement. Number: 51/HK.03/020300/2023 dated March 9, 2023, valid for 1 year until March 8, 2024.

40. UNIVERSITAS TELKOM

Product License Agreement between Universitas Telkom and PT Industri Telekomunikasi Indonesia regarding the Development and/or Commercialization/Business of Hestia Smart Lighting System products. Number: 109/BTP/PKS.01/0.0/2023 – 17/HK.05/020300/2023 dated January 11, 2023, valid for 11 months until December 10, 2023.

41. PT HOPPECKE INDONESIA

- a. Confidentiality Agreement. Number: 61/



HK.03/020300/2023 tanggal 16 Maret 2023, berlaku 1 tahun pada 15 Maret 2024.

- b. Naskah Kesepahaman Nomor: 60/ HK.03/020300/2023 tanggal 16 Maret 2023 berlaku 1 tahun pada 15 Maret 2024 .

42. TOWER BERSAMA GROUP

Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi Nomor: 0004/TBG-TBG00/VEM-EQUIP/04/III/2023 Tanggal 20 Maret 2023, berlaku pada 31 Juli 2024.

43. PT HARAPAN UTAMA PRIMA

- a. Perjanjian Kerahasiaan Nomor: 6/ PL.04/040300/2023 - 02/HUP/I/2023 Tanggal 13 Januari 2023, berlaku 1 tahun.
- b. Naskah Kesepahaman Nomor : 7/ PL.04/040300/2023 - 01/HUP/I/2023 Tanggal 13 Januari 2023 tentang kerjasama Penjualan dan Penyediaan Produk PT INTI berlaku selama 1 tahun sampai 12 Januari 2024.

44. PT BAKHTERA NUSANTARA

- a. Perjanjian Kerahasiaan Nomor: 262/ HK.03/020902/2022 - 0220303212956 Tanggal 12 Januari 2023, berlaku 1 tahun.
- b. Naskah Kesepahaman Nomor : 8/ PL.04/040300/2023 - 01/PKS/01/2023 Tanggal 12 Januari 2023 tentang kerjasama Penjualan dan Penyediaan Produk PT INTI berlaku selama 1 tahun sampai 11 Januari 2024.

45. PT TELKOM ADITAMA PRIMA

- a. Perjanjian Kerahasiaan Nomor: 260/ HK.03/020902/2022 - 012/TAP-INTI/XII/2022 Tanggal 01 Desember 2022, berlaku 1 tahun.
- b. Naskah Kesepahaman Nomor : 295/ HK.03/020905/2022 - 013/MOU/TAP-INTI/XII/2022 Tanggal 01 Desember 2022 tentang kerjasama Penjualan dan Penyediaan Produk PT INTI berlaku selama 1 tahun sampai 30 November 2023 .

46. PT EASYSOFT INDONESIA

- a. Perjanjian Kerahasiaan Nomor: 3124/ HK.03/031200/2022 - 0020/ESI-ADM/X/2022 Tanggal 04 Oktober 2022, berlaku 1 tahun.
- b. Naskah Kesepahaman Nomor : 3125/ HK.03/031200/2022 - 0021/ESIADM/X/2022 Tanggal 04 Oktober 2022 tentang kerjasama INTI Cloud dan Platform Aman Mandiri berlaku selama 1 tahun sampai 03 Oktober 2024.

47. PT AWAN KOMPUTASI TEKNOLOGI (AWANIO)

Naskah Kesepahaman mengenai Kerjasama INTI Cloud dan Platform AWANIO dengan Nomor: 257/

HK.03/020300/2023 dated March 16, 2023, valid for 1 year until March 15, 2024.

- b. Memorandum of Understanding. Number: 60/ HK.03/020300/2023 dated March 16, 2023, valid for 1 year until March 15, 2024.

42. TOWER BERSAMA GROUP

Cooperation Agreement for Procurement of Goods and Services for Installation of Telecommunication Infrastructure Support Devices. Number: 0004/TBG-TBG 00/VEM-EQUIP/04/III/2023 dated March 20, 2023, effective until July 31, 2024.

43. PT HARAPAN UTAMA PRIMA

- a. Confidentiality Agreement. Number: 6/ PL.04/040300/2023 - 02/HUP/I/2023 dated January 13, 2023, valid for 1 year.
- b. Memorandum of Understanding. Number: 7/ PL.04/040300/2023 - 01/HUP/I/2023 dated January 13, 2023, regarding sales cooperation and provision of PT INTI products, valid for 1 year until January 12, 2024.

44. PT BAKHTERA NUSANTARA

- a. Confidentiality Agreement. Number: 262/ HK.03/020902/2022 - 0220303212956 dated January 12, 2023, valid for 1 year.
- b. Memorandum of Understanding. Number: 8/ PL.04/040300/2023 - 01/PKS/01/2023 dated January 12, 2023, regarding sales cooperation and provision of PT INTI products, valid for 1 year until January 11, 2024.

45. PT TELKOM ADITAMA PRIMA

- a. Confidentiality Agreement. Number: 260/ HK.03/020902/2022 - 012/TAP-INTI/XII/2022 dated December 1, 2022, valid for 1 year.
- b. Memorandum of Understanding. Number: 295/ HK.03/020905/2022 - 013/MOU/TAP-INTI/XII/2022 dated December 1, 2022, regarding sales cooperation and provision of PT INTI products, valid for 1 year until November 30, 2023.

46. PT EASYSOFT INDONESIA

- a. Confidentiality Agreement. Number: 3124/ HK.03/031200/2022 - 0020/ESI-ADM/X/2022 dated October 4, 2022, valid for 1 year.
- b. Memorandum of Understanding. Number: 3125/ HK.03/031200/2022 - 0021/ESI ADM/X/2022 dated October 4, 2022, regarding INTI Cloud and Secure Platform cooperation, valid for 1 year until October 3, 2024.

47. PT AWAN KOMPUTASI TEKNOLOGI (AWANIO)

Memorandum of Understanding regarding INTI Cloud and AWANIO Platform cooperation. Number: 257/

HK.03/031201/2022 - 002/MOU/AKT/XII/2022
tertanggal 21 Desember 2022 dengan masa laku sampai
20 Desember 2023.

HK.03/031201/2022 - 002/MOU/AKT/XII/2022 dated
December 21, 2022, valid until December 20, 2023.

48. PT BADAK NATURAL GAS LIQUEFACTION

Naskah Kesepahaman mengenai Kerjasama dalam Pemanfaatan sumber daya serta sarana prasarana dan/atau fasilitas, Inventarisasi/identifikasi terhadap berbagai potensi, Berkolaborasi dalam membangun bisnis baru berdasarkan keunggulan dan bersama - sama melakukan pemasaran dan penjualan dengan Nomor: 251/HK.03/010600/2022 - 320/BJ00/2022-045 tertanggal 20 Oktober 2022 , berlaku selama 3 tahun sampai 19 Oktober 2025.

48. PT BADAK NATURAL GAS LIQUEFACTION

Memorandum of Understanding regarding cooperation in the utilization of resources, facilities, inventory/identification of various potentials, collaboration in building new businesses based on strengths, and joint marketing and sales. Number: 251/HK.03/010600/2022-320/BJ00/2022-045 dated October 20, 2022, valid for 3 years until October 19, 2025.

49. PT COMMSCOPE CONNECTIVITY INDONESIA

Naskah Kesepahaman mengenai Kerjasama dalam bidang FTTX Fiber, Jaringan Seluler dan Jaringan Tetap Nirkabel, Konektifitas Data Center, dan ikut berpartisipasi dalam memperbaiki infrastruktur konektifitas di Indonesia melalui kemitraan strategis dengan Nomor: 253/HK.03/031200/2022 tertanggal 30 November 2022 dengan masa laku sampai 29 November 2023.

49. PT COMMSCOPE CONNECTIVITY INDONESIA

Memorandum of Understanding regarding cooperation in FTTX Fiber, Mobile Network, Fixed Wireless Network, Data Center Connectivity, and participation in improving connectivity infrastructure in Indonesia through strategic partnerships. Number: 253/HK.03/031200/2022 dated November 30, 2022, valid until November 29, 2023.

50. PT EVERYNET INDONESIA TECHNOLOGY

Naskah Kesepahaman mengenai Kerjasama penyediaan transformasi digital mulai dari proses bisnis, penerapan sensor berbiaya rendah, platform dan sistem analitik cloud data dengan Model Jaringan Host Netral IoT berbiaya sangat rendah yang dapat diakses di semua industri untuk mengaktifkan solusi tingakt perusahaan dengan menggunakan teknologi LoRaWAN di Indonesia dengan Nomor: 251/HK.03/010600/2022 - 14.06/EV-ID/XI/2022 tertanggal 22 November 2022 dengan masa laku sampai 21 November 2023.

50. PT EVERYNET INDONESIA TECHNOLOGY

Memorandum of Understanding regarding cooperation in providing digital transformation from business processes, low-cost sensor implementation, cloud data platform and analytics systems with a Low-Cost IoT Neutral Host Network model accessible across all industries to enable enterprise-level solutions using LoRaWAN technology in Indonesia. Number: 251/HK.03/010600/2022 - 14.06/EV-ID/XI/2022 dated November 22, 2022, valid until November 21, 2023.

51. PT DREDOLF INDONESIA

Naskah Kesepahaman mengenai Kerjasama Pekerjaan Jasa Aktivasi Icon+ dengan Nomor: 38/PL.04/040300/2023 - 0168/DI-INTI/II/2023 tertanggal 20 Januari 2023 dengan masa laku sampai 19 Januari 2024.

51. PT DREDOLF INDONESIA

Memorandum of Understanding regarding Cooperation for Activation Services of Icon+ with Number: 38/PL.04/040300/2023 - 0168/DI-INTI/II/2023 dated January 20, 2023, valid until January 19, 2024.

52. PT DATASYSTEM SOLUSINDO (CHUWI)

Perjanjian Kerahasiaan tentang Kerjasama dalam Pabrikasi Laptop Nomor : 134/HK.03/031200/2022 tanggal 11 Agustus 2022, berlaku selama 1 Tahun pada 10 Agustus 2023.

52. PT DATASYSTEM SOLUSINDO (CHUWI)

Confidentiality Agreement regarding Cooperation in Laptop Fabrication Number: 134/HK.03/031200/2022 dated August 11, 2022, valid for 1 year until August 10, 2023.

53. PT MURNI SOLUSINDO NUSANTARA

Perjanjian Kerahasiaan tentang Kerjasama berkaitan dengan peluang bisnis secara umum, namun pada khususnya dalam rangka fitting kiosk dan evaluasi unit perangkat E-KTP Reader: IDENTIK MD01 (modular) termasuk aksesorisnya dan SAM Card di Indonesia Nomor : 249/HK.03/031200/2022 - 023/NDA/LGL/MURNI/XI/2022 tanggal 24 November 2022, berlaku

53. PT MURNI SOLUSINDO NUSANTARA

Confidentiality Agreement regarding Cooperation related to business opportunities in general, specifically in the context of kiosk fitting and evaluation of E-KTP Reader: IDENTIK MD01 (modular) and its accessories, and SAM Card in Indonesia Number: 249/HK.03/031200/2022 - 023/NDA/LGL/MURNI/XI/2022 dated November 24, 2022, valid for 1 year until November 23, 2023.



selama 1 Tahun pada 23 November 2023.

54. PT MULTI PRIMA TECHNOLOGY

Perjanjian Kerahasiaan tentang Kerjasama sebagai mitra usaha pada proyek PLTS, Rooftop, STB DVB-T2 Nomor : 255/HK.03/020902/2022 - 013/PKHN/MPT.INTI/XI/2022 tanggal 28 November 2022, berlaku selama 1 Tahun pada 27 November 2023.

55. KOPEGTEL SURYA CENDRAWASIH

Perjanjian Kerahasiaan tentang Kerjasama sebagai mitra usaha terkait proyek *Refurbished* NTE Nomor : 220/HK.03/020902/2022 - 621/UH59/PENK-MN/2022 tanggal 25 Oktober 2022, berlaku selama 1 Tahun pada 24 Oktober 2023.

56. PT PEKALONGAN SUKA MANDIRI

Perjanjian Kerahasiaan tentang Kerjasama sebagai mitra usaha pada proyek OSP Node B Nomor : 227/HK.03/020902/2022 - 269/PK-PSM/XI/2022 tanggal 27 Oktober 2022, berlaku selama 1 Tahun pada 26 Oktober 2023.

57. PERSEKUTUAN PERDATA NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS

Perjanjian tentang kerja sama sebagai mitra usaha Jasa Konsultan Hukum dalam rangka Restrukturisasi Perusahaan Nomor: 102/PL.04/040300/2023, berlaku selama 1 (satu) tahun pada 15 Mei 2023.

58. KOPEGTEL MENARA RO PALEMBANG

Berita Acara Negosiasi Kesepakatan Kerja Sama Pengadaan Jasa Repair/Refurbished NTE Telkom serta Rekondisi Assesoris Cabutan ONT, STB, dan IP Cam di Lokasi Telkom Regional I No. 157/PL.04/BAK/040300/2023 pada tanggal 24 Maret 2023. Berlaku selama 1 (satu) tahun.

59. KOPKAR SIPAKALEBBI

Berita Acara Negosiasi Kesepakatan Kerja Sama Pengadaan Jasa *Repair/Refurbished* NTE Telkom serta Rekondisi Assesoris Cabutan ONT, STB, dan IP Cam di Lokasi Telkom Regional VII No. 158/PL.04/BAK/040300/2023 pada tanggal 24 Maret 2023. Berlaku selama 1 (satu) tahun.

60. KOPEGTEL INSAN DENPASAR

Berita Acara Negosiasi Kesepakatan Kerja Sama Pengadaan Jasa *Repair/Refurbished* NTE Telkom serta Rekondisi Assesoris Cabutan ONT, STB, dan IP Cam di Lokasi Telkom Regional V No. 156/PL.04/BAK/040300/2023 pada tanggal 24 Maret 2023. Berlaku selama 1 (satu) tahun.

61. KOPKAR ICC PALANGKARAYA

54. PT MULTI PRIMA TECHNOLOGY

Confidentiality Agreement regarding Cooperation as business partners in the PLTS Rooftop, STB DVB-T2 project Number: 255/HK.03/020902/2022 - 013/PKHN/MPT.INTI/XI/2022 dated November 28, 2022, valid for 1 year until November 27, 2023.

55. KOPEGTEL SURYA CENDRAWASIH

Confidentiality Agreement regarding Cooperation as business partners in the Refurbished NTE project Number: 220/HK.03/020902/2022 - 621/UH59/PENK-MN/2022 dated October 25, 2022, valid for 1 year until October 24, 2023.

56. PT PEKALONGAN SUKA MANDIRI

Confidentiality Agreement regarding Cooperation as business partners in the OSP Node B project Number: 227/HK.03/020902/2022 - 269/PK-PSM/XI/2022 dated October 27, 2022, valid for 1 year until October 26, 2023.

57. PERSEKUTUAN PERDATA NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS

Agreement for cooperation as legal consultant partners in the context of Company Restructuring Number: 102/PL.04/040300/2023, valid for 1 year until May 15, 2023.

58. KOPEGTEL MENARA RO PALEMBANG

Minutes of Negotiation Agreement on Cooperation for Procurement of Repair/Refurbished NTE Telkom Services and Reconditioning of ONT, STB, and IP Cam Accessories at Telkom Regional I No. 157/PL.04/BAK/040300/2023 dated March 24, 2023. Valid for 1 year.

59. KOPKAR SIPAKALEBBI

Minutes of Negotiation Agreement on Cooperation for Procurement of Repair/Refurbished NTE Telkom Services and Reconditioning of ONT, STB, and IP Cam Accessories at Telkom Regional VII No. 158/PL.04/BAK/040300/2023 dated March 24, 2023. Valid for 1 year.

60. KOPEGTEL INSAN DENPASAR

Minutes of Negotiation Agreement on Cooperation for Procurement of Repair/Refurbished NTE Telkom Services and Reconditioning of ONT, STB, and IP Cam Accessories at Telkom Regional V No. 156/PL.04/BAK/040300/2023 dated March 24, 2023. Valid for 1 year.

61. KOPKAR ICC PALANGKARAYA

Berita Acara Negosiasi Kesepakatan Kerjasama Pengadaan Jasa *Repair/Refurbished* NTE Telkom serta Rekondisi Assesoris Cabutan ONT, STB, dan IP Cam di Lokasi Telkom Regional VI No. 151/PL.04/BAK/040300/2023 pada tanggal 24 Maret 2023. Berlaku selama 1 (satu) tahun.

62. KOPERASI JASA PEGAWAI PT. TELKOM INDONESIA BALIKPAPAN

Berita Acara Negosiasi Kesepakatan Kerjasama Pengadaan Jasa *Repair/Refurbished* NTE Telkom serta Rekondisi Assesoris Cabutan ONT, STB, dan IP Cam di Lokasi Telkom Regional VI No. 155/PL.04/BAK/040300/2023 pada tanggal 24 Maret 2023. Berlaku selama 1 (satu) tahun.

63. CV BAFINPRO CAKRAWALA

Berita Acara Negosiasi Kesepakatan Kerjasama Pengadaan Jasa *Repair/Refurbished* NTE Telkom serta Rekondisi Assesoris Cabutan ONT, STB, dan IP Cam di Lokasi Telkom Regional VI No. 153/PL.04/BAK/040300/2023 pada tanggal 27 Januari 2023. Berlaku selama 1 (satu) tahun.

64. KOPEGTEL DINASTI

Berita Acara Negosiasi Kesepakatan Kerjasama Pengadaan Jasa *Repair/Refurbished* NTE Telkom serta Rekondisi Assesoris Cabutan ONT, STB, dan IP Cam di Lokasi Telkom Regional VI No. 159/PL.04/BAK/040300/2023 pada tanggal 24 Maret 2023. Berlaku selama 1 (satu) tahun.

65. KOPEGTEL METRO MANDIRI

Berita Acara Negosiasi Kesepakatan Kerjasama Pengadaan Jasa *Repair/Refurbished* NTE Telkom serta Rekondisi Assesoris Cabutan ONT, STB, dan IP Cam di Lokasi Telkom Regional VI No. 160/PL.04/BAK/040300/2023 pada tanggal 24 Maret 2023. Berlaku selama 1 (satu) tahun.

66. KOPERASI KARYAWAN TELEKOMUNIKASI KANDATEL SURABAYA BARAT

Berita Acara Negosiasi Kesepakatan Kerjasama Pengadaan Jasa *Repair/Refurbished* NTE Telkom serta Rekondisi Assesoris Cabutan ONT, STB, dan IP Cam di Lokasi Telkom Regional VI No. 154/PL.04/BAK/040300/2023 pada tanggal 24 Maret 2023. Berlaku selama 1 (satu) tahun.

67. KOPERASI PEGAWAI TELKOM PEKANBARU

Berita Acara Negosiasi Kesepakatan Kerjasama Pengadaan Jasa *Repair/Refurbished* NTE Telkom serta Rekondisi Assesoris Cabutan ONT, STB, dan IP Cam di Lokasi Telkom Regional VI No. 36/PL.04/BAK/040300/2023 pada tanggal 27 Januari 2023. Berlaku selama 1 (satu) tahun.

Minutes of Negotiation Agreement on Cooperation for Procurement of Repair/Refurbished NTE Telkom Services and Reconditioning of ONT, STB, and IP Cam Accessories at Telkom Regional VI No. 151/PL.04/BAK/040300/2023 dated March 24, 2023. Valid for 1 year.

62. KOPERASI JASA PEGAWAI PT. TELKOM INDONESIA BALIKPAPAN

Minutes of Negotiation Agreement on Cooperation for Procurement of Repair/Refurbished NTE Telkom Services and Reconditioning of ONT, STB, and IP Cam Accessories at Telkom Regional VI No. 155/PL.04/BAK/040300/2023 dated March 24, 2023. Valid for 1 year.

63. CV BAFINPRO CAKRAWALA

Minutes of Negotiation Agreement on Cooperation for Procurement of Repair/Refurbished NTE Telkom Services and Reconditioning of ONT, STB, and IP Cam Accessories at Telkom Regional VI No. 153/PL.04/BAK/040300/2023 dated January 27, 2023. Valid for 1 year.

64. KOPEGTEL DINASTI

Minutes of Negotiation Agreement on Cooperation for Procurement of Repair/Refurbished NTE Telkom Services and Reconditioning of ONT, STB, and IP Cam Accessories at Telkom Regional VI No. 159/PL.04/BAK/040300/2023 dated March 24, 2023. Valid for 1 year.

65. KOPEGTEL METRO MANDIRI

Minutes of Negotiation Agreement on Cooperation for Procurement of Repair/Refurbished NTE Telkom Services and Reconditioning of ONT, STB, and IP Cam Accessories at Telkom Regional VI No. 160/PL.04/BAK/040300/2023 dated March 24, 2023. Valid for 1 year.

66. KOPERASI KARYAWAN TELEKOMUNIKASI KANDATEL SURABAYA BARAT

Minutes of Negotiation Agreement on Cooperation for Procurement of Repair/Refurbished NTE Telkom Services and Reconditioning of ONT, STB, and IP Cam Accessories at Telkom Regional VI No. 154/PL.04/BAK/040300/2023 dated March 24, 2023. Valid for 1 year.

67. KOPERASI PEGAWAI TELKOM PEKANBARU

Minutes of Negotiation Agreement on Cooperation for Procurement of Repair/Refurbished NTE Telkom Services and Reconditioning of ONT, STB, and IP Cam Accessories at Telkom Regional VI No. 36/PL.04/BAK/040300/2023 dated January 27, 2023. Valid for 1 year.



68. UNIVERSITAS BENGKULU

- a. Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor: 3631/UN30/KS/2023 – 104/HK.03/020300/2023 tanggal 12 Mei 2023 berlaku 5 tahun sampai dengan 11 Mei 2028.
- b. Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan TKDN dan Pemenuhan Sistem Uji Sertifikasi Radar Hujan menuju Produk E-Katalog Nomor 108/HK.03/020300/2023 – 3973/UN30.15/KS/2023 tanggal 5 Juni 2023, berlaku 1 tahun sampai dengan 4 Juni 2024.

69. PT IHSAN DIGITAL NUSANTARA

- a. Perjanjian Kerahasiaan terkait kerjasama pengembangan platform ekonomi digital yang holistic dan Komprehensif Nomor: 110/HK.03/020300/2023 tanggal 7 Juni 2023, berlaku 1 tahun sampai dengan 6 juni 2024.
- b. Naskah Kesepahaman tentang pengembangan fintech dan platform ekonomi digital yang holistic dan komprehensif Nomor: 111/HK.03/020300/2023 tanggal 7 Juni 2023, berlaku 1 tahun sampai dengan 6 juni 2024.

70. PT BACH MULTI GLOBAL

- a. Perjanjian Kerahasiaan terkait kerjasama pengadaan power system tanggal 5 April 2023, berlaku 1 tahun sejak 10 April 2023 sampai dengan 9 april 2024.
- b. Naskah Kesepahaman tentang telekomunikasi dan sarana penunjang lainnya Nomor: 119/HK.03/020300/2023 tanggal 20 Juni 2023, berlaku 1 tahun sampai dengan 19 juni 2024.

71. PT TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI GLOBAL

- a. Perjanjian Kerahasiaan tentang Kerjasama Penyediaan Material dan Jasa untuk Pelaksanaan Proyek-Proyek PT INTI tanggal 22 Juni 2023, berlaku 1 tahun sampai dengan 21 Juni 2024.
- b. Naskah Kesepahaman tentang Kerjasama Penyediaan Material dan Jasa untuk Pelaksanaan Proyek-Proyek PT INTI Nomor: 155/HK.03/040300/2023 tanggal 22 Juni 2023, berlaku 1 tahun sampai dengan 21 Juni 2024.

72. PT NEXWAVE

Naskah Kesepahaman tentang Kerjasama Penyediaan Chip Smart Card Nomor: 193/PL.04/040300/2023 tanggal 01 September 2023, berlaku 1 tahun sampai dengan 31 Agustus 2024.

68. UNIVERSITAS BENGKULU

- a. *Memorandum of Understanding on Cooperation for the Development of Tri Dharma Perguruan Tinggi Number: 3631/UN30/KS/2023 – 104/HK.03/020300/2023 dated May 12, 2023, valid for 5 years until May 11, 2028.*
- b. *Cooperation Agreement on Increasing Domestic Component Level (TKDN) and Fulfilling Rain Radar Certification System towards E-Catalog Products Number: 108/HK.03/020300/2023 – 3973/UN30.15/KS/2023 dated June 5, 2023, valid for 1 year until June 4, 2024.*

69. PT IHSAN DIGITAL NUSANTARA

- a. *Confidentiality Agreement related to cooperation in the development of a holistic and comprehensive digital economic platform Number: 110/HK.03/020300/2023 dated June 7, 2023, valid for 1 year until June 6, 2024.*
- b. *Memorandum of Understanding on the development of fintech and holistic and comprehensive digital economic platform Number: 111/HK.03/020300/2023 dated June 7, 2023, valid for 1 year until June 6, 2024.*

70. PT BACH MULTI GLOBAL

- a. *Confidentiality Agreement related to cooperation in procurement of power systems dated April 5, 2023, valid for 1 year from April 10, 2023, until April 9, 2024.*
- b. *Memorandum of Understanding on telecommunications and other supporting facilities Number: 119/HK.03/020300/2023 dated June 20, 2023, valid for 1 year until June 19, 2024.*

71. PT TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI GLOBAL

- a. *Confidentiality Agreement on Cooperation for the Provision of Materials and Services for Projects of PT INTI dated June 22, 2023, valid for 1 year until June 21, 2024.*
- b. *Memorandum of Understanding on Cooperation for the Provision of Materials and Services for Projects of PT INTI Number: 155/HK.03/040300/2023 dated June 22, 2023, valid for 1 year until June 21, 2024.*

72. PT NEXWAVE

Memorandum of Understanding on Cooperation for the Provision of Smart Card Chip Number: 193/PL.04/040300/2023 dated September 1, 2023, valid for 1 year until August 31, 2024.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance



Pendahuluan

Investment

Konsep penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) dalam organisasi Perseroan berlandaskan pada komitmen untuk menciptakan Perseroan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan praktik-praktik GCG merupakan salah satu langkah penting bagi Perusahaan untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai Perseroan, mendorong pengelolaan Perseroan yang profesional, transparan, dan efisien dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, mitra bisnis, serta pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan berkomitmen untuk menerapkan praktik-praktik GCG dalam pengelolaan kegiatan usaha Perseroan. Kesadaran akan pentingnya GCG bagi Perseroan adalah karena keinginan untuk menegakkan integritas dalam menjalankan bisnis yang sehat dan berkesinambungan.

Bagi PT INTI (Persero), komitmen terhadap penerapan instrumen ini tidak hanya mewakili kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku, tapi diyakini sebagai kunci sukses dalam upaya pencapaian kinerja usaha yang efektif, efisien, serta berkelanjutan yang sangat diperlukan dalam memenangi persaingan pasar.

The concept of implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the Company's organization is based on the Company's commitment to create a transparent, accountable and trustworthy company through accountable business management.

Application of GCG practices is a critical step for the Company to increase and maximize the value of the Company, the Company's management encourages professionalism, transparency and efficiency by increasing the principles of transparency, accountability, trustworthiness, responsibility, and fairness so that it can fulfill its obligations to Shareholders, the Board of Commissioners, business partners, and stakeholders fairly.

Furthermore, the Board of Commissioners, Directors, and employees are committed to implementing GCG practices in managing the Company's operations. Awareness of the importance of good corporate governance for the Company is due to the desire to uphold integrity in a healthy and sustainable business.

For PT INTI (Persero), a commitment to implementing this instrument does not only represent an obligation to comply with regulations but is believed to be the key to success in achieving effective, efficient, and sustainable business performance which is indispensable in winning the market competition.

Pelaksanaannya bahkan menjadi bagian dari budaya Perseroan sehingga tercermin pada sikap dan tingkah laku sehari-hari. Hal ini tidak hanya tercermin di tingkatan Dewan Komisaris dan Direksi, tapi hingga ke tingkatan karyawan agar tercipta keselarasan guna mencapai visi, misi, dan tujuan Perseroan yang akan melindungi kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam jangka panjang.

Perseroan juga mengkomunikasikan dan melakukan sosialisasi dan pelatihan, serta memetakan akuntabilitas dan tanggung jawab untuk memastikan setiap karyawan memahami dan mengetahui tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai perubahan bisnis dan organisasi dalam Perseroan.

Its implementation becomes part of a company culture reflected in daily attitudes and behaviour. This is not only reflected at the level of the Board of Commissioners and the Board of Directors but to all levels of employees to create harmony to achieve the vision, mission and objectives of the Company, which will protect the interest so of shareholders and other stakeholders in the long term.

The Company also communicates and implements socialization and training, as well as maps out accountability and responsibility to ensure that every employee understands and knows their duties, functions and responsibilities according to changes in the Company's businesses and organizations.



Capaian Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2023

Good Corporate Governance Assessment Achievements in 2023

Penandatanganan Pakta Integritas

Signing of Integrity Pact

Sebagai bentuk komitmen atas Kebijakan Kode Etik Perusahaan, segenap Insan PT INTI (Persero) diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas secara tahunan.

1. Seluruh Insan PT INTI (Persero) wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan komitmen untuk melaksanakan Kebijakan Kode Etik Perusahaan.
2. Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya Pakta Integritas bagi seluruh Insan PT INTI (Persero).
3. Setiap Insan PT INTI (Persero) menerima satu salinan Pakta Integritas dan menandatangani formulir Pakta Integritas bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami, dan setuju untuk mematuhi Kebijakan Kode Etik Perusahaan yang didokumentasikan oleh fungsi yang menangani *Good Corporate Governance* (GCG) di Perseroan.
4. Kebijakan Kode Etik Perusahaan harus disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh Insan PT INTI (Persero).
5. Seluruh atasan bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan Kebijakan Kode Etik Perusahaan tersebut.

As a form of commitment to the Company's Code of Ethics, all PT INTI (Persero)'s employees are required to sign the Integrity Pact on an annual basis.

1. All PT INTI (Persero)'s employees must sign an Integrity Pact which is a commitment to implement the Company's Code of Ethics.
2. The Board of Directors is responsible for the implementation of the Integrity Pact for all PT INTI (Persero)'s employees.
3. Each PT INTI (Persero)'s employees receive a copy of the Integrity Pact and signs an Integrity Pact form stating that the person has received, understands, and agrees to comply with the Company's Code of Ethics which is documented by the function that handles Good Corporate Governance (GCG) in the Company.
4. The Company's Code of Ethics policy must be socialized to and understood by all PT INTI (Persero)'s employees.
5. All superiors are responsible and exemplify their subordinates for the implementation of the Company's Code of Ethics.

Internal Assessment Penerapan GCG 2022

Internal Assessment of GCG Implementation 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi yang Signifikan Badan Usaha Milik Negara pada BUMN perlu dilakukan Assessment dan/atau evaluasi penerapan GCG.

Berdasarkan Assessment Internal yang dilakukan atas penerapan praktik-praktik GCG, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada perusahaan mencapai predikat kategori "Baik" dengan skor 76,578 tahun buku 2022.

Based on the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-2/MBU/03/2023 on the Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, it is necessary to carry out an Assessment and/or evaluation of the GCG implementation.

Based on the Internal Assessment done on the application of corporate governance practices, it can be concluded that the conditions for implementing GCG in companies achieve predicate category of "Good" with a score of 76,578 for the 2022 fiscal year.

No.	Aspek Governance <i>Governance Aspects</i>	Bobot <i>Weight</i>	Capaian Perusahaan <i>Company Achievements</i>	Persentase (%) <i>Percentage (%)</i>	Penjelasan <i>Explanation</i>
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance</i>	7	6,337	90,52	Sangat Baik <i>Very Good</i>
II	Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham <i>Shareholders and General Meeting of Shareholders</i>	9	7,778	86,43	Baik <i>Good</i>
III	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	35	28,013	80,04	Baik <i>Good</i>
IV	Direksi <i>Board of Directors</i>	35	26,731	76,37	Baik <i>Good</i>
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9	7,719	85,77	Baik <i>Good</i>
Sub Total		95	76,578		
VI	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5	0,000		
Total		100	76,578		Baik <i>Good</i>

Beberapa Rekomendasi Assessment GCG, sebagai berikut:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

- Perusahaan melakukan kordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyempurnakan kebijakan penyampaian LHKPN dengan muatan yang sesuai Struktur Organisasi yang mutakhir dan mekanisme serta batas waktu penyampaian.
- Memutakhirkan kebijakan *Wistle-Blowing System* (WBS) disesuaikan dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan WBS.

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

- Menetapkan maksimal jumlah jabatan sebagai Komisaris yang dapat dipegang seorang anggota Komisaris.
- Menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen dan secara eksplisit dinyatakan dalam keputusan pengangkatannya.

GCG Assessment Recommendations, as follows:

1. Commitment to the Implementation of Sustainable Governance

- Monitor the submission of the State Officials Wealth Reports promptly according to the applicable laws and regulations.
- Refine the policy for submitting the State Officials Wealth Reports with appropriate content according to the up-to-date Organizational Structure and mechanism and deadline for submission.
- Updating the *Wistle-Blowing System* (WBS) policy through the Cooperation Agreement with the Corruption Eradication Commission regarding Complaint Handling in Efforts to Eradicate Corruption Crimes and evaluating the effectiveness of implementing the WBS policy.

2. General Meeting of Shareholders (GMS)

- Determine the maximum number of positions as Commissioner that a member of the Board of Commissioners can hold.
- Appoint members of the Board of Commissioners as Independent and explicitly stated in the appointment decision.

- c. Pemegang Saham melakukan evaluasi penilaian Direksi secara individu dan hasilnya dituangkan dalam Risalah RUPS.
- d. Pemegang Saham melengkapi kebijakan Kementerian BUMN dengan mekanisme sistem penerimaan laporan mengenai gejala penurunan kinerja.

3. Dewan Komisaris

- a. Mengusulkan kepada Direksi untuk kegiatan pelatihan Dewan Komisaris dianggarkan terpisah dari Anggaran Pelatihan karyawan.
- b. Aktif mengikuti program yang diselenggarakan *Forum Human Capital Indonesia*, *BUMN Center of Excellence*.
- c. Melakukan telaah dan pemberian nasihat mengenai kebijakan teknologi informasi perusahaan dan penerapannya, kebijakan mutu dan pelayanan, serta pelaksanaannya.
- d. Melakukan penilaian kinerja Direksi secara individu dan memuat hasil penilaian tersebut dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris.

4. Direksi

- a. Semua Direksi melaksanakan pelatihan terkait bisnis perusahaan dan membuat laporan hasil pelatihan agar dapat dimanfaatkan oleh manajemen kunci perusahaan.
- b. Mendokumentasikan kajian kelayakan serta analisis risiko dalam pengambilan keputusan program/kegiatan yang membutuhkan investasi dan hutang dalam jumlah yang signifikan.
- c. Menyusun pencapaian kinerja masing-masing Direktorat dan pencapaian target kinerja anggota Direksi (individu).
- d. Menyampaikan Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.

5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi

- a. Kebijakan Pengendalian Informasi Perseroan belum secara konsisten diimplementasikan sesuai dengan kebijakan sehingga persepsi karyawan atas tingkat kepatuhan pengendalian kebijakan informasi masih rendah.
- b. Perseroan belum melaksanakan pertemuan atau *gathering* dengan *stakeholders* dalam upaya pemasaran atau pengenalan produk perusahaan.
- c. Perseroan belum mengikuti *Corporate Social Responsibility (CSR) Award* dan sejenisnya.

- c. *Shareholders evaluate the Board of Directors assessment individually, and the results are outlined in the minutes of the GMS.*
- d. *Shareholders complement the Ministry of SOEs policy with a mechanism for receiving reports regarding symptoms of decreased performance.*

3. Board of Commissioners

- a. *Propose to the Board of Directors for training activities for the Board of Commissioners to be budgeted separately from the employee Training Budget.*
- b. *Actively participating in programs organized by the Indonesian Human Capital Forum, BUMN Center of Excellence.*
- c. *Reviewing and providing advice regarding the company's information technology policies and their implementation, quality and service policies, and their implementation.*
- d. *Evaluate the performance of the Board of Directors individually and include the assessment results in the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Duties.*

4. The Directors

- a. *All Directors carry out training related to the company's business and make reports on the training results so that it can be utilized by the company's key management.*
- b. *Documenting feasibility studies and risk analysis in making decisions on programs/activities requiring significant amounts of investment and debt.*
- c. *Arrange the performance achievements of each Directorate and the achievement of performance targets for members of the Board of Directors (individuals).*
- d. *Submit Quarterly Management Reports and Annual Reports to the Board of Commissioners and Shareholders on time.*

5. Information Disclosure and Transparency

- a. *Company Information Control Policies has not been consistently implemented in accordance with the policy, so employees' perceptions of compliance with informational policy controls are still low.*
- b. *The Company has not yet held a meeting or gathering with stakeholders in marketing efforts or the introduction of company products.*
- c. *The Company has not participated in the Corporate Social Responsibility (CSR) Award and the like.*

Sosialisasi

Socialization

Pada tahun 2023, telah diadakan sosialisasi Pencegahan Korupsi di Perusahaan pada karyawan PT INTI (Persero) yang dilakukan pada Maret dan Desember 2023. Sosialisasi secara tertulis kepada masing-masing karyawan dengan mengirimkan tautan melalui surat elektronik untuk mengunduh e-book dan pada portal Perusahaan yang berisi kebijakan tentang:

1. Benturan Kepentingan
2. Kode Etik
3. Larangan Pemberian Hadiah dan Penerimaan Hadiah Suap dan sejenisnya
4. Pedoman *Good Corporate Governance*
5. *Whistle-Blowing System*
6. Anti Korupsi

In the year 2023, socialization on Corruption Prevention in Corporate has been held to PT INTI (Persero)'s employees conducted in March and December 2023. Written socialization was also performed to each employee by sending a link via email and on the Company portal to download e-book containing the policy about:

1. *Conflict of Interest*
2. *Code of Conduct*
3. *Prohibition on the Granting of Rewards and Accepting Bribery Gifts and the like*
4. *Good Corporate Governance Guidelines*
5. *Whistle-Blowing System*
6. *Anti-Corruption*

Soft Structure

Soft Structure

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) juncto Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, terdapat lima dokumen *Soft Structure Good Corporate Governance* yang terdiri dari:

1. **Surat Keputusan Direksi Nomor KN.016/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi.**
Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang dan/atau mencegah terjadinya gratifikasi yang dianggap suap.
2. **Surat Keputusan Direksi Nomor KN.017/2021 tentang Kebijakan Benturan Kepentingan.**
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatur perihal Benturan Kepentingan serta prosedur pengungkapan kemungkinan adanya Benturan Kepentingan dalam rangka menjamin pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
3. **Surat Keputusan Direksi Nomor KN. 006/2022 tentang Whistle Blowing System.**
Kebijakan ini bertujuan untuk memenuhi standar kepatuhan yang telah ditetapkan dan mengikat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari Perseroan serta untuk menjamin pengelolaan Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Based on the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in conjunction with Regulation of the Minister of SOEs Number PER-09/MBU/2012 on the Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-01/MBU/2011 on the Application of Good Corporate Governance, there are five documents Soft Structure of Good Corporate Governance which, consisting of:

1. ***Decree of Directors Number KN.016/2021 on Gratification Control.***
This policy is intended to prohibit and/or prevent gratification are considered bribery.
2. ***Decree of Directors Number KN.017/2021 on Conflict of Interest Policy.***
This policy is intended to regulate the conflict of interest and procedures regarding disclosure of the possibility of conflict of interest in order to ensure the company's management based on the principles of Good Corporate Governance.
3. ***Decree of Board of Directors Number KN.006/2022 on Whistle Blowing System.***
This policy aims to meet compliance standards that have been set and are binding in carrying out daily activities of the Company and to ensure the Company's management based on the principles of good corporate governance.



4. Surat Keputusan Direksi Nomor KN.009/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance atau GCG).

Kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan bagi pihak yang berkepentingan.

5. Surat Keputusan Direksi Nomor KN.007/2023 tentang Kode Etik.

Kebijakan ini bertujuan untuk menetapkan nilai-nilai budaya Perusahaan dan sebagai pedoman bagi Perusahaan untuk memastikan kegiatan usaha Perusahaan dijalankan dengan penuh integritas serta sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain *Soft Structure* sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan juga melakukan evaluasi serta penyesuaian terhadap *Board Manual* yang telah ada sebelumnya.

4. Decree of Board of Directors Number KN.020/2018 on Code of Corporate Governance (GCG)

This policy aims to maximize value for the Company's stakeholders.

5. Decree of Directors No: KN.010/2019 of the Code of Conduct.

This policy aims to establish cultural values of the Company and as a guideline for the Company to ensure the Company's operations are run with integrity and in accordance with the provisions of the laws and regulations in force.

Besides Soft Structure as mentioned above, the Company also conducts evaluations and adjustments to the Board Manual that has been there before.

Survey Persepsi Pemangku Pemangku Kepentingan Terhadap Penerapan Good Corporate Governance

Stakeholders Perception Survey on Implementation of Good Corporate Governance

Survei Persepsi Pemangku Kepentingan dalam Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT INTI (Persero) yang dilakukan oleh Divisi *Legal and Risk Management* adalah salah satu cara untuk mengetahui persepsi pemangku kepentingan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* di Perseroan.

Secara keseluruhan dari hasil survei dimaksud dapat diperoleh gambaran bahwa tingkat persepsi pemangku kepentingan terhadap materi survei yakni, Pengungkapan Informasi, Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komitmen, Kebijakan GCG, serta Penerapan GCG yang dilakukan Perseroan mencapai nilai rata-rata 76,578 atau masuk dalam kategori "Baik".

Stakeholders Perception Survey on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in PT INTI (Persero) conducted by the Legal and Risk Management Division is one way to determine stakeholders' perception of implementing Good Corporate Governance in the Company.

Overall, from the result of the survey, an illustration can be obtained that the level of perception of stakeholders on the survey material, Disclosure, Rights and Responsibilities of Shareholders, Commitment, GCG Policy, and GCG Implementation of the Company reached an average value of 76,578 or in the "Good" category.

Jejak Langkah Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Milestones of Corporate Governance Implementation

Kinerja Usaha Perseroan merupakan suatu refleksi dari adanya upaya secara terus menerus dari organ-organ perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan meyakini bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan dapat menurunkan biaya (cost), meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan meningkatkan praktik-praktik bisnis terbaik (*best practices*). Dengan demikian, tata kelola perusahaan yang baik merupakan perangkat yang handal bagi perusahaan dalam menjawab perubahan lingkungan bisnis dan persaingan yang semakin kompetitif.

Dengan komitmen yang tinggi Perseroan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja usaha dan pertumbuhan jangka panjang yang dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham, serta para pemangku kepentingan lainnya. Sistem pengelola untuk mendukung hal tersebut di atas meliputi beberapa hal sebagai pondasi bagi kokohnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Perseroan yaitu:

1. Pelaksanaan etika bisnis dan pedoman perilaku yang di dalamnya memuat tata nilai budaya perusahaan yang telah dikomunikasikan kepada karyawan dan pemangku kepentingan lainnya melalui kegiatan sosialisasi.
2. Pengelola kebijakan dan prosedur kerja yang efektif atau sesuai tuntutan bisnis melalui penerapan manajemen kualitas (*International Organization for Standardization* atau ISO) dengan membentuk *Manajemen Representative*, sebagai pedoman pengelola perusahaan dan menjadi panduan kerja untuk karyawan.
3. Pembentukan Bagian Manajemen Kualitas dan Risiko pada Divisi Keuangan dan Akuntansi.
4. Pengawasan internal dan penerapan pengendalian internal.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada proses bisnis berupa *System Application and Processing* (SAP).
6. Pemantauan Kinerja Individu, berupa penandatanganan rencana kerja tahunan bagi setiap karyawan perusahaan yang pencapaiannya dievaluasi secara berkala.

Hasil assessment yang dilakukan dari tahun 2012 hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The Company's Business Performance is a reflection of the continuous efforts of the company's organs to maintain and improve the quality of good corporate governance. The Company believes that good corporate governance will reduce costs, increase stakeholder trust and improve best business practices. Thus, good corporate governance is a reliable tool for companies in responding to changes in the business environment and increasingly competitive competition.

With a high commitment, the Company makes various efforts to improve business performance and long-term growth that can increase value for shareholders, and other stakeholders. The management system to support the above includes several things as the foundation for the solid implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the company, namely:

1. *Implementation of business ethics and code of conduct which includes corporate cultural values that have been communicated to employees and other stakeholders through socialization activities.*
2. *Management of policies and work procedures that are effective or in accordance with business demands through the implementation of quality management (International Organization for Standardization or ISO) by establishing a Management Representative, as a guide for company management and as a work guide for employees.*
3. *Establishment of the Quality and Risk Management Section in the Finance and Accounting Divisions.*
4. *Internal control and implementation of internal control.*
5. *Utilization of Information Technology in business processes in the form of System Application and Processing (SAP).*
6. *Individual Performance Monitoring, in the form of signing an annual work plan for each company employee whose achievements are evaluated periodically.*

The results of the assessment carried out from the year of 2012 to 2023 are as follows:

Tahun Buku Year Book	Pelaksanaan Assessment Implementation of the Assessment	Assessor	Skor Score	Keterangan Information
2012	2013	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) <i>Financial and Development Supervisory Agency</i>	76,04	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-16/S.MBU/2012 <i>In accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-16/S.MBU/2012</i>
2013	2014	<i>Self Assessment</i>	78,55	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-16/S.MBU/2012 <i>In accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-16/S.MBU/2012</i>
2014	2015	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) <i>Financial and Development Supervisory Agency</i>	82,02	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-16/S.MBU/2012 <i>In accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-16/S.MBU/2012</i>
2015	2016	<i>Self Assessment</i>	84,09	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-16/S.MBU/2012 <i>In accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-16/S.MBU/2012</i>
2016	2017	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) <i>Financial and Development Supervisory Agency</i>	81,63	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-16/S.MBU/2012 dan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat Nomor S-639/PW10/4/2017 <i>In accordance with the Decree of the Secretary to the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-16/S.MBU/2012 and the Letter of the Financial Supervisory Agency and Representative Development of West Java Number S-639/PW10/4/2017</i>
2017	2018	<i>Self Assessment</i>	83,15	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-16/S.MBU/2012 <i>In accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-16/S.MBU/2012</i>
2018	2019	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) <i>Financial and Development Supervisory Agency</i>	81,48	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-16/S.MBU/2012 dan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat Nomor S-823/PW10/4/2017 <i>In accordance with the Decree of the Secretary to the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-16/S.MBU/2012 and the Letter of the Financial and Development Supervisory Agency for West Java Number S-823/PW10/4/2017</i>
2019	2020	<i>Self Assessment</i>	73,24	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-16/S.MBU/2012 <i>In accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-16/S.MBU/2012</i>
2020	2021	<i>Self Assessment</i>	76,69	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-16/S.MBU/2012 <i>In accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-16/S.MBU/2012</i>
2021	2022	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) <i>Financial and Development Supervisory Agency</i>	75,77	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-16/S.MBU/2012 dan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat Nomor S-212/PW10/4.1/2022 <i>In accordance with the Decree of the Secretary to the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-16/S.MBU/2012 and the Letter of the Financial and Development Supervisory Agency for West Java S-212/PW10/4.1/2022</i>
2022	2023	<i>Self Assessment</i>	76,58	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-16/S.MBU/2012 <i>In accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-16/S.MBU/2012</i>

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Objectives of Implementing Good Corporate Governance

PT INTI (Persero) berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance atau GCG) secara konsisten dan berkelanjutan. Kinerja usaha Perseroan merupakan suatu refleksi dari adanya upaya secara terus menerus dari organ-organ Perseroan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola.

Perseroan meyakini bahwa tata kelola Perseroan yang baik akan dapat menurunkan biaya, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan meningkatkan praktik-praktik bisnis terbaik (*best practices*).

Penerapan dan pengembangan GCG di PT INTI (Persero) bertujuan untuk:

1. Melaksanakan kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku.
2. Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang optimal sehingga meningkatkan kemakmuran Perseroan, serta mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan Pemangku Kepentingan lainnya.
3. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Pemangku Kepentingan Perseroan.
4. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perseroan.
5. Tercapainya visi, misi, dan tujuan Perseroan.
6. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.
7. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dengan memenuhi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil.
8. Memperbaiki budaya kerja Perseroan.
9. Menjadikan Perseroan bernilai tambah yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh Insan PT INTI (Persero), berikut peningkatan kemanfaatan bagi pemangku kepentingan Perseroan.

PT INTI (Persero) is committed to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) consistently and sustainably. The Company's business performance is a reflection of the continuous efforts of the Company's organs to maintain and improve the quality of governance.

The Company believes that good corporate governance will reduce costs, increase stakeholder trust, and improve best practices.

The implementation and development of GCG at PT INTI (Persero) aims to:

1. *Carry out obligations to comply with applicable regulations.*
2. *Achieving optimal growth and returns so as to increase the prosperity of the Company, as well as realizing Shareholder value in the long term without neglecting the interests of other Stakeholders.*
3. *Controlling and directing good relations between the Shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all the Stakeholders of the Company.*
4. *Supporting the Company's internal control and development activities.*
5. *The achievement of the Company's vision, mission, and goals.*
6. *Manage resources more reliably.*
7. *Increase accountability to stakeholders by fulfilling the principles of openness, accountability, trustworthiness, responsibility, and fairness.*
8. *Improving the Company's work culture.*
9. *Making the Company value added, namely improving the welfare of all PT INTI (Persero) personnel, as well as increasing the benefits for the Company's stakeholders.*



Implementasi Good Corporate Governance

Good Corporate Governance Implementation

Kinerja usaha Perseroan merupakan suatu refleksi dari adanya upaya secara terus-menerus dari organ-organ Perseroan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG). Perseroan meyakini bahwa dengan tata kelola yang baik akan dapat menurunkan biaya (*cost*), meningkatkan kepercayaan stakeholder dan meningkatkan praktik-praktik bisnis terbaik (*best practices*). Dengan demikian, GCG merupakan perangkat yang handal bagi Perseroan dalam menjawab perubahan lingkungan bisnis dan persaingan yang semakin kompetitif.

Dengan komitmen yang tinggi, Perseroan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja usaha dan pertumbuhan jangka panjang yang dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan para *stakeholder* lainnya. Sistem pengelolaan untuk mendukung hal tersebut di atas meliputi beberapa hal sebagai pondasi bagi kokohnya penerapan GCG di Perseroan yaitu:

1. Pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku yang di dalamnya memuat tata nilai budaya Perseroan yang telah dikomunikasikan kepada karyawan dan pemangku kepentingan lainnya melalui kegiatan sosialisasi.
2. Pengelolaan kebijakan dan prosedur kerja yang efektif atau sesuai dengan tuntutan bisnis melalui penerapan manajemen kualitas atau *International Organization for Standardization* (ISO) dengan membentuk *Manajemen Representative*, sebagai pedoman pengelolaan Perseroan dan menjadi panduan bekerja untuk karyawan.
3. Pembentukan Komite Manajemen Risiko.
4. Pengawasan internal dan penerapan pengendalian internal.
5. Pemanfaatan teknologi informasi pada proses bisnis berupa *System Application and Processing* (SAP).
6. Pemantauan kinerja individu, berupa pembuatan sasaran kerja individu dan rencana kerja tahunan bagi setiap karyawan Perseroan.

The Company's business performance reflects the continuous efforts of the organs of the Company to maintain and improve the quality of Good Corporate Governance. The Company believes that Good Corporate Governance (GCG) will lower the cost, increase stakeholder confidence and improve the best business practices (best practices). Thus, GCG is a powerful device for the Company in responding to changes in the business environment, and increasingly competitive competition.

With a solid commitment, Company try to improving business performance and long-term growth that can increase value for shareholders and other stakeholders. Management system to support the above covers some of the concrete foundations for the implementation of GCG, namely:

1. *Implementation of an ethical code and code of conduct, including the Company's cultural values that have been communicated to employees and other stakeholders through socialization.*
2. *Management policies and procedures are effective or by the demands of the business through the implementation of quality management or Organization for Standardization (ISO) to form a Management Representative as guidelines for the management of the Company and to guide the work of employees.*
3. *Establishment of Risk Management Committee.*
4. *Internal supervision and implementation of internal control.*
5. *Use Information Technology in business processes such as System Application and Processing (SAP).*
6. *Individual Performance Monitoring, in the form of defining personal work targets and the annual work plan for each employee of the Company.*

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Structure

Struktur Tata Kelola Perusahaan terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Organ pendukung dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris
5. Sekretaris Perusahaan

Adapun perincian lebih lanjut sebagai berikut:

Governance Structure consists of:

1. General Meeting of Shareholders (GMS)
2. The Board of Commissioners
3. The Board of Directors
4. Supporting organs and Committees under the Board of Commissioners
5. Corporate Secretary

As for further details as follows:

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

General Meeting of Shareholders (RUPS)

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik RUPS Tahunan (RUPST) maupun RUPS Luar Biasa (RUPSLB) bertindak sebagai forum utama bagi para pemegang saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap Perseroan.

RUPSTahunan terdiri dari RUPS mengenai Persetujuan Laporan Keuangan dan RUPS mengenai Persetujuan RKAP, sedangkan RUPSLB dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Dalam RUPST dan RUPSLB, setiap pemegang saham berhak memperoleh perlakuan yang sama dan kedudukan yang seimbang, terutama dalam menyuarakan pendapatnya dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan penting dan strategis terkait dengan:

1. Perubahan Anggaran Dasar.
2. Persetujuan Laporan Tahunan, RKAP, serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Penentuan dan persetujuan terhadap penggunaan laba perusahaan.
5. Hal-hal lain yang menjadi kewenangan RUPS.

Based on the Company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders (GMS) both of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) to act as the main forum for shareholders to exercise their rights and authority over the Company.

Annual General Meeting consists of GMS to Approval of the Financial Statements and the GMS on the agreement Corporate Work and Budget Plan (CBP), whereas the EGMS can held at any time if necessary. In the GMS and EGMS, each of shareholder are entitled to equal treatment and a balanced position, especially in voicing their opinions and contribute to the decision making process of strategic importance related to:

1. Amendments to the Articles of Association.
2. Approval of the Annual Report, CBP, and Company Long Term Plan (CTLTP).
3. Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Directors.
4. Determination and approval of the use of corporate profits.
5. Other things that the authority of the GMS.



Komisaris

Board of Commissioners

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Surat

Composition of the Board of Commissioners of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi

Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-318/MBU/10/2020 tertanggal 8 Oktober 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor SK-233/MBU/10/2022 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, maka susunan Dewan Komisaris PT INTI (Persero) sebagai berikut:

Indonesia based on Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number SK-318/MBU/10/2020 dated 8 October 2020, regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, Decree of the Minister of SOEs Number SK-233 / MBU/10/2022 regarding Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, the composition of the Board of Commissioners of PT INTI (Persero) is as follows:

Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	: Unggul Priyanto
Komisaris <i>Commissioner</i>	: Rahmadi Murwanto
Komisaris <i>Commissioner</i>	: Trisno Hendradi
Komisaris <i>Commissioner</i>	: Yanuar Rokhmad Madyantoro

Direksi

Board of Directors

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-143-MBU/07/2022, tertanggal 8 Juli 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-256/MBU/11/2022 tertanggal 14 November 2022 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, maka susunan Direksi PT INTI (Persero) adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number SK-143-MBU/07/2022, dated July 8, 2022, on Termination and Appointment of Members of President Directors of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia and the Decree of the Minister of SOEs Number SK-256/MBU/11/2022 dated November 14, 2022, on Dismissal, Changes in Position Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, the Board of Directors of PT INTI (Persero) is as follows:

Direktur Utama <i>President Director</i>	: Edi Witjara
Direktur Keuangan, SDM, Hukum, dan Manajemen Risiko <i>Financial, Human Capital, Legal & Risk Management Director</i>	: Tantang Yudha Santoso
Direktur Operasi <i>Operation Director</i>	: Ahmad Taufik

Organ Pendukung dan Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Supporting Organ and Committees Under The Board of Commissioners

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: PER-2/MBU/03/2023, Dewan Komisaris dapat mengangkat organ pendukung dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu:

1. Sekretaris Dewan Komisaris, jika diperlukan;
2. Komite Audit;
3. Satu komite lain, jika diperlukan.

Sekretaris Dewan Komisaris PT INTI (Persero) ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor : SK-54a/DK-INTI/11/2022 tentang Pemberhentian dan Penugasan Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia tertanggal 2 November 2022, yang dijabat oleh Suripto.

Perusahaan juga telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-54/DEKOM/INTI/X/2020 tertanggal 21 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-01/DEKOM/INTI/IV/2012 tertanggal 2 April 2021 tentang Perpanjangan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia yang beranggotakan:

Ketua : Rahmadi Murwanto

Anggota : Endarjono

Selain Komite Audit, PT INTI (Persero) telah membentuk komite lain di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-53/DEKOM/INTI/10/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan beranggotakan:

Ketua : Unggul Priyanto (Komisaris Utama)

Sekretaris : Trisno Hendradi (Anggota Dewan Komisaris)

Anggota : Rahmadi Murwanto (Anggota Dewan Komisaris)

Pembantu Sekretaris : Endarjono (Anggota Komite Audit)

According to Regulation of Ministry of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-2/MBU/03/2023, the Board of Commissioners can appoint supporting organ and committees under the Board of Commissioners as follows:

1. Secretary of Board of Commissioners, if necessary;
2. Audit Committee;
3. Another committee, if necessary.

The Secretary of the Board of Commissioners of PT INTI (Persero) is appointed based on the Decree of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Number: SK-54a/DK-INTI/11/2022 concerning the Dismissal and Assignment of the Acting Secretary of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia dated November 2 2022, which is held by Suripto.

The Company has also established an Audit Committee by the Decree of BOC Nomor SK-54/DEKOM/INTI/X/2020 dated October 21, 2020, on the Appointment of the Company's Audit Committee of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia and Decree of the Board of Commissioners Number KEP-01/DEKOM/INTI/IV/2012 dated April 2, 2021, concerning Extension of Members of the Audit Committee of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia consists of:

Chairman : Rahmadi Murwanto

Member : Endarjono

In addition to the Audit Committee, PT INTI (Persero) has formed other committees under the Board of Commissioners, namely the Nomination and Remuneration Committee based on the Decree of the Board of Commissioners Number SK-53/DEKOM/INTI/10/2020 concerning the Appointment of the Nomination and Remuneration Committee for the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia and the members of:

Chairman : Unggul Priyanto (President Commissioners)

Secretary : Trisno Hendradi (Member of Board of Commissioners)

Member : Rahmadi Murwanto (Member of Board of Commissioners)

Secretary : Endarjono (Member of Audit Committee)

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan merupakan Organ Pendukung Direksi yang bertindak sebagai pejabat penghubung (*liaison officer*) serta bertugas menatausahakan dan menyimpan dokumen Perusahaan, tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus Perusahaan dan Risalah Rapat Direksi, Dewan Komisaris, maupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh organ struktural setingkat di bawah Direksi dan bertanggung jawab kepada Direksi Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan harus memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Komisaris apabila diminta.

Corporate Secretary is a supporting organ that acts as a liaison officer to administer and store the documents of the Company, including but not limited to the Register of Shareholders, Special Register Company, and Minutes of Meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the General Meeting of Shareholders (GMS). Corporate Secretary is run by the structural organ level under the Board of Directors and is responsible to the Company's Board of Directors.

The Corporate Secretary must ensure that the Company complies with the applicable disclosure requirements and regulations and periodically provide information related to its duties to the Board of Directors and to the Board of Commissioners when requested.

Dasar Penerapan Good Corporate Governance

Good Corporate Governance Implementation Basis

Untuk mewujudkan tujuan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) di Perseroan, terdapat sejumlah acuan peraturan yang melandasi sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Pasal 5 ayat 3).
2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi yang Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
3. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tertanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator atau Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.
4. Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diperbaharui oleh Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tertanggal 16 Agustus 2007.

To achieve the objectives of Good Corporate Governance (GCG) implementation in the Company, there are several reference regulations that underlie, as follows:

1. *Law Number 19 of 2003 on State Owned Enterprises (SOEs) (Article 5 paragraph 3).*
2. *State-Owned Enterprises (SOEs) Minister's Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 on the Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.*
3. *BUMN Ministry Secretary's Decision Number SK-16/S.MBU/2012 dated 06 June 2012 on Indicators or Parameters for the Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance in SOEs.*
4. *Law Number 1 of 1995 on Limited Liability Company subsequently amended with Law Number 40 of 2007 dated 16 August 2007.*



Prinsip Dasar Tata Kelola Perusahaan

Basic Principles of Corporate Governance

Sebagai landasan utama dalam menetapkan kebijakan tata kelola dan menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menetapkan kebijakan tata kelola yang berlaku dengan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha (BUMN) Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi yang Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang menyebutkan bahwa "BUMN wajib melaksanakan operasional Perseroan dengan berpegang pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran."

1. Transparans

Perseroan senantiasa menerapkan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Perseroan memberikan informasi yang benar dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai jalur informasi, seperti melalui situs website Perseroan, siaran pers, dan laporan-laporan berkala.

2. Akuntabilitas

Seluruh organ tata kelola Perseroan memiliki kejelasan fungsi, metode dan sistem pelaksanaan, serta pertanggungjawaban yang sistematis sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Hal ini dapat terlihat melalui pengelolaan Perseroan yang memisahkan tugas dan tanggung jawab serta menguraikan secara jelas mengenai tugas pokok, fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing organ tata kelola.

3. Pertanggungjawaban

Bentuk pertanggungjawaban Perseroan adalah kesesuaian pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Hal ini dapat dibuktikan melalui kepatuhan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku, seperti pengadaan, pembayaran pajak, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan industrial, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility* atau CSR) yang berkelanjutan.

4. Kemandirian

Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan

As the main foundation in establishing governance policy and conducting business activities, the Company sets out the general governance policy concerning the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number PER-2/MBU/03/2023 on the Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, on the Implementation of Good Corporate Governance at SOEs, which states that "SOEs are required to implement the Company's operations by adhering to Good Corporate Governance (GCG) principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness."

1. Transparency

The Company constantly implements disclosure in the process of decision-making and disclosure in disclosing material and relevant information about the company. The Company provides true and accurate information to all stakeholders through various information channels, such as through the Company's website, press releases, and periodic reports.

2. Accountability

All of the Company's governance organs have clear functions, methods and systems of execution, as well as systematic accountability so that the management of the company is implemented effectively. This can be seen through the management of the Company that separates duties and responsibilities and outlines clearly the main tasks, functions, rights, obligations and authority of each governance organ.

3. Responsibility

The Company's form of responsibility is the conformity of the Company's management to the laws and principles of a healthy corporation. This can be proven through the Company's compliance with applicable regulations, such as procurement, tax payment, occupational health and safety, industrial relations, environmental protection and sustainable corporate social responsibility (CSR) programs.

4. Independence

The Company's management is carried out professionally without any conflict of interest and the influence or

dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran

Perseroan memberikan perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak seluruh pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku. Melalui prinsip ini, manajemen melakukan pengelolaan terhadap seluruh jalannya Perseroan dengan kehati-hatian dan memperhatikan norma-norma kewajaran sehingga memunculkan perlindungan kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil.

pressure of any party that is inconsistent with legislation and sound corporate principles.

5. Fairness

The Company provides fair and equitable treatment in fulfilling the rights of all stakeholders arising under the applicable laws and regulations and regulations. Through this principle, management manages all the Company's operations with due care and observes norms of fairness so as to raise the protection of shareholders' interests honestly and fairly.



Internalisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Internalization of Good Corporate Governance

Dalam rangka memberikan dan meningkatkan pemahaman tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance atau GCG) serta sejauh mana implementasi GCG di PT INTI (Persero) telah dilaksanakan, maka pada tahun 2023 telah diadakan Sosialisasi Implementasi GCG, Standar Etika Perusahaan, Pengendalian Gratifikasi, Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), *Whistle-Blowing System*, dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta Anti Korupsi bagi karyawan PT INTI (Persero).

Penanaman nilai-nilai GCG juga dilakukan melalui portal internal Perusahaan, sosialisasi melalui e-mail kepada seluruh karyawan, maupun publikasi melalui banner, media sosial, dan website Perseroan yang dapat dilihat dan diunduh dengan mudah oleh karyawan Perseroan maupun pemangku kepentingan, seperti link di bawah ini:

To provide and improve understanding of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and the extent to which the implementation of GCG at PT INTI (Persero) has been implemented, in 2023 has been held a Socialization of GCG Implementation, Corporate Ethics Standards, Gratification Control, Management of State Administration Assets Report, Whistle-Blowing System, and Anti-Bribery Management System as well as anti-corruption for PT INTI (Persero) employees.

The inculcation of GCG values is also carried out through the Company's internal portal, socialization via e-mail to all employees, as well as publications through banners, corporate social media, as well as the Company's website, which can be viewed and downloaded easily by Company employees and stakeholders, such as the link below:

https://www.inti.co.id/?page_id=1046

https://www.instagram.com/p/C1HN0kWvmlP/?img_index=1

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi di Perseroan, sebagai forum utama bagi para pemegang saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya serta mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan kepemilikan saham di Perseroan.

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang tersebut mencakup hal dalam mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi, menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta meminta pertanggungjawaban terkait dengan pengelolaan Perseroan, mengubah Anggaran Dasar, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara direksi, dan lain-lain.

Dalam melaksanakan wewenangnya, RUPS harus memperhatikan kepentingan pengembangan dan kesehatan Perseroan, kepentingan para pemangku kepentingan, serta hak-hak Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, terdapat dua jenis RUPS yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan
RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun meliputi:
 - a. RUPS mengenai persetujuan Laporan Tahunan, diadakan paling lama dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, di mana disampaikan Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, usulan penggunaan laba bersih, dan hal-hal lain yang perlu diputuskan oleh RUPS.
 - b. RUPS mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), diadakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP yang bersangkutan), di mana Direksi menyampaikan RKAP dan hal-hal lain yang perlu diputuskan oleh RUPS.
2. RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

RUPS dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

General Meeting of Shareholders as the highest organ in the Company, as the main forum for shareholders to exercise their rights and authority as well as taking vital decisions relating to the ownership of shares in the Company.

General Meeting of Shareholders has the authority that are not granted to the Board of Commissioners or Board of Directors within the limits specified in the Articles of Association and regulations that apply. Such authorities include appointing and dismissing the Board of Commissioners and Board of Directors, stipulate the Corporate Work and Budget Plan and asking for accountability regarding the management of the Company, revising the Articles of Association, deciding the division of roles and responsibilities among the Board of Directors, and others.

In exercising its authority, the General Meeting of Shareholders must consider the interests of the Company's development and health, the interests of stakeholders, and rights of the Company.

In accordance with the Articles of Association, there are two types of General Meeting of Shareholders, namely:

1. Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)
The AGMS is held each year include:
 - a. AGMS regarding the approval of the Annual Report, held at the latest in June after the close of the fiscal year concerned, which the Annual Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, the proposed use of net profit, and other things that need to be decided by the AGMS are conveyed at the meeting.
 - b. AGMS regarding the approval of the Corporate Work and Budget Plan (CBP), held no later than 30 (thirty) days after the current fiscal year (the fiscal year concerned CBP), in which the Board of Directors to convey CBP and other things that need to be decided by the AGMS.
2. The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) can be held at any time based on the needs for the benefit of the Company.
GMS can make a decision if the decision was approved unanimously.



Pada tahun 2023 PT INTI (Persero) melakukan RUPS sebanyak tiga kali, yaitu RUPS Pengesahan RKAP dan *Key Performance Indicator* (KPI) Revisi Tahun 2022 pada 7 Februari 2023, RUPS Pengesahan RKAP dan KPI Tahun 2023 pada 7 Februari 2023, serta RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 pada 11 April 2023.

In year 2023 PT INTI (Persero) held three General Meeting of Shareholders, namely General Meeting of Shareholders on Ratification of Corporate Work and Budget Plan revised 2022 on February 7, 2023, General Meeting of Shareholders on Ratification of Corporate Work and Budget Plan 2023 on February 7, 2023, and also General Meeting of Shareholders on Approval of Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements of Fiscal Year 2022 on April 11, 2023.

RUPS Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan *Key Performance Indicator* (KPI) Revisi Tahun 2022

General Meeting of Shareholders Concerning Approval of Corporate Work Plan and Budget and Key Performance Indicator (KPI) Revised for 2022

Sesuai undangan Direksi PT INTI (Persero) Nomor 3803/PR.03.04/010504/2022 tertanggal 1 Desember 2022 untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 7 Februari 2023 melalui Media Aplikasi Zoom Meeting.

In accordance with the invitation of the Board of Directors of PT INTI (Persero) Number 3803/PR.03.04/010504/2022 dated December 1, 2022, to hold the General Meeting of Shareholders on February 7, 2023 through the Zoom Meeting Application Media.

Pokok-pokok Keputusan RUPS tertuang dalam Risalah RUPS dengan uraian sebagai berikut:

The principal decisions of General Meeting of Shareholders contained in the Minutes of Meeting of the General Meeting of Shareholders with the following description:

1. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Tahun 2022.
2. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (RKA-TJSL) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Tahun 2022.
3. Menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi Tahun 2022, yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2022 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.
4. Menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2022, yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2022 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.

1. *Approve and ratify the 2022 Company Work Plan and Budget including the 2022 Work Plan and Budget of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.*
2. *Approve and ratify the 2022 Work Plan and Budget for the Corporate Social and Environmental Responsibility Program of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.*
3. *Determine Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Directors for 2022, which are stated in the 2022 Management Contract between the Board of Directors and Board of Commissioners and Shareholders.*
4. *Determine Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners for 2022, which are stated in the 2022 Management Contract between the Board of Commissioners and Shareholders.*

RUPS Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2023

General Meeting of Shareholders Concerning Approval of Corporate Work Plan and Budget and Key Performance Indicator (KPI) for 2023

Sesuai undangan Direksi PT INTI (Persero) Nomor 273/PR.03.04/010300/2023 tertanggal 20 Januari 2023 untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 7 Februari 2023 melalui Media Aplikasi Zoom Meeting.

In accordance with the invitation of the Board of Directors of PT INTI (Persero) Number 273/PR.03.04/010300/2023 dated Januari 20, 2023, to hold the General Meeting of Shareholders on Februari 7, 2023 through the Zoom Meeting Application Media.

Pokok-pokok Keputusan RUPS tertuang dalam Risalah RUPS dengan uraian sebagai berikut:

The principal decisions of General Meeting of Shareholders contained in the Minutes of Meeting of the General Meeting of Shareholders with the following description:

1. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Tahun 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (RKA-TJSL) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Tahun 2023.
3. Menetapkan Key Performance Indicators (KPI) Direksi Tahun 2023, yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2023 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.
4. Menetapkan Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2023, yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2023 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.

1. *Approve and ratify the 2023 Company Work Plan and Budget including the 2023 Work Plan and Budget of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.*
2. *Approve and ratify the 2023 Work Plan and Budget for the Corporate Social and Environmental Responsibility Program of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.*
3. *Determine Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Directors for 2023, which are stated in the 2023 Management Contract between the Board of Directors and Board of Commissioners and Shareholders.*
4. *Determine Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners for 2023, which are stated in the 2023 Management Contract between the Board of Commissioners and Shareholders.*



RUPS Tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022

General Meeting Of Shareholders On Approval Of Annual Report And Ratification Of Financial Statements Of Fiscal Year 2022

Sesuai undangan Direksi PT INTI (Persero) Nomor 745/TU.02.01/010300/2023 tertanggal 27 Maret 2023 untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 11 April 2023 melalui Media Aplikasi Zoom Meeting.

In accordance with the invitation of the Board of Directors of PT INTI (Persero) Number 745/TU.02.01/010300/2023 dated March 27, 2023, to hold the General Meeting of Shareholders on April 11, 2023 through the Zoom Meeting Application Media.

Pokok-pokok Keputusan RUPS tertuang dalam Risalah RUPS dengan uraian sebagai berikut:

The principal decisions of General Meeting of Shareholders contained in the Minutes of Meeting of the General Meeting of Shareholders with the following description:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir, Abadi, Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00170/2.1030/AU.2/12/1155-1/0/III/2023 tertanggal 15 Maret 2023.
3. Tidak ada penetapan penggunaan Laba bersih Konsolidasian Perseroan karena Perseroan mengalami laba minus atau rugi bersih Perseroan Tahun 2022.
4. Menetapkan tentang tantiem tahun buku 2022, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2022 akan ditetapkan secara tersendiri.
5. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) tahun Buku 2023.

1. *Approve the Corporate Annual Report on the circumstances and the course of the Company, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners during the fiscal year 2022.*
2. *Ratify the Consolidated Financial Statements of the Company PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) for Fiscal Year 2022 which has been audited by the Public Accounting Firm of Amir, Abadi, Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) as contained in its report Number 00170/2.1030/AU.2/12/1155-1/0/III/2023 dated March 15, 2023.*
3. *There is no stipulation on the use of the Company's Consolidated Net Profits because the Company experienced a minus profit or net loss for 2022.*
4. *To stipulate the bonus for the financial year 2022, the salary for the Board of Directors and the honorarium for the Board of Commissioners along with other facilities and allowances for 2022 will be determined separately.*
5. *Determination of a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements and Implementation of Micro and Small Business Funding Programs for the 2023 Financial Year.*

Uraian Tentang Dewan Komisaris

Description on Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Selain itu, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perusahaan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

Setiap anggota Dewan Komisaris harus memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan, dan komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, peran Dewan Komisaris sangat strategis. Oleh karena itu, komposisi Dewan Komisaris Perseroan harus memungkinkan pengambil keputusan yang efektif, tepat, dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap direksi.

Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

The Board of Commissioners is the corporate organ responsible collectively for supervising and giving advice to the Board of Directors and ensuring that the Company implements Good Corporate Governance (GCG) to all levels of the organization. In addition, the Board of Commissioners is responsible to the Shareholders in terms of supervising the policies of the Board of Directors on the Company's operations in general, which refers to the business plan that the Board has approved of Commissioners and Shareholders, as well as ensuring compliance with all applicable laws and regulations.

Every member of the Board of Commissioners must have high integrity, knowledge, ability, and commitment to providing time in carrying out their duties. Thus, the role of the Board of Commissioners is very strategic. Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners must enable effective, appropriate, and fast decision-makers. In addition, the Board of Commissioners also requires to act independently, in the sense of having no conflict of interest, which can interfere with its ability to carry out tasks independently and critically, both with each other and the relationship with the directors.

The Board of Commissioners assisted by the Secretary of the Board of Commissioners and the Audit Committee in supporting the implementation of their duties.

Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders (RUPS) in accordance with the laws and regulations. The appointment of the Board of Commissioners must meet the general and specific requirements set by the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN).

Referensi Peraturan

Regulation Reference

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi yang Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

1. Regulation of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-2/MBU/03/2023 on the Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs.

2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

2. Regulation of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-3/MBU/03/2023 on the Guidelines for Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of The Board of Commissioners

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta peraturan perundangundangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan, dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

The Board of Commissioners is in charge of supervising management policies, the general management of both the Company and the Company's business as well as provide advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the Company Long Term Plan, Company Work Plan and Budget as well as provisions of the Articles of Association and Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), as well as applicable laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

In carrying out its duties, each member of the Board of Commissioners must:

1. Comply with the Articles of Association and laws and regulations and the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, accountability, and fairness.
2. Good-willed, prudent, and responsible in carrying out the supervisory duties and giving advice to the Board of Directors for the Company's interests and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

Kewajiban Dewan Komisaris

Obligations of The Board of Commissioners

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disiapkan oleh Direksi, serta memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP serta menyampaikan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP.

In carrying out its duties the Board of Commissioners is obliged to:

1. Providing advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company.
2. Research, review and sign the Company Long Term Plan and also the Company Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, and provide opinion and suggestion to GMS regarding the Company Long Term Plan and Company Work Plan and Budget and convey the reasons for the Board of Commissioners signing the the Company Long Term Plan and Company Work Plan and Budget.

3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.
4. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.
5. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan, serta memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
6. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP.
7. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan risalahnya.
9. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
10. Memantau dan memastikan tata kelola perusahaan diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Terkait dengan **Rencana Jangka Panjang Perusahaan**

Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.



Terkait dengan **Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)**



1. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
2. Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perseroan yang tercantum dalam RKAP yang merupakan penjabaran dari RJPP.



Terkait dengan **Penyusunan Laporan Tahunan**

1. Dewan Komisaris melakukan telaahan atas Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah



3. *Keep abreast of developments in the Company's activities, provide opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important for the management of the Company.*
4. *Report immediately to the GMS in the event of symptoms of a decline in the Company's performance.*
5. *Researching and reviewing periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and signing the annual report, as well as providing explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the Annual Report, if requested.*
6. *Prepare an annual work program and include it in the Company Work Plan and Budget.*
7. *Propose a Public Accountant to the GMS.*
8. *Make minutes of Board of Commissioners meetings and keep copies.*
9. *Provide a report on the supervisory duties that have been carried out during the last financial year to the GMS.*
10. *Monitor and ensure that corporate governance is implemented effectively and sustainably.*
11. *Carry out other obligations in the context of supervisory duties and providing advice, as long as they do not conflict with the laws and regulations, articles of association, and/or GMS decisions.*

Related to the **Company Long-Term Plan**

The Board of Commissioners reviews and provides opinions on the Company Long-Term Plan prepared by the Board of Directors before being signed together.

Related to the **Company Work Plan and Budget**

1. *The Board of Commissioners reviews and provides opinions on the Company Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors before being signed together.*
2. *The Board of Commissioners provides direction to the Board of Directors on the implementation of the Company's plans and policies stated in the Company Work Plan and Budget which are the elaboration of the Company Long-Term Plan.*

Related to **Annual Report Preparation**

1. *The Board of Commissioners reviews the Draft Annual Report including financial statements audited by public*

diaudit oleh akuntan publik.

2. Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunan untuk selanjutnya oleh Direksi disampaikan kepada Pemegang Saham.

Terkait dengan **Pengelolaan Manajemen Risiko**

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko.

Terkait dengan **Sistem Pengendalian Internal**

Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi agar menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif.

Terkait **Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi**

1. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perseroan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perseroan.
2. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
3. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Perseroan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan.
4. Informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perseroan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan Perseroan, harus dirahasiakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perseroan.
5. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

accountants.

2. The Board of Directors and the Board of Commissioners sign the Annual Report for the next by the Directors to be conveyed to the Shareholders.

Related to **Risk Management**

The Board of Commissioners has an obligation to supervise and provide advice to the Board of Directors on a regular basis regarding the effectiveness of the application of risk management.

Associated with the **Internal Control System**

The Board of Commissioners assisted by the Audit Committee has the obligation to supervise and provide advice to the Board of Directors to establish an effective internal control system.

Related to **Disclosure and Information Confidentiality**

1. The Board of Commissioners must ensure that in the Company's Annual Report contains information about the identity, main works, positions of the Board of Commissioners in other companies, including meetings conducted in one financial year (internal meetings or joint meetings with the Board of Directors), and honorarium, facilities and/or other benefits received from the Company.
2. The Board of Commissioners must report to the Company regarding its share ownership and/or family to the Company and other companies, including any amendments thereto.
3. The Board of Commissioners is responsible to the Company for maintaining the confidentiality of Company information.
4. Information, which is based on statutory provisions and/or Company provisions, is confidential information relating to the Company, must be kept confidential in accordance with the provisions of the laws and/or Company provisions.
5. Confidential information obtained while serving as a Board of Commissioners must be kept confidential in accordance with applicable laws and regulations.

Wewenang Dewan Komisaris

Authority of The Board of Commissioners

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, surat berharga, dan memeriksa kekayaan Perseroan.
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu.
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

In carrying out its duties the Board of Commissioners is authorized to:

1. *Look at books, letters, and other documents, check cash for verification purposes and other, securities, and check Company assets.*
2. *Enter the yard, building and office used by the Company.*
3. *Request an explanation from the Directors and/or other officials regarding all matters relating to the management of the Company.*
4. *Knowing all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors.*
5. *Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.*
6. *Appoint and dismiss the Secretary of the Board of Commissioners, if deemed necessary.*
7. *Temporarily dismissing members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association.*
8. *Establish other Committees other than the Audit Committee, if deemed necessary by taking into account the Company's capabilities.*
9. *Use experts for certain matters and within a certain period of time at the Company's expense, if deemed necessary.*
10. *Perform management actions of the Company in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.*
11. *Attending Board of Directors meetings and giving views on matters discussed.*
12. *Carry out other oversight authorities insofar as they do not conflict with statutory regulations, Articles of Association, and/or decisions of the General Meeting of Shareholders (GMS), in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company.*



Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana Direksi dalam hal:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
2. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer* atau BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer* atau BOWT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate* atau BTO), dan kerja sama lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menyewakan aset: Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk menyewakan aset Perseroan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan nilai sewa/transaksi lebih dari 1% sampai dengan 2,5% dari pendapatan (revenue), atau lebih dari 2% sampai dengan 5% dari ekuitas Perseroan, mana yang lebih kecil.
 - b. Kerja Sama Operasi dan Kerja Sama Usaha: Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan Kerja Sama Operasi dan Kerja Sama Usaha dengan jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan nilai penyertaan (aset Perseroan yang dikerjasamakan) lebih dari 2,5% sampai dengan 5% dari pendapatan (revenue), atau lebih dari 5% sampai dengan 10% dari ekuitas Perseroan, mana yang lebih kecil.
 - c. Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BOWT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO) : Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan Kerja Sama Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BowT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO) dengan jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dengan nilai aset Perseroan yang dikerjasamakan lebih dari 6% sampai dengan 12,5% dari pendapatan atau lebih dari 6,5% sampai dengan 13% dari ekuitas Perseroan, mana yang lebih kecil.
 - d. Kontrak Manajemen dan Kerja Sama Lainnya: Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan Kontrak Manajemen dan Kerja Sama Lainnya dengan jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan nilai penyertaan (aset Perseroan yang dikerjasamakan) lebih dari 2,5% sampai dengan 5% dari pendapatan atau lebih dari 5% sampai dengan 10% dari ekuitas Perseroan, mana yang lebih kecil.
 - e. Pelaksanaan tindakan tersebut di atas harus disertai dengan Pakta Integritas yang berisi

The Board of Commissioners is authorized to approve or reject in writing the Board of Directors' plans in terms of:

1. *Applying fixed assets for short-term credit withdrawals.*
2. *Organize cooperation with business entities or other parties in the form of licensing cooperation, management contracts, asset leasing, Operational Cooperation (BOC), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOWT), Build Transfer Operate (BTO), and other cooperation with the following conditions:*
 - a. *Renting out assets : The Board of Directors must obtain written approval from the Board of Commissioners to lease the Company's assets with a period of more than 3 (three) years up to 5 (five) years with more than 1% to 2.5% of rent/transaction value. (revenue), or more than 2% to 5% of the Company's equity, whichever is smaller.*
 - b. *Cooperation in Operations and Business Cooperation: The Board of Directors must obtain written approval from the Board of Commissioners to conduct Joint Operations and Business Cooperation with a period of more than 5 (five) years up to 10 (ten) years with more than 2.5% to 5% of revenue (revenue), or more than 5% to 10% of the Company's equity, whichever is smaller.*
 - c. *Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BowT), Build Transfer Operate (BTO) : The Board of Directors must obtain written approval from the Board of Commissioners to cooperate Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BowT), Build Transfer Operate (BTO) with a period of more than 10 (ten) years up to 20 (twenty) years with the value of the Company's assets cooperation is more than 6% to 12.5% of income or more from 6.5% to 13% of the Company's equity, whichever is smaller.*
 - d. *Management Contracts and Other Cooperation: The Board of Directors must obtain written approval from the Board of Commissioners to conduct Management Contracts and Other Cooperation with a period of more than 10 (ten) years with the value of investments (Company assets cooperated) of more than 2.5% up to 5 % of income or more from 5% to 10% of the Company's equity, whichever is smaller.*
 - e. *The implementation of the aforementioned actions must be accompanied by an Integrity Pact which*

pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris bahwa pelaksanaan tindakan tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dan dengan itikad baik, tanpa pengaruh pihak lain dan tanpa benturan kepentingan, serta dengan penuh kehati-hatian untuk kepentingan terbaik bagi Perseroan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

contains the statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners that the implementation of these actions has been carefully considered and in good faith, without the influence of other parties and without Conflict of Interest, and with full care for the best interests Company with heed the applicable provisions and the principles of Good Corporate Governance (GCG).

3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah atau panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan dari Perseroan, dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dari Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
7. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern.
8. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

3. *Receiving or providing medium or long-term loans, except loans (debt or receivables) arising from business transactions and loans given to subsidiaries of the Company, with the terms of loans to subsidiaries of the Company reported to the Board of Commissioners.*
4. *Eliminate from bookkeeping of bad debts and dead goods inventory.*
5. *Releasing movable fixed assets with an economic age that is generally applicable in the industry in general up to 5 (five) years.*
6. *Establish the organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors.*
7. *Appoint and dismiss the Head of the Internal Audit Unit.*
8. *Appoint and dismiss the Corporate Secretary.*

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan Keputusan atas permohonan Direksi sebagaimana dimaksud di atas.

Within 30 (thirty) days of receipt of the application or explanation and documents in full from the Board of Directors, the Board of Commissioners must provide a decision at the request of the Board of Directors as referred to above.

Uraian Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Description of The Implementation of The Board of Commissioners' Duties

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dengan berpedoman kepada ketentuan Anggaran Dasar PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan peraturan perundangan yang berlaku, serta tata kelola perusahaan yang baik. Tugas yang dilaksanakan meliputi pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, memastikan terlaksananya ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan undang-undangan lainnya yang berlaku.

During 2023, the Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities independently by referring to the provisions of the Articles of Association of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) and applicable laws and regulations, as well as good corporate governance. The duties carried out include supervising the policies and management of the Company by the Board of Directors, providing advice to the Board of Directors, ensuring the implementation of the provisions of the Company's Articles of Association and other applicable laws and regulations.

Pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan dilakukan melalui evaluasi atas Laporan Manajemen Bulanan dan Triwulanan serta informasi lainnya, baik melalui

Supervision of the company's operational activities is carried out through evaluation of the Monthly and Quarterly Management Reports and other information, both through internal

pembahasan internal Dewan Komisaris maupun pembahasan bersama Direksi Perseroan. Selain melalui pertemuan rutin, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dengan cara memberi penugasan khusus kepada Komite Audit untuk melakukan pendalaman terhadap permasalahan tertentu yang cukup penting. Hasil pendalaman Komite Audit tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu dasar bagi Rapat Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan.

Secara lebih detail, aktivitas yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam rangka melakukan tugas pengawasan terhadap Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan

Setiap pembahasan dalam Rapat Dewan Komisaris, baik Rapat Dewan Komisaris Internal maupun Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, ditindaklanjuti dengan pemberian saran atau nasihat kepada Direksi. Selama tahun 2023, nasihat atau saran yang terpenting, sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan pelaporan kinerja keuangan dan operasional perusahaan:
 - 1) *Transformation Optimism Positivity Strategy* dan *Strategic Programs* yang meliputi *Financial Improvement*, *Digitalization* dan *Human Capital and Organization Transformation* yang akan dijalankan dalam rangka mempertahankan kelangsungan usaha agar dijalankan secara sungguh-sungguh guna peningkatan kinerja perusahaan secara berkelanjutan.
 - 2) Mencermati adanya kecenderungan margin yang menurun, maka Direksi diharapkan agar mengupayakan pendapatan yang berasal dari proyek dengan margin yang relatif tinggi dengan prioritas pada kontrak yang bersifat '*recurring*' untuk menjamin perolehan pendapatan dapat tercapai sesuai yang ditargetkan.
 - 3) Dalam mendukung pembiayaan untuk pengerjaan kontrak-kontrak yang diperoleh perusahaan, agar diupayakan modal kerja yang tidak hanya berasal dari PT Perusahaan Pengelola Aset, namun juga dari mitra yang lain dengan cost of fund yang masih dapat diakomodir dari kontrak yang akan dibiayai tersebut.
 - 4) Agar terus diupayakan pengendalian terhadap Beban Pokok Penjualan dan Beban Usaha, sehingga profitabilitas perusahaan dapat meningkat.
 - 5) Aset produktif yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka memperoleh pendapatan di luar bisnis inti dan meningkatkan likuiditas perusahaan.

discussions of the Board of Commissioners and discussions with the Company's Directors. In addition to regular meetings, the Board of Commissioners carries out its supervisory function by giving special assignments to the Audit Committee to explore certain important issues. The exploration results of the Audit Committee will then be used as a basis for the Board of Commissioners Meeting to take the necessary decisions.

In more detail, the activities carried out by the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties of the Company are as follows:

1. *Provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company*

Every discussion in the Board of Commissioners Meeting, both the Internal Board of Commissioners Meeting and the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors, is followed up with the provision of advice or advice to the Board of Directors. During 2023, the most important advice or suggestions, as follows:

- a. *In relation to the company's financial and operational performance reporting:*
 - 1) *Transformation Optimism Positivity Strategy and Strategic Programs, which include Financial Improvement, Digitalization, and Human Capital and Organization Transformation, will be implemented to ensure the sustainability of the business and to enhance the company's performance continuously.*
 - 2) *Noting the tendency of declining margins, the Board of Directors is expected to strive for revenue from projects with relatively high margins, prioritizing 'recurring' contracts to ensure that the targeted revenue is achieved.*
 - 3) *To support the financing of contracts obtained by the company, working capital should not only be sourced from PT Perusahaan Pengelola Aset but also from other partners with a cost of funds that can be accommodated by the contracts being financed.*
 - 4) *Efforts should continuously be made to control the Cost of Goods Sold and Operating Expenses, in order to improve the company's profitability.*
 - 5) *The productive assets owned should be utilized to their maximum potential in order to generate revenue outside of the core business and enhance the company's liquidity.*

- 6) Agar diupayakan terus penagihan terhadap piutang macet yang berpotensi untuk meningkatkan likuiditas perusahaan. Dalam hal situasi memungkinkan, dapat dilakukan langkah-langkah hukum kepada para debitur yang tidak kooperatif.
 - 7) Direksi agar segera menindaklanjuti hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian sebagaimana yang tertera dalam Laporan KAP "Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan" (RSM) serta menuntaskan temuan-temuan BPK RI yang masih dalam proses penyelesaian.
 - 8) Agar selalu diterapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam seluruh aspek pengelolaan bisnis Perusahaan.
 - 9) Penyaluran program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) berpedoman pada prinsip membantu usaha kecil serta kelancaran pengembalian pinjaman. Oleh karena itu sasaran pembinaan diutamakan pada komunitas di sekitar wilayah unit kerja, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus memperkuat hubungan sosial.
- b. Berkaitan dengan Pengembangan Perusahaan:
- 1) Dewan Komisaris telah melakukan pembahasan dengan Direksi terkait rencana Direksi dalam melakukan Kerja Sama melalui sinergi BUMN maupun dengan pihak ketiga.
 - 2) Dewan Komisaris telah melakukan pertemuan dengan Serikat Pekerja INTI untuk mendapatkan informasi atas jalannya perusahaan.
 - 3) Dewan Komisaris telah melakukan pertemuan dengan Internal Audit Group terkait dengan hasil temuan Internal Audit Group tahun 2015-2022 yang belum selesai ditindaklanjuti.
- c. Berkaitan dengan pengembangan Anak Perusahaan:
- 1) Dewan Komisaris menyarankan agar Direksi dapat memacu kinerja Anak Perusahaan.
 - 2) Dewan Komisaris menyarankan agar jalannya pengelolaan dan pengembangan Anak Perusahaan dilakukan pengawasan yang baik.
- d. Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKAP Tahun 2024, Dewan Komisaris merekomendasikan hal-hal, berikut:
- 1) Untuk mendukung pencapaian target kinerja tahun 2024, agar diupayakan pendapatan yang berasal dari proyek dengan margin yang relatif tinggi dan perolehan kontrak-kontrak dengan prioritas pada kontrak yang bersifat 'recurring'
 - 6) *Efforts should be continuously made to collect on overdue receivables that have the potential to enhance the company's liquidity. If the situation permits, legal actions may be taken against non-cooperative debtors.*
 - 7) *The board of directors is instructed to promptly follow up on matters requiring attention as outlined in the report of "Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, and Partners" (RSM) and resolve the findings of the Supreme Audit Agency (BPK RI) that are still in the process of resolution.*
 - 8) *Ensure that the principles of good corporate governance are consistently applied across all aspects of Company business management.*
 - 9) *The distribution of Micro and Small Business Funding Program follows the principle of assisting small businesses and ensuring smooth loan repayment. Therefore, mentoring targets are prioritized within communities surrounding the working units, aiming to enhance community welfare and strengthen social relations.*
- b. *Related to Company Development:*
- 1) *The Board of Commissioners has discussed with the Board of Directors regarding the Board of Directors' plans in conducting Cooperation through SOEs synergies and with third parties.*
 - 2) *The Board of Commissioners has held a meeting with the INTI Trade Union to obtain information on the running of the company.*
 - 3) *The Board of Commissioners has held a meeting with the Internal Audit Group regarding the findings of the Internal Audit Group from 2015-2022 that have not been resolved.*
- c. *With regard to the development of Subsidiaries:*
- 1) *The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors can encourage the performance of Subsidiaries.*
 - 2) *The Board of Commissioners recommends that the management and development of Subsidiaries be carried out with good supervision.*
- d. *With regard to the implementation of the preparation of the 2024 Company Work Plan and Budget, the Board of Commissioners recommends the following:*
- 1) *To support the achievement of performance targets in 2024, efforts should be made to generate revenue from projects with relatively high margins and secure contracts with a priority on recurring contracts to ensure revenue*

untuk menjamin perolehan pendapatan dapat tercapai.

- 2) Target *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization* (EBITDA) positif yang ditargetkan pertama kali pada tahun 2024 agar benar-benar diupayakan pencapaiannya dengan memastikan capaian Kontrak/ Pendapatan dan pengendalian biaya sesuai RKAP tahun 2024.
- 3) Direksi agar terus melakukan upaya untuk mencari sumber pendanaan dengan cara-cara yang inkonvensional sepanjang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Kewajiban pembayaran utang yang telah direschedule sebagai produk pengadilan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) agar ditangani secara benar dan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan, sehingga tidak berpotensi menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.
- 5) Dampak ikutan dari keberhasilan PKPU seperti pengenaan pajak atas other comprehensive income yang diperoleh agar dimitigasi, sehingga tidak membebani cash flow perusahaan.
- 6) Agar ditingkatkan secara terus menerus upaya penagihan piutang khususnya piutang yang lama tidak tertagih (macet) yang nilainya material, sehingga dapat meningkatkan likuiditas perusahaan.
- 7) Program optimalisasi aset yang dilakukan dengan menyewakan space gedung kepada universitas-universitas yang berasal dari luar negeri agar dilaksanakan selaras dengan misi dan visi PT INTI.
- 8) Sejalan dengan pelaksanaan *Early Retirement Program* (ERP), agar dilakukan upaya rekrutmen sumber daya manusia (SDM) pengganti dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kinerja Perusahaan.
- 9) Terkait peningkatan sinergi bisnis dengan PT Danareksa dalam pengembangan proyek di kawasan industri, maka diharapkan dijalin komunikasi yang intensif diantara personil yang menangani, sehingga bila ada kendala langsung dapat dicarikan solusinya.
- 10) Anak atau cucu perusahaan, dan afiliasi yang sudah sudah berkinerja baik agar dipertahankan, dan terus mengupayakan mencari potensi-potensi kontrak yang dapat meningkatkan kinerja, sedangkan bagi yang masih rendah kinerjanya untuk di ambil upaya-upaya/mitigasi dini agar tidak membebani

targets are met.

- 2) The initial target of achieving positive *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization* (EBITDA) in 2024 should be pursued diligently by ensuring that Contract/ Revenue achievements and cost control align with the 2024 RKAP (Annual Work Plan and Budget).
- 3) The Board of Directors should continue efforts to seek funding from unconventional sources, as long as they comply with applicable regulations and laws.
- 4) The obligation to pay debts that have been rescheduled under the Postponement of Debt Payment Obligations court order should be handled correctly and executed according to the specified schedule, to avoid potential issues in the future.
- 5) The secondary effects of successful Postponement of Debt Payment Obligations, such as taxation on other comprehensive income obtained, should be mitigated to avoid burdening the company's cash flow.
- 6) Efforts to collect overdue receivables, especially long outstanding debts (non-performing), which are material in value, should be continuously improved to enhance the company's liquidity.
- 7) The asset optimization program, conducted by leasing building spaces to foreign universities, should be carried out in alignment with PT INTI's mission and vision.
- 8) Concurrent with the implementation of the Early Retirement Program (ERP), efforts should be made to recruit replacement human resources with qualifications that meet the company's needs, thereby supporting efforts to improve company performance.
- 9) Regarding the enhancement of business synergy with PT Danareksa in project development within industrial zones, intensive communication among personnel handling the project is expected to promptly address any challenges.
- 10) Subsidiaries and affiliates that have demonstrated good performance should be retained, with continued efforts to explore potential contracts that can enhance performance. Meanwhile, subsidiaries with lower performance should undergo early mitigation efforts to avoid burdening the parent

induk.

- 11) Penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan agar diprioritaskan pada lingkungan wilayah usaha Perusahaan, sehingga penyaluran dana tersebut dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

2. Meneliti dan menelaah Laporan Berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan, serta memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.

a. Meneliti dan menelaah Laporan Berkala dan Laporan Tahunan

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat-rapat untuk melakukan telaah atas Laporan Berkala dan Laporan Manajemen Tahunan dan sekaligus sebagai bahan Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengurusan dan pelaksanaan pengurusan perusahaan, serta pemberian nasihat kepada Direksi PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). Pelaksanaan telaah secara triwulanan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan I/2023 pada 18 April 2023.
- 2) Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan II/2023 pada 24 Juli 2023.
- 3) Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan III/2023 pada 25 Oktober 2023.

Berdasarkan hasil telaah terhadap Laporan Manajemen Berkala maupun Laporan Manajemen Tahunan, Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan Pemegang Saham, melalui :

- 1) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Nomor S-41/Dekom/INTI/V/2023 tertanggal 15 Mei 2023 tentang Tanggapan atas Kinerja Perusahaan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Periode 31 Maret 2023 (Triwulan I).
- 2) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Nomor S-59/DEKOM/INTI/8/2023 tertanggal 22 Agustus 2023 tentang Tanggapan atas Kinerja Perusahaan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT Industri Telekomunikasi

company.

- 11) The allocation of funds for Corporate Social Responsibility (CSR) should prioritize the local business environment, thereby enhancing the socio-economic conditions of the local community.

2. Researching and reviewing the Periodic Reports and Annual Reports prepared by the Board of Directors and signing the Annual Report, as well as providing explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the Annual Report, if requested.

a. Researching and reviewing Periodic Reports and Annual Reports

The Board of Commissioners holds meetings to review the Periodic Reports and Annual Management Reports as material for the Board of Commissioners to evaluate the management policies and implementation of the company's management, as well as provide advice to the Directors of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). The quarterly review is carried out as follows:

- 1) Discussion on the Quarter I/2023 Management Report on April 18, 2023.
- 2) Discussion of Quarter II/2023 Management Report on July 24, 2023.
- 3) Discussion of Quarter III/2023 Management Report on October 25, 2023.

Based on the results of a review of the Periodic Management Report and Annual Management Report, the Board of Commissioners has provided opinions and suggestions to the Board of Directors and Shareholders, through:

- 1) Letter of the Board of Commissioners to the the President Director of PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero), acting as the Power of Attorney of the Shareholder of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Number S-41/Dekom/INTI/V/2023 dated May 15, 2023, regarding Response to Company Performance and Supervisory Report of the Board of Commissioners of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) for the Period of March 31, 2023 (Quarter 1).
- 2) Letter of the Board of Commissioners to the the President Director of PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) as the Proxy of the Shareholder of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Number S-59/DEKOM/INTI/8/2023 dated August 22, 2023, regarding Response to Company Performance and Supervisory Report of the Board of



Indonesia (Persero) Periode 30 Juni 2023 (Triwulan II).

- 3) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Nomor S-72/DEKOM/INTI/11/2023 tertanggal 22 November 2023 tentang Tanggapan atas Kinerja Perusahaan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Periode 30 September 2023 (Triwulan III).

b. Menandatangani Laporan Tahunan.

Sebagai pelaksanaan kewajiban Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 67 ayat (1), seluruh anggota Dewan Komisaris telah menandatangani Laporan Manajemen Tahunan Tahun 2023 (*Audited*).

- c. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan. Dewan Komisaris telah memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan tahun 2023 sesuai dengan Surat Dewan Komisaris kepada PT Perusahaan Pengelola Aset selaku Kuasa Pemegang Saham PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Nomor S-27/DEKOM/INTI/06/2024 tertanggal 12 Juni 2024 tentang Tanggapan dan Rekomendasi Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).

3. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP

Untuk memandu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris sebagai bagian yang tak terpisahkan dari RKAP.

4. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS

Dewan Komisaris mengusulkan RUPS agar menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) "Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan" untuk melakukan General Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun Buku 2024, dengan pertimbangan sebagaimana surat Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Nomor S-31/DEKOM/INTI/VII/2024 tertanggal 4 Juli 2024 perihal Usulan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT INTI (Persero) dan Anak Perusahaan serta Pengelolaan

Commissioners of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) for the Period Ended June 30, 2023 (Quarter 2).

- 3) *Letter of the Board of Commissioners to the President Director of PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) as the Proxy of the Shareholder of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Number S-72/DEKOM/INTI/11/2023 dated November 22, 2023, regarding Response to Company Performance and Supervisory Report of the Board of Commissioners of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) for the Period Ended September 30, 2023 (Quarter 3).*

b. *Signing the Annual Report*

As the implementation of the obligations of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, specifically Article 67 Paragraph (1), all members of the Board of Commissioners have signed the 2023 Annual Management Report (Audited).

- c. *Providing explanations, opinions, and recommendations to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report. The Board of Commissioners has provided explanations, opinions, and recommendations to the General Meeting of Shareholders regarding the 2023 Annual Report in accordance with the Board of Commissioners' letter to PT Perusahaan Pengelola Aset as the Proxy Shareholder of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Number S-27/DEKOM/INTI/06/2024 dated June 12, 2024, concerning the Response and Recommendations of the Board of Commissioners on the Financial Statements for the 2023 Fiscal Year of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).*

3. Prepare an annual work program and include it in the Company Work Plan and Budget

To guide the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners has prepared the Work Plan and Budget for the Board of Commissioners as an integral part of the Company Work Plan and Budget.

4. Propose a Public Accountant to the GMS

The Board of Commissioners proposes that the General Meeting of Shareholders re-appoint the Public Accounting Firm "Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners" to conduct a General Audit of the Financial Statements for Financial Year 2024 and also Environmental and Social Responsibility Financial Statements for Financial Year 2024, taking into account the Board of Commissioners' letter to Shareholders S-31/DEKOM/INTI/VII/2024 dated July 4, 2024 regarding Proposal for Public Accountant Office as Independent Auditor for the Consolidated Financial Statements of PT INTI (Persero) and Subsidiaries,

Program PUMK Tahun Buku 2024.

and Management of the Micro and Small Business Funding Program for the 2024 Fiscal Year.

5. Menyusun risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan risalahnya

Dalam Rapat Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan pembahasan atas kinerja berkala bulanan, berdasarkan laporan kinerja bulanan. Direksi memaparkan presentasi kinerja bulanan, beserta hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari Dewan Komisaris. Dalam rapat, Dewan Komisaris menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, saran dan masukan kepada Direksi. Direksi menjawab langsung pertanyaan tersebut dan menyajikan data pendukungnya. Terhadap hal-hal yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, setelah dilakukan pembahasan dalam rapat, ditindaklanjuti dengan adanya surat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat baik Rapat Internal Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris selain secara fisik juga melalui Zoom Teleconference. Selain itu, Dewan Komisaris juga menghadiri rapat dengan Kementerian BUMN terkait RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023 dan RUPS Pengesahan Laoran Keuangan Tahun Buku 2022, di samping itu juga menghadiri sosialisasi Peraturan Menteri BUMN dan Monitoring ke Pabrik, serta melakukan wawancara calon Direksi/Komisaris Anak Perusahaan.

Dalam kegiatan rapat rutinitas Dewan Komisaris, realisasi kehadiran selama Tahun 2023 secara kuantitatif dapat diuraikan sebagai berikut:

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Jumlah Kehadiran <i>Total Attendance</i>	Persentase <i>Percentage</i>	Keterangan <i>Description</i>
Unggul Priyanto	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	24	100%	
Trisno Hendradi	Komisaris <i>Commissioner</i>	24	100%	
Rahmadi Murwanto	Komisaris <i>Commissioner</i>	24	100%	
Yanuar Rokhmad Madyantoro	Komisaris <i>Commissioner</i>	24	100%	

6. Memantau dan memastikan tata kelola perusahaan diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) pada seluruh

5. Prepare the minutes of the Board of Commissioners meeting and store the minutes

In the Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners, there is a discussion on the monthly periodic performance, based on the monthly performance report. The Board of Directors presents monthly performance presentations, along with matters that need attention from the Board of Commissioners. In the meeting, the Board of Commissioners conveying questions, suggestions and perceptions to the Board of Directors. On matters that require the approval of the Board of Commissioners, after discussion in the meeting, it is followed up with a letter of approval from the Board of Commissioners.

During the year 2023, the Board of Commissioners held meetings including Internal Board of Commissioners Meetings and Joint Meetings with the Board of Directors, both physically and via Zoom Teleconference. Additionally, the Board of Commissioners attended meetings with the Ministry of State-Owned Enterprises related to the Approval of the 2023 Company Work Plan and Budget and the Approval of the 2022 Financial Statements, as well as participated in the socialization of Ministry of SOEs Regulations and Factory Monitoring, and conducted interviews with candidates for Directors/Commissioners of Subsidiaries.

In the routine meeting activities of the Board of Commissioners, the realization of attendance during 2023 can be described quantitatively as follows:

6. Monitor and ensure that corporate governance is implemented effectively and sustainably.

To ensure the implementation of GCG principles in every business activity of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) at all levels or levels of the organization, the

tingkatan atau jenjang organisasi, Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap terlaksananya tugas Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi diantara anggota Dewan Komisaris dan antara Dewan Komisaris dengan Direksi.
- b. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Secara internal, dalam pelaksanaan pengawasan kinerja manajemen, Dewan Komisaris menugaskan Komite Audit untuk melakukan telaah atas laporan kinerja yang kemudian mengundang Komite Audit untuk membahas bersama berdasarkan hasil penelaahan yang disampaikan oleh Komite Audit. Komite Audit telah melakukan evaluasi atas kinerja berkala, melakukan analisis, serta menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan penjelasan dari Direksi.

Dewan Komisaris juga membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, di mana salah satu tugasnya menetapkan kriteria pemilihan calon Direksi, mengusulkan nominated talent (*Board of Directors minus-1*) dan mengusulkan besaran remunerasi Direksi.

Board of Commissioners carries out its duties and responsibilities, as follows:

- a. *The Board of Commissioners is responsible for the effective and efficient implementation of the duties of the Board of Commissioners regulated in the Articles of Association as well as the maintenance of effective communication between members of the Board of Commissioners and between the Board of Commissioners and the Board of Directors.*
- b. *Conducting other obligations in the context of supervisory duties and providing advice, as long as they do not conflict with the laws and regulations, articles of association, and/or GMS decisions.*

Internally, in the implementation of management performance monitoring, the Board of Commissioners assigns the Audit Committee to review the performance report which then invites the Audit Committee to discuss together based on the results of the review submitted by the Audit Committee. The Audit Committee has conducted periodic performance evaluations, conducted analysis, and conveyed several matters that need attention and explanation from the Board of Directors.

The Board of Commissioners also formed the Nomination and Remuneration Committee, which one of its duties is to determine the criteria for selecting candidates for the Board of Directors, to propose nominated talents (Board of Directors minus-1) and to propose the amount of remuneration for the Board of Directors.

7. Kinerja Perusahaan Tahun Buku 2023

Gambaran kinerja tahun 2023 setelah dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, adalah sebagai berikut:

7. Company Performance for Fiscal Year 2023

The description of performance in 2023 after an audit by the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners, is as follows:

Uraian Description	2022	2023		% Audit 2023 Terhadap % Audit 2023 Toward	
	Audited	RKAP Company Work Plan and Budget	Audited	Audited 2022	RKAP 2023 Company Work Plan and Budget 2023
Pendapatan Sales	309,029	345,557	503,680	162.99	145.76
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(267,248)	(306,532)	(459,172)	171.82	149.80
Pendapatan Laba/(Rugi) Kotor Gross Profit	41,781	39,025	44,508	106.52	114.05
EBITDA	(13,346)	(32,208)	(41,257)	309.13	128.10
Beban Usaha Operating Expenses	(66,986)	(81,900)	(92,783)	138.51	113.29
Rugi Usaha Operating Loss	25,204	(42,876)	(48,275)	191.53	112.59

Beban Pendanaan <i>Financing Expenses</i>	54,112	(58,402)	(48,363)	90.30	83.67
Laba/(Rugi) sebelum Pajak <i>Profit (Loss) Before Tax</i>	(79,317)	(101,277)	(97,138)	122.47	95.91
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan <i>Profit (Loss) Current Year</i>	(82,234)	(99,877)	(96,280)	117.08	96.40
Aset Lancar <i>Current Assets</i>	281,623	160,453	352,945	125.33	219.97
Total Liabilitas <i>Total Liability</i>	1,809,770	853,180	1,974,397	109.10	231.42
Total Ekuitas <i>Total Equity</i>	(625,502)	293,356	(716,563)	114.56	(244.26)
Total Aset <i>Total Asset</i>	1,184,268	1,146,536	1,257,834	106.21	109.71
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode <i>Cash on Hand and in Banks at Beginning of Year</i>	37,861	30,330	27,771	73.35	91.56
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode <i>Cash on Hand and in Banks at Ending of Year</i>	27,771	8,041	25,051	90.21	311.56
Total Investasi <i>Total Investments</i>	1,365	77,915	3,826	280.28	4.91
Skor Tingkat Kesehatan <i>Health Level Score</i>	34,6 (KS)	525 (KS)	43,1 (KS)		

- a. Secara umum realisasi kinerja tahun 2023 perusahaan mengalami kerugian yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan dan realisasi kinerja tahun 2022, namun di sisi pendapatan lebih baik atau mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan maupun realisasi kinerja tahun 2022.
- b. Realisasi Pendapatan tahun 2023 mencapai 145,76% dari RKAP dan 162,99% dibandingkan realisasi tahun 2022. Sedangkan Beban Pokok Penjualan mencapai 149,80% dari RKAP dan 171,82% dari realisasi tahun 2022.
- c. EBITDA sebesar negatif Rp. 41,26 miliar atau lebih rendah dari target RKA yang ditetapkan dan realisasi tahun 2022 masing-masing sebesar negatif Rp. 32,21 miliar dan negatif Rp. 13,35 miliar.
- d. Realisasi Rugi Sebelum Pajak Rp. 97,14 miliar menurun kerugiannya dibandingkan RKAP 2023 yang direncanakan rugi sebesar Rp 101,28 miliar, namun meningkat kerugiannya dibandingkan realisasi 2022 yang Rugi sebesar Rp. 79,32 miliar.
- e. Total Aset per 31 Desember 2023 ditutup dengan saldo sebesar Rp 1.257,83 miliar dengan total liabilitas sebesar Rp 1.974,40 miliar (156,97%) dan Total Ekuitas sebesar negatif Rp 716,56 miliar (-56,97%). Total Aset mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sedangkan negatif Ekuitas juga semakin besar diakibatkan Akumulasi Kerugian yang semakin meningkat.
- f. Skor Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2023

- a. In general, the company's performance in 2023 showed a higher loss compared to the set target and the performance in 2022. However, in terms of revenue, it was better or showed an increase compared to both the set target and the performance in 2022.
- b. Revenue realization in 2023 reached 145.76% of the Company Work Plan and Budget 162.99% compared to the realization in 2022. Meanwhile, the Cost of Goods Sold reached 149.80% of the Company Work Plan and Budget and 171.82% of the realization in 2022.
- c. EBITDA was negative Rp. 41.26 billion, which is lower than the RKA target and the 2022 realization, each of which were negative Rp. 32.21 billion and negative Rp. 13.35 billion, respectively.
- d. The realization of Loss Before Tax was Rp. 97.14 billion, which was lower than the 2023 Company Work Plan and Budget planned loss of Rp 101.28 billion. However, it increased compared to the 2022 realization, which was a Loss of Rp. 79.32 billion.
- e. Total Assets as of December 31, 2023, closed with a balance of Rp 1,257.83 billion, with Total Liabilities of Rp 1,974.40 billion (156.97%) and Total Equity of negative Rp 716.56 billion (-56.97%). Total assets increased from the previous year, while negative equity also grew larger due to the increasing Accumulation of Losses.
- f. The Company's Health Level Score for 2023 was 43.1

sebesar 43,1 (Kurang Sehat – BB) meningkat dibandingkan tahun 2022 yang 34,6 (Kurang Sehat – B).

- g. Realisasi Investasi tahun 2023 sebesar Rp 3,83 miliar, mengalami peningkatan 180,28% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022.
- h. Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2023 tercapai dengan nilai skor sebesar 67,25 terjadi penurunan dibandingkan nilai skor pada tahun 2022 yang sebesar 74,25.

8. Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2023

Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini:

(Less Healthy - BB), an improvement compared to 2022, which was 34.6 (Less Healthy - B).

- g. The Realization of Investment in 2023 was Rp 3.83 billion, an increase of 180.28% compared to the same period in 2022.
- h. The Key Performance Indicator (KPI) for 2023 was achieved with a score of 67.25, a decrease compared to the 2022 score of 74.25.

8. Key Performance Indicators (KPI) in 2023

Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners in 2023 are presented in the table below:

No.	Program Kerja <i>Work Program</i>	Keterangan <i>Description</i>	RKAP		Realisasi <i>Realization</i>	
			KPI	Bobot <i>Percentage (%)</i>	KPI	Bobot <i>Percentage (%)</i>
1	2	3	5	6	6	7
I	Aspek Pengawasan dan Pengarahan <i>Supervision and Direction Aspects</i>			50.00		47.50
1	Review atau Analisis Kinerja Perusahaan <i>Company performance review/analysis</i>		4	Dokumen	10.00	4 Dokumen 10
2	Rapat Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Meeting</i>	Tidak termasuk keikutsertaan Dewan Komisaris dalam Rapat dengan Pemegang Saham <i>Does not include the participation of the Board of Commissioners in meetings with Shareholders</i>				
	• Jumlah Rapat Gabungan dengan Direksi <i>Cost of Revenues</i>		12	kali	5.00	12 kali 5.00
	• Jumlah Rapat Internal <i>Number of Internal Meetings</i>		12	kali	5.00	12 kali 5.00
	• Kehadiran Rapat <i>Meeting Attendance</i>		100	%	5	100 % 5.00
3	Melakukan pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi terhadap kebijakan atau rancangan sistem pengendalian intern, kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan, kebijakan tentang sistem teknologi informasi, kebijakan pengadaan, kebijakan mutu dan pelayanan, kebijakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Corporate Social Responsibility (CSR), penyampaian laporan kepada para pemegang saham beserta pelaksanaannya secara lisan yang tertuang dalam notulen rapat atau saran tertulis. <i>Supervise and provide advice to the Board of Directors on policies or designs of internal control systems, policies and implementation of company risk management, policies on information technology systems, procurement policies, quality and service policies, Partnerships and Community Development Program and Corporate Social Responsibility (CSR) policies, submission of reports to shareholders and their implementation in a timely manner verbally contained in the minutes of the meeting or written suggestions.</i>		4	Dokumen	750	4 Dokumen 7.50

4	Membuat rencana tindak lanjut atas <i>area of improvement</i> yang menjadi kewenangan Komisaris dan melakukan <i>monitoring</i> atas tindak lanjut hasil/temuan audit internal/eksternal dan melakukan pengawasan efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal <i>Monitoring the follow-up to the results or findings of internal or external audits and supervising the effectiveness of the implementation of external audits and internal audits</i>	Komite Audit, Dewan Komisaris <i>Audit Committee, Board of Commissioners</i>	2	Dokumen	7.50	2	Dokumen	7.50
5	Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian Pabrik <i>Factory Monitoring, Supervision and Control</i>	Prioritas sektor pemasaran <i>Marketing sector priorities</i>	2	Dokumen	5.00	1	Dokumen	2.50
6	Melakukan pengawasan dan kajian atas kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap perjanjian dengan pihak ketiga dan melakukan pemantauan atas penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. <i>Supervise and review the Board of Directors' compliance with applicable laws and regulations and agreements with third parties and monitor the implementation of good corporate governance principles.</i>		2	Dokumen	5.00	2	Dokumen	5.00
II Aspek Pelaporan <i>Reporting Aspect</i>					35.00			35.00
1	Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan <i>Develop and deliver annual work programs</i>	Akhir tahun <i>End of year</i>	1	kali	5.00	1	kali	5.00
2	Menyampaikan laporan/pendapat/saran kepada Pemegang Saham/RUPS <i>Conveying reports/opinions/suggestions to Shareholders/GMS.</i>		2	kali	20.00	2	kali	20.00
3	Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris <i>Submitting reports on the supervisory duties of the Board of Commissioners.</i>		1	kali	10.00	1	kali	10.00
III Aspek Dinamis <i>Dynamic Aspect</i>					15.00			12.50
1	Peningkatan kompetensi/kapabilitas/pelatihan <i>Enhancement of competence/capability/training</i>		2	kali	5.00	1	kal	2.50
2	Melakukan penunjukan/penentuan calon Kantor Akuntan Publik dan anggarannya <i>Appointing/determining Public Accounting Firm candidates and their budgets.</i>		1	kali	5.00	1	kali	5.00
3	Melakukan pembahasan transaksi atau tindakan yang merupakan kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai Anggaran Dasar <i>Discussing transactions or actions that are the authority of the Board of Commissioners or GMS in accordance with the Articles of Association.</i>		7	hari kerja	1.25	7	hari kerja	1.25
4	Melakukan telaah dan atau persetujuan atas rancangan KAP yang diajukan oleh Direksi dan/atau melakukan telaah dan/atau persetujuan atas rancangan Rencana Jangka Panjang (RJPP) <i>Reviewing and/or approving the draft of a public accounting firm submitted by the Board of Directors and/or reviewing and/or approving the draft of the Company's Long-Term Plan.</i>		1	kali	1.25	1	kali	1.25



5	Melakukan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris <i>Reviewing complaints related to the company received by the Board of Commissioners</i>	14	hari kerja	1.25	14	hari kerja	1.25
6	Melakukan telaah dan /atau pengusulan remunerasi Direksi <i>Reviewing and/or proposing the remuneration of the Board of Directors</i>	1	kali	1.25	1	kali	1.25
TOTAL (I-III)				100,00	95.00		

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Criteria for Members of The Board of Commissioners

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia (SDM) BUMN adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Formal

Persyaratan formal anggota Dewan Komisaris, yaitu:

- Orang perseorangan.
- Cakap melakukan perbuatan hukum.
- Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
- Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

2. Persyaratan Materiil

Persyaratan materiil anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yaitu:

- Integritas
- Dedikasi
- Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
- Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero/Perum dimana yang bersangkutan dicalonkan.
- Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number PER-03/MBU/03/2023 concerning the Organization and Human Resources (HR) of SOEs, it is as follows:

1. Formal Requirements

Formal requirements for members of the Board of Commissioners, namely:

- Individuals.*
- Can carry out legal actions.*
- Never been declared bankrupt within 5 (five) years before nomination.*
- Never been a member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners/Supervisory Board who was found guilty of causing a SOEs, Subsidiary, and/or other business entity to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to appointment.*
- Never been convicted of committing a criminal act that is detrimental to the finances of the State, SOEs, Subsidiaries, other business entities, and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to appointment.*

2. Material Requirements

The material requirements of the members of the Board of Commissioners and the Supervisory Board are:

- Integrity*
- Dedication*
- Understand the company's management problems relating to one of the management functions.*
- Have adequate knowledge in the business sector of the Perseroan or Perum where the relevant person is nominated.*
- Can provide sufficient time to carry out their duties.*

3. Persyaratan Lain

Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, yaitu:

- a. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah.
- c. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/ Anak Perusahaan yang bersangkutan
- d. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada BUMN atau Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode
- e. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris.
- f. Sehat jasmani dan rohani, yang tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit.
- g. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir

3. Other Requirements

Other requirements are members of the Board of Commissioners and the Supervisory Board, namely:

- a. Not a member of a political party, a candidate for the legislature, and/or a member of the legislature in the House of Representatives, the Regional Representative Council, the Provincial Regional House of Representatives, and the Regency/City Regional House of Representatives.
- b. Not a candidate for Regional Head/Deputy Regional Head and/or Regional Head/Deputy Regional Head, including acting regional heads/deputy regional heads.
- c. Not currently holding a position that has the potential to create a conflict of interest with the relevant SOE/ Subsidiary.
- d. Not serving as a member of the Board of Commissioners or the Supervisory Board at an SOEs or the Board of Commissioners at the relevant Subsidiary for more than 2 (two) periods.
- e. Not currently holding a position that, according to the law, is prohibited from being held concurrently with the position of a member of the Board of Commissioners.
- f. Physically and mentally healthy, not suffering from any illness that may hinder the performance of duties as a member of the Board of Commissioners or Supervisory Board, as evidenced by a health certificate from a hospital.
- g. Possesses a Taxpayer Identification Number and has fulfilled tax obligations for the last 2 (two) years.

“

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dilaksanakan oleh Kementerian BUMN sebagai Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham BUMN.

Capability and Compliance Assessment was carried out by the Ministry of SOEs as a Government Representative as a SOEs Shareholder.

”



Komposisi Dewan Komisaris

Composition of The Board of Commissioners

Pada tahun 2023 komposisi Dewan Komisaris PT INTI (Persero) adalah sebagai berikut:

In 2023 the composition of the Board of Commissioners of PT INTI (Persero) is as follows:

No.	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Dasar Pengangkatan <i>Appointment Ratification</i>
1	Unggul Priyanto	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Surat Keputusan Menteri <i>Ministerial Decree</i> SK-188/MBU/06/2021 tanggal/ <i>dated</i> 04 Juni 2021
2	Rahmadi Murwanto	Komisaris <i>Commissioner</i>	Surat Keputusan Menteri <i>Ministerial Decree</i> SK-318/MBU/10/2020 tanggal/ <i>dated</i> 8 Oktober 2020
3	Trisno Hendradi	Komisaris <i>Commissioner</i>	Surat Keputusan Menteri <i>Ministerial Decree</i> SK-318/MBU/10/2020 tanggal/ <i>dated</i> 8 Oktober 2020
4	Yanuar Rokhmad Madyantoro	Komisaris <i>Commissioner</i>	Surat Keputusan Menteri <i>Ministerial Decree</i> SK-233/MBU/10/2022 tanggal/ <i>dated</i> 21 Oktober 2022
5	Suripto	Sekretaris Dewan Komisaris <i>Secretary of the Board of Commissioners</i>	Keputusan Dewan Komisaris <i>Decree of Board of Commissioners</i> KEP-49/DK-/INTI/VI/2017 tanggal/ <i>dated</i> 1 November 2017
6	Dian Agustina	Staf Sekretaris Dewan Komisaris <i>Staff Secretary to the Board of Commissioners</i>	Keputusan Dewan Komisaris <i>Decree of Board of Commissioners</i> KEP-49/DK-/INTI/XI/2017 tanggal/ <i>dated</i> 1 November 2017

Keberagaman Anggota Dewan Komisaris

Diversity of The Board of Commissioners Composition

Perusahaan meyakini bahwa keragaman keahlian, pengalaman, dan latar belakang pendidikan sangat diperlukan untuk efektivitas pelayanan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengurusan Perusahaan oleh Direksi.

The Company believes that the diversity of expertise, experience, and educational background is indispensable for the effectiveness of the supervisory services of the Board of Commissioners and the management of the Company by the Board of Directors.

Dewan Komisaris dan Direksi PT INTI (Persero) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan memiliki komposisi yang cukup beragam, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian, serta

The Board of Commissioners and Directors of PT INTI (Persero), appointed based on the Resolution of the General Meeting of Shareholders with consideration of the company's needs and complexity, has a diverse composition in terms of age, educational background, expertise, and experience required in

pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Badan Umum Milik Negara (BUMN) Nomor PER-03/MBU/03/2023 yang menyatakan bahwa sumber calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat berasal dari berbagai institusi berikut dengan ketentuan-ketentuannya.

carrying out their duties and responsibilities. This aligns with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number PER-03/MBU/03/2023, which states that candidates for the Board of Commissioners and Directors can come from various institutions, subject to specific requirements.

Susunan dan keberagaman komposisi Dewan Komisaris Perseroan tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, dan usia, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

The composition and diversity of the composition of the Company's Board of Commissioners is reflected in education, work experience, and age, as can be seen in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Unggul Priyanto	Komisaris Utama President Commissioner	Malang, 30 September 1958 Malang, September 30, 1958	Pria Male	- S1 Teknik Kimia Bachelor of Chemical Engineering - S2 Chemical Engineering Master of Chemical Engineering - S3 Electronic & Material Doctorate in Electronics & Materials	- Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Head of the Agency for the Assessment and Application of Technology - Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material Deputy for Information Technology, Energy and Materials - Kuasa Pengguna Anggaran Budget User Authority - Direktur Pusat Teknologi Sumberdaya Energi Director of the Center for Energy Resources Technology
Rahmadi Murwanto	Anggota Dewan Komisaris Member of the Board of Commissioners	Metro, 13 Maret 1970 Metro, March 13, 1970	Pria Male	- D3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara D3 of State Accounting College - D4 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara D4 of State Accounting College - Master of Business Administration Master of Accountancy - PhD	- Pelaksana dan Asisten Dosen Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Executive and Assistant Lecturer of the State Accounting College - Business Analyst di Amerika Serikat Business Analyst in United State of America - Direktur Departemen Keuangan Director of the Ministry of Finance - Kepala Bidang Menteri Keuangan Head of the Ministry of Finance - Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Head of the Organization and Administration Section of the Secretariat of the Financial Education and Training Agency - Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Director of the State Accounting College
Trisno Hendradi	Anggota Dewan Komisaris Member of the Board of Commissioners	Magelang, 14 Oktober 1961 Magelang, October 14, 1961	Pria Male	- Akademi Angkatan Udara Air Force Academy - Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara Air Force Unit Command School - Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara Air Force Command and Staff College - Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Indonesian Armed Forces Command and Staff College - Lembaga Ketahanan Nasional National Defense Institute	- Kepala Sekretariat Militer Presiden Head of the Presidential Military Secretariat - Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Udara (Kodiklatau) Deputy Commander of the Air Force Doctrine Development, Education and Training Command



Yanuar Rokhmad Madyantoro	Anggota Dewan Komisaris <i>Member of the Board of Commissioners</i>	Semarang, 6 September 1972 <i>Semarang, September 6, 1972</i>	Pria <i>Male</i>	- Sarjana S1 Sains Teknik Kimia dari Universitas Purdue - West Lafayette, Indiana-Amerika Serikat, 1996 <i>Bachelor of Science in Chemical Engineering from Purdue University - West Lafayette, Indiana- United State of AmericaS, 1985</i> - MM Executive S2 dari Prasetiya Mulya Business School, Jakarta, 2006 <i>MM Executive S2 from Prasetiya Mulya Business School, Jakarta, 2006</i>	<i>Executive Vice President / Kepala Divisi Restrukturisasi dan Revitalisasi 3 PT Perusahaan Pengelola Aset</i> <i>Executive Vice President / Head of Restructuring and Revitalization Division 3 PT Perusahaan Pengelola Aset</i> - Komisaris PT Istaka Karya (Persero) <i>Commissioner of PT Istaka Karya (Persero)</i> - Vice President PT Mandiri Sekuritas <i>Vice President of PT Mandiri Sekuritas</i> - Direktur anak usaha PT Trisurya Lintas Energi <i>Director of PT Trisurya Lintas Energi subsidiary</i> - Komite Audit PT Gema Graha Sarana Tbk <i>The Audit Committee of PT Gema Graha Sarana Tbk</i> - PT Sumber Segara Primadaya - PT Geo Dipa Energi

Rapat Dewan Komisaris

Meeting of The Board of Commissioners

Untuk mengambil segala keputusan yang dipandang perlu, Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, di mana dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak

Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan. Risalah rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh Komisaris yang hadir dalam rapat.

To make any decisions deemed necessary, the Board of Commissioners holds the Meeting of the Board of Commissioners. The decision can also be taken outside the Meetings of the Board of Commissioners as long as the Board of Commissioners agrees on how and materials to be decided.

The Board of Commissioners shall hold a meeting at least once every month, at which the Board of Commissioners may invite the Board of Directors. The Board of Commissioners can be convened at any time at the request of 1 (one) or several members of the Board of Commissioners, the Board of Directors request, or upon written at the demand of Shareholders mentioning the things that will be discussed.

All board meetings are chaired by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent or unavailable, the Meeting of the Board of Commissioners is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner.

The Meeting of the Board of Commissioners is valid and may take binding decisions if attended or represented by more than 1/2 (a half) the number of members of the Board of Commissioners.

All decisions taken by the Meeting of the Board of Commissioners are through consensus decision-making. If the consensus is not reached, then the decision of the Meeting of the Board of Commissioners is taken by a majority vote.

In each Meeting of the Board of Commissioners, minutes of meetings must be made, containing things that are discussed and decided. Minutes of the meeting were signed by the Chairman of the Meeting and all Commissioners present at the meeting.

Organ Pendukung dan Komite-Komite di Bawah Komisaris

Supporting Organ and Committees Under The Board of Commissioners

Untuk mendukung fungsi pengawasan, Dewan Komisaris mempunyai 2 (dua) Komite Penunjang Dewan Komisaris, yakni Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi, serta didukung oleh fungsi Sekretaris Dewan Komisaris. Setiap Komite Penunjang Dewan Komisaris diketuai oleh anggota Dewan Komisaris dan tugas serta tanggung jawab masing-masing Komite tercantum dalam masing-masing pedoman kerja (charter).

Adapun dasar hukum pembentukan organ penunjang Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia (SDM) BUMN.

Dalam setiap Rapat Komite Penunjang Dewan Komisaris, setiap anggota diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat profesionalnya. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat termasuk pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*), dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan diketahui oleh Ketua dan Wakil Ketua Komite, sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat.

Seluruh Organ Pendukung Dewan Komisaris wajib membuat laporan pada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diterima disertai dengan rekomendasi jika diperlukan. Laporan tersebut ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komite.

Sekretaris Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: PER-3/MBU/03/2023 di mana Dewan Komisaris dapat mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris, maka Sekretaris Komisaris PT INTI (Persero) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisaris PT INTI (Persero) Nomor SK-54a/DK-INTI/11/2022 tertanggal 2 November 2022 dan dijabat oleh Suripto.

Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, bahan rapat, dan risalah rapat Dewan Komisaris.
2. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris.
3. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran dan Rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris.

To support its supervisory function, the Board of Commissioners has 2 (two) Supporting Committees for the BOC, namely the Audit Committee, the Good Corporate Governance, Nomination & Remuneration Committee, and the Risk Management Committee and supported by the function of the Secretary to the Board of Commissioners. Each the Board of Commissioners Supporting Committee is chaired by a member of the the Board of Commissioners, and the duties and responsibilities of each committee are listed in their respective work guidelines (charter).

The legal basis for the formation of the supporting organs for the the Board of Commissioners refers to State-Owned Enterprises (SOEs) Minister's Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 regarding the Organization and Human Resources (HR) of SOEs.

In every Board of Commissioners Supporting Committee's Meeting, each member of the Committee was given the freedom to express their professional opinion. The decision of the meeting is made based on consensus through deliberation. Everything discussed and decided in the meeting, including dissenting opinions, stated in the Minutes of Meeting, signed by all committee members who were present and known by the Chairman and Vice-Chairman of the Committee, as valid evidence for decisions taken at the meeting.

All the supporting Organs of the Board of Commissioners shall prepare a report to the BOC for each assignment received, accompanied by a recommendation if necessary. The report is signed by the Chairman, Vice-Chairman, and Committee member.

Secretary to the Board of Commissioners

In accordance with the Regulation of Ministry of State Owned Enterprises (SOEs) Nomor: PER-3/MBU/03/2023 that the Board of Commissioners can appoint the Secretary of the Board of Commissioners, so the Secretary of Board of Commissioners of PT INTI (Persero) was appointed by the Decree of Board of Commissioners of PT PT INTI (Persero) Number SK-54a/DK-INTI/11/2022 dated November 2, 2022 and chaired by Suripto.

Secretary of Board of Commissioners has the following tasks:

1. *To prepare meetings, meeting materials and minutes of meetings of the Board of Commissioners.*
2. *To administer Board of Commissioners documents.*
3. *To prepare drafts of Work and Budget Plan and Reports of Board of Commissioners.*

4. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG). 5. Memberikan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau apabila diminta. 6. Mengkoordinasikan anggota Komite jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris. 7. Menjadi penghubung (<i>liaison officer</i>) Dewan Komisaris dengan pihak luar. 8. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris	4. To ensure that the Board of Commissioners complies to regulations and applies <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) principles. 5. To provide information needed by the Board of Commissioners regularly and/or upon request. 6. To coordinate Committee members if needed, to facilitate the tasks of the Board of Commissioners. 7. To play the role of <i>liaison officer</i> between the Board of Commissioners and external parties. 8. To implement other tasks assigned by the Board of Commissioners.

Pelatihan Bagi Dewan Komisaris

Training for The Board of Commissioners

Pada tahun 2023, hanya Komisaris Utama yang mengikuti pelatihan. Data pelatihan yang diikuti oleh Komisaris Utama PT INTI (Persero) ditampilkan pada tabel berikut:

In 2023, only the President Commissioner participated in the training. The training data attended by the President Commissioner of PT INTI (Persero) is shown in the following table:

Tanggal <i>Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Topik <i>Topic</i>	Lokasi <i>Location</i>
Kamis, 14 September 2023 <i>Thursday, September 14, 2023</i>	Deloitte Governance Forum.	Strategi Penerapan Manajemen Risiko <i>Risk Management Implementation Strategy</i>	OnFive – Grand Hyatt Jakarta

Uraian Tentang Direksi

Description on Board of Directors

Direksi merupakan Organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengelolaan PT INTI (Persero) serta melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pertanggungjawaban Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) Direktur Utama dan 2 (dua) Direktur. Seluruh Direksi berdomisili di Indonesia. Direksi diangkat dalam RUPS, dengan periode jabatan masing-masing anggota selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan RUPS.

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, meninggal dunia, diberhentikan oleh Dewan Komisaris, atau berdasarkan keputusan RUPS. Pengangkatan Direksi telah melalui proses fit & proper test sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan GCG. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai.

The Board of Directors is a Company Organ with collective duties and responsibilities for managing PT INTI (Persero) and implementing Good Corporate Governance (GCG) at all organization levels. In carrying out the tasks, the Directors are responsible to the General Meeting of Shareholders (GMS). Their responsibility to General Meeting of Shareholders (GMS) embodies the accountability of corporate management under Good Corporate Governance (GCG) principles.

The Board of Directors consists of 3 (three) people, namely 1 (one) President Director and 2 (two) Directors. All Directors domiciled in Indonesia. They are inaugurated in GMS, with tenure of each member for 5 (five) years, and can be re-promoted according to GMS' decision.

The Directors' tenure will end when they resign, no longer qualified, pass away, or terminated by the Board of Commissioners, or based on GMS' decision. The Board of Directors' promotions has gone through the fit & proper test process according to the applicable regulations and GCG principles. All members of Board of Directors have adequate integrity, competence, and reputation.

Komposisi Direksi

The Composition of The Board of Directors

Pada tahun 2023 tidak terjadi perubahan pada komposisi Direksi PT INTI (Persero) dan dapat diuraikan dalam tabel berikut:

In 2023, there were no changes to the composition of the Board of Directors of PT INTI (Persero) and this can be described in the following table:



No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Ratification
1	Edi Witjara	Direktur Utama President Director	Surat Keputusan Menteri Ministerial Decree SK-143/MBU/07/2022 Tanggal 8 Juli 2022 Dated July 8, 2022
2	Tantang Yudha Santoso	Direktur Keuangan, SDM, Hukum, dan Manajemen Risiko Financial, Human Capital, Legal, and Risk Management Director	Surat Keputusan Menteri Ministerial Decree SK-256/MBU/11/2022 Tanggal 14 November 2022 Dated November 14, 2022
3	Ahmad Taufik	Direktur Operasi Operation Director	Surat Keputusan Menteri Ministerial Decree SK-256/MBU/11/2022 Tanggal 14 November 2022 Dated November 14, 2022

Keberagaman Anggota Direksi

Diversity of The Board of Directors Composition

Perusahaan meyakini bahwa keragaman keahlian, pengalaman, dan latar belakang pendidikan sangat diperlukan untuk efektivitas pelayanan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengelolaan Perseroan oleh Direksi.

Dewan Komisaris dan Direksi PT INTI (Persero) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan, memiliki komposisi yang cukup beragam, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian, serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-02/MBU/02/2015 untuk Dewan Komisaris dan PER-11/MBU/07/2021 untuk Direksi yang menyatakan bahwa sumber calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat berasal dari berbagai institusi berikut dengan ketentuan-ketentuannya.

Susunan dan keberagaman komposisi Direksi Perseroan tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, dan usia, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

The Company believes the diversity of expertise, experience, and educational background is indispensable for the effectiveness of the supervisory services of the Board of Commissioners and the management of the Company by the Board of Directors.

The Board of Commissioners and the Board of Directors of PT INTI (Persero) appointed by the General Meeting of Shareholders' resolutions, taking into consideration the needs and complexities of the Company, has considerable composition based on age, educational background, expertise and experience required in the performance of its duties and responsibilities. This is in line with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number PER-02/MBU/02/2015 for the Board of Commissioners and PER-11/MBU/07/2021 for the Board of Directors stating that the source of the candidate members of the Board of Commissioners and the Board of Directors may come from various institutions and the conditions.

The composition and diversity of the composition of the Company's Board of Directors is reflected in education, work experience, and age, as can be seen in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Edi Witjara	Direktur Utama President Director	Kediri, 17 November 1972 <i>Kediri, November 17, 1972</i>	Pria Male	- Doktor Strategi Bisnis <i>Doctor of Business Strategic</i> - Master Hukum Bisnis <i>Master of Business Law</i> - Sarjana Teknik Elektro <i>Bachelor of Electrical Engineering</i> - Certified Management Accountant (CMA)	- Direktur <i>Enterprise & Business Service</i> PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk. <i>Director of Enterprise & Business Service, PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk.</i> - Penasehat Senior Kantor Staf Presiden Republik Indonesia <i>Senior Advisor of Executive Office of the President of the Republic of Indonesia</i> - Komisaris Utama PT Telkom Satelit Indonesia <i>President Commissioner of PT Telkom Satelit Indonesia</i> - Komisaris Utama PT PINS Indonesia <i>President Commissioner of PT PINS Indonesia</i> - Komisaris Utama PT Multimedia Nusantara <i>President Commissioner of PT Multimedia Nusantara</i> - Direktur <i>Human Capital Management</i> PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk. <i>Human Capital Management Director of PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk.</i> - Anggota Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University <i>Senator of Faculty of Economics and Business Telkom University</i>
Tantang Yudha Santoso	Direktur Keuangan, SDM, Hukum, dan Manajemen Risiko <i>Financial, Human Capital, Legal, and Risk Management Director</i>	Samarinda, 12 Oktober 1977 <i>Samarinda, October 12, 1977</i>	Pria Male	Sarjana Teknik Industri <i>Bachelor of Industrial Engineering</i>	- Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT MD Media <i>Finance & Risk Management Director PT MD Media</i> - Operation <i>Senior Manager Leveraging Asset</i> PT Telkom Indonesia - AVP Keuangan Strategis PT Telkom Indonesia <i>AVP Strategic Finance PT Telkom Indonesia</i> - VP Perencanaan Strategis & Sistem Manajemen PT PINS Indonesia <i>VP Strategic Planning & Management System PT PINS Indonesia</i> - AVP Pengembangan Perusahaan PT PINS Indonesia <i>AVP Corporate Development PT PINS Indonesia</i>
Ahmad Taufik	Direktur Operasi <i>Operation Director</i>	Jakarta, 25 September 1965 <i>Jakarta, September 25, 1965</i>	Pria Male	Sarjana Ilmu Komputer <i>Bachelor of Computer Science</i>	<i>Head of Business Continuity Management</i>, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. <i>Vice President - Strategic Project</i>, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. <i>Project Treasury Officer</i>, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. <i>Vice President - IT Strategic Wholesale Banking</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. <i>Vice President - Information Management Solution</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tugas dan Kewajiban Direksi

Duties and Obligations of Board of Directors

- Tugas dan Kewajiban Direksi dalam **mengurus Perusahaan** adalah:
 - Melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta memastikan agar Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban,

- Duties and Obligations of Board of Directors in **managing the Company** are:*
 - Carry out their duties in good faith for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company, ensure that the Company exercises its social responsibility and considers the interests of the various stakeholders in accordance with the provisions of the legislation.*
 - Give full energies, thoughts, attention and devotion to duty, obligation and the achievement of the purpose*

- dan pencapaian maksud dan tujuan.
- c. Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - d. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
 - e. Membuat daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Risalah Rapat Direksi.
 - f. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada Perseroan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
 - g. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan serta dokumen keuangan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
 - h. Memelihara dan menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan, serta dokumen perusahaan lainnya.
 - i. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris.
 - j. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan.
 - k. Menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada ketentuan GCG yang berlaku dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan.
 - l. Memastikan bahwa Auditor Eksternal, Auditor Internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai Perseroan, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
 - m. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
 - n. Melakukan pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas tersebut.
 - o. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan

- and objectives of the Company.*
- c. *Comply with the Company's Articles of Association and regulations and implement professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.*
 - d. *Seek and guarantee the implementation of the Company's business and activities in accordance with the purpose and business activities.*
 - e. *Create a list of Shareholders, the Special Register, Minutes of Meeting of the General Meeting of Shareholders (GMS), and Minutes of Meeting of the Board of Directors.*
 - f. *Report to the Company regarding his/her share ownership and/or his family (wife/husband and children) in the Company and other companies, including any amendments.*
 - g. *Create Annual Report as a form of accountability of Company management and the Company's financial documents as mentioned in the Law on Corporate Documents.*
 - h. *Maintain and store the domicile of the Company: Register of Shareholders, the Special Register, Minutes of the GMS, the Minutes of Meeting of the Board of Commissioners Meetings and Board of Directors Meetings, the Annual Report and financial documents as well as other company documents.*
 - i. *Provide regular reports in the manner and time in accordance with applicable regulations as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners.*
 - j. *Hold and maintain the Company's accounting and administration in accordance with the standards in force for the Company.*
 - k. *Apply Good Corporate Governance (GCG) consistently and continuously, guided by the applicable GCG regulations, concerning rules and norms of the Company's Articles of Association.*
 - l. *Ensure that the External Auditors, Internal Auditors and the Audit Committee, and other committees if any, have access to the accounting records, supporting data, and information about the Company, to the extent necessary to perform their duties.*
 - m. *Each board of directors personally takes full responsibility if the concerned makes mistakes or is negligent in performing their duties for the Company's benefit and business.*
 - n. *Divide roles and responsibilities among the Board of Directors, determined by Decree of Directors in the case of the GMS does not select the division of roles.*
 - o. *Members of the Board of Directors cannot be held responsible for the loss of the Company if such*

dapat membuktikan bahwa:

- Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
- Telah mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya kerugian tersebut.

2. Terkait dengan **Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

- a. Menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menyusun Laporan Tahunan dan menyampaikan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- c. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
- d. Menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS. Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis. Dalam hal ada anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud di atas, harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- e. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa.
- f. Mengumumkan Laporan Tahunan Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas atau nasional di wilayah Republik Indonesia dan dalam satu surat kabar untuk rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, jika dianggap perlu oleh Direksi.
- g. Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- h. Menyediakan bahan RUPS kepada Pemegang Saham di Kantor Perusahaan dan diberikan secara cuma-cuma jika diminta.
- i. Membuat risalah RUPS yang sekurang-kurangnya

person can prove that:

- The loss is not due to his/her error or negligence.
- The management has been performed in good faith and prudence to the benefit of and in accordance with the Company's purposes and objectives.
- He/she does not have a conflict of interest, whether directly or indirectly, for the management resulting losses.
- He/she has taken action to prevent the continuation of such losses.

2. Related to the **Shareholders or General Meeting of Shareholders (GMS)**

- a. Organize and store the Register of Shareholders and documents relating to the GMS in accordance with laws and regulations.
- b. Develop and submit the Annual Report to the GMS after review by the Board of Commissioners at the latest within a period of five (5) months after the Company fiscal year ends
- c. Give explanations to the GMS regarding the Annual Report.
- d. Prepare an annual report in accordance with the legislation in force, signed by all the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to be submitted at the GMS. The annual report must be provided in the Company's office no later than 14 (fourteen) days prior to the date of the GMS held, and available for inspection by the shareholders with a written request. In case that any member of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners did not sign the Annual Report, the reason should be written.
- e. Call and organize the Annual General Meeting and/or Extraordinary General Meetings of Shareholders.
- f. Publish the Company's Annual Report in 2 (two) daily newspaper in Indonesian language which is published and circulated widely or nationally in the territory of the Republic of Indonesia, and in a newspaper for a planned merger, consolidation and acquisition of the Company no later than 30 (thirty) calendar days before the GMS, if deemed necessary by the Board of Directors.
- g. Request approval of the GMS to divert or make more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets as debt collateral, in one or more transactions, whether in relation to one another or not.
- h. Provide materials to the Shareholders General Meeting at the Corporate Office and provided free of charge if requested.
- i. Make Minutes of GMS which at least contain the



memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.

- j. Memberikan salinan Risalah RUPS kepada Pemegang Saham.
- k. Meminta persetujuan RUPS jika Perseroan ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan, termasuk pengalihannya.
- l. Mendapat persetujuan dari RUPS untuk melakukan perjanjian kerja bersama (PKB) dengan karyawan yang berkaitan dengan penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan oleh atau melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Meminta persetujuan RUPS jika Perusahaan ingin menambah besarnya jumlah modal Perseroan. RUPS dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- n. Menyampaikan dokumen Perseroan yang diperlukan dalam RUPS.
- o. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi yang mewakili Pemegang Saham dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.

3. Terkait dengan **Strategi dan Rencana Kerja Perusahaan**

- a. Menyiapkan visi, misi, tujuan, strategi, dan budaya perusahaan.
- b. Menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku RKAP yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- c. Menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perseroan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RJPP dan diajukan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum periode RJPP berakhir.
- d. Melaksanakan dan mengupayakan tercapainya sasaran-sasaran jangka panjang yang tercantum dalam RJPP.
- e. Melaksanakan dan mengupayakan tercapainya target-target jangka pendek yang tercantum dalam RKAP melalui penetapan target kinerja yang diturunkan di tingkat satuan kerja dan jabatan dalam struktur organisasi Perseroan.
- f. Menerima, menampung, dan membahas usulan

time, agenda, participants, notions developed in the GMS, and the decision of the GMS.

- j. Provide a copy of the Minutes of the GMS to Shareholders.
- k. Ask for approval of the GMS if the Company intends to buy back shares that have been issued, including their transfer.
- l. Ask for approval of the GMS to make a collective labor agreement with the employees associated with the employee wages which are not required by or exceed the provisions of the legislation.
- m. Ask for approval of the GMS if the Company intend to increase the amount of Company capital. GMS may delegate this authority to the Board of Commissioners for a maximum period of 1 (one) year.
- n. Deliver Company documents required in the GMS.
- o. In the voting, members of the Board of Directors representing Shareholders are prohibited from acting on behalf of Shareholders.

3. Related to the **Company Strategy and Work Plan**

- a. Set out the corporate vision, mission, goals, strategy and culture.
- b. Prepare a draft of Company Work and Budget Plan which has been signed by all members of the Board of Directors to be submitted to the Board of Commissioners for review and signing before being submitted to the Shareholders. Company Work and Budget Plan draft which has been signed by all the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be submitted to the Shareholders no later than 60 (sixty) days prior to the relevant fiscal year Company Work and Budget Plan for approval by the General Meeting of Shareholders (GMS) with regard of the applicable regulations.
- c. Prepare a plan of the Company's Long-Term Plan which is a strategic plan that includes goals and objectives to be achieved within a period of 5 (five) years, within a period of one (1) year prior to the expiration of the current Company's Long-Term Plan and submitted to the Board of Commissioners no later than 60 (sixty) days before the current Company's Long-Term Plan expires.
- d. Implement and facilitate the long-term goals listed in Company's Long-Term Plan.
- e. Implement and facilitate the short-term targets are listed in the Company Work and Budget Plan through establishing performance targets derived in the work unit and position level in the Company organizational structure.
- f. Accept, accommodate and discuss business

peluang bisnis yang disampaikan oleh karyawan, anggota Direksi, atau Dewan Komisaris.

- g. Menyampaikan kepada Dewan Komisaris, usulan peluang bisnis sebagaimana dimaksud butir (f) di atas disertai studi kelayakan untuk dibahas dengan Dewan Komisaris, khususnya untuk peluang bisnis yang apabila ditindaklanjuti oleh Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- h. Membahas isu-isu perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha dan kinerja Perseroan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh Direksi. Apabila, menurut pendapat Direksi, perubahan lingkungan bisnis tersebut berdampak besar pada usaha dan kinerja Perseroan, Direksi menyampaikan isu-isu tersebut kepada Dewan Komisaris untuk meminta arahan Dewan Komisaris atas isu-isu tersebut.

4. Terkait dengan **Sumber Daya Manusia**

- a. Menetapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
- b. Menyusun dan melaksanakan pedoman pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi sistem perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, penempatan karyawan dan jabatan dalam struktur organisasi Perseroan, promosi dan demosi, serta mutasi.
- c. Memastikan penempatan Karyawan sesuai dengan kriteria jabatan dalam struktur organisasi Perseroan.
- d. Menyampaikan kepada Dewan Komisaris atas rencana promosi pejabat satu level di bawah Direksi.
- e. Memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan karyawan sesuai dengan kompetensi jabatan.
- f. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja untuk satuan kerja dan jabatan dalam organisasi secara obyektif dan transparan.

5. Terkait dengan **Pengelolaan Manajemen Risiko**

Membangun, melaksanakan, dan mengembangkan sistem manajemen risiko Perseroan agar Direksi dalam mengambil setiap keputusan atau tindakan dapat mempertimbangkan risiko usaha secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program *Good Corporate Governance* (GCG).

6. Terkait dengan **Teknologi Informasi**

- a. Menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi kepada Dewan Komisaris.

opportunities proposals submitted by employees, members of the Board of Directors, atau Board of Commissioners.

- g. *Deliver to the Board of Commissioners, the proposed business opportunities referred in point (f) above with a feasibility study to be discussed with the Board of Commissioners, especially for business opportunities that require the approval of the Board of Commissioners when followed-up by the Board of Directors, as set out in the Articles of Association.*
- h. *Discuss issues of the changing business environment and its problems, which could have an impact on the business and performance of the Company at any time deemed necessary by the Board of Directors. If, in the opinion of the Board of Directors, changes in the business environment have a major impact on the operations and performance of the Company, the Board of Directors convey these issues to the Board of Commissioners to request directions from the Board of Commissioners on these issues.*

4. Related to the **Human Resources**

- a. *Establish the Company organizational structure complete with details and duties descriptions.*
- b. *Develop and implement guidelines for human resources management including systems of manpower planning, recruitment, selection, placement of employees and positions within the Company's organizational structure, promotion and demotion as well as transfer.*
- c. *Ensure placement of employees in accordance with the job specifications within the Company's organizational structure.*
- d. *Deliver to the Board of Commissioners on promotional plans for officials one level below the Board of Directors.*
- e. *Ensure the implementation of the education and training of employees in accordance with the job competency.*
- f. *Implement performance measurement and assessment for work units and positions within the organization objectively and transparently.*

5. Related to the **Management of Risk**

Build, implement and develop the Company's risk management system so that the Board of Directors in making any decision or action may consider business risks in an integrated manner which is part of the Good Corporate Governance (GCG) program implementation.

6. Related to **Information Technology**

- a. *Establish governance effective information technology.*
- b. *Submit the information technology governance report to the Board of Commissioners.*



- c. Menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi di Perseroan.

7. Terkait dengan **Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Pengadaan Barang, dan Pencatatan serta Kualitas**

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan lainnya, Direksi berkewajiban atas hal-hal berikut:

- a. Membuat dan melaksanakan kebijakan, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
- b. Membuat dan melaksanakan kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa.
- c. Membuat kebijakan mutu serta pelaksanaannya di Perseroan.

8. Terkait dengan **Etika Berusaha dan Anti Korupsi**

- a. Memastikan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat satu level di bawah Direksi telah melaporkan harta kekayaan kepada lembaga pemerintah yang berwenang.
- b. Melakukan sosialisasi atas program pengendalian gratifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Terkait dengan **Sistem Pengendalian Internal**

- a. Menetapkan kebijakan tentang Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.
- b. Membangun Sistem Pengendalian Internal sehingga mampu mengarahkan dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, serta mampu mencegah terjadinya tindakan penyimpangan pada Perseroan.
- c. Memberikan arahan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan serta melakukan tindak lanjut dan monitoring atas rekomendasi yang diberikan oleh Sistem Pengendalian Internal.
- d. Memastikan sistem pengendalian internal perusahaan berjalan efektif.
- e. Menyampaikan hasil audit dan laporan kegiatan Sistem Pengendalian Internal kepada Dewan Komisaris.
- f. Penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi Satuan Pengawas Intern diatur dalam Piagam Satuan Pengawasan Intern yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

10. Terkait dengan **Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi**

- a. Mengungkapkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Perseroan dan informasi penting dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan informasi lainnya kepada pihak lain, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan obyektif.
- b. Menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan

- c. *Maintain and evaluate the quality of information technology governance functions in the Company.*

7. *Related to **Partnerships and Community Development Program, Procurement, and Recording and Quality***

In carrying out business activities other Company, the Board of Directors liable for the following:

- a. *Create and implement policies of Partnerships and Community Development Program.*
- b. *Create and implement procurement policies and/or services.*
- c. *Create a quality policy and its implementation in the Company.*

8. *Related to **Business Ethics and Anti-Corruption***

- a. *Ensure that all members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Officers of one level below the Board of Directors has reported assets of the authorized government agency.*
- b. *Perform socialization of gratification control program in accordance with applicable laws and regulations.*

9. *Related to **Internal Control System***

- a. *Establish a policy on effective Internal Control System to secure investments and assets of the Company.*
- b. *Build Internal Control System that is able to direct and guide subordinates in the execution of their duties to achieve the goals and objectives of the organization that has been established, and is able to prevent the occurrence of irregularities in the actions of the Company.*
- c. *Provide direction for implementation of the Company's internal control systems, and perform follow-up and monitoring of the recommendations given by the Internal Control Systems.*
- d. *Ensure the company's internal control systems are effective.*
- e. *Deliver the Internal Control Systems audit results and activity reports to the Board of Commissioners.*
- f. *Further elaboration of the duties and functions of the Internal Audit Unit is set in the Internal Audit Charter which has been established by the Decree of the Board of Directors.*

10. *Related to **Disclosure and Confidentiality of Information***

- a. *Reveal the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and important information in the Annual Report, Financial Statements, and other information to other parties, according to applicable laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective.*
- b. *Convey information about the identity, the main occupations, and positions of the Board of*

Komisaris di anak perusahaan, perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta penghasilan yang diterima dari Perseroan, anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

- c. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dalam hal menjaga kerahasiaan informasi Perseroan, Direksi dituntut untuk mengutamakan kepentingan Perusahaan daripada kepentingan individu atau kelompok.

11. Terkait Hubungan dengan **Pemangku Kepentingan**

- a. Memastikan terjaminnya hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan karyawan, pengguna jasa, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Memastikan bahwa aset dan lokasi usaha, serta fasilitas Perseroan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.
- c. Menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.

12. Terkait dengan **Sistem Akuntansi dan Pembukuan**

- a. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada akuntan publik untuk diaudit.
- b. Menyusun sistem akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
- c. Memastikan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- d. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan untuk menghasilkan penyelenggaraan pembukuan yang tertib, kecukupan modal kerja dengan biaya modal yang efisien, struktur neraca yang baik dan kokoh, penyajian laporan dan analisa keuangan tepat waktu dan akurat, serta prinsip-prinsip lain sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan.

13. Terkait dengan **Tugas dan Kewajiban Lain**

Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan

Commissioners in subsidiary, joint ventures, and/or other companies, including meetings conducted in one fiscal year (internal meetings and joint meetings with the Board of Commissioners), as well as income received of the Company, its subsidiaries, and/or joint venture, to be published in Company Annual Report.

- c. *Confidential information obtained while serving as a Member of Board of Directors of the Company shall remain confidential in accordance with the legislation in force.*
- d. *In terms of maintaining the confidentiality of information of the Company, the Board of Directors are required to give priority to the interests of the Company rather than the interests of individuals or groups.*

11. **Related Relationships with Stakeholders**

- a. *Ensure the security of stakeholder rights arising under the laws in force and/or agreements made by the Company with employees, service users, suppliers, and other stakeholders.*
- b. *Ensure that the assets and business locations as well as other Company facilities, comply with legislation relating to health and safety and environmental protection.*
- c. *Provide a work environment which is free from all forms of pressure (harassment) which may arise as a result of differences in character, personal circumstances and cultural background of a person.*

12. **Related to Other Accounting and Bookkeeping**

- a. *Develop Financial Statements by Financial Accounting Standards and submit to the public accountant to audit.*
- b. *Develop appropriate accounting system and the Financial Accounting Standards based on the principles of internal control, especially the function of obtaining, recording, storage and supervision.*
- c. *Ensure accounting policies and the preparation of financial statements in accordance with accounting standards generally accepted in Indonesia.*
- d. *Hold and maintain the Company's accounting and administration to produce an orderly bookkeeping administration, the adequacy of working capital to capital cost efficient, good structure and a solid balance sheet, statements and analysis of timely and accurate financial, and other principles in accordance with the standards in force for a company.*

13. **Related to Other Duties and Obligations**

Run other obligations in accordance with the provisions



ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar atau yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

set forth in the Articles of Association or determined by the General Meeting of Shareholders (GMS) based on the legislation.

Pembagian Tugas Pokok Dewan Direksi

Division of Main Duties of Board of Directors

1. Tugas Pokok Direktur Utama adalah:

- Merencanakan dan menetapkan arah, strategi dan kebijakan pengelolaan Perseroan serta mengendalikan implementasinya.
- Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh proses bisnis dan fungsi-fungsi di Perseroan.
- Di samping melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) ayat ini, Direksi juga merencanakan dan menetapkan arah, strategi dan kebijakan pengelolaan proses bisnis dan fungsi di bidang pengembangan bisnis dan produk, pengawasan internal, dan sekretaris perusahaan, serta mengendalikan implementasinya.
- Memimpin dan mengorganisasikan proses bisnis dan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud huruf (c) ayat ini.
- Menjalin dan mengembangkan hubungan baik dengan pemegang kepentingan misalnya karyawan atau serikat pekerja, pemegang saham, komisaris, pemerintah atau regulator, pelanggan, pemasok, kreditor, mitra usaha atau mitra kerja, konsultan, lembaga pendidikan atau pelatihan, lembaga keuangan, masyarakat di lingkungan perusahaan, dan pemegang kepentingan lainnya.

2. Tugas Pokok Direktur Keuangan, SDM, Hukum, dan Manajemen Risiko adalah:

- Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Menetapkan konsep, arah strategi, dan arah kebijakan pengelolaan fungsi keuangan, akuntansi, penagihan, perpajakan, perencanaan & pengendalian strategis, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan layanan umum, manajemen aset, hukum, tata kelola Perusahaan dan manajemen risiko;
- Memimpin dan mengorganisasikan pengelolaan proses bisnis dan fungsi bisnis, keuangan, akuntansi, penagihan, perpajakan, perencanaan & pengendalian strategis, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan layanan umum,

1. Main Duties of the President Director are:

- Plan and define the Company's management directions, strategies and policies and control its implementation.
- Lead and coordinate all business processes and functions in the Company.
- In addition to the activities referred to in paragraph (a) and (b) above, the Board of Directors also plan and define the direction, strategy and policy of business process management and functions in the field of business and product development, internal control, and corporate secretary, and controls its implementation.
- Lead and organize the business processes and functions referred to in item (c) of this paragraph.
- Establish and develop good relationships with stakeholders for example employees or labor unions, shareholders, commissioners, government or regulators, customers, suppliers, creditors, business or work partners, consultants, education or training institutions, financial institutions, society in the corporate environments, and other stakeholders.

2. Main Duties of the Director of Finance, HR, Legal and Risk Management are:

- Carry out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company and represent the Company both inside and outside the Court on all matters and all events with limitations as stipulated in laws and regulations;
- Establish concepts, strategic directions, and policy directions for managing the functions of finance, accounting, billing, taxation, strategic planning & control, human resource management, general service management, asset management, legal, corporate governance and risk management;
- Lead and organize the management of business processes and business functions, finance, accounting, billing, taxation, strategic planning & control, human resource management, general service management, asset management, legal,

manajemen asset, hukum, tata kelola Perusahaan dan manajemen risiko;

- d. Mengkoordinasikan pengelolaan proses bisnis dan fungsi di bidang keuangan, akuntansi, penagihan, perpajakan, perencanaan & pengendalian strategis, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan layanan umum, manajemen asset, hukum, tata kelola Perusahaan dan manajemen risiko dengan anggota Direksi lainnya;
- e. Memimpin dan mengkoordinasikan penetapan arah strategis dan kebijakan pengelolaan proses bisnis dan fungsi di bidang keuangan, akuntansi, penagihan, perpajakan, perencanaan & pengendalian strategis, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan layanan umum, manajemen aset, hukum, tata kelola Perusahaan dan manajemen risiko dengan anggota Direksi lainnya;
- f. Menetapkan konsep, strategi, kebijakan, arah pengelolaan serta memimpin dan mengkoordinasikan pemecahan masalah eksternal Perusahaan di bidang keuangan, akuntansi, penagihan, perpajakan, perencanaan & pengendalian strategis, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan layanan umum, manajemen asset, hukum, tata kelola Perusahaan dan manajemen risiko serta mengkoordinasikan dengan anggota Direksi lainnya terkait dengan fungsi bisnis tersebut;
- g. Menyelenggarakan dan memimpin Rapat Direktorat Keuangan, SDM, Hukum & Manajemen Risiko secara periodik sesuai ketetapan Direksi, atau rapat-rapat yang lain apabila dipandang perlu sesuai usulan Direksi;
- h. Menjalin dan mengembangkan hubungan baik dengan pemegang kepentingan:
- i. Karyawan/Serikat Pekerja, Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Pemerintah/Regulator, Pelanggan, Pemasok, Kreditor, Mitra Usaha/Kerja, Konsultan, Lembaga Pendidikan/ Pelatihan, Lembaga Keuangan, Masyarakat Lingkungan Perusahaan dan Pemegang Kepentingan Lainnya.

3. Tugas Pokok Direktur Bisnis/Operasi adalah:

- a. Merencanakan dan menetapkan arah, strategi, dan kebijakan pengelolaan proses bisnis dan fungsi di bidang bisnis strategis, yang meliputi fungsi di bidang pengelolaan *account*, komersial, *engineering*, implementasi proyek, *service*, produksi, pengadaan, dan keuangan divisi terkait bisnis atau *strategic business unit* (SBU), serta mengendalikan implementasinya.
- b. Memimpin dan mengorganisasikan seluruh proses bisnis dan fungsi-fungsi yang sebagaimana dimaksud huruf (a) ayat ini.
- c. Menjalin dan mengembangkan hubungan baik dengan pemegang kepentingan misalnya, karyawan

corporate governance and risk management;

- d. *Coordinating the management of business processes and functions in finance, accounting, billing, taxation, strategic planning & control, human resource management, public service management, asset management, legal, corporate governance and risk management with other members of the Board of Directors;*
- e. *Lead and coordinate the establishment of strategic directions and policies for managing business processes and functions in finance, accounting, billing, taxation, strategic planning & control, human resource management, public service management, asset management, legal, corporate governance and risk management with members other directors;*
- f. *Establish concepts, strategies, policies, management directions as well as lead and coordinate the resolution of the Company's external problems in finance, accounting, billing, taxation, strategic planning & control, human resource management, public service management, asset management, legal, corporate governance and risk management and coordinating with other members of the Board of Directors related to the business function;*
- g. *Organize and chair meetings of the Directorate of Finance, HR, Legal & Risk Management periodically according to the decisions of the Board of Directors, or other meetings if deemed necessary according to the recommendations of the Board of Directors;*
- h. *Establish and develop good relations with stakeholders:*
- i. *Employees/Workers' Unions, Shareholders, Board of Commissioners, Government/Regulators, Customers, Suppliers, Creditors, Business/Work Partners, Consultants, Education/Training Institutions, Financial Institutions, Company Communities and Other Stakeholders*

3. Main Duties of the Business Director are:

- a. *Plan and define the direction, strategy and policy of business process management and functions in the field of strategic business, which includes functions in account management, commercial, engineering, project implementation, services, production, procurement and finance in business related division or strategic business units (SBUs) and control its implementations.*
- b. *Lead and organize the business processes and functions referred to in item (a) of this paragraph.*
- c. *Establish and develop good relationships with stakeholders for example employees or labor*

atau serikat pekerja, pemegang saham, komisaris, pemerintah atau regulator, pelanggan, pemasok, kreditor, mitra usaha atau mitra kerja, konsultan, lembaga pendidikan atau pelatihan, lembaga keuangan, masyarakat di lingkungan perusahaan, dan pemegang kepentingan lainnya.

unions, shareholders, commissioners, government or regulators, customers, suppliers, creditors, business or work partners, consultants, education or training institutions, financial institutions, society in the corporate environments, and other stakeholders.

Rapat Direksi

Board of Directors Meeting

Untuk mengambil segala keputusan yang dipandang perlu, Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi. Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

Direksi dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Direksi, atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Direktur Utama.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi.

Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan Rapat Direksi diambil dengan suara terbanyak.

Dalam setiap Rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan. Risalah rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh Direksi yang hadir dalam rapat.

Sepanjang tahun 2023, Direksi telah membuat 46 keputusan dalam Rapat Direksi yang menyangkut berbagai aspek seperti bisnis, finansial dan investasi, hukum, dan sumber daya manusia.

To take any decisions deemed necessary, the Board of Directors holds the Board of Directors Meeting. The decision can also be taken outside the Board of Directors Meeting as long as the Board of Directors agrees on how and materials to be decided.

The Board of Directors can be convened at any time at the request of 1 (one) or several members of the Board of Directors, upon written demand of one or more members of the Board of Commissioners, or upon written demand of Shareholders mentioning the things that will be discussed.

All board meetings chaired by the President Director. In the event that the President Director is absent or unavailable, Board of Directors Meeting chaired by a member of the Board of Directors appointed by the President Director.

The Board of Directors Meeting is valid and may take binding decisions if attended or represented by more than 1/2 (a half) the number of members of the Board of Directors.

All decisions taken by the Board of Directors Meeting are through consensus decision-making. If the consensus is not reached, then the decision of the Board of Directors Meeting taken by a majority vote.

In each of the Board of Directors Meeting, minutes of meetings must be made, containing things that are discussed and decided. Minutes of the meeting signed by the Chairman of the Meeting and all members of the Board of Directors present in the meeting.

Throughout the year 2023, the Board of Directors has made 46 decisions in the Board of Directors Meeting on various aspects such as business, finance and investment, law, and human resources.

Kehadiran Rapat Direksi

Board of Directors Meeting Attendance

No.	Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Attendance	Keterangan Note	Persentase Percentage
1	Edi Witjara	46	44		96%
2	Tantang Yudha Santoso	46	45		98%
3	Ahmad Taufik	46	46		100%

Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Tempat Pelaksanaan Place of execution	Keterangan Information
Senin, 02 Januari 2023 Monday, January 02, 2023	Vc.Zoom, ID : 469 273 6431,	Rapat Rutin Mingguan Weekly Routine Meeting
Selasa, 10 Januari 2023 Tuesday, January 10, 2023	Vc.Zoom, ID : 469 273 6431,	Rapat Rutin Mingguan Weekly Routine Meeting
Selasa, 17 Januari 2023 Tuesday, January 17, 2023	Vc.Zoom, ID : 469 273 6431,	Rapat Rutin Mingguan Weekly Routine Meeting
Rabu, 25 Januari 2023 Wednesday, 25 January 2023	Vc.Zoom, ID : 469 273 6431,	Rapat Rutin Mingguan Weekly Routine Meeting
Selasa, 31 Januari 2023 Tuesday, 31 January 2023	Vc.Zoom, ID : 469 273 6431,	Rapat Rutin Mingguan Weekly Routine Meeting
Selasa, 7 Februari 2023 Tuesday, 07 February 2023	Vc.Zoom, ID : 469 273 6431,	Rapat Rutin Mingguan Weekly Routine Meeting
Selasa, 14 Februari 2023 Tuesday, February 14, 2023	Vc.Zoom, ID : 469 273 6431,	Rapat Rutin Mingguan Weekly Routine Meeting
Selasa, 21 Februari 2023 Tuesday, February 21, 2023	Vc.Zoom, ID : 469 273 6431,	Rapat Rutin Mingguan Weekly Routine Meeting
Selasa, 28 Februari 2023 Tuesday, February 28, 2023	Vc.Zoom, ID : 469 273 6431	Rapat Rutin Mingguan Weekly Routine Meeting
Selasa, 7 Maret 2023 Tuesday, March 7, 2023	Vc.Zoom, ID : 469 273 6431	Rapat Rutin Mingguan Weekly Routine Meeting
Selasa, 15 Maret 2023 Tuesday, March 15, 2023	Vc.Zoom, ID : 469 273 6431	Rapat Rutin Mingguan Weekly Routine Meeting
Selasa, 21 Maret 2023 Tuesday, March 21, 2023	Vicon Zoom ID : 923 8127 8420	Rapat Rutin Mingguan Weekly Routine Meeting
Selasa, 28 Maret 2023 Tuesday, March 28, 2023	Vicon Zoom ID : 923 8127 8420	Rapat Rutin Mingguan Weekly Routine Meeting
Selasa, 4 April 2023 Tuesday, April 4, 2023	Vicon Zoom ID : 923 8127 8420	Rapat Rutin Mingguan Weekly Routine Meeting
Selasa, 18 April 2023 Tuesday, April 18, 2023	Vicon Zoom ID : 923 8127 8420	Rapat Rutin Mingguan Weekly Routine Meeting
Selasa, 2 Mei 2023 Tuesday, May 2, 2023	Vicon Zoom ID : 923 8127 8420	Rapat Rutin Mingguan Weekly Routine Meeting



Selasa, 9 Mei 2023 <i>Tuesday, May 9, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 923 8127 8420	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 16 Mei 2023 <i>Tuesday, May 16, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 923 8127 8420	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 23 Mei 2023 <i>Tuesday, May 23, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 923 8127 8420	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 30 Mei 2023 <i>Tuesday, May 30, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 923 8127 8420	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Kamis, 8 Juni 2023 <i>Thursday, June 8, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 923 8127 8420	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 13 Juni 2023 <i>Tuesday, June 13, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 923 8127 8420	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 20 Juni 2023 <i>Tuesday, June 20, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 923 8127 8420	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 27 Juni 2023 <i>Tuesday, June 27, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 923 8127 8420	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 4 Juli 2023 <i>Tuesday, July 4, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 923 8127 8420	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Rabu, 12 Juli 2023 <i>Wednesday, July 12, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 923 8127 8420	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 18 Juli 2023 <i>Tuesday, July 18, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 923 8127 8420	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 25 Juli 2023 <i>Tuesday, July 25, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 923 8127 8420	Rapat Direksi Terbatas Legal <i>Legal Limited Board of Directors Meeting</i>
Selasa, 1 Agustus 2023 <i>Tuesday, August 1, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 923 8127 8420	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 8 Agustus 2023 <i>Tuesday, August 8, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 923 8127 8420	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Rabu, 23 Agustus 2023 <i>Wednesday, August 23, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 923 8127 8420	Rapat Direksi Terbatas Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 29 Agustus 2023 <i>Tuesday, August 29, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 923 8127 8420	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 5 September 2023 <i>Tuesday, September 5, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 923 8127 8420	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Kamis, 14 September 2023 <i>Thursday, September 14, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 923 8127 8420	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 19 September 2023 <i>Tuesday, September 19, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 249 187 9675	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Rabu, 27 September 2023 <i>Wednesday, September 27, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 249 187 9675	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 3 Oktober 2023 <i>Tuesday, October 3, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 427 625 0414	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 10 Oktober 2023 <i>Tuesday, October 3, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 427 625 0414	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>

Selasa, 17 Oktober 2023 <i>Tuesday, October 3, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 427 625 0414	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 24 Oktober 2023 <i>Tuesday, October 3, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 427 625 0414	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 31 Oktober 2023 <i>Tuesday, October 3, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 427 625 0414	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 14 November 2023 <i>Tuesday, November 14, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 427 625 0414	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 21 November 2023 <i>Tuesday, November 21, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 427 625 0414	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 5 Desember 2023 <i>Tuesday, December 5, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 427 625 0414	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 5 Desember 2023 <i>Tuesday, December 5, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 427 625 0414	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 12 Desember 2023 <i>Tuesday, December 12, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 427 625 0414	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>
Selasa, 19 Desember 2023 <i>Tuesday, December 19, 2023</i>	Vicon Zoom ID : 427 625 0414	Rapat Rutin Mingguan <i>Weekly Routine Meeting</i>

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Joint Meeting of The Board of Commissioners and The Board of Directors

Untuk menyatukan pandangan dan memutuskan suatu persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan operasional Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi mengagendakan pertemuan berkala dalam forum Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Penyelenggara rapat berkala ini adalah Dewan Komisaris guna membahas berbagai agenda menyangkut rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

In order to unify the views and decides an important matter related to the continuity of business and operational of the Company, the Board of Commissioners and Directors schedule a regular meeting in Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors. This regular meeting organizer is the Board of Commissioners, to discuss various agendas related to work plan, operational, business opportunity, and strategic issues that need approval from the Board of Commissioners.

Rapat ini adalah sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan memberikan tanggapan, catatan, dan saran yang dituangkan dalam risalah rapat.

This meeting is a form of coordination in order to discuss the Board of Directors' periodic reports and to give response, notes, and advice written in the minutes of meeting.



Kehadiran Rapat Gabungan Direksi dan Komisaris

The Board of Commissioners and The Board of Directors Joint Meeting Attendance

No.	Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Attendance	Keterangan Note	Persentase Percentage
1	Unggul Priyanto	12	12		100%
2	Trisno Hendradi	12	12		100%
3	Rahmadi Murwanto	12	12		100%
4	Yanuar Rokhmad Madyantoro	12	12		100%
5	Edi Witjara	12	12		100%
6	Tantang Yudha Santoso	12	12		100%
7	Ahmad Taufik	12	12		100%

No.	Agenda	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Tempat Pelaksanaan Place of Execution
1	Pembahasan Kinerja hingga Desember 2022 <i>Performance Discussion until December 2022</i>	Kamis, 26 Januari 2022 <i>Thursday, January 26, 2022</i>	Kantor Cabang Jakarta (Balitung) <i>Jakarta Branch Office (Balitung)</i>
2	Pembahasan Kinerja hingga Januari 2023 <i>Performance Discussion until January 2023</i>	Kamis, 23 Februari 2023 <i>Thursday, February 23, 2023</i>	Kantor Cabang Jakarta (Balitung) <i>Jakarta Branch Office (Balitung)</i>
3	Pembahasan Kinerja hingga Februari 2023 <i>Performance Discussion until February 2023</i>	Kamis, 30 Maret 2023 <i>Thursday, March 30, 2022</i>	Kantor Cabang Jakarta (Balitung) <i>Jakarta Branch Office (Balitung)</i>
4	Pembahasan Kinerja hingga Maret 2023 <i>Performance Discussion until March 2023</i>	Jumat, 28 April 2023 <i>Friday, April 28, 2023</i>	Vicon Zoom (ID : 924 4549 3496)
5	Pembahasan Kinerja hingga April 2023 <i>Performance Discussion until April 2023</i>	Kamis, 25 Mei 2023 <i>Thursday, May 25, 2023</i>	Kantor Cabang Jakarta (Balitung) <i>Jakarta Branch Office (Balitung)</i>
6	Pembahasan Kinerja hingga Mei 2023 <i>Performance Discussion until May 2023</i>	Rabu, 28 Juni 2023 <i>Wednesday, June 28, 2023</i>	Vicon Zoom (ID : 924 4549 3496)
7	Pembahasan Kinerja hingga Juni 2023 <i>Performance Discussion until June 2023</i>	Kamis, 27 July 2023 <i>Thursday, August 04, 2023</i>	Kantor Cabang Jakarta (Balitung) <i>Jakarta Branch Office (Balitung)</i>
8	Pembahasan Kinerja hingga Juli 2023 <i>Performance Discussion until July 2023</i>	Jumat, 01 September 2023 <i>Friday, September 01, 2023</i>	Kantor Cabang Jakarta (Balitung) <i>Jakarta Branch Office (Balitung)</i>
9	Pembahasan Kinerja hingga Agustus 2023 <i>Performance Discussion until August 2023</i>	Jumat, 29 September 2023 <i>Friday, September 29, 2023</i>	Kantor Cabang Jakarta (Balitung) <i>Jakarta Branch Office (Balitung)</i>
10	Pembahasan Kinerja hingga September 2023 <i>Performance Discussion until September 2023</i>	Rabu, 25 Oktober 2023 <i>Wednesday, October 25, 2023</i>	Kantor Cabang Jakarta (Balitung) <i>Jakarta Branch Office (Balitung)</i>
11	Pembahasan Kinerja hingga Oktober 2023 <i>Performance Discussion until October 2023</i>	Rabu, 29 November 2023 <i>Wednesday, November 29, 2023</i>	Vicon Zoom (ID : 427 625 0414)

12

Pembahasan Kinerja hingga November 2023
Performance Discussion until November 2023

Jumat, 22 Desember 2023
Friday, December 22, 2023

Kantor Cabang Jakarta (Balitung)
Jakarta Branch Office (Balitung)

Pendelegasian Wewenang

Delegation of Authority

Direksi dapat mendelegasikan kewenangan kepada anggota Direksi lainnya dan pejabat lainnya di lingkungan Perseroan. Pendelegasian wewenang meliputi tugas, tanggung jawab serta kewenangan, dan dibuat secara tertulis. Setiap pendelegasian wewenang dilakukan dengan mempertimbangkan lingkup pekerjaan yang akan didelegasikan, kompetensi serta tugas dan wewenang orang yang akan menerima pendelegasian wewenang.

Pada tahun 2023 terdapat 103 (seratus tiga) kali pendelegasian wewenang anggota Direksi kepada anggota Direksi lainnya dan karyawan Perseroan melalui surat kuasa.

The Board of Directors may delegate authority to the other Board members and other officials of the Company. Delegation of authority includes the duties, responsibilities and authority, and made in writing. Each delegation of authority is done by considering the scope of the work to be delegated, the competence and the duty and authority of people who will receive the delegation of authority.

By 2023 there are 103 (one hundred and three) delegations of authority from a Board of Directors member to another Board members and employees of the Company through a power of attorney.

Pelatihan Bagi Direksi

Training For Board of Directors

Sepanjang tahun 2023 tidak ada direksi yang mengikuti program pelatihan dan seminar.

Throughout 2023 there were no directors participating in training programs and seminars.

No.	Indikator <i>Indicator</i>	Satuan <i>Unit</i>	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2023 <i>Company Work and Budget Plan 2023</i>		Realisasi 2023 <i>Realization 2023</i>	
			Target <i>Target</i>	Bobot <i>Weight</i>	Nilai <i>Value</i>	Bobot <i>Weight</i>
Financial				35,00		26,25
1	Gross Revenue	Rp Milyar <i>IDR Billion</i>	345,0	10,00	503,68	10,00
2	EBITDA	Rp Milyar <i>IDR Billion</i>	-32,2	10,00	-41,26	7,19
3	ROIC >= WACC*	%	-9,9	5,00	-11,79	4,06
4	Interest Bearing Debt to EBITDA	Kali <i>Time</i>	-3,8	5,00	-26,85	0,00
	Interest Bearing Debt to Invested Capital	Kali <i>Time</i>	0,3	5,00	2,75	5,00

Business Model Innovation				20,00	5,00	
5	Jumlah Kemitraan strategic dalam kegiatan pengembangan <i>Electronic Vehicle</i> <i>Number of strategic partnerships in Electronic Vehicle development activities</i>	Buah <i>Partnership</i>	1	10,00	0,5	5,00
6	Integrasi dalam perolehan Kontrak (diantaranya Bisnis <i>Charging Station</i>) dalam <i>Holding</i> Danareksa <i>Integration in obtaining contracts (including Charging Business Station) in Holding Danareksa</i>	TW <i>Quarterly</i>	4	10,00	0	0,00
Internal Business Process				30,00	25,99	
7	Okupansi Optimalisasi Aset <i>Asset Optimization Occupancy</i>	%	60	5,00	63,20	5,00
8	Utang-utang nonproduktif vendor,Bank&LKNB <i>Non-productive debts of vendors, banks & LKNB</i>	%	5	5,00	0,99	0,99
9	Mendapatkan/mempertahankan sertifikat ISO 14001 <i>Obtaining/maintaining ISO 14001 certification</i>	TW <i>Quarterly</i>	4	10,00	4	10,00
10	Penyusunan dan Penetapan Kebijakan/Pedoman dalam rangka Integrasi sebagai <i>Holding</i> termasuk didalamnya menetapkan <i>Risk Appetite Statement</i> , <i>risk tolerance</i> dan strategi penanggulangan risiko secara korporasi <i>Preparation and Determination of Policies/Guidelines for Integration as a Holding including determining Risk Appetite Statement, risk tolerance and corporate risk management strategies.</i>	TW <i>Quarterly</i>	4	10,00	1	10,00
Learning & Growth				15,00	10,00	
11	Perempuan dalam <i>nominated talent</i> <i>Women in nominated talent</i>	Orang <i>Peoples</i>	1	5,00	0	0,00
12	Milenial (<=42 tahun) dalam <i>nominated talent</i> <i>Millennials in nominated talent</i>	%	20	5,00	100,00	5,00
13	Sertifikasi Karyawan <i>Employee Certification</i>	Buah <i>Certificates</i>	3	5,00	18	5,00
Total				100,00	67,25	

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Corporate Health Level

Kinerja Direksi juga dinilai berdasarkan Tingkat Kesehatan Perusahaan yang diukur berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Peraturan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-2/MBU/03 tertanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Tingkat kesehatan BUMN dinilai berdasarkan kinerja laporan keuangan audit konsolidasi tahun buku yang bersangkutan, menggunakan Peringkat (rating) yang didasarkan pada Pemeringkatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkat yang memenuhi kualifikasi.

Sementara itu, berdasarkan pedoman sebelumnya yang dikeluarkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-2/MBU/03 tertanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang kemudian diganti dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-2/MBU/03. Aspek-aspek yang dinilai mencakup berikut:

1. Aspek Keuangan, terdiri dari 8 indikator
2. Aspek Operasional, terdiri dari 3 indikator
3. Aspek Administrasi terdiri dari 4 indikator

The Board of Directors' performance is also appraised based on Corporate Health Level, which are measured based on guidelines issued by the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) through the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number PER-2/MBU/03 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. The health level of SOEs is assessed based on the performance of the consolidated audited financial report for the relevant fiscal year, using a Rating based on the Rating carried out by a qualified Rating Company.

Meanwhile, based on previous guidelines issued by the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) through the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Number PER-2/MBU/03 dated June 4, 2002 concerning the Assessment of the Health Level of State-Owned Enterprises (SOEs), which was later replaced by the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number PER-2/MBU/03. The assessed aspects include the following:

1. Financial Aspect, consists of 8 indicators
2. Operational Aspect, consists of 3 indicators
3. Administrative Aspect, consists of 4 indicators

No.	Indikator <i>Indicator</i>	Satuan <i>Unit</i>	RKAP 2023 <i>Company Work and Budget Plan 2023</i>		Realisasi 2023 <i>Realization 2023</i>	
			Target <i>Target</i>	Bobot <i>Weight</i>	Nilai <i>Value</i>	Bobot <i>Weight</i>

Aspek Keuangan

Financial Aspect

1	Imbalan kepada Pemegang Saham <i>Return on Equity</i>	%	(26,5)	-	15,4	-
2	Imbalan Investasi <i>Return on Investment</i>	%	(2,7)	1,0	(3,3)	1,0
3	Rasio Kas <i>Cash Ratio</i>	%	1,1	-	3,1	-
4	Rasio Lancar <i>Current Ratio</i>	%	22,8	-	43,1	-
5	Periode Penagihan Piutang <i>Collection Period</i>	Hari <i>Days</i>	89,1	4,5	134,2	3,5

6	Perputaran Persediaan <i>Inventory Turnover</i>	Hari <i>Days</i>	52,3	5,0	74,7	5,0
7	Perputaran Total Aset <i>Total Asset Turnover</i>	Hari <i>Days</i>	32,8	2,0	41,1	5,0
8	Total Modal Sendiri terhadap Total Aset <i>Total Owned Capital to Total Assets</i>	%	32,8	10,0	(49,8)	-
Jumlah Skor Aspek Keuangan <i>Total Financial Aspect Score</i>			-	22,5	-	14,5
Aspek Operasional <i>Operational Aspect</i>						
1	Increasing Order or Contract Booked	%	-12,0	5,0	95,8	5,0
2	Order Fulfillment Rate	%	85,3	5,0	79,2	4,6
3	Percentage of Government Contract	%	22,8	5,0	49,7	5,0
Jumlah Skor Aspek Operasional <i>Total Operational Aspect Score</i>			-	15,0	-	14,6
Aspek Administrasi <i>Administration Aspect</i>						
1	Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 <i>Annual Financial Report 2022</i>	Bulan <i>Month</i>	Maret 2023 <i>March 2023</i>	3,0	Maret 2023 <i>March 2023</i>	3,0
2	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024 <i>Company Work and Budget Plan 2024</i>	Bulan <i>Month</i>	Oktober 2023 <i>October 2023</i>	3,0	Oktober 2023 <i>October 2023</i>	3,0
3	Keterlambatan Laporan Manajemen/Triwulan <i>Management Report/Quarterly Delay</i>	Hari <i>Days</i>	0 Hari <i>0 Days</i>	3,0	0 Hari <i>0 Days</i>	3,0
4	Kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) <i>Performance of Partnership and Community Development Program</i>					
	• Efektivitas Penyaluran Dana <i>Fund Distribution Effectiveness</i>	%	100,00	3,0	92,63%	2,0
	• Kolektibilitas Pinjaman <i>Loan Collectibility Effectiveness</i>	%	73,00	3,0	70,89%	3,0
Jumlah Aspek Administrasi <i>Total Administration Aspect</i>			-	15,0	-	14,0
Total Skor <i>Total Score</i>			-	52,5	-	43,1
Golongan Tingkat Kesehatan <i>Corporate Health Level Group</i>			Kurang Sehat BBB		Kurang Sehat BB	

Hubungan Afiliasi Antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama, dan/atau Pengendali

Description on Board of Directors

Sesama Anggota Dewan Komisaris, antara Anggota Dewan Komisaris, dan Direksi tidak terdapat hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda (pertalian kekeluargaan karena perkawinan). PT INTI (Persero) memastikan hal ini tidak terjadi, baik antar masing-masing anggota Dewan Komisaris atau Direksi, maupun terhadap Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Fellow Members of the Board of Commissioners, between Members of the Board of Commissioners, and the Board of Directors, there is no family relationship to the second degree, either in a straight line or sideways or by marriage (kinship ties due to marriage). PT INTI (Persero) ensures that this does not happen between each member of the Board of Commissioners or the Board of Directors, as well as the Major Shareholders and/or Controlling Shareholders.



Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination and Remuneration Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors

Mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-13/MBU/09/2021 tertanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas BUMN, dan Surat Kuasa Khusus ("SKK") Menteri BUMN Nomor SKK-43/MBU/09/2020 tertanggal 30 September 2020, maka remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PT INTI (Persero) dapat terdiri dari:

1. Gaji atau Honorarium
2. Tunjangan
3. Fasilitas, dan
4. Tantiem atau Insentif Kinerja

Penetapan Remunerasi yang berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Remunerasi yang berupa Tantiem atau Insentif Kinerja yang bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan Perseroan, serta faktor-faktor lain yang relevan.

Referring to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number PER-13/MBU/09/2021 dated 24 September 2021 concerning the Sixth Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining Income for the Board of Directors, Board of Commissioners, SOEs Supervisory Board, and Special Power of Attorney of Minister of SOEs Number SKK-43/MBU/09/2020 dated 30 September 2020, then the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT INTI (Persero) may consist of:

1. Salary or Honorarium
2. Allowance
3. Facilities, and
4. Tantiem or Performance-based Incentives

Remuneration in the form of Salary or Honorarium, Allowance, and Facilities which are fixed, are determined by considering the business scale, the business complexity, inflation rate, conditions and financial ability of the Company, and other relevant factors, and shall not be inconsistent with the laws and regulations.

Determination of Remuneration in the form of variable Tantiem or Performance-based Incentive (merit rating) is carried out by considering the factors achieving the target, the level of health and financial capacity of the Company, and other relevant factors.

Gaji atau Honorarium

Salary or Honorarium

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberikan Gaji atau Honorarium yang ditetapkan oleh Pemegang Saham untuk satu tahun buku sejak Januari tahun berjalan.

Gaji atau Honorarium ditetapkan berdasarkan pedoman internal Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Faktor Penyesuaian Inflasi dapat ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN (0% hingga 50% dari inflasi tahun sebelumnya berdasarkan penetapan Bank Indonesia).

Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are given a Salary or Honorarium determined by the Shareholders for one financial year starting from January of the current year.

Salary or Honorarium is set according to internal guidance of Minister of State Owned Enterprises (SOEs). Inflation Adjustment Factor is set by Secretary of Ministry of SOEs (0% to 50% of the previous year inflation specified by Indonesian Central Bank).

Besaran Faktor Jabatan sebagaimana ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:

1. Direktur Utama : 100%
2. Anggota Direksi : 85% dari Direktur Utama
3. Komisaris Utama : 45% dari Direktur Utama
4. Anggota Dewan Komisaris : 90% dari Komisaris Utama

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Menteri dapat menetapkan besaran Faktor Jabatan yang berbeda apabila dipandang lebih dapat merefleksikan keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta kemampuan Perseroan.

Seseorang yang mempunyai kemampuan khusus yang mendapat tugas menjadi Direksi untuk penyehatan, restrukturisasi, atau peningkatan kinerja luar biasa pada suatu BUMN, dapat diberikan penghasilan tambahan di atas gaji berdasarkan keputusan RUPS atau Menteri. Penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud di atas dikaitkan dengan ekspektasi pencapaian Ukuran Kinerja Utama (Key Performance Indicators atau KPI) yang berisi target-target tahunan yang harus dicapai oleh anggota Direksi dimaksud. Pencapaian KPI tersebut dievaluasi setiap akhir tahun buku untuk menentukan besaran penghasilan yang wajar berdasarkan capaian target yang dicapai oleh anggota Direksi dimaksud.

Dewan Komisaris PT INTI (Persero) telah mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 maka Faktor Jabatan untuk Sekretaris Dewan Komisaris adalah maksimal 15% dari Direktur Utama.

Pajak atas Gaji atau Honorarium ditanggung dan menjadi beban Perseroan. Besarnya Gaji atau Honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS atau Menteri setiap tahun dengan daya laku selama satu tahun buku perusahaan terhitung sejak Januari tahun berjalan.

Dalam hal RUPS atau Menteri tidak menetapkan besarnya Gaji atau Honorarium anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk tahun tertentu, maka besarnya Gaji atau Honorarium menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS or Menteri.

Tunjangan

Allowance

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan Tunjangan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Magnitude of Position Factor is set in the following composition:

1. *President Director : 100%*
2. *Members of the Board of Directors : 85% of the President Director*
3. *President Commissioner : 45% of the President Director*
4. *Members of the Board of Commissioners : 90% of the President Commissioner*

The General Meeting of Shareholders or Minister may determine a different Position Factor if deemed better reflecting the justice and fairness in the implementation of the tasks and responsibilities of each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Company's ability.

A person with a special ability assigned to the Board of Directors for restructuring or extraordinary performance improvements to the SOEs may be awarded additional income above the salary based on the General Meeting of Shareholders or Minister decision. The additional income referred to above is attributed to the expectation of achieving Key Performance Indicators (KPI), which contain the annual targets to be achieved by the members of the Board of Directors. The achievement of the KPI is evaluated at the end of each financial year to determine the fair amount of income based on the achievement of the targets the members of the Board of Directors achieve.

The Board of Commissioners of PT INTI (Persero) has appointed a Secretary to the Board of Commissioners according to Regulation of Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023, the Position Factor for Secretary of the Board of Commissioners is 15% of the President Director.

Taxes on Salary or Honorarium are borne by and become expenses of the Company. The amount of Salary or Honorarium of the Board of Directors and the Board of Commissioners determined by the General Meeting of Shareholders or Minister each year with a validity of the Company's fiscal year since January of the current year.

Suppose the General Meeting of Shareholders or Minister does not specify the amount of honorarium of the Board of Directors and/or Board of Commissioners for a particular year. In that case, the last honorarium set and enforced by the General Meeting of Shareholders or Minister will be used.

To the Board of Directors and Commissioners, allowances may be given, adjusted to the Company's financial condition and ability, and must not conflict with laws and regulations.

Pajak atas Tunjangan ditanggung dan menjadi beban Perseroan.

1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Besaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan adalah 1 (satu) kali Gaji atau Honorarium.

2. Santunan Purnajabatan

Kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan Santunan Purnajabatan dalam bentuk Asuransi Purnajabatan, Asuransi Dana Pensiun, atau bentuk lainnya.

Pemberian Santunan Purnajabatan atau bentuk lainnya diatur sebagai berikut:

- Diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti).
- Premi, iuran, atau istilah lain yang relevan yang dapat ditanggung oleh Perseroan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji atau Honorarium dalam satu tahun yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahun anggaran.
- Pemilihan program untuk Santunan Purnajabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris setelah ditetapkan anggarannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Pemberian premi, iuran, atau istilah lain yang relevan sebagaimana dimaksud sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian.

Tunjangan Khusus Dewan Komisaris

Kepada anggota Dewan Komisaris diberikan pula tunjangan lain yang dapat berupa Tunjangan Cuti Tahunan, Tunjangan Cuti Besar, Tunjangan Perumahan, termasuk Biaya Utilitas.

Tunjangan Transportasi

Kepada Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan Tunjangan Transportasi yang besarnya setiap bulan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Gaji atau Honorarium masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Tunjangan Khusus Direksi

Kepada Anggota Dewan Direksi diberikan pula Tunjangan Perumahan termasuk Biaya Utilitas.

Tunjangan Perumahan

Tunjangan Perumahan termasuk Biaya Utilitas diberikan bagi Direksi karena Perseroan tidak menyediakan fasilitas Rumah Jabatan. Tunjangan Perumahan diberikan secara

Taxes on Allowance are borne by and become expenses of the Company.

1. Religious Holiday Allowance

Religious Holiday Allowance may be given to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners. The amount of Religious Holiday Allowance is 1 (one) time of Salary or Honorarium.

2. Post-Service Compensation

Members of the Board of Directors and Board of Commissioners may be provided with Post-Service Compensation in the form of Post-Service Insurance, Pension Fund Insurance, or other forms.

Provision of Post-Service Compensation or other forms is regulated as follows:

- Awarded during his tenure (starting from being appointed to stopping).*
- Premiums, contributions, or other relevant terms that can be borne by the Company are a maximum of 25% (twenty five percent) of the Salary or Honorarium in one year which is budgeted in the Company's Work Plan and Budget for each fiscal year.*
- The selection of the program for the Post-Service Compensation is determined by each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners after the budget is determined by the General Meeting of Shareholders (GMS).*
- The provision of premiums, contributions, or other relevant terms as intended includes premiums for accident and death insurance.*

Allowances for The Board of Commissioners Only

To the members of the Board of Commissioners are also given other allowances which can be in the form of Annual Leave Allowance, Grand Leave Allowance, Housing Allowance, including Utility Fees.

Transportation Allowances

To the members of the Board of Commissioners may be given Transport Allowance which is set for each month at most 20% (twenty percent) of the Salary or Honorarium of each member of the Board of Commissioners concerned.

Allowances for Board of Directors Only

Members of the Board of Directors are also given Housing Allowance including Utility Fees.

Housing Allowance

Housing Allowances including Utility Costs are granted for the Board of Directors because the Company does not provide Official Residences. Housing Allowances are given on a monthly

bulanan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) mengingat PT INTI (Persero) berkedudukan di Kota Bandung yang merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat.

basis amounted Rp 25,000,000.00 (twenty five million rupiah) since PT INTI (Persero) is located in Bandung City, the capital of West Java province.

Fasilitas

Facilities

KKepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan Fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

To the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners may be given Facilities adjusted to the conditions and financial capability and must not conflict with laws and regulations.

Pajak yang timbul akibat pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud ditanggung dan menjadi beban Perseroan.

Taxes arising from the provision of facilities as mentioned above are borne by and become expenses of the Company.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilarang melakukan penyalahgunaan Fasilitas sebagaimana dimaksud di atas. Pemegang Saham dapat menuntut secara hukum terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yang melakukan penyalahgunaan Fasilitas.

The members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are prohibited to misuse facilities referred above. Shareholders may litigate against BOD or BOC member misusing the Facility.

Fasilitas Kesehatan

Health Facilities

Perseroan memberikan Fasilitas Kesehatan kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*).

The company provides health facilities to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses.

Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Health Facilities mentioned above are granted with the following conditions:

1. Fasilitas Kesehatan diberikan kepada anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris beserta seorang istri atau suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun, dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan Fasilitas Kesehatan.
2. Fasilitas Kesehatan diberikan dengan menggunakan dasar pengobatan dan perawatan di dalam negeri, yang meliputi :
 - a. Rawat jalan dan obat
 - b. Rawat inap dan obat
 - c. *Medical check-up*
3. Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian Fasilitas Kesehatan dapat diberikan penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.
4. *Medical chek-up* sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf (c) dan Fasilitas Pengobatan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka (3) tidak diberikan

1. *Health Facilities are granted to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and a wife or a husband and a maximum of 3 (three) children who have not reached the age of 25 years, provided that if the child under 25 years old has been married or worked, then the concerned child is not entitled to health facilities.*
2. *Health facilities are given based on domestic health treatment and medical care, which includes:*
 - a. *Outpatient and medicines*
 - b. *Hospitalization and medicines*
 - c. *Medical check-ups*
3. *In case of the treating physician providing referrals for treatment abroad, the provision of Health Facilities can be granted fully or partially by taking Company financial capabilities into account.*
4. *Medical check-ups as referred to in number (2) letter (c) and overseas medical facilities as referred to in number (3) are not given to wives, husbands and children.*



kepada isteri, suami, dan anak.

5. *Medical check-up* diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
6. Dalam hal anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan atau perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan harus memilih satu Fasilitas Kesehatan yaitu dari PT INTI (Persero). Apabila anggota Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada badan usaha milik negara (BUMN) lainnya, maka hanya diberikan satu fasilitas kesehatan.

Fasilitas Bantuan Hukum

Perseroan wajib memberikan Fasilitas Bantuan Hukum kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindakan atau perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan menggunakan Fasilitas Bantuan Hukum, wajib membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi, dan bersedia mengembalikan Fasilitas Bantuan Hukum tersebut kepada Perseroan apabila ternyata terbukti sebaliknya.

Fasilitas Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pembiayaan 1 (satu) jasa kantor pengacara atau konsultan hukum untuk setiap kasus tertentu, yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan. Penunjukan kantor pengacara atau konsultan hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai prosedur pengadaan barang atau jasa yang berlaku.

Dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, atau yang bersangkutan menggunakan kantor pengacara atau bantuan hukum atas pilihannya sendiri, maka seluruh biaya pengacara atau konsultan hukum, baik yang sudah maupun belum dibayarkan, menjadi beban yang bersangkutan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-06/MBU/02/2016, Fasilitas Bantuan Hukum ini tidak berlaku jika penggugat atau tergugat adalah PT INTI (Persero), Negara (negara sebagai badan hukum, lembaga negara, atau lembaga pemerintah), atau pihak lain yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Menteri.

Fasilitas Khusus Direksi

Khusus untuk anggota Direksi diberikan fasilitas sebagai berikut:

5. *Medical check-ups* are given 1 (one) times each year.
6. In case the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners having a concurrent position as a Board of Commissioners member in subsidiaries or joint ventures, then the concerned shall choose one Medical Facility, which is from PT INTI (Persero). If the Board of Commissioners member is concurrently a member of the Board of Commissioners in another SOE, only one medical facility will be given.

Legal Aid Facility

The Company shall provide the Legal Aid Facility to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in case of actions or acts happened for and on behalf of their position related to the Company's purposes and objectives as well as business activities.

Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners intending to make use of the Legal Aid Facility, shall make a Statement on stamped paper explaining that their position in a particular case is not in an unofficial capacity, and is willing to return the Legal Aid Facility if proven otherwise.

Legal Aid Facility mentioned above are provided in the form of financing of 1 (one) lawyer's or legal consultant office service for each particular case, covering the examination process as witnesses, suspects, and the defendant in court. Appointment of attorney or law consultant is carried out by the Company according to the procedure of procurement of goods or services that applies.

In the event that the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners concerned is declared guilty and sentenced by a decision that has had permanent legal force, or their use a lawyer's or legal consultant office of their choice, then the entire costs of lawyer or legal consultant, either already or have not been paid, will be borne by the concerned.

According to Regulation of Ministry of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-06/MBU/02/2016, the Legal Aid Facility is not valid if the plaintiff or the defendant is PT INTI (Persero), the Country (as legal entity, state institution, or government institution), or other parties that is determined by the General Meeting of Shareholders (GMS) or Minister.

Facility for The Board of Directors Only

Exclusively for members of the Board of Directors, the following facilities are provided:

Fasilitas Kendaraan

Apabila Perseroan mempunyai kondisi keuangan yang sehat dan mampu, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Menteri dapat menyediakan Fasilitas Kendaraan kepada anggota Direksi sebanyak satu unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional.

Dalam hal Perseroan menyediakan Fasilitas Kendaraan, dan anggota Direksi tidak mau menggunakan kendaraan tersebut, maka kepada anggota Direksi, yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Transportasi maupun biaya penggantian lainnya.

Spesifikasi dan standar kendaraan sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh RUPS atau Menteri.

Dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat, wajib mengembalikan kendaraan sebagaimana dimaksud kepada Perseroan.

Dalam hal anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan atau perusahaan patungan, maka yang bersangkutan harus memilih satu Fasilitas Kendaraan.

Vehicle Facility

If the Company has a healthy financial condition and is capable, with the approval of the General Meeting of Shareholders (GMS) or Minister can provide facilities to the members of the Board of Directors by one unit of official vehicle including maintenance and operating costs.

In case the Company provides Vehicle Facility, and the member of the Board of Directors does not want to use the vehicle, then to that concerned member is not to be given any transportation allowance or other reimbursement costs.

Vehicle specifications and standards as mentioned above is designated by the GMS or Minister.

In the case of a member of the Board of Directors is no longer in office, within 30 (thirty) days after being terminated, the vehicle must be returned to the Company.

In case of a member of Board of Directors having a concurrent position as the member of Board of Commissioners in subsidiaries or joint ventures, then the concerned shall choose one Vehicle Facility.

Tantiem

Tantiem

Perseroan dapat memberikan Tantiem atau Insentif Kinerja kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan penetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Menteri dalam pengesahan laporan tahunan, apabila:

1. Opini yang diterbitkan oleh auditor adalah paling sedikit Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
2. Realisasi Tingkat Kesehatan dengan nilai paling rendah yaitu 70. Pencapaian dimaksud tidak memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya.
3. Capaian Ukuran Kinerja Utama (Key Performance Index atau KPI) paling rendah sebesar 80%. Pencapaian dimaksud tidak memperhitungkan faktor di luar pengendalian Direksi.
4. Kondisi Perseroan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk perusahaan yang tengah berada dalam kondisi rugi, atau Perseroan tidak menjadi rugi dari sebelumnya tengah berada dalam kondisi untung. Kerugian tersebut tidak memperhitungkan faktor di luar pengendalian Direksi.

The Company can give Tantiem or Performance-based Incentives to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners determined by the General Meeting of Shareholders (GMS) or Minister in the annual report approval, if:

1. *The opinion issued by the auditor is at least a Qualified Opinion.*
2. *Realization of the Health Level with the lowest score of 70. This achievement does not take into account the burden or profit resulting from the previous actions of the Board of Directors.*
3. *The lowest Key Performance Index (KPI) is 80%. Such achievement does not take into account factors beyond the control of the Board of Directors.*
4. *The condition of the Company is not losing more than the previous year for a company that is in a loss condition, or the Company is not at a loss from before being in a profit condition The loss does not take into account factors beyond the control of the Board of Directors.*

Tantiem atau Insentif Kinerja merupakan beban biaya tahun buku yang bersangkutan, dan oleh karenanya harus dianggarkan secara spesifik dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun tersebut. Anggaran Tantiem atau Insentif Kerja tersebut harus dikaitkan dengan target-target KPI yang ditetapkan dalam RKAP tahun yang bersangkutan.

Apabila pemberian Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud di atas melebihi anggaran Tantiem atau Insentif Kinerja dalam RKAP maka kekurangan anggaran dimaksud diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun buku yang bersangkutan. Penetapan anggaran Tantiem atau Insentif Kinerja tersebut menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh RUPS atau Menteri.

Tantiem atau Insentif Kinerja diberikan secara proporsional berdasarkan capaian KPI pada tahun yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa KPI juga harus mempertimbangkan kriteria pencapaian pelaksanaan tugas selaku agen pembangunan (*agent of development*) yang akan ditetapkan oleh RUPS atau Menteri secara tersendiri, dengan memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sinergi BUMN
2. Hilirisasi dan kandungan lokal
3. Pembangunan ekonomi daerah terpadu
4. Kemandirian keuangan dan penciptaan nilai
5. Penugasan Pemerintah

Dengan mempertimbangkan kepantasan, dan/atau kualitas laba yang dibukukan, dan/atau kemampuan keuangan Perseroan, dan/atau faktor-faktor lain yang relevan, RUPS atau Menteri dapat menetapkan Tantiem atau Insentif Kinerja yang lebih rendah dari perhitungan atau anggaran.

Komposisi besarnya Tantiem atau Insentif Kinerja ditetapkan sebagai berikut :

1. Direktur Utama : **100%**
2. Anggota Direksi : **90% dari Direktur Utama**
3. Komisaris Utama : **45% dari Direktur Utama**
4. Anggota Dewan Komisaris : **90% dari Komisaris Utama**

Dalam hal terdapat jabatan lain yang tidak tercantum dalam komposisi Faktor Jabatan, besaran Faktor Jabatan ditetapkan oleh RUPS atau Menteri.

Dalam hal masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang bersangkutan, maka besaran Tantiem atau Insentif Kinerja dihitung secara proporsional dengan masa jabatan yang bersangkutan.

Tantiem or Performance-based Incentives is a cost burden of the fiscal year concerned, and therefore shall be budgeted specifically within the Company Work Plan and Budget of the concerned year. The Tantiem or Performance-based Incentives budget shall be linked to the KPI targets set in the Company Work Plan and Budget concerned.

If the provision of Tantiem or Performance Incentives as referred to above exceeds the Tantiem or Performance Incentives budget in the Company Work Plan and Budget, the budget shortfall in question is calculated as a cost in the relevant financial year. The determination of the Tantiem budget or Performance Incentives uses the internal guidelines set by the GMS or the Minister.

Tantiem or Performance Incentives are given proportionally based on the achievements of the KPI in the relevant year, provided that the KPI must also consider the criteria for achieving the implementation of tasks as agents of development which will be determined by the GMS or the Minister separately, by containing the following elements following:

1. SOEs Synergy
2. Downstream and local content
3. Integrated regional economic development
4. Financial independence and value creation
5. Government Assignment

By considering the appropriateness, and/or quality of recorded profits, and/or the financial capability of the Company, and/or other relevant factors, the GMS or the Minister may determine the Tantiem or Performance Incentives that are lower than the calculation or budget.

The composition of the amount of Tantiem or Performance Incentives is determined as follows:

1. President Director : **100%**
2. Members of the Board of Directors : **90% of the President Director**
3. President Commissioner : **45% of the President Director**
4. Members of the Board of Commissioners : **90% of the President Commissioner**

In the event that there are other positions that are not listed in the composition of the Position Factor, the amount of the Position Factor shall be determined by the GMS or the Minister.

In case of the tenure of member of the Board of Directors and the Board of Commissioners member is less than 12 (twelve) months in the concerned fiscal year, the amount of Tantiem or Performance-based Incentive is calculated in proportion to the term of office concerned.

Pajak Penghasilan atas Tantiem dan Insentif Kinerja ditanggung dan menjadi beban masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Income Tax on Tantiem and Performance Incentives is borne and borne by each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners concerned.

Tantiem

Tantiem

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-04/MBU/2014, Perseroan dapat menganggarkan biaya operasional sebagai berikut :

According to Regulation of Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-04/MBU/2014, the Company can budget operating expenses as follow :

1. Untuk anggota Direksi

Biaya komunikasi, pakaian seragam, keanggotaan perkumpulan profesi, club membership atau corporate member, dan biaya representasi dalam bentuk *corporate credit card*.

1. For members of the Board of Director

Communication fees, uniforms, membership of professional associations, club membership or corporate members, and the cost of representation in the form of corporate credit card.

2. Untuk anggota Dewan Komisaris

Pakaian seragam dan keanggotaan perkumpulan profesi.

2. For members of the Board of Commissioners

Uniforms and professional association membership.

Resume Struktur Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris

Resume Salary Structure, Benefits, and Facilities Board of Directors and Board of Commissioners

Gaji Per Tahun <i>Salary Per Year</i>	Tunjangan <i>Allowance</i>	Fasilitas <i>Facilities</i>
Direktur Utama <i>President Director</i> Anggota Direksi 85% dari Direktur Utama <i>The member of the Board of Directors 85% of President Director</i>	- Tunjangan Hari Raya Keagamaan : 1 (satu) kali gaji* <i>Religious Holiday Allowance : 1 (one) time salary*</i> - Tunjangan Purnajabatan : Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun <i>Post-Service Allowance : The premium borne by the company is 25% of salary in 1 year</i> - Tunjangan Perumahan : Rp 25.000.000,- per bulan <i>Housing Allowance: Rp 25.000.000,- per month</i>	- Fasilitas Kendaraan : 1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi perusahaan <i>Vehicle Facility: 1 (one) unit along with maintenance and operational costs, taking into account the condition of the company</i> - Fasilitas Kesehatan: dalam bentuk asuransi kesehatan atau pengganti biaya pengobatan (at cost) <i>Health Facility: in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost)</i> - Fasilitas Bantuan Hukum: sebesar pemakaian (at cost) <i>Legal Aid Facility: at cost</i>
Komisaris Utama 45% dari Direktur Utama <i>President Commissioner</i> 45% from President Director Anggota Dewan Komisaris 90% dari Komisaris Utama <i>The member of the Board of Commissioners 90% of President Commissioner</i>	- Tunjangan Hari Raya Keagamaan : 1 (satu) kali gaji* <i>Religious Holiday Allowance : 1 (one) time salary*</i> - Tunjangan Purnajabatan : Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun <i>Post-Service Allowance : The premium borne by the company is 25% of salary in 1 year</i> - Tunjangan Transportasi : 20% dari honorarium per bulan <i>Transportation Allowance: 20% of the honorarium per month</i>	- Fasilitas Kesehatan: dalam bentuk asuransi kesehatan atau pengganti biaya pengobatan (at cost) <i>Health Facility: in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost)</i> - Fasilitas Bantuan Hukum: sebesar pemakaian (at cost) <i>Legal Aid Facility: at cost</i>

**Realisasi Remunerasi
Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023**

*Remuneration Realization
of The Board of Directors and The Board of Commissioners in 2023*

Dewan Komisaris (dalam Rupiah) <i>Board of Commissioners (in Rupiah)</i>			
Honorarium	Tunjangan <i>Allowances</i>	Tunjangan Lainnya <i>Other Allowances</i>	Asuransi Purnajabatan <i>Post-Employment Insurance</i>
1.938.060.000,-	387.612.000,-	0,-	484.515.000,-

Dewan Direksi (dalam Rupiah) <i>Board of Commissioners (in Rupiah)</i>			
Gaji <i>Salary</i>	Tunjangan <i>Allowances</i>	Tunjangan Lainnya <i>Other Allowances</i>	Asuransi Purnajabatan <i>Post-Employment Insurance</i>
3.142.800.000,-	900.000.000,-	0,-	785.700.000,-

Remunerasi Direksi Tahun 2023

The Remuneration of The Board of Directors in 2023

Nama <i>Name</i>	Gaji per Tahun <i>Salary per Year</i>	Tunjangan per Tahun <i>Attendance</i>	Potongan Dinas <i>Service Deductions</i>	Gaji Bersih per Tahun <i>Net Salary per Year</i>	Tantiem Tunjangan Hari Raya <i>Tantiem Religious Holiday Allowance</i>	Jumlah <i>Amount</i>
	1	2	3	4 = 1+2+3	5	6 = 4+5
Edi Witjara	1.164.000.000	300.000.000	25.867.152	1.489.867.152	97.000.000	1.586.867.152
Tantang Yudha Santoso	989.400.000	300.000.000	22.375.152	1.311.775.152	82.450.000	1.394.225.152
Ahmad Taufik	989.400.000	300.000.000	22.375.152	1.311.775.152	82.450.000	1.394.225.152

Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2023

The Remuneration of The Board of Directors in 2023

Nama <i>Name</i>	Gaji per Tahun <i>Salary per Year</i>	Tunjangan per Tahun <i>Attendance</i>	Potongan Dinas <i>Service Deductions</i>	Gaji Bersih per Tahun <i>Net Salary per Year</i>	Tantiem Tunjangan Hari Raya <i>Tantiem Religious Holiday Allowance</i>	Jumlah <i>Amount</i>
	1	2	3	4 = 1+2+3	5	6 = 4+5
Unggul Priyanto	523.800.000	104.760.000	10.476.000	639.036.000	43.650.000	682.686.000
Trisno Hendradi	471.420.000	94.284.000	9.428.400	575.132.400	39.285.000	614.417.400
Rahmadi Murwanto	471.420.000	94.284.000	10.575.552	576.279.552	39.285.000	594.750.000
Yanuar Rokhmad Madyantoro	471.420.000	94.284.000	10.575.552	576.279.552	39.285.000	594.750.000

Komite Audit

Audit Committee

Untuk lebih meningkatkan kinerjanya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris serta kalangan luar dengan berbagai keahlian dan kualifikasi yang dibutuhkan. Komite Audit harus bebas dari pengaruh Direksi maupun Eksternal Auditor. Dengan demikian, Komite Audit hanya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Penggantian anggota Komite Audit yang belum habis masa jabatannya dan pengangkatan anggota Komite Audit yang baru harus mendapat persetujuan paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Komite Audit dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-37/DEKOM/INTI/04/2023 tertanggal 18 April 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

Komite Audit PT INTI (Persero) berjumlah 2 (dua) orang, yaitu dari 1 (satu) orang anggota Komisaris Perseroan merangkap menjadi Ketua Komite Audit dan 1 (satu) orang anggota Komite Audit. Susunan Komite Audit sebagaimana dimaksud Keputusan Dewan Komisaris tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rahmadi Murwanto sebagai Ketua.
2. Endarjono sebagai Anggota.

To further improve their performance, the Board of Commissioners shall establish an Audit Committee consisting of one or more members of the Board of Commissioners and outer circles with a variety of skills and qualifications required. The Audit Committee shall be free from the influence of the Board of Directors and the External Auditors. Thus only the Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners. Replacement of members of the Audit Committee whose term is not yet expired and appointment of new member of the Audit Committee must be approved by at least 50% of the total number of Commissioners.

The Audit Committee is established based on the Decree of the Board of Commissioners Number KEP-37/DEKOM/INTI/04/2023 dated April 18, 2023, regarding the Dismissal and Appointment of the Audit Committee of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).

Audit Committee of PT INTI (Persero) consists of 2 (two) members, namely 1 (one) member of the Board of Commissioners concurrently as Chairman and 1 (one) member of the Audit Committee. The composition of the Audit Committee referred to the decision of the Board of Commissioners are as follows:

1. Rahmadi Murwanto as Chairman.
2. Endarjono as Member.

Kualifikasi Anggota Komite Audit

Qualification of Audit Committee Members

• Ketua Komite Audit

Rahmadi Murwanto, Ak., M.Acc., Ph.D., Warga Negara Indonesia, berdomisili di Tangerang Selatan, lahir di Metro 13 Maret 1970, mengawali karir di Kementerian Keuangan pada tahun 1991 di Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK) setelah lulus Diploma-III dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Lulusan Strata-2 jurusan Akuntansi dari Weatherhead School of Management Case Western Reserve University Amerika Serikat itu pernah menjabat sebagai Direktur Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2016-sekarang. Peraih gelar Akuntan pada tahun 1997 ini juga sempat menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat

• Chairman of Audit Committee

Rahmadi Murwanto, Ak., M.Acc., Ph.D.

Indonesian citizen, domiciled in South Tangerang, born in Metro March 13, 1970, started his career at the Ministry of Finance in 1991 at the Financial Education and Training Agency after graduating Diploma-III from the State Accounting College.

A Postgraduate majoring in Accounting from Weatherhead School of Management Case Western Reserve University, United States of America, has served as Director of the State Finance Polytechnic State Accounting College in 2016-present. The owner of the title of Accountant in 1997 also served as Head of the Organization and Administration Section of the Secretariat of the Financial Education and



Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) pada 2014, Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja BPPK pada tahun 2011, serta Kepala Subbagian Organisasi Sekretariat BPPK pada tahun 2003.

- **Anggota Komite Audit**

Endarjono, Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, lahir pada 3 Oktober 1962. Lulus dari pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Diponegoro pada tahun 1987 dan S2 Manajemen Bisnis Administrasi Teknologi di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2005.

Memiliki pengalaman kerja sebagai Direktur di Perum Produksi Film Negara (2011-2013), Direktur Administrasi dan Keuangan di Perum Produksi Film Negara (2001-2011), Kasubdit Pendukung Jasa Konstruksi di Kementerian Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (2000-2001), Kasubdit Perusahaan Manufaktur Strategis di Kementerian Kementerian Pendayagunaan BUMN (2000-2001), dan Kepala Bagian Pendanaan di Badan Pengelola Industri Strategis (1992-1999).

Training Agency in 2014, Head of Performance Evaluation and Reporting Division of Financial Education and Training Agency in 2011, and Head of the Secretariat Organization Subdivision of the Financial Education and Training Agency in 2003.

- **Audit Committee Member**

EEndarjono, an Indonesian citizen, domiciled in Jakarta, born on October 3, 1962. Graduated from Bachelor Degree of Accounting at Diponegoro University in 1987 and holds a Masters in Business Administration in Technology at the Bandung Institute of Technology in 2005.

Having work experience as a Director of State Film Production Corporation (2011-2013), Director of Administration and Finance at the State Film Production Corporation (2001-2011), Head of Sub Directorate of Construction Services Support at the Ministry of Investment and Development of State Owned Enterprises (SOEs) (2000-2001), Head of Sub Directorate of Strategic Manufacturing Companies in the Ministry of SOEs Empowerment (2000-2001), and Head of Funding Section at the Strategic Industry Management Agency (1992-1999).

Independensi Anggota Komite Audit

Independence of The Audit Committee Member

Berdasarkan Piagam Komite Audit PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), Komite Audit adalah organ pendukung Dewan Komisaris di dalam infrastruktur Good Corporate Governance (GCG) yang bekerja secara kolektif dan bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan. Kedudukan Komite Audit berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Ketua Komite Audit dijabat oleh salah seorang anggota Komisaris Perseroan. Personil Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Komite Audit harus tidak memiliki benturan kepentingan terhadap Perseroan.

Independensi Komite Audit ditetapkan untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya atau hubungan dengan pihak lain secara independen tanpa campur tangan pihak-pihak lain atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan yang secara material dapat mengganggu objektivitas dan kemandirian tugas Komite Audit yang dijalankan untuk kepentingan Perseroan.

Antar-anggota Komite Audit, dengan Direksi, dengan Dewan Komisaris, serta dengan Pemegang Saham Utama dan/atau

Based on the Audit Committee Charter PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), the Audit Committee is a supporting organ to the Board of Commissioners in the Good Corporate Governance (GCG) infrastructure supporting that works collectively and is independent both in the execution of its tasks and in reporting. The position of the Audit Committee is subordinate and reporting to the Board of Commissioner.

Chairman of the Audit Committee is held by a member of the Board of Commissioners. The personnel of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported to the General Meeting of Shareholders. In performing their duties, members of the audit committee must have no conflict of interest to the Company.

Independence of the Audit Committee is determined to carry out all its duties and responsibilities or relationships with other parties independently without interference from other parties or that are against the laws and regulations and the Articles of Association of the Company which can materially interfere with the objectivity and independence of the duties of the Audit Committee for the benefit of the Company.

Between members of the Audit Committee, as well as the Audit Committee with members of the Risk Development and

Pengendali tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

GCG Committee, with the Board of Directors, with the Board of Commissioners and also with the Major, and/or Controlling Shareholders do not have family relations up to the third degree, either according to a straight line or a sideways line including relationships arises because of marriage.

Tugas Komite Audit dan Pelaksanaannya di Tahun 2023

Tasks of Audit Committee and The Implementation in 2023

Berdasarkan Piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas informasi keuangan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan lainnya.
2. Menyeleksi dan mengusulkan calon auditor independen dan melakukan evaluasi untuk memberikan persetujuan awal terhadap jasa auditor independen.
3. Melakukan penelaahan atas efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
4. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal.
5. Melakukan menelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh Perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
7. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi.
8. Menerima, menelaah, dan memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan, manajemen, atau karyawan.
9. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan memutakhirkan Piagam Komite Audit.

Based on the Audit Committee Charter, the duties and responsibilities of the Audit Committee are as follows:

1. *Assisting the Board of Commissioners in reviewing financial information such as financial reports, projections, and others.*
2. *Select and propose prospective independent auditors and conduct evaluations to provide initial approval for independent auditor services.*
3. *Reviewing the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the external and internal auditors' duties implementation.*
4. *Assessing the implementation of activities as well as the results of audits carried out by the Internal Audit Unit and the external auditors.*
5. *Reviewing the Company's compliance with laws and regulations relating to company activities.*
6. *Report to the Board of Commissioners the various risks that may be faced by the Company and the implementation of risk management by the Board of Directors.*
7. *Examining the alleged error in the decision of the Board of Directors meeting.*
8. *Receive, review, and monitor follow-up complaints relating to the company, management, and employees.*
9. *Identifying matters requiring the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners.*
10. *Carry out other duties assigned by the Board of Commissioner based on the prevailing laws and regulations.*
11. *Evaluating the effectiveness of the implementation of duties and updating the Audit Committee Charter.*



Komite Audit melakukan komunikasi dengan Direksi dan jajaran Manajemen mengenai masalah laporan keuangan dan pelaporan, menyangkut kebijakan dan praktik pelaporan akuntansi dan keuangan termasuk adanya perubahan yang signifikan, dasar pertimbangan dari alternatif perlakuan akuntansi yang dipergunakan, standar pelaporan akuntansi, laporan keuangan triwulan maupun tahunan.

Secara berkala, Komite Audit dan Satuan Pengawas Intern melakukan rapat koordinasi yang membahas antara lain struktur pengendalian intern, laporan keuangan, kebijakan akuntansi, laporan hasil audit, kinerja audit, dan lain-lain.

The Audit Committee communicates with the Board of Directors and the Management on the issue of financial statements and reporting, policies and practices regarding accounting and financial reporting, including any significant changes, considerations taken for used alternative accounting treatment, accounting reporting standards, quarterly and annual financial reports.

Periodically, the Audit Committee and Internal Audit Unit hold a coordination meeting which discusses among other things the structure of internal control, financial reporting, accounting policies, report the results of audits, performance audits, and others.

Daftar Rekapitulasi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

List of Audit Committee Meeting Recapitulation and Attendance Rate

No.	Materi Rapat <i>Meeting Materials</i>	Jumlah (Kali) <i>Quantity (Times)</i>	Peserta <i>Participant</i>	Tingkat Kehadiran <i>Attendance Rate</i>
1	Pembahasan Laporan Keuangan Bulanan dengan Dewan Komisaris <i>Discussion of Monthly Financial Reports with the Board of Commissioners</i>	12 kali <i>12 times</i>	Rahmadi Murwanto	100%
2	Pembahasan Realisasi Program Kerja Satuan Pengawas Intern Triwulan I sampai dengan IV <i>Discussion on the Realization of the Work Program of the Internal Audit Unit in Quarters I to IV</i>	4 kali <i>4 times</i>	Endarjono	100%

No.	Tanggal Rapat <i>Date of Meeting</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Jabatan <i>Position</i>	Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i>
1	02 Februari 2023 <i>February 02, 2023</i>	Pembahasan Laporan Realisasi Program Kerja Satuan Pengawas Intern sampai dengan Triwulan IV 2023 <i>Discussion of the Report on the Realization of the Work Program of the Internal Supervisory Unit up to Quarter IV 2023</i>	Rahmadi Murwanto	Ketua Komite Audit <i>Chairman of the Audit Committee</i>
			Endarjono	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>
			Lisda Noor Rachmawati	Vice President Satuan Pengawasan Intern <i>Vice President of Internal Audit Unit</i>
			Febriani Puspa Dewi	Manager Rencal Audit <i>Audit Planning and Control Manager</i>
			Dhani Purwito	Senior Auditor
			Aar Sumiarsa	Senior Auditor
			Revita P. Siswanto	Notulis <i>Note Taker</i>

2	03 Mei 2023 May 03, 2023	1. Pembahasan Laporan Realisasi Program Kerja Satuan Pengawas Intern sampai dengan Triwulan I 2023 dan Rencana Kegiatan Triwulan II 2023 <i>Discussion of the Report on the Realization of the Work Program of the Internal Audit Unit until the first Quarter of 2023 and the Plan of Activities for the Second Quarter of 2023</i> 2. Lain-lain <i>Others</i>	Rahmadi Murwanto	Ketua Komite Audit <i>Chairman of the Audit Committee</i>
			Endarjono	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>
			Lisda Noor Rachmawati	Vice President Satuan Pengawasan Intern <i>Vice President of Internal Audit Unit</i>
			Febriani Puspa Dewi	Manager Rencal Audit <i>Audit Planning and Control Manager</i>
			Dhani Purwito	Senior Auditor
			Aar Sumiarsa	Senior Auditor
3	24 Juli 2023 July 24, 2023	1. Pembahasan Laporan Realisasi Program Kerja Satuan Pengawas Intern sampai dengan Triwulan II 2023 dan Rencana Kegiatan Triwulan III 2023 <i>Discussion of the Report on the Realization of the Work Program of the Internal Audit Unit until the Second Quarter of 2023 and the Plan of Activities for the Third Quarter of 2023</i> 2. Lain-lain <i>Others</i>	Revita P. Siswanto	Notulis <i>Note Taker</i>
			Rahmadi Murwanto	Ketua Komite Audit <i>Chairman of the Audit Committee</i>
			Endarjono	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>
			Febriani Puspa Dewi	Vice President Satuan Pengawas Intern <i>Vice President of Internal Audit Unit</i>
			Dhani Purwito	Senior Auditor
			Aar Sumiarsa	Senior Auditor
4	16 November 2023 November 16, 2023	1. Pembahasan Laporan Realisasi Program Kerja Satuan Pengawas Intern sampai dengan Triwulan III 2023 dan Rencana Kegiatan Triwulan IV 2023 <i>Discussion of the Report on the Realization of the Work Program of the Internal Supervisory Unit up to Quarter III 2023 and the Activity Plan for Quarter IV 2023</i> 2. Lain-lain <i>Others</i>	Revita P. Siswanto	Notulis <i>Note Taker</i>
			Rahmadi Murwanto	Ketua Komite Audit <i>Chairman of the Audit Committee</i>
			Endarjono	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>
			Febriani Puspa Dewi	Vice President Satuan Pengawas Intern <i>Vice President of Internal Audit Unit</i>
			Dhani Purwito	Senior Auditor
			Aar Sumiarsa	Senior Auditor



5	Januari sampai dengan Desember 2023 <i>January until December 2023</i>	Pembahasan Laporan Keuangan Januari sampai dengan Desember 2023 (tiap bulan) <i>Discussion of Financial Statements for January to December 2023 (every month)</i>	Unggul Priyanto	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>
			Trisno Hendradi	Komisaris <i>Commissioners</i>
			Rahmadi Murwanto	Ketua Komite Audit <i>Chairman of the Audit Committee</i>
			Endarjono	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>
			Suripto	Sekretaris Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Secretary</i>
			Dian Agustina	Staf Sekretaris Dewan Komisaris <i>Staff Secretary to the Board of Commissioners</i>

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Dalam rangka membantu Dewan Komisaris, selain pembentukan Komite Audit, dibentuk pula Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan kriteria pemilihan calon Direksi dan mengusulkan besaran remunerasinya.

In order to assist the Board of Commissioners, in addition to the establishment of the Audit Committee, a Nomination and Remuneration Committee was also formed to determine the criteria for selecting candidates for the Board of Directors and propose the amount of remuneration.

Komite Nominasi dan Remunerasi PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) diangkat dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-56/DEKOM/INTI/10/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 dengan susunan sebagai berikut:

The Nomination and Remuneration Committee of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) was appointed by the Decree of the Board of Commissioners Number SK-56/DEKOM/INTI/10/2022 dated October 31, 2022 with the following composition:

Jabatan <i>Position</i>	Nama <i>Name</i>	Status Rangkap Jabatan <i>Double Position Status</i>
Ketua <i>Chairman</i>	Unggul Priyanto*	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>
Sekretaris <i>Secretary</i>	Trisno Hendradi*	Anggota Dewan Komisaris <i>Member of the Board of Commissioners</i>
Anggota <i>Member</i>	1. Rahmadi Murwanto* 2. Yanuar Rokhmad Madyantoro*	Anggota Dewan Komisaris <i>Member of the Board of Commissioners</i>
Pembantu Sekretaris <i>Assistant Secretary</i>	Endarjono**	Anggota Komite Audit <i>Member of the Audit Committee</i>

*Informasi mengenai riwayat hidup Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris.

** Information regarding the curriculum vitae of the Nomination and Remuneration Committee can be found in the profile section of the Board of Commissioners.*

** Informasi mengenai riwayat hidup Pembantu Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada bagian profil Komite Audit.

*** Information regarding the curriculum vitae of Assistant Secretary of the Nomination and Remuneration Committee can be found in the profile section of the Audit Committee.*



Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Independence of The Nomination and Remuneration Committee

Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), KNR adalah organ pendukung Dewan Komisaris di dalam infrastruktur (Good Corporate Governance/GCG) yang bekerja secara kolektif dan bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan, kedudukan KNR berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Based on the Charter of the Nomination and Remuneration Committee of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), the Nomination and Remuneration Committee is a supporting organ for the Board of Commissioners in the infrastructure (Good Corporate Governance/GCG) that works collectively and is independent both in carrying out its duties and in reporting, the position of the Nomination and Remuneration Committee is under and responsible to the Board of Commissioners.

Ketua KNR dijabat oleh Komisaris Utama Perseroan. Personil KNR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan

The Chairman of the Nomination and Remuneration Committee is held by the President Commissioner of the Company. The

dilaporkan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam melaksanakan tugasnya Anggota KNR harus tidak memiliki benturan kepentingan terhadap Perseroan.

Independensi KNR ditetapkan untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya atau hubungan dengan pihak lain secara independen tanpa campur tangan pihak-pihak lain atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perusahaan yang secara material dapat mengganggu obyektivitas dan kemandirian tugas KNR yang dijalankan untuk kepentingan Perseroan.

Antar-anggota KNR dan KNR dengan Direksi, serta dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi Perusahaan.
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi berdasarkan tolak ukur atau *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan atau kompetensi anggota Direksi.
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai usulan dari *Talent Committee*, yang terdiri dari Top 20% talent Board of Directors *minus one* (BOD-1) dan Direksi, kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada pemegang saham (Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS).
2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai:
 - 1) Struktur Remunerasi
 - 2) Kebijakan atas Remunerasi
 - 3) Besaran atas Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee personnel are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported to the General Meeting of Shareholders.

The independence of the Nomination and Remuneration Committee is determined to carry out all its duties and responsibilities or relationships with other parties independently without interference from other parties or contrary to the laws and regulations and the Company's Articles of Association which could materially interfere with the objectivity and independence of the Nomination and Remuneration Committee's duties carried out for the benefit of the Company.

Between Members of the Nomination and Remuneration Committee and the Nomination and Remuneration Committee with the Board of Directors, and also with the Main and/or Controlling Shareholders, there is no family relationship, including relationships that arise due to marriage.

Members of the Nomination and Remuneration Committee have the following duties and responsibilities:

1. *Related to the Nomination function:*
 - a. *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
 - 1) *The composition of the positions of the members of the Company's Board of Directors.*
 - 2) *Policies and criteria required in the nomination process.*
 - 3) *Performance evaluation policies for members of the Board of Directors.*
 - b. *Assisting the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors based on benchmarks or Key Performance Indicator (KPI) that have been prepared as evaluation materials.*
 - c. *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the capacity building program for members of the Board of Directors.*
 - d. *Proposing candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors according to the proposal from the Talent Committee, consisting of Top 20% talent Board of Directors minus one (BOD-1) and Directors, to the Board of Commissioners to be submitted to shareholders (General Meeting of Shareholders or GMS).*
2. *Related to the Remuneration function:*
 - a. *Provide recommendations to the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 1 (one) year regarding:*
 - 1) *Remuneration Structure*
 - 2) *Remuneration Policy*
 - 3) *Amount of Remuneration*

b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi.

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2023 Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan 3 (tiga) kali rapat dengan tingkat kehadiran 100%. Jumlah realisasi rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut di bawah rencana di dalam program kerja yang sebanyak 4 (empat) kali. Hal itu disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda Indonesia.
2. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap struktur organisasi yang sesuai dengan perkembangan bisnis perusahaan.
3. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi nominasi Direksi PT INTI (Persero).
4. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kinerja Direksi PT INTI (Persero) yang saat ini menjabat berdasarkan tolok ukur atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.
5. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi atau *Talent Committee* atas BoD-1 yang akan diusulkan sebagai *Nominated Talent* kepada Pemegang Saham.
6. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

b. *Assisting the Board of Commissioners in conducting performance appraisals in accordance with the remuneration received by each member of the Board of Directors.*

3. *Carry out other duties assigned by the Board of Commissioners based on the prevailing laws and regulations.*

In carrying out its duties and functions throughout 2023 the Nomination and Remuneration Committee has implemented the following activities:

1. *The Nomination and Remuneration Committee has held 3 (three) meetings with 100% attendance. The number of realization of the Nomination and Remuneration Committee meetings was below the plan in the work program which was 4 (four) times. This is due to the current conditions of the Covid-19 pandemic that still occurred in Indonesia.*
2. *Reviewing and provide recommendations to the Board of Commissioners on the organizational structure in accordance with the company's business development.*
3. *Reviewing and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the policies and criteria needed to be nominated for the Board of Directors of PT INTI (Persero).*
4. *Evaluate and provide recommendations to the Board of Commissioners on the performance of the Board of Directors of PT INTI (Persero) based on the benchmarks or Key Performance Indicators (KPI) that have been set.*
5. *Reviewing and providing recommendations to the Board of Commissioners on the proposal of the Board of Directors or Talent Committee on the BoD-1 which will be proposed as Nominated Talent to Shareholders.*
6. *Review and provide recommendations to the Board of Commissioners on the structure, policies, and amount of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners.*



No.	Tanggal Rapat <i>Date of Meeting</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i>	Jabatan <i>Position</i>
1	23 Januari 2023 <i>January 23, 2023</i>	Pembahasan <i>Nominated Talent</i> Direksi PT INTI (Persero) <i>Discussion on the Nominated Talent of the Directors of PT INTI (Persero)</i>	Unggul Priyanto	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Chairman of the Nomination and Remuneration Committee</i>
			Trisno Hendradi	Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Secretary of the Nomination and Remuneration Committee</i>
			1. Rahmadi Murwanto 2. b. Yanuar R. Madyantoro	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Nomination and Remuneration Committee</i>
			Endarjono	Pembantu Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Assistant Secretary of the Nomination and Remuneration Committee</i>
			Suripto	Sekretaris Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Secretary</i>
2	21 November 2023 <i>November 21, 2023</i>	Pembahasan <i>Nominated Talent</i> Direksi PT INTI (Persero) <i>Discussion on the Nominated Talent of the Directors of PT INTI (Persero)</i>	Unggul Priyanto	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Chairman of the Nomination and Remuneration Committee</i>
			Trisno Hendradi	Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Secretary of the Nomination and Remuneration Committee</i>
			1. Rahmadi Murwanto 2. b. Yanuar R. Madyantoro	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Nomination and Remuneration Committee</i>
			Endarjono	Pembantu Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Assistant Secretary of the Nomination and Remuneration Committee</i>
			Suripto	Sekretaris Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Secretary</i>

Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee

Penerapan pengelolaan risiko telah dilakukan secara formal sejak diterbitkannya Keputusan Direksi yang mengatur tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko pada 31 Maret 2005 dan dilengkapi dengan Keputusan Direksi yang mengatur Kebijakan Operasional dan Panduan Manajemen Risiko yang diterbitkan pada 12 Oktober 2005.

Dengan kebijakan tersebut maka penerapan pengelolaan risiko Perseroan telah dilakukan secara komprehensif di seluruh fungsi dan area kerja Perseroan, di mana pelaksanaannya senantiasa dikawal oleh sebuah Komite Manajemen Risiko yang dibentuk melalui sebuah Keputusan Direksi.

Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan Risiko senantiasa diperbaharui untuk penyempurnaan dengan menyesuaikan pada perubahan lingkungan internal dan eksternal Perseroan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tertanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, yang kemudian diganti menjadi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-2/MBU/03 Tahun 2023 tertanggal 03 Maret 2023 tentang tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Perseroan telah menetapkan Komite Pengelolaan Risiko menjadi sebuah struktur yang lebih permanen dalam struktur organisasi Perseroan sejak tahun 2014.

The implementation of risk management has been carried out formally since the issuance of the Decree of the Board of Directors, which regulates the General Guidelines for Risk Management on March 31, 2005, and is complemented by the Decree of the Board of Directors governing the Operational Policy and Guidelines for Risk Management which was issued on October 12, 2005.

With this policy, the Company's risk management has been implemented comprehensively in all functions and work areas. A Risk Management Committee monitors the implementation established through a Decree of the Board of Directors.

Risk Management Policies and Guidelines are continuously updated for improvement by adjusting to changes in the company's internal and external environment. This is in accordance with the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises (SOEs) Number PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, which was later replaced by the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No PER-2/MBU/03 of 2023 dated March 3, 2023, regarding Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. The company has established a Risk Management Committee as a more permanent structure within the company's organizational structure since 2014.



Uraian Tentang Sekretaris Perusahaan

Description on Corporate Secretary

Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor KN.020/2018 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG), dijelaskan hal-hal berikut mengenai Sekretaris Perusahaan:

Based on the Decision of the Board of Directors of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Number KN.020/2018 about Implementation Guidelines of Good Corporate Governance, the following is described on the Corporate Secretary:

Fungsi dan Peran

Function and Roles

Perseroan memiliki Sekretaris Perusahaan yang:

1. Bertindak sebagai pejabat penghubung (*liaison officer*) untuk berkoordinasi dan memfasilitasi komunikasi antara Perseroan dengan seluruh pemangku kepentingan.
2. Menatausahakan dan menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus Perseroan, serta risalah rapat Direksi, Komisaris maupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan perundang-undangan dan tata kelola yang baik (*compliance and good governance*), termasuk tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Komisaris apabila diminta.

Fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh organ struktural setingkat di bawah Direksi, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Direksi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-2/MBU/03 Tahun 2023.

Senior Vice President Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Delvia Damayanti, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KD.106/KP.09/030300/2023 tentang Penetapan Karyawan Setingkat Band 6.

The Company has a Corporate Secretary who:

1. *Acts as liaison officer to coordinate and facilitate communication between the Company with all stakeholders.*
2. *Administers and stores documents of the Company, including but not limited to the Register of Shareholders, the Special Register of the Company, and also minutes of meetings of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the General Meeting of Shareholders (GMS).*
3. *Ensures that the Company complies with the legislation and good governance, including applicable disclosure requirements, and shall regularly provide all relevant information to the Board of Directors and the Board of Commissioners upon request.*

The Corporate Secretary's function is run by a structural organ one level under the Board of Directors, who is appointed by and responsible to the Board of Directors, as regulated in Regulation of Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-2/MBU/03 Tahun 2023.

Senior Vice President Corporate Secretary is occupied by Delvia Damayanti, appointed based on the Decree of the Board of Directors Number KD.106/KP.09/030300/2023 regarding the Determination of Employees at Band 6 Level.

Kualifikasi

Qualifications

Sekretaris Perusahaan harus memiliki kualifikasi akademis yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selain itu, Sekretaris Perusahaan harus mampu berkomunikasi, bekerja dalam tim, dan membangun hubungan kerja yang baik, serta mempunyai pemikiran analitis dan konseptual.

Komitmen kepada organisasi, kepedulian pada aturan dan kualitas, serta orientasi pada hasil pencapaian turut menjadi penentu keberhasilan Sekretaris Perusahaan dalam menjalankan tugasnya.

The Corporate Secretary must have adequate academic qualifications to carry out the duties and responsibilities satisfactorily. Other than that, the Corporate Secretary must be able to communicate, work in a team, build a good working relationship, and have analytic and conceptual thinking.

Organizational commitment, concern for order and quality, and achievement orientation are also critical to the corporate secretary's success in performing his/her duties.

Accountability

Accountability

Sekretaris Perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk mendukung dan membantu Direksi Perseroan dalam mengelola dan menjalankan kegiatan Perseroan meliputi bidang Administrasi Direksi, Hubungan Masyarakat, Program Kemitraan dan Lingkungan (PKBL).

Corporate Secretary is formed to support and assist the Board of Directors of the Company in managing and running the Company's activities, including the field of Directors Administration, Public Relations, Partnership and Community Development Program.



Profil Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Profile

Delvia Damayanti adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 10 Juli 1987, dan meraih gelar Sarjana Public Relations dari Universitas Mercu Buana.

Delvia Damayanti mulai bekerja di PT INTI (Persero) pada tahun 2023 sebagai Vice President Corporate Secretary. Beliau pernah berkarir di PT Deloitte Konsultan Indonesia sebagai Associate Director pada Agustus 2021-Januari 2023 serta Chief Operating Officer di Cell Science Medical Aesthetic Clinic Maret 2019-Agustus 2021.

Delvia Damayanti is an Indonesian citizen, born in Jakarta on July 10 1987, and holds a Bachelor's degree in Public Relations from Mercu Buana University.

Delvia Damayanti started working at PT INTI (Persero) in 2023 as Vice President Corporate Secretary. He had a career at PT Deloitte Consultant Indonesia as Associate Director in August 2021-January 2023 and Chief Operating Officer at Cell Science Medical Aesthetic Clinic March 2019-August 2021.

Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Pada Tahun 2023

Brief Description of The Implementation of The Corporate Secretary's Duties in 2023

Selama tahun 2023 Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut, antara lain:

1. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022.
2. Menyelenggarakan Rapat Direksi bersama seluruh Vice President setiap minggu serta Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris setiap bulan.
3. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023.
4. Menerbitkan 34 siaran pers terkait dengan kinerja dan perkembangan bisnis PT INTI (Persero).
5. Menyelenggarakan 12 Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023.
6. Memberikan dukungan dalam pemasaran, di antaranya penyiapan marketing kit serta berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan.
7. Mengembangkan materi dan strategi komunikasi serta media krisis untuk korporasi PT INTI (Persero) seperti briefing document, standby statement, publikasi pemberitaan dan laporan keuangan melalui media massa, media sosial, website, serta lainnya.
8. Mewakili Perseroan dalam hubungannya dengan pemangku kepentingan dalam mengkomunikasikan kegiatan Perseroan terutama terkait keterbukaan informasi (sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID).
9. Menyiapkan strategi dan mengelola Komunikasi Eksternal dan Internal:
 - a. Pengelolaan Media Internal (laman intranet i-Portal, siaran radio, e-magazine, majalah dinding, dan TV internal).
 - b. Pengelolaan Media Eksternal (website, Portal Publik Kementerian BUMN, Facebook, Thread, Instagram, Youtube, Tiktok, Podcast).
 - c. Penanganan Keprotokoleran Perusahaan.
 - d. Desain dan pembuatan Marketing Tools.
10. Mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan sponsorship PT INTI (Persero) seiring dengan kebijakan Perusahaan.

During 2023 the Corporate Secretary has carried out the following activities, among others:

1. *Held the General Meeting of Shareholder regarding Approval of the 2022 Fiscal Year Annual Report.*
2. *Organizing Directors Meeting with all Vice Presidents every week and a Joint Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners every month.*
3. *Held the General Meeting of Shareholders to ratify the Company Work Plan and Budget 2023.*
4. *Published 33 press releases related to the performance and business development of PT INTI (Persero).*
5. *Held 12 Joint Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners throughout 2023.*
6. *Provide support in marketing, including the preparation of marketing kits and various needs related to the Company's business.*
7. *Developing material and communication strategies as well as crisis media for PT INTI (Persero) corporations such as briefing documents, standby statements, news publications and financial reports through mass media, social media, websites, and others.*
8. *Representing the Company in relation to stakeholders in communicating the Company's activities, especially related to information disclosure (as Information Management and Documentation Officer).*
9. *Prepare strategies and manage External and Internal Communications:*
 - a. *Internal Media Management (i-Portal intranet page, radio streaming, e-magazine, wall magazine, and internal TV)*
 - b. *External Media Management (website, Public Portal of Ministry of SOEs, Facebook, Thread, Instagram, Youtube, Tiktok, Podcast).*
 - c. *Handling Company Protocol*
 - d. *Design and production of Marketing Tools*
10. *Develop and implement PT INTI (Persero) sponsorship activities in line with Company policies.*

11. Mengembangkan sarana komunikasi dan kegiatan internal dan eksternal, seperti forum komunikasi manajemen dan karyawan, perayaan ulang tahun perusahaan, silaturahmi purnabakti PT INTI (Persero), halal bihalal, pameran, kunjungan kerja, kunjungan industri, audiensi institusi dan media, media gathering, media visit, press conference, Festival Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, dan lainnya.
12. Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi di Perusahaan.

Di samping itu, karena pada tahun 2023 Divisi Corporate Secretary juga menjalankan fungsi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Perusahaan, maka kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 adalah mengembangkan dan mengimplementasikan TJSL, sebagaimana diuraikan pada Laporan Tahunan PT INTI (Persero) Bab Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

11. Develop communication facilities and internal and external activities, such as management and employee communication forums, company anniversary celebrations, PT INTI (Persero) retirement gatherings, halal bihalals, exhibitions, work visits, industrial visits, institutional and media audiences, media gatherings, media visits, press conferences, Micro, Small and Medium Enterprises Festival, corporate social responsibility activities, and others.
12. Implementation of Integrated Management System in the Company.

In addition, because in 2023 the Corporate Secretary also carries out the function of the Social and Environmental Responsibility in the Company, the activities that have been carried out in 2023 are developing and implementing of the Social and Environmental Responsibility Program, as described in the Annual Report of PT INTI (Persero) Chapter of the Social and Environmental Responsibility Program.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Information and Corporate Data

Penyebaran informasi kepada semua pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari peningkatan prinsip transparansi informasi secara internal dan eksternal, yang diharapkan dapat membantu menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan persepsi positif dari para pemangku kepentingan terhadap kebijakan dan kegiatan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

Selain menerbitkan publikasi Laporan Keuangan Tahunan melalui media massa baik cetak maupun online, Perseroan juga memanfaatkan teknologi informasi dan media lainnya sebagai sarana penyebaran informasi bagi perusahaan, antara lain melalui:

1. Situs internet www.inti.co.id
2. Radio internal
3. Portal internal (intranet) i-Portal
4. Media Sosial Facebook Humas PT INTI
5. Media Sosial Facebook Fanpage PT INTI Official
6. Media Sosial Twitter @ptintiofficial
7. Media Sosial Instagram @ptintiofficial
8. Media Sosial Tiktok @ptintiofficial
9. Media Sosial Youtube PT INTI Official
10. Aplikasi PPID PT INTI
11. INTI Podcast
12. WhatsApp Chatbot INTI SINTA 08112377723
13. Website Kementerian BUMN

Increasing the principle of transparency of information internally and externally, which is expected to help maintain and increase the knowledge, understanding, and positive perceptions of stakeholders regarding the policies and activities of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

In addition to publishing the Annual Financial Report through mass media, both print and online, the Company also utilizes information technology and other media as a means of disseminating information for the company, including through:

1. Internet Site www.inti.co.id
2. Internal Radio
3. Internal Portal (intranet) i-Portal
4. Social Media Facebook Humas PT INTI
5. Social Media Facebook Fanpage PT INTI Official
6. Social Media Twitter @ptintiofficial
7. Social Media Instagram @ptintiofficial
8. Social Media Tiktok @ptintiofficial
9. PT INTI Official Youtube Social Media
10. PPID PT INTI Application
11. INTI Podcast
12. WhatsApp Chatbot INTI SINTA 08112377723
13. Website of Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs)



Uraian Tentang Audit Internal

Description on Internal Audit

Fungsi Audit Internal PT INTI (Persero) dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bab VI pasal 67, 68, dan 69.

Kegiatan pengawasan internal difokuskan pada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan memperkuat Sistem Pengendalian Manajemen. Hal ini merupakan suatu upaya dari fungsi internal audit untuk dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian keberhasilan usaha dan peningkatan akuntabilitas perusahaan.

Untuk meningkatkan akuntabilitas Perseroan, kegiatan audit dilakukan antara lain melalui evaluasi atas penerapan manajemen risiko, evaluasi atas penerapan praktik Good Corporate Governance (GCG), evaluasi atas kewajaran laporan keuangan, penilaian pengendalian biaya, mendorong peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menjalin kemitraan auditor eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia, dan Kantor Akuntan Publik), dan instansi terkait lainnya.

The Internal Audit function of PT INTI (Persero) is carried out by the Internal Audit Unit which was established based on the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOEs) Chapter IV articles 67, 68, and 69.

Internal control activities are focused on efforts to increase corporate accountability and strengthen the Management Control System. This is an effort of the internal audit function to be able to contribute to achieving business success and increasing corporate accountability.

To improve the Company's accountability, audit activities are carried out, among others, through evaluation of the implementation of risk management, evaluation of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) practices, evaluation of the fairness of financial statements, assessment of cost control, encouraging increased compliance with applicable laws and regulations, and establish partnerships with external auditors (Financial Audit Board of the Republic of Indonesia, Financial and Development Supervisory Agency of the Republic of Indonesia, and Public Accounting Firms), and other relevant agencies.

Penjelasan Tentang Sistem Pengendalian Intern

Description On Internal Control System

Dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diubah pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-09/MBU/2012 tertanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinyatakan bahwa:

1. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.
2. Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dengan:
 - a. Membentuk Satuan Pengawasan Intern
 - b. Membuat Piagam Pengawasan Intern

In Article 28 of the Decree of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in SOEs as amended in the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises (SOEs) it is stated that:

1. *The Board of Directors is required to carry out internal supervision.*
2. *Internal control as referred to in paragraph (1) is carried out by:*
 - a. *Establish an Internal Control Unit*
 - b. *Create an Internal Control Charter*

3. Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas.
4. Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;
 - b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
5. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas.
6. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan.

Dalam Pasal 3 dan 6 Surat Keputusan Direksi KN. 024/2012 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern yang disahkan pada 24 Desember 2012, menyatakan bahwa:

Pasal 3 tentang Ruang Lingkup Sistem Pengendalian Intern: Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi perusahaan, antara lain:

1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Satuan Pengawasan Intern
4. Karyawan
5. Pihak Ekstern

Pasal 6 tentang Pengendalian Intern oleh Satuan Pengawasan Intern:

"Satuan Pengawasan Intern (SPI) harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Perusahaan yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam pelaksanaan audit intern, SPI harus bertindak secara independen dan memiliki jalur pelaporan yang memadai serta memiliki keahlian dalam praktek dan penerapan penilaian risiko."

Pengendalian yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan situasi ekonomi yang dinamis, persaingan yang semakin ketat, pergeseran permintaan pelanggan dan prioritasnya, serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang.

Dengan demikian, pengendalian internal mengandung unsur-

3. *The Internal Control Unit as referred to in paragraph (2) letter (a), is led by a head who is appointed and dismissed by the President Director based on the company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners or Supervisory Board.*
4. *The internal control functions as referred to in paragraph (1) are:*
 - a. *Evaluation of the effectiveness of the implementation of internal control, risk management, and corporate governance processes, in accordance with laws and regulations and company policies.*
 - b. *Examination and assessment of efficiency and effectiveness in finance, operations, human resources, information technology, and other activities.*
5. *The Board of Directors is required to submit periodic reports on the implementation of the internal control function to the Board of Commissioners or Supervisory Board.*
6. *The Board of Directors is required to maintain and evaluate the quality of the internal control function in the company. In Article 3 and 6 of the Decree of the Board of Directors KN. 024/2012 concerning the Internal Control System Guidelines adopted on December 24, 2012, stating that:*

Article 3 concerning the Scope of the Internal Control System: The implementation of a reliable and effective Internal Control System is the responsibility of all parties involved in company organizations, including:

1. *Board of Commissioners*
2. *Board of Directors*
3. *Internal Control Unit*
4. *Employees*
5. *External Party*

Article 6 concerning Internal Control by the Internal Audit Unit:

"The Internal Audit Unit must be able to evaluate and play an active role in increasing the effectiveness of the Internal Control System on an ongoing basis in relation to the implementation of the Company's operations that have the potential to cause losses in achieving the targets set by the company. In conducting internal audits, the Internal Audit Unit must act independently and have adequate reporting lines and have expertise in the practice and application of risk assessments."

Good control enables management to be ready to face changes in the dynamic economic situation, increasingly fierce competition, shifting customer demand and priorities, and restructuring for future progress.

Thus, internal controls contain elements:



unsur:

1. Membantu manajemen atau organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan.
2. Suatu proses yang berisikan kegiatan-kegiatan perusahaan.
3. Dilaksanakan oleh jajaran perusahaan.
4. Dapat memberikan reasonable assurance mengenai efektivitas dan efisiensi operasional, reliabilitas pelaporan keuangan, kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku.
5. Disesuaikan dengan struktur organisasi.

Untuk memudahkan proses evaluasi atas pengendalian internal perusahaan, Satuan Pengawasan Intern (SPI) menggunakan metodologi *framework Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Sesuai dengan definisi dari *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh satu entitas Direksi, manajemen, dan personil-personil lain, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang layak (*reasonable assurance*) tentang tercapainya tujuan-tujuan yang berkenaan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan (*compliance*).

Adapun materi-materi *framework* COSO yang digunakan, secara garis besar meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan rumusan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), bahwa lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi.

2. Aktifitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan, telah dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi.

3. Penilaian Risiko

Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, dan informasi

1. Assist management or organization in achieving goals.
2. A process that contains company activities.
3. Implemented by a range of companies.
4. Can provide reasonable assurance regarding operational effectiveness and efficiency, reliability of financial reporting, compliance with applicable laws and regulations.
5. Adapted to the organizational structure.

To facilitate the evaluation process of the company's internal control, the Internal Audit uses the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) methodology. In accordance with the definition of Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), internal control is a process, carried out by an entity of the Board of Directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance about the achievement of objectives relating to operations, reporting and compliance.

The COSO framework materials used, in general, include:

1. Environmental Control

Based on the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) formula, that control environment is defined as a set of standards, processes, and structures that provide the basis for implementing internal controls throughout the organization.

2. Control Activities

Control activities are actions established through policies and procedures that help ensure that management directives to reduce risks to the achievement of objectives are carried out. Control activities are performed at all levels of the entity, at various stages in the business process, and over the technology environment.

3. Risk Assessment

Risk assessment involves a dynamic and interactive process for identifying and assessing risks towards achieving goals. Risk itself is understood as a possibility that an event will occur and affect the achievement of the entity's objectives.

4. Information and Communication

Information needed by management is relevant and good quality information that comes from internal and external sources, and information used to support the functions

yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain pengendalian internal. Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus-menerus, berulang, dan berbagi.

5. Monitoring

Aktifitas pemantauan menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah, maupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi-fungsi dalam setiap komponen, ada dan berfungsi. Kegiatan pemantauan meliputi proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu, dan memastikan apakah semuanya dijalankan seperti yang diinginkan serta apakah telah disesuaikan dengan perubahan keadaan.

of other components of internal control. Information is obtained or generated through a process of communication between internal and external parties that is carried out continuously, repeatedly, and shared.

5. Monitoring

Monitoring activities according to Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) are evaluation activities with several forms, whether those that are sustainable, separate or a combination of both are used to ascertain whether each of the five components of internal control affects the functions in each component, exists and functions. Monitoring activities include the process of assessing the quality of internal control performance over time, and ensuring that everything is carried out as desired and whether it has been adjusted to changes in circumstances.

Pimpinan Unit Internal Audit Group

Head of Internal Audit Group

Satuan Pengawasan Intern (SPI) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan mekanisme internal perusahaan dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Sejak 1 Maret 2021, Kepala Satuan Pengawasan Intern SPI dijabat oleh Lisda Noor Rachmawati. Beliau meniti karir di PT INTI (Persero) sejak tahun 1992. Sebelum menjabat sebagai Vice President Satuan Pengawasan Intern (SPI) beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Sistem, Prosedur dan Kebijakan Akuntansi dari Divisi Akuntansi, Manajer Akuntansi Manajemen dari Divisi Keuangan dan Akuntansi, Manajer Evaluasi Kinerja Anak dan Afiliasi dari Divisi Keuangan dan Akuntansi, serta Manajer Perencanaan dan Pengendalian Audit Divisi Satuan Pengawasan Intern.

Setelah kepemimpinan Lisda, nama unit kerja berubah menjadi Divisi Internet Audit Group yang dikepalai oleh Febriani Puspa Dewi sebagai Vice President Internal Audit Group. Beliau meniti karir di PT INTI (Persero) pada tahun 2012. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Urusan Manajemen Resiko dan Quality Assurance, Kepala Urusan Pengelolaan dan Perencanaan Strategis, serta Manajer Perencanaan dan Pengendalian Audit.

Lalu, sejak 1 Februari 2024, Vice President Internal Audit Group dijabat sementara oleh Erik Arfiansyah. Beliau meniti karir di PT INTI (Persero) sejak tahun 2012. Sebelum menjabat sebagai Penanggung Jawab Sementara Internal Audit Group, beliau

The Internal Audit Unit is led by a Head who is responsible to the President Director. The Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the Board of Directors based on the company's internal mechanism and is approved by the Board of Commissioners.

Since March 1, 2021 Head of the Internal Audit Unit has been led by Lisda Noor Rachmawati. Lisda Noor Rachmawati has pursued her career at PT INTI (Persero) since 1992. Before she was appointed Head of the Internal Audit Unit, she served in several functions such as Head of the System, Procedure, and Accounting Policy Division of the Accounting Division, Manager of Accounting Management from the Finance and Accounting Division, Subsidiaries and Affiliates Performance Evaluation Manager from Finance and Accounting Division, and Audit Planning and Control Manager of Internal Audit Division.

After Lisda's leadership, the name of the work unit changed to the Internet Audit Group Division, headed by Febriani Puspa Dewi as Vice President of the Internal Audit Group. She started his career at PT INTI (Persero) in 2012. She has served as Head of Risk Management and Quality Assurance, Head of Strategic Management and Planning, and Manager of Audit planning and control.

Then, since February 1 2024, the Vice President of the Internal Audit Group will be temporarily held by Erik Arfiansyah. He has pursued a career at PT INTI (Persero) since 2012. Before serving as Temporary Person in Charge of the Internal Audit Group, he

pernah menjabat sebagai Kepala Urusan Pengembangan Audit, Manager Akuntansi Mangement dan Evaluasi Anak Perusahaan & Afiliasi, dan sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi.

served as Head of Audit Development Affairs, Management Accounting and Evaluation Manager for Subsidiaries & Affiliates, and as Head of the Finance and Accounting Division.

Profil Pimpinan Internal Audit Group

Profile of Internal Audit Group Head

Erik Arfiansyah adalah Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung, dan lahir di Bandung, pada 20 Mei 1988. Erik Arfiansyah menyelesaikan studi Strata-1 di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Pasundan Bandung.

Erik Arfiansyah is an Indonesian citizen, domiciled in Bandung and born in Bandung on Mei 20, 1988. Erik Arfiansyah completed her undergraduate studies at the Accounting Department, Faculty of Economics at Pasundan University, Bandung.

Erik Arfiansyah juga aktif dalam mengikuti seminar dan pelatihan guna menunjang karir nya di PT INTI (Persero).

Erik Arfiansyah is also active in attending seminars and training to support his career at PT INTI (Persero).

Jumlah dan Kualifikasi Personil Internal Audit Group

Number and Qualifications Personnel of The Internal Audit Group

Jumlah personil Internal Audit Group tahun 2023 berjumlah 5 (lima) orang dengan rincian sebagai berikut:

The number of personnel of the Internal Audit Unit in 2023 is 5 (five) people with details as follows:

Posisi Position	Jumlah Personil Number of Personnel
Vice President Internal Audit Group Vice President of Internal Audit Unit	1 orang/person
Manajer	1 orang/person
Officer	1 orang/person
Auditor	2 orang/person
Jumlah / Total	5 orang/person

Dalam rangka meningkatkan kompetensi auditor, PT INTI (Persero) telah melakukan program pelatihan bagi auditor. Program pelatihan atau sharing session yang diikuti oleh auditor Internal Audit Group adalah sebagai berikut:

To increase the competence of auditors, PT INTI (Persero) has conducted training programs for auditors. The training or sharing session programs that the Internal Audit Group auditors followed was as follows:

No.	Jenis Program <i>Program Type</i>	Judul Program <i>Program Title</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Partisipan <i>Participant</i>	Tanggal <i>Date</i>
1	Webinar	<i>Introduction to Project Management & Certified Associate In Project Management</i>	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Umum PT INTI (Persero) <i>Division of Human Capital and General Affair PT INTI (Persero)</i>	3 Orang/Person	17 Februari 2023 <i>February 17, 2023</i>
2	Webinar	Lesson Learned Kasus Silicon Valley Bank (SVB)	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia <i>Indonesian Banking Development Institute</i>	4 Orang/Person	06 April 2023 <i>April 06, 2023</i>
3	Webinar	Webinar Launching "Laporan Survei Manajemen Risiko: Konteks Korporasi Indonesia Tahun 2023" <i>Webinar Launching "Risk Management Survey Report: Indonesian Corporate Context in 2023"</i>	<i>Indonesia Risk Management Professional Association</i>	6 Orang/Person	07 Juni 2023 <i>June 07, 2023</i>
4	Webinar	Resiko Kesehatan Pekerja Kantor & Pola Hidup Sehat <i>Health Risks of Office Workers & Healthy Lifestyles</i>	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Umum PT INTI (Persero) <i>Division of Human Capital and General Affair PT INTI (Persero)</i>	5 Orang/Person	21 Juli 2023 <i>July 21, 2023</i>
5	Webinar	Bincang SPI "Revitalisasi Kompetensi SPI" dalam rangka Penguatan Kapasitas Governance, Risk & Compliance Perusahaan. <i>SPI Talk "Revitalizing SPI Competencies" in the context of Strengthening Company Governance, Risk & Compliance Capacity.</i>	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern Jawa Barat – Banten <i>West Java - Banten Internal Audit Unit Communication Forum</i>	5 Orang/Person	28 Juli 2023 <i>July 28, 2023</i>
6	Webinar	Pelatihan Pembelajaran Interaktif untuk Pengelolaan Whistleblowing System Yang Berintegritas (Peluit Integritas) Tahun 2023 <i>Interactive Learning Training for Managing a Whistleblowing System with Integrity (Integrity Whistle) in 2023</i>	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia <i>Republic of Indonesia Corruption Eradication Commission</i>	1 Orang/Person	14-18 Agustus 2023 <i>August 14-18, 2023</i>
7	Webinar	Strategi Efektif Penerapan Manajemen Risiko Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 2/MBU/03/2023 <i>Effective Strategy for Implementing Risk Management in Accordance with SOEs Ministerial Regulations Number PER 2/MBU/03/2023</i>	Deloitte Indonesia	5 Orang/Person	14 September 2023 <i>September 14, 2023</i>



8	Webinar	Sentuhan Qalbu Mengundang Pertolongan Allah <i>Heart Touch Invites God's Help</i>	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Umum PT INTI (Persero) <i>Division of Human Capital and General Affair PT INTI (Persero)</i>	5 Orang/Person	26 Oktober 2023 <i>October 26, 2023</i>

Struktur Organisasi Internal Audit Group

Organizational Structure Internal Audit Group

Internal Audit Group adalah unit kerja yang mendukung Direktur Utama dalam melaksanakan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KN. 037/2020 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Tingkat Urusan, struktur organisasi Internal Audit Group menjadi sebagai berikut:

The Internal Audit Group is a unit that supports the President Director in evaluating the effectiveness of internal control, risk management, and corporate governance processes by legislation and company policies.

Based on the Decree of the Board of Directors Number KN. 037/2020 concerning Corporate Organizational Structure at the Level of Affairs, the organizational structure of the Internal Audit Group is as follows:



Tugas Internal Audit Group

Tasks of Internal Audit Unit

Tugas Internal Audit Group sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Intern atau Piagam Pengawas Intern PT INTI (Persero) yang ditetapkan pada 11 Oktober 2021, adalah sebagai berikut:

Internal Audit Group tasks, as stated in the Internal Audit Charter of PT INTI (Persero), which was validated on October 11, 2021, are as follows:

1. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas audit internal atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan.
2. Melakukan audit dan penilaian atas efisiensi dan

1. *Planning and carrying out internal audit activities on the effectiveness of the implementation of internal control, risk management, and corporate governance processes, in accordance with the laws and regulations and company policies.*
2. *Conduct audits and assessments of efficiency and*

efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.

3. Melakukan koordinasi dengan fungsi pengawasan intern anak perusahaan guna memutuskan kecukupan cakupan audit dan kualitas dari pendekatan audit.
4. Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
5. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.

Pemenuhan tugas Internal Audit Group dilakukan melalui pemberian informasi, konsultasi dan rekomendasi atas aktifitas yang diaudit atau dievaluasi kepada manajemen, serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit, dalam rangka hal berikut:

1. Meningkatkan kinerja usaha perusahaan secara efektif, efisien, dan ekonomis.
2. Menjaga ketaatan terhadap ketentuan dan prosedur yang berlaku.
3. Menjaga kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan, termasuk pengelolaan resiko.

Adapun aktivitas Internal Audit Group yang tertuang dalam Piagam Audit Intern atau Piagam Pengawas Intern pada pokoknya meliputi:

1. Penyusunan rencana kegiatan audit, baik Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) maupun non-PKAT.
2. Penilaian terhadap kecukupan sistem atau sarana pengendalian intern, ketaatan atau kepatuhan atas ketentuan yang berlaku, kinerja manajemen, pengamanan aset perusahaan, dan pengelolaan risiko.
3. Pengawasan terhadap kegiatan operasional atas fungsi unit kerja.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian manajemen serta memberikan informasi konsultasi, dan rekomendasi mengenai hal dimaksud.
5. Memastikan bahwa rekomendasi hasil audit telah ditindaklanjuti oleh manajemen dan/atau auditee.
6. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama atas hasil audit yang telah dilaksanakan, dan Internal Audit Group dapat menyampaikan tembusan Laporan Hasil Audit kepada auditee, direktur, dan/atau kepala yang membawahi auditee.

effectiveness in finance, accounting, operations, marketing, human resources, information technology, and other activities.

3. *Coordinate with the subsidiary's internal control function to determine the adequacy of audit coverage and the quality of the audit approach.*
4. *Cooperate with the Audit Committee in carrying out the supervisory function.*
5. *Communicating directly with the President Director, the Board of Commissioners and/or the Audit Committee.*

Fulfillment of Internal Audit Group tasks is carried out through the provision of information, consultation, and recommendations on activities to be audited/evaluated to the management, as well as ensuring follow-ups on audit recommendations to:

1. *Improve the performance of the company effectively, efficiently and economically.*
2. *Maintain compliance with the provisions and procedures,*
3. *Maintain clarity of functions, implementation, and accountability for the management of the company, including risk management.*

The Internal Audit Group activities contained in Internal Audit Charter principally include:

1. *Preparation of audit activity plans, both the Annual Supervision Work Program and non-Annual Supervision Work Program.*
2. *Assessment of the adequacy of the system or tools of internal control, compliance with applicable regulations, management performance, safeguarding company assets, and risk management.*
3. *Supervision of operational activities on the functions of work units.*
4. *Identify matters that require management attention and provide consultation information, and recommendations regarding these matters.*
5. *Ensure that the audit recommendations have been followed up by management and/or auditees.*
6. *Submit a report to the President Director on the results of the audit that has been carried out, and Internal Audit Group can submit a copy of the Audit Result Report to the auditee, director, and/or head in charge of the auditee.*



Uraian Pelaksanaan Tugas Internal Audit Group Tahun 2023

Description of The Implementation of The Internal Audit Group in 2023

1. Mendampingi Kantor Akuntan Publik dalam penyelesaian general audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023.	1. <i>Assisting the Public Accounting Firm in completing the general audit of the 2023 Fiscal Year.</i>
2. Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Program Kerja Audit Tahunan 2023 sebanyak 7 (tujuh) buah Program Audit.	2. <i>Carry out inspections based on the 2023 Annual Audit Work Program as many as 9 (seven) Audit Programs.</i>

No.	Laporan Hasil Pemeriksaan <i>Inspection Result Report</i>	Nomor Surat Penugasan <i>Assignment Letter Number</i>	Nomor Laporan Hasil Pemeriksaan <i>Examination Result Report Number</i>	Tanggal Penerbitan Laporan <i>Report Issuance Date</i>
1	Audit atas kegiatan Divisi Commercial Engineering <i>Audit of the activities of the Commercial Engineering Division</i>	SP.01/ PW.01/010400/2023	I.47/ PW.03/010400/2023	24 Mei 2023 <i>24 May, 2023</i>
2	Audit atas kegiatan Divisi Financial, Planning & Analysis <i>Audit of the activities of the Financial, Planning & Analysis</i>	SP.03/ PW.01/010400/2023	I.76/ PW.03/010400/2023	11 Agustus 2023 <i>August 11, 2023</i>
3	Audit atas Kegiatan Divisi Divisi Pengadaan & Manajemen Material <i>Audit of the Activities of the Procurement & Material Management Division</i>	SP. NO. 05/ PW.01/010200/2023	I.82/PW.03/2023	2 Oktober 2023 <i>October 02, 2023</i>
4	Audit atas Kegiatan Divisi Pelaksanaan Audit Divisi Human Capital & General Affair <i>Audit of The Human Capital & General Affair</i>	SP.02/ PW.01/010400/2023	I.02/ PW.01/010200/2023	31 Mei 2023 <i>May 31, 2023</i>
5	Audit atas Kegiatan Divisi Operation <i>Audit of the Activities of Operation Division</i>	SP.06/ PW.01/010200/2023	06/PW.01/010200/2023	7 September 2023 <i>September 7, 2023</i>
6	Audit atas Kegiatan Divisi Sales & Marketing <i>Audit of the Activities of Sales & Marketing Division</i>	SP.04/ PW.01/010200/2023	I.69/ PW.03/010400/2023	31 July 2023 <i>July 31, 2023</i>
7	Pemeriksaan Non-Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) PT Mitra Bakti INTI Persada <i>Annual Audit Non-Work Program Inspection PT Mitra Bakti INTI Persada</i>	SP.07/ PW.01/010200/2023	I.07/ PW.01/010200/2023	23 November 2023 <i>November 23, 2023</i>

3. Melakukan monitoring tindak lanjut atas hasil pemeriksaan internal Internal Audit Group tahun 2023.	3. <i>Monitoring the follow-up on the results of the internal inspection of the Internal Audit Group in 2023.</i>

4. Melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan eksternal tahun 2022.
5. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2022.
6. Melakukan penyesuaian terhadap dokumen kualitas Internal Audit Group.
7. Melaksanakan program pengembangan kompetensi untuk para personil Satuan Pengawasan Intern.

4. Follow up on the results of external audits in 2022.
5. Monitoring the follow-up to the results of the examination of the Public Accountant Office for the 2022 financial year.
6. Make adjustments to the quality documents of the Internal Audit Group.
7. Implement a competency development program or the personnel of the Internal Audit Unit.

Hasil Tinjauan yang Dilakukan atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada Tahun Buku 2023

Results of The Review Conducted on The Implementation of The Internal Control System in The Financial Year 2023

Dalam evaluasi pengendalian internal, Internal Audit Group mengacu ke kerangka kerja Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO). Berdasarkan evaluasi yang dilakukan melalui kuesioner berbasis website dengan kriteria hasil evaluasi yang mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 dapat disampaikan bahwa hasil penilaian atas pengendalian internal perusahaan tahun 2023 berada pada interval "BERKEMBANG" dengan skor 2.22. Hal tersebut menjelaskan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

In evaluating internal control, the Internal Audit Group refers to the Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) framework. Based on the evaluation carried out through a website-based questionnaire with the evaluation results criteria referring to the Financial and Development Supervisory Agency Regulation Nomor 5 of 2021, it can be stated that the results of the assessment of the company's internal control in 2023 are in the "DEVELOPING" interval with a score of 2.22. This explains that the organization has been able to define its performance well. However, the strategy for achieving its performance is still not relevant, and the implementation of controls is still limited to fulfillment, as shown in the table below:

No.	Evaluasi Pengendalian Internal <i>Internal Control Evaluation</i>	Bobot <i>Weight</i>	Skor <i>Score</i>	Persentase <i>Percentage</i>
I	Lingkungan Pengendalian <i>Controlling Scope</i>		4.33	1.03%
1	Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi <i>Management Philosophy and Operation Style</i>	30	0,76	0,19%
2	Integritas dan Nilai Etika <i>Integrity and Ethical Values</i>		0,84	0,18%
3	Komitmen terhadap Kompetensi <i>Commitment to Competence</i>		0,81	0,15%
4	Praktik Pembinaan Personil <i>Personnel Development Practices</i>		0,62	0,18%
5	Struktur Organisasi <i>Organizational Structure</i>		0,63	0,15%
6	Tanggung Jawab dan Wewenang <i>Responsibility and Authority</i>		0,67	0,18%

II	Aktivitas Pengendalian <i>Controlling Activities</i>		3,06	0,48%
1	Pelaksanaan Review Kerja <i>Review Performance Implementation</i>		0,82	0,12%
2	Pemisahan Fungsi & Tugas <i>Function and Task Separation</i>		0,74	0,12%
3	Pengelolaan Informasi <i>Information Management</i>	20	0,77	0,12%
4	Pengendalian Fisik <i>Physical Controlling</i>		0,73	0,12%
III	Penaksiran Risiko <i>Risk Assessment</i>		3,09	0,44%
1	Analisis Risiko <i>Risk Analysis</i>		0,78	0,11%
2	Identifikasi Risiko <i>Risk Identification</i>		0,74	0,11%
3	Mengelola Risiko Atas Perubahan <i>Managing Risk Due of Changes</i>	20	0,74	0,11%
4	Penetapan Tujuan <i>Goal Setting</i>		0,83	0,11%
IV	Informasi dan Komunikasi <i>Information and Communication</i>		1,41	0,18%
1	Informasi <i>Information</i>		0,70	0,9%
2	Komunikasi <i>Communication</i>	15	0,71	0,9%
V	Monitoring		0,67	0,9%
1	Monitoring	15	0,67	0,9%
Total		100	12.55	2.22

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa persentase tiga terendah terdapat pada:

1. Sub kategori I.4. Praktik Pembinaan Personil, yaitu skor 0,62.
2. Sub kategori I.5. Struktur Organisasi, yaitu skor 0,63.
3. Sub kategori I.6. Tanggung Jawab dan Wewenang, yaitu skor 0,67.
1. Sub kategori V.1.c Monitoring, yaitu skor 0,67.

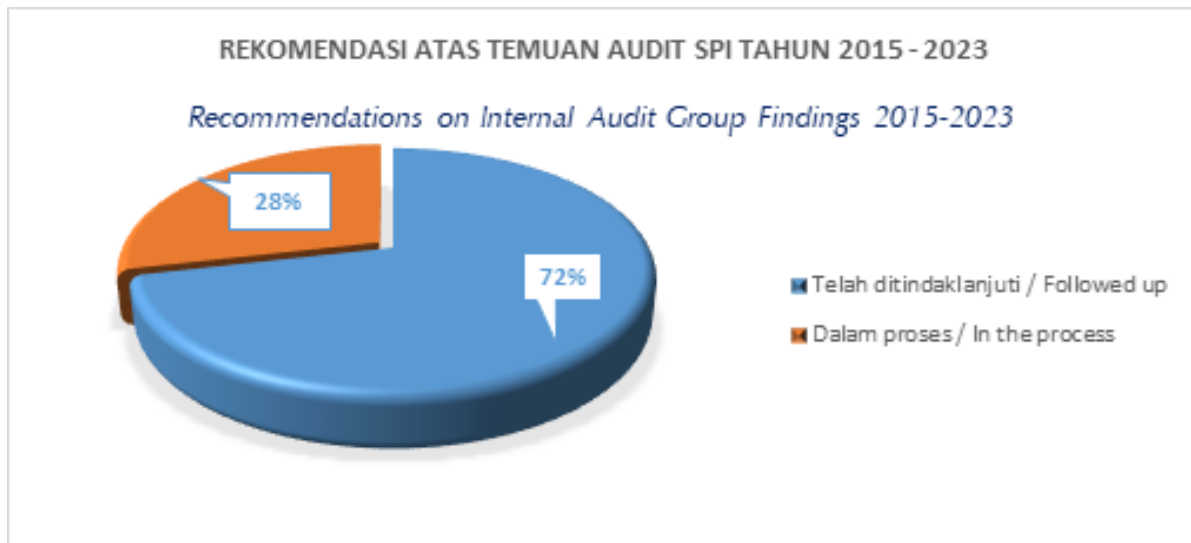
Hasil Pemeriksaan tahun 2015-2023 yang telah dan dalam proses ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

From the table above can be submitted that the three lowest percentages are in:

1. Sub category I.4. Personnel Development Practices, that is scored 0.62.
2. Sub category I.5. Structure Organization, that is scored 0.63.
3. Sub category I.6. Responsibility and Authority, that is scored 0.67.
4. Sub category V.1. Monitoring, that is scored 0.67.
- 5.

Examination results for 2015-2023 that have been and are being followed up in the process are as follows:

Pemeriksaan <i>Examination</i>	Jumlah Rekomendasi <i>Number of Recommendations</i>	Telah Ditindaklanjuti <i>Followed Up</i>	Dalam Proses <i>In the Process</i>	% Telah Ditindaklanjuti <i>% Followed Up</i>
2015	101	98	3	97%
2016	61	45	16	74%
2017	107	100	7	93%
2018	130	121	9	93%
2019	123	95	29	77%
2020	91	71	23	78%
2021	73	43	30	59%
2022	77	58	19	75%
2023	37	1	29	3%
Jumlah <i>Total</i>	800	632	165	72,17%



Manajemen Risiko

Risk Management

Perusahaan menyadari bahwa di dalam setiap langkah kegiatan usahanya terdapat sejumlah risiko yang perlu dihadapi. Oleh karena itu, Perseroan telah membangun sebuah kerangka kerja pengendalian risiko, yang sekaligus merupakan bagian dari kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG) yang lebih luas, yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menerapkan pengelolaan risiko di Perseroan.

Pengelolaan risiko Perseroan ini dibangun dengan maksud menekan setiap dampak risiko sampai tingkat serendah mungkin sehingga setiap pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional dan usaha dapat mengarah pada pencapaian tujuan bisnis Perseroan.

The Company realizes that several risks need to be addressed in every step of its business activities. Therefore, the Company has developed a risk control framework, an integral part of a broader framework of Good Corporate Governance (GCG), which guides all stakeholders in implementing risk management.

The Company's risk management is built to suppress any risk impact to the lowest possible level so that any decision-making in operational and business activities can lead to achieving the Company's business objectives.

Kebijakan Pengelolaan Risiko

Risk Management Policy

Penerapan pengelolaan risiko telah dilakukan secara formal sejak diterbitkannya Keputusan Direksi yang mengatur tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko tertanggal 31 Maret 2005 dan diperbarui dengan Keputusan Direksi mengenai Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Perusahaan yang diterbitkan pada 14 Maret 2023. Dengan kebijakan tersebut maka penerapan pengelolaan risiko Perseroan telah dilakukan secara komprehensif di seluruh fungsi dan area kerja Perseroan, di mana pelaksanaannya senantiasa dikawal oleh sebuah Komite Manajemen Risiko yang dibentuk melalui sebuah Keputusan Direksi.

Kebijakan dan pedoman pengelolaan risiko senantiasa diperbarui untuk penyempurnaan dengan menyesuaikan pada perubahan lingkungan internal dan eksternal Perseroan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-2/MBU/03/2023 tertanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dan sudah sejak tahun 2014 Perseroan mengubah komite pengelolaan risiko menjadi sebuah struktur yang lebih permanen dalam struktur organisasi Perseroan.

The implementation of risk management has been formally established since the issuance of a Decree of the Board of Directors which regulates the Risk Management General Guidelines dated March 31, 2005, updated with the Decree of the Board of Directors regarding Guidelines for Risk Management in the Company issued on March 14, 2023. Under the policies, the implementation of risk management has been carried out comprehensively throughout the Company's functions and work areas, where a Risk Management Committee always guards its performance established through a decree of the Board of Directors.

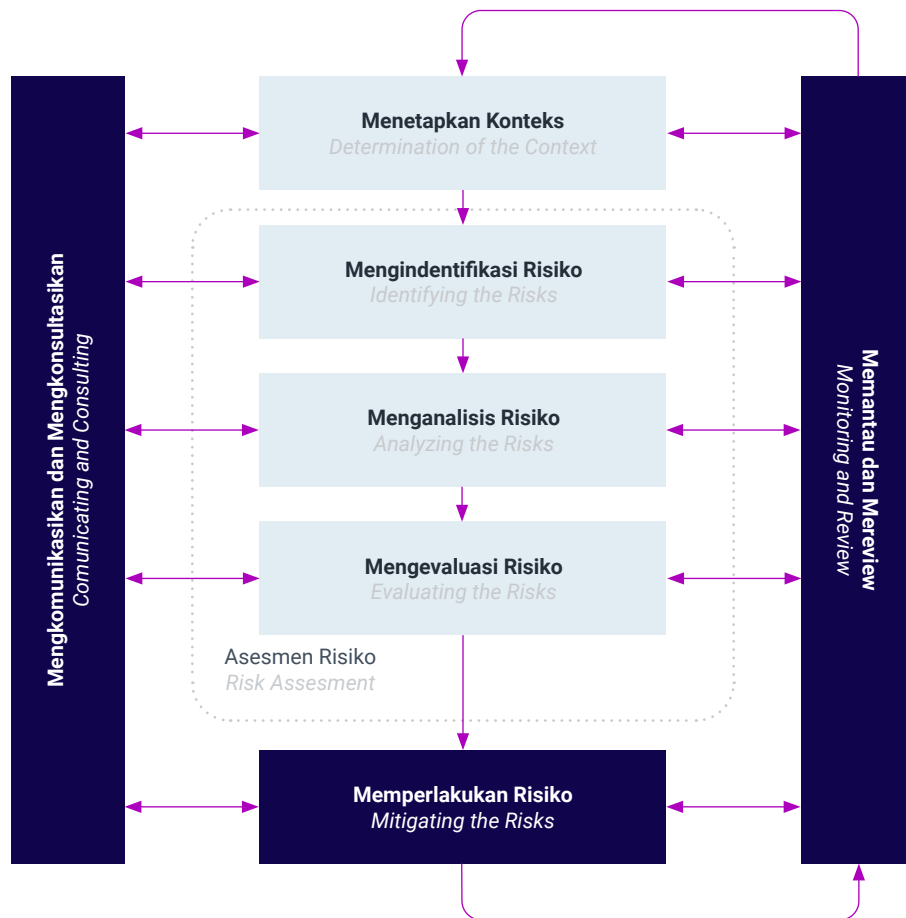
Risk management policies and guidelines are constantly updated for refinement by adjusting to the Company's internal and external environment changes. Referring to the Regulation of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) Number PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, regarding Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, and since 2014, the Company has changed the risk management committee into a more permanent structure in the organizational structure of the Company.

Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko

Risk Management Framework

Kerangka kerja pengelolaan risiko Perseroan dibangun dengan berlandaskan ISO 31000:2018 tentang Risk Management-Principles and Guidelines. Penerapan kerangka kerja ini dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dengan disertai oleh pembangunan budaya sadar risiko yang diintegrasikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Budaya Perseroan, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, atau yang biasa disebut AKHLAK.

The Company's risk management framework is built on ISO 31000: 2018 on Risk Management-Principles and Guidelines. The implementation of this framework is implemented in phases and sustainable manner, accompanied by the development of a risk consciousness culture, which is integrated as an integral part of the global Corporate Culture, namely trustworthy (amanah), competent (kompeten), harmonious (harmonis), loyal (loyal), adaptive (adaptif), and collaborative (kolaboratif), or what is commonly called AKHLAK.



Secara umum kerangka kerja pengelolaan risiko Perseroan mencakup:

1. **Penetapan Konteks**, yaitu penetapan ruang lingkup pengelolaan risiko yang akan dilakukan.
2. **Penilaian Risiko**, terdiri dari kegiatan:
 - a. **Identifikasi Risiko**, yaitu proses mengenali peristiwa atau kejadian yang memiliki kemungkinan terjadi dan berakibat mengganggu atau merugikan dengan mempertimbangkan aspek internal maupun eksternal serta memperhatikan sumber potensi

In general, the Company's risk management framework includes:

1. **Determination of the Context**, namely the determination of the scope of risk management to be performed.
2. **Risk Assessment**, consisting of activities:
 - a. **Risk Identification**, which is the process of identifying events that have the possibility of occurring and causing disturbing or disadvantage, by considering internal and external aspects as well as considering the potential sources of risk. Result of this process is

risiko. Hasil proses ini adalah Daftar Risiko.

- b. **Analisis Risiko**, yaitu proses menentukan tingkat kemungkinan atau frekuensi dan tingkat akibat atau konsekuensi dari suatu risiko. Hasil proses ini adalah Tingkat Risiko.
- c. **Evaluasi Risiko**, yaitu proses perbandingan antara tingkat risiko terhadap selera risiko untuk memutuskan apakah menerima risiko atau tidak.

- 3. **Perlakuan Risiko**, yaitu proses untuk menentukan bagaimana risiko dimitigasi.
- 4. **Pemantauan dan Review**, yaitu proses pemantauan risiko, pengevaluasian risiko dan pelaksanaan mitigasinya, serta pengungkapan risiko.
- 5. **Konsultasi dan komunikasi** yang dilakukan secara kontinyu dengan *stakeholder* untuk tindak lanjut dari hasil Manajemen Risiko yang dilakukan.

the Risk List.

- b. **Risk Analysis**, which is the process of determining the level of probability or frequency of occurrences and as well the consequence level of the risk. Result of this process is the Risk Level.
- c. **Risk Evaluation**, which is the process of comparison between the risk level and risk appetite to decide whether to accept the risk or not.

- 3. **Risk Mitigation**, which is a process to determine how risks are mitigated.
- 4. **Monitoring and Review**, which is the process of risk monitoring, risk evaluation and implementation of mitigation, and risk disclosure.
- 5. **Continuous consultation and communication** with stakeholders for follow-up of the results of Risk Management conducted.

Penerapan Pengelolaan Risiko

Risk Management Implementation

Implementasi assesmen dan mitigasi risiko telah dijalankan di masing masing divisi yang dibuktikan dengan pengiriman hasil mitigasi yang dilakukan ke Bagian Manajemen Risiko. Dari hasil *monitoring* dan kajian yang dilakukan terhadap kegiatan assesmen manajemen risiko terhadap divisi menunjukkan bahwa terdapat beberapa profil risiko yang level risikonya turun maupun naik. Mitigasi telah dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hasil mitigasi yang telah dilaporkan ke Bagian Manajemen Risiko akan dikaji dan dipantau.

Untuk meningkatkan *awareness* terhadap proses manajemen risiko, telah dilakukan sosialisasi pengelolaan manajemen risiko kepada *Risk Representative* di setiap divisi yang dilanjutkan dengan evaluasi terhadap pengelolaan manajemen risiko. Selain itu juga telah dilakukan sosialisasi manajemen risiko khusus untuk *information technology risk management*.

Untuk meningkatkan kehandalan manajemen risiko di Perseroan, assesmen dan mitigasi saat ini tidak hanya memandang sisi risiko saja, tapi juga peluang. Dengan adanya assesmen dan mitigasi peluang ini diharapkan perusahaan mampu menangkap peluang-peluang bisnis yang baru dari aktivitasnya selama ini.

Untuk mengetahui cara pengukuran tingkat kematangan dari penerapan manajemen risiko di PT INTI (Persero), maka Bagian Manajemen Risiko mengadakan pelatihan. Dengan diadakannya pelatihan ini diharapkan PT INTI (Persero) dapat melakukan *self assessment maturity level* manajemen risiko.

Implementation of risk assessment and mitigation has been carried out in each division as evidenced by the delivery of the results of mitigation carried out to the Risk Management Section. From the results of monitoring and review conducted on risk management assessment activities on divisions showed that there were several risk profiles whose risk levels fell and rose. Mitigation has been carried out in accordance with the specified time. The mitigation results that have been reported to the Risk Management Section will be reviewed and monitored.

To increase awareness of the risk management process, socialization of risk management to Risk Representatives has been carried out in each Division followed by an evaluation of risk management. In addition, risk management socialization specifically for information technology risk management has also been carried out.

To improve the reliability of risk management in the Company, current assessment and mitigation do not only look at the risk side but also the opportunity. With this assessment and mitigation opportunity, the company is expected to be able to capture new business opportunities from its activities so far.

To find out how to measure the maturity level of the application of risk management at PT INTI (Persero), the Risk Management Section conducts training. With this training, PT INTI (Persero) is expected to be able to conduct a self-assessment of risk management maturity level.

Telah dilakukan penyusunan dan sosialisasi kepada Tim *Risk Representative* untuk prosedur pengukuran *maturity level* implementasi manajemen risiko.

Dengan pemahaman yang baik terhadap pengelolaan risiko, unit-unit kerja di Perseroan melakukan pengelolaan risiko terhadap kegiatan operasional dan bisnisnya dalam tahapan-tahapan berikut:

Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan pada tujuan (*goal*) untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan pendekatan proses untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang dapat menghambat pencapaian proses divisi.

Teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi Risiko adalah sebagai berikut:

1. Review dokumen
2. Curah pendapat
3. *Workshop* yang difasilitasi
4. Diskusi dengan kelompok terpilih
5. Wawancara
6. Pengamatan (observasi)
7. Analisis arus proses bisnis
8. Analisis pohon peristiwa
9. Diagram tulang ikan
10. Penggolongan model risiko bisnis

Analisis Risiko

Dilakukan untuk menganalisis sumber risiko dan pemicu terjadinya risiko, dampak positif dan negatifnya, serta kemungkinan terjadinya. Risiko dianalisis dengan menentukan dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.

Hasil Analisis Risiko akan menjadi masukan bagi evaluasi risiko dan untuk proses pengambilan keputusan mengenai perlakuan terhadap risiko. Suatu kejadian dapat mempunyai dampak yang beragam dan dapat mempengaruhi berbagai macam sasaran divisi.

Analisis dapat dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terlebih dahulu untuk mendapatkan indikasi umum tingkat kegawatan risiko. Setelah itu melakukan analisis yang lebih spesifik dan secara kuantitatif.

Evaluasi Risiko

Dilakukan untuk menentukan prioritas pengelolaan risiko dengan membandingkan tingkatan suatu risiko dengan standar atau target tingkatan risiko yang ditentukan sebelumnya, atau

The preparation and socialization have been carried out to the Risk Representative Team for procedures for measuring the maturity level of risk management implementation.

With a good understanding of risk management, every unit in the Company has been managing its risks to operational and business activities in the following steps:

Risk Identification

Risk identification is carried out with 2 (two) approaches, those are goal-approach to identify events that can hamper the achievement of the objectives and process-approaches to identify events that may hinder the achievement of the processes in divisions.

The techniques used in identifying Risk are as follows:

1. Document review
2. Brainstroming
3. Facilitated workshop
4. Focus group discussion
5. Interview
6. Observation
7. Analysis the business process flow
8. Analysis tree of events
9. Fish bone diagram
10. Grouping of business risk models

Risk Analysis

Conducted to analyze the source and trigger of the occurrence of risk, its positive and negative impacts, and the possibility of occurrence. Risks are analyzed by determining the impact and likelihood of risk occurring.

Risk Analysis results will be inputed to risk evaluation for decision making process on risk treatment. An event may have diverse impacts and may affect a wide range of division targets.

The analysis can be done quantitatively or qualitatively. Qualitative analysis is done first to obtain a general indication of risk urgency level, and a more specific quantitative analysis is done afterward.

Risk Evaluation

Done to determine risk management priority by comparing the level of a risk to a predetermined standard or target level of risk, or other specified criteria.

kriteria lain yang ditetapkan.

Evaluasi risiko dilakukan dengan terlebih dahulu memahami kriteria risiko untuk dilanjutkan dengan evaluasi terhadap penyebab dan konsekuensi atas peristiwa risiko yang teridentifikasi. Hasil dari evaluasi risiko adalah menentukan risiko mana yang memerlukan perlakuan dan bagaimana prioritas implementasi perlakuan risiko atau daftar prioritas risiko untuk tindakan lebih lanjut.

Mitigasi Risiko

Dilakukan untuk menyeleksi pilihan-pilihan yang dapat mengurangi atau meniadakan dampak serta kemungkinan terjadinya risiko.

Mitigasi Risiko yang akan diberlakukan di Perseroan adalah:

1. Menghindari
2. Menerima
3. Memitigasi atau Dikurangi
4. Transfer

Pemantauan dan Pengkajian

Pemantauan terus-menerus dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional dan bisnis masih relevan terhadap rencana awal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *likelihood* dan *consequence* suatu *outcome* dapat saja berubah, seperti halnya faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian dan biaya atas berbagai opsi mitigasi risiko.

Oleh karena itu, pengulangan siklus proses manajemen risiko secara reguler terus dilakukan. Tingkat risiko dan efektivitas tindakan pengendalian dipantau secara bulanan bersamaan dengan proses asesmen risiko dan penyampaian profil manajemen risiko untuk masing-masing divisi atau unit bisnis. Pengkajian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rencana mitigasi risiko. Divisi yang menangani fungsi manajemen risiko menjadi fasilitator dalam tahapan pengkajian ini. Risiko-risiko yang telah dipaparkan akan dipilih dan disaring untuk mendapatkan daftar yang menjadi perhatian utama Perseroan.

Audit Berbasis Risiko

Penerapan manajemen risiko dari masing-masing divisi, khususnya pengelolaan terhadap risiko yang telah ditetapkan sebagai risiko-risiko terpilih, akan menjadi obyek pemeriksaan oleh fungsi internal auditor dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan pengelolaan risiko di Perseroan telah dilakukan dengan efektif.

Laporan hasil audit penerapan pengelolaan risiko disampaikan kepada Direksi oleh fungsi auditor internal sebagai bagian dari

Risk evaluation is performed by first understanding the risk criteria to be followed by an evaluation of the causes and consequences of identified risk events. The outcome of a risk evaluation is to determine which risks require treatment and how priorities for the implementation of risk treatment or risk priority list for further action.

Risk Mitigation

Conducted to select options that can reduce or eliminate the impact and the likelihood of risk occurring.

Risk Mitigation to be applied in the Company are:

1. Avoid
2. Accept
3. Mitigate or Reduce
4. Transfer

Monitoring and Review

Continuous monitoring is conducted to ensure that operational and business activities are still relevant to the original plan. Factors that may affect the likelihood and consequence of an outcome may change, as do the factors affecting the suitability and cost of various risk mitigation options.

Therefore, regular repetition of the risk management process cycle continues. The level of risk and effectiveness of its control are monitored monthly along with the risk assessment process and the identification of risk management profiles for each division or business unit. Assessment is an integral part of risk mitigation plan. Unit that handles the risk management function becomes the facilitator in this stage of assessment. The risks that have been presented will be selected and screened to obtain a list of risks that are of major concern to the Company.

Risk-Based Audit

Implementation of Risk Management of each Division, in particular the management of selected defined risks, shall be the object of examination by the internal auditor in the Annual Audit Work Program. This is done to ensure that the implementation of risk management in the Company has been carried out effectively.

The audit report on the implementation of risk management is submitted to the Board of Directors by the internal auditor as

pelaksana pengawasan dan pengendalian intern. Selain itu, dalam rangka penerapan Good Corporate Governance (GCG), laporan hasil penerapan manajemen risiko juga disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui laporan manajemen bulanan dan triwulanan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Upaya Pengelolaan Risiko

Profil risiko yang dihasilkan dari proses asesmen risiko diklasifikasikan sebagai profil risiko dengan tingkat risiko sangat rendah, rendah, moderat, tinggi, dan sangat tinggi.

Sosialisasi pada *Risk Representative* untuk Identifikasi dan Monitoring Evaluasi Manajemen Risiko target Triwulan IV serta Membuat Konsep *Reward & Punishment Risk Management*.

Pelaksanaan *review risk management* di PT INTI (Persero) pada tahun 2023 diuraikan dalam tabel berikut:

part of the internal control and oversight. In addition, as part of Good Corporate Governance (GCG) practices, a report on the implementation of risk management is as well submitted to the Board of Commissioners and Shareholders through monthly and quarterly management reports as mandated by Regulation of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) Number PER-2/MBU/03/2023 regarding Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Risk Management Effort

Risk Profile resulting from the risk assessment process is Risk Profile resulting from the risk assessment process is classified as a risk profile with very low, low, moderate, high, and very high.

Socialization to Risk Representatives for Identification and Monitoring of Risk Management Evaluation targets for the Fourth Quarter and also Making the Concept of Reward & Punishment Risk Management.

The implementation of the risk management review at PT INTI (Persero) in 2023 is described in the following table:

No.	Unit Kerja <i>Work Unit</i>	Review Risk Management <i>Risk Management Review</i>				Catatan <i>Notes</i>
		Triwulan 1 <i>Quarter 1</i>	Triwulan 2 <i>Quarter 2</i>	Triwulan 3 <i>Quarter 3</i>	Triwulan 4 <i>Quarter 4</i>	
1	Hukum & Manajemen Risiko <i>Legal & Risk Management</i>	✓	✓	✓	✓	-
2	Manajemen Sumber Daya Manusia & Umum <i>Human Capital & General Affair</i>	✓	✓	✓	✓	-
3	Pengadaan & Manajemen Materi <i>Procurement and Management Material</i>	✓	✓	✓	✓	-
4	Pemasaran & Penjualan <i>Sales & Marketing</i>	✓	✓	✓	✓	-
5	Rekayasa <i>Commercial Engineering</i>	✓	✓	✓	✓	-
6	Operasi <i>Operation</i>	✓	✓	✓	✓	-
7	Satuan Pengawasan Intern <i>Internal Audit Group</i>	✓	✓	✓	✓	-
8	Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>	✓	✓	✓	✓	-
9	Perencanaan & Analisis Keuangan <i>Financial Planning and Analysis</i>	✓	✓	✓	✓	-

Keterangan :

✓ : Sudah Dilaksanakan/Sudah Mengumpulkan (*Already Done/Already Collected*)
X : Belum Melaporkan (*Not Reported*)

Manajemen Risiko Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023

Risk Management in Company Work Plan and Budget 2023

Dalam menjalankan bisnisnya perusahaan memitigasi risiko baik kegiatan operasional maupun proyek. Mitigasi risiko yang langsung dengan strategi perusahaan di tahun 2023 dituangkan ke dalam Mitigasi Risiko Key Performance Indicator (KPI) sebagai berikut:

In carrying out its business, the company mitigates risks in both operational activities and projects. Risk mitigation that is directly related to the company's strategy in 2023 is stated in the Risk Mitigation Key Performance Indicator (KPI) as follows:

Sasaran Target	Risiko Utama Main Risk	Kategori Risiko Risk Category	Going Concern	Pembahasan Risiko Risk Causes	Dampak Risiko Kuantitatif Quantitative Risk Impact	Dampak Risiko Kualitatif Qualitative Risk Impact	Kemungkinan Inherent Risk Inherent Risk Likelihood	Dampak Inherent Risk Inherent Risk Impact	Level Inherent	Inherent Risk	Kemungkinan Residual Risk Residual Risk Likelihood	Dampak Residual Risk Residual Risk Impact	Level Residual	Residual Risk	Rencana Pemenuhan Mitigation Plan	Output	Target Waktu Time Target
EBITDA dengan target Rp12,5 miliar EBITDA with a target of Rp12.5 billion	Total utang tinggi dan total EBITDA rendah High total debt and low total EBITDA	Nilai Ekonomi Sosial-Finansial Socio-Financial Economic Value	Ya Yes	1. Perusahaan tidak mampu untuk melunasi utang-utang jangka panjang & non-productif (utang ke bank, vendor, karyawan, perusahaan piutang, lembaga keuangan), dikarenakan proses pendanaan debt to equity swap penjualan aset dan atau penjualan saham tidak berhasil dilaksanakan. The company is unable to pay off long-term & non-productive debts (debt to banks, vendors, employees, partners, etc), due to financing instruments) due to the process of obtaining a debt to equity swap, selling assets, and/or selling shares that have not been realized. 2. Perusahaan belum mendapatkan pinjaman modal kerja dari PT Perusahaan Pengelola Aset sehingga Perusahaan belum dapat mengoptimalkan potensi proyek-proyek yang dapat dipecah (EBITDA belum optimal). The company has not received a working capital loan from PT Perusahaan Pengelola Aset so that the company has not been able to optimize the potential of projects that can be obtained (EBITDA is not optimal).		Kesulitan dalam likuiditas dan solvabilitas Difficulty in liquidity and solvency	3	3	9	Moderate	3	3	9	Moderate	1. Perusahaan mengajukan permohonan kredit modal kerja kepada PT Perusahaan Pengelola Aset. The company submits a working capital loan application to PT Perusahaan Pengelola Aset. 2. Perusahaan mencari alternatif pinjaman kredit modal kerja kepada lembaga keuangan. Companies are looking for alternative working capital credit loans to financing institutions. 3. PT Perusahaan Pengelola Aset mengonfirmasi utang PT NNTI (Persero) kepada Bank BRI dan Bank Mandiri. PT Perusahaan Pengelola Aset took over PT NNTI (Persero)'s debt to Bank BRI and Bank Mandiri. 4. PT Perusahaan Pengelola Aset menggunakan aset Mochi Toha 77 sebagai penyetoran modal saham di PT NNTI (Persero). PT Perusahaan Pengelola Aset uses the assets of Mochi Toha 77 as share capital investment in PT NNTI (Persero).	Total utang yang akan dimiliki oleh PT Perusahaan Pengelola Aset sebesar Rp 634 miliar The total debt that will be taken over by PT Perusahaan Pengelola Aset is Rp 634 billion	TW 4 2023 Q4 2023
ROIC= WACC dengan target 5% ROIC= WACC with a target of 5%	Meningkatnya investasi yang tidak berdampak luas dengan kinerja perusahaan dan beban pendanaan Increase in invested capital is not directly proportional to the company's performance and funding expenses	Nilai Ekonomi Sosial-Finansial Socio-Financial Economic Value	Ya Yes	1. Tidak tepat dalam alokasi pendanaan pada proyek. Inappropriate funding allocation for the project. 2. Adanya keterlambatan proyek yang menyebabkan performansi berdampak luas dengan investasi modal. There are project delays that cause performance to be directly proportional to the invested capital.	Beban pendanaan meningkat Funding expenses increased	Menurunnya kepercayaan investor Declining investor confidence	3	3	9	Moderate	2	3	6	Moderate	1. Tetap dalam meningkatkan beban pendanaan. Appropriate in allocating funding expenses. 2. Monitoring proyek secara tepat baik budget maupun pendanaan. Project project monitoring both budget and funding. 3. Mendapatkan proyek dengan margin minimal 15%. Get a project with a minimum margin of 15%.	Margin di atas 15% Margin above 15%	TW 4 2023 Q4 2023
Interest Bearing Debt to EBITDA dengan target 2,34 kali Interest Bearing Debt to EBITDA with a target of 2.34 times	1. Bunga restrukturisasi naik (di atas 6%) Restructuring rates are up (above 6%) 2. Pendanaan baru lebih dari 12% New funding more than 12% 3. Performansi tidak mencapai breakeven point. Performance does not reach the break even point.	Nilai Ekonomi Sosial-Finansial Socio-Financial Economic Value	Ya Yes	1. Utang bunga restrukturisasi meningkat di atas 6%. Payable interest on restructuring increases above 6%. 2. Pendanaan baru dengan bunga lebih dari 12%. New funding with interest > 12%.	Rasio di bawah target KPI. The ratio is below the KPI target.	1. Tunggakan BRI dan Bank Mandiri. Responses from BRI and Bank Mandiri. 2. Aset terjual berdasarkan appraisal Rp832 miliar. Assets sold based on an appraisal of Rp 832 billion.	4	4	16	Very High	4	4	16	Very High	1. Usulan restrukturisasi untuk pembayaran pokok utang dan penghapusan beban bunga dengan Bank Mandiri dan BRI 25 tahun dan grace period 3 tahun. Proposed restructuring for payment of principal debt and abolition of interest expense with Mandiri and BRI for 25 years and a grace period of 3 years. 2. Mencari pola pendanaan di bawah 12%. Look for funding patterns below 12%.		TW 4 2022 Q4 2022



Penyusunan dan Penerapan Kebijakan/ Pedoman dalam rangka Integrasi sebagai Holding termasuk di dalamnya menetapkan Risk Appetite Statement, risk tolerance dan strategi pengendalian risiko secara korporasi dengan target selaras TW 4. Formulation and Dissemination of Policy/ Guidelines for Integration as a Holding include establishing a Risk Appetite Statement, risk tolerance and a corporate risk management strategy with a target of completing Q4.	Belum ditetapkan nya/ risk tolerance dan risk appetite sehingga perusahaan belum dapat menetapkan prioritas mitigasi pada setiap risiko. Not yet set. Its risk tolerance and risk appetite so that the company has not been able to set mitigation priorities for each risk.	Nilai Ekonomi Sosial-Operasional Economic Value Tidak No	Pemetaan kegiatan dan prosedur terkait manajemen risiko memerlukan perhatian sehingga pengesahannya menjadi mendasar dari waktu yang telah ditetapkan dikarenakan keterbatasan jumlah personil di fungsi manajemen risiko. Mapping business activities related to risk management requires attention so that the approval is delayed from the predetermined time due to the limited number of personnel in the risk management function.	Perubahan belum dapat menonjolkan prioritas mitigasi pada setiap risiko. The change has not been able to set priorities for each risk.	2	2	4	Low	1	2	2	Very Low	1. Kebijakan dan prosedur terkait manajemen risiko sudah disahkan awal tahun 2023. Policies and procedures related to risk management have been ratified in early 2023. 2. Batas risk appetite yang telah ditetapkan pada semua risiko yaitu risiko yang memiliki level very low, low, dan moderate. Risk appetite limits that have been set for all risks, namely risks that have very low, low, and moderate levels. 3. Risk tolerance menyesuaikan dengan risk appetite yang telah ditetapkan yakni pada level high dan very high. Risk tolerance adjusts to the predetermined risk appetite, namely at high and very high levels. 4. Tindakan risiko yang dilakukan berdasarkan level risiko adalah: -Very low/low: Tidak diperlukan tindakan (acceptable). -Moderate: Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber daya. -Jika tersedia sumber daya. The risk actions taken based on the level of risk are: -Very low/low: No action required (acceptable). -Moderate: It is recommended that action be taken if resources are available.	1. Kebijakan pedoman manajemen risiko di lingkungan perusahaan. Policy guidelines for risk management within the company. 2. Prosedur manajemen risiko. Risk management procedures.	TW 4 2023 Q4 2023
Mendapatkan/ memperoleh sertifikasi ISO 14001 dengan target sampai TW 4. Obtain/achieve ISO 14001 certificate with a target of up to Q4.	Perangtanjung/ aronay sertifikasi ISO 14001 tidak tercapai. Extension renewal of ISO 14001 certification was not carried out. No	Nilai Ekonomi Sosial/Social Economic Value Tidak No	Adanya temuan eksternal yang tidak dapat dipenuhi. There are external findings that cannot be fulfilled.	Sertifikasi ISO 14001 yang dimiliki Perusahaan hingga tidak berlaku lagi. ISO 14001 certification owned by the Company is lapsed.	3	3	9	Moderate	1	1	1	Very Low	1. Memerintahkan seluruh temuan auditor eksternal beresahan dengan ISO 14001. Fully and close all external auditor findings related to ISO 14001. 2. Audit internal telah dilaksanakan pada bulan Juni 2023. Internal Audit has been carried out in June 2023.	Sertifikat ISO 14001 ISO 14001 certificate	TW 4 2023 Q4 2023
Integrasi fungsi pendukung dalam bentuk shared service. Integration of supporting functions in the form of shared services.	Belum adanya value yang dapat diwujudkan perusahaan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan Kaster Danareksa-PPA. There is no value that can be offered by the company according to the needs of the Danareksa-PPA cluster.	Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation Tidak No	Busnis yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai dengan kebutuhan shared service kaster Danareksa-PPA. The business offered by the company is not in accordance with the shared service needs of the Danareksa-PPA cluster.	Tidak mendapatkan kontrak Don't get a contract	3	3	9	Moderate	2	3	6	Moderate	1. Melakukan identifikasi pasar kebutuhan shared service kaster Danareksa-PPA. Identify market needs for shared service clusters of Danareksa-PPA. 2. Memperkenalkan serta memasarkan produk dan jasa yang dapat dilakukan perusahaan dalam kaster Danareksa-PPA. Introducing and marketing products and services that can be carried out by companies in the Danareksa-PPA cluster.	Perolehan kontrak Contract acquisition	TW 4 2023 Q4 2023

Utang Karyawan & Pemisn, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial & Widya Bhakti INTL, Paljak, Koperasi & PT INTI Bumi Perkasa dengan target pembayaran 50% Employee and Pension Debt, Social Security Adminnistr & Widya Bhakti INTL, Taxes, Cooperative & PT INTI Bumi Perkasa with a payment target of 50%.	Beban utang semakin besar <i>The debt burden is getting bigger</i>	Inovasi Model Bisnis <i>Innovation</i>	Ya	Penjualan tidak mampu untuk melunasi utang-utang jangka panjang & non produktif, dikarenakan proses mendapatkan <i>redt to equity</i> swap, penjualan aset, dan atau penjualan saham tidak berhasil direalisasi <i>The company is unable to pay off long-term & non-productive debts, because the process of obtaining a debt-to-equity swap, selling assets, and/or selling shares has not been successfully realized</i>	1. Total utang jangka panjang September: Rp1.089.288, 890.896 <i>Total long-term debt September: Rp 1.089.288, 890.896</i> 2. Total utang jangka pendek Juni: Rp674.592, 783.021 <i>Total short-term debt in June: Rp 674.592, 783.021</i>	Perusahaan dapat dipulihkan <i>Companies can be bankrupt</i>	3	4	12	High	3	4	12	High	1. Pembayaran utang diambil dari cash in, karena rencana penjualan aset tidak jadi dilaksanakan. <i>Debt payments are taken from cash in, because the plan to sell assets has not been implemented</i> 2. Melakukan pengisian piutang macet untuk menbayar sebagian utang non produktif. <i>Collect bad debts to pay some non-productive debts.</i>	Total Hutang Jangka Panjang Rp. 0 miliar <i>Total Long Term Debt Rp. 0 billion</i>	TW 4 2023 <i>Q4 2023</i>
Pelaksanaan restrukturisasi utang-utangan produktif vendor & Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan target pembayaran 20% <i>Implementation of restructuring of productive debt of vendors & Non-Bank Financial Institutions with a payment target of 20%.</i>								3	4	12	High						
Implementasi MIS untuk laporan keuangan dengan target TV 4. <i>MIS implementation for financial reports with Q4 targets.</i>	Keterlambatan penambahan yang diperlukan di sistem. <i>Late without adding the necessary elements to the system.</i>	Keperluanhan Teknologi Leadership	Tidak	Keterbatasan jumlah SDM pada fungsi IT dalam mengembangkan MIS. <i>Limitet number of human resources in the IT function in developing MIS.</i>		Laporan tidak bisa dipantau secara digital dan masih manual. <i>Reports cannot be monitored digitally and are still manual.</i>	2	3	6	Mediane	1	2	2	Low	MIS secara sistem sudah ada namun perlu ditambahkan terkait laporan keuangan yang lebih detail seperti rencana laba rugi. <i>The MIS system already exists but needs to be added regarding more detailed financial reports such as a profit and loss balance sheet.</i>	Aplikasi MIS terintegrasi. <i>Integrated MIS application</i>	TW 4 2023 <i>Q4 2023</i>
Implementasi of MIS/SSO as a tool for implementing integrated governance with TV 4 targets								2	2	4	Low	1	1	1	Very Low		
Jumlah kegiatan strategis dalam kegiatan investasi dengan target 1 bulan. <i>Number of strategic investments activities with a target of 1 unit.</i>	Tidak memperoleh mitra pendanaan strategis. <i>Did not obtain a strategic funding partner.</i>	Peningkatan investasi <i>Increased investment</i>	Ya	Tingkat kolektibilitas perusahaan pada bank yang rendah mempengaruhi keputusan mitra pendanaan strategis. <i>The low level of corporate collectibility at the bank influences the decision of strategic funding partners.</i>		Perusahaan ingin meningkatkan pendapatan perusahaan dengan menjual aset untuk modal kerja dan pembayaran utang. <i>The company has planned revenue from asset sales for working capital and payments debt ranson.</i>	3	4	12	High	3	4	12	High	Memasarkan proyek dengan history yang baik. <i>One projects with a good history.</i>	Pendanaan untuk proyek. <i>Funding for projects.</i>	TW 4 2023 <i>Q4 2023</i>
Penjualan seluruh/sebagian aset Moch Toha 77 dengan target TV 4. <i>Whole sale/ part of the Moch Toha 77 Assets with a target of TV 4.</i>	Penjualan aset yang tidak dapat dilakukan dikarenakan belum memenuhi unsur-unsur persyaratan yang harus dimiliki. <i>Asset sales that cannot be carried out because they have not fulfilled the required elements</i>	Peningkatan investasi <i>Increased investment</i>	Ya	Penjualan aset tidak disetujui oleh pemegang saham. <i>The sale of assets is not approved by the shareholders.</i>			0	0	0	0	0	0	0		Rencana penjualan aset dibatalkan. <i>Planned sale of Assets cancelled.</i>		



Peertnupan dalam nominated talent minimal 1 orang. Women in nominated talent at least 1 person.	Tidak terpenuhinya talent nominated peertnupan 1 orang. Unfulfilled female nominated talent 1 person.	Pengen- bangan Talent Development	Tidak No	Ketersediaan jumlah karyawan peertnupan yang dapat memenuhi standar kualifikasi/ persyaratan untuk masuk dalam nominated talent. Limited number of female employees who can meet the standard qualifications/requirements to enter nominated talent.		Tidak adanya karyawan perempuan an yang masuk ke dalam nominated talent. There are no female employees who are included in the nominate talent.	2	2	4	Low	2	2	4	Low	Untuk seluruh Vice President akan dilaksanakan program main MGA. Khusus Vice President yang peertnupan akan diikutsertakan ke dalam program melalui berbagai macam pelatihan. For all Vice President & a main MGA program will be included. Specifically for female Vice President their abilities will be enhanced through various types of training.	Peertnupan dalam nominated talent sejumlah 1 orang. Women in nominated talent amount to 1 person.	TW 4 2023 Q4 2023
Millenial (<=42 tahun) dalam nominated talent sebanyak 20%. Millennials (<=42 years) in nominated talent as much as 20%.	Millenial yang terpilih sebagai nominated talent di bawah 20%. Millennials selected as nominated talent under 20%.	Pengembangan Talent Development	Tidak No	1. Millenial di bawah umur 42 tahun masih belum memenuhi kualifikasi persyaratan. Millennials under the age of 42 still do not meet the qualification requirements. 2. Jumlah millenial yang bebas dalam perusahaan. Limited number of millennials in the company.		Regenerasi dalam perusahaan tidak berjalan dengan baik. Regeneration within the company did not go well.	1	2	2	Very Low	1	1	1	Very Low	Millenial (<=42 tahun) dalam nominated talent sebanyak 20%. Millennials (<=42 years) in nominated talent as much as 20%.	TW 4 2023 Q4 2023	

Matriks risiko menggambarkan level risiko yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan. Level risiko perusahaan dapat diperoleh dengan mengalikan nilai kemungkinan dengan nilai konsekuensi.

The risk matrix describes the level of risk that may be faced by the company. The company's risk level can be obtained by multiplying the likelihood value by the consequence value.

		Konsekuensi Consequence				
		Tidak Signifikan Insignificant	Minor	Medium	Signifikan Significant	Sangat Signifikan Severe
Kemungkinan Likelihood	Sangat Besar Almost Certain	Score 1	2	3	4	5
	Besar Likely	5 Tinggi High	10 Tinggi High	15 Ekstrem Extreme	20 Ekstrem Extreme	25 Ekstrem Extreme
	Sedang Possible	4 Moderate	8 Tinggi High	12 Tinggi High	16 Ekstrem Extreme	20 Ekstrem Extreme
	Kecil Unlikely	3 Rendah Low	6 Moderate	9 Tinggi High	12 Ekstrem Extreme	15 Ekstrem Extreme
	Sangat Kecil Rare	2 Rendah Low	4 Rendah Low	6 Moderate	8 Tinggi High	10 Ekstrem Extreme
		1 Rendah Low	2 Rendah Low	3 Moderate	4 Tinggi High	5 Tinggi High

Kriteria kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) untuk analisis risiko pada profil risiko perusahaan 2023 ditampilkan dalam tabel berikut ini:

The criteria for the likelihood of risk for risk analysis in the 2023 company risk profile are shown in the following table:

		Risk Parameter	
		Probabilitas Probability	Deskripsi Kualitatif Qualitative Description
Tingkat Kemungkinan Likelihood	5 Hampir Selalu Terjadi Almost Always Happens	Dapat terjadi pada banyak keadaan atau probabilitas 80% < s.d. 100% <i>May occurs in many circumstances or probability 80% < until 100%</i>	Risiko pernah terjadi sekali dalam 1 bulan > 10% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi <i>The risk occurs once a month > 10% of the frequency of events / number of transactions</i>
	4 Sering Terjadi Often Occur	Akan mungkin terjadi pada banyak keadaan atau probabilitas 60% < s.d. < 80% <i>Will occurs in many circumstances/probability 60% < until < 80%</i>	Risiko pernah terjadi sekali dalam 2 bulan Di atas 5% s/d 10% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi <i>Risk ever happened once in 2 months Above 5% to 10% of the frequency event / number of transactions</i>
	3 Mungkin Terjadi Might happen	Dapat terjadi pada beberapa waktu atau probabilitas 40% < s.d. < 59% <i>Occurs in some time or probability 40% < until < 59%</i>	Risiko pernah terjadi namun tidak sering, sekali dalam 4 bulan Di atas 1% s/d 5% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi <i>The risk has occurred but not often, once every 4 months Above 1% to 5% of the frequency of events / number of transactions</i>

Tingkat Kemungkinan Likelihood	2	Jarang Terjadi <i>Rarely Happening</i>	Mungkin terjadi pada beberapa waktu atau probabilitas 20% < s.d. < 39% <i>May occur at some time or probability 20% < until < 40%</i>	Risiko mungkin terjadi hanya sekali dalam 6 bulan Dari 1 permil s/d 1% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi <i>The risk may occur only once in 6 months</i> From 1 per mil to 1% of the frequency of events / number of transactions
	1	Hampir Tidak Pernah Terjadi <i>Almost Never Happens</i>	Mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal atau probabilitas < 20% <i>May occur only in abnormal conditions or probability < 20%</i>	Risiko mungkin terjadi sangat jarang, paling banyak satu kali dalam setahun < 1 permil dari frekuensi kejadian/ jumlah transaksi <i>The risk may occur very rarely, at most once a year</i> < 1 per mile of frequency of events/ number of transactions

Kriteria dampak risiko untuk analisis risiko pada profil risiko perusahaan tahun 2023 dijabarkan dalam tabel berikut:

The risk impact criteria for risk analysis on the company's risk profile in 2023 are described in the following table:

Pengukuran Dampak <i>Impact Measurement</i>		Sangat Rendah (1) <i>Very Low (1)</i>	Rendah (2) <i>Low (2)</i>	Menengah (3) <i>Moderate (3)</i>	Tinggi (4) <i>High (4)</i>	Sangat Tinggi (5) <i>Very High (5)</i>
Strategis <i>Strategic</i>						
1	Tujuan Strategis <i>Strategic Objectives</i>	Minimal 1 parameter tujuan strategis tertunda kurang dari 1 bulan <i>At least 1 strategic objective parameter is delayed by less than 1 month</i>	Minimal 1 parameter tujuan strategis tertunda antara 2 - 3 bulan <i>Minimum 1 strategic objective parameter pending between 2 - 3 months</i>	Minimal 1 parameter tujuan strategis tertunda antara 3 - 6 bulan <i>Minimum 1 strategic objective parameter pending between 3- 6 months</i>	Minimal 1 parameter tujuan strategis tertunda antara 6 - 9 bulan <i>Minimum 1 strategic objective parameter pending between 6 - 9 months</i>	Minimal 1 parameter tujuan strategis tertunda lebih dari 9 bulan <i>At least 1 strategic objective parameter is delayed for more than 9 months</i>
Hukum <i>Law</i>						
1	Pelanggaran hukum <i>Lawlessness</i>	Perusahaan menghadapi masalah hukum yang minimal <i>The company faced minimal legal issues</i>	Perusahaan mendapat somasi. Ada tindakan hukum pada perusahaan dengan dampak rendah. <i>The company received a subpoena. There are legal actions against low-impact companies.</i>	Perusahaan mendapat tuntutan hukum. Ada tindakan hukum pada perusahaan dengan dampak menengah. <i>The company was sued. There is legal action on the company with medium impact.</i>	Perusahaan diputuskan kalah di pengadilan tingkat pertama. Ada tindakan hukum pada perusahaan dengan dampak tinggi. <i>The company was decided to lose in the court of first instance. There are legal actions on companies with high impact.</i>	Perusahaan diputuskan kalah di pengadilan tingkat selanjutnya. Ada tindakan hukum pada perusahaan dengan dampak sangat mengganggu kinerja perusahaan. <i>The company was decided to lose at the next level of court. There is legal action against the company with a very detrimental impact on the company's performance.</i>

Kepatuhan
compliance

1	Pelanggaran ketentuan kepatuhan <i>Violation of compliance requirements</i>	Teguran informal / verbal. <i>Informal/verbal reprimand.</i>	Diminta bertemu dengan pihak Regulator (mis. OJK, Bank Indonesia, IDX, Kementerian terkait, Dirjen Pajak, dll) <i>Requested to meet with Regulators (e.g. OJK, Bank Indonesia, IDX, relevant Ministries, Director General of Taxes, etc.)</i>	Peringatan tertulis / formal, terkena denda. <i>Written/formal warning, subject to fine</i>	Regulator memberlakukan pembatasan dan atau pembekuan terhadap aktivitas operasional / produk / jasa tertentu. <i>Regulators impose restrictions and/or freezes on certain operational activities/products/services.</i>	Regulator memberlakukan sanksi signifikan (mis. delisting saham, tidak diperkenankan mengikuti kliring, menarik produk yg beredar, dll) <i>Regulators impose significant sanctions (e.g. delisting of shares, not permitted to participate in clearing, withdrawing products in circulation, etc.)</i>

Reputasi
Reputation

1	Keluhan pelanggan/ nasabah/ pembeli/ supplier <i>Complaints from customers/customers/buyers/suppliers</i>	dalam 1 hari kerja <i>Isolated complaints and can be handled within 1 working day</i>	dalam 3 hari kerja <i>Isolated complaints and can be resolved within 3 working days</i>	dapat diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja dan masih berada dalam kewenangan Pimpinan Cabang / Wilayah <i>Complaints that spread to a sectoral scale and/or are submitted collectively can be resolved within 7 working days and are still within the authority of the Branch/Regional Head</i>	yang dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja dan / atau memerlukan penanganan kewenangan Kantor Pusat <i>Complaints that spread to a national scale and/or are submitted collectively and can be resolved within 10 working days and/or require handling by the authority of the Head Office</i>	yang diselesaikan melebihi 10 hari kerja dan / atau memerlukan penanganan kewenangan Kantor Pusat <i>Complaints that spread to a national/international scale and/or are submitted collectively and are resolved beyond 10 working days and/or require handling by the authority of the Head Office</i>
2	Pemberitaan negatif di media <i>Negative coverage in the media</i>	Publikasi negatif yg terisolasi di wilayah sektoral melalui media konvensional (mis. Radio, TV, Surat Kabar daerah) <i>Isolated negative publications in sectoral areas through conventional media (eg radio, TV, regional newspapers)</i>	Publikasi negatif yang lintas sektoral/ wilayah/provinsi namun masih tersebar media konvensional. <i>Negative publications that cross sectors/ regions/provinces but are still spread by conventional media</i>	Publikasi negatif yang tersebar di media konvensional skala nasional. <i>Cross-national negative publications spread across conventional media on a national scale.</i>	Publikasi negatif mencapai skala nasional yang tersebar di sosial media dan/ atau memerlukan penanganan kewenangan Kantor Pusat <i>Negative publications reach a national scale, spread on social media and/or require handling by the authority of the Head Office</i>	Publikasi negatif mencapai skala internasional yang tersebar di sosial media dan/ atau memerlukan penanganan kewenangan Kantor Pusat <i>Negative publications reach an international scale, spread on social media and/or require handling by the authority of the Head Office</i>
3	Kehilangan daya saing <i>Negative coverage in the media</i>	Penurunan pangsa pasar 5% <i>5% decrease in market share</i>	Penurunan pangsa pasar 5,1% - 10% <i>Decrease in market share 5.1% - 10%</i>	Penurunan pangsa pasar 11% - 15% <i>Decrease in market share 11% - 15%</i>	Penurunan pangsa pasar 16% - 20% <i>Decrease in market share 16% - 20%</i>	Penurunan pangsa pasar lebih dari 20% <i>Market share decline of more than 20%</i>



Sumber Daya Manusia

Human Resources

1	Keluhan Karyawan <i>Employee Complaints</i>	Terdapat keluhan karyawan yang disalurkan sampai tingkat SP Unit namun dapat diisolir dan diselesaikan oleh Pemimpin Unit <i>There are employee complaints that are channeled to the SP Unit level but can be isolated and resolved by the Unit Leader</i>	Terdapat keluhan karyawan yang perlu diselesaikan oleh Penyelia Pemimpin Unit <i>There are employee complaints that need to be resolved by the Unit Lead Supervisor</i>	Terdapat keluhan yang disalurkan mencapai tingkat sektoral / wilayah / provinsi. <i>There are complaints that are channeled to the sectoral/regional/provincial level.</i>	Unjuk rasa karyawan yang mengganggu aktivitas perusahaan dan / atau disertai terjadinya cedera serius / cacat permanen <i>Employee demonstrations that disrupt company activities and/or result in serious injury/permanent disability</i>	Demonstrasi terkoordinasi, terjadinya kematian karyawan saat kerja <i>Coordinated demonstrations, employee deaths at work</i>
2	Turn Over Karyawan Bertalenta <i>Employee Complaints</i>	Turn over pegawai bertalenta kurang dari 1% setahun <i>There are employee complaints that are channeled to the SP Unit level but can be isolated and resolved by the Unit Leader</i>	Turn over pegawai bertalenta 1% - 5% setahun <i>Talent employee turnover 1% - 5% a year</i>	Turn over pegawai bertalenta 5,1 % - 10% setahun <i>Turnover of talented employees is 5.1% - 10% a year</i>	Turn over pegawai bertalenta 11 % - 15 % setahun <i>Turnover of talented employees is 11% - 15% a year</i>	Turn over pegawai bertalenta >15 % setahun <i>Turn over talented employees >15% a year</i>

Sistem Infrastruktur Teknologi

Technology Infrastructure Systems

1	Aplikasi Infrastruktur Pendukung <i>Infrastructure Applications Supporter</i>	Aplikasi & Infrastruktur pendukung yang kurang penting tidak berfungsi selama 1 hari <i>Less important supporting applications & infrastructure do not function for 1 day</i>	Aplikasi dan Infrastruktur pendukung yang kurang penting tidak berfungsi selama lebih dari 1 hari s/d 3 hari <i>Applications and supporting infrastructure that are less important do not function for more than 1 day to 3 days</i>	Infrastruktur vital yang penting tidak berfungsi selama < 1 jam (mis. Listrik, air, jaringan komunikasi & online system) <i>Critical vital infrastructure is down for < 1 hour (e.g. Electricity, water, communication networks & online systems)</i>	Infrastruktur vital yang penting tidak berfungsi selama 2 s/d 6 jam (mis. Listrik, air, jaringan komunikasi & online system) <i>Important vital infrastructure does not function for 2 to 6 hours (eg electricity, water, communication networks & online systems)</i>	Infrastruktur vital yang penting tidak berfungsi selama lebih dari 6 jam (mis. Listrik, air, jaringan komunikasi & online system) <i>Critical vital infrastructure is down for more than 6 hours (eg. Electricity, water, communication networks & online systems)</i>

Kuangan

Finance

1	Pencapaian Pendapatan Operasional <i>Revenue Achievement Operational</i>	$\geq 100\%$ dari target RKAP $\geq 100\%$ of RKAP target	$95\% \leq X < 100\%$ dari target RKAP $95\% \leq X < 100\%$ of the RKAP target	$90\% \leq X < 95\%$ dari target RKAP $90\% \leq X < 95\%$ of the RKAP target	$85\% \leq X < 90\%$ dari target RKAP $85\% \leq X < 90\%$ of the RKAP target	$X < 85\%$ dari target RKAP $X < 85\%$ of the RKAP target
2	Deviasi Anggaran Biaya Operasional <i>Operational Cost Budget Deviation</i>	$x \leq 0\%$ dari target RKAP $0\% \leq x \leq 0\%$ of target RKAP	$0\% < x \leq 3\%$ dari target RKAP $0\% < x \leq 3\%$ of target RKAP	$3\% < X \leq 5\%$ dari target RKAP $3\% < x \leq 5\%$ of target RKAP	$5\% < X \leq 10\%$ dari target RKAP $5\% < x \leq 10\%$ of target RKAP	$X > 10\%$ dari target RKAP $X > 10\%$ of the RKAP target
3	Pencapaian Kinerja Operasional <i>Achievement of Operational Performance</i>	100% sesuai target RKAP <i>100% according to RKAP target</i>	$97\% \leq X < 100\%$ dari target RKAP $97\% \leq X < 100\%$ of the RKAP target	$95\% \leq X < 97\%$ dari target RKAP $95\% \leq X < 97\%$ of the RKAP target	$90\% \leq X < 95\%$ dari target RKAP $90\% \leq X < 95\%$ of RKAP targets	$X < 90\%$ dari target RKAP $X < 90\%$ of the RKAP target

4	Kerugian absolut: musnah, kehilangan, kecelakaan, kerusakan suatu aset (individual maupun group) termasuk pengeluaran biaya pemulihan [recovery cost] atas suatu kejadian insiden kerugian <i>Absolute loss: destruction, loss, accident, damage to an asset (individual or group) including recovery costs for a loss incident</i>	< 1% dari nilai buku aset <i>< 1% of the book value of assets</i>	Antara 1 % s/d 5% dari nilai buku aset <i>Between 1% to 5% of the book value of assets</i>	Antara 5,1% s/d 10% dari nilai buku aset <i>Between 5.1% to 10% of the book value of assets</i>	Antara 11% s/d 15% dari nilai buku aset <i>Between 11% to 15% of book value of assets</i>	>15 % dari nilai buku aset <i>>15 % of the book value of assets</i>
5	Debt Service Coverage Ratio (EBITDA 1 tahun / (Pokok 1 tahun + Bunga 1 tahun))	DSCR>2	DSCR di antara 1,51 sampai 2	DSCR di antara 1,1 sampai 1,5	DSCR di antara 0,8 dan 1	DSCR < 0,8
6	Cost to Income Ratio (Operating Expense / Operating Income)	<60%	60%-69%	70% - 79%	80% - 89%	>90%
7	Penurunan nilai aset/ transaksi/ komoditas/ aktiva produktif atau terdapatnya penambahan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) <i>Decrease in the value of assets/ transactions/ commodities/ productive assets or their existence additional allowance for impairment losses</i>	< 1 per mil dari nominal transaksi/aktiva <i>< 1 per mile of nominal transaction/asset</i>	Diatas 1 permil s/d 1% dari nominal transaksi/ aktiva <i>Above 1 per mil to 1% of the nominal transaction/ asset</i>	Di atas 1% s/d 5% dari nominal transaksi/aktiva <i>Above 1% to 5% of the nominal transaction/ assets</i>	Diatas 5% s/d 10% dari nominal transaksi/aktiva <i>Above 5% to 10% of the nominal transaction/ assets</i>	>10% dari nominal transaksi/ aktiva <i>>10% of the nominal transaction/assets</i>

Operasional

Operasional

1	Pelampauan SLA (Service Level Agreement) melebihi standar <i>Complaints from customers/ customers/buyers/ suppliers</i>	< 1 % dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidakediaan layanan produk atau tambahan biaya / ongkos) <i>< 1% of the predetermined SLA standard (measured from the time of vacancy or unavailability of product services or additional costs/fees)</i>	Antara 1 % s/d 2,5% dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidakediaan layanan produk atau tambahan biaya / ongkos) <i>Between 1% to 2.5% of the predetermined SLA standard (measured from the time of vacancy or unavailability of product services or additional costs/fees)</i>	Antara 2,6% s/d 10% dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidakediaan layanan produk atau tambahan biaya / ongkos) <i>Between 2.6% to 10% of the predetermined SLA standard (measured from the time of vacancy or unavailability of product services or additional costs/fees)</i>	Antara 11 % s/d 20% dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidakediaan layanan produk atau tambahan biaya / ongkos) <i>Between 11% to 20% of the predetermined SLA standard (measured from the time of vacancy or unavailability of product services or additional costs/fees)</i>	>20% dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidakediaan layanan produk atau tambahan biaya / ongkos) <i>>20% of the SLA standard that has been set (measured from the time of vacancy or unavailability of product services or additional costs/fees)</i>



Health, Safety, Security and Environment (HSSE)

1	Fatality <i>Fatalities</i>	Kasus Pertolongan Pertama tidak berpengaruh pada Kinerja Kerja <i>on Work Performance</i>	Kasus Perawatan Medis Efek kesehatan minor dan reversibel (tanpa rawat inap) <i>minor and reversible (no hospitalization)</i>	Cacat tidak tetap / Ketidakhadiran kerja yang terbatas Efek ireversibel tanpa kehilangan nyawa tetapi dengan cacat serius dan rawat inap berkepanjangan <i>Irreversible effects without loss of life but with serious disabilities and inpatient long</i>	Kasus kematian tunggal / Cacat tetap / Ketidakhadiran kerja yang lama Efek ireversibel yang menyebabkan kematian <i>Long absence from work Irreversible effects causing death</i>	Kasus kematian masal Wabah ke lingkungan Potensi menyebabkan banyak kematian misalnya bahan kimia beracun berbahaya <i>Potential to cause many deaths, for example dangerous toxic chemicals</i>
2	Lingkungan <i>Environment</i>	Kerusakan terbatas pada area minimal dengan signifikansi rendah <i>Damage is limited to minimal areas of low significance</i>	Efek minor pada lingkungan biologis atau fisik <i>Minor effects on the biological or physical environment</i>	Sedang Efek jangka pendek tetapi tidak mempengaruhi fungsi ekosistem <i>Currently Short-term effects but do not affect ecosystem function</i>	Efek lingkungan jangka menengah yang serius <i>Serious medium-term environmental effects</i>	Sangat serius Kerusakan lingkungan jangka panjang dari fungsi ekosistem <i>Very serious Long-term environmental damage to ecosystem function</i>

Pengadaan Barang dan Jasa

Procurement of Goods and Services

PT INTI (Persero) telah memiliki berbagai kebijakan dalam Pengelolaan Rantai Pasokan yang menjadi acuan utama semua aktivitas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan dilakukan melalui strategi, perencanaan, proses, dan pengendalian dalam pengadaan yang efektif dan efisien.

Kebijakan terkait mengenai Pengadaan Barang dan Jasa terakhir diperbarui pada tahun 2020 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor KN.11 Tahun 2020 tertanggal 23 April 2020 terkait Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan.

Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh proses eksisting Pengadaan Barang dan Jasa di PT INTI (Persero) dimulai dari proses sourcing, negosiasi, pembelian, hingga pembayaran barang yang sudah terintegrasi dengan System Application and Product (SAP), ditambahkan dengan kebijakan-kebijakan lainnya yang membuat pengelolaan rantai pasok di PT INTI (Persero) lebih baik yaitu peraturan mengenai pengadaan elektronik (e-procurement).

Saat ini, proses pengembangan terkait penggunaan sistem e-Procurement masih terus dilakukan oleh PT INTI (Persero) dan masih terus disempurnakan pengembangannya hingga saat ini, sehingga pada tahun 2023 dapat digunakan sepenuhnya.

Selain itu, dalam pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, PT INTI (Persero) telah menggunakan ISO 14001:2015 yaitu Standar Internasional tentang Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan untuk menciptakan kinerja operasional yang terbebas dari terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa.

PT INTI (Persero) has various policies in Supply Chain Management, which are the primary reference for all goods and services procurement activities carried out by considering various aspects and carried out through strategies, planning, processes, and controls in effective and efficient procurement.

The related policy regarding the Procurement of Goods and Services was last updated in 2020 through the Decree of the Board of Directors Number KN.11 of 2020, dated April 23, 2020, regarding Guidelines for the Procurement of Company Goods and Services.

Based on this policy, the entire existing process of Procurement of Goods and Services at PT INTI (Persero) starts from the process of sourcing, negotiating, and purchasing to payment for goods that have been integrated with System Application and Product (SAP), added with other policies that make management supply chain at PT INTI (Persero) is better, namely regulations regarding electronic procurement (e-procurement).

Currently, the development process related to using the e-Procurement system is still being carried out by PT INTI (Persero), and still being developed until now, so that in 2023 it can be fully used.

In addition, in the management of the Procurement of Goods and Services, PT INTI (Persero) has used ISO 14001:2015, namely International Standards on Environmental Management Systems and ISO 37001:2016 concerning Anti-Bribery Management Systems to create an operational performance that is free from corruption, collusion, and nepotism for each stage of the process of procuring goods and services.



Kode Etik Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Etik Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Standar Etika Perusahaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa, yakni:

1. Mengikuti seluruh peraturan Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan PT INTI (Persero) pada saat melakukan pengadaan atas barang atau jasa yang dibutuhkan.

The Company's Ethical Standards in the Procurement of Goods and Services are:

1. Follow all the regulations for the Procurement of Goods and Services set by PT INTI (Persero) when procuring the goods or services needed.

2. Menggunakan pemasok-pemasok yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan PT INTI (Persero) dan secara konsisten mampu memenuhi standar kualitas baik barang dan jasa dengan biaya yang kompetitif dan representatif.
3. Melakukan hubungan kerja hanya dengan pemasok yang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan tambahan dari PT INTI (Persero), terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, lingkungan, kesehatan dan keamanan, hak kekayaan intelektual, dan pembayaran yang tidak wajar.
4. Kedua belah pihak juga saling melakukan upaya evaluasi guna perbaikan dan hubungan yang lebih harmonis dan konstruktif.

2. Using suppliers who meet the qualifications set by PT INTI (Persero) and are consistently able to meet the quality standards of both goods and services at competitive and representative costs.
3. Conduct working relationships only with suppliers who comply with applicable laws and regulations and additional requirements from PT INTI (Persero), especially those related to employment, environment, health and safety, intellectual property rights, and unfair payments.
4. Both parties also make mutual evaluation efforts for improvement and a more harmonious and constructive relationship.

Sistem Electronic Procurement (e-Procurement)

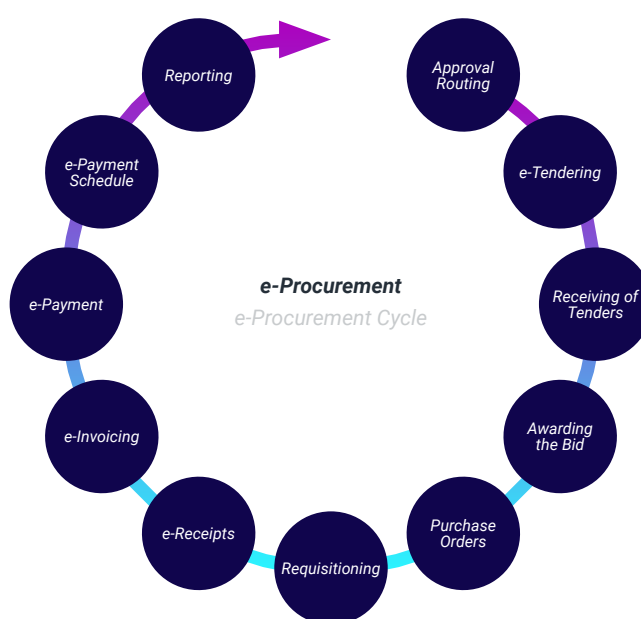
Electronic Procurement System (e-Procurement)

Untuk meningkatkan kualitas kinerja yang efektif dan efisien, khususnya dalam praktik pengadaan barang dan jasa dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), maka PT INTI (Persero) tengah melakukan pengembangan mengenai sistem e-Procurement yang ditargetkan untuk diimplementasikan pada tahun 2023.

Sistem ini dirancang agar proses pengadaan dapat dengan mudah untuk diakses oleh publik dan pihak yang berencana menjalin kemitraan sebagai penyedia barang dan jasa, dengan hanya mendaftar melalui sistem e-Procurement di website Perseroan.

To improve the quality of effective and efficient performance, especially in the procurement of goods and services, and to prevent the occurrence of criminal acts such as corruption, collusion, and nepotism, PT INTI (Persero) is developing an e-Procurement system targeted for implementation in 2023.

This system is designed to easily access the procurement process by the public and those who plan to establish partnerships as providers of goods and services by simply registering through the e-Procurement system on the Company's website.



Panitia Lelang

Auction Committee

Pada proses pengadaan barang dan jasa, khususnya metode pelelangan PT INTI (Persero) memiliki tim Panitia Lelang, di mana panitia ini bersifat independen dan memiliki sikap standar etika dalam menjalankan pekerjaannya.

Panitia Lelang dianjurkan memiliki jumlah anggota yang ganjil karena pengambilan keputusan untuk pemenang ditetapkan minimal 3 orang, di mana di dalamnya terdapat ketua, wakil ketua, dan 2 (dua) anggota panitia. Berikut merupakan fungsi Panitia Lelang :

1. Melaksanakan pembukaan lelang dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi dan teknis terhadap dokumen penawaran calon mitra yang masuk serta dibuatkan daftar hadir dan berita acara pembukaan lelang.
2. Melakukan evaluasi harga atas penawaran yang memenuhi syarat administrasi dan teknis berdasarkan kriteria atau tata cara yang ditetapkan.
3. Mengevaluasi proses lelang yang gagal setelah diulang dengan pelelangan, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung.
4. Menetapkan urutan calon pemenang dan membuat Berita Acara Pembukaan Lelang, serta membuat rekomendasi untuk melakukan negosiasi.
5. Membuat Laporan Hasil Lelang kepada Pejabat Berwenang.
6. Menjadi narasumber dan memberi masukan jika ada sanggahan dari peserta lelang.

In the process of procuring goods and services, especially the auction method, PT INTI (Persero) has a team of Auction Committee, where this committee is independent and has an attitude of ethical standards in carrying out its work.

The Auction Committee is recommended to have an odd number of members because the decision-making for the winner is determined by at least 3 people, which there is a chairman, a vice-chairman, and 2 (two) committee members. The following are the functions of the Auction Committee:

1. *Carry out the opening of the auction followed by an administrative and technical examination of the bid documents of prospective partners who enter and make a list of attendance and minutes of the auction opening.*
2. *To evaluate the price of bids that meet the administrative and technical requirements based on the criteria or procedures established.*
3. *Evaluate failed bidding process after repeated by auction, direct election, or direct appointment.*
4. *Determine the order of potential winners and make Auction Opening Minutes as well as make recommendations for negotiating.*
5. *Making Auction Result Report to the Authorized Official.*
6. *Become a resource person and provide input if there are objections from bidders.*



Tata Cara Pendaftaran Mitra Kerja PT INTI (Persero)

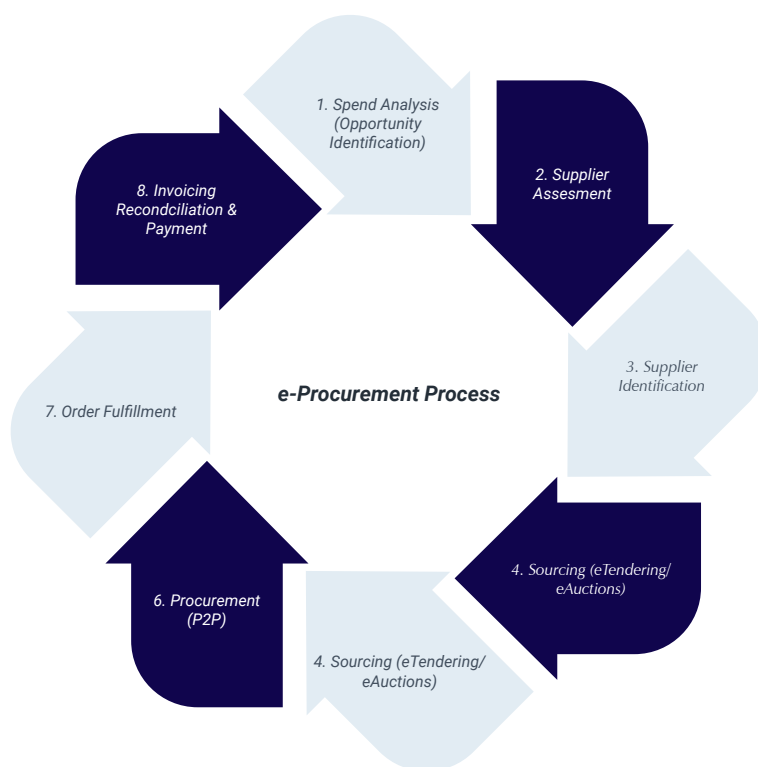
Procedures for Registration of PT INTI (Persero) Work Partners

Tata cara pendaftaran sebagai mitra kerja PT INTI (Persero) dapat dilihat secara langsung pada website Perseroan dengan menghubungi narahubung yang tertera.

Dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa di PT INTI (Persero), salah satu metode yang digunakan adalah dengan sistem pemilihan langsung yang sudah dilakukan proses tender terbuka dan beauty contest sebelumnya sesuai dengan kebijakan internal Perseroan.

The procedure for registering as a working partner of PT INTI (Persero) can be seen directly on the Company's website by contacting the contact person listed.

In implementing the procurement process for goods and services at PT INTI (Persero), one of the methods used is the direct selection system carried out by an open tender process and a beauty contest previously by the Company's internal policies.



Akuntan Perseroan

Corporate Accountant

PT INTI (Persero) menunjuk Kantor Jasa Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sebagai Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT INTI (Persero) serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik ini dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan surat Dewan Komisaris Nomor S-56/DEKOM/INTI/08/2023 dan ditetapkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT INTI (Persero) tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 No. 939/TU.07010300/2023.

PT INTI (Persero) assigned the Accountant Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) as Public Accountants to audit the Consolidated Financial Statements of PT INTI (Persero) and also Implementation of the company's Micro and Small Business Funding Program for the year ended December 31, 2023.

The appointment of this Public Accounting Firm is carried out by the Board of Commissioners based on a letter from the Board of Commissioners Number S-556/DEKOM/INTI/08/2023 and stipulated in the Minutes of the General Meeting of Shareholders (RUPS) PT INTI (Persero) regarding Approval of the 2022 No. 939/TU.07010300/2023.

Profil Kantor Akuntan Publik

Profile of Public Accounting Firms

Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) didirikan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta, Nomor 11 tanggal 16 Juli 1999 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000406-AH.01.23 Tahun 2020 tertanggal 04 Agustus 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., di Jakarta Barat, Nomor 04 tertanggal 04 Mei 2020, berkedudukan di Gedung Plaza Asia Lantai 10-11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan.

Accountant Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) was established by Deed of Notary Fathiah Helmi, S.H., in Jakarta, Number 11 dated 16 July 1999 and was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-0000406-AH.01.23 of 2020 dated 04 August 2020 as amended several times, most recently by Deed of Notary Eliwaty Tjitra, S.H., in West Jakarta, Number 04 dated 04 May 2020, located at the Plaza Asia Building 10-11 Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, South Jakarta.

Informasi Mengenai Penugasan Kantor Akuntan Publik

Information Regarding The Assignment of a Public Accounting Firm

Sesuai dengan kontrak kerja antara PT INTI (Persero) dengan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) Nomor 222/HK.03/020904/2023 periode penugasan selama 153 hari terhitung dari 29 September 2023–29 Februari 2024. Namun, adanya kendala dalam proses audit maka dilakukan perpanjangan kontrak selama 30 hari. Terhitung dari 29 September 2023 – 30 Maret 2024 maka total hari kerja menjadi 184 hari.

In accordance with the work contract between PT INTI (Persero) and Accountant Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) Number 222/HK.03/020904/2023, the assignment period is 153 days starting from 29 September 2023 - 29 February 2024. However, there were obstacles in the audit process, so the contract was extended for 30 days. Starting from 29 September 2023 – 30 March 2024, the total working days will be 184 days.



Jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) yang diberikan hanya mencakup jasa audit saja.

Jasa audit yang diberikan berupa Laporan Auditor Independen (LAI) atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT INTI (Persero) tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023, Laporan Auditor Independen atas penilaian Tingkat Kesehatan dan Key Performance Indicator (KPI), Laporan Auditor Independen atas Pertanggungjawaban Dana pada Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk Tahun Buku 2023 dan 2022, Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern dan Laporan Management Letter Final.

Audit Fee atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT INTI (Persero) untuk tahun buku 2023 adalah sebesar Rp372.000.000. Daftar audit fee untuk periode 2013-2023 tertuang dalam tabel berikut:

Audit services provided by Accountant Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) just only include audit services.

The audit services provided are in the form of an Independent Auditor's Report (LAI) on the Consolidated Financial Report of PT INTI (Persero) for the financial year ending 31 December 2023, an Independent Auditor's Report on the assessment of Health Level and Key Performance Indicators (KPI), Independent Auditor's report regarding fund accountability in the Social and Environmental Responsibility Unit for the 2023 and 2022 Financial Years, Report on Compliance with Statutory Regulations and Internal Control and Management Letter Final Report.

The Audit Fee for the Consolidated Financial Statements PT INTI (Persero) for 2023 is Rp372,000,000. The list of audit fees for the period 2013-2023 is in the following table:

Tahun Buku <i>Fiscal Year</i>	Kantor Jasa Penilai Publik <i>Office of Public Appraisal Service</i>	Audit Fee (Rp)
2013	Kanaka, Puradiredja, Suhartono (Partner: Andy Eldes)	255.000.000
2014	Kanaka, Puradiredja, Suhartono (Partner: Andy Eldes)	260.000.000
2015	Djoko, Sidik & Indra (Partner: Indra Soesetiawan)	250.000.000
2016	Djoko, Sidik & Indra (Partner: Indra Soesetiawan)	225.000.000
2017	Djoko, Sidik & Indra (Partner: Indra Soesetiawan)	245.000.000
2018	Kanaka, Puradiredja, Suhartono (Partner: Soehartono)	330.000.000
2019	Kanaka, Puradiredja, Suhartono (Partner: Soehartono)	370.557.000
2020	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	348.000.000
2021	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	338.000.000
2022	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	338.000.000
2023	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	372.000.000

Kebijakan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Kreditur

Corporate Accountant

Sebagai wujud komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance*, PT INTI (Persero) senantiasa memperhatikan kepentingan para pihak yang membantu Perseroan untuk meningkatkan kemampuan modal kerja Perseroan maupun sebagai sumber pendanaan.

Demi mewujudkan komitmen tersebut, Perseroan telah berupaya terkait pemenuhan Hak-Hak Kreditur yang bertujuan untuk menjaga terpenuhinya Hak-Hak Kreditur dan menjaga kepercayaan yang diberikan Kreditur terhadap Perseroan. Secara garis besar, prinsip-prinsip kebijakan pemenuhan Hak-Hak Kreditur yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Perseroan mempertimbangkan dan mengukur kemampuan secara internal.
2. Perseroan melakukan pemilihan kreditur berdasarkan aspek kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Perseroan menerima pendanaan yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (*fairness*).
4. Perseroan senantiasa berupaya bahwa pembayaran hutang pokok, bunga, dan pokok pinjaman dilakukan tepat waktu.
5. Perseroan memastikan penyampaian informasi laporan keuangan kepada kreditur dilakukan secara tepat waktu, transparan, akurat, dan dapat dipercaya.
6. Perseroan menggunakan pendanaan sesuai dengan tujuan yang diperjanjikan.
7. Perseroan memastikan bahwa seluruh persyaratan dalam perjanjian dengan pihak kreditur terpenuhi.
8. Perseroan memberikan informasi secara transparan, akurat, terbuka, dan tepat waktu tentang penggunaan dana.
9. Perseroan menyampaikan salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kreditur.

As a form of the Company's commitment to implementing the principles of Good Corporate Governance, PT INTI (Persero) always pays attention to the interests of the parties who help the Company to improve the Company's working capital capabilities and as a source of funding.

In order to realize this commitment, the Company has made efforts related to the fulfillment of Creditor Rights which aims to maintain the fulfillment of Creditor Rights and maintain the trust given by Creditors to the Company. Broadly speaking, the principles of the policy on the fulfillment of Creditor Rights carried out by the Company are as follows:

1. *The Company considers and measures its capabilities internally.*
2. *The Company selects creditors based on the aspect of credibility that can be accounted for.*
3. *The Company receives funding that is tied up through a valid agreement with agreement clause that puts forward the principle of fairness.*
4. *The Company always strives that payment of principal, interest, and loan principal is made on time.*
5. *The Company ensures that the submission of financial statement information to creditors is carried out in a timely, transparent, accurate, and reliable manner.*
6. *The Company uses funding in accordance with the agreed objectives.*
7. *The Company ensures that all requirements in the agreement with the creditor are met.*
8. *The Company provides information in a transparent, accurate, open, and timely manner regarding the use of funds.*
9. *The Company submits a copy of the Deed of Amendment to the Company's Articles of Association to creditors.*

In establishing a relationship with Creditors, PT INTI (Persero)'s



Dalam menjalin hubungan dengan Kreditor, Insan PT INTI (Persero) diwajibkan untuk:

1. Memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada Kreditor sehubungan dengan kerja sama yang terjadi, dengan menjunjung tinggi transparansi dan kejelasan, serta tidak mengandung hal-hal yang multitafsir, dengan tetap memperhatikan dan menjaga informasi-informasi yang bersifat rahasia yang dimiliki Perseroan.
2. Bekerja sama dengan para Kreditor yang sudah dipilih atas dasar pertimbangan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan dan pengembangan bisnis.
3. Melakukan analisa risiko dan manfaat sebelum melakukan ikatan perjanjian kerja sama.
4. Menjaga dan mengutamakan kepentingan Perseroan.
5. Berkomitmen untuk memenuhi hak-hak para Kreditor sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati meliputi pembayaran bunga, pelunasan pokok, dan hak-hak Kreditor lainnya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati antara Perseroan dan Kreditor serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

personnel are required to:

1. *Provide complete and accurate information to Creditors in connection with the cooperation that occurs by upholding transparency and clarity and not containing matters of multiple interpretations, while still paying attention to and maintaining confidential or confidential information owned by the Company.*
2. *Cooperating with Creditors who have been selected on the basis of credibility considerations that can be accounted for for the sake of business interests and development.*
3. *Conduct risk and benefit analysis before entering into a cooperation agreement.*
4. *Maintain and prioritize the interests of the Company.*
5. *Committed to fulfill the rights of Creditors in accordance with the agreed agreement including interest payments, repayment of principal, and other rights of creditors in accordance with the provisions of the agreement agreed between the Company and the Creditors and the relevant laws and regulations.*

Bahasan Mengenai Kode Etik

Discussion on Code of Conduct

Untuk mengembangkan perilaku yang baik sesuai dengan standar etika yang tinggi bagi korporasi, Direksi dan seluruh karyawan, mengembangkan hubungan yang baik dengan pihak eksternal berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), maka PT INTI (Persero) menetapkan Kebijakan Kode Etik Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor Nomor KN.007/2023 tertanggal 04 Juni 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi yang Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Kode Etik ini sejalan dengan Sarbanes-Oxley Act (SOA) Section 406.

Kode Etik yang ditetapkan ini dimaksudkan agar menjadi pedoman dan berlaku bagi seluruh insan PT INTI (Persero), yaitu seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perseroan, untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Perseroan dijalankan dengan penuh integritas, berlandaskan prinsip-prinsip GCG dan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian juga akan tercipta suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perseroan.

To develop good behavior in accordance with high ethical standards for the corporation, the Board of Directors and all employees, develop good relationships with external parties on the principles of Good Corporate Governance (GCG), PT INTI (Persero) sets Policy of Code of Conduct based on Directors of Decree Number KN.007/2023 dated 04 Juni 2023 accordance with the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-2/MBU/03/2023 on the Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs. The Code is in line with the Sarbanes-Oxley Act (SOA) Section 406.

Code of Conduct set is intended to be a guideline and applies to all PT INTI (Persero)'s employees, that is all members of the Board of Commissioners, Directors, Employees, and other personnel who directly works for and on behalf of the Company, to ensure that the business of the Company is run with integrity, based on GCG principles and in accordance with the legal provisions and the applicable legislation. Thus also a healthy and comfortable working atmosphere is created within the Company.

Isi Kode Etik

Content of Code of Conduct

Kode Etik Perusahaan merupakan nilai dan norma moral yang harus diperhatikan dalam interaksi internal maupun eksternal Perusahaan. Kode Etik Perusahaan terdiri dari Etika Bisnis Perusahaan dan Etika Perilaku Insan PT INTI (Persero).

Etika Bisnis Perusahaan dalam Kebijakan Kode Etik ini merupakan penjelasan tentang bagaimana Perseroan sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika, dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perseroan dengan kepentingan segenap para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas Perseroan.

Etika Bisnis Perusahaan dijabarkan menjadi:

1. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam artian setiap insan PT INTI (Persero) harus memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan, merupakan

KCode of Ethics are moral values and norms that must be considered in the Company's internal and external interactions. Code of Ethics consists of Corporate Business Ethics and Ethical Behavior of PT INTI (Persero) personnel.

Corporate Business Ethics in this Policy of Code of Conduct is a description of how the Company as a business entity should behave ethically and act as its effort to balance the interests of the Company and the interests of all stakeholders in accordance with the principles of GCG and healthy corporate values while maintaining Company profitability.

Corporate Business Ethics are described as follows:

1. Compliance with Laws and Regulations, means that every PT INTI (Persero)'s employee should understand and obey legislation which is the key element that must be



elemen utama yang harus dijaga dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap Insan PT INTI (Persero).

2. Larangan pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi, dengan memperhatikan sejumlah kebijakan berikut:

a. Kebijakan Pemberian kepada Pihak Ketiga

- Insan PT INTI (Persero) dilarang memberikan atau menjanjikan hadiah, suap, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung pada penyelenggara negara, mitra bisnis, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Perseroan, di mana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga digunakan untuk mempengaruhi atau menggerakkan pihak-pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- Segala hal menyangkut pemberian sesuatu pada pihak-pihak yang berhubungan dengan Perseroan wajib mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan gratifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Tindak Pidana Korupsi.

b. Kebijakan Penerimaan Hadiah, Suap, dan Sejenisnya.

- Insan PT INTI (Persero) dilarang melakukan hal berikut:
 - i. Menerima gratifikasi yang dianggap suap dari pihak manapun yang diterima secara langsung maupun tidak langsung.
 - ii. Meminta gratifikasi yang dianggap suap dari pihak manapun baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yang diketahui atau patut diduga digunakan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, ketentuan peraturan Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - iii. Penerima gratifikasi yang dianggap suap, wajib melaporkan pada atasan langsung, serendah-rendahnya setingkat Kepala Bagian dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi dimaksud.
 - iv. Memotong atau menerima sebagian jumlah pembayaran pada pihak ketiga sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas

maintained in any action taken by any PT INTI (Persero)'s employee.

2. *Prohibition of Giving and/or Reception of Gratuities, having regard to the following policies:*

a. *Granting to Third Parties Policies*

- *PT INTI (Persero)'s personnel are prohibited from giving or promising gifts, bribes, and its kind, either directly or indirectly to state officials, business partners, and other parties related to the Company, in which the giving is known or reasonably suspected to be used to influence or move these parties to do or to not do something in his position, which is contrary to his obligations.*
- *All matters concerning the giving to the parties relating to the Company shall refer to the provisions of the applicable legislation, including gratuities provisions referred to in the legislation in the field of Corruption.*

b. *Policies Receiving Gifts, Bribes, and Its Kind.*

- *PT INTI (Persero)'s personnel are prohibited to do as follow:*
 - i. *Accept gratification considered bribes received from any party directly or indirectly.*
 - ii. *Ask for gratuity is considered a bribe of any party either directly or indirectly, or by abusing his power to force someone to give something, pay, or do something for themselves that are known or reasonably suspected to be used to influence decision-making or to move in order to perform or not perform something in his position, which is contrary to its obligations, Company Regulations, and existing laws.*
 - iii. *Gratuity recipients considered bribes, shall report to the direct supervisor, at least to head of unit (Manager) within 30 days of receipt of gratuities intended.*
 - iv. *Cut or accept partial payments amount to a third party in return for the performance of duties and obligations.*

dan kewajibannya.

- v. Larangan sebagaimana dimaksud pada butir i sampai dengan iii, juga berlaku bagi keluarga insan PT INTI (Persero), sepanjang hal tersebut dapat atau patut diduga dapat mempengaruhi Insan PT INTI (Persero) dalam pelaksanaan tugas atau pengambilan kebijakan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, ketentuan Peraturan Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penerima gratifikasi yang dianggap suap, wajib melaporkan pada atasan langsung serendah-rendahnya setingkat Kepala Bagian dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya pemberian.
- Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud butir (b) di atas, atasan langsung meneliti gratifikasi yang diterima tersebut untuk menentukan apakah gratifikasi yang diterima tersebut diklasifikasikan atau dianggap suap atau bukan dengan sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika pemberian yang diterima dianggap suap, maka kewajiban bagi penerima pemberian untuk mengembalikan kepada si pemberi dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterimanya pemberian dimaksud, disertai penjelasan mengenai kebijakan ini dengan menggunakan Formulir Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Direksi tentang Pengendalian Gratifikasi.
- Jika alamat si Pemberi sebagaimana dimaksud butir (d) di atas berada di tempat yang jauh atau di luar negeri, maka cukup Formulir tersebut di atas yang dikirimkan, sedangkan pemberiannya diberikan kepada lembaga sosial yang ditentukan oleh Perseroan.

v. *The prohibition referred to point i to iii, also applies to family of PT INTI (Persero)'s personnel, the extent they may or should be expected to affect of PT INTI (Persero)'s personnel to the performance of duties or the policy in his position as opposed to their obligations, Company Regulations, and existing laws.*

- *The recipient of gratuity that considered bribes, shall report to direct supervisor at least Department Head, within 30 days of the receipt.*
- *Upon receipt of the report as referred to in point (b) above, the direct supervisor examines the gratuities which received to determine whether the received gratuities are classified or considered bribes or not in accordance with company rules and existing laws.*
- *If the gift received is considered a bribe, it is an obligation for the recipient to return the gift to the giver within 30 working days of receipt, along with an explanation of this policy, by using the Returns Form referred to in the Decree of the Board of Control Gratification.*
- *e) If the address of the giver referred to point (d) above is in distant place or abroad, then it suffices to send the Form above, while the gift is given to social institutions determined by the Company.*

3. Kepedulian terhadap Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan, harus dilakukan oleh semua insan PT INTI (Persero) melalui hal-hal berikut:
- a. Senantiasa menjaga dan memelihara keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Setiap Insan PT INTI (Persero) merupakan aset penting bagi Perseroan, karenanya pengelolaan dan pemeliharaan aset tersebut senantiasa memperhatikan kesehatan dan keselamatan serta hubungannya dengan lingkungan di sekitarnya.
 - c. Bertanggung jawab untuk memelihara lingkungan kerja yang aman dengan mematuhi peraturan dan praktik-praktik mengenai keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan.

3. *Concern for Health, Safety, and Environment, shall be done by all members of PT INTI (Persero) through the following:*
- a. *Always keep and maintain the safety, health and environment in accordance with existing laws.*
 - b. *Each PT INTI (Persero)'s personnel is an important asset to the Company, hence the management and supervision the assets always considered safety and health and the relation to the environment.*
 - c. *Responsible for maintaining a safe work environment by complying with the rules and practices on safety, occupational health and environment.*



- d. Melaporkan apabila terjadi kecelakaan, luka atau cacat fisik, dan adanya peralatan kerja yang tidak aman, pada pimpinan atau pihak yang ditunjuk untuk hal tersebut.
 - e. Memiliki komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari bahaya, serta senantiasa menjaga kelestarian lingkungan.
 - f. Memahami dan mematuhi seluruh prosedur keselamatan kerja yang telah ditetapkan.
 - g. Menangani masalah pencemaran lingkungan yang terjadi dengan efektif dan efisien.
4. Lingkungan kerja yang baik, termasuk tentang privasi, keragaman, praktik hubungan kerja yang adil dan saling menghormati tanpa adanya diskriminasi dan pelecehan, serta tindakan lainnya yang tidak menyenangkan.
5. Standar Etika dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan, menjadi pernyataan jaminan Perseroan dalam rangka pemenuhan hak-hak dan kepentingan pada para pemangku kepentingan yang dijalankan pada hubungan berikut:
- a. Hubungan dengan Insan PT INTI (Persero), yang diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
 - b. Hubungan dengan Kastemer, yang dilakukan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan kastemer berdasarkan kejujuran dan integritas. Segala bentuk promosi Perseroan dilakukan secara terukur dan jujur. Pelaksanaannya diatur tersendiri dalam Kebijakan Kastemer.
 - c. Hubungan dengan Pemasok, yang diatur tersendiri dalam Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Perusahaan.
 - d. Hubungan dengan Kreditur, yang diatur tersendiri dalam Kebijakan Kreditur.
 - e. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar, yang diatur tersendiri dalam Pedoman Pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
 - f. Hubungan dengan Pemerintah, selalu didasarkan pada standar etika bisnis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Hubungan dengan Pemegang Saham:
 - Jaminan Perlindungan bagi Pemegang Saham Insan PT INTI (Persero) berkomitmen untuk senantiasa berusaha keras agar Perseroan mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan berdasarkan standar bisnis yang saling menguntungkan hingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi Pemegang Saham. Hubungan dengan Pemegang Saham dapat terjalin dengan baik dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. *Reported if any event accident, injury or physical disabilities occurs, and their equipment work unsafe, to the leader or the party designated for it.*
 - e. *Committed to create a work environment that is free from danger, and to always preserve the environment.*
 - f. *Understand and comply with all safety procedures that have been established.*
 - g. *Deal with environmental pollution problem effectively and efficiently.*
4. *Good working environment, including privacy, diversity, fair labor practices and a relationship of mutual respect without any discrimination and harassment, and other acts that are not pleasant.*
5. *Standard Ethics in dealing with stakeholders, become a statement of the Company in order to guarantee the fulfillment the rights and interests of the stakeholders run on the relations of follow:*
- a. *Relationship with PT INTI (Persero)'s personnel, which is regulated separately in the Collective Labour Agreement.*
 - b. *Relationship with the Customer, which is performed to establish a long term relationship with the customer based on honesty and integrity. All forms of the Company's promotion should be measurable and honest. Its implementation regulated separately in the Customer Policy.*
 - c. *Relationship with Suppliers, regulated separately in the Procurement of Goods and/or Services Company.*
 - d. *Relationship with the Creditor, regulated separately in Creditor Policy.*
 - e. *Relationship with the Community and Neighborhood, regulated separately in the Guidelines for the Management of Partnership Program and Community Development Program.*
 - f. *Relationship with the Government, always based on business ethics standards and existing laws.*
 - g. *Relations with Shareholders*
 - *Guarantees for the Protection of Shareholders*
- PT INTI (Persero)'s personnel is committed to continually strive for the Company continuous growth based on mutual business standards to be able to give a maximum contribution to the Shareholders. Relations with Shareholders can be established in compliance with the provisions of legislation.*

- Prinsip Jaminan Bagi Pemegang Saham
 - i. Setiap Insan PT INTI (Persero) bertanggung jawab untuk melindungi aset Pemegang Saham yang dipercayakan pada Perseroan dari kehilangan, kerusakan, penyalahgunaan, atau pencurian.
 - ii. Saham-saham berupa dana, Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), *prototype*, produk, ataupun peralatan, hanya dapat digunakan untuk usaha dan tujuan yang disetujui manajemen.
 - iii. Setiap Insan PT INTI (Persero) dilarang menggunakan aset-aset Perseroan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar peraturan Perseroan.
 - iv. Setiap Insan PT INTI (Persero) wajib segera memberitahu terjadinya pencurian, kehilangan, atau penyalahgunaan aset Perusahaan pada fungsi *general affair/* umum atau pihak yang ditunjuk untuk itu.
 - Keakuratan Dokumen-Dokumen Perusahaan
Segala dokumen, catatan-catatan, dan akun-akun harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan sistem internal kontrol Perseroan.
 - Audit dan Investigasi
 - i. Setiap Insan PT INTI (Persero) diharuskan bekerja sama dengan tim pemeriksa dan investigasi yang dilakukan oleh Perseroan, instansi pemeriksa, dan regulator.
 - ii. Seluruh informasi yang diberikan harus benar dan akurat.
 - iii. Seluruh Insan PT INTI (Persero) tidak akan menyembunyikan, mengubah, memusnahkan dokumen atau catatan-catatan sehubungan dengan adanya kegiatan investigasi atau adanya permintaan yang sah untuk hal itu.
 - iv. Setiap Insan PT INTI (Persero) disarankan untuk berkonsultasi dengan fungsi hukum sebelum merespon segala permintaan audit, investigasi atau informasi lain di luar kebiasaan.
 - h. Hubungan dengan Mitra Bisnis, mengedepankan asas manfaat, sinergi, tidak merugikan perusahaan, mematuhi kode etik, transparan, sesuai kontrak, dan memastikan telah memenuhi kebijakan Perseroan.
 - i. Hubungan dengan Pesaing, patuh pada ketentuan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berlaku.
 - j. Hubungan dengan Media Massa, senantiasa menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab dalam rangka membangun citra Perseroan yang positif dengan tetap menghormati
- *Shareholders Guarantee Principle*
 - i. *Each PT INTI (Persero)'s personnel is responsible to protect the Shareholders assets entrusted to the Company from loss, damage, misuse, or theft.*
 - ii. *Shares in the form of funds, Intellectual Property Rights (IPR), prototype, product, or equipment, may only be used for business and purposes approved by the management.*
 - iii. *Each PT INTI (Persero)'s personnel is prohibited from using the Company's assets for purposes contrary to the law and violates the Company rules.*
 - iv. *Each PT INTI (Persero)'s personnel shall immediately notify the occurrence of theft, loss or misuse of company assets to the function of general affairs or other party assigned for it.*
 - *The accuracy of Company Documents*
All documents, records, and accounts must be in accordance with the principles of accounting and internal control systems of the Company.
 - *Audit and Investigation*
 - i. *Each PT INTI (Persero)'s personnel is required to cooperate with the inspection and investigations team conducted by the Company, inspectorate, and regulators.*
 - ii. *All information provided must be truthful and accurate.*
 - iii. *All PT INTI (Persero)'s personnel will not hide, alter, destroy documents or records in connection with the activities of the investigation or any valid request for it.*
 - iv. *Each PT INTI (Persero)'s personnel is advised to consult with legal function before responding to any request of audits, investigations or other information out of the ordinary.*
 - h. *Relations with Business Partners, promote the principle of benefits, synergy, not detrimental to the company, adhering to code of conduct, transparent, based on the contract, and ensured has meet the Company's policy.*
 - i. *Relations with Competitors, comply with the provisions on the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition regulations.*
 - j. *Relations with the Mass Media, always convey information openly and responsibly in order to build a positive image of the company while respecting the journalistic code of ethics.*



kode etik jurnalistik.

- k. Hubungan dengan Anak Perusahaan, harus dilakukan dengan baik dalam rangka membangun sinergi dan citra yang lebih baik dan dapat meningkatkan kinerja Perseroan.

6. Standar Etika Insan, penting bagi Perseroan untuk mengatur perilaku yang beretika dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari dalam proses pekerjaan. Hal itu mengatur hal berikut:

- a. Perilaku Sebagai Atasan Terhadap Bawahan.
- b. Perilaku Sebagai Bawahan Terhadap Atasan.
- c. Perilaku sebagai Rekan Kerja.
- d. Hak atas Kekayaan Intelektual.

Etika Perilaku Insan PT INTI (Persero) diharapkan menjadi pedoman untuk mengembangkan perilaku yang baik di lingkup eksternal maupun internal. Hal ini dijalankan dengan hal berikut:

1. Komitmen Insan PT INTI (Persero).
2. Menjaga nama baik perusahaan.
3. Menjaga hubungan baik antar insan PT INTI (Persero).
4. Menjaga kerahasiaan perusahaan.
5. Menjaga dan menggunakan aset perusahaan.
6. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
7. Menghindari perilaku asusila, narkoba, obat terlarang, perjudian dan hanya merokok di tempat yang disediakan.
8. Melakukan pencatatan data Perseroan dan penyusunan laporan.
9. Menghindari benturan kepentingan.
10. Jaminan dan batasan tentang aktivitas politik.

- k. *Relationship with Subsidiaries, must be done in order to build synergies and better image and may improve the the Company performance.*

6. *Individual Ethical Standards, it is important for the Company to regulate ethical behavior in the implementation of daily activities in the work process. It set as follows:*

- a. *Behaviour as Supervisor Toward Subordinate.*
- b. *Behaviour as Subordinate Toward Supervisor.*
- c. *Behaviour as Colleagues.*
- d. *Intellectual Property Rights.*

Behavior Ethics PT INTI (Persero)'s personnel is expected to be a guideline to develop good behavior in both external and internal sphere. It runs by following:

1. *PT INTI (Persero)'s personnel commitment.*
2. *Keeping Company reputation.*
3. *Keeping good relations among PT INTI (Persero)'s personnel.*
4. *Keeping company confidentiality.*
5. *Maintaining and using company assets.*
6. *Maintaining health and occupational safety, and environment.*
7. *Avoiding immoral behavior, narcotics, drugs, gambling, and smoking.*
8. *Recording Company data and report.*
9. *Avoiding conflict of interest.*
10. *Guarantee and limitation of political activities.*

Ketaatan Pada Kode Etik dan Pelanggaran Terhadap Kode Etik Perusahaan

Compliance to Code of Conducts and Violation of Company's Code of Conducts

Akses terhadap Kode Etik Perusahaan tersedia melalui web intern yaitu **portal-hukum.inti.net** yang dapat diakses oleh seluruh Karyawan dan Direksi PT INTI (Persero).

Setiap Insan PT INTI (Persero) dari seluruh tingkatan dan fungsi organisasi wajib mentaati Kode Etik yang telah ditetapkan, dan dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Kode Etik. Hal ini ditandai dengan wajibnya seluruh Insan PT INTI (Persero) untuk menandatangani Pakta Integritas yang merupakan bukti komitmen untuk melaksanakan Kebijakan Kode Etik Perusahaan.

Setiap Insan PT INTI (Persero) menerima satu salinan Pakta

Access to the Company Code of Conduct is available through internal web portal-hukum.inti.net that can be accessed by all employees and members of the Board of Directors of PT INTI (Persero).

Each PT INTI (Persero)'s personnel from all levels and functions of the organization has to comply with the Code of Ethics that has been defined, and is prohibited from doing things that are contrary to the provisions described in the Code of Conduct Policy. It is characterized by the necessity of the whole personnel of PT INTI (Persero) to sign the Integrity Pact, which is proof of commitment to the Company's Code of Conduct Policy.

Each of PT INTI (Persero)'s personnel receive a copy of the

Integritas dan menandatangani bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami, dan setuju untuk mematuhi Kebijakan Kode Etik Perusahaan, dan kemudian didokumentasikan oleh fungsi yang menangani *Good Corporate Governance* (GCG) di Perseroan.

Pelaksanaan Kebijakan Kode Etik Perusahaan merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh Insan PT INTI (Persero). Seluruh atasan bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan Kebijakan Kode Etik Perusahaan tersebut.

Insan PT INTI (Persero) dapat menyampaikan laporan mengenai terjadinya atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik melalui mekanisme pelaporan yang berlaku.

Pelaporan dapat disampaikan kepada atasan langsung dari Insan PT INTI (Persero) yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik atau melalui *Whistle Blowing System*.

Sehubungan dengan pelaporan tersebut, seorang pelapor harus:

1. Menyebutkan secara jelas identitas pelaku pelanggaran dan tindak pelanggaran yang dilakukan; dan
2. Menyebutkan secara jelas identitas pelapor.

Direksi menjamin perlindungan terhadap pelapor atas pelaporan pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap Kebijakan Kode Etik Perusahaan kepada Direksi. Kerahasiaan laporan akan dijamin kecuali jika pengungkapan diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan dan untuk kepentingan Perseroan.

Semua pengaduan yang dilakukan dengan itikad baik akan diselidiki secara adil dan komprehensif dengan dukungan internal dan/atau eksternal yang relevan. Pelanggaran terhadap Kode Etik ditindaklanjuti secara tegas dan konsisten.

Atasan langsung dari karyawan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik wajib memanggil dan memeriksa yang bersangkutan serta melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang menghukum, sesuai dengan ketentuan Hukuman Disiplin yang tertuang dalam Lampiran II Perjanjian Kerja Bersama. Insan PT INTI (Persero) yang terbukti melakukan kecurangan dan/atau pelanggaran dikenai sanksi sesuai dengan peraturan Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2023, tidak terdapat pelanggaran Kode Etik yang menyangkut pelanggaran Etika Bisnis Perusahaan atau Etika Perilaku Insan Perseroan oleh Insan PT INTI (Persero) dan afiliasi, Pemegang Saham ataupun *Stakeholders* PT INTI (Persero).

Integrity Pact and signs that he/she has accepted, understood and agrees to abide the Corporate Code of Ethics Policy, and then documented by the function that handles the Good Corporate Governance (GCG) in the Company.

Implementation of the Code of Ethics Policy is the commitment and responsibility of all PT INTI (Persero)'s personnel. All superiors are responsible and shall set an example for his subordinates on the application of the Company's Code of Conduct Policy.

INTI (Persero)'s personnel can submit a report on the occurrence of actual or suspected violations of the Code of Conduct through existing reporting mechanisms.

Reporting can be delivered to the direct superior of PT INTI (Persero)'s personnel who is suspected on violating of the Code or through the Whistle Blowing System.

In connection with the reporting, a reporter must:

1. *State clearly the identity of the perpetrator of the violation and the act of violation committed; and*
2. *Mention the identity of the reporter clearly.*

The Board of Directors guarantees the protection of whistleblowers for reporting violations or suspected violations of the Company's Code of Ethics to the Directors. The confidentiality of the report will be guaranteed unless disclosure is needed in the context of conducting an investigation and for the benefit of the Company.

All complaints made in good faith will be investigated fairly and comprehensively with the support of relevant internal and/or external parties. Violations of the Code of Conduct shall be followed up rigorously and consistently.

Direct supervisor of the employee who allegedly committed violations of the Code is obliged to summon and investigate the employee in question, and report the investigation results to the official authorized to punish, in accordance with the provisions of the Disciplinary Punishment contained in Appendix II of the Collective Labor Agreement. PT INTI (Persero)'s personnel convicted of fraud and/or violation shall be penalized in accordance with regulation of the Company and applicable law.

In 2023, there was no violation of the Code of Ethics concerning the violation of the Company's Business Ethics or the Conduct Ethics of the Company by PT INTI (Persero)'s staff and affiliates, Shareholders or Stakeholders of PT INTI (Persero).



Independensi, Benturan Kepentingan, dan Pengungkapan Hubungan Afiliasi

Independency, Conflict of Interest, and Disclosure of Affiliation

Tiap anggota Dewan Komisaris Perseroan dituntut untuk bertindak secara independen, tanpa adanya benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan dengan pihak manapun yang berkaitan dengan Perseroan maupun hubungan dengan Direksi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT INTI (Persero) bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun.

Sampai dengan akhir Desember 2023, PT INTI (Persero) belum menunjuk Komisaris Independen.

Berdasarkan surat Wakil Menteri Negara BUMN atas nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor S-375/MBU.Wk/2011 tertanggal 5 Desember 2011 dinyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN hanya diperkenankan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada 1 (satu) BUMN. Dalam tahun 2023, tidak ada anggota Dewan Komisaris PT INTI (Persero) yang memiliki jabatan rangkap di BUMN lain.

Untuk menjamin tercapainya independensi dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang objektif dan menempatkan kewajaran di antara beragam kepentingan serta senantiasa terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

Untuk meminimalisir terjadinya benturan kepentingan, setiap Komisaris dan Direktur diwajibkan untuk melaporkan kepemilikan saham setiap Komisaris atau Direktur dan/atau keluarganya pada PT INTI (Persero) maupun perusahaan lain. Daftar kepemilikan saham ini disimpan dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Each member of the Company's Board of Commissioners must act independently, without any conflict of interest that can interfere with his ability to carry out tasks independently and critically, about any party related to the Company and relations with the Board of Directors.

All members of the Board of Commissioners of PT INTI (Persero) act independently and are free from intervention from any party.

At the end of December 2023, PT INTI (Persero) has yet to appoint Independent Commissioners.

Based on the letter of the Vice Minister of BUMN on behalf of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number S-375/MBU.Wk/2011, dated December 5, 2011, it is stated that the Board of Commissioners or Board of Supervisory of SOEs are only allowed to serve as members of the Board of Commissioners or Board of Supervisory in 1 (one) SOEs. In 2023, no Board of Commissioners of PT INTI (Persero) member ran a double function at other SOEs.

To ensure independence in carrying out their duties, the Board of Commissioners and the Board of Directors encourage the creation of an objective climate and work environment, place fairness between various interests, and always be free from conflict of interest.

To minimize the conflict of interest, every Commissioner and Director shall report their share ownership of every Commissioner or Director and/or their families at PT INTI (Persero) or other companies. The List of share ownership is kept and administered by the Corporate Secretary.

Criteria for affiliation between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Controlling Shareholders include:

1. *Affiliation between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors.*
2. *Affiliation between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.*
3. *Affiliation between members of the Board of Directors and Major and / or controlling Shareholders.*

4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan

5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan akibat pernikahan.

4. Affiliation between members of the Board of Commissioners and other Commissioners; and

5. Affiliation between members of the Board of Commissioners and the Main Shareholders and / or controllers.

Among members of Board of Commissioners and between members of Board of Commissioners and members of Board of Directors there are no blood relations up to third degree, either according to straight line, or side line, or related by marriage.

Nama <i>Name</i>	Hubungan Keluarga dan/atau Keuangan <i>Family and/or Financial Relations</i>					
	Dewan Direksi <i>Board of Director</i>		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioner</i>		Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	
	Ya /Yes	Tidak /No	Ya /Yes	Tidak /No	Ya /Yes	Tidak /No
Unggul Priyanto		X		X		X
Trisno Hendradi		X		X		X
Rahmadi Murwanto		X		X		X
Yanuar Rokhmad Madyantoro		X		X		X
Endarjono		X		X		X
Edi Witjara		X		X		X
Ahmad Taufik		X		X		X
Tantang Yudha Santoso		X		X		X



“

Anggota Direksi, Komisaris, maupun keluarganya, tidak memiliki saham di Perusahaan lain.

Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or their families, do not have shares in another company.

”

Pencegahan Transaksi Orang Dalam

Insider Trading Prevention

Orang Dalam Perusahaan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Perseroan dilarang memperdagangkan informasi Perseroan berdasarkan Informasi atau Fakta Material yang Belum Diungkap.

Definisi Orang Dalam Perusahaan meliputi:

1. Pemegang Saham Utama Perseroan.
2. Dewan Komisaris, Direksi, atau Karyawan Perseroan.
3. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya, atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh Informasi Orang Dalam.
4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana disebutkan dalam angka (1), (2), dan (3) di atas.

Company Insiders or parties who have special relationships with the Company are prohibited from trading Company information based on Information or Undisclosed Material Facts.

The definition of Company Insider includes:

1. *Major Shareholders of the Company.*
2. *The Board of Commissioners, the Board of Directors, or Employees of the Company.*
3. *An individual who because of his position or profession, or because of his business relationship with the Company, allows that person to obtain Inside Information.*
4. *A party that within the last 6 (six) months is no longer a party as mentioned in points (1), (2), and (3) above.*

Pengendalian Gratifikasi

Gratification Control

Perseroan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Perusahaan memiliki ketentuan atau kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi.

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor KN.021/2014 tertanggal 12 November 2014. Pada tahun 2021, Perseroan melakukan pemutakhiran terhadap Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor KN.016/2021 tertanggal 24 September 2021.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi merupakan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi yang bertujuan untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh Insan PT INTI (Persero) yang berkenaan dengan penerimaan, pemberian, dan/atau permintaan gratifikasi, agar terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik dan bersih dari korupsi.

Insan PT INTI (Persero) adalah seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perusahaan, termasuk karyawan yang ditugaskan di anak perusahaan dan instansi lainnya, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama perusahaan.

Muatan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi antara lain:

- a. Ketentuan gratifikasi yang menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh diterima.
- b. Fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi adalah fungsi yang menangani *Good Corporate Governance* (GCG).

Fungsi yang menangani GCG adalah Divisi Hukum, Kualitas, dan Manajemen Risiko melalui Bagian Hukum dan Kepatuhan yang membawahi fungsi perencanaan dan pengendalian GCG.

Mekanisme pelaporan gratifikasi bahwa Insan PT INTI (Persero) yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada keputusan ini agar segera melaporkan kepada Atasan Langsung. Setelah menerima laporan, Atasan Langsung akan meneliti gratifikasi yang diterima tersebut untuk menentukan apakah gratifikasi yang diterima tersebut diklasifikasikan atau dianggap suap atau bukan, sesuai dengan peraturan

The Company implements a gratification control program in accordance with applicable regulations.

1. *The company has provisions or policies regarding Gratification Control.*

The Gratification Control Policy has been established by the Decree of the Board of Directors Number KN.021/2014 dated November 12, 2014. In 2021, the Company will update the Guidelines for Gratification Control and it is stipulated by the Decree of the Board of Directors Number KN.016/2021 dated September 24, 2021.

The Gratification Control Guidelines are the commitments of the Board of Commissioners and the Board of Directors which aim to provide direction and reference for all PT INTI (Persero)'s personnel with regard to receiving, granting, and/or requesting gratification, in order to implement good corporate governance and free from corruption.

PT INTI (Persero)'s personnel are all members of the Board of Commissioners, Directors, and Employees of the Company, including employees assigned to subsidiaries and other agencies, as well as other personnel who directly work for and on behalf of the company.

Contents in the Gratification Control Guidelines include:

- a. *Gratification provisions that explain what may and may not be accepted.*
- b. *The function assigned to manage gratuities is the function that handles Good Corporate Governance (GCG).*

The function that handles GCG is the Legal, Quality, and Risk Management Division through the Legal and Compliance Division which oversees the GCG planning and control function.

The mechanism for reporting gratuities is that PT INTI (Persero) personnel who are aware of a violation of the provisions contained in this decision must immediately report it to their Direct Supervisor. After receiving the report, the Direct Supervisor will examine the gratuity received to determine whether the gratuity received is classified or considered a bribe or not, in accordance with company regulations and applicable laws and regulations,



perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya melaporkannya kepada fungsi yang menangani GCG.

Pemantauan atas pelaksanaan, pada prinsipnya seluruh insan PT INTI (Persero) memiliki kewajiban dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan ini. Secara struktural, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini dilakukan oleh:

- a. Atasan Langsung atau Unit Kerja Perseroan.
- b. Fungsi Internal Audit Perusahaan dan/atau Dewan Komisaris sesuai kewenangan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT INTI (Persero) terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perseroan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan atau ketentuan Pengendalian Gratifikasi.
3. Perseroan telah mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi.

Implementasi Pengendalian Gratifikasi dilakukan melalui pembentukan Divisi Hukum, Kualitas, dan Manajemen Risiko, lewat Bagian Hukum dan Kepatuhan yang membawahi unit kerja Tata Kelola Perusahaan. Hal tersebut telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor KN.020/2021 tentang Struktur Organisasi tertanggal 28 Desember 2021.

Telah dibuat pula Laporan Gratifikasi yang ditujukan kepada Direksi, tapi tidak ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direksi menerima kiriman bingkisan hari raya dan telah disalurkan ke panti, namun tidak dibuat surat pemberitahuan atau pelaporan ke KPK.

then reports it to the function that handles GCG.

Monitoring the implementation, in principle, all PT INTI (Persero) personnel have an obligation to oversee the implementation of this policy. Structurally, supervision of the implementation of this policy is carried out by:

- a. Direct Supervisor or Company Work Unit.*
- b. The function of the Company's Internal Audit and/or the Board of Commissioners in accordance with the authority and the General Meeting of Shareholders (GMS).*

Violations committed by PT INTI (Persero)'s personnel against the provisions stipulated in this Decree, will be subject to sanctions in accordance with company regulations and/or applicable laws and regulations.

- 2. The Company undertakes efforts to improve understanding of Gratification Control policies or stipulations.*
- 3. The Company implements Gratification Control.*

The implementation of Gratification Control is carried out through the establishment of the Legal, Quality, and Risk Management Division, through the Legal and Compliance section which oversees the Corporate Governance work unit. This has been determined by the Decree of the Board of Directors Number KN.020/2021 concerning Organizational Structure dated December 28, 2021.

A Gratification Report has also been made which is addressed to the Board of Directors, but not to the Corruption Eradication Commission. The Board of Directors received holiday gifts and distributed them to the orphanage, but no notification letter or report was made to the Corruption Eradication Commission.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Anti-Bribery Management System

Dalam rangka program penguatan implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan wujud komitmen Perseroan dalam menjalankan operasional Perseroan dengan lebih transparan, adil, dan zero tolerance terhadap fraud dan tindakan penyuapan baik oleh Direksi, Dewan Komisaris, karyawan, maupun pihak eksternal, PT INTI (Persero) telah memiliki Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk melengkapi kebijakan yang terkait dengan pencegahan penyuapan, yang berpedoman pada standar internasional yaitu SNI ISO 37001:2016.

Dalam rangka membantu Perseroan dalam menerapkan SMAP yang efektif, Perseroan pun telah mengantongi sertifikat ISO 370001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, sejak 22 Desember 2020.

Perseroan telah menetapkan kebijakan, membuat dokumen, melakukan sosialisasi, menerapkan, mendokumentasikan, memelihara, dan menyempurnakannya secara berkesinambungan sejalan dengan persyaratan standar dalam SNI ISO 37001:2016.

In the context of strengthening the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and a manifestation of the Company's commitment to running the Company's operations more transparently, fairly, and with zero tolerance for fraud and acts of bribery by the Board of Directors, the Board of Commissioners, employees, and external parties, PT INTI (Persero) already has the Anti-Bribery Management System to complement policies related to bribery prevention, which is guided by international standards, namely SNI ISO 37001:2016.

To assist the Company in implementing an effective Anti-Bribery Management System, the Company has also obtained the ISO 370001:2016 certificate on Anti-Bribery Management System since December 22, 2020.

The Company has established policies, created documents, disseminated, implemented, documented, maintained, and improved them on an ongoing basis in line with the standard requirements in SNI ISO 37001:2016.

Dasar Penerapan SMAP

The Anti-Bribery Management System Application Basics

Implementasi dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) PT INTI (Persero) dilaksanakan berdasarkan:

1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
2. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor S-35/MBU/01/2020 tertanggal 10 Januari 2020 perihal Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
3. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor S-17/S.MBU/02/2020 tertanggal 17 Februari 2020 perihal Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BUMN.

The implementation and implementation of PT INTI (Persero)'s the Anti-Bribery Management System is carried out based on:

1. *Presidential Instruction Number 10 of 2016 concerning Actions for Prevention and Eradication of Corruption.*
2. *Letter of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number S-35/MBU/01/2020 dated January 10, 2020 regarding the Implementation of the Anti-Bribery Management System in SOEs as the Implementation of Presidential Regulation Number 54 of 2018 concerning the National Strategy for Corruption Prevention.*
3. *Letter of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number S-17/S.MBU/02/2020 dated 17 February 2020 regarding ISO 37001 Anti-Bribery Management System Certification in SOEs.*



Standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini memuat langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola Anti Penyuapan di Perseroan dan dirancang untuk menerapkan pengendalian yang tepat dalam mendeteksi, mengidentifikasi dan mengurangi potensi penyuapan sejak awal, mengembangkan dan menumbuhkan budaya anti-penyuapan bagi seluruh Direksi, Dewan Komisaris, karyawan, maupun pihak eksternal terkait, serta meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

This Anti-Bribery Management System Standard contains the steps needed to manage Anti-Bribery in the Company and is designed to implement appropriate controls in detecting, identifying and reducing potential bribery from the start, developing and fostering an anti-bribery culture for all Directors, Board of Commissioners, employees and related external parties and improve compliance with applicable laws and regulations.

Ruang Lingkup

Scope

Ruang lingkup Kebijakan Penerapan Anti Penyuapan meliputi:

1. Perseroan fokus pada persyaratan pelanggan dengan tetap mengedepankan SMAP tanpa kompromi.
2. Selalu menggalakkan budaya peduli SMAP di Perseroan dan menjadi komitmen bersama bagi seluruh Insan PT INTI (Persero).
3. Kebijakan Anti Penyuapan di Perseroan harus mencakup hal berikut:
 - a. Memadai (*appropriate*) dan sesuai dengan visi dan misi Perusahaan.
 - b. Disempurnakan secara berkesinambungan.
 - c. Menyiapkan kerangka kerja untuk hal berikut:
 - Membuat sasaran Anti Penyuapan di Perseroan.
 - Meninjau kesesuaiannya untuk perbaikan berkelanjutan.
4. Dikomunikasikan dan dimengerti oleh semua Insan PT INTI (Persero) dan ditinjau ulang untuk kesesuaian berkesinambungan.
5. Tersedia untuk pihak-pihak terkait yang berkepentingan sesuai kebutuhan.

The scope of the Anti-Bribery Implementation Policy includes:

1. *The Company focuses on customer requirements while continuing to prioritize the Anti-Bribery Management System without compromise.*
2. *Always promote the Anti-Bribery Management System care culture in the Company and become a shared commitment for all PT INTI (Persero)'s Personnel.*
3. *The Company's Anti-Bribery Policy must includes the following:*
 - a. *Adequate (*appropriate*) and in accordance with the vision and mission of the Company.*
 - b. *Continuously perfected.*
 - c. *Set up a framework for the following:*
 - *Establishing Anti-Bribery targets for the Company.*
 - *Reviewing its suitability for continual improvement.*
4. *Communicated and understood by all PT INTI (Persero)'s personnel and reviewed for continuous conformity.*
5. *Available to interested parties as needed.*

Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

The Anti-Bribery Management System Certification

Untuk mendukung Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah diimplementasikan di Perusahaan, maka PT INTI (Persero) juga telah mewujudkan komitmen penerapan praktik terbaik atas SMAP tersebut dengan diperolehnya Sertifikasi SMAP ISO 37001:2016 pada 22 Desember 2020.

To support the Anti-Bribery Management System implemented in the Company, PT INTI (Persero) has also realized its commitment to implementing the best practices for the Anti-Bribery Management System by obtaining the Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016 Certification on December 22, 2020.

Peningkatan Berkelanjutan

Continuous Improvement

Perseroan senantiasa akan mengidentifikasi dan mengevaluasi kesesuaian, kecukupan dan keefektifan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), menentukan peluang untuk tindakan perbaikan, dan penerapan untuk memenuhi persyaratan yang berlaku.

PT INTI (Persero) senantiasa berupaya untuk meningkatkan kesadaran Insan PT INTI (Persero) untuk turut serta dalam mencegah dan menghindari praktik penyuapan sebagai budaya di Perseroan. Antara lain dengan rutin melakukan sosialisasi larangan penerimaan atau pemberian gratifikasi dan anti-suap secara berkala kepada karyawan, surat elektronik di i-Portal PT INTI (Persero), kampanye di media sosial resmi perusahaan, serta himbauan Direktur Utama kepada seluruh karyawan dan juga pemangku kepentingan Perseroan.

The Company will always identify and evaluate the suitability, adequacy, and effectiveness of the Anti-Bribery Management System implementation, determine opportunities for corrective action, and implement it to meet applicable requirements.

PT INTI (Persero) continually strives to increase the awareness of PT INTI (Persero) 's personnel to prevent and avoid bribery practices as a culture in the Company. Among others, by routinely conducting socialization on the prohibition of receiving or giving gratuities and periodic anti-bribery to employees, electronic mail at PT INTI (Persero) i-Portal, campaigns on the Company's official social media, as well as the President Director's appeal to all employees and stakeholders Company.



Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Management of State Administrators Wealth Reports

Perseroan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

1. Perseroan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.

Kebijakan kepatuhan dan penyampaian LHKPN berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KD.83/KP.00/020805/2017 tertanggal 9 Mei 2017 tentang Penetapan Pejabat yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan dan Surat Keputusan Direksi Nomor KD.242/KP.09/020800/2019 tentang Penetapan Karyawan sebagai Petugas Pengguna Aplikasi e-LHKPN, tertanggal 6 Desember 2019.

Surat Keputusan Direksi Nomor KD.83/KP.00/020805/2017 tertanggal 9 Mei 2017 tentang Penetapan Pejabat yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan, mengatur:

- a. Mewajibkan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural Setingkat Kepala Divisi, Kepala atau Deputi *Strategic Business Unit* (SBU), dan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi di lingkungan Perseroan untuk menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Kepada pejabat yang tidak menyampaikan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Untuk memudahkan pelaksanaan pelaporan, ditunjuk unit kerja yang menangani fungsi pelayanan sumber daya manusia sebagai koordinator pengelolaan pelaporan. Namun dalam keputusan tersebut tidak ada muatan yang menerangkan batas waktu penyampaian. Unit kerja yang menangani fungsi pelayanan sumber daya manusia (SDM) ditunjuk sebagai Koordinator Pengelolaan Laporan dimaksud.
2. Penyelenggara Negara atau Wajib Lapor memahami kebijakan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.
Penyebaran email kepada seluruh Wajib LHKPN pada 22 Januari 2023, secara online melalui elkhpn.kpk.go.id.

The Company coordinates the Management of State Administrators Wealth Report.

1. The company has a policy regarding compliance with state administration assets reporting for the Board of Commissioners, the Board of Directors and officials one level below the Board of Directors.

The policy for compliance and submission of the State Officials Wealth Report is based on the Decree of the Board of Directors Number KD.83/KP.00/020805/2017 dated May 9, 2017, concerning the Determination of Officials who are Required to Submit Assets Reports and Directors Decree Number KD.242/KP.09/020800/2019 concerning Designation of Employees as Officers Using the Electronic State Officials Wealth Report Application, December 6, 2019.

Decree of the Board of Directors Number KD.83/KP.00/020805/2017 dated May 9, 2017, concerning the Determination of Officials who are required to submit assets reports, regulates:

- a. Requires members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Structural Officers at the Level of Division Heads, Strategic Business Unit (SBU)'S Heads or Deputies, and members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors of Subsidiaries and/or Affiliates within the Company to submit the State Officials Wealth Report by the laws and regulations.
 - b. Officials who do not submit are subject to sanctions by applicable regulations.
 - c. To facilitate the implementation of reporting, a work unit that handles the function of human resources services is appointed as the coordinator of reporting management. However, in the decision, no content explains the deadline for submission. The work unit that handles the Human Resources (HR) service function is appointed the Report Management Coordinator referred to.
2. State Administrators or Required Reporting understand the policies or Standard Operating Procedure (SOP) regarding compliance with the reporting of state administrators' assets.
Email distribution to all mandatory the State Officials Wealth Report on January 21, 2022, online via elkhpn.kpk.go.id.

Pelaporan LHKPN dilakukan posisi per 1 Desember 2022. Jumlah yang wajib menyampaikan LHKPN yaitu sebanyak 24 orang. Wajib LHKPN yang tepat waktu menyampaikan LHKPN Tahun 2022 sebanyak 24 orang atau sebanyak 100%.

3. Perseroan melaksanakan kebijakan atau SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Pada tanggal 13 April 2023, Bagian Pelayanan SDM telah membuat laporan, yaitu Laporan Pelaksanaan Tugas Koordinator Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2022 yang ditujukan kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

kpk.go.id. The State Officials Wealth Report is reported as of December 1, 2021. The number of people required to submit the Management of State Administrators Wealth Report is 24. Mandatory State Officials Wealth Report on time submit State Officials Wealth Report 2021 as many as 24 people or as much as 100%.

3. *The Company implements policies or SOPs regarding compliance with state administration assets reporting. On April 13, 2023, the HR Services Section made a report, namely the 2022 Report on the Implementation of the Coordinator's Tasks for the State Officials Wealth Report, which is addressed to the Director of Finance and Risk Management.*



Pengungkapan Mengenai Whistle-Blowing System

Disclosure of Whistle-Blowing System

Whistle-Blowing System (WBS) adalah saluran untuk menerima pelaporan, mengevaluasi, menindaklanjuti dugaan adanya pelanggaran dan/atau kecurangan, atau adanya praktik yang menyimpang dan mengancam kepentingan Perseroan.

Prinsip utama dari WBS ini adalah bahwa kegiatan Perseroan harus senantiasa dalam keadaan tertib, bersih dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun (independen), serta bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

WBS harus senantiasa dilaksanakan secara konsekuen sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan dalam pengelolaan aset Perseroan, baik tangible maupun intangible.

Untuk melaksanakan WBS, dibentuk Tim WBS yang pembentukannya dilakukan melalui Keputusan Direksi. Setiap potensi maupun terjadinya pelanggaran dan/atau kecurangan dapat diungkapkan atau dilaporkan kepada Tim WBS. Tim WBS dan/atau Direksi memutuskan apakah pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut dapat dan/atau terbukti, dan dapat berakibat merugikan kepentingan Perseroan atau tidak, baik secara materiil maupun immateriil, langsung maupun tidak langsung.

Dasar hukum penerapan WBS adalah Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi yang Signifikan BUMN dan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator atau Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN.

Perseroan juga telah menetapkan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor KN.006/2022 tertanggal 16 Maret 2022 tentang Kebijakan Whistle-Blowing System yang memuat prosedur kebijakan, pelaksanaan dan pelaporan WBS, jaminan perlindungan bagi Whistle-Blower, tim WBS, dan kerahasiaan. Selain itu, Perseroan telah menyediakan sarana komunikasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan WBS berupa Kotak WBS, email pengaduan@inti.co.id, nomor Whatsapp 08112437770, SMS Center, dan laporan

The Whistle-Blowing System (WBS) is a channel for receiving reporting, evaluating, following up on allegations of violations and/or fraud, or the existence of practices that deviate and threaten the interests of the Company.

The main principle of the WBS is that the activities of the Company shall constantly be orderly, clean and independent by any party, and act in accordance with applicable regulations, including but not limited to the Statutes and General Meeting of Shareholders decisions, the implementation is done in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG).

WBS must always be carried out consistently so that it can help improve the overall performance of the Company in the management of Company assets, both tangible and intangible.

To implement the WBS, a WBS Team is formed which is formed through a Decree of the Board of Directors. Any potential or occurrence of violations and/or fraud can be disclosed or reported to the WBS Team. The WBS team and/or the Board of Directors decides whether the abuse and/or fraud can and/or is proven and can result in damaging the interests of the Company, whether materially or immaterial, directly or indirectly.

The legal basis for implementing the WBS is Regulation of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) Number Number PER-2/MBU/03/2023 on the Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs and Decree of the Secretary of Ministry of SOEs Number SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators or Parameters for Evaluating and Evaluating GCG Implementation in SOEs.

The Company has also set up a reporting system policy on alleged irregularities in the Decree of the Board of Directors Number KN.006/2022 dated March 16, 2022 on Whistle-Blowing Policy System, containing the policy procedure, execution and reporting of WBS, guarantees protection for Whistle-Blower, WBS team, and confidentiality. In addition, the Company has provided a means of communication to support the implementation of WBS policies in the form of WBS Box, email pengaduan@inti.co.id, Whatsapp number 08112437770, SMS Center, and complaint report in WBS format via the link

pengaduan dengan format WBS melalui tautan <http://bit.ly/formatwbs>. Perusahaan juga telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan telah dibuat sarana pelaporan melalui <https://wbs.inti.co.id/auth/login>.

Fraud (kecurangan) dapat terjadi di perusahaan melalui pihak eksternal maupun internal perusahaan. Fraud yang dilakukan jajaran Perseroan dapat mengakibatkan kerugian dan mempengaruhi citra (image) Perseroan yang berdampak terhadap produktivitas kerja jajaran maupun kelangsungan usaha Perseroan secara keseluruhan.

Manajemen PT INTI (Persero) mendorong Insan PT INTI (Persero) berperan aktif untuk mencegah bahkan memberantas dan “memusuhi” Fraud secara bersama-sama melalui komitmen bersama bahwa “Fraud adalah musuh INTI”.

Wujud keseriusan PT INTI (Persero) dalam memberantas Fraud ditunjukkan dengan adanya sarana pelaporan WBS yang digunakan seluruh Insan PT INTI (Persero) untuk melaporkan setiap menemukan dan melihat perbuatan Fraud yang dilakukan oleh Insan PT INTI (Persero). WBS dirancang sebagai sarana pelaporan yang bersifat confidential (rahasia) untuk memudahkan Insan PT INTI (Persero) melaporkan setiap kejadian internal fraud tanpa harus merasa takut.

<http://bit.ly/formatwbs>. The Company has also collaborated with the Corruption Eradication Commission, and a reporting facility has been made via <https://wbs.inti.co.id/auth/login>.

Fraud can occur in the Company through internal and external parties of the Company. Fraud committed by the Company employee could result in losses and affect the image of the Company which can have an impact on labor productivity and the Company's overall viability.

The management of PT INTI (Persero) encourages PT INTI (Persero)'s Personnel to have an active role in preventing and even eradicating and “fighting” against Fraud together through a joint commitment that “Fraud is INTI's enemy”.

The seriousness of PT INTI (Persero) in the fight against fraud is indicated by the reporting facility WBS which is used throughout the PT INTI (Persero)'s personnel to report whenever any Fraud is found and seen committed by PT INTI (Persero)'s personnel. WBS is designed as a means of reporting that is confidential to facilitate PT INTI (Persero)'s Personnel to report any internal fraud incident without fear.

Tindakan atau Perbuatan yang Dapat Dilaporkan

Action or Devotion That May Be Reported

Tindakan atau perbuatan yang dapat dilaporkan adalah antara lain:

1. Pencurian dan/atau penggelapan aset Perusahaan.
2. Suap/penyuapan dan/atau pemberian atau penerimaan hadiah (Gratifikasi).
3. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
4. Benturan Kepentingan.
5. Pelanggaran terhadap peraturan perusahaan termasuk pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan, hasil ketetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Anggaran Dasar Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bentuk Kecurangan lainnya.

Kegiatan yang berkaitan dengan WBS dicatat dan didokumentasikan secara khusus untuk kepentingan tersebut oleh Sekretaris Tim WBS.

Actions or actions that can be reported include:

1. Theft and/or embezzlement of Company assets.
2. Bribery/bribe and/or giving or receiving gifts (Gratification).
3. Corruption, Collusion, and Nepotism.
4. Conflict of Interest.
5. Violations of Company regulations including violations of the Company's Code of Ethics, the results of the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Company's Articles of Association, and applicable laws and regulations.
6. Other forms of cheating.

Activities related to the WBS are specifically recorded and documented for this purpose by the WBS Team Secretary.



Prosedur Pelaporan

Reporting Procedure

Laporan Whistle-Blower

1. Identitas Pelapor (apabila pelapor berasal dari internal INTI):
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/Jabatan :
 - d. Divisi/Unit Kerja :
2. Identitas Pelapor (apabila pelapor berasal dari eksternal INTI):
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Perusahaan/Instansi :
 - d. Alamat Perusahaan/Instansi :
 - e. Hubungan dengan PT INTI (Persero) :
3. Penjelasan Singkat tentang Pelanggaran dan Kecurangan:

No.	Jenis Informasi	Uraian
a.	Jenis Pelanggaran dan/atau Kecurangan	
b.	Tempat dan waktu kejadian	
c.	Nama dan Jabatan/Pangkat terlapor	
d.	Proses kejadian	
e.	Menimbulkan kerugian finansial	Ya / Tidak
f.	Besarnya perkiraan kerugian	
g.	Peristiwa yang sama pernah terjadi sebelumnya	Ya / Tidak
	Jika Ya, kapan peristiwa tersebut terjadi	
h.	Saksi atau bukti pendukung agar disebutkan dan dilampirkan	
i.	Pengungkapan identitas pelapor	Keberatan / Tidak
j.	Pernah diungkapkan kepada pihak lain	Ya / Tidak
	Jika Ya, kepada siapa	
k.	Saran/tanggapan dari pihak pada huruf j	
l.	Pernah melaporkan kepada penegak hukum atas Pelanggaran dan/atau Kecurangan yang diungkapkan pada laporan ini	Ya / Tidak
	Jika Ya, kepada Instansi mana	
		_____ Pelapor

Catatan: Format ini dapat disesuaikan dengan materi laporan

Pelaporan yang dilakukan oleh Pelapor (*Whistle-Blower*) dapat dilaksanakan melalui 3 (tiga) cara yaitu:

1. Melalui surat yang berisikan uraian pelaporan dan bukti-bukti, yang ditujukan langsung kepada "Ketua Tim WBS" dalam format tertentu, dan dimasukkan ke kotak WBS; atau
2. Melalui surat elektronik yang berisikan uraian pelaporan ke pengaduan@inti.co.id
3. Melalui pesan singkat kepada Ketua Tim WBS (+62 811-2437-770); atau
4. Melalui web ke <https://wbs.inti.co.id/auth/login> ; atau
5. Melalui nomor Whatsapp 08112437770 ; atau
6. Laporan pengaduan dengan format WBS melalui tautan <http://bit.ly/formatwbs>.

Guna mendukung cara pelaporan tersebut, Perseroan telah menyediakan 1 (satu) buah "Kotak WBS" yang ditempatkan di Lobby Gedung Kantor Pusat (GKP) sebagai sarana untuk menampung surat pelaporan yang dikirimkan oleh *Whistle-Blower*.

Pelaporan dilakukan dengan mencantumkan identitas pelapor yaitu nama, nomor induk pegawai (NIP), jabatan, dan unit kerja untuk memudahkan tindak lanjut. Pelaporan yang disampaikan tanpa identitas tetap diproses setelah mempertimbangkan kesungguhan isi laporan, kredibilitas, bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk melakukan konfirmasi.

Pelaporan yang disampaikan oleh *Whistle-Blower* wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

1. Uraian pelanggaran/kecurangan dan kerugian (apabila dapat ditentukan) yang ditimbulkan dari Pelanggaran dan/atau Kecurangan tersebut.
2. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan.
3. Lokasi pelanggaran dan/atau kecurangan yang meliputi nama, jabatan, atau unit kerja.
4. Waktu pelanggaran dan/atau kecurangan.
5. Bagaimana pelanggaran dan/atau kecurangan terjadi dan apakah terdapat bukti-bukti yang mendukung, berupa bukti tulisan baik di atas kertas atau dalam bentuk data elektronik yang dapat dibaca, bukti audio (rekaman suara)

Reporting by Whistle-blowers can be implemented through 3 (three) ways:

1. *Through a letter containing a description of reporting and evidence, which is addressed directly to "WBS Team Leader", with a particular format, and put into a box of WBS; or*
2. *Via e-mail that contains a description reporting to pengaduan@inti.co.id ;*
3. *Via short message service (SMS) to the Chairman of the WBS (+62 811-2437-770); or*
4. *Via web to <https://wbs.inti.co.id/auth/login> ; or*
5. *Via Whatsapp number 08112437770 ; or*
6. *Complaint report in WBS format via the link <http://bit.ly/formatwbs>.*

To support the reporting method, the Company has provided 1 (one) "WBS Box" placed in the Lobby of the Central Office Building as a means to accommodate a reporting letter sent by the Whistle-Blower.

Reporting is done by stating the identity of the complainant: name, employee identity number, position, and unit to facilitate follow-up. Reporting delivered without identity will still be processed, however, after considering the sincerity of the report sincerity, credibility, and the evidence submitted, as well as the possibility to confirm the report.

Reporting done by Whistle-blowers required to provide an early indication of which can be accounted for, includes:

1. *Description of violation and/or fraud that occurs and loss (if can be determined) arising from the violation and/or the fraud.*
2. *Parties involved, that is who should be responsible for violation and/or fraud, including witnesses and parties who benefited or harmed by violation and/or the fraud.*
3. *Violation and/or fraud location, which includes the name, place, units work or function.*
4. *Violation and/or fraud time.*
5. *How the violation and/or fraud occurs and whether there is supporting evidence, in form of written evidence set forth in any form on paper or in the form of electronic data that can be read, audio evidence (sound recording), evidence of*

dan/atau video (rekaman gambar).

6. Apakah pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain.
7. Apakah pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut pernah terjadi sebelumnya maupun bukti kesaksian.

Apabila pelaporan pelanggaran dan/atau kecurangan diajukan oleh orang atau badan hukum atau lembaga di luar Perseroan, maka juga diserahkan bukti-bukti lainnya yaitu:

1. Salinan bukti identitas pelapor; atau
2. Surat Kuasa dari *Whistle-Blower* di luar Perseroan kepada penerima kuasa yang menyatakan memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama yang bersangkutan; atau
3. Jika perwakilan *Whistle-Blower* di luar Perseroan adalah lembaga atau badan hukum, maka harus melampirkan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pelaporan pelanggaran dan/atau kecurangan berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.

Jika pelaporan dilakukan melalui surat elektronik atau pesan singkat, bukti-bukti sebagaimana dimaksud dimintakan oleh Tim WBS pada tahap proses Evaluasi Kelayakan.

video (image recording), or testimonial evidence.

6. If the violation and/or fraud is never reported to the other party.
7. If the violation and/or fraud is happened before.

If the reporting of violations and/or fraud filed by a person or legal entity or institution outside the Company, then additionally other evidence shall be submitted, namely:

1. Copy of proof of identity of the complainant; or
2. Power of Attorney from the Whistle-blower outside the Company to the proxy stating authority person to act for and on behalf of the concerned; or
3. If the representative of Whistle-Blower outside the Company is an institution or legal entity, they must attach a document stating that the person/party reporting violations and/or fraud is authorized to represent the organization or legal entity.

If reporting is done through e-mail or short message service (SMS), the evidence referred will be requested by WBS team at the Feasibility Evaluation process.

Peningkatan Berkelanjutan

Continuous Improvement

Whistle-Blower mendapat jaminan perlindungan dari tim *Wistle-Blowing System* (WBS), terhitung sejak laporan diterima sampai dengan laporan tersebut dinyatakan ditutup dan/atau selesainya proses pengungkapan laporan yang disampaikan. Jaminan perlindungan ini bertujuan agar yang bersangkutan dapat terhindar dari intimidasi, pemerasan, ancaman, dan kekerasan dari seseorang, kelompok, maupun institusi berbadan hukum.

Jaminan perlindungan dapat berupa antara lain:

1. Memperoleh perlindungan serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
2. Memberikan pernyataan tanpa tekanan.
3. Mendapat penerjemah (bila perlu).
4. Mendapatkan informasi dari perkembangan kasus.
5. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
6. Memperoleh penggantian biaya transportasi (bila ada) sesuai dengan kebutuhan.

Whistle-blowers receives protection assurance from *Wistle-Blowing System* (WBS) team, starting from receipt of the report by the WBS team until the report is declared closed and/or the disclosure of the submitted report is completed. The protection assurance given to the *Whistle-Blower* is intended that he/she can be protected from intimidation, extortion, threats and violence from a person, group or legal entity.

Protection assurance can be, among others:

1. Protection and freedom from threats associated with the testimony that will be, is being or has been rendered.
2. Providing a statement without pressure.
3. Obtaining an interpreter (if necessary).
4. Getting information from the case progress.
5. Obtaining information about court decisions.
6. Obtaining reimbursement for transportation costs (if any) as needed.

7. Mendapat nasihat atau bantuan hukum.

Perseroan juga memberikan perlindungan kepada *Whistle-Blower* yang laporannya terbukti benar atas tindakan sebagai berikut:

1. Pemecatan yang tidak adil.
2. Penurunan jabatan atau pangkat.
3. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya.

Dalam hal laporan diselesaikan melalui jalur hukum di luar perusahaan, maka jaminan perlindungan sebagaimana dimaksud tidak berlaku. *Whistle-Blower* akan mendapatkan jaminan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penghargaan diberikan kepada *Whistle-Blower* apabila materi laporan yang disampaikan mempengaruhi kepentingan proses bisnis Perseroan secara signifikan. Penghargaan diberikan secara rahasia setelah kasus yang dilaporkan dinyatakan resmi terbukti dan dinyatakan selesai.

7. Receiving advice or legal assistance.

The Company also provides protections to the *Whistle-blowers* whose report is proved to be true, from actions as follows:

1. Unfair dismissal.
2. Demotion of position or rank.
3. Note that could harm their personal file record.

If the report resolved through legal recourse outside the Company, the protection assurance referred to herein does not apply. *Whistle-blower* protection is instead guaranteed in accordance with the applicable legislation.

Award is given to the *Whistle-Blower* if the submitted report materials affect the Company business process significantly. Awards shall be given in secret after the reported cases have been declared officially as proven and finished.

Evaluasi Kelayakan

Feasibility Evaluation

Pelaporan yang masuk akan dievaluasi kelayakannya oleh Tim WBS dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Pada tahap ini, Tim WBS melakukan pemeriksaan atas adanya Indikasi Awal atau kesesuaian kriteria Pelaporan dan membuat ringkasannya. Tim WBS dapat meminta bukti atau keterangan tambahan dari Pelapor jika bukti atau keterangan yang disampaikan sebelumnya dinilai belum cukup. Teknik dan/atau tata cara evaluasi ditetapkan oleh Tim WBS.

Apabila di dalam Pelaporan tersebut terdapat Indikasi Awal atau sesuai dengan kriteria Pelaporan dan dapat ditindaklanjuti, maka Tim WBS memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi, yang dituangkan dalam laporan hasil evaluasi.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi Tim WBS, Direktur Utama dapat memutuskan apakah proses pemeriksaan dihentikan (jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal) atau dilanjutkan ke proses investigasi. Keputusan dituangkan dalam Berita Acara sesuai format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2 Surat Keputusan Direksi tentang Kebijakan WBS.

Apabila Direktur Utama memutuskan untuk menghentikan proses pemeriksaan, maka Tim WBS akan mendokumentasikan data yang telah diperoleh sebagai arsip. Apabila Direktur Utama memutuskan untuk melanjutkan proses investigasi, maka Tim WBS akan melakukan investigasi sesuai dengan

Submitted report will be evaluated for feasibility by WBS Team within 14 (fourteen) working days. At this stage, WBS team shall conduct an examination of the Preliminary Indications or the suitability of the Reporting criteria and make a summary. The WBS team may request additional evidence or statements from the *Wistle-blower*, if the evidence or information submitted previously is considered insufficient. Evaluation techniques and/or procedures shall be determined by WBS Team.

If the Reporting contains Preliminary Indications or complies the reporting criteria and is actionable, then the WBS Team shall provide recommendations to the President Director, which shall be contained in an evaluation report, for appropriate follow-up of evaluation result.

Based on the WBS Team evaluation report, President Director shall decide if the inspection process shall be stopped (if the Preliminary Indications are not qualified), or proceed with investigation. The decision shall be contained in Minutes of Meeting according to the format as described in Appendix 2 of the Decree of the Board of Directors on WBS Policy.

If the President Director decides to stop the inspection process, then the WBS Team shall document the data that has been obtained as archive. If the President Director decides to proceed with the investigation, the WBS team will conduct an investigation according to established procedures.



prosedur yang ditetapkan.

Rekomendasi tim WBS ditindaklanjuti oleh:

1. Direksi, jika Terlapor adalah Karyawan.
2. Dewan Komisaris, jika Terlapor adalah anggota Direksi.
3. Rapat Umum Pemegang Saham, jika Terlapor adalah Anggota Dewan Komisaris.

WBS Team recommendation shall be followed-up by:

1. *Board of Directors, if the Reported is an employee.*
2. *Board of Commissioners, if the Reported is a member of the Board of Directors.*
3. *General Meeting of Shareholders, if the Reported is a Member of the Board of Commissioners.*

Investigasi

Investigation

Berdasarkan Keputusan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal 7 Kebijakan WBS, Tim WBS melakukan investigasi lebih lanjut atas Indikasi awal adanya tindak Pelanggaran dan/atau Kecurangan. Pada tahap ini Tim WBS dapat meminta bukti atau keterangan tambahan yang diperlukan dari pihak-pihak yang terkait. Teknik dan/atau tata cara investigasi ditetapkan oleh Tim WBS.

Seluruh proses Investigasi atas Pelaporan wajib dibuatkan Berita Acara dan/atau Laporan serta ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses investigasi. Proses Investigasi harus didokumentasikan dengan baik, sehingga jika diperlukan untuk peninjauan ulang dapat dengan mudah dilakukan penelaahan kembali atas fakta, bukti, analisa, rekomendasi, dan juga keputusan-keputusan penting yang diambil selama proses berlangsung.

Laporan Hasil Investigasi harus disertai beberapa bukti pendukung yang merupakan bukti fisik serta bukti nonfisik. Laporan Hasil Investigasi tidak berupa opini atau pendapat, tapi berupa kesimpulan akhir mengenai hasil Investigasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan tindakan.

Laporan Hasil Investigasi Tim WBS harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan untuk melakukan investigasi diterima oleh Tim WBS. Laporan kemudian disampaikan dan dipresentasikan oleh Tim WBS kepada Direksi.

Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud di atas, Direksi menggunakan Berita Acara sesuai format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3 Kebijakan WBS dan memutuskan:

1. Menutup permasalahan yang diinvestigasi, jika tidak terbukti benar; atau
2. Memerintahkan kepada atasan langsung Terlapor untuk melakukan proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan; jika terbukti terjadi Pelanggaran dan/atau Kecurangan; atau

Based on Decree of President Director as referred in paragraph (6) article 7 of WBS Policy, the WBS team performs further investigation on preliminary indications of Violation and/or Fraud. At this stage, the WBS team may request additional evidence or statements from the involved parties. Techniques and/or procedures shall be determined by WBS Team.

The entire Investigation Process of the Reporting must be made into Minutes of Meeting and/or Report, then signed by the parties involved in the investigation process. The investigation process shall be well documented, so if needed for reconsideration, reviewing of facts, evidence, analysis, recommendations, and also important decisions taken during the process can be easily reviewed.

Report of Investigation shall be accompanied by some supporting evidence, which is physical and non-physical evidence. Report of Investigation shall not represent opinions or views, but in the form of a final conclusion on the investigation results that will be used as a basis for taking action.

Report of Investigation made by the WBS Team must have been completed within a maximum period of 90 (ninety) working days after the decision to conduct investigations received by WBS Team. The report shall then be submitted and presented by WBS Team to the Board of Directors.

Based on the report referred above, the Board of Directors shall use Minutes of Meeting according to the format as described in Appendix 3 of WBS Policy and decide:

1. *To close the investigated problems, if not proven to be true; or*
2. *To order the immediate supervisor of the Reported to perform disciplinary punishment process according to applicable regulations of the Company; if there is evidence of violation and/or fraud; or*

3. Jika dinilai lebih baik bagi Perusahaan, dapat meneruskan kepada penyidik untuk proses lebih lanjut, apabila terbukti terkait dengan tindak pidana;
4. Huruf (2) dan (3) harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan Hukuman Disiplin yang berlaku di Perusahaan.

Bila hasil investigasi mengindikasikan adanya tindakan kriminal, maka Direksi dapat memutuskan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut melalui jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim WBS dapat menyampaikan laporan hasil Investigasi secara langsung kepada:

1. Dewan Komisaris melalui Komisaris Utama jika terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh anggota Direksi. Komisaris Utama membuat laporan kepada Dewan Komisaris, setelah terlebih dahulu menugaskan Komite Audit untuk mengkaji ulang hasil investigasi Tim WBS dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan tersebut.
2. Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris.

3. *If considered better for the company, to continue to investigators for further proceedings, provided proven to be associated with criminal act;*
4. *Letter (2) and (3) must be determined in accordance with the applicable provisions of Disciplinary Sanctions in the Company.*

If the investigation results indicate the existence of a criminal act, then the Board of Directors may decide to follow-up the matter through legal recourse according to law and legislation.

WBS Team submit a report of investigation directly to:

1. *The Board of Commissioners through the President Commissioner if there are strong indications of violations and/or fraud committed by members of the Board of Directors. The President Commissioner reports to the Board of Commissioners, after first assigning the Audit Committee to review the results of investigations WBS Team within 14 (fourteen) working days from the receipt of the report.*
2. *Shareholders or General Meeting of Shareholders if there are strong indications of violations and/or fraud committed by members of the Board of Commissioners.*

“

Pada tahun 2023 tidak terdapat laporan pengaduan melalui saluran WBS terkait adanya dugaan pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh Insan PT INTI (Persero).

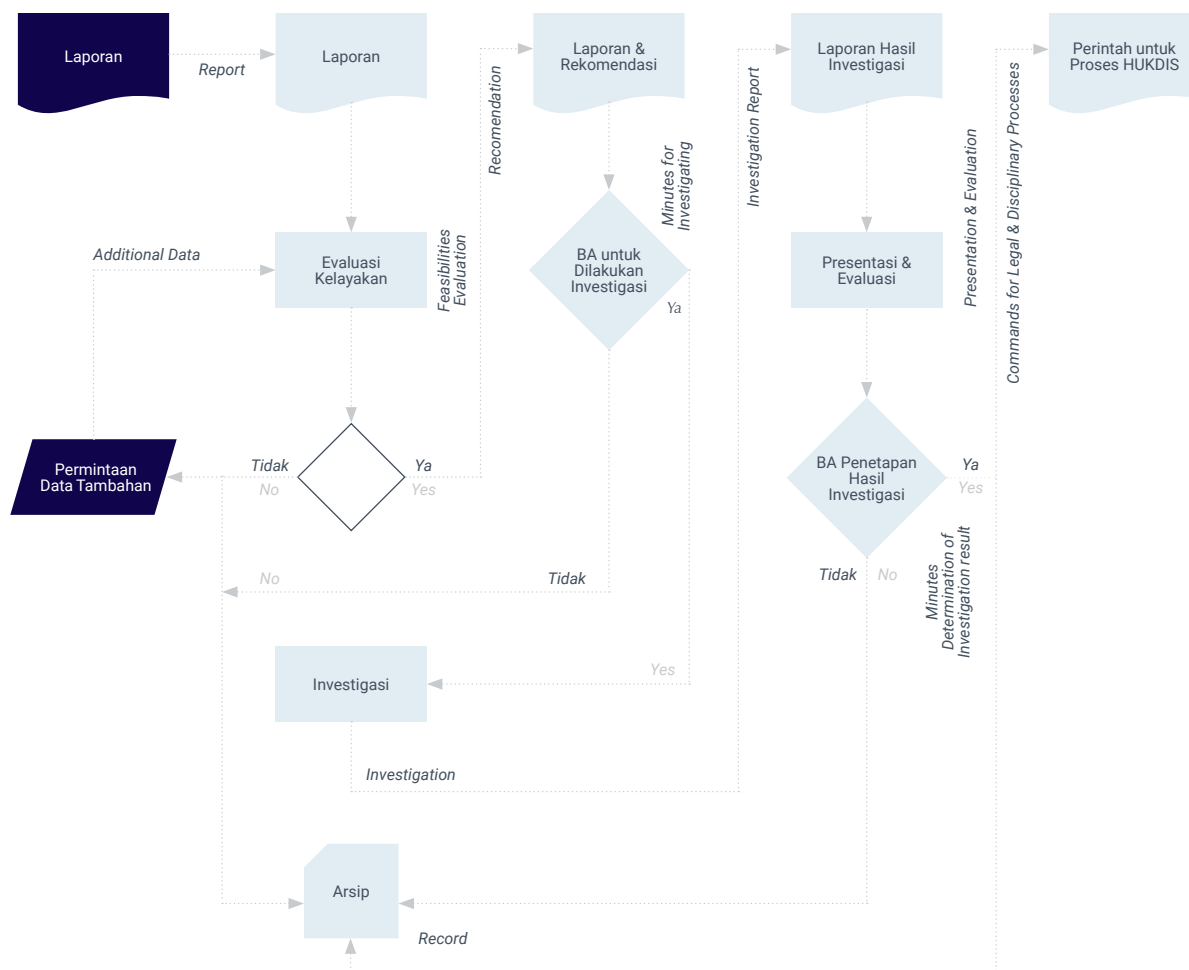
Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or their families, do not have shares in another company. In 2023 there were no reports of complaints through the WBS channel related to the alleged violations or fraud committed by PT INTI (Persero)'s personnel.

”



WBS System Procedures of Report

Pelapor <i>Reporter Whistleblower</i>	Tim WBS <i>WBS Team</i>	Direktur Utama <i>President Director</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>	Atasan Langsung Terlapor <i>Supervisor of The Reported</i>



Sebagai perwujudan terciptanya penyelenggaraan Good Corporate Governance yang efektif dan baik maka sosialisasi dan penegakan penerapan terhadap WBS akan selalu terus ditingkatkan. Perseroan melakukan evaluasi, pemutakhiran, dan penyempurnaan Kebijakan WBS dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis Perseroan dan menyesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Detail laporan yang masuk melalui saluran Whistle-Blowing System (WBS) selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

As an embodiment of effective and good implementation of Good Corporate Governance, the dissemination and enforcement of the application to the Whistleblowing System will always be improved. The company evaluates, updates and refines WBS Policies in order to continually improve in accordance with the development of the Company's business and adapts to the applicable laws and regulations.

Details of report submitted through Whistle-Blowing System (WBS) during 2023 is as follows:

No.	Uraian Description	Jumlah Laporan Number of Reports
1	Laporan Masuk Submitted Reports	0
2	Tindak Lanjut Pelaporan Report Follow-Ups	
	a. Investigasi Tim WBS WBS Team Investigation	0
	b. Internal Perusahaan Company Internals	0
	c. Eksternal Perusahaan dan Kepolisian Company Externals and Police	0
3	Jenis Kasus yang Dilaporkan Type of Reported Cases	
	a. Kecurangan Internal Internal Fraud	0
	b. Kecurangan Eksternal External Fraud	0
	c. Kegagalan Sistem System failure	0
	d. Kegagalan transaksi dan manajemen operasional Transaction failure and operational management	0
	e. Kegagalan hubungan ketenagakerjaan dan keamanan kerja Labor relations and work security failure	0
	f. Kegagalan praktik bisnis, produk dan hubungan dengan kastemer Business and product practices, customer relationship failure	0
	g. Lain-lain Others	0



Perkara Penting yang Sedang Dihadapi

Important Matters That are Being Faced

Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan.

Pada tahun 2023, terdapat perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perseroan, Entitas Anak, Anggota Direksi, dan/atau Anggota Dewan Komisaris, yaitu PT INTI (Persero) mendapatkan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari PT Redision Teknologi Indonesia (RTI). Sesuai dengan informasi yang dipublikasikan melalui sipp-pn.jakartapusat, gugatan tersebut dilayangkan oleh PT RTI pada Senin, 5 Juni 2023 dengan Nomor Perkara 159/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

Penetapan PKPU Sementara PT INTI (Persero) pun telah diputuskan oleh PN Jakarta Pusat berdasarkan putusan No. 159 tertanggal 18 Juli 2023.

Proses yang telah berlangsung selama 195 hari tersebut pun berakhir dengan Homologasi atau Perdamaian. Putusan tersebut lahir setelah proses voting yang berujung kesepakatan dari mayoritas kreditor, dengan komposisi hasil voting untuk Kreditor Separatis baik Headcount maupun Amount terkalkulasi sebesar 100%. Sementara itu, untuk Kreditor Konkuren Headcount 98,04% dan Amount 94,06%.

Keputusan tersebut disahkan oleh Majelis Hakim Perkara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada Kamis, 25 Januari 2024.

Important matters are being faced by companies, entities, members of the Board of Directors, and/or members of the Board of Commissioners who served during a period of the annual report.

In 2023, there is an important case being faced by the Company, Subsidiaries, Members of the Board of Directors, and/or Members of the Board of Commissioners, namely PT INTI (Persero) received a lawsuit for Postponement of Debt Payment Obligations from PT Redision Teknologi Indonesia (RTI). In accordance with information published via sipp-pn.jakartacentral, the lawsuit was filed by PT RTI on Monday, June 5 2023 with Case Number 159/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

The provisional Postponement of Debt Payment Obligations determination of PT INTI (Persero) has also been decided by the Central Jakarta District Court based on decision No. 159 dated July 18, 2023.

The process which lasted for 195 days ended with Homologation or Peace. This decision was made after a voting process which resulted in an agreement from the majority of creditors, with the composition of the voting results for Separatist Creditors, both Headcount and Amount, calculated at 100%. Meanwhile, for Concurrent Creditors the Headcount is 98.04% and the Amount is 94.06%.

This decision was ratified by the Panel of Case Judges at the Central Jakarta Commercial Court, on Thursday, January 25 2024.

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi

Important Matters That are Being Faced

informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku.

Pada tahun 2023, tidak terdapat sanksi administrasi/sanksi yang dikenakan kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

information regarding administrative sanctions/sanctions imposed on the Company, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities in the financial year.

In 2023, there were no administrative sanctions/sanctions imposed on the Company, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Corporate Social Responsibility and Environmental Management

Manajemen berkomitmen untuk menjalankan praktik keberlanjutan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dalam penerapannya didukung dengan praktik tata kelola organisasi yang baik, salah satu di antaranya adalah dengan turut memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan strategi dan operasi tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan, serta mendorong kepatuhan untuk menjamin akuntabilitas program. Program keberlanjutan Perusahaan diselaraskan pula dengan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) serta mendukung sasaran strategis bisnis guna memaksimalkan capaian kinerja keberlanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang saat ini berubah nama menjadi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility atau CSR) yang berfokus pada beberapa pihak pendukung, antara lain lingkungan hidup, ketenagakerjaan, sosial kemasyarakatan, dan konsumen.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan pengelolaan lingkungan Perseroan dilakukan melalui penyaluran dana pinjaman untuk bantuan permodalan bagi usaha kecil dan dana pembinaan kemitraan berupa bantuan untuk promosi pasar dan pelatihan kepada Mitra Mitra Pendanaan.

Melalui program CSR, filantropi, dan upaya sukarela, suatu bisnis dapat memberi manfaat bagi masyarakat sambil

Management is committed to carrying out sustainability practices through the Social and Environmental Responsibility Program which in its implementation is supported by good organizational governance practices, one of which is by participating in ensuring oversight of the implementation of the Company's social and environmental responsibility strategy and operations, as well as encouraging compliance to ensure program accountability. The Company's sustainability program is also aligned with Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects and supports business strategic goals to maximize sustainability performance achievements.

This commitment is realized through the implementation of the Partnership and Community Development Program which is currently changing its name to Corporate Social Responsibility (CSR) which focuses on several supporting parties, including the environment, employment, social community, and consumers.

The implementation of the Company's social responsibility and environmental management is carried out through the distribution of loan funds for capital assistance for small businesses and partnership development funds in the form of assistance for market promotion and training for Foster Partners.

Through CSR programs, philanthropy and volunteer efforts, a business can benefit society while enhancing their own brand.



meningkatkan merk mereka sendiri. Pentingnya program CSR bagi masyarakat, tidak kalah pentingnya bagi Perseroan.

Kegiatan CSR dapat membantu menjalin ikatan yang lebih kuat antara karyawan dan Perseroan. Kegiatan ini dapat meningkatkan moral dan dapat membantu karyawan dan perusahaan merasa lebih terhubung dengan dunia di sekitar mereka. Sehingga Perseroan bertanggung jawab secara sosial, diawali dengan Perseroan harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan pemegang sahamnya.

Seringkali, perusahaan yang mengadopsi program CSR telah mengembangkan bisnis mereka ke titik di mana mereka dapat memberikan kembali kepada masyarakat. Dengan demikian, program CSR terutama merupakan strategi perusahaan besar. Selain itu, semakin terlihat dan sukses sebuah perusahaan, semakin besar tanggung jawabnya untuk menetapkan standar perilaku etis bagi rekan-rekan, persaingan, dan industrinya.

Pelaksanaan program-program CSR yang dilakukan secara efektif, efisien, dan konsisten setiap tahun ini memberikan dampak besar, tidak hanya kepada berbagai pihak tersebut, tapi juga menunjang Perseroan mencapai keberlanjutan bisnis di masa kini dan masa mendatang.

The importance of CSR programs for the community is no less important for the Company.

CSR activities can help build stronger bonds between employees and the Company. These activities can boost morale and can help employees and employers feel more connected to the world around them. In order for the Company to be socially responsible, it begins with the Company being responsible to itself and its shareholders.

Often, companies that adopt CSR programs have grown their business to the point where they can give back to society. Thus, CSR programs are primarily a strategy for large companies. In addition, the more visible and successful a company is, the greater its responsibility to set standards of ethical behavior for its peers, competition, and industry.

The implementation of CSR programs that are carried out effectively, efficiently, and consistently every year has had a major impact, not only on these various parties, but also supports the Company in achieving business sustainability in the present and in the future.

Dasar Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perseroan

Feasibility Evaluation Basic Implementation of Corporate Social Responsibility

Landasan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia adalah :

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) huruf (e) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat, Pasal 88 tentang BUMN mengatur BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi, serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN yang diatur dengan Keputusan Menteri.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER.01/MBU/03/2023 tertanggal 3 Maret 2023, tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
3. Keputusan Direksi PT INTI (Persero) Nomor KN.024/2022 tertanggal 30 November 2022 Pedoman Pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

The basis for the implementation of the Partnership and Community Development Program for the Limited Liability (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia is:

1. *Law Number 19 of 2003 Article 2 paragraph (1) letter (e), concerning State-Owned Enterprises (SOEs), one of the aims and objectives of establishing SOEs is to actively provide guidance and assistance to entrepreneurs from economically vulnerable groups, cooperatives, and the community, Article 88 concerning SOEs stipulates that SOEs may set aside a portion of their net profits to foster small businesses or cooperatives as well as foster communities around SOEs which Ministerial Decree regulates.*
2. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number PER.01/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, concerning the Special Assignments and Corporate Social Responsibility and Community Development for State-Owned Enterprises.*
3. *Decree of the Board of Directors of PT INTI (Persero) Number KN.024/2022 dated November 30th, 2022, regarding Guidelines for the Management of Partnership and Community Development Programs.*

4. Surat Edaran dari Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Nomor: S-165/DSI.MBU/08/2021 tertanggal 2 Agustus 2021 tentang Permintaan Penyajian Laporan Manajemen Triwulan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

4. g. Circular Letter from the Deputy for Human Resources, Technology and Information Number: S-165/DSI.MBU/08/2021 dated 2 August 2021 concerning Requests for Presentation of Quarterly Management Reports for the Corporate Social Responsibility (CSR) of State-Owned Enterprises (SOEs).

Efektivitas Penyaluran Dana Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil

Fund Distribution Effectiveness of Small Micro Business Funding Program

Tingkat Efektivitas Penyaluran Program Kemitraan pada tahun 2023 tercatat sebesar 89,00% dengan skor 2, sedangkan Kolektibilitas sebesar 70,42% dengan skor 3.

The Effectiveness of the Distribution of the Partnership Program in 2023 was recorded at 89,00% with a score of 2, while Collectibility was 70,42% with a score of 3.

Penyaluran dana bergulir Mitra Binaan atau Usaha Mikro Kecil (UMK) pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.020.000.000,- atau 111,6% dari Rencana Kerja dan Anggaran 2023 yang sebesar Rp 1.810.000.000,-. Dana sebesar Rp 320.000.000 disalurkan kepada 4 (empat) Mitra Binaan untuk usaha mikro kecil yang berada di wilayah Bandung dan Jawa Barat, dan sebesar Rp 1.700.000.000 disalurkan melalui program kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

The distribution of revolving funds of Foster Partners in 2023 is Rp 2,020,000,000,- or 111,6% of the 2023 Work Plan and Budget, which is Rp 1,810,000,000,-. Funds amounting to Rp 320,000,000 were distributed to 4 (four) micro and small businesses partners in the Bandung and West Java areas, and Rp 1,700,000,000 was distributed through a collaboration program with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Efektivitas Penyaluran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Distribution Effectiveness of Social and Environmental Responsibility Programs

Realisasi penyaluran dana program CSR aktivitas sosial yang sumber dananya berasal dari Perusahaan adalah sebesar Rp 102.945.586 yaitu penyaluran dana program CSR untuk kegiatan aktivitas sosial berupa bantuan yang disalurkan untuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang berada di sekitar Perusahaan, dan kegiatan Sehari Bersama Anak Yatim dan Kaum Dhuafa.

The realization of the distribution of funds for the CSR social activity program, whose sources of funds came from the Company, amounted to Rp 102,945,586, namely the distribution of CSR program funds for social activity activities in the form of assistance distributed to Integrated Service Post located around the Company, and day activities with orphans and the Dhuafa.

Telah dilakukan pembinaan terhadap Mitra Binaan Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui pelatihan pelaporan Keuangan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diadakan di PT INTI (Persero) pada November 2023 dengan realisasi sebesar Rp5.640.200,.

Guidance has been carried out for Micro Small Enterprises Foster Partners through financial reporting training for Micro, Small, and Medium Enterprises which was held at PT INTI (Persero) in November 2023 with a realization of Rp 5,640,200.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Scope of Corporate Social Responsibility

Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL), PT INTI (Persero) senantiasa memastikan keseimbangan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mewujudkan keberlanjutan dan masyarakat sekitar dalam lingkup sebagai berikut:

In carrying out Corporate Social Responsibility (CSR), PT INTI (Persero) always ensures a balance of economic, social, and environmental performance to achieve sustainability and the surrounding community in the following areas:

1. Prosperity
2. People
3. Planet
4. Partnership
5. Prudence

1. Prosperity
2. People
3. Planets
4. Partnerships
5. Prudence

Program Create Share Value (CSV)

Create Share Value Programs (CSV)

Create Share Value (CSV) didasari pada ide adanya hubungan interdependen antara bisnis perusahaan dan kesejahteraan sosial, di mana CSV merupakan pengembangan dari konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Create Share Value (CSV) is based on the idea of an interdependent relationship between the company's business and social welfare, where CSV is a development of the concept of Corporate Social Responsibility (CSR).

Realisasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Realization of Sosial and Environmental Responsibility Program

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (Non-Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil atau Non-PUMK serta Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil atau PUMK).

Community Engagement and Development Social and Environmental Responsibility Program (Non-Micro and Small Business Funding Program and Micro and Small Business Funding Program).

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) <i>Sustainable Deveopment Goals (SDGs)</i>	Rencana Kerja dan Anggaran <i>Work Plan and Budget</i> Tahun 2023 (Rp)	Realisasi <i>Realization</i> Tahun 2023 (Rp)	Persentase Capaian Rencana Kerja dan Anggaran <i>Achievement Percentage Work Plan and Budget</i> Tahun 2023 (%)
A	Pilar Sosial <i>Social Pillars</i>	76.000.000	102.945.586	135,5%
1	TPB 3	44.900.000	82.305.386	183,3%
2	TPB 4	31.100.000	20.640.200	66,4%
B	Pilar Ekonomi <i>Social Pillars</i>	1.840.000.000	2.029.896.081	110,3%
1	TPB 8	1.810.000.000	2.020.000.000	116,6%
2	TPB 17	30.000.000	9.896.081	33,0%
C	Pilar Lingkungan <i>Environment Pillars</i>	45.000.000	1.000.000	2,2%
1	TPB 12	20.000.000	-	-
2	TPB 13	25.000.000	1.000.000	4,0%
Total		1.961.000.000	2.133.841.667	108,8%

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tanpa Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (Non-Community Involvement and Development) dan Tanpa Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (Non-PUMK).

Social and Environmental Responsibility Programs Without Community Involvement and Development (Non-Community Involvement and Development) and Without Micro and Small Business Funding Programs.

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	Rencana Kerja dan Anggaran <i>Work Plan and Budget</i> Tahun 2023 (Rp)	Realisasi <i>Realization</i> Tahun 2023 (Rp)	Persentase Capaian Rencana Kerja dan Anggaran <i>Achievement Percentage Work Plan and Budget</i> Tahun 2023 (%)
A	Pilar Sosial <i>Social Pillars</i>	-	72.305.386	-
1	TPB 3	-	72.305.386	-
B	Pilar Hukum dan Tata Kelola <i>Pillar of Law and Governance</i>	500.000.000	181.015.000	36,2%
1	TPB 16	500.000.000	181.015.000	36, 2%
Total		500.000.000	253.320.386	50,7%

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan *Community Involvement and Development* (Non Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil & Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil).

Community Involvement and Development Social and Environmental Responsibility Program (Non Micro and Small Business Funding Program & Micro and Small Business Funding Program).

No.	Nama Program <i>Program Name</i>	Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan <i>Priority Sustainable Development Goals</i>	Pilar Pembangunan <i>Development Pillars</i>	Rencana Kerja dan Anggaran <i>Work Plan and Budget</i> 2023		Realisasi <i>Realization</i> 2023	
				Uraian Program <i>Program Description</i>	Nilai Value (Rp)	Uraian Program <i>Program Description</i>	Nilai Value (Rp)
1	Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (UMK) <i>Small Micro Business Funding Program</i>	8	Pilar: Pembangunan Ekonomi <i>Pillar: Economic Development</i>	Pemberian bantuan pendanaan untuk Usaha Mikro Kecil di sekitar Perusahaan dan Kabupaten Bandung agar menjadi tangguh dan mandiri secara ekonomi. <i>Provision of funding assistance for Small Micro Enterprises around the Company and Bandung Regency so that they become economically strong and independent.</i>	-	Penyaluran Dana Pinjaman <i>Distribution of Loan Funds</i>	320.000.000
2	Penyaluran Kolaborasi <i>Collaborative Disbursement</i>	8	Pilar: Pembangunan Ekonomi <i>Pillar: Economic Development</i>	Kolaborasi melalui hibah kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. <i>Collaboration through grants to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.</i>	1.800.000.000		1.700.000.000
3	Penyaluran SROI <i>SROI Program</i>	8	Pilar: Pembangunan Ekonomi <i>Pillar: Economic Development</i>	Upgrade Motor Bensin menjadi Motor Listrik Pada Ojek Online. <i>Upgrade a gas motorbike to an electric motorbike for online ride hailing driver.</i>	10.000.000	-	-

4	Kegiatan Kolaborasi Bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) <i>Collaborative Activities with State Owned Enterprises (SOEs)</i>	17	Pilar: Pembangunan Ekonomi <i>Pillar: Economic Development</i>	Kegiatan Kolaborasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). <i>State-Owned Enterprises (BUMN) Collaborative Activities.</i>	30.000.000	Crash Program Keringanan Utang Tahun 2023 yaitu keringanan beban tunggakan eks pasien rumah sakit melalui KPKNL Bandung. <i>Crash Debt Relief Program in 2023, namely easing the burden of arrears for former hospital patients through KPKNL Bandung.</i>	9.896.081
5	Aktivitas Tanggung Jawab Sosial <i>Social Responsibility Activities</i>	3	Pilar: Pembangunan Sosial <i>Pillar: Social Development</i>	Pemberian bantuan sumbangan dalam rangka kegiatan kemanusiaan seperti sarana ibadah, sumbangan bencana alam, peningkatan kesehatan, serta sarana dan prasarana umum. <i>Provision of donations in the framework of humanitarian activities such as places of worship, donations for natural disasters, health improvement, as well as public facilities and infrastructure.</i>	44.900.000	Bantuan untuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sekitar Perusahaan. <i>Assistance for Integrated Service Posts around the Company.</i> Sumbangan Renovasi Sarana Ibadah. <i>Donations for Renovation of Worship Facilities.</i> Sumbangan kepada Panti Asuhan Yayasan Permata Insani. <i>Donations to the Yayasan Permata Insani Orphanage.</i>	4.500.000 4.000.000 1.500.000
6	Program Kolaborasi Bantuan Pendidikan <i>Collaborative Education Assistance Program</i>	4	Pilar: Pembangunan Sosial <i>Pillar: Social Development</i>	Program Kolaborasi Bantuan Pendidikan <i>Collaborative Education Assistance Program</i>	16.100.000	Pelatihan Laporan Pembukuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah <i>Training on Bookkeeping Reports for Micro, Small, and Medium Enterprises</i>	10.000.000
7	Program Prioritas Bantuan Pendidikan <i>Education Assistance Priority Program</i>	4	Pilar: Pembangunan Sosial <i>Pillar: Social Development</i>	Bantuan sarana pendidikan untuk sekolah di lingkungan Perusahaan. <i>Assistance with educational facilities for schools in the surrounding area of the Company.</i>	5.000.000	Sumbangan renovasi Gedung Olahraga SMPN 10 kota Bandung <i>Donation for the Sport Hall renovation in SMPN 10 Bandung</i>	5.000.000
8	Program Prioritas Pelatihan dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil (UMK) <i>Priority Program for Training and Development of Micro and Small Enterprises</i>	4	Pilar: Pembangunan Sosial <i>Pillar: Social Development</i>	Memberikan training manajemen usaha ke Mitra UMKM. <i>Providing business management training to Micro, Small, and Medium Enterprises Partners.</i>	10.000.000	Memberikan pelatihan Digital Marketing ke Mitra UMKM. <i>Providing Digital Marketing training to Micro, Small, and Medium Enterprises Partners.</i>	5.640.200
9	Program Prioritas Pelestarian Lingkungan <i>Environmental Preservation Priority Program</i>	13	Pilar: Pembangunan Lingkungan <i>Pillar: Environmental Development</i>	Antisipasi Banjir dengan penanaman pohon dan membuat resapan air. <i>Flood prevention by planting trees and creating water catchments.</i>	5.000.000	Sumbangan dalam bentuk bibit tanaman produktif. <i>Donations in the form of productive plant seeds</i>	1.000.000
9	Program Prioritas Pelestarian Lingkungan (SROI) <i>Environmental Preservation Priority Program (SROI)</i>	13	Pilar: Pembangunan Lingkungan <i>Pillar: Environmental Development</i>	Pemasangan jaring besi di saluran air untuk mencegah banjir. <i>Installation of iron nets in water channels to prevent flooding.</i>	20.000.000	-	-

9	Program Prioritas Pelestarian Lingkungan (SROI) <i>Environmental Preservation Priority Program (SROI)</i>	12	Pilar: Pembangunan Lingkungan <i>Pillar: Environmental Development</i>	Penerangan jalan umum berbasis PLTS. <i>Public street lighting based on solar cells.</i>	10.000.000	-	-
9	Program Kolaborasi Bantuan Pendidikan <i>Collaborative Education Assistance Program</i>	12	Pilar: Pembangunan Lingkungan <i>Pillar: Environmental Development</i>	Penerangan jalan umum berbasis PLTS di daerah Bandung. <i>Public street lighting based on solar cells in Bandung Area.</i>	10.000.000	-	-
Total					1.961.000.000	2.061.536.281	

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Non-Community Involvement and Development Social and Environmental Responsibility Program and Non-Micro and Small Business Funding Program.

Non-Community Involvement and Development Social and Environmental Responsibility Program and Non-Micro and Small Business Funding Program.

No.	Nama Program <i>Program Name</i>	Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan <i>Priority Sustainable Development Goals</i>	Pilar Pembangunan <i>Development Pillars</i>	Rencana Kerja dan Anggaran <i>Work Plan and Budget</i> 2023		Realisasi <i>Realization</i> 2023	
				Uraian Program <i>Program Description</i>	Nilai Value (Rp)	Uraian Program <i>Program Description</i>	Nilai Value (Rp)
1	Aktivitas Tanggung Jawab Sosial <i>Social Responsibility Activities</i>	3	Pilar: Pembangunan Sosial <i>Pillar: Social Development</i>	Aktivitas Tanggung Jawab Sosial <i>Social Responsibility Activities</i>	-	Kegiatan bersama Anak Yatim dan Kaum Dhuafa <i>Activities with Orphans and Dhuafa</i>	57.795.386
				Aktivitas Tanggung Jawab Sosial <i>Social Responsibility Activities</i>	-	Memfasilitasi UMKM untuk melaksanakan Bazar Sembako murah. <i>Facilitate MSMEs to participate in food bazaars program.</i>	14.510.000
2	Evaluation & Publication	16	Pilar: Hukum dan Tata Kelola <i>Pillar: Social Development</i>	External Assesment Good Corporate Governance dan Konsultasi Hukum <i>External Assessment of Good Corporate Governance and Legal Consultation</i>	500.000.000	Kegiatan Audit ISO <i>ISO Audit Activities</i>	181.015.000
Total					500.000.000	253.320.386	

Realisasi Tiga Program Prioritas (Pendidikan, Lingkungan, Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Realization of Three Priority Programs (Education, Environment, Development of Micro, Small and Medium Enterprises)

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang mendukung pencapaian prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah ditentukan sebagai program prioritas, adalah sebagai berikut:

The Social and Environmental Responsibility Program that supports the priority achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) which have been determined as priority programs, are as follows:

No.	Nama Program <i>Program Name</i>	Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan <i>Priority Sustainable Development Goals</i>	Pilar Pembangunan <i>Development Pillars</i>	Uraian Program <i>Program Description</i>	Indikator Capaian <i>Performance Indicator</i>	Rencana Kerja dan Anggaran <i>Work Plan and Budget 2023 (Rp)</i>	Realisasi <i>Realization 2023 (Rp)</i>
1	Program Prioritas Bantuan Pendidikan <i>Education Assistance Priority Program</i>	4	Pilar: Pembangunan Sosial <i>Pillar: Social Development</i>	Bantuan sarana pendidikan untuk sekolah di lingkungan Perusahaan. <i>Assistance with educational facilities for schools in the surrounding area of the Company.</i>	1 sekolah <i>1 school</i>	5.000.000	5.000.000
2	Program Prioritas Pelatihan dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil <i>Priority Program Training and Small Micro Business Development</i>	4	Pilar: Pembangunan Sosial <i>Pillar: Social Development</i>	Memberikan training manajemen usaha ke Mitra UMKM. <i>Providing business management training to Micro, Small, and Medium Enterprises Partners.</i>	10 Mitra Binaan mengikuti pelatihan <i>10 Foster Partners attended the training</i>	10.000.000	5.640.200
3	Program Prioritas Pelestarian Lingkungan <i>Environmental Preservation Priority Program</i>	13	Pilar: Pembangunan Lingkungan <i>Pillar: Environmental Development</i>	Antisipasi Banjir dengan penanaman pohon dan membuat resapan air. <i>Flood prevention by planting trees and creating water catchments.</i>	1 area umum <i>1 public area</i>	5.000.000	1.000.000

Pada 14 November 2023, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT INTI (Persero) telah memberikan pembinaan kepada 14 Mitra Binaan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM) berupa Pelatihan Digital Marketing yang diselenggarakan di Kantor PT INTI (Persero) Jalan Moch. Toha No 77 Bandung.

On November 14, 2023, Social and Environmental Responsibility PT INTI (Persero) has provided guidance to 14 Foster Partners (Micro, Small and Medium Enterprises or MSMEs) with theme Digital Marketing for MSMEs held at the Office PT INTI (Persero) Jalan Moch. Toha No. 77 Bandung.



Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil

Micro Small Enterprises Funding Program

Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (UMK) adalah pendanaan atau pemberian pinjaman dana kepada pelaku UMK agar dapat meningkatkan usaha. Selain itu, pendanaan UMK ini juga tidak berfokus hanya memberikan dana saja, tetapi juga memberikan pembinaan dan pendampingan UMK agar menjadi tangguh dan mandiri.

The Micro Small Enterprises (MSEs) Funding Program is funding or providing loans to MSEs actors in order to increase their business. In addition, this MSEs funding is also not focused on just providing funds, but also providing guidance and assistance for MSEs to become tough and independent.

Sumber Dana

Source of Funds

Rincian penerimaan dan penyaluran program Mitra Binaan atau Usaha Mikro Kecil tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The details of receiving and distributing the Foster Partners or Micro Small Enterprises (MSEs) program in 2023 are as follows:

Uraian <i>Description</i>	Pendanaan Usaha Mikro Kecil (UMK) 2023 <i>Micro Small Enterprises (MSEs) Funding 2023</i>			
	Audit 2023 <i>Audits 2023</i>	Rencana Kerja dan Anggaran 2023 <i>Work Plan and Budget 2023 (Rp)</i>	Realisasi 2023 <i>Realization 2023 (Rp)</i>	%
Dana Tersedia <i>Available Funds</i>				
1 Saldo Awal <i>Beginning balance</i>	326.700.530	-	184.199.860	-
2 Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan <i>Foster Partner Loan Returns</i>	1.971.425.832	1.640.000.000	1.874.731.079	114,31
3 Pendapatan Jasa Administrasi Pin-jaman <i>Loan Administration Service Revenue</i>	192.906.755	159.000.000	205.300.340	129,12
4 Pendapatan Administrasi Bank (nett) <i>Bank Administration Income (nett)</i>	3.256.743	1.000.000	3.698.968	369,90
5 Koreksi Pendapatan Lainnya <i>Correction of Other Income</i>	4.910.000	-	1.684.000	-
Dana Tersedia <i>Available Funds</i>	2.499.199.860	1.800.000.000	2.269.614.247	126,09
Penyaluran Dana dan Biaya Operasional <i>Distribution of Funds and Operational Costs</i>				
1 Penyaluran Mandiri <i>Independent Distribution</i>	2.315.000.000	-	320.000.000	-
2 Penyaluran Melalui Sinergi BUMN <i>Distribution Through SOEs Synergy</i>		1.800.000.000	1.700.000.000	94,44
Jumlah Penyaluran Dana <i>Total Distribution of Funds</i>	2.315.000.000	1.800.000.000	2.020.000.000	112,22
Saldo Akhir <i>Ending Balance</i>	184.199.860	-	249.614.247	-

Penyaluran Dana Pinjaman Berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah

Distribution of Loan Funds Based on Business Sector and Region

Realisasi penyaluran dana bergulir kepada Mitra Binaan berdasarkan sektor usaha tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Realization of distribution of revolving funds to Foster Partners by business sector in 2023 as shown in the following table:



Sektor <i>Sectors</i>	Tahun/Year 2022		Mitra Binaan <i>Foster Partners</i>	Rencana Kerja dan Anggaran <i>Work Plan and Budget 2023 (Rp)</i>	Tahun/Year 2023	
	Mitra Binaan <i>Foster Partners</i>	Pinjaman <i>Loan</i>			Mitra Binaan <i>Foster Partners</i>	Pinjaman <i>Loan</i>
Jawa Barat						
Sektor Usaha Industri <i>Industrial Business Sector</i>	9	460.000.000	8	460.000.000	-	-
Sektor Usaha Perdagangan <i>Trading Business Sector</i>	22	1.445.000.000	15	1.100.000.000	3	220.000.000
Sektor Usaha Pertanian/Perkebunan <i>Agriculture/Plantation Business Sector</i>	-	-	2	90.000.000	-	-
Sektor Usaha Perikanan/Peternakan <i>Fishery/Livestock Business Sector</i>	1	20.000.000	2	50.000.000	-	-
Sektor Usaha Jasa <i>Service Business Sector</i>	6	390.000.000	3	100.000.000	1	100.000.000
Penyaluran Melalui Bank BRI <i>Distribution via BRI Bank</i>	-	-	-	-	-	1.700.000.000
Jumlah	38	2.315.000.000	30	1.800.000.000	4	2.020.000.000

Realisasi penyaluran dana bergulir kepada Mitra Binaan atau Usaha Mikro Kecil (UMK) tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.020.000.000 atau 111,6% dari anggaran, yang disalurkan kepada 4 (empat) Mitra Binaan PT INTI (Persero) dan melalui bank BRI.

Realization of channeling revolving funds to Foster Partners or Micro Small Enterprises (MSEs) in 2023 is Rp 2,020,000,000 or 111.6% of the budget which is distributed to 4 (four) PT INTI (Persero) Foster Partners, and also through BRI Bank.

Monitoring Mitra Binaan

Monitoring Foster Partners

Pada tahun 2023, telah dilakukan kegiatan monitoring atau kunjungan kepada 111 (seratus sebelas) Mitra Binaan, dengan rincian sebagai berikut:

In 2023, monitoring or visiting activities have been carried out to 111 (one hundred and eleven) Foster Partners, with the following details:

No	Lokasi <i>Location</i>	Jumlah Bulan Desember <i>Number of Months December 2023</i>	Jumlah s.d. Bulan Desember <i>Total up to December 2023</i>
1	Kodya Bandung	0 PK	9 PK
2	Kab. Bandung	0 PK	25 PK
3	Kab. Bandung Barat	0 PK	0 PK
4	Kodya Cimahi	0 PK	0 PK
5	Kab. Sumedang	7 PK	35 PK
6	Kab. Subang	0 PK	0 PK
7	Kab. Majalengka	0 PK	4 PK
8	Kab. Sukabumi	0 PK	0 PK

9	Kab.Indramayu	0 PK	0 PK
10	Kab. Cirebon	0 PK	4 PK
11	Kab. Ciamis	0 PK	0 PK
12	Kab. Garut	7 PK	34 PK
13	Kab. Tasikmalaya	0 PK	0 PK
14	Kab. Cianjur	0 PK	0 PK
15	Kab. Kuningan	0 PK	0 PK
Jumlah Jawa Barat		14 PK	111 PK
<i>Total West Java</i>			



Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia (HAM)

Social Responsibility Related to Human Rights

Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) adalah prinsip utama bagi Perseroan dan berkaitan erat dengan kegiatan operasional. Tanggung Jawab Sosial Terkait HAM diterapkan Perseroan melalui prinsip non-diskriminasi di tempat kerja dan pengelolaan sumber daya manusia.

Hal ini tercermin dari kebijakan rekrutmen dan pengembangan karier yang adil dan terbuka di Perseroan, dalam rangka mewujudkan keberagaman dan inklusivitas di lingkungan kerja. Seleksi Karyawan pun dilakukan berdasarkan potensi profesional dan kinerjanya, tanpa memandang perbedaan suku, etnis, ras, agama, dan jenis kelamin.

Respect for Human Rights is the Company's main principle and is closely related to operational activities. The Company implements Social Responsibility Related to Human Rights through the principle of non-discrimination in the workplace and human resource management.

This is reflected in the Company's fair and open recruitment and career development policies to create diversity and inclusiveness in the work environment. Employee selection is also based on professional potential and performance, regardless of ethnicity, race, religion, or gender differences.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Praktik Operasi yang Adil

Corporate Social Responsibility Related to Fair Operating Practices

PT INTI (Persero) senantiasa berupaya menjalankan operasi usaha yang adil dan transparan serta sejalan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance atau GCG).

Oleh karena itu, Perseroan telah menetapkan Pedoman Kode Etik sebagai panduan bagi seluruh karyawan Perseroan dalam berinteraksi dengan sesama karyawan dan pemangku kepentingan eksternal Perseroan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.

Implementasi kode etik untuk operasi usaha yang adil terlihat dari pelaksanaan sistem tata kelola yang baik, diiringi dengan upaya perbaikan yang terus-menerus. Perseroan juga senantiasa memenuhi prinsip akuntabilitas secara efektif dan transparan, juga membuka akses pelaporan melalui Whistle-Blowing System.

Di samping itu, Perseroan juga selalu menyertakan tujuan kebijakan bisnis berkelanjutan ke dalam proses pengambilan keputusan.

PT INTI (Persero) continually strives to carry out fair and transparent business operations per Good Corporate Governance (GCG) principles.

Therefore, the Company has established a Code of Conduct Guidelines as a guide for all Company employees in interacting with fellow employees and external stakeholders of the Company to implement their daily duties and responsibilities.

Implementing the code of ethics for proper business operations can be seen from implementing a sound governance system and continuous improvement efforts. The Company also consistently fulfills the principle of accountability effectively and transparently and opens access to reporting through the Whistle-Blowing System.

In addition, the Company also always incorporates sustainable business policy objectives into the decision-making process.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup

Corporate Social Responsibility Related to The Environment

Perseroan meyakini aspek kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberlangsungan bisnis di masa depan. Oleh karenanya, dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasionalnya sehari-hari, Perseroan menjamin bahwa seluruh aktivitasnya tidak akan merusak atau mencemari lingkungan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam menjalankan bisnis sebagai industri telekomunikasi, Perseroan menyadari adanya dampak yang ditimbulkan dari aktivitas Perseroan terhadap lingkungan. Untuk menjaga lingkungan hidup maka Perseroan berkomitmen untuk mematuhi peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan, mencegah pencemaran lingkungan, dan mengupayakan efisiensi energi.

Komitmen kebijakan ini dituangkan dalam Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi yang telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan serta membekali bisnis Perseroan dengan sertifikasi ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Pada tahun 2023 tidak ada realisasi penyaluran dana untuk program pelestarian lingkungan, dan Perusahaan tidak mendapatkan Sertifikat Terkait Lingkungan Hidup.

The Company believes that environmental sustainability is one of the important factors in supporting business continuity in the future. Therefore, in carrying out its business activities and day-to-day operations, the Company guarantees that all of its activities will not damage or pollute the environment as regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

In running its business as a telecommunications industry, the Company is aware of the impact of the Company's activities on the environment. To protect the environment, the Company is committed to complying with regulations related to environmental management, preventing environmental pollution, and striving for energy efficiency.

This policy commitment is stated in the Integrated Management System Policy, which has been socialized to all employees and has provided the Company's business with ISO 14001:2015 certification on Environmental Management Systems and ISO 45001:2018 on Occupational Health and Safety Management Systems.

In 2023 there will be no actual channeling of funds for environmental preservation programs, and the Company did not get a Certificate Related to the Environment.

Tanggung Jawab Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Related to The Environment

Perseroan senantiasa memandang karyawan sebagai aset yang memiliki peranan besar dalam mendukung keberlangsungan bisnis usaha di masa depan. Berlandaskan pada pandangan tersebut, Perseroan selalu berupaya memenuhi hak seluruh karyawan baik dalam hal kesejahteraan, kesehatan, hingga keselamatan saat bekerja sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Perseroan. Hal ini dilakukan Perseroan agar tercipta hubungan industrial yang sehat serta seluruh karyawan lebih termotivasi untuk memperbaiki kinerjanya. Hal ini mengingat Sumber Daya Manusia merupakan aset penting sekaligus modal utama (human capital) untuk mencapai visi dan misi Perseroan.

Selain pengembangan terhadap Sumber Daya Manusia, Perseroan juga melaksanakan peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja. Perlindungan dan jaminan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) karyawan sebagai komponen utama Kualitas Lingkungan Kerja, akan berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan hidup karyawan.

Komitmen Perseroan dalam pengelolaan lingkungan kerja yang baik tercantum dalam Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) Nomor QMS1-LDR05-001 Poin 4 yaitu "Berkomitmen untuk mencegah pencemaran lingkungan dan perlindungan lingkungan, termasuk mengawal, mengevaluasi dan merealisasikan sasaran mutu, anti penyuapan, K3 dan lingkungan".

Untuk memastikan koordinasi dalam bidang keselamatan kerja, Perseroan membentuk Tim Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) melalui Surat Keputusan Direksi dan disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kota Bandung.

Kompetensi karyawan di bidang K3, khususnya bagi mereka yang memiliki tugas di bidang K3 baik sebagai tugas utama maupun tambahan, terus ditingkatkan pada tahun 2023 melalui pelatihan Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), Sistem Manajemen K3 Awareness, Electrical Safety Awareness, Fire Safety Awareness, Ahli K3 Umum, Awareness ISO 9001:2015, serta Pelatihan P3K dan Pemadam Kebakaran.

The Company always views employees as assets that have a major role in supporting business continuity in the future. Based on this view, the Company always strives to fulfill the rights of all employees in terms of welfare, health, and safety at work as stated in the Company Regulations. This is done by the Company in order to create healthy industrial relations and all employees are more motivated to improve their performance. This is because Human Resources are an important asset as well as the main capital (human capital) to achieve the Company's vision and mission.

In addition to the development of Human Resources, the Company also carries out improvements to the Quality of the Work Environment. Protection and guarantees for Occupational Health and Safety of employees as the main component of the Quality of the Work Environment, will affect the increase in work productivity and welfare of employees.

The Company's commitment to managing a good work environment is stated in the Integrated Management System Policy Number QMS1-LDR05-001 Point 4 namely "Committed to preventing environmental pollution and environmental protection, including overseeing, evaluating and realizing quality objectives, anti-bribery, occupational health and safety, and the environment".

To ensure coordination in the field of work safety, the Company formed a Team of Occupational Health and Safety Advisory Committee through a Board of Directors Decree and approved by the Head of the Bandung City Transmigration and Manpower Office.

The competence of employees in the occupational health and safety field, especially for those who have duties in the occupational health and safety field both as main and additional tasks, will continue to be improved in 2023 through training on B3 Waste Management, Occupational Health and Safety Awareness Management System, Electrical Safety Awareness, Fire Safety Awareness, General Occupational Health and Safety Expert, Awareness ISO 9001:2015, and also First Aid and Fire Fighting Training.



Untuk menunjang kesehatan karyawan, Perseroan juga menyediakan fasilitas poliklinik yang memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan rawat jalan (kuratif) sekaligus konsultasi untuk pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan (preventif).

Pasca masa pandemi, Perseroan terus menguatkan komitmen untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja karyawan melalui penerapan protokol kesehatan ketat. Selain itu, Perseroan pun menyediakan sarana kantin sehat untuk memastikan kualitas konsumsi bagi seluruh karyawan PT INTI (Persero).

Tanggung jawab terhadap K3 juga dilakukan melalui pemeriksaan rutin sarana dan prasarana gedung seperti lift, hydrant, dan sarana penunjang keselamatan kerja lainnya. Kegiatan pun difokuskan pada pengecekan rutin sarana evakuasi keselamatan di gedung untuk menjaga agar kondisinya senantiasa siap dan siaga.

Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap K3, maka Perseroan pun menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai K3 kepada karyawan, minimal satu tahun sekali. Perseroan juga mengadakan simulasi tanggap darurat bencana, satu tahun sekali, untuk melatih kesiagaan terhadap bencana seperti kebakaran, gempa bumi, dan bencana lainnya.

Hal tersebut dilakukan agar setiap orang, baik dari lingkup internal maupun eksternal, yang berada di lingkungan Perseroan wajib mengetahui aspek K3. Oleh karena itu, pada setiap awal penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan pihak eksternal, Perseroan akan selalu menayangkan video Safety Induction sebagai salah satu upaya peningkatan pemahaman K3.

Upaya pemahaman pun dilakukan melalui pemasangan tanda dan rambu K3, seperti rambu Dilarang Merokok, tanda Wajib Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), petunjuk Alat Pemadam Api Ringan (APAR), tanda Jalur Evakuasi, informasi Arah Parkir, dan lain-lain.

Selain itu, Perseroan pun berkomitmen pada aspek pengendalian dan pengelolaan limbah domestik dan limbah bahan berbahaya dan beracun yang secara rutin dilakukan untuk menjamin baku mutu, serta ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Perseroan pun menempatkan karyawan sebagai mitra strategis bagi keberlanjutan usaha. Perseroan menjamin kebebasan karyawan untuk berserikat dan bergabung dalam Serikat Pekerja INTI sebagai wadah penghubung karyawan dengan Perseroan, juga sekaligus sarana penyelesaian masalah karyawan.

Lalu, untuk menjembatani kepentingan Perseroan dan

To support employee health, the Company also provides polyclinic facilities that offer outpatient (curative) examination and treatment services and consultation for disease prevention and health care (preventive).

Post-pandemic period, the Company continued to strengthen its commitment to maintaining employees' health and safety through strict health protocols. In addition, the Company also provides healthy canteen facilities to ensure quality consumption for all employees of PT INTI (Persero).

Responsibility for Occupational Health and Safety is also carried out through routine inspections of building facilities and infrastructure such as elevators, hydrants, and other work safety supporting facilities. Activities are also focused on routine checking of safety evacuation facilities in buildings to keep them ready and on standby.

To increase understanding and awareness of Occupational Health and Safety, the Company also organizes outreach and socialization regarding Occupational Health and Safety to employees at least once a year. The Company also conducts disaster emergency response simulations annually to train disaster preparedness such as fires, earthquakes, and other disasters.

This is done so that everyone, internal and external, who is in the Company's environment must know the Occupational Health and Safety aspect. Therefore, at the beginning of every activity involving external parties, the Company will always show a Safety Induction video to increase the understanding of Occupational Health and Safety.

Efforts to understand are also carried out by installing Occupational Health and Safety signs, such as No-Smoking signs, Mandatory Personal Protective Equipment (PPE) signs, Light Fire Extinguishers instructions, Evacuation Path signs, Parking Direction information, and others.

In addition, the Company is also committed to the aspect of controlling and managing domestic waste and hazardous and toxic waste which is routinely carried out to ensure quality standards, and also compliance with applicable laws and regulations.

Furthermore, the Company also places employees as strategic partners for business sustainability. The Company guarantees the freedom of employees to associate and join the INTI Labor Union as a forum for connecting employees with the Company and a means of solving employee problems.

Then, to bridge the interests of the Company and the interests

kepentingan karyawan, terutama yang terkait kebijakan Sumber Daya Manusia, Perseroan, dan Serikat Pekerja INTI menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) setiap dua tahun, dan didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Perseroan juga menerapkan prinsip non-diskriminasi yang ketat dan konsisten dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia melalui kebijakan rekrutasi, penilaian kinerja, remunerasi, dan pengembangan karier yang profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik. Perseroan juga senantiasa mengutamakan tenaga kerja lokal sebagai sumber daya utama dalam seluruh kegiatan operasional Perseroan.

of employees, especially those related to Human Resources policies, the Company, and the INTI Labor Union prepare a Collective Labor Agreement every two years and are registered with the Manpower and Transmigration Office.

The Company also applies strict and consistent principles of non-discrimination in managing Human Resources through policies on recruitment, performance appraisal, remuneration, and professional career development regardless of ethnicity, religion, race, class, gender, and physical condition. The Company also always prioritizes local workers as the main resource in all of the Company's operational activities.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen

Corporate Social Responsibility to Consumers

Sebagai wujud kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perseroan berkomitmen akan selalu memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dengan menyediakan produk dan/atau layanan yang terjamin aman bagi seluruh Pelanggan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan secara konsisten melakukan berbagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk memastikan bahwa seluruh Pelanggan telah mendapatkan pelayanan yang prima di mana hal tersebut menjadi salah satu prioritas Perseroan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sehari-hari.

Dalam melakukan analisis dan meningkatkan pelayanan kepada Pelanggan, maka Perseroan menggunakan dasar sebagai berikut:

1. Kemudahan Akses, yaitu ketersediaan atas berbagai informasi yang diperlukan Pelanggan dan kemudahan menghubungi baik melalui telepon, email, dan faksimili kepada unit yang menangani keluhan, alamat kantor, dan website Perseroan.
2. Kompetensi Karyawan yang diukur dari kemampuan dan pengetahuan karyawan yang berhubungan langsung dengan Pelanggan.
3. Tingkat Keramahan dan Kemampuan Berempati dari karyawan yang berhubungan langsung dengan Pelanggan.
4. Keandalan Produk atau Layanan, yaitu barang yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi, kuantitas, dan kualitas secara keseluruhan, serta tingkat layanan yang memenuhi harapan Pelanggan.
5. Respon atas Kebutuhan Pelanggan, yaitu tingkat kesigapan Perseroan dalam menanggapi keluhan dan permintaan Pelanggan.
6. Kecepatan, yaitu waktu yang dibutuhkan dalam menindaklanjuti informasi, proses pembayaran, dan penanganan keluhan.
7. Keamanan, yaitu jaminan keamanan dalam menggunakan produk atau layanan yang diberikan oleh Perseroan.
8. Layanan yang Kasat Mata, seperti fasilitas kantor Perseroan, loket pembayaran, penampilan karyawan, berbagai tampilan media dan lembaran promosi, serta hal lainnya yang dapat menciptakan citra baik Perseroan.

As a form of compliance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the Company is committed to always protecting consumer rights by providing products and/or services that are guaranteed to be safe for all customers.

In this regard, the Company consistently carries out various continuous improvement efforts to ensure that all customers receive excellent service, which is one of the Company's priorities in carrying out its daily business activities.

In conducting analysis and improving services to customers, the Company uses the following basis:

1. *Ease of Access, namely the availability of various information needed by the Customer and the ease of contacting either by telephone, email, and facsimile to the unit that handles complaints, the office address, and the Company's website.*
2. *Employee Competence as measured by the ability and knowledge of employees who are directly related to customers.*
3. *The Level of Friendliness and Empathy Ability of employees who deal directly with customers.*
4. *Product or Service Reliability, namely goods produced in accordance with specifications, quantity, and overall quality, as well as service levels that meet customer expectations.*
5. *Response to Customer Needs, namely the level of readiness of the Company in responding to customer complaints and requests.*
6. *Speed, namely the time needed to follow up on information, process payments, and handle complaints.*
7. *Security, namely security guarantees in using the products or services provided by the Company.*
8. *Visible Services, such as the Company's office facilities, payment counters, employee appearances, various media displays and promotional sheets, as well as other things that can create a good image of the Company.*

Mekanisme Penanganan Keluhan Pelanggan

Customer Complaint Handling Mechanism

1. Karyawan yang melaksanakan fungsi pemasaran, *sales engineering*, manajemen proyek, dan operasi harus menetapkan dan menerapkan pengaturan yang efektif untuk berkomunikasi dengan Pelanggan, terutama berkaitan dengan hal berikut:

- a. Informasi Produk melalui internet, brosur, atau media lainnya.
- b. Pertanyaan, penanganan kontrak atau pesanan, perubahan kontrak atau pesanan, saran dan/atau keluhan Pelanggan melalui surat, telepon, e-mail, fax, kunjungan, rapat, dan lain-lain.

2. Mekanisme penerimaan dan penyampaian keluhan Pelanggan di Perseroan dilakukan melalui unit yang ditunjuk untuk menangani keluhan Pelanggan.

3. Penanganan keluhan pelanggan pada prinsipnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penerimaan keluhan atau pengaduan dari setiap malfungsi, gangguan perangkat, atau spesifikasi teknis yang berbeda setelah diserahkan dan dioperasikan oleh pelanggan.
- b. Pencatatan dan registrasi keluhan dalam daftar keluhan untuk keperluan pengendalian penyelesaian keluhan.
- c. Pendistribusian keluhan untuk dilakukan penanganan yang tepat kepada unit kerja internal yang memiliki tanggung jawab atau kemampuan dalam menindaklanjuti keluhan yang diterima.
- d. *Monitoring* penyelesaian keluhan sesuai dengan standar layanan kualitas yang ditetapkan.
- e. Menutup permasalahan (*closing*) dan menyampaikan kepada Pelanggan tentang penyelesaian atau tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan.

4. Proses pengaduan keluhan sampai dengan penyelesaian keluhan tersebut diatur tersendiri dalam *Standard Operating Procedure*.

1. *Employees performing marketing, sales engineering, project management, and operations functions must establish and implement effective arrangements for communicating with Customers, particularly with regard to the following:*

- a. *Product information via the internet, brochures, or other media.*
- b. *Inquiries, handling contracts or orders, changes to contracts or orders, suggestions and/or complaints from customers by mail, telephone, e-mail, fax, visits, meetings, and others.*

2. *The mechanism for receiving and submitting customer complaints in the Company is carried out through a unit appointed to handle customer complaints.*

3. *Handling of customer complaints in principle is carried out in the following ways:*

- a. *Receipt of complaints or complaints of any malfunctions, device problems, or different technical specifications after being handed over and operated by the customer.*
- b. *Recording and registering complaints in the complaint register for the purpose of controlling the resolution of complaints.*
- c. *Distribution of complaints for proper handling to internal work units that have the responsibility or ability to follow up on complaints received.*
- d. *Monitoring the resolution of complaints in accordance with the established quality service standards.*
- e. *Closing the problem (closing) and conveying to the Customer about the settlement or follow-up to the complaint submitted.*

4. *The complaint process until the settlement of the complaint is regulated separately in the Standard Operating Procedure.*



Landasan Kebijakan

Policy Foundation

1. Perseroan senantiasa berusaha agar produk yang diserahkan kepada Pelanggan memenuhi harapan Pelanggan, dilakukan dengan layanan yang terbaik, serta senantiasa menghindari kemungkinan timbulnya kerugian pada Pelanggan.
2. Perseroan memberikan jaminan berupa perbaikan atau penggantian dengan produk baru dalam hal terjadi kerusakan pada produk yang masih dalam masa garansi.
3. Perseroan akan mengganti kerugian yang dialami oleh Pelanggan yang disebabkan oleh produk yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Perseroan atau karyawan, atau kesalahan orang-orang yang bekerja untuk Perseroan dalam implementasi atau penyerahan produk.

Perseroan memberikan layanan purnajual atas produk setelah masa garansi berupa konsultasi teknis produk, perbaikan dan pemeliharaan, serta penyediaan suku cadang berbayar.

1. *The Company always strives to ensure that the products delivered to customers meet customer expectations, carried out with the best service, and always avoid the possibility of causing losses to customers.*
2. *The Company provides a guarantee in the form of repair or replacement with a new product in the event of damage to the product which is still within the warranty period.*
3. *The Company will compensate for the loss suffered by the Customer caused by the product not functioning properly, due to the negligence or fault of the Company or its employees, or the fault of the people who work for the Company in the implementation or delivery of the product.*

The Company provides after-sales services for products after the warranty period in the form of product technical consultation, repair, maintenance, and the provision of paid spare parts.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Sosial dan Masyarakat

Social Responsibility to Social and Community

Menyadari keberadaan Perseroan sebagai entitas bisnis yang tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat, Perseroan berupaya untuk senantiasa hadir dan memberikan kontribusi yang maksimal kepada masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, Perseroan secara berkala menyusun program dan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang sosial dan pengembangan masyarakat yang rutin dijalankan setiap tahunnya, khususnya di bidang pendidikan dan keagamaan.

Tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diimplementasikan dalam bentuk kepedulian, antara lain pelestarian alam, perbaikan sarana ibadah, kesehatan masyarakat, pendidikan, sarana prasarana, bencana alam, dan pengentasan kemiskinan.

Realisasi penyaluran dana program CSR aktivitas sosial yang sumber dananya berasal dari perusahaan adalah sebesar Rp 102.945.586 yaitu penyaluran dana program CSR untuk kegiatan aktivitas sosial berupa bantuan yang disalurkan untuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang berada di sekitar Perusahaan, dan kegiatan Sehari Bersama Anak Yatim dan Kaum Dhuafa.

PT INTI (Persero) melalui Bagian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan membantu kegiatan pembinaan kepada Mitra Binaan berupa pengadaan pelatihan tentang membuat pelaporan keuangan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) senilai Rp5.640.200,.

Recognizing the existence of the Company as a business entity that cannot be separated from social life, the Company always strives to be present and provide maximum contribution to the surrounding community.

Therefore, the Company regularly arranges Corporate Social Responsibility (CSR) programs and activities in the social and community development fields, routinely carried out yearly, especially in education and religion.

Responsibility to the community and the environment can be implemented through care, including nature conservation, repair of religious facilities, public health, education, infrastructure, natural disasters, and poverty alleviation.

The realization of the distribution of funds for the CSR social activity program, whose sources of funds came from the Company, amounted to Rp 102.945.586, namely the distribution of CSR program funds for social activity activities in the form of assistance distributed to Integrated Service Post located around the Company, and day activities with orphans and the Dhuafa.

PT INTI (Persero), through the Social and Environmental Responsibility Section, assists in coaching activities for fostered partners by providing training on making financial reports for Small Micro Business worth Rp 5,640,200.



LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Consolidated Financial Statements





**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK /
AND SUBSIDIARIES**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022***





Daftar Isi	Halaman/ <u>Page</u>	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		<i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2023 and 2022</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	5	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>
Informasi Tambahan		<i>Supplementary Information</i>
Lampiran I Informasi Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk		<i>Appendix I Information of Parent Entity's Statement of Financial Position</i>
Lampiran II Informasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk		<i>Appendix II Information of Parent Entity's Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Lampiran III Informasi Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk		<i>Appendix III Information of Parent Entity's Statement of Changes in Equity</i>
Lampiran IV Informasi Laporan Arus Kas Entitas Induk		<i>Appendix IV Information of Parent Entity's Statement of Cash Flows</i>
Lampiran V Pengungkapan Lainnya		<i>Appendix V Other Disclosure</i>



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023 AND 2022**

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

We, the undersigned:

1.	Nama / Name	:	Edi Witjara
	Alamat Kantor / Office Address	:	Jalan Mochammad Toha No. 77 Bandung 40253
	Alamat Domisili sesuai KTP /	:	Jl. Kalijati Indah 7-A Antapani, Bandung
	<i>Domicile as stated in ID Card</i>		
	Nomor Telepon / Phone Number	:	
	Jabatan / Position	:	Direktur Utama / President Director
2.	Nama / Name	:	Tantang Yudha Santoso
	Alamat Kantor / Office Address	:	Jalan Mochammad Toha No. 77 Bandung 40253
	Alamat Domisili sesuai KTP /	:	Komp. BI Jl. I No. 8 Tebet, Jakarta Selatan
	<i>Domicile as stated in ID Card</i>		
	Nomor Telepon / Phone Number	:	
	Jabatan / Position	:	Direktur Keuangan, SDM, Hukum dan Manajemen Risiko / Director Finance, Human Capital, Legal & Risk Management
3.	Nama / Name	:	Ahmad Taufik
	Alamat Kantor / Office Address	:	Jalan Mochammad Toha No. 77 Bandung 40253
	Alamat Domisili sesuai KTP /	:	Jl. Unta Raya No. 16 Ciputat Timur, Tangerang Selatan
	<i>Domicile as stated in ID Card</i>		
	Nomor Telepon / Phone Number	:	
	Jabatan / Position	:	Direktur Operasi / Director Operation

Menyatakan bahwa:

State that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan konsolidasian PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan entitas anak;	1. <i>We are responsible for the preparation and the presentation of the consolidated financial statements of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) and Subsidiaries;</i>
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan entitas	2. <i>The consolidated financial statements PT Industri Telekomunikasi Indonesia</i>

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Kantor Pusat :
Jl. Moch. Toha No. 77
Bandung 40253
E-mail : info@inti.co.id

Pabrik :
Jl. Moch. Toha No. 225
Palasari - Bandung 40258

Kantor Cabang Jakarta :
Jl. Balitung 1 No.17 (Senopati)
Jakarta Selatan 12110

anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

(Persero) and Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan entitas anak telah disajikan secara lengkap dan benar;
- b. Laporan keuangan konsolidasian PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dan aplikasinya di dalam PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan entitas anak.

3. a. *All information in the consolidated financial statements PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) and Subsidiaries has been disclosed in a complete and truthful manner;*
- b. *The consolidated financial statements PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) and Subsidiaries do not contain any incorrect material information or facts, nor do they omit material information or facts; and*
4. *We are responsible for the internal control system and its application PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) and Subsidiaries.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. *This statement letter is made truthfully.*

Jakarta, 18 Maret/ March 18, 2024

Atas Nama dan Mewakili Direksi/ *For and on Behalf of the Board of Directors*



Edi Witjara
Direktur Utama / *President Director*

Tantang Yudha Santoso
Direktur Keuangan, SDM, Hukum
dan Manajemen Risiko/ *Director
Finance, Human Capital, Legal &
Risk Management*



Ahmad Taufik
Direktur Operasi/ *Director
Operation*

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Registered Public Accountants

Nomor/Number : 00686/2.1030/AU.1/04/1155-2/1/III/2024

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) and its Subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Registered Public Accountants is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: RMM No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)



Ketidakpastian Material yang Terkait dengan Kelangsungan Usaha

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Grup telah mencatat rugi bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp96 miliar, serta melaporkan saldo akumulasi kerugian dan defisiensi modal pada tanggal 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.807 miliar dan Rp716 miliar. Selain itu total liabilitas lancar pada tanggal 31 Desember 2023 melampaui total aset lancarnya sebesar Rp818 miliar. Kondisi tersebut, beserta hal-hal lainnya yang diungkapkan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas

Material Uncertainty Related to Going Concern

We draw attention to Note 42 in the consolidated financial statements, which indicates that the Group incurred a net loss of Rp96 billion during the year ended December 31, 2023, and reported accumulated losses and capital deficiency as of December 31, 2023 of Rp1,807 billion and Rp716 billion, respectively. In addition, the Group current liabilities exceeded its total assets by Rp818 billion. As stated in Note 42, these events or conditions, along with other matters as set forth in Note 42, indicate that a material uncertainty exist that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Other matter

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2023, and for the year then ended was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2023 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and other disclosures (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the above-mentioned consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the above-mentioned consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the above-mentioned consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audits of the above-mentioned consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all



berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas jika tersedia, dan dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dalam laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat yang akan dilakukan berdasarkan Standar Audit yang dikeluarkan Institut Akuntansi Publik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

material respects, in relation to the above-mentioned consolidated financial statements taken as a whole.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Entitas Induk terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal adalah tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan kesimpulan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal berdasarkan audit kami. Pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal tersebut kami laksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pernyataan Standar Audit No. 62 (Seksi 801) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern disampaikan secara terpisah kepada manajemen, masing-masing dalam laporan kami nomor R/163.AAT/eiz/2024 dan R/164.AAT/eiz/2024.

Report on the Compliance to Regulations and Internal Controls

We also have tested on the Parent Entity compliance with certain regulations and internal controls. The compliance with certain regulations and internal controls are the responsibility of the management. Our responsibility is to express a conclusion on the compliance with certain regulations and internal controls based on our audit. Testing of the compliance with certain regulations and internal controls that we performed were in accordance with State Financial Auditing Standards established by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia and Statement of Standards on Auditing No. 62 (Section 801) established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

The reports of compliance to laws and regulations and internal controls, are submitted separately to the management, in our reports number R/163.AAT/eiz/2024 and R/164.AAT/eiz/2024 respectively.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan**Eishennoraz**Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1155/
Public Accountant License Number: AP.1155

Jakarta, 18 Maret 2024/March 18, 2024



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**
As of December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023 Rp	2022*) Rp
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	4, 36, 38, 39	25,051,425,522	27,770,920,175
Piutang Usaha	5, 39		
Pihak Berelasi	36	138,905,154,308	59,689,185,028
Pihak Ketiga		46,256,781,933	13,439,480,669
Piutang Lain-lain	6, 39		
Pihak Berelasi	36	4,530,747,481	1,382,293,811
Pihak Ketiga		2,289,858,428	2,379,057,162
Persediaan	7	103,033,573,035	169,236,642,197
Pajak Dibayar di Muka	23.a	25,007,155,918	3,214,418,389
Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka	8	7,870,445,912	4,511,380,012
Jumlah Aset Lancar		352,945,142,537	281,623,377,443
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	9	769,221,812,529	768,508,608,712
Investasi pada Entitas Asosiasi	10	--	--
Investasi pada Instrumen Keuangan	11	--	--
Properti Investasi	12	58,804,090,680	58,819,363,483
Aset Takberwujud	13	14,131,884,994	13,720,495,713
Aset Pajak Tangguhan	23.d	62,491,621,811	61,406,284,251
Aset Lain-lain	15	239,549,860	189,660,093
Jumlah Aset Tidak Lancar		904,888,959,874	902,644,412,252
JUMLAH ASET		1,257,834,102,411	1,184,267,789,695
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	16, 38, 39		
Pihak Berelasi	36	194,908,032,714	189,252,920,625
Pihak Ketiga		131,384,421,923	115,366,085,369
Utang Lain-lain	17, 39		
Pihak Berelasi	36	35,669,858,006	24,775,477,322
Pihak Ketiga		48,686,612,687	50,053,445,726
Beban Akrua	18, 39	222,891,293,568	178,598,345,741
Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang:			
Utang Bank	19.a, 39	53,009,707,837	51,872,251,850
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank	20, 39	39,763,846,097	15,794,604,362
Liabilitas Sewa	22, 39	2,838,346,601	2,838,346,601
Utang Pajak	23.b	35,160,909,833	33,220,180,413
Provisi Masa Pemeliharaan	24	503,775,559	503,211,181
Pendapatan Diterima di Muka	25, 36	51,483,360,971	38,378,821,880
Liabilitas Keuangan Lancar Lainnya	21, 39	1,882,835,662	2,267,315,250
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		818,183,001,458	702,921,006,320
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas Jangka Panjang:			
Utang Bank	19.a, 39	809,961,386,216	809,961,386,216
Utang Bunga Bank	19.b, 39	205,163,023,258	161,209,868,151
Liabilitas Imbalan Kerja	26	141,089,404,667	135,677,425,048
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1,156,213,814,141	1,106,848,679,415
JUMLAH LIABILITAS		1,974,396,815,599	1,809,769,685,735
EKUITAS			
Modal Saham - Nilai Nominal			
Rp 1.000.000 per Saham			
Modal Dasar - 1.000.000 Saham			
Modal Ditempatkan dan			
Disetor Penuh 350.000 Saham	27	350,000,000,000	350,000,000,000
Tambahan Modal Disetor		1,229,185,189	1,229,185,189
Saldo Laba			
Ditentukan Penggunaannya		88,494,256,333	88,494,256,333
Belum Ditentukan Penggunaannya		(1,895,745,266,961)	(1,805,203,933,483)
Penghasilan Komprehensif Lain		744,589,598,803	744,870,293,362
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan		(711,432,226,636)	(620,610,198,599)
Kepentingan Non Pengendali		(5,130,486,552)	(4,891,697,441)
JUMLAH DEFISIENSI MODAL		(716,562,713,188)	(625,501,896,040)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1,257,834,102,411	1,184,267,789,695

*) Direklasifikasi, Catatan 41

ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and Cash Equivalents
Trade Receivables
Related Parties
Third Parties
Other Receivables
Related Parties
Third Parties
Inventories
Prepaid Taxes
Prepaid Expenses and Advances
Total Current Assets
NON-CURRENT ASSETS
Fixed Assets
Investment in Associates
Investment in Financial Instrument
Investment Properties
Intangible Assets
Deferred Tax Assets
Other Assets
Total Non-Current Assets
TOTAL ASSETS
LIABILITIES AND EQUITY
CURRENT LIABILITIES
Trade Payables
Related Parties
Third Parties
Other Payables
Related Parties
Third Parties
Accrued Expenses
Current Maturities of Long-Term Liabilities:
Bank Loans
Financial Institutions Loans
Lease Liabilities
Taxes Payable
Guarantee Period Provision
Unearned Revenue
Other Current Financial Liabilities
Total Current Liabilities
NON-CURRENT LIABILITIES
Non-Current Liabilities:
Bank Loans
Accrued Interest Payable
Employee Benefit Liabilities
Total Non-Current Liabilities
TOTAL LIABILITIES
EQUITY
Capital Stock - Par Value of
Rp 1,000,000 per Share
Authorized Capital - 1,000,000 Shares
The Issued and Fully Paid Capital -
350,000 Shares
Additional Paid in Capital
Retained Earnings
Appropriated
Unappropriated
Other Comprehensive Income
Total Equity Attributable to Owner of the Parent Entity
Non-Controlling Interests
TOTAL CAPITAL DEFICIENCY
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
*) Reclassification, Note 41

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements taken as a whole

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023 Rp	2022 Rp	
PENDAPATAN	28	503,679,774,500	309,029,101,512	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	29	(459,172,255,250)	(267,247,763,947)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO		44,507,519,250	41,781,337,565	GROSS PROFIT
Beban Penjualan	30	(24,509,113,607)	(13,019,483,040)	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	31	(60,402,690,975)	(48,960,767,585)	General and Administrative Expenses
Beban Pengembangan	32	(3,953,115,269)	(4,641,874,787)	Development Expenses
Pendapatan Lain-lain	33	11,030,488,586	14,722,968,415	Other Income
Beban Pajak Final		(2,914,885,852)	(5,842,169,225)	Final Tax Expense
Beban Lain-lain	34	(12,033,397,468)	(9,244,475,595)	Other Expenses
RUGI USAHA		(48,275,195,335)	(25,204,464,252)	LOSS FROM OPERATIONS
Beban Keuangan	35	(48,863,255,259)	(54,112,111,269)	Finance Expenses
RUGI SEBELUM PAJAK		(97,138,450,594)	(79,316,575,521)	LOSS BEFORE TAX
Manfaat (Beban) Pajak	23.c	858,328,005	(2,917,172,496)	Tax Benefit (Expenses)
RUGI TAHUN BERJALAN		(96,280,122,589)	(82,233,748,017)	LOSS FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				Item that Will Not be Reclassified
Kerugian Aktuarial atas Program Imbalan Pasti	26	(359,864,819)	(5,473,321,524)	Actuarial Loss of Defined Benefit Plan
Pajak Penghasilan Terkait	23.d	79,170,260	1,204,130,735	Related Income Tax
Jumlah Rugi Komprehensif Lain Setelah Pajak		(280,694,559)	(4,269,190,789)	Total Other Comprehensive Loss After Tax
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(96,560,817,148)	(86,502,938,806)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR
RUGI TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				LOSS FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		(90,541,333,478)	(81,744,263,226)	Owner of the Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali *)		(5,738,789,111)	(489,484,791)	Non-Controlling Interest *)
Jumlah		(96,280,122,589)	(82,233,748,017)	Total
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE LOSS ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		(90,822,028,037)	(86,013,454,015)	Owner of the Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali *)		(5,738,789,111)	(489,484,791)	Non-Controlling Interest *)
Jumlah		(96,560,817,148)	(86,502,938,806)	Total

*) Saldo 2023 termasuk kepentingan non pengendali PT ISTEK (Catatan 46)

*) 2023 balance includes non-controlling interests of PT ISTEK (Note 46)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CHANGES IN EQUITY**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owners of the Parent Entity									
	Saldo Laba/ Retained Earnings	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Kepentingan Non-Pengendali/ Non-Controlling Interest	Total Defisiensi Modal/ Capital Deficiency					
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid in Capital	Ditentukan Penggunaan/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaan/ Unappropriated	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus	Pengkukuran Kembali Program Imbalan Pasti/ Remeasurement of Defined Benefit Plan	Total			
Catatan/ Notes	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
SALDO PER 31 DESEMBER 2021	350.000.000.000	1.229.185.189	88.494.256.333	(1.723.459.670.257)	802.524.611.135	(53.385.126.984)	(534.596.744.584)	(4.402.212.650)	(538.998.957.234)
Rugi Tahun Berjalan	--	--	--	(81.744.263.226)	--	--	(81.744.263.226)	(489.484.791)	(82.233.748.017)
Rugi Komprehensif Lain	--	--	--	--	--	(4.269.190.789)	(4.269.190.789)	--	(4.269.190.789)
SALDO PER 31 DESEMBER 2022	350.000.000.000	1.229.185.189	88.494.256.333	(1.805.203.933.483)	802.524.611.135	(57.654.317.773)	(620.610.198.599)	(4.891.697.441)	(625.501.896.040)
Rugi Tahun Berjalan	--	--	--	(90.541.333.478)	--	--	(90.541.333.478)	(5.738.789.111)	(96.280.122.589)
Dampak Konsolidasi Entitas Anak	--	--	--	--	--	--	--	5.500.000.000	5.500.000.000
Rugi Komprehensif Lain	--	--	--	--	--	(280.694.559)	(280.694.559)	--	(280.694.559)
SALDO PER 31 DESEMBER 2023	350.000.000.000	1.229.185.189	88.494.256.333	(1.895.745.266.961)	802.524.611.135	(57.935.012.332)	(711.432.226.636)	(5.130.486.552)	(716.562.713.188)
									BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2021
									BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2022
									BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2023

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
financial statements taken as a whole



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023 Rp	2022*) Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari Pelanggan		431,007,550,218	393,158,594,149
Penerimaan Restitusi Pajak		3,057,876,821	5,370,130,704
Penerimaan Bunga Jasa Giro		343,933,462	274,167,180
Pembayaran kepada Pemasok dan Beban Operasional		(341,547,708,093)	(323,234,104,660)
Pembayaran kepada Karyawan		(43,448,253,913)	(51,460,960,592)
Pembayaran Beban Pendanaan		(3,956,869,940)	(1,102,402,004)
Pembayaran Pajak Penghasilan		(41,649,115,278)	(40,680,904,356)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		3,807,413,277	(17,675,479,579)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan Aset Tetap	9	--	(205,978,124)
Perolehan Aset Takberwujud	13	(142,357,095)	--
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(142,357,095)	(205,978,124)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank	20	1,250,000,000	21,844,993,055
Pembayaran Utang Bank	19	(143,673,000)	(1,105,178,759)
Pembayaran Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank	20	(7,104,620,389)	(14,175,256,529)
Liabilitas Keuangan Lancar Lainnya - Bersih		(384,479,588)	1,218,165,467
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(6,382,772,977)	7,782,723,234
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(2,717,716,795)	(10,098,734,469)
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs yang Belum Direalisasi		(1,777,858)	8,246,096
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		27,770,920,175	37,861,408,548
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	4	25,051,425,522	27,770,920,175

*) Direklasifikasi (Catatan 41)

Tambahan Informasi Terkait Arus Kas Disajikan di Catatan 40

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Cash Received from Customers
Cash Received from Tax Restitution
Interest Income from Current Account
Cash Paid to Suppliers and Operational Expenses
Cash Paid for Employees
Cash Paid for Financing Expenses
Corporate Income Tax Paid
Net Cash Flow Provided by (Used in) Operating Activities

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Purchase of Fixed Assets
Purchase of Intangible Assets
Net Cash Flow Used in Investing Activities

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Cash Received from Financial Institution Loan
Payment for Bank Loan
Payment for Financial Institution Loan
Other Current Financial Liabilities - Net
Net Cash Flow Provided by (Used in) Financing Activities

NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

Unrealized Gain (Loss) from Foreign Exchange

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT ENDING OF YEAR

*) Reclassified (Note 41)

Additional Information Related to Cash Flows are Presented in Note 40

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

1. Umum

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) ("Perusahaan") didirikan sebagai evolusi dari kerja sama PN Telekomunikasi dan Siemen AG pada tahun 1966. Kerja sama ini berlanjut pada pembentukan Pabrik Telepon dan Telegraf (PTT) sebagai Bagian dari LPP Postel pada tahun 1968. Pada tahun 1974, bagian ini dipisahkan dari LPP Postel menjadi sebuah Perseroan Terbatas yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Pendirian Perusahaan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.34 tahun 1974 tanggal 23 September 1974 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Telekomunikasi dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-1771/MK/IV/12/1974 tanggal 28 Desember 1974 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan. Anggaran Dasar Perusahaan dibuat oleh Akta Notaris Pengganti Warda Sungkar Alurmei, S.H., No.322 tanggal 30 Desember 1974 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.Y.A.5/273/10 tanggal 1 Agustus 1975.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No.036/MPBUMN/1988, Perusahaan dimasukkan ke dalam kelompok Industri Strategis. Pada tanggal 17 Januari 1998 dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.12 tahun 1998 yang menghilangkan peran departemen teknis dalam mengelola BUMN. Sebagai tindaklanjutnya, pembinaan INTI beralih ke Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN. Pada tahun yang sama BPIS beralih status menjadi sebuah *holding company* dengan nama PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero) atau PT BPIS dan sepuluh BUMN strategis di bawahnya menjadi anak perusahaan. Kondisi ini berakhir pada tahun 2002, dimana PT BPIS dibubarkan pada bulan Maret 2002 sesuai Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2002. Selanjutnya pengelolaan INTI beralih kembali ke Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Akta Notaris No.13 tanggal 8 April 2021 oleh Dr. Yurisa Martanti S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan pemberitahuannya telah diterima oleh

1. General

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) ("The Company") was established as the evolution of cooperation PN Telekomunikasi and Siemens AG in 1966. This cooperation continued in the formation of Factory Telephone and Telegraph (FTT) as part of the LPP Postel in 1968. In 1974, this section was separated from LPP Postel became a Limited Company under the auspices of the Directorate General of Post and Telecommunication. The establishment of the Company is based on the Indonesian Government Regulation No.34 of 1974 dated September 23, 1974 on Remittance of Capital of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in Telecommunication Industry Sector and Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No.Kep-1771/MK/IV/12/1974 dated December 28, 1974 regarding the Stipulation of Capital of the Company. The Articles of Association was made by Notarial Deed in Lieu of Warda Sungkar Alurmei, S.H., No.322 dated December 30, 1974 and approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia No.Y.A.5/273/10 dated August 1, 1975.

Based on the Decree of the Minister of State Owned Enterprise No.036/MPBUMN/1988, the Company was put into the Strategic Industry groups. At January 17, 1998 a Government Regulation of the Republic of Indonesia No.12 of 1998 was issued which eliminates the role of the technical department in managing SOEs. As a follow up, INTI's monitoring was switched to the Ministry of State Owned Enterprises Reform. In the same year BPIS switch its status to a holding company under the name of PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero) PT BPIS and ten strategic SOEs under its monitoring became the subsidiaries. This condition ended in 2002, where PT BPIS dissolved in March 2002 as the Government Regulation No.52 Year 2002. Furthermore INTI management reverts back to the Ministry of State Owned Enterprises Reform.

The Company's articles of Association have been amended several times, most recently by Deed No.13 dated April 8, 2021 of Dr. Yurisa Martanti S.H., M.H., Notary in Jakarta and its notification had been received by the Ministry of



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No.AHU-0022218.AH.01.02
tanggal 13 April 2021.

*Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia No.AHU-0022218.AH.01.02 dated
April 13, 2021.*

Perusahaan berkedudukan di Jawa Barat
dengan kantor pusat berkedudukan di Jl. Moch.
Toha No.77, Bandung, Jawa Barat dan memulai
kegiatan komersialnya pada tanggal
30 Desember 1974.

*The Company is domiciled in West Java, with its
head office located in Jl. Moch. Toha No.77,
Bandung, West Java and commenced its
commercial operations on December 30, 1974.*

Jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember
2023 dan 2022 masing-masing sebanyak 206
dan 275 orang (tidak diaudit).

*The number of employees as of December 31,
2023 and 2022 were 206 and 275, respectively
(unaudited).*

Berdasarkan keputusan Menteri Badan Usaha
Milik Negara selaku rapat umum pemegang
saham Perusahaan perseroan (persero)
PT Industri Telekomunikasi Indonesia tentang
pemberhentian, perubahan nomenklatur
jabatan, dan pengangkatan anggota-anggota
Direksi perusahaan PT Industri Telekomunikasi
Indonesia No.SK-256/MBU/11/2022 tanggal
14 November 2022, keputusan ini telah
diaktakan melalui Akta Notaris No. 12 oleh
Notaris H. Iwan Yusuf Anwari S.H., tanggal
16 November 2022 dan telah terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No.AHU-AH.01.09-0077161
Tahun 2022 tanggal 17 November 2022.
Susunan dewan Komisaris dan Direksi
Perusahaan adalah sebagai berikut:

*Based on the decision of the Minister of State-
Owned Enterprises as the general meeting of
shareholders of a limited liability Company
(persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia
regarding dismissal, change in position
nomenclature, and appointment of members of
the board of directors of the Company
PT Industri Telekomunikasi Indonesia
No.SK-256/MBU/11/2022 dated November 14,
2022, this decision has been notarized through
Notarial Deed No. 12 dated November 16, 2022
by Notary H. Iwan Yusuf Anwari S.H., and has
been registered with the Ministry of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia
No.AHU-AH.01.09-0077161 Year 2022 dated
November 17, 2022. The composition of the
Company's Board of Directors and
Commissioners are as follows:*

Dewan komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris

Unggul Priyanto
Rahmadi Murwanto
Trisno Hendradi
Yanuar Rokhmad Madyantoro

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur Keuangan, SDM, Hukum
dan Manajemen Risiko
Direktur Operasi

Edi Witjara
Tantang Yudha Santoso
Ahmad Taufik

Board of Directors

President Director
Finance, HR, Legal, and
Risk Management Director
Operations Director

Entitas Anak

PT Inti Pindad Mitra Sejati ("IPMS")

IPMS didirikan berdasarkan akta Notaris No.31
tanggal 26 Juli 2004 dari Nining
Puspitaningtyas, S.H., yang telah mengalami
beberapa kali perubahan dengan perubahan
terakhir melalui Akta Notaris No.20 tanggal
21 Maret 2005 yang telah disahkan dengan
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak

Subsidiaries

PT Inti Pindad Mitra Sejati ("IPMS")

*IPMS was established based on Notarial Deed
No.31 dated July 26, 2004 from Nining
Puspitaningtyas, S.H., which have been
changed several times with recent change by
Notarial Deed No.20 dated March 21, 2005
which have been authorized by the decision of
the Ministry of Justice and Human Rights of the*

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-21806HT.01.01.TH.2005 tanggal 5 Agustus 2005, Tambahan Berita - Negara Republik Indonesia No.23 tanggal 20 Maret 2007. Pengumuman dalam Berita - Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (1) Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Anggaran Dasar IPMS telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.195, tanggal 25 Juni 2013 oleh Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0072491.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 29 Juni 2013, dengan komposisi pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Modal Saham/ Capital Stock	Lembar Saham/ Shares	Nilai Nominal/ A Par Value (Rp)	Nilai Modal Saham/ Value of Shares (Rp)	%
PT Inti (Persero)	16,800,582	1,000	16,800,582,000	86.15426%
PT Pindad (Persero)	2,700,000	1,000	2,700,000,000	13.84574%
Jumlah/ Total	19,500,582	1,000	19,500,582,000	100.00000%

PT Inti Konten Indonesia ("INTENS")

INTENS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.52 tanggal 11 Mei 2010, dari Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan dengan surat putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-24412.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 14 Mei 2010. Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir yaitu Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham INTENS No.7 oleh Notaris Rasman, S.H., tanggal 14 Januari 2016 yang telah disahkan dengan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0002758.

Modal Saham/ Capital Stock	Lembar Saham/ Shares	Nilai Nominal/ A Par Value (Rp)	Nilai Modal Saham/ Value of Shares (Rp)	%
PT Inti (Persero)	9,999,999	1,000	9,999,999,000	99.99999%
PT Widya Bhakti Inti	1	1,000	1,000	0.00001%
Jumlah/ Total	10,000,000	1,000	10,000,000,000	100.00000%

Perusahaan dan entitas anak selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

Republic of Indonesia No.C-21806 HT.01.01.TH.2005 dated August 5, 2005, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia No.23 dated March 20, 2007. Announcement in the the State Gazette of the Republic of Indonesia is in accordance with the article 22 (1) Law No.1 year 1995 on Limited Liability Company.

The Articles of Association of IPMS have been changed several times, among others by the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions No. 195, dated June 25, 2013 of Notary Nining Puspitaningtyas, S.H., and has been registered at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-0072491.AH.01.09. Tahun 2013 dated June 29, 2013, with the composition as of December 31, 2023 and 2022 as follows:

PT Inti Konten Indonesia ("INTENS")

INTENS was established based on the Incorporation Deed No.52 dated May 11, 2010, by the Notary Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn. The Incorporation Deed has been approved through the decision letter of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-24412.AH.01.01.Tahun 2010, dated May 14, 2010. The articles association of INTENS has been changes several times, recently based on the Declaration Deed of Shareholder INTENS No.7 by Notary Rasman, S.H., dated January 14, 2016 which has been approved through the decision letter of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-AH.01.03-0002758.

The Company and subsidiaries are collectively referred to as "the Group".

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

2.b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2.c. Standar Akuntansi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut amendemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;

2. Material Accounting Policies Information

2.a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI).

2.b. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. The basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

2.c. Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are amendment and improvements to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2023, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal; dan
- Revisi PSAK 107: Akuntansi Ijarah.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anaknya seperti disebutkan pada Catatan 1.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan, yakni Perusahaan terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Perusahaan memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Perusahaan mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal kehilangan pengendalian.

- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as a Current or Non-Current;
- Amendment to PSAK 16: Fixed Assets related to Proceeds before Intended Use;
- Amendments PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding Definition of Accounting Estimates;
- Amendments PSAK 46: Income Tax regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and
- Revised PSAK 107: Accounting for Ijarah.

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial year.

2.d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and its subsidiaries as described in Note 1.

A subsidiary is an entity controlled by the Company, which the Company is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (i.e., substantive rights) are considered when assessing whether the Company controls another entity.

The Group's consolidated financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its subsidiaries are directly and indirectly controlled. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until that loses control.



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban dan arus kas dalam kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non pengendali);
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transaction between entities of the group are eliminated in full.

The Group attributed the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (which transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration received or paid is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

If the Group loses control, the Group:

- Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- Recognizes the fair value of the consideration received, (if any) from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;*
- Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

- e. Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan
- f. Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

2.e. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

- e. Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAK's, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary; and
- f. Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.

2.e. Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

The Group's financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets at fair value through profit or loss.

i. Financial Assets Measured at Amortized Costs

Financial assets are measured at amortized costs if these conditions are met:

- The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak material jumlahnya atau tidak sering.

ii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be immaterial in value or infrequent in nature.

ii. Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")

The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets; and*
- *The contractual term of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.*

The financial assets are measured at fair value, where the changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment losses, and foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- Liabilitas keuangan yang timbul Ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:

iii. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or fair value through other comprehensive income FVTOCI. Hence, these are measured at fair value through profit or loss FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designate an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

- Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.
- Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.
- Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

- i. Jumlah penyisihan kerugian; dan
- ii. Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.
- Imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakusasi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontinjensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau
- Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi

- i. The amount of the loss allowance; and
- ii. The amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of PSAK 72.
- Contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognised in profit or loss.

The Group may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liabilities as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

- Eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as "an accounting mismatch") that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or
- A group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Group's key management personnel.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI, piutang sewa, aset kontrak atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan. Aset keuangan yang berupa investasi pada instrumen ekuitas tidak dilakukan penurunan nilai.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kredatnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu

are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Impairment of Financial Assets

The Group recognized expected credit loss for its financial assets measured at amortized costs and financial assets measured at FVTOCI, lease receivables, contract assets or loan commitments and financial guarantee contracts. Financial asset in form of investment in equity instrument is not impaired.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then 12 months expected credit loss is recognized.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

The expected credit loss of financial instruments are conducted by a means which reflect:

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

- i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. Nilai waktu uang; dan
- iii. Informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "investment grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

- i. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;
- ii. Time value of money; and
- iii. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with "investment grade" according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

Derecognition of Financial Assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when they transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continue to control the transferred asset, the Group recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts they may have to pay. If the Group retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continue to recognize the financial asset and also recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the assets carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is reclassified to profit or loss.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

On derecognition of a financial asset other than in its entirety (e.g., when the Group retain an option to repurchase part of a transferred asset), the Group allocate the previous carrying amount of the financial asset between the part they continue to recognize under continuing involvement and the part they no longer recognize on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Derecognition of Financial Liabilities

The Group derecognizes financial liabilities, if and only if the Group obligations are discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the considerations paid and payable is recognized in profit or loss.

Reklasifikasi

Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

Reclassification

The Group reclassifies a financial asset if and only if the Group's business model objective for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Grup menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required the Group to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. The Group does not restate previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi. Pada saat Grup melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTPL, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTOCI, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost.

This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

When the Group reclassifies its financial asset out of the FVTPL into FVTOCI, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into FVTPL, the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of

kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- i. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- ii. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2); dan
- iii. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- i. *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*
- ii. *Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2); and*
- iii. *Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.



Perpindahan antara level hierarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

2.f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.f. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (current account) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

2.g. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

2.g. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

The amount of any write-down of inventories to net realisable value and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realisable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognized as an expense in the period in which the reversal occurs.

2.h. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

2.h. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the useful life of each expense on a straight-line method.

2.i. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

2.i. Investments in Associates

Associates are entities which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies (significant influence).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat

Investment in associates accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost and the carrying amount is

ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

increased or decreased to recognize the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the investee is recognized in profit or loss. Distributions received from an investee reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

The Group discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

- Jika investasi menjadi entitas anak, Grup mencatat investasinya sesuai dengan PSAK 22 dan PSAK 65;
- Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar; dan
- Ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

- If the investment becomes a subsidiary, the Group account for its investment in accordance with PSAK 22 and PSAK 65;*
- If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measures the retained interest at fair value; and*
- When the Group discontinue the use of the equity method, the Group account for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.*

2.j. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

2.j. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity and the cost of the investment property can be measured reliably.



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, properti investasi diukur sebesar nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Grup mengalihkan properti ke, atau dari properti investasi jika, dan hanya jika, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan, mencakup:

- Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;
- Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
- Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk dijual, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi; dan
- Insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

2.k. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diperlukan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi

Investment properties are measured initially at its cost, including transaction costs. Subsequent to initial recognition, investment properties are measured at fair value. Gain or loss arises from a change in the fair value of investment property are recognized in profit or loss, in the period in which they arise.

Maintenance and repairment costs are charged to profit or loss as incurred, while renewals and betterments are capitalized.

The Group shall transfer a property, to, or from investment property when, and only when, there the property meets, or ceases to meet, the definition of investment property and there is evidence of the change in use, include:

- *Commencement of owner-occupation, or of development with a view to owner occupation, for a transfer from investment property to owner-occupied property;*
- *Commencement of development with a view to sale, for a transfer from investment property to inventories;*
- *End of owner-occupation, for a transfer from owner-occupied property to investment property; and*
- *Inception of an operating lease to another party, for a transfer from inventories to investment property.*

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

2.k. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on

aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tetap berupa tanah, setelah pengakuan awal diukur dengan menggunakan model revaluasi. Nilai wajar tanah biasanya ditentukan melalui penilaian berdasarkan bukti pasar yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional.

Penyusutan diakui dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*). Tanah diakui sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Estimasi masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

After initial recognition, fixed assets, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Fixed assets comprised of land, after the initial recognition are measured using the revaluation model. The fair value of land is usually determined through an assessment based on market evidence conducted by a qualified professional appraiser.

Depreciation is recognized using the straight-line method. Land is recognized at acquisition cost and not depreciated. Estimated useful lives of the assets are as follows:

Golongan	Masa Manfaat/ Useful Life	Categories
Bangunan	20-25 Tahun/ Years	Buildings
Mesin dan Peralatan	10-16 Tahun/ Years	Machinery dan Equipment
Alat Ukur dan Perkakas Kerja	4-5 Tahun/ Years	Measuring Tools and Instruments of Labor
Inventaris Kantor dan Gudang	3-5 Tahun/ Years	Office and Warehouse Inventory
Alat Olah Data	4-5 Tahun/ Years	Data Processing Equipment
Kendaraan	4 Tahun/ Years	Vehicles
Tower	Maksimal Selama Sewa atau Kontrak/ Maximum During Lease or Contract	Tower

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset Dalam Penyelesaian" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset dalam penyelesaian. Biaya perolehan aset dalam penyelesaian tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Self-constructed fixed assets are presented as part of the property and equipment under "Assets Under Construction" and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of construction in progress. Cost construction in progress shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

2.1. Sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu, Grup menilai apakah selama periode penggunaan, Grup memiliki dua hal berikut:

- a. Hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- b. Hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, yaitu hanya jika:
 - (i) Grup memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan; atau
 - (ii) Keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya

dan:

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

At the end of each reporting period, the Group made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

2.1. Lease

At inception of a contract, the Group shall assess whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time, the Company shall assess whether, throughout the period of use, the Group has both of the following:

- a. *The right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the identified asset; and*
- b. *The right to direct the use of the identified asset, only if either:*
 - (i) *The Group has the right to direct how and for what purpose the asset is used throughout the period of use; or*
 - (ii) *The relevant decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined and:*

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

- Grup memiliki hak mengoperasikan aset (atau mengarahkan pihak lain untuk mengoperasikan aset dengan cara yang telah ditentukan) selama periode penggunaan, tanpa pemasok memiliki hak untuk mengubah instruksi operasi tersebut; atau
- Grup mendesain aset (atau aspek tertentu dari aset) dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Grup Sebagai Penyewa (Lessee)

Grup menerapkan satu pendekatan pengakuan dan pengukuran bagi seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang merupakan hak untuk menggunakan aset pendasar.

Grup mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset tersedia untuk digunakan). Aset hak guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung yang timbul di awal, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama periode yang lebih pendek antara sewa dan estimasi masa manfaat aset.

Jika kepemilikan aset sewa beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya perolehan mencerminkan pelaksanaan opsi beli, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset.

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dibawah jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga mencakup

- The Group has the right to operate the asset (or to direct others to operate the asset in a manner that it determines) throughout the period of use, without the supplier having the right to change those operating instructions; or
- The Group designed the asset (or specific aspects of the asset) in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used throughout the period of use.

The Group as Lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

The Group recognizes right of use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date underlying assets is available for use). Right of use assets are measure at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right of use assets includes the amount of lease liabilities recognized, intital direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right of use assets are depreciated on a straght-line basis over the shorter period of the lease term and the estimated useful lives of the assets.

If ownership of the leased assets transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects to exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the assets.

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in-substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

harga pelaksanaan dari opsi beli yang cukup pasti akan dilaksanakan oleh Perusahaan, dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan Perusahaan melaksanakan opsi untuk menghentikan sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban (kecuali terjadi untuk menghasilkan persediaan) pada periode dimana peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal dimulainya sewa karena tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat segera ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk merefleksikan penambahan bunga dan mengurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa (misalnya, perubahan pembayaran masa depan akibat perubahan indeks atau kurs yang digunakan untuk pembayaran sewa) atau perubahan penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak guna telah berkurang menjadi nol.

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa bangunan (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dari tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi beli). Hal ini juga berlaku untuk pengecualian pengakuan sewa aset bernilai rendah untuk sewa bangunan yang dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan

the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the Company exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses (unless they are incurred to produce inventories) in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, The Group uses its incremental borrowing rate at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases of buildings and infrastructures (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies the lease of low-values assets recognition exemption to leases of buildings and infrastructures that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if both:

- The modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- The consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and

penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- Mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- Menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- Mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal efektif modifikasi;
- Menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- Membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- Remeasure and allocate the consideration in the modified contract;
- Determine the lease term of the modified lease;
- Remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as The Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;
- Decrease the carrying amount of the right-of-use-asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognize in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and
- Make a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.

Grup Sebagai Pemberi Sewa (Lessor)

Grup mengakui aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa operasi. Sewa kontingen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

The Group as Lessor

The Group presents assets subject to operating leases in the statement of financial position according to the nature of the asset. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as an expense over the lease term on the same basis as the lease income. Contingent rents, if any, are recognized as income in the period incurred. Lease income from operating leases is recognized as revenue on a straight-line basis over the lease term.

2.m. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

2.m. Intangible Assets

Intangible assets is measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible assets is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible assets is assessed to be either finite or indefinite.



Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus.

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

Intangible assets with finite useful life

Intangible assets with finite life is amortized over the economic useful life by using a straight-line method.

Amortization is calculated so as to write off the cost of the asset, less its estimated residual value, over its useful economic life.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at each financial year-end.

2.n. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

2.n. Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Capitalization of borrowing costs commences when the Group undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

2.o. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah

2.o. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- Pengakuan awal goodwill; atau
- Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak); dan
- pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba

and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Current tax expense is computed using the tax rates in effect at the financial reporting date and determined based on the estimated taxable income for the current year. Management periodically evaluates positions reported in Annual Tax Returns (SPT) with respect to situations where applicable tax regulations require interpretation. If necessary, management determines provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Tax benefits related to tax loss that can be carried back to recover current tax of prior periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- The initial recognition of goodwill; or
- The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss); and
- at the time of the transaction, does not give rise to equal taxable and deductible temporary differences.

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak) dan pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss) and at the time of the transaction, does not give rise to equal taxable and deductible temporary differences.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Deferred tax assets and liabilities are calculated based on the rates that will be charged in the period when the asset is realized or the liability is settled, based on the tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of the financial reporting period. The tax effects relating to provision for and / or recovery of all temporary differences during the year, including the effect of changes in tax rates, are credited or charged in current operations, for transactions that have previously been charged or credited directly to equity.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a. Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. Entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- a. Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b. Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2.p. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021.

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris

- a. The Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and
- b. The deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:
 - i. The same taxable entity; or
 - ii. Different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

The Group offsets current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- a. Has legally enforceable right to set off the recognized amounts; and
- b. Intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

2.p. Employee Benefits

Short-Term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short-term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Law No. 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation Becoming Law, Government Regulation No. 35 of 2021.

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

Program Masa Persiapan Pensiun

Grup memberikan imbalan bagi karyawan tetap yang memasuki usia pensiun. Imbalan ini biasanya diberikan kepada pekerja yang tetap bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum. Biaya yang diharapkan timbul atas imbalan ini diakui selama masa kerja dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Kewajiban ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen yang memenuhi syarat.

Imbalan Pascakerja Jangka Panjang Lainnya

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Pengukuran liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya konsisten dengan

assets which calculated by independent actuaries using the *Projected Unit Credit* method. Present value benefit obligation is determined by discounting the benefit.

The Group accounts not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Termination Benefits

The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and
- When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

Retirement Preparation Advance Program

The Group provide benefits to their permanent employees who at retirement age. The entitlement to these benefits is usually conditional on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment using projected unit credit method. These obligations are valued annually by independent qualified actuaries.

Other Long Term Post-Employment Benefits

The Group provides other long-term employee benefits. The measurement of other long-term employee benefit liabilities is consistent with the

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

pengukuran liabilitas imbalan pascakerja kecuali untuk keuntungan/kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya diakui pada laba atau rugi.

measurement of post employment benefit liabilities except for actuarial gain/loss in other long-term employee benefit liability is recognized on profit or loss.

2.q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak;
 - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan;
 - Kontrak memiliki substansi komersial.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Suatu waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Suatu kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu kecuali jika memenuhi salah satu kriteria berikut, dalam hal ini dipenuhi dari sepanjang waktu:

2.q. Revenue and Expense Recognition

In determining revenue recognition, the Group perform analysis transaction through the following five steps of assessment:

1. Identify contracts with customers with certain criteria as follows:
 - The contract has been agreed by the parties involved in the contract;
 - The Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred;
 - The contract has commercial substance.
2. Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer.
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives, luxury sales tax, value added tax and export duty, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract.
5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

A performance obligation is satisfied at a point in time unless it meets one of the following criteria, in which case it is satisfied over time:

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

- Pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh pelaksanaan Grup sebagaimana yang dilakukan Grup;
- Pelaksanaan Grup menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset itu dibuat atau ditingkatkan; dan
- Pelaksanaan Grup tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif untuk Grup dan Grup memiliki hak yang dapat diberlakukan atas pembayaran untuk pelaksanaan yang diselesaikan hingga saat ini.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

Jika adanya kemungkinan bahwa kontrak akan menghasilkan kerugian pada saat penyelesaian kontrak, penyisihan atas kerugian yang diperkirakan hingga penyelesaian kontrak diakui sebagai penyisihan kini pada laporan keuangan konsolidasian. Kerugian diakui secara penuh ketika dapat diukur secara andal, terlepas dari tingkat penyelesaian.

Biaya kontrak yang tidak mungkin dipulihkan diakui segera sebagai beban tahun berjalan pada laba rugi.

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan. Pendapatan jasa diakui pada saat pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat dari jasa tersebut.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual), kecuali merupakan aset yang terkait dengan aktivitas kontrak masa depan.

2.r. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Grup adalah Rupiah.

- The customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Group's performance as the Group performs;
- The Group's performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced; and
- The Group's performance does not create an asset with an alternative use to the Group and the Group has an enforceable right to payment for performance completed to date.

Contract revenue comprises the initial amount of revenue that agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable that it will result in revenue and can be reliably measured.

If it is regarded as probable that a contract will generate a loss on completion, a provision for expected losses to completion is recognized as a current provision in the consolidated financial statements. The loss is provided for in full as soon as it is can be reliably measured, irrespective of the completion rate.

Contract costs that are not probable of being recovered are recognized as current year expenses in profit or loss.

Revenue from the sale of goods is recognized when the control of goods has been transferred to the customer. Revenue from the rendering of services is recognized when the customer has received and consumed benefit from the services.

Expenses are recognized as incurred (accrual basis), unless they create an asset related to future contract activity.

2.r. Transactions in Foreign Currency

In preparing financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The Group's functional currency is Rupiah.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, which is middle rate of Bank of Indonesia at December 31, 2023 and 2022 as follows:

	2023 Rp	2022 Rp	
1 Dolar Amerika Serikat	15,416	15,731	1 United States Dollar

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

2.s. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah

2.s. Transactions with Related Parties

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

- entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai entitas induk utama.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga diungkapkan pada Catatan 36.

sponsoring employers are also related to the reporting entity;

- vi. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);*
- vii. *A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or*
- viii. *The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.*

Government related entity can be an entity which controlled or significantly influenced by the Local Government that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Regional Government of DKI Jakarta as ultimate parent entity.

All significant transactions and balances with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in Note 36.

3. Pertimbangan Akuntansi Kritis dan Sumber Ketidakpastian Estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan

3. Critical Accounting Judgments and Source of Estimation Uncertainty

The preparation of the Group consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

i. Accounting Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas. Nilai tercatat aset tetap dan aset takberwujud disajikan dalam Catatan 9 dan 13.

Estimasi Penyisihan Persediaan Usang

Penyisihan persediaan usang diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan diungkapkan dalam Catatan 7.

Estimasi Imbalan Pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja dan beban pensiun yang masih harus dibayar tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pascakerja dan beban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam

its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Estimated Useful Lives of Fixed Assets and Intangible Assets

The Group reviews periodically the estimated useful lives of fixed assets and intangible assets based on factors such as technical specification and future technological developments. Future results of operations could be materially affected by changes in these estimates brought about by changes in the factors mentioned. Carrying amounts of fixed assets and intangible assets are disclosed in Notes 9 and 13.

Estimated Inventory Obsolete

Provision for obsolete is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The allowance is reevaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. The carrying amounts of inventories are disclosed in Note 7.

Estimated Post-Employment Benefits

The present value of post-employment benefits obligations and accrued pension expenses depends on several factors that are determined by actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine net pension cost (income) include the discount rate and salary increase rate. Changes in these assumptions will affect the carrying amount of post-employment benefits and pension expenses.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period, this is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the obligations. In



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pascakerja dan cadangan dana pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi mengenai asumsi dan jumlah liabilitas dan beban imbalan pascakerja serta dana pensiun diungkapkan pada Catatan 26.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan pengurangan biaya tertentu ketika mengestimasi penyisihan pajak penghasilan Grup. Terdapat transaksi dan perhitungan yang memungkinkan penentuan pajak akhir menjadi tidak pasti selama kegiatan usaha normal. Dimana perhitungan pajak akhir dari hal-hal tersebut berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada penetapan pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang ditangguhkan dalam periode penentuan pajak tersebut.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari kerugian pajak yang dapat dikompensasikan kembali, penyisihan modal dan perbedaan temporer diakui hanya ketika hal-hal tersebut diperhitungkan untuk dapat dipulihkan, yang tergantung pada pembentukan laba kena pajak yang mencukupi di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan tergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini tergantung pada estimasi produksi, jumlah penjualan barang dan jasa, harga komoditas, biaya operasi, belanja modal, dividen dan transaksi manajemen modal lainnya di masa depan. Nilai tercatat aset pajak tangguhan telah diungkapkan pada Catatan 23.d.

Rugi Penurunan Nilai Piutang

Pada tanggal pelaporan Grup menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur

determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related obligation.

Key assumptions for post-employment benefit obligations and other pension fund reserves are based in part on current market conditions. Information regarding the assumptions and total liabilities and post-employment benefits expenses and include pension funds are disclosed in Note 26.

Income Tax

Judgements and assumptions are required in determining the deduction of certain costs when estimating the Groups income tax allowances. There are transactions and calculations that allow the determination of the final tax to be uncertain during the normal course of business. Where the final tax calculation of these matters differs from the amount previously recorded, the difference will have an impact on the determination of income tax and with holding tax withheld during the tax determination period.

Deferred tax assets, including those arising from recoverable tax losses, capital allowance, temporary differences are recognized only when they are calculated to be recoverable, depending on the formation of sufficient future taxable profit. The assumption of forming future taxable income depends on management's estimate of future cash flows. This depends on estimated future production, total sales of goods and services, commodity prices, operating costs, capital expenditures, dividends and other capital management transactions. The carrying value of deferred tax assets has been disclosed in Note 23.d.

Impairment Loss on Receivables

At the reporting date, the Group assesses whether the credit risk on financial instruments has increased significantly since initial recognition. When making this assessment, the Company considers changes in default risk that occurs over the

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

instrumen keuangan, bukan perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya.

Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah jika instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan kondisi ekonomi dan bisnis yang memburuk dalam jangka waktu panjang, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

Nilai tercatat piutang usaha dan piutang lain-lain diungkapkan dalam Catatan 5, 6 dan 39.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar. Pengungkapan lebih lanjut tentang nilai wajar terdapat dalam Catatan 39.

ii. Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan kritis berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

life of the financial instruments, not changes in the amount of expected credit losses. In making this assessment, the Company compares the risk of default at the reporting date with the risk of default at initial recognition and considers reasonable and supportable information that is available free of charge.

The credit risk of a financial instrument is considered low if the financial instrument has a low risk of default, the borrower has strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and economic and business conditions deteriorate in the long term, but not always, deteriorate capacity the borrower to meet its contractual cash flow obligations.

The carrying amounts of trade receivables and other receivables are disclosed in Notes 5, 6 and 39.

Fair Value of Financial Instruments

Where the fair value of financial assets and financial liabilities recorded on the statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, management judgment is required to establish fair values. The judgments include considerations of liquidity and model inputs such as volatility for long term derivatives and discount rates, prepayment rates, and default rate assumptions. The other disclosures on fair value are presented in Note 39.

ii. Critical Judgements in Applying the Accounting Policies

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements.



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2.e dan 39.

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Notes 2.e and 39.

4. Kas dan Setara Kas

4. Cash and Cash Equivalents

	2023 Rp	2022 Rp
Kas/ Cash on Hand		
Rupiah	183,592,413	155,163,044
Bank/ Cash in Banks		
Rupiah		
Pihak Berelasi/ Related Parties (Catatan/ Note 36):		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12,111,971,849	7,239,183,527
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10,149,205,199	19,911,724,992
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	402,736,957	357,095,111
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1,239,647	654,647
Pihak Ketiga/ Third Parties :		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1,012,001,001	890,000
PT Bank Mega Tbk	5,866,828	5,866,828
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi	5,804,166	5,804,166
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	3,150,000	3,450,000
PT Bank KB Bukopin Tbk	1,670,000	--
PT Bank KB Bukopin Syariah	1,266,186	1,618,756
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	620,000	860,000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	--	266,798
Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar		
Pihak Berelasi/ Related Parties (Catatan/ Note 36):		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,037,689,120	21,545,492
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	40,573,525	41,353,495
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	24,038,631	25,443,319
Sub Jumlah/ Sub Total	<u>24,797,833,109</u>	<u>27,615,757,131</u>
Deposito Berjangka/ Time Deposit		
Rupiah		
Pihak Berelasi/ Related Parties (Catatan/ Note 36):		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	70,000,000	--
Sub Jumlah/ Sub Total	<u>70,000,000</u>	<u>--</u>
Jumlah/ Total	<u>25,051,425,522</u>	<u>27,770,920,175</u>
Deposito Berjangka/ Time Deposit		
Tingkat Bunga Kontraktual/ Contractual Interest Rate		
Rupiah	2,5%	--
Jangka Waktu/ Time Period	1 bulan/ month	--

Tidak ada saldo kas dan bank yang digunakan sebagai jaminan.

There are no cash on hand and in banks used as collateral.

5. Piutang Usaha

5. Trade Receivables

a. Berdasarkan Pelanggan

a. By Customers

	2023 Rp	2022 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties (Catatan/ Note 36)	143,161,273,349	63,945,304,069
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Less: Allowance for Impairment Losses	(4,256,119,041)	(4,256,119,041)
Sub Jumlah Pihak Berelasi/ Sub Total Related Parties	138,905,154,308	59,689,185,028
Pihak Ketiga/ Third Parties	264,474,840,293	229,946,332,613
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Less: Allowance for Impairment Losses	(218,218,058,360)	(216,506,851,944)
Sub Jumlah Pihak Ketiga/ Sub Total Third Parties	46,256,781,933	13,439,480,669
Jumlah - Bersih/ Total - Net	185,161,936,241	73,128,665,697

b. Berdasarkan Umur

b. By Aging

	2023 Rp	2022 Rp	
Belum Jatuh Tempo	--	--	Not yet Due
6 - 12 bulan	177,682,078,579	42,198,648,369	6 - 12 months
12 - 24 bulan	6,652,642,418	29,314,163,364	12 - 24 months
24 - 36 bulan	5,193,618,717	3,383,509,645	24 - 36 months
Lebih dari 36 bulan	218,107,773,928	218,995,315,304	More than 36 months
Sub Jumlah	407,636,113,642	293,891,636,682	Sub Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(222,474,177,401)	(220,762,970,985)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah	185,161,936,241	73,128,665,697	Total

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	2023 Rp	2022 Rp	
Saldo Awal	220,762,970,985	221,580,116,430	Beginning Balance
Penambahan (Catatan 34)	2,026,946,146	351,219,257	Addition (Note 34)
Pemulihan (Catatan 33)	(315,739,730)	(1,168,364,702)	Recovery (Note 33)
Saldo Akhir	222,474,177,401	220,762,970,985	Ending Balance

Berdasarkan penilaian status dan kualitas kredit dari piutang, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut cukup.

Based on its assessment of the status and credit quality of the receivables, management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

Berdasarkan Akta No. 01 tanggal 14 Desember 2020, Tan Heng Lok memberikan jaminan kepada Perusahaan atas sisa hutangnya senilai Rp110.624.829.747 berupa jaminan saham yang tidak dapat ditarik kembali untuk menjual saham pada PT Sejahtera Bintang Abadi Textile senilai Rp81.000.000.000.

Based on Deed No. 01 December 14, 2020, Tan Heng Lok provided guarantees to the Company for the remaining debt of Rp110,624,829,747 in the form of an irrevocable share guarantee to sell the shares in PT Sejahtera Bintang Abadi Textile of Rp81,000,000,000.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Semua piutang usaha dalam mata uang Rupiah.

All trade receivables are denominated in Rupiah currency.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang usaha Grup digunakan sebagai jaminan untuk utang bank (Catatan 19).

As of December 31, 2023 and 2022, the Group's trade receivables are used as collateral for bank loan (Note 19).

6. Piutang Lain-lain

6. Other Receivables

	2023 Rp	2022 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties (Catatan/ Note 36)	4,530,747,481	1,382,293,811
Pihak Ketiga/ Third Parties	32,851,624,425	32,940,823,159
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai <i>Less: Allowance for Impairment Losses</i>	(30,561,765,997)	(30,561,765,997)
Sub Jumlah Pihak Ketiga/ Sub Total Third Parties	2,289,858,428	2,379,057,162
Jumlah/ Total	6,820,605,909	3,761,350,973

Berdasarkan penilaian status dan kualitas kredit dari piutang, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut cukup.

Based on its assessment of the status and credit quality of the receivables, management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang lain-lain Grup digunakan sebagai jaminan untuk utang bank (Catatan 19).

As of December 31, 2023 and 2022, the Group's other receivables are used as collateral for bank loan (Note 19).

7. Persediaan

7. Inventories

	2023 Rp	2022 Rp	
Barang Jadi	81,932,388,006	94,475,672,083	Finished Goods
Persediaan dalam Penyelesaian	10,491,890,458	57,003,663,635	Work in Proses
Barang dalam Perjalanan	19,508,658,697	27,730,792,153	Goods in Transit
Bahan Baku	2,895,140,073	1,850,197,841	Raw Material
Bahan Tambahan	610,675,552	581,496,236	Supplies Material
Sub Jumlah	115,438,752,786	181,641,821,948	Sub Total
Provisi Kerugian Penurunan Nilai	(12,405,179,751)	(12,405,179,751)	Provision for Impairment Losses
Jumlah	103,033,573,035	169,236,642,197	Total

Persediaan Grup telah diasuransikan kepada PT BRI Asuransi Indonesia dan PT AXA Mandiri dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp50.688.742.135 dan Rp101.377.484.270 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The Group's inventories were insured against PT BRI Asuransi Indonesia and PT AXA Mandiri with a total coverage of Rp50,688,742,135 and Rp101,377,484,270 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh persediaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diasuransikan secara memadai.

The management believes that all the inventories as of December 31, 2023 and 2022 were adequately insured.

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai persediaan cukup untuk menutup kemungkinan kerugian persediaan.

Management of the Group believes that the allowance for impairment losses on inventories is sufficient to cover possible losses on inventories.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, persediaan Grup digunakan sebagai jaminan untuk utang bank (Catatan 19).

As of December 31, 2023 and 2022, the Group's inventories are used as collateral for bank loan (Note 19).

8. Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka

8. Prepaid Expenses and Advances

	2023 Rp	2022 Rp	
Uang Muka Operasional	2,667,725,854	2,044,455,725	Operational Advances
Biaya Dibayar di Muka	2,434,503,649	1,312,411,865	Prepaid Expense
Uang Muka Lainnya	2,768,216,409	1,154,512,422	Other Advances
Jumlah	7,870,445,912	4,511,380,012	Total

9. Aset Tetap

9. Fixed Assets

	2023				
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Biaya Perolehan					Acquisition Costs
Tanah	760,479,136,678	--	--	760,479,136,678	Land
Bangunan	47,505,333,141	--	--	47,505,333,141	Building
Mesin dan Peralatan	7,306,479,327	--	--	7,306,479,327	Machinery and Equipment
Alat Ukur dan Perkakas Kerja	39,645,002,606	--	--	39,645,002,606	Measuring Tools and Instruments of Labor
Inventaris Kantor dan Gudang	5,258,493,351	42,833,260	--	5,301,326,611	Office and Warehouse Inventory
Alat Olah Data	8,104,622,252	1,643,306,845	--	9,747,929,097	Data Processing Equipment
Kendaraan	559,771,186	--	--	559,771,186	Vehicles
Tower	1,840,081,533	--	--	1,840,081,533	Tower
	870,698,920,074	1,686,140,105	--	872,385,060,179	
Aset dalam Penyelesaian	--	1,352,769,101	--	1,352,769,101	Assets under Construction
Jumlah	870,698,920,074	3,038,909,206	--	873,737,829,280	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	40,392,531,180	1,825,206,331	--	42,217,737,511	Building
Mesin dan Peralatan	6,587,702,328	181,832,935	--	6,769,535,263	Machinery and Equipment
Alat Ukur dan Perkakas Kerja	39,626,173,736	16,120,061	--	39,642,293,797	Measuring Tools and Instruments of Labor
Inventaris Kantor dan Gudang	5,233,553,594	51,393,895	--	5,284,947,489	Office and Warehouse Inventory
Alat Olah Data	7,950,497,844	251,152,167	--	8,201,650,011	Data Processing Equipment
Kendaraan	559,771,174	--	--	559,771,174	Vehicles
Tower	1,840,081,506	--	--	1,840,081,506	Tower
Jumlah	102,190,311,362	2,325,705,389	--	104,516,016,751	Total
Nilai Buku	768,508,608,712			769,221,812,529	Book Value



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

	2022				
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Biaya Perolehan					Acquisition Costs
Tanah	760,479,136,678	--	--	760,479,136,678	Land
Bangunan	47,323,785,017	181,548,124	--	47,505,333,141	Building
Mesin dan Peralatan	7,306,479,327	--	--	7,306,479,327	Machinery and Equipment
Alat Ukur dan Perkakas Kerja	39,642,852,606	2,150,000	--	39,645,002,606	Measuring Tools and Instruments of Labor
Inventaris Kantor dan Gudang	5,239,493,351	19,000,000	--	5,258,493,351	Office and Warehouse Inventory
Alat Olah Data	8,101,342,252	3,280,000	--	8,104,622,252	Data Processing Equipment
Kendaraan	559,771,186	--	--	559,771,186	Vehicles
Tower	1,840,081,533	--	--	1,840,081,533	Tower
Jumlah	870,492,941,950	205,978,124	--	870,698,920,074	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	38,419,641,201	1,972,889,979	--	40,392,531,180	Building
Mesin dan Peralatan	6,199,426,280	388,276,048	--	6,587,702,328	Machinery and Equipment
Alat Ukur dan Perkakas Kerja	39,601,224,919	24,948,817	--	39,626,173,736	Measuring Tools and Instruments of Labor
Inventaris Kantor dan Gudang	5,184,464,028	49,089,566	--	5,233,553,594	Office and Warehouse Inventory
Alat Olah Data	7,577,707,113	372,790,731	--	7,950,497,844	Data Processing Equipment
Kendaraan	559,771,174	--	--	559,771,174	Vehicles
Tower	1,840,081,506	--	--	1,840,081,506	Tower
Jumlah	99,382,316,221	2,807,995,141	--	102,190,311,362	Total
Nilai Buku	771,110,625,729			768,508,608,712	Book Value

Pada tahun 2023, nilai pasar tanah dan bangunan Perusahaan berdasarkan laporan penilaian aset dari Kantor Jasa Penilai Publik Rinaldi Alberth Baroto dan Rekan adalah sebagai berikut:

- Aset tanah dan bangunan kantor, berdasarkan Laporan Penilaian No.00586/2.0114-00/PI/06/0287/1/XI/2023 tanggal 14 November 2023 adalah sebesar Rp883.137.000.000; dan
- Aset tanah Palasari, berdasarkan Laporan Penilaian No. 00005/2.0114-00/PI/07/0287/1/I/2022 tanggal 25 November 2021.

Aset tetap Grup telah diasuransikan kepada PT BRI Asuransi Indonesia dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp320.807.392.100 pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset tetap berupa tanah, bangunan dan mesin tertentu digunakan sebagai jaminan atas kredit modal kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (Catatan 19 dan 20).

Beban penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 29)	234,600,159	428,185,300
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 31)	2,091,105,230	2,379,809,841
Jumlah	2,325,705,389	2,807,995,141

In 2023, the market value of land and building based on valuation report of Office of Public Appraisal Service Rinaldi Alberth Baroto and Partners are as follows:

- Land and office building assets, based on the Appraisal Report No. 00586/2.0114-00/PI/06/0287/1/XI/2023 dated November 14, 2023 is amounted to Rp883,137,000,000; and
- Palasari's land assets, based on the Appraisal Report No.00005/2.0114-00/PI/07/0287/1/I/2022 dated November 25, 2021.

The Group's fixed assets were insured with PT BRI Asuransi Indonesia and PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) with total sum insured amounting to Rp320,807,392,100 as of December 31, 2022.

Fixed assets in the form of land, buildings and certain machinery are used as collateral for working capital loans from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (Notes 19 and 20).

Depreciation expenses for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Cost of Revenues (Note 29)
General and Administrative Expenses (Note 31)

Total
473

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan memiliki aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp62.502.819.170 dan Rp62.417.993.387.

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has fixed assets with acquisition cost that have been fully depreciated and still in use amounted to Rp62,502,819,170 and Rp62,417,993,387, respectively.

10. Investasi pada Entitas Asosiasi

10. Investment in Associates

	2023 dan/ and 2022				
	Persentase Kepemilikan/ Ownership Percentage %	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Pelepasan Addition/ Deduction Rp	Bagian Laba/Rugi Profit/Loss Portion Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp
Kepemilikan Langsung/ Direct Ownership					
<u>Metode Ekuitas/ Equity method</u>					
PT Inti Pisma Internasional	22.00%	78,479,123	--	--	78,479,123
<u>Dikurangi: Provisi Penurunan Nilai/ Less: Provision for Impairment</u>					
PT Inti Pisma Internasional		(78,479,123)	--	--	(78,479,123)
Jumlah Kepemilikan Langsung/ Total Direct Ownership		--	--	--	--
Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Ownership					
<u>Metode Ekuitas/ Equity method</u>					
PT Inti Global Optical Communication	25.00%	6,813,502,678	--	--	6,813,502,678
PT Internasional Serat Optik	33.00%	1,650,000,000	--	--	1,650,000,000
PT Mitrabhakti Inti Perdana	32.00%	1,203,239,150	--	--	1,203,239,150
Sub Jumlah/ Sub Total		9,666,741,828	--	--	9,666,741,828
<u>Dikurangi: Provisi Penurunan Nilai/ Less: Provision for Impairment</u>					
PT Inti Global Optical Communication		(6,813,502,678)	--	--	(6,813,502,678)
PT International Serat Optik		(1,650,000,000)	--	--	(1,650,000,000)
PT Mitrabhakti Inti Perdana		(1,203,239,150)	--	--	(1,203,239,150)
Sub Jumlah/ Sub Total		(9,666,741,828)	--	--	(9,666,741,828)
Jumlah Kepemilikan Tidak Langsung/ Total Indirect Ownership		--	--	--	--
Jumlah/ Total		--			

Kepemilikan Langsung

PT Inti Pisma Internasional (IPI)

Berdasarkan Akta Notaris Erni Rohaini, S.H., MBA No.5, tanggal 15 Mei 2007, Perusahaan memiliki Penyertaan pada IPI sebesar Rp1.430.000.000 atau sebesar 22% dari Modal yang ditempatkan. Penyertaan ini telah mendapat persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.W7-HT.01.04-8520.

IPI bergerak dalam bidang usaha produksi pesawat telepon tanpa kabel dan perdagangan umum.

Kepemilikan Tidak Langsung

PT Inti Global Optical Communication (IGOC)

Berdasarkan Akta Notaris Ashari Koerniawan, S.H., M.Kn. No.4, tanggal 11 Februari 2013, IPMS melakukan Penyertaan pada IGOC

Direct Ownership

PT Inti Pisma Internasional (IPI)

Based on the Notarial Deed Erni Rohaini, S.H., MBA No.5, dated May 15, 2007, the Company has Participation in IPI amounting to Rp1,430,000,000 or 22% of the issued capital. This participation has received approval from Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on letter No.W7-HT.01.04-8520.

IPI is engaged in the production of cordless telephones and general trading.

Indirect Ownership

PT Inti Global Optical Communication (IGOC)

Based on the Notarial Deed Ashari Koerniawan, S.H., M.Kn. No.4, dated February 11, 2013, IPMS made Participation in

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

sebesar Rp6.600.000.000 atau sebesar 25% dari modal yang ditempatkan. Penyertaan ini telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat No. AHU-6541 AH.01.01.Tahun 2013.

IGOC bergerak dalam bidang usaha jasa ekspor-impor dan perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi.

PT Internasional Serat Optik (ISO)

Berdasarkan Akta Notaris Ashari Koerniawan, S.H., M.Kn. No. 13, tanggal 22 April 2013, IPMS melakukan Penyertaan pada ISO sebesar Rp1.650.000.000 atau sebesar 33% dari modal yang ditempatkan. Penyertaan ini telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat No.AHU-23086.AH.01.01.Tahun 2013.

Maksud dan tujuan ISO adalah melakukan usaha dalam bidang perdagangan besar. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ISO dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Ekspor impor perdagangan peralatan telekomunikasi, antara lain kabel serat *optic*, pabrikasi elektronik;
- Distributor barang dagangan antara lain kabel serat *optic* untuk komunikasi;
- Jasa konsultan teknik bidang telekomunikasi.

PT Mitrabhakti Inti Perdana (MIP)

Berdasarkan Akta Notaris Rasman, S.H., tanggal 23 November 2012, INTENS memiliki Penyertaan pada MIP sebesar Rp783.000.000 atau sebesar 60% dari modal yang ditempatkan. Penyertaan ini telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.10-28058.

MIP bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, jasa instalasi, sarana telekomunikasi, dan sistem jaringan kabel bawah tanah.

Berdasarkan penelaahan investasi pada entitas asosiasi secara individual, manajemen melakukan penurunan nilai karena entitas asosiasi tersebut mengalami kerugian dan sudah tidak beroperasi.

IGOC amounting to Rp6,600,000,000 or 25% of the issued capital. This participation has received approval from Ministry of Law and Human Rights based on letter No. AHU-6541 AH.01.01.Tahun 2013.

IGOC engaged in the business of export-import services and trading of telecommunication transmission equipment.

PT Internasional Serat Optik (ISO)

Based on the Notarial Deed Ashari Koerniawan, S.H., M.Kn No.13, dated April 22, 2013, IPMS made Participation in ISO amounting to Rp1,650,000,000 or 33% of the issued capital. This participation has received approval from Ministry of Law and Human Rights based on letter No.AHU-23086.AH.01.01.Tahun 2013.

The purpose and objective of ISO is doing business in a large scale trade. To achieve its goals and objectives, ISO may carry out the following activities:

- Export import trade of telecommunications equipment, including fiber-optic cable, electronic manufacturing;
- Merchandise distributor that includes fiber optic cables for communications;
- Engineering consultancy services in telecommunications.

PT Mitrabhakti Inti Perdana (MIP)

Based on the Notarial Deed Rasman, S.H., dated November 23, 2012, INTENS made Participation in MIP amounting to Rp783,000,000 or 60% of the issued capital. This participation has received approval from Ministry of Law and Human Rights based on letter No.AHU-AH.01.10-28058.

MIP is engaged in the business of construction services, installation services, telecommunications facilities, and underground cable network system.

Based on the review of investments in associates individually, management has impaired the value, because the associates incurred a loss and is no longer in operation.

11. Investasi pada Instrumen Keuangan

11. Investments in Financial Instruments

2023 dan/ and 2022			
Persentase Kepemilikan/ Ownership Percentage %	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Pelepasan Addition/ Deduction Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp
Kepemilikan Langsung/ Direct Ownership			
<u>Investasi Instrumen Keuangan/</u>			
<u>Investment in Financial Instrument</u>			
PT Maleo Emtiga	30,000,000,000	--	30,000,000,000
PT Smart Telecom	0.19% 24,227,027,000	--	24,227,027,000
PT Bangtelindo	2.65% 250,000,000	--	250,000,000
Sub Jumlah/ Sub Total	54,477,027,000	--	54,477,027,000
<u>Dikurangi: Provisi Penurunan Nilai/</u>			
<u>Less: Provision for Impairment</u>			
PT Maleo Emtiga	(30,000,000,000)	--	(30,000,000,000)
PT Smart Telecom	(24,227,027,000)	--	(24,227,027,000)
PT Bangtelindo	(250,000,000)	--	(250,000,000)
Sub Jumlah/ Sub Total	(54,477,027,000)	--	(54,477,027,000)
Jumlah Kepemilikan Langsung/			
Total Direct Ownership	--	--	--
Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Ownership			
<u>Investasi Instrumen Keuangan/</u>			
<u>Investment in Financial Instrument</u>			
Primer Telecommunication International Ltd	9.00% 8,573,601,509	--	8,573,601,509
PT JK Networks	17.00% 850,000,000	--	850,000,000
Sub Jumlah/ Sub Total	9,423,601,509	--	9,423,601,509
<u>Dikurangi: Provisi Penurunan Nilai/</u>			
<u>Less: Provision for Impairment</u>			
Primer Telecommunication International Ltd	(8,573,601,509)	--	(8,573,601,509)
PT JK Networks	(850,000,000)	--	(850,000,000)
Sub Jumlah/ Sub Total	(9,423,601,509)	--	(9,423,601,509)
Jumlah Kepemilikan Tidak Langsung/			
Total Indirect Ownership	--	--	--
Jumlah/ Total	--	--	--

Kepemilikan Langsung

PT Maleo Emtiga (Maleo)

Berdasarkan surat menteri keuangan No.S-83/MK.016/1997 tanggal 6 Februari 1997, jumlah penyertaan Perusahaan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai berikut:

- RUPS tanggal 18 April 1996 tentang Pengesahan Hasil Kegiatan Usaha tahun 1995, penyertaan Perusahaan adalah sebesar Rp10.000.000.000;
- RUPS tanggal 7 November 1996 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 1997, Perusahaan menambahkan penyertaan saham sebesar Rp15.000.000.000 sehingga nilai penyertaan saham Perusahaan menjadi Rp25.000.000.000;

Direct Ownership

PT Maleo Emtiga (Maleo)

Based on the letter of the minister of finance No.S-83/MK.016/1997 dated February 6, 1997, the Company's total participation was determined by the General Meeting of Shareholders (GMS) as follows:

- General Meeting of Shareholders on April 18, 1996 concerning Ratification of the Results of Business Activities in 1995, the Company's investment amounting to Rp10,000,000,000;
- General Meeting of Shareholders on November 7, 1996 concerning Ratification of the Company's 1997 Work Plan and Budget, the Company added the investment in shares amounting to Rp15,000,000,000 so that the investment value of the Company became Rp25,000,000,000;

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

- RUPS tanggal 4 Maret 1997 tentang Pengesahan Hasil Kegiatan Usaha tahun 1996, Perusahaan menambahkan penyertaan saham sebesar 5.000.000.000 sehingga nilai penyertaan saham Perusahaan menjadi Rp30.000.000.000.

PT Smart Telecom

PT Smart Telecom bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, jasa instalasi, sarana telekomunikasi, dan sistem jaringan kabel bawah tanah.

PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia (Bangtelindo)

Bangtelindo bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, jasa instalasi, sarana telekomunikasi, dan sistem jaringan kabel bawah tanah.

Kepemilikan Tidak Langsung

Premier Telecommunication International Limited (PTI)

PTI berdiri dan beroperasi sejak tahun 2009 dengan berkantor di Shenzhen China dengan pusat manufaktur di Shenzhen dan Bandung.

PTI bergerak dalam bidang perancangan dan integrasi Handset CDMA, GSM/GPRS dilengkapi dengan pengembangan aplikasinya.

PT JK Networks

JK Network bergerak dalam bidang usaha penyedia perlengkapan kabel optik.

Berdasarkan penelaahan investasi pada instrumen keuangan secara individual, manajemen melakukan penurunan nilai karena instrumen keuangan tersebut mengalami kerugian dan sudah tidak beroperasi.

- GMS held on March 4, 1997 concerning Ratification of the Results of Business Activities in 1996, the Company increased the investment in shares amounting to 5,000,000,000 so that the investment value of the Company's shares became Rp30,000,000,000.

PT Smart Telecom

PT Smart Telecom engaged in the business of construction services, installation services, telecommunications facilities, and underground cable network system.

PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia (Bangtelindo)

Bangtelindo engaged in the business of construction services, installation services, telecommunications facilities, and underground cable network system.

Indirect Ownership

Premier Telecommunication Internasional Limited (PTI)

PTI established and operated since 2009 with offices in Shenzhen China with manufacturing center in Shenzhen and Bandung.

PTI is engaged in designing and integrating CDMA, GSM/ GPRS handsets complemented by application development.

PT JK Networks

JK Network is engaged in providing optical cable equipment.

Based on the review of investments in financial instrument individually, management has impaired the value, because the financial instrument incurred a loss and is no longer operational.

12. Properti Investasi

12. Investment Properties

2023				
Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Biaya Perolehan				Acquisition Costs
Tanah	58,761,113,322	--	58,761,113,322	Land
Bangunan	482,009,415	--	482,009,415	Buildings
Hak Pakai Lahan	2,525,930,925	--	2,525,930,925	Right of Use Land
Jumlah	61,769,053,662	--	61,769,053,662	Total
Akumulasi Penyusutan				Accumulated Depreciation
Bangunan	423,759,255	15,272,803	439,032,058	Buildings
Hak Pakai Lahan	2,525,930,924	--	2,525,930,924	Right of Use Land
Jumlah	2,949,690,179	15,272,803	2,964,962,982	Total
Nilai Buku	58,819,363,483		58,804,090,680	Book Value

	2022				
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Biaya Perolehan					Acquisition Costs
Tanah	58,761,113,322	--	--	58,761,113,322	Land
Bangunan	482,009,415	--	--	482,009,415	Buildings
Hak Pakai Lahan	2,525,930,925	--	--	2,525,930,925	Right of Use Land
Jumlah	61,769,053,662	--	--	61,769,053,662	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	369,991,477	53,767,778	--	423,759,255	Buildings
Hak Pakai Lahan	2,525,930,924	--	--	2,525,930,924	Right of Use Land
Jumlah	2,895,922,401	53,767,778	--	2,949,690,179	Total
Nilai Buku	58,873,131,261			58,819,363,483	Book Value

Seluruh beban depresiasi atas properti investasi dicatat pada beban umum dan administrasi (Catatan 31) masing-masing sebesar Rp15.272.803 dan Rp53.767.778 pada 31 Desember 2023 dan 2022.

All depreciation expense on investment properties are recorded in general and administrative expenses (Note 31) amounting to Rp15,272,803 and Rp53,767,778 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

13. Aset Takberwujud

13. Intangible Assets

	2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Biaya Perolehan						Acquisition Costs
Produk Pengembangan	21,286,010,854	13,980,000	--	4,083,983,842	25,383,974,696	Product Development
Software	24,031,308,607	--	--	--	24,031,308,607	Software
Lisensi Radar	2,000,000,000	--	--	--	2,000,000,000	Radar License
	47,317,319,461	13,980,000	--	4,083,983,842	51,415,283,303	
Aset dalam Penyelesaian	8,431,465,878	2,174,671,080	--	(4,083,983,842)	6,522,153,116	Assets under Construction
Jumlah	55,748,785,339	2,188,651,080	--	--	57,937,436,419	Total
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization
Produk Pengembangan	15,996,981,019	1,777,261,799	--	--	17,774,242,818	Product Development
Software	24,031,308,607	--	--	--	24,031,308,607	Software
Lisensi Radar	2,000,000,000	--	--	--	2,000,000,000	Radar License
Jumlah	42,028,289,626	1,777,261,799	--	--	43,805,551,425	Total
Nilai Buku	13,720,495,713				14,131,884,994	Book Value

	2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Biaya Perolehan						Acquisition Costs
Produk Pengembangan	15,884,448,594	--	--	5,401,562,260	21,286,010,854	Product Development
Software	23,047,388,623	983,919,984	--	--	24,031,308,607	Software
Lisensi Radar	2,000,000,000	--	--	--	2,000,000,000	Radar License
	40,931,837,217	983,919,984	--	5,401,562,260	47,317,319,461	
Aset dalam Penyelesaian	11,817,694,264	2,015,333,874	--	(5,401,562,260)	8,431,465,878	Assets under Construction
Jumlah	52,749,531,481	2,999,253,858	--	--	55,748,785,339	Total
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization
Produk Pengembangan	15,591,721,075	405,259,944	--	--	15,996,981,019	Product Development
Software	22,237,150,173	1,794,158,434	--	--	24,031,308,607	Software
Lisensi Radar	2,000,000,000	--	--	--	2,000,000,000	Radar License
Jumlah	39,828,871,248	2,199,418,378	--	--	42,028,289,626	Total
Nilai Buku	12,920,660,233				13,720,495,713	Book Value

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset dalam penyelesaian terdiri dari ADSB Tahap 2, Smart Level Crossing, Smart Digital Enclosure SCR Insentif, Modular Insentif, Smart Device Radio Sonde Insentif, Smart NTE LVMS, Smart NTE Antena VSAT, Smart Device Santanu Insentif, Smart Device Radar Cuaca Insentif, dan ADSB Insentif dalam pelaksanaan yang mempunyai nilai masing-masing sebesar Rp6.522.153.116 dan Rp8.431.465.878.

Tingkat penyelesaian atas aset dalam penyelesaian adalah berkisar antara 90% sampai 95%. Manajemen memperkirakan bahwa pada bulan Januari 2024 aset takberwujud tersebut telah siap digunakan.

Beban amortisasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022, construction in progress consists of ADSB Phase 2, Smart Level Crossing, Smart Digital Enclosure SCR Incentives, Incentive Modular, Smart Device Radio Sonde Incentive, Smart NTE LVMS, Smart NTE VSAT Antenna, Smart Device Santanu Incentive, Smart Weather Radar Device Incentives, and ADSB Incentives in progress which have the amount of Rp6,522,153,116 and Rp8,431,465,878, respectively.

Completion rate on assets in progress is between 90% until 95%. Management estimates that in January 2024, intangible assets are ready to use.

Amortization expense for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023 Rp	2022 Rp	
Beban Pokok Penjualan (Catatan 29)	764,235,478	437,174,303	Cost of Revenues (Note 29)
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 31)	1,013,026,321	1,762,244,075	General and Administrative Expenses (Note 31)
Jumlah	1,777,261,799	2,199,418,378	Total

14. Aset Hak Guna

14. Right-of-Use Assets

	2022				
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Aset Hak Guna					Right-of-Use
Alat Olah Data	3,164,439,028	--	3,164,439,028	--	Data Processing Tools
Jumlah	3,164,439,028	--	3,164,439,028	--	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Alat Olah Data	2,531,551,223	632,887,805	3,164,439,028	--	Data Processing Tools
Jumlah	2,531,551,223	632,887,805	3,164,439,028	--	Total
Nilai Buku	632,887,805			--	Book Value

Beban penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Depreciation expense for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023 Rp	2022 Rp	
Beban Pokok Penjualan (Catatan 29)	--	147,903,624	Cost of Revenues (Note 29)
Beban Penjualan (Catatan 30)	--	34,736,789	Selling Expenses (Note 30)
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 31)	--	432,971,153	General and Administrative Expenses (Note 31)
Beban Pengembangan (Catatan 32)	--	17,276,239	Development Expense (Note 32)
Jumlah	--	632,887,805	Total

15. Aset Lain-Lain

15. Other Assets

	2023 Rp	2022 Rp	
Aset Tetap Non Operasi			Non Operating Fixed Assets
Alat Olah Data	13,329,564,861	13,832,308,327	Data Processing Equipment
Alat Ukur dan Perkakas Kerja	11,171,242,802	11,734,927,777	Measuring Tools and Instruments of Labor
Mesin dan Peralatan	5,306,025,658	6,121,467,453	Machinery and Equipment
Inventaris Kantor dan Gudang	1,158,893,456	2,157,771,074	Inventory Office and Warehouse
Dikurangi:			Less:
Akumulasi Penyusutan	(30,965,724,420)	(33,846,472,041)	Accumulated Depreciation
Sub Jumlah	2,357	2,590	Sub Total
Persediaan Lainnya			Other Inventories
Persediaan Usang	9,793,048,159	13,548,450,724	Obsolete Inventories
Dikurangi:			Less:
Provisi Kerugian Penurunan Nilai	(9,793,048,159)	(13,548,450,724)	Provision for Impairment Losses
Sub Jumlah	--	--	Sub Total
Depositi Sewa Gedung	239,547,503	189,657,503	Building Rental Deposit
Jumlah	239,549,860	189,660,093	Total

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan lainnya adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment losses of other inventories are as follows:

	2023 Rp	2022 Rp	
Saldo Awal	13,548,450,724	15,971,691,714	Beginning Balance
Penambahan (Catatan 34)	5,300,000	--	Addition (Note 34)
Pemulihan	(3,760,702,565)	(2,423,240,990)	Recovery
Saldo Akhir	9,793,048,159	13,548,450,724	Ending Balance

Pada tahun 2023 dan 2022, Perusahaan menjual aset tetap non operasi dan persediaan usang yang telah dicadangkan. Pendapatan atas penjualan tersebut dicatat oleh Perusahaan pada pendapatan lain-lain masing-masing sebesar Rp1.058.540.099 dan Rp287.387.388 (Catatan 33).

In 2023 and 2022, the Company sold non operating fixed assets and obsolete inventory that had been reserved. The revenue from these sales was recorded by the Company as other income, amounted to Rp1,058,540,099 and Rp287,387,388 respectively (Note 33).

16. Utang Usaha

16. Trade Payables

	2023 Rp	2022 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties (Catatan/ Note 36)	194,908,032,714	189,252,920,625
Pihak Ketiga/ Third Parties	131,384,421,923	115,366,085,369
Jumlah/ Total	326,292,454,637	304,619,005,994

Pembayaran utang usaha Perusahaan akan dilakukan restrukturisasi berdasarkan proses penundaan kewajiban pembayaran utang ("PKPU") dan keputusan homologasi tertanggal 24 Januari 2024 dengan ketentuan pembayaran dalam jangka waktu 5 sampai dengan 18 tahun dan pembayaran pertama pada akhir tahun ke 3 sampai dengan 10 (Catatan 44 dan 45).

Payment of the Company's trade payables will be restructured based on the postponement of debt payment ("PKPU") process and homologation decision dated January 24, 2024 with payment provisions within a period of 5 until 18 years and the first payment at the end of years 3 until 10 (Notes 44 and 45).

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

17. Utang Lain-Lain

17. Other Payables

	2023 Rp	2022 Rp
Pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i> (Catatan/ <i>Note</i> 36)	35,669,858,006	24,775,477,322
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>	48,686,612,687	50,053,445,726
Jumlah/ <i>Total</i>	84,356,470,693	74,828,923,048

Sebagian besar utang lain-lain pihak ketiga merupakan utang atas tunggakan gaji karyawan.

Most of the other debts from third parties are payable on arrears of employee salaries.

Pembayaran utang lain-lain Perusahaan akan dilakukan restrukturisasi berdasarkan proses PKPU dan keputusan homologasi tertanggal 24 Januari 2024 dengan ketentuan pembayaran dalam jangka waktu 5 sampai dengan 18 tahun dan pembayaran pertama pada akhir tahun ke 3 sampai dengan 10 (Catatan 45).

Payment of the Company's other payables will be restructured based on the PKPU process and homologation decision dated January 24, 2024 with payment provisions within a period of 5 until 18 and the first payment at the end of years 3 until 10 (Note 45).

18. Beban Akrua

18. Accrued Expenses

Akun ini merupakan beban akrual terkait operasional dan jasa produksi yang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing nilainya sebesar Rp222.891.293.568 dan Rp178.598.345.741.

This account represents accrual expenses related to the operations and production services which as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp222,891,293,568 and Rp178,598,345,741, respectively.

19. Utang Bank

19. Bank Loans

a. Pokok Pinjaman

a. Loan Principal

	2023 Rp	2022 Rp	
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	558,255,788,787	558,255,788,787	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	275,988,821,001	275,988,821,001	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	21,119,383,153	21,179,383,153	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4,863,390,530	3,612,261,538	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	2,743,710,582	2,797,383,587	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
	862,971,094,053	861,833,638,066	
Dikurangi:			Less:
Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	(53,009,707,837)	(51,872,251,850)	Current Maturity
Jatuh Tempo Lebih dari Satu Tahun	809,961,386,216	809,961,386,216	Maturity More than One Year

Perusahaan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk "Mandiri"

Pada tanggal 2 September 2020, berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit No.CBG.CB5/SPPK.034/2020, Perusahaan memperoleh fasilitas restrukturisasi kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

The Company

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk "Mandiri"

On September 2, 2020, based on the Approval Letter for Credit Extension No.CBG.CB5/SPPK.034/2020, the Company obtained a credit restructuring facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as follows:

- a. Fasilitas KMK Transaksional 1
Plafon Kredit : Rp97.412.337.879
Tingkat Bunga : 6% per tahun
Jangka Waktu : sampai dengan 23 September 2029
Tujuan : Penyesuaian jangka waktu pembayaran dalam rangka restrukturisasi fasilitas kredit
- b. Fasilitas KMK Transaksional 2
Plafon Kredit : Rp66.000.000.000
Tingkat Bunga : 6% per tahun
Jangka Waktu : sampai dengan 23 September 2029
Tujuan : Penyesuaian jangka waktu pembayaran dalam rangka restrukturisasi fasilitas kredit
- c. Fasilitas KMK *Post Financing*
Plafon Kredit : Rp116.498.799.660
Tingkat Bunga : 6% per tahun
Jangka Waktu : sampai dengan 23 September 2029
Tujuan : Penyesuaian jangka waktu pembayaran dalam rangka restrukturisasi fasilitas kredit
- d. Fasilitas *Non-Cash Loan*
Limit Fasilitas : Rp35.000.000.000
Jenis Kredit : Bank Garansi
Jangka Waktu : 1 tahun
Tujuan : Jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan/retensi.

- a. *KMK Transactional 1 Facility*
Maximum Limit : Rp97,412,337,879
Interest Rate : 6% per annum
Period : until September 23, 2029
Purpose : Adjustment of payment terms for credit facility restructuring
- b. *KMK Transactional 2 Facility*
Maximum Limit : Rp66,000,000,000
Interest Rate : 6% per annum
Period : until September 23, 2029
Purpose : Adjustment of payment terms for credit facility restructuring
- c. *KMK Post Financing Facility*
Maximum Limit : Rp116,498,799,660
Interest Rate : 6% per annum
Period : until September 23, 2029
Purpose : Adjustment of payment terms for credit facility restructuring
- d. *Non-Cash Loan Facility*
Facility Limit : Rp35,000,000,000
Credit Type : Bank Guarantee
Period : 1 year
Purpose : Tender guarantee, implementation guarantee, maintenance/retention guarantee.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

- Aset di Jl. Moch. Toha No.225 (Palasari) yang diikat secara Hak Tanggungan senilai Rp76.970.000.000 (Catatan 9);
- Persediaan dan piutang atas proyek yang dibiayai serta persediaan dan piutang lainnya yang diikat secara Fidusia dengan total *Security Coverage Ratio* sebesar 150% (Catatan 5, 6, dan 7);
- *Escrow Account* yang digunakan untuk menampung hasil pembayaran atas proyek dengan *standing instruction* dan Perusahaan memberikan surat kuasa dalam perjanjian kredit untuk mendebet *Escrow Account* yang digunakan untuk membayar kewajiban dan menurunkan baki debet;
- Agunan bersifat *cross collateral* dengan agunan fasilitas kredit.

The loan facility is secured by:

- Assets on Jl. Moch. Toha No.225 (Palasari) bound under Mortgage worth Rp76,970,000,000 (Note 9);
- Inventories and receivables from financed projects as well as inventories and other receivables that are tied in Fiduciary basis with a total *Security Coverage Ratio* of 150% (Notes 5, 6, and 7);
- Escrow Account that is used to save the payment results for the project with a *standing instruction* and the Company provides a power of attorney in the credit agreement to debiting the Escrow Account which is used to pay obligations and reduce the outstanding loan;
- Collateral is cross collateral with credit facility collateral.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Selama kredit belum lunas, Perusahaan diwajibkan untuk:

- Menjaga *financial covenants net operating cash flow* positif mulai tahun 2024, *leverage* maksimal 600% mulai tahun 2027, dan *EBITDA to I* minimal 1,2 kali mulai tahun 2023;
- Mendahulukan menyelesaikan segala kewajiban kredit di atas kepentingan anak perusahaan;
- Melaporkan progress proyek yang dibiayai setiap 3 bulan dan paling lambat telah diterima 30 hari setelah akhir periode laporan;
- Menyampaikan laporan keuangan *inhouse/ unaudited* setiap triwulan dan paling lambat telah diterima 60 hari setelah akhir periode laporan dan laporan keuangan *audited* tahunan paling lambat telah diterima pada 180 hari setelah akhir periode pelaporan;
- Mengizinkan untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan Perusahaan;
- Memperpanjang perizinan usaha dan penutupan asuransi yang akan jatuh tempo dan menyampaikan salinan/ fotokopi;
- Menyampaikan salinan/ fotokopi akta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan setiap ada perubahan;
- Melakukan pengkinian daftar persediaan dan piutang sebagai lampiran Akta Fidusia secara triwulan atas persediaan dan piutang yang dijaminkan dan pembaharuan lampiran Fidusia dengan biaya yang timbul menjadi beban Perusahaan;
- Mandiri berhak mengubah ketentuan dan syarat restrukturisasi kredit apabila terdapat perbedaan signifikan terhadap skema restrukturisasi atau ketentuan kewajiban kredit dari kreditur lain dibandingkan dengan kajian final restrukturisasi dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA);
- Perusahaan berkewajiban menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) paling lambat setiap bulan Januari;
- Perusahaan wajib menyediakan dana pada rekening *Debt Service Account* (DSA) minimal sebesar 1 kali tagihan kewajiban kredit;
- Memberitahukan Mandiri dalam tempo paling lambat 1 bulan untuk mengubah susunan pengurus dan pemegang saham, membayar/melunasi utang kepada pemegang saham, membagikan dividen, memperoleh suntikan dana dari pemegang saham.

As long as the credit has not been paid off, the Company is required to:

- Maintain positive *financial covenants net operating cash flow* starting in 2024, maximum leverage of 600% starting in 2027, and *EBITDA to I* at least 1.2 times starting in 2023;
- Prioritize settling all credit obligations above the interests of the subsidiary;
- Report the progress of the financed project every 3 months and received no later than 30 days after the end of the reporting period;
- Submit an *inhouse/ unaudited financial report* every quarter and it has been received no later than 60 days after the end of the reporting period and the annual audited financial report has been received no later than 180 days after the end of the reporting period;
- Permit to conduct audits of the Company's business and financial activities;
- Extending business licenses and insurance coverage that will be due and submitting copies/ photocopies;
- Submit a copy/ photocopy of the deed of amendment to the Company's Articles of Association every time there is a change;
- Updating the list of inventories and receivables as an attachment to the *Fiduciary Deed* on a quarterly basis on collateralized inventories and receivables and updating the *Fiduciary attachment* with costs incurred to be borne by the Company;
- Mandiri has the right to change the terms and conditions of credit restructuring if there are significant differences to the restructuring scheme or the terms of the credit obligations of other creditors compared to the final restructuring review from PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA);
- The Company is obliged to submit a Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) at the latest every January;
- Companies are required to provide funds in a *Debt Service Account* (DSA) for a minimum of 1 time a loan obligation statement;
- Notify Mandiri within 1 month at the latest for changes in the composition of management and shareholders, pay/settle debts to shareholders, distribute dividends, obtain an injection of funds from shareholders.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri terlebih dahulu, Perusahaan tidak diperkenankan:

- Memindahtangankan barang jaminan;
- Mengikat diri sebagai penjamin utang, kecuali yang telah dijaminan terlebih dahulu sebelum tanggal SPPK terbaru;
- Memperoleh fasilitas kredit baru atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lainnya;
- Memberikan pinjaman kepada anak perusahaan kecuali dalam rangka operasional usaha yang wajar.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp275.988.821.001.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan belum memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan. Meskipun demikian, Mandiri masih memperlakukan pinjaman ini sebagai kredit jangka panjang karena Perusahaan sedang dalam proses PKPU (Catatan 45).

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
"BRI"**

Berdasarkan surat No.R.II.256-OPK/DKD/09/2019 tanggal 26 September 2019 Perusahaan memperoleh fasilitas restrukturisasi kredit sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Modal Kerja Co Menurun 1 (KMK Co Menurun 1)
- | | |
|---------------|--|
| Plafon Kredit | : Rp550.000.000.000 |
| Tingkat Bunga | : 6% per tahun |
| Jangka Waktu | : 26 September 2029 |
| Tujuan | : <i>Repackaging outstanding</i> fasilitas yang sudah ada di BRI yang telah digunakan untuk mengerjakan proyek-proyek yang didapatkan oleh Perusahaan. |

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

- Termin Proyek Cessie;
- Tanah dan bangunan SHGB No.8 luas tanah 45,957m² sebesar Rp638.786 juta (Catatan 9);
- Tanah dan bangunan SHGB No.44, 19 dan 48, luas tanah 79,417m² senilai Rp120.000.000.000 (Catatan 9); dan
- Persediaan senilai Rp95.000.000 (Catatan 7).

As long as the loan has not been paid off, without prior written approval from Mandiri, the Company is not allowed to:

- *Transfer of collateral;*
- *Bind himself as a guarantor of debt, except for those that have been pledged before the latest SPPK date;*
- *Obtaining new credit facilities or other loans from other financial institutions;*
- *Providing loans to subsidiaries except for normal business operations.*

As of December 31, 2023 and 2022, both of these loans amounted to Rp275,988,821,001.

As of December 31, 2023, the Company has not complied with the ratios and covenants as required. However, Mandiri still treats this loan as long-term credit because the Company is currently in the PKPU process (Note 45).

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
"BRI"**

Based on letter No.R.II.256-OPK/DKD/09/2019 dated September 26, 2019, the Company obtained a restructuring credit facility as follows:

- a. *Working Capital Credit Facility Co Menurun 1 (KMK Co Menurun 1)*
- | | |
|----------------------|---|
| <i>Maximum Limit</i> | <i>: Rp550,000,000,000</i> |
| <i>Interest Rate</i> | <i>: 6% per annum</i> |
| <i>Period</i> | <i>: September 26, 2029</i> |
| <i>Purpose</i> | <i>: Repackaging the existing outstanding facility at BRI that has been used to work on projects acquired by the Company.</i> |

The loan facility is secured by:

- *Cessie Project Termin;*
- *Land and building SHGB No.8, land area 45,957sqm amounting to Rp638,786 million (Note 9);*
- *Land and building SHGB No.44, 19 and 48, land area of 79,417sqm worth Rp120,000,000,000 (Note 9); and*
- *Inventory of Rp95,000,000 (Note 7).*

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

- b. Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Baru (KMCK Baru)
- | | |
|---------------|---|
| Plafon Kredit | : Rp100.000.000.000 |
| Tingkat Bunga | : 6% per tahun |
| Jangka Waktu | : 30 September 2029 |
| Tujuan | : Tambahan modal kerja jasa konstruksi untuk proyek-proyek yang diperoleh Perusahaan dari Telkom grup, PLN grup, dan Kementerian, serta telah mendapatkan persetujuan dari Divisi Bisnis BUMN 1 |

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan aset yang sama dengan fasilitas KMK Co menurun 1 (cross collateral).

- c. Fasilitas Kredit Modal Kerja Co Menurun 2 (KMK Co Menurun 2)
- | | |
|---------------|---|
| Plafon Kredit | : Rp10.000.000.000 |
| Tingkat Bunga | : 6% per tahun |
| Jangka Waktu | : 26 September 2022 |
| Tujuan | : Tambahan modal kerja untuk membiayai kebutuhan perusahaan terkait proyek yang dikerjakan oleh Perusahaan selain yang dibiayai oleh fasilitas KMCK |

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan aset yang sama dengan fasilitas KMK Co menurun 1 (cross collateral).

- d. Fasilitas Bank Garansi
- | | |
|---------------|---|
| Plafon Kredit | : Rp50.000.000.000 |
| Jenis Kredit | : <i>Contingent</i> |
| Jangka Waktu | : 30 September 2029 |
| Tujuan | : Jaminan tender, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan kepabeanaan atas proyek-proyek BUMN dan Pemerintah yang telah mendapat persetujuan BRI. |

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan belum menggunakan fasilitas tersebut. Sebagai dampak dari restrukturisasi utang bank Perusahaan melalui proses PKPU (Catatan 45), fasilitas pinjaman Perusahaan yang ada pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi tidak dapat digunakan.

- b. Construction Working Capital Credit Facility Baru (KMCK Baru)
- | | |
|---------------|--|
| Maximum Limit | : Rp100,000,000,000 |
| Interest Rate | : 6% per annum |
| Period | : September 30, 2029 |
| Purpose | : Additional working capital for construction services for projects obtained by the Company from the Telkom group, PLN group and the Ministry, and has received approval from the BUMN Business Division 1 |

This loan facility is secured with the same collateral as KMK facility Co Menurun 1 (cross collateral).

- c. Working Capital Credit Facility Co Menurun 2 (KMK Co Menurun 2)
- | | |
|---------------|--|
| Maximum Limit | : Rp10,000,000,000 |
| Interest Rate | : 6% per annum |
| Period | : September 26, 2022 |
| Purpose | : Additional working capital to finance company needs related to projects undertaken by the Company other than those financed by the KMCK facility |

This loan facility is secured with the same collateral as KMK facility Co Menurun 1 (cross collateral).

- d. Bank Guarantee Facility
- | | |
|---------------|--|
| Maximum Limit | : Rp50,000,000,000 |
| Credit Type | : <i>Contingent</i> |
| Period | : September 30, 2029 |
| Purpose | : Tender guarantees, down payment guarantees, implementation guarantees, customs guarantee for BUMN and Government projects that have received BRI approval. |

As of December 31, 2022, the Company has not used the facility. As a result of the Company's bank loan restructuring through PKPU (Note 45), the Company's credit facility as at December 31, 2023 became unavailable.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Selama kredit belum lunas, Perusahaan tidak diperbolehkan untuk:

- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri debitur sendiri;
- Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya;
- Melakukan merger, akuisisi atau konsolidasi dengan perusahaan lain, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku dan/atau Keputusan dari Kementerian yang berwenang;
- Melakukan perubahan bentuk badan hukum dan/ atau bidang usaha yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku dan/atau Keputusan dari Kementerian yang berwenang;
- Debitur mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- Debitur mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit ini;
- Debitur memperoleh pinjaman/ kredit baru dari Bank atau lembaga keuangan lainnya;
- Debitur melakukan perubahan struktur permodalan;
- Melunasi atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di BRI dilunasi terlebih dahulu;
- Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang wajar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Debitur dan prinsip *good corporate governance*; dan
- Melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan/atau peraturan yang berlaku.

Selama kredit belum lunas, Perusahaan diwajibkan untuk (*Financial Covenant*):

- Perusahaan harus menjaga *net worth* (total modal) bernilai positif.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp558.255.788.787.

As long as the credit has not been paid off, the Company is not allowed to:

- Submitted a request for a bankruptcy statement to the Commercial Court to declare the debtor's own bankruptcy;
- Selling or releasing immovable property or main assets in running the business;
- Conduct a merger, acquisition or consolidation with another company, unless required by applicable laws and/or a decision from the competent Ministry;
- Changing the form of a legal entity and/ or business sector that could have material consequences, unless required by the applicable laws and/ or a decree from the competent Ministry;
- The debtor binds himself as a guarantor or guarantor of debt or guarantees the company's assets to other parties;
- The debtor transfers/ delivers to another party, partly or wholly, of the rights and obligations arising in connection with this Credit Facility;
- Debtors get new loans/ credits from banks or other financial institutions;
- The debtor changes the capital structure;
- Pay off or pay debts to shareholders before debt is paid in BRI first;
- Conducting transactions with a person or party, including but not limited to affiliated companies, in a different way or outside the normal practices and habits or not in accordance with the applicable provisions of the debtor and the principles of good corporate governance; and
- Performing an action that violates any applicable legal provisions and/or regulations.

As long as the credit has not been paid off, the Company is required to (*Financial Covenant*):

- The Company shall maintain a positive net worth (total equity).

As of December 31, 2023 and 2022, of these loans amounted to Rp558,255,788,787.



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan belum memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan. Meskipun demikian, BRI masih memperlakukan pinjaman ini sebagai kredit jangka panjang karena Perusahaan sedang dalam proses PKPU (Catatan 45).

Perusahaan akan melakukan restrukturisasi pinjaman bank jangka pendek menjadi jangka waktu 18 tahun berdasarkan proses PKPU dan keputusan homologasi tertanggal 24 Januari 2024 (Catatan 45). Pinjaman bank jangka pendek ini akan disajikan sebagai bagian dari pinjaman bank jangka panjang.

Entitas Anak

PT Inti Pindad Mitra Sejati "IPMS"

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk "BNI"

- Restrukturisasi
IPMS mengajukan perubahan Restrukturisasi Fasilitas Kredit di BNI melalui surat No.085/HK.07/21000/04/2019 tanggal 14 April 2019 dan BNI menyetujui permohonan tersebut melalui surat BNI No.BIN/2.4/127/R tanggal 27 Mei 2019 perihal persetujuan perubahan Restrukturisasi Fasilitas Kredit Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Fasilitas Pinjaman Kredit:

- Plafond Rp15.908.994.044;
- Bunga 7,32% per tahun;
- Jangka waktu 36 bulan sampai dengan tanggal 28 Februari 2028.

Jaminan:

- Piutang usaha sebesar Rp11.671.060.000 diikat fidusia No.WS-0017966HT.05.01 tanggal 10 November 2009 senilai Rp15.945.954.134 (Catatan 5);
- Persediaan barang sebesar Rp2.088.170.000 diikat fidusia No.W8-0017967HT.05.01.TH.2009 tanggal 10 September 2009 sebesar Rp6.762.167.624 (Catatan 7).

Berdasarkan surat No.RRC/2/01488/R tanggal 22 Desember 2020 perihal Penyesuaian Syarat Fasilitas kredit bahwa IPMS tidak memenuhi syarat ketentuan restrukturisasi kredit sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit, sehingga terdapat penyesuaian terhadap fasilitas kredit menjadi sebagai berikut:

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

As of December 31, 2023, the Company has not complied with the ratios and covenants as required. However, BRI still treats this loan as long-term credit because the Company is currently in the PKPU process (Note 45).

The company will restructure short-term bank loans into an 18-year term based on the PKPU process and the homologation decision dated January 24, 2024 (Note 45). The short-term bank loan will be presented as part of long-term bank loans.

Subsidiaries

PT Inti Pindad Mitra Sejati "IPMS"

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk "BNI"

- Restructurisation
IPMS submitted changes to the Credit Facility Restructuring at BNI through letter No.085/HK.07/21000/04/2019 dated April 14, 2019 and BNI approved the request through BNI letter No.BIN/2.4/127/R date May 27, 2019 concerning the approval of changes to the Restructuring of the Company's Credit Facility with the following provisions:

Credit Loan Facility:

- Maximum limit Rp15,908,994,044;
- Interest 7.32% per annum;
- Term of 36 months until February 28, 2028.

Collaterals:

- Trade receivables in the amount of Rp11,671,060,000 bound by fiduciary No.WS-0017966HT.05.01 dated November 10, 2009 amounted to Rp15,945,954,134 (Note 5);
- Inventories amounting to Rp2,088,170,000 are bound by fiduciary No.W8-0017967HT.05.01.TH.2009 dated September 10, 2009 amounting to Rp6,762,167,624 (Note 7).

Based on letter No.RRC/2/01488/R dated December 22, 2020 regarding Adjustment of Credit Facility Terms that IPMS does not meet the requirements of the credit restructuring provisions as stipulated in the credit agreement, so there are adjustments to the credit facility to be as follows:

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

- Penyesuaian suku bunga fasilitas kredit Kredit Modal Kerja (KMK) menjadi sebesar 7,32% per tahun tanpa *deferred interest*.
- Pembebanan seluruh *outstanding* kewajiban bunga ditangguhkan ke dalam *outstanding* Kredit Modal Kerja (KMK).
- Pembebanan *outstanding* Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) ke dalam *outstanding* Kredit Modal Kerja (KMK).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 saldo pinjaman ini adalah masing-masing sebesar Rp21.119.383.153 dan Rp21.179.383.153.

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
"BRI"**

IPMS memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dari BRI, sebagaimana dalam Surat Persetujuan Membuka Kredit tanggal 30 Maret 2012 dihadapan Notaris Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H., No.378, yang telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir, sebagaimana dalam Surat Penawaran Putusan Kredit, tanggal 16 Juli 2019, No. B.2135/KC-VI/uK/07/2019, yang sudah dituangkan dalam Akta Notaris Lestari Andayani Uiatmo, S.H., No.22, tanggal 14 Agustus 2019, di antaranya sebagai berikut:

Fasilitas Pinjaman Kredit:

- Plafond Rp4.000.000.000;
- Bunga 9% per tahun; dan
- Jangka waktu 16 bulan terhitung 30 Maret 2019 sampai dengan 30 Juli 2020.

Jaminan:

- Piutang atas proyek IPMS diikat dengan PJ-07 (Pengikatan Jaminan) hingga sejumlah Rp13.710.800.000 (Catatan 5);
- Sertifikat Kontra Garansi dan asuradur BRI, atas Bank Garansi yang diterbitkan oleh BRI hingga sejumlah Rp1.000.000.000;
- Mesin Nissei kapasitas 250 ton, dalam Akta Jaminan Fidusia, nilai penjaminan Rp150.000.000 (Catatan 9);
- Mesin Enggel kapasitas 175 ton, dalam Akta Jaminan Fidusia, nilai penjaminan Rp150.000.000 (Catatan 9);
- Mesin Enggel kapasitas 150 ton, dalam Akta Jaminan Fidusia, nilai penjaminan Rp150.000.000 (Catatan 9);
- Mesin Arburg kapasitas 70 ton, dalam Akta Jaminan Fidusia, nilai penjaminan Rp150.000.000 (Catatan 9);

- Adjustment of the working capital credit facility (KMK) interest rate to be 7.32% per year without deferred interest.
- Charges of all outstanding interest obligations are deferred into the outstanding Working Capital Credit (KMK).
- Charging of outstanding Debt Settlement Agreement (PPH) into the Outstanding Working Capital Credit (KMK).

As of December 31, 2023 and 2022 the outstanding loan is amounted to Rp21,119,383,153 and Rp21,179,383,153, respectively.

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
"BRI"**

IPMS obtained the Construction Working Capital Credit Facility (KMKK) from BRI, as stated in the Credit Opening Agreement dated March 30, 2012 before the Notary Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H., No.378, which has been amended several times, most recently, as in the Credit Decision Offer Letter, dated July 16, 2019, No.B.2135/KC-VII/uK/07/2019, as stated in the Deed Notary Lestari Andayani Uiatmo, S.H., No.22, August 14, 2019, among others as follows:

Credit Loan Facility:

- Maximum limit of Rp4,000,000,000;
- Interest 9% per annum; and
- Time period 16 months from March 30, 2019 to July 30, 2020.

Collaterals:

- Accounts receivable of IPMS's project, bound by PJ-07 (Collateral Binding) of up to Rp13,710,800,000 (Notes 5);
- BRI Guarantee and Counter Certificate for Bank Guarantees issued by BRI up to a total of Rp1,000,000,000;
- Nissei machine capacity of 250 tons, in the Deed of Fiduciary, Rp150,000,000 guarantee value (Notes 9);
- Enggel engine capacity of 175 tons, in the Deed of Fiduciary, Rp150,000,000 guarantee value (Notes 9);
- Enggel engine capacity of 150 tons, in the Deed of Fiduciary, Rp150,000,000 guarantee value (Notes 9);
- Arburg machine capacity of 70 tons, in the Deed of Fiduciary, Rp150,000,000 guarantee value (Notes 9);



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

- Mesin Arburg kapasitas 80 ton, dalam Akta Jaminan Fidusia, nilai penjaminan Rp150.000.000 (Catatan 9).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp4.863.390.530 dan Rp3.612.261.538.

**PT Inti Konten Indonesia "INTENS"
PT Bank Syariah Indonesia Tbk**

Fasilitas pembiayaan ini diperpanjang sesuai dengan Addendum I Akad Pembiayaan Musyarakah No.0270/MSY/KC-SNR/FS/3/2021 tanggal 29 Maret 2021 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Fasilitas Pinjaman Syariah:

- Plafond Rp3.140.000.000.
- Porsi dana Bank 16,97%, Nasabah 83,03%.
- Nisbah bagi hasil Bank 3,66% Nasabah 96,34% (multi nisbah).
- Jangka waktu 48 bulan sejak 29 Maret 2021 sampai dengan 29 Maret 2025.

Jaminan:

Fidusia tagihan sebesar Rp3.925.000.000 (125% dari plafond) (Catatan 5).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 saldo pinjaman ini adalah masing-masing sebesar Rp2.743.710.582 dan Rp2.797.383.587.

b. Utang Bunga Bank

	2023 Rp	2022 Rp
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	141,995,279,294	109,427,269,614
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	63,167,743,964	51,782,598,537
Jumlah	205,163,023,258	161,209,868,151

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Berdasarkan surat tertanggal 26 September 2019 No.R.II.256-OPK/DKD/09/2019 tentang penawaran putusan kredit, Perusahaan mendapatkan fasilitas restrukturisasi bunga pinjaman yang timbul atas fasilitas pinjaman pokok. Pembayaran atas bunga bank tersebut ditangguhkan hingga tahun 2029.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

- Arburg machine capacity of 80 tons, in the Deed of Fiduciary, Rp150,000,000 guarantee value (Notes 9).

As of December 31, 2023 and 2022, the outstanding loan is amounted to Rp4,863,390,530 and Rp3,612,261,538.

**PT Inti Konten Indonesia "INTENS"
PT Bank Syariah Indonesia Tbk**

This financing facility was extended in accordance with Addendum I Musyarakah Financing Agreement No.0270/MSY/KC-SNR/FS/3/2021 dated March 29, 2021, with the following terms and conditions:

Sharia Loan Facility:

- Maximum limit of Rp3,140,000,000.
- Fund portion Bank 16,97%, Customer 83,03%.
- Nisbah profit sharing Bank 3.66% Customer 96.34% (multi nisbah)
- Time period 48 months from March 29, 2021 to March 29, 2025.

Collaterals:

Fiduciary bills amounting to Rp3,925,000,000 (125% of the ceiling) (Note 5).

As of December 31, 2023 and 2022, the outstanding loan is amounted to Rp2,743,710,582 and Rp2,797,383,587, respectively.

b. Accrued Interest Payable

	2023 Rp	2022 Rp
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	141,995,279,294	109,427,269,614
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	63,167,743,964	51,782,598,537
Total	205,163,023,258	161,209,868,151

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Based on the letter dated September 26, 2019 No.R.II.256-OPK/DKD/09/2019 concerning the credit decision offering, the Company obtained a loan interest restructuring facility that arose on the principal loan facility. Payment of the bank interest is deferred until 2029.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, saldo utang bunga BRI masing-masing sebesar Rp141.995.279.294 dan Rp109.427.269.614.

Besarnya suku bunga restrukturisasi yang ditetapkan adalah sebesar 6% per tahun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Dimana tingkat bunga yang harus dibayarkan adalah sebesar 1% per tahun dan sisanya ditangguhkan sebesar 5% yang jatuh tempo pembayarannya pada September 2029.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")
Berdasarkan surat tertanggal 2 September 2020 No.CBG.CBS/SPPK.034/2020 tentang penyesuaian ketentuan dan syarat kredit restrukturisasi Bank Mandiri, Perusahaan mendapatkan fasilitas restrukturisasi bunga pinjaman yang timbul atas fasilitas pinjaman pokok. Pembayaran atas bunga bank tersebut ditangguhkan hingga tahun 2029.

Pada 31 Desember 2023 dan 2022 saldo utang bunga Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp63.167.743.964 dan Rp51.782.598.537.

Besarnya suku bunga restrukturisasi yang ditetapkan adalah masing-masing sebesar 6% per tahun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Dimana tingkat bunga yang harus dibayarkan adalah sebesar 1% per tahun dan sisanya ditangguhkan sebesar 5% yang jatuh tempo pembayarannya pada September 2029.

Berdasarkan proses PKPU dan keputusan homologasi tertanggal 24 Januari 2024 (Catatan 45), seluruh bunga dan denda yang tertunggak serta bunga dan denda yang timbul sampai dengan perjanjian perdamaian yang dihomologasi berkekuatan hukum tetap ditangguhkan pembayarannya hingga tanggal jatuh tempo terakhir.

As of December 31, 2023 and 2022, the balance of BRI's interest payable is amounted to Rp141,995,279,294 and Rp109,427,269,614, respectively.

The interest rate for restructuring is 6% *aper annum* as of December 31, 2023 and 2022. Where the interest rate to be paid is 1% per year and the remaining is deferred of 5% which payment due in September 2029.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")
Based on a letter dated September 2, 2020 No.CBG.CBS/SPPK.034/2020 concerning adjustments to the terms and conditions of Bank Mandiri's restructuring credit, the Company obtained a loan interest restructuring facility that arose on the principal loan facility. Payment of the bank interest is deferred until 2029.

As of December 31, 2023 and 2022, the balance of Bank Mandiri's interest payable is amounted to Rp63,167,743,964 and Rp51,782,598,537, respectively.

The interest rate for restructuring is 6% *per annum* respectively as of December 31, 2023 and 2022. Where the interest rate to be paid is 1% per year and the remaining is deferred of 5% which fall payment due in September 2029.

Based on the PKPU process and the Homologation decision dated January 24, 2024 (Note 45), all outstanding interest and penalties, as well as interest and penalties arising until the legally ratified peace agreement, are temporarily deferred in their payment until the final due date.

20. Utang Lembaga Keuangan Non-Bank

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Hewlett Packard Finance Indonesia
Jumlah/ Total

20. Non-Bank Financial Service Institutions

2023 Rp	2022 Rp
34,988,862,090	11,019,620,355
4,774,984,007	4,774,984,007
39,763,846,097	15,794,604,362

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

PT Hewlett Packard Finance Indonesia (HPFI)

Pada tanggal 22 April 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari HPFI yang digunakan untuk pembelian persediaan proyek Perusahaan.

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 12,56% per tahun dengan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 24 bulan.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA)

Pada tanggal 2 Maret 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PPA yang digunakan untuk modal kerja Perusahaan dengan tingkat bunga sebesar 12,5% per tahun dengan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 12 bulan. Plafon fasilitas pembiayaan modal kerja setinggi-tingginya sebesar Rp23.880.000.000, terdiri dari Rp15.000.000.000 ("Tranche A") dan Rp8.880.000.000 ("Tranche B"). Tranche A bersifat *revolving* dan Tranche B bersifat *non revolving*. Jaminan pembiayaan berupa 3 bidang tanah milik Perusahaan di Jl. Moh. Toha, No. 225 Palasari, Bandung dengan nilai hak tanggungan secara keseluruhan sekurang-kurangnya sebesar Rp31.044.000.000 (Catatan 9).

Berdasarkan surat No. S-3018/PPA/DINV1R/0723 tanggal 12 Juli 2023, PPA menyetujui permohonan restrukturisasi fasilitas pinjaman modal kerja dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan 23 Desember 2024.

Pada tanggal 16 Agustus 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas modal kerja bagi hasil dari PPA untuk proyek pengadaan alat ukur EMC (chamber 10m) Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2023 dengan nilai proyek Rp82.808.978.808. Plafon fasilitas modal kerja bagi hasil setinggi-tingginya sebesar Rp31.100.000.000 dan bersifat *non revolving*. Besarnya tingkat bagi hasil yaitu sebesar 12%. Jaminan pembiayaan berupa 3 bidang tanah milik Perusahaan, yaitu SHGB Nomor 19/Citeureup, SHGB Nomor 44/Pesawahan dan SHGB Nomor 48/Pesawahan dengan nilai hak tanggungan secara keseluruhan sekurang-kurangnya sebesar Rp40.430.000.000, fidusia piutang atas proyek dengan nilai penjamin sebesar Rp60.141.080.570 dan aset atau kekayaan lainnya yang telah dan akan dimiliki Perusahaan yang belum dijaminkan kepada pihak lain (Catatan 9).

PT Hewlett Packard Finance Indonesia (HPFI)

As of April 22, 2019, the Company obtained a loan facility from HPFI which was used to purchase inventory for the Company's project.

This loan bears annual interest rate of 12.56% with period of repayment of 24 months.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA)

As of March 2, 2022, the Company obtained a financing facility from PPA which was used for the Company's working capital with an interest rate of 12,5% per annum with a loan repayment period of 12 months. Maximum working capital financing facility is Rp23,880,000,000, consisting of Rp15,000,000,000 ("Tranche A") and Rp8,880,000,000 ("Tranche B"). Tranche A is revolving and Tranche B is non-revolving. Guaranteed financing in the form of 3 plots of land owned by the Company on Jl. Moh. Toha, No. 225 Palasari, Bandung with a total mortgage value of at least Rp31,044,000,000 (Note 9).

Based on letter No. S-3018/PPA/DINV1R/0723 dated July 12 2023, PPA approved the request for restructuring of the working capital loan facility with a payment due date of December 23, 2024.

On August 16 2023, the Company obtained a profit sharing working capital facility from PPA for the EMC measuring equipment procurement project (chamber 10m) Ministry of Communication and Information Technology for the 2023 budget year with a project value of Rp82,808,978,808. The maximum profit sharing working capital facility ceiling is Rp31,100,000,000 and is non-revolving. The profit sharing rate is 12%. The financing collateral is in the form of 3 plots of land owned by the Company, namely SHGB Number 19/Citeureup, SHGB Number 44/Pesawahan and SHGB Number 48/Pesawahan with a total mortgage value of at least Rp40,430,000,000, fiduciary receivables for the project with a guarantee value of at least Rp40,430,000,000. Rp60,141,080,570 and other assets or wealth that the Company has and will own that have not been pledged as collateral to other parties (Note 9).

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Pada 31 Desember 2023 total penerimaan fasilitas modal kerja bagi hasil sebesar Rp31.073.862.124 yang dibayarkan langsung kepada vendor sebesar Rp29.823.862.124 dan kepada Perusahaan sebesar Rp1.250.000.000.

Pada 31 Desember 2023 dan 2022 saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp34.988.862.090 dan Rp11.019.620.355.

Perusahaan akan melakukan restrukturisasi atas utang lembaga keuangan nonbank menjadi jangka waktu 18 tahun berdasarkan proses PKPU dan keputusan homologasi tertanggal 24 Januari 2024 (Catatan 45). Utang lembaga keuangan nonbank ini akan disajikan sebagai bagian dari pinjaman jangka panjang.

On December 31, 2023, the total proceeds from the profit sharing working capital facility amounted to Rp31,073,862,124, which was paid directly to the vendor amounting to Rp29,823,862,124 and to the Company amounting to Rp1,250,000,000.

As of December 31, 2023 and 2022, the outstanding loan is amounted to Rp34,988,862,090 and Rp11,019,620,355, respectively.

The Company will restructure non-bank financial service institutions into an 18-year term based on the PKPU process and the homologation decision dated January 24, 2024 (Note 45). The non-bank financial service institutions will be presented as part of long-term loans.

21. Liabilitas Keuangan Lancar Lainnya

Akun ini merupakan liabilitas keuangan terkait pendanaan proyek di INTENS dan IPMS dengan tingkat bunga sebesar 40%-65% dari *margin good receipt* dan 10%-11% dari nilai investasi dan 0,9%-1,2% dari pokok utang, memiliki jangka waktu jatuh tempo 3-12 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing nilainya sebesar Rp1.882.835.662 dan Rp2.267.315.250.

21. Other Current Financial Liabilities

This account represents a financial liability related to funding the INTENS and IPMS projects with an interest rate of 40%-65% of the *good receipt margin* and 10%-11% of the investment value and 0.9%-1.2% of the principal debt, has a term of maturity 3-12 months. On December 31, 2023 and 2022, the value was Rp1,882,835,662 and Rp2,267,315,250, respectively.

22. Liabilitas Sewa

Jadwal pembayaran sewa minimum alat olah data berdasarkan perjanjian sewa Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

22. Lease Liabilities

The future minimum lease payments of data processing tools required under the Company's outstanding lease agreements as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023 Rp	2022 Rp	
Kurang dari 1 Tahun	3,006,180,000	3,006,180,000	Less than 1 Year
Antara 1 - 2 Tahun	--	--	Between 1 - 2 Years
Jumlah	3,006,180,000	3,006,180,000	Total
Dikurangi Bunga	(167,833,399)	(167,833,399)	Less Interest
Nilai Kini Pembayaran Sewa Minimum	2,838,346,601	2,838,346,601	Net Present Value
Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun	(2,838,346,601)	(2,838,346,601)	Less: Due in One Year Portion
Bagian Jangka Panjang	--	--	Long Term Portion

Liabilitas sewa tersebut didasarkan atas kontrak sewa berupa alat olah data antara Perusahaan dengan PT Berca Hardayaperkasa No.249/HK.02/020803/2017 tertanggal 7 Juni 2017. Jangka waktu perjanjian tersebut sampai dengan 6 Juni 2022.

The lease liability is based on the lease contract or data processing equipment between the Company and PT Berca Hardayaperkasa No.249/HK.02/020803/2017 dated June 7, 2017. The term of the agreement is until June 6, 2022.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Perusahaan akan melakukan restrukturisasi atas seluruh liabilitas berdasarkan proses PKPU dan keputusan homologasi tertanggal 24 Januari 2024 (Catatan 45).

The Company will restructure all liabilities based on the PKPU process and homologation decision dated January 24, 2024 (Note 45).

Perusahaan mencatat beban bunga liabilitas sewa pada beban keuangan (Catatan 35) masing-masing sebesar nihil dan Rp8.161.637 pada 31 Desember 2023 and 2022.

The Company recorded interest expense of lease liabilities under financial expenses (Note 35) amounting to nil and Rp8,161,637 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

Saldo sewa yang bernilai rendah dicatat pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp1.319.076.927 dan Rp1.260.058.326 pada 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 31).

The balance of low value lease recorded in expense general and administrative expenses amounted to Rp1,319,076,927 and Rp1,260,058,326 as of December 31, 2023 and 2022, respectively (Note 31).

23. Perpajakan

23. Taxation

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	2023 Rp	2022 Rp
<u>Perusahaan</u>		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 4(2)	--	91,527,933
Pasal 28A		
Tahun 2023	3,651,483,842	--
Tahun 2022	493,808,420	493,808,420
Tahun 2021	--	1,950,512,699
Pajak Pertambahan Nilai	17,154,294,472	--
Sub Jumlah	<u>21,299,586,734</u>	<u>2,535,849,052</u>
<u>Entitas Anak</u>		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 4(2)	250,167,598	68,980,722
Pasal 22	--	1,230,000
Pasal 23	--	445,208,602
Pasal 25	--	4,280,266
Pasal 28A		
Tahun 2023	1,843,312,425	--
Tahun 2021	158,869,747	158,869,747
Pajak Pertambahan Nilai	1,455,219,414	--
Sub Jumlah	<u>3,707,569,184</u>	<u>678,569,337</u>
Jumlah	<u>25,007,155,918</u>	<u>3,214,418,389</u>

The Company
Income Tax:
Article 4(2)
Article 28A
Year 2023
Year 2022
Year 2021
Value Added Tax
Sub Total

Subsidiaries
Income Tax:
Article 4(2)
Article 22
Article 23
Article 25
Article 28A
Year 2023
Year 2021
Value Added Tax
Sub Total
Total

Perusahaan memperoleh Surat Ketetapan Pajak lebih bayar pajak penghasilan Tahun Pajak 2020 No. 00016/406/20/051/22 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp3.796.474.542 yang dikompensasikan untuk membayar Surat Tagihan Pajak PPN masa Februari dan Desember 2020 sebesar Rp520.311.426. Selisih pembayaran restitusi pajak penghasilan Pasal 28A tahun 2020 sebesar Rp2.250.026.200 dicatat dalam penyesuaian periode lalu.

The Company obtained a tax assessment letter for overpayment of income tax for the 2020 fiscal year No. 00016/406/20/051/22 dated April 26, 2022 amounting to Rp3,796,474,542 which was compensated for paying the VAT Tax Collection Letter for the period of February and December 2020 in the amount of Rp520,311,426. The difference in the payment of Article 28A income tax refund for 2020 amounting to Rp2,250,026,200 was recorded as an adjustment for the previous period.

Perusahaan memperoleh Surat Ketetapan Pajak lebih bayar pajak penghasilan Tahun Pajak 2021 No. 00042/406/21/051/23 tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp1.925.861.524 yang dikompensasikan untuk membayar surat ketetapan pajak kurang bayar atas pajak pertambahan nilai masa Desember 2018 sebesar Rp1.925.861.524. Selisih pembayaran restitusi pajak penghasilan Pasal 28A tahun 2021 sebesar Rp24.651.175 dicatat dalam penyesuaian periode lalu.

The Company obtained a Tax Assessment Letter for overpayment of income tax for the 2021 Fiscal Year No. 00042/406/21/051/23 dated May 31, 2023 amounting to Rp1,925,861,524 which was compensated to pay the underpayment tax assessment letter for value added tax for the period December 2018, amounting to Rp1,925,861,524. The difference in the payment of Article 28A income tax refund for 2021 amounting to Rp24,651,175 was recorded as an adjustment for the previous period.

Pada tahun 2023 dan 2022, Grup memperoleh Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebesar Rp3.057.876.821 dan Rp2.093.967.588 (Catatan 23.e).

In 2023 and 2022, the Group received Refunds for Overpaid Taxes amounting to Rp3,057,876,821 and Rp2,093,967,588 (Note 23.e).

b. Utang Pajak

b. Taxes Payables

	2023 Rp	2022 Rp
<u>Perusahaan</u>		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 4(2)	8,889,174,836	7,459,697,883
Pasal 21	13,529,550,303	11,281,436,931
Pasal 22	3,659,234,234	3,451,882,894
Pasal 23	3,627,121,760	3,692,024,668
Pajak Pertambahan Nilai	--	1,818,093,942
Sub Jumlah	29,705,081,133	27,703,136,318
<u>Entitas Anak</u>		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 4(2)	188,338,153	--
Pasal 21	25,651,455	5,719,140
Pasal 23	12,565,637	63,305,040
Denda Pajak	--	7,273,635
Pajak Pertambahan Nilai	5,229,273,455	5,440,746,280
Sub Jumlah	5,455,828,700	5,517,044,095
Jumlah	35,160,909,833	33,220,180,413

The Company
Income Tax:
Article 4(2)
Article 21
Article 22
Article 23
Value Added Tax
Sub Total
Subsidiaries
Income Tax:
Article 4(2)
Article 21
Article 23
Tax Penalty
Value Added Tax
Sub Total
Total

c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

c. Income Tax Benefit (Expense)

	2023 Rp	2022 Rp
<u>Perusahaan</u>		
Penyesuaian Periode Lalu (Catatan 23a)	(24,651,175)	(2,250,026,200)
Pajak Tangguhan	1,502,466,130	(744,370,971)
	1,477,814,955	(2,994,397,171)
<u>Entitas Anak</u>		
Pajak Kini	(123,188,120)	--
Pajak Tangguhan	(496,298,830)	77,224,675
	(619,486,950)	77,224,675
Jumlah	858,328,005	(2,917,172,496)

The Company
Prior Year Adjustment (Notes 23a)
Deferred Tax

Subsidiaries
Current Tax
Deferred Tax

Total

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)



Pajak Kini

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dan penghasilan lainnya komersial dengan laba kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Current Tax

A reconciliation between loss before tax as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income for the years ended December 31, 2023 and 2022 is as follows:

	2023 Rp	2022 Rp	
Rugi Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	(97,138,450,594)	(79,316,575,521)	Loss Before Tax as Consolidated Statements of Comprehensive Income
Dikurangi:			Deduction:
Pajak Final	(2,914,885,852)	(5,842,169,225)	Final Income Tax
Rugi Sebelum Pajak Entitas Anak	3,797,884,468	5,122,852,697	Loss Before Tax of Subsidiaries
Disesuaikan dengan Jurnal Eliminasi Konsolidasi	2,954,289,746	5,880,056,429	Adjusted with Consolidated Elimination Journal
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan - Perusahaan	(93,301,162,232)	(74,155,835,620)	Loss Before Income Tax - The Company
Beda Waktu			Timing difference
Amortisasi Aset Takberwujud	1,777,261,800	3,462,546,184	Amortization of Intangible Assets
Penambahan (Pemulihan) Penyisihan Piutang	1,607,470,146	(1,092,500,000)	Addition (Recovery) of Receivables Allowance
Beban Penurunan Nilai Persediaan	(3,760,702,565)	(2,423,240,990)	Impairment of Receivables Inventory
Beban Masa Garansi	564,378	(1,836,127,879)	Warranty Period Expenses
Beban Penyusutan Aset Tetap	2,152,682,941	2,138,803,327	Depreciation of Fixed Assets
Aset Hak Guna	--	(2,428,138,795)	Right-of-Use Assets
Imbalan Pascakerja	5,052,114,800	(1,204,846,259)	Post-Employee Benefits
Jumlah Beda Waktu	6,829,391,500	(3,383,504,412)	Total Timing Differences
Beda Tetap			Permanent Differences
Alokasi Beban atas Pendapatan yang Dikenakan Pajak Final	106,150,237,133	112,412,215,161	Allocation of Expense Upon Income Subject to Final Tax
Beban yang Tidak Dapat Dibiayakan	24,249,728,505	27,241,359,380	Non-Deductible Expenses
Pendapatan Bunga dan Jasa Giro	(205,273,785)	(256,618,901)	Interest Income and Giro
Pendapatan Sewa	(5,914,880,284)	(9,227,285,701)	Rental Revenue
Pendapatan Jasa Konstruksi	(114,067,033,672)	(122,449,651,661)	Revenue Construction Services
Jumlah Beda Tetap	10,212,777,897	7,720,018,278	Total Permanent Differences
Rugi Fiskal Sebelum Kompensasi Rugi - Perusahaan	(76,258,992,835)	(69,819,321,754)	Tax Loss Before Tax Loss Carried Forward - The Company
Rugi Fiskal Periode Sebelumnya:			Previous Period Fiscal Loss:
Rugi Fiskal 2022	(69,819,321,754)	--	Fiscal Loss 2022
Rugi Fiskal 2021	(57,399,984,098)	(57,399,984,098)	Fiscal Loss 2021
Rugi Fiskal 2020	(41,252,705,254)	(41,252,705,254)	Fiscal Loss 2020
Rugi Fiskal 2019	(70,907,594,486)	(70,907,594,486)	Fiscal Loss 2019
Akumulasi Rugi Fiskal - Perusahaan	(315,638,598,427)	(239,379,605,592)	Tax loss - The Company
Beban Pajak Kini dengan Tarif Pajak yang Berlaku			Current Tax Expenses with Applicable Tax Rates
Dikurangi:			Less:
Pajak Penghasilan Dibayar di Muka			Prepaid Income Tax
Pasal 22	1,971,297,904	10,113,405	Article 22
Pasal 23	1,680,185,938	483,695,015	Article 23
Pajak Penghasilan Lebih Bayar - Perusahaan	3,651,483,842	493,808,420	Overpayment Income Tax - The Company
Taksiran Beban Pajak Penghasilan Entitas Anak			Subsidiary's Estimated Income Tax Expense
Laba Kena Pajak	559,946,000	--	Taxable Income
Beban Pajak Penghasilan	123,188,120	--	Income Tax Expense
Pajak Penghasilan Dibayar di Muka Pasal 22, 23 dan 25	1,966,500,545	--	Prepaid Income Tax Article 22, 23 and 25
Taksiran Pajak Penghasilan Lebih Bayar Entitas Anak	1,843,312,425	--	Subsidiary's Estimated Overpayment Income Tax
Taksiran Pajak Penghasilan Lebih Bayar Konsolidasian	5,494,796,267	493,808,420	Estimated Consolidated Overpayment Income Tax

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Perusahaan belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Badan untuk tahun pajak 2023. Namun demikian, taksiran penghasilan kena pajak tersebut di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2023.

As of the date of this financial report the Company has not submitted an Annual Corporate Income Tax Return (SPT) for the 2023 tax year. However, the estimated taxable income mentioned above is the basis for completing the 2023 Annual Corporate Income Tax Return.

d. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan laba rugi komersial dengan dasar pengenaan pajak. Aset dan liabilitas pajak tangguhan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode ketika aset direalisasikan dan liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang telah ditetapkan.

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

d. Deferred Tax

Deferred tax is calculated based on the effect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities according to the commercial consolidated statement of profit or loss and the tax bases. Deferred tax assets and liabilities are adjusted with the tax rates in effect in the period when the assets are realized and the liabilities are settled based on the tax rates that have been determined.

The details of deferred tax assets and liabilities are as follows:

	2022	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/ Credit (Charge) to Profit or Loss	Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged to Other Comprehensive Income	Penyesuaian/ Adjustment	2023	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	The Company
Perusahaan						
Penyisihan Piutang	47,611,911,775	353,643,432	--	--	47,965,555,207	Receivables Allowance
Penyisihan Persediaan	5,689,862,232	(827,354,564)	--	--	4,862,507,668	Inventories Allowance
Penyisihan Piutang Lain-lain	4,933,013,444	--	--	--	4,933,013,444	Other Receivables Allowance
Penyisihan Penyertaan Saham	12,002,211,347	--	--	--	12,002,211,347	Investments Allowance
Penyusutan Aset Tetap	11,865,970,908	473,590,247	--	--	12,339,561,155	Fixed Assets Depreciation
Amortisasi Aset Takberwujud	(288,151,370)	390,997,596	--	--	102,846,226	Amortization of Intangible Assets
Amortisasi Masa Garansi	110,706,460	124,163	--	--	110,830,623	Amortization of Warranty Period
Beban Manfaat Karyawan	29,849,033,510	1,111,465,256	79,170,260	--	31,039,669,026	Employee Benefits Expense
Rugi Fiskal	52,663,513,230	16,776,978,424	--	--	69,440,491,654	Fiscal Losses
Revaluasi Aset Tanah	(13,429,515,000)	--	--	--	(13,429,515,000)	Revaluation of Land Assets
	151,008,556,536	18,279,444,554	79,170,260	--	169,367,171,350	
Dikurangi: Cadangan Nilai	(97,918,013,816)	(16,776,978,424)	--	--	(114,694,992,240)	Less: Allowance Impairment
Subjumlah - Induk	53,090,542,720	1,502,466,130	79,170,260	--	54,672,179,110	Subtotal - Parent
Entitas Anak	8,315,741,531	40,994,170	--	(537,293,000)	7,819,442,701	Subsidiaries
Jumlah	61,406,284,251	1,543,460,300	79,170,260	(537,293,000)	62,491,621,811	Total

	2021	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/ Credit (Charge) to Profit or Loss	Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged to Other Comprehensive Income	2022	
	Rp	Rp	Rp	Rp	The Company
Perusahaan					
Penyisihan Piutang	47,852,261,775	(240,350,000)	--	47,611,911,775	Receivables Allowance
Penyisihan Persediaan	6,222,975,250	(533,113,018)	--	5,689,862,232	Inventories Allowance
Penyisihan Piutang Lain-lain	4,933,013,444	--	--	4,933,013,444	Other Receivables Allowance
Penyisihan Penyertaan Saham	12,002,211,347	--	--	12,002,211,347	Investments Allowance
Penyusutan Aset Tetap	11,395,434,176	470,536,732	--	11,865,970,908	Fixed Assets Depreciation
Amortisasi Aset Takberwujud	(1,049,911,530)	761,760,160	--	(288,151,370)	Amortization of Intangible Assets
Amortisasi Masa Garansi	514,654,593	(403,948,133)	--	110,706,460	Amortization of Warranty Period
Aset Hak Guna	534,190,535	(534,190,535)	--	--	Right-of-Use Assets
Beban Manfaat Karyawan	28,909,968,952	(265,066,177)	1,204,130,735	29,849,033,510	Employee Benefits Expense
Rugi Fiskal	37,303,262,444	15,360,250,786	--	52,663,513,230	Fiscal Losses
Revaluasi Aset Tanah	(13,429,515,000)	--	--	(13,429,515,000)	Revaluation of Land Assets
Sub Jumlah	135,188,545,986	14,615,879,815	1,204,130,735	151,008,556,536	Sub Total
Dikurangi: Cadangan Nilai	(82,557,763,030)	(15,360,250,786)	--	(97,918,013,816)	Less: Allowance Impairment
Subjumlah - Induk	52,630,782,956	(744,370,971)	1,204,130,735	53,090,542,720	Subtotal - parent
Entitas Anak	8,238,516,856	77,224,675	--	8,315,741,531	Subsidiaries
Jumlah	60,869,299,812	(667,146,296)	1,204,130,735	61,406,284,251	Total

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

**e. Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat
Ketetapan Pajak (SKP)**

Pada tahun 2023 dan 2022, Grup menerima
Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan
Pajak (STP) sebagai berikut:

**e. Tax Collection Letter (STP) and Tax
Assessment Letter (SKP)**

In 2023 and 2022, the Group received Tax
Assessment Letter (SKP) and Tax Collection
Notice (STP) are as follows:

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak/ Refund of Tax Overpayment				
Jenis Pajak/ Type	No. Keputusan/ Decision	Periode Pajak/ Tax Period	Tanggal Terima/ Date Received	Nilai/ Amount
Perusahaan/ The Company				
SKPPKP PPN/ VAT	KEP-00199/SKPPKP/KPP.190303/2022	September 2022	13 Desember/ December 2023	416,110,800
INTENS				
SKPPKP PPN/ VAT	KEP-00262/PPN/KPP.0917/2023	Julii/ July 2019	12 September 2023	2,641,766,021
			Total	3,057,876,821
Perusahaan/ The Company				
KEP PPh Pasal 4 (2)/ Article 4 (2)	KEP-00047.PPH/WPJ.19/KP.03/2022	Desember/ December 2019	08 April 2022	1,473,330,828
SKPPKP PPN/ VAT	KEP-00111.PPN/WPJ.19/KP.03/2022	November 2019	16 Maret/ March 2022	493,342,236
SKPPKP PPN/ VAT	KEP-00168.PPN/WPJ.19/KP.03/2022	Mei/ May 2019	11 April 2022	10,539,675
SKPPKP PPN/ VAT	KEP-00169.PPN/WPJ.19/KP.03/2022	Julii/ July 2019	08 April 2022	1,125,000
SKPPKP PPN/ VAT	KEP-00170.PPN/WPJ.19/KP.03/2022	September 2019	08 April 2022	1,258,000
SKPPKP PPN/ VAT	KEP-00171.PPN/WPJ.19/KP.03/2022	Desember/ December 2019	08 April 2022	19,799,477
SKPPKP PPN/ VAT	KEP-00174.PPN/WPJ.19/KP.03/2022	Agustus/ August 2019	08 April 2022	2,495,520
SKPPKP PPN/ VAT	KEP-00178.PPN/WPJ.19/KP.03/2022	Julii/ July 2019	08 April 2022	786,243
SKPPKP PPN/ VAT	KEP-00182.PPN/WPJ.19/KP.03/2022	Februari/ February 2019	08 April 2022	853,613
SKPPKP PPN/ VAT	KEP-00183.PPN/WPJ.19/KP.03/2022	Maret/ March 2019	08 April 2022	4,431,548
SKPPKP PPN/ VAT	KEP-00184.PPN/WPJ.19/KP.03/2022	Januari/ January 2021	08 April 2022	42,128,697
SKPPKP PPN/ VAT	KEP-00185.PPN/WPJ.19/KP.03/2022	September 2019	08 April 2022	4,368,002
SKPPKP PPN/ VAT	KEP-00186.PPN/WPJ.19/KP.03/2022	Februari/ February 2021	08 April 2022	21,027,995
SKPPKP PPN/ VAT	KEP-00190.PPN/WPJ.19/KP.03/2022	Juni/ June 2019	08 April 2022	7,780,829
SKPPKP PPN/ VAT	KEP-00196.PPN/WPJ.19/KP.03/2022	Maret/ March 2021	11 April 2022	9,758,072
SKPPKP PPN/ VAT	KEP-00197.PPN/WPJ.19/KP.03/2022	Oktober/ October 2019	11 April 2022	941,853
			Total	2,093,967,588

Surat Ketetapan Pajak/ Tax Assessment Letter(s)				
Jenis Pajak/ Type	No. STP/ SKP	Periode Pajak/ Tax Period	Tanggal/ Date	Nilai/ Amount
Perusahaan/ The Company				
STP PPN/ VAT	00002/187/23/051/2	Februari/ February 2023	22 Mei/ May 2023	500,000
STP PPN/ VAT	00050/107/23/051/23	Februari/ February 2023	22 Mei/ May 2023	500,000
STP PPN/ VAT	00003/187/23/051/23	Maret/ March 2023	22 Mei/ May 2023	500,000
	00051/107/23/051/23	Maret/ March 2023	22 Mei/ May 2023	500,000
STP PPN/ VAT	00098/107/23/051/23	April 2023	26 Juni/ June 2023	500,000
STP PPN/ VAT	00004/187/23/051/23	April 2023	26 Juni/ June 2023	500,000
STP PPh 23	00009/103/21/051/23	Desember/ December 2021	26 Juni/ June 2023	7,826,855
SKPKB 4 (2)	00024/240/21/051/23	Desember/ December 2021	12 Juni/ June 2023	164,238,957
STP PPN/ VAT	00038/187/21/051/23	Juni/ June 2021	12 Juni/ June 2023	15,962,644
SKPKB PPh 23	00046/203/21/051/23	Juni/ June 2021	12 Juni/ June 2023	107,378,999
SKPKB PPN/ VAT	00070/287/21/051/23	Julii/ July 2021	12 Juni/ June 2023	7,679,648
SKPKB PPN/ VAT	00071/287/21/051/23	November 2021	12 Juni/ June 2023	2,787,511
SKPKB PPN/ VAT	00072/287/21/051/23	Desember/ December 2021	12 Juni/ June 2023	1,440,613
STP PPN/ VAT	00083/107/21/051/23	Juni/ June 2021	12 Juni/ June 2023	1,022,042
SKPKB PPN/ VAT	000126/207/21/051/23	April 2021	12 Juni/ June 2023	2,154,250

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Surat Ketetapan Pajak/ Tax Assessment Letter(s)				
Jenis Pajak/ Type	No. STP/ SKP	Periode Pajak/ Tax Period	Tanggal/ Date	Nilai/ Amount
SKPKB PPN/ VAT	000126/207/21/051/23	Junii/ June 2021	12 Junii/ June 2023	922,075
SKPKB PPN/ VAT	000127/207/21/051/23	Agustus/ August 2021	12 Junii/ June 2023	3,325,000
STP PPh 21	865/101/22/422/23	Desember/ December 2022	9 Junii/ June 2023	47,600,200
SKPKB PPh 21	00028/201/20/422/23	Januari-Desember/ January-December 2020	12 September 2023	2,289,019,332
SKPKB PPh 21	00011/201/20/422/23	Januari-Desember/ January-December 2021	8 Junii/ June 2023	1,289,795,121
SKPKB PPh 21	00004/201/19/422/23	Desember/ December 2019	9 Junii/ June 2023	1,433,022,836
SKPKB PPh 21	00001/202/20/422/23	Desember/ December 2020	12 September 2023	228,229,893
SKPKB PPh 21	01013/101/21/422/22-23/09/2022	Oktober/ October 2022	18 Agustus/ August 2023	11,840,439
STP PPN/ VAT	00040/187/051/22	Januari/ January 2020	26 April 2022	90,029,513
STP PPN/ VAT	00041/187/051/22	Februari/ February 2020	26 April 2022	42,900,492
SKPKB PPN/ VAT	00090/207/20/051/22	Desember/ December 2020	26 April 2022	147,415,106
STP PPN/ VAT	00042/187/051/22	Desember/ December 2020	26 April 2022	232,595,560
STP PPN/ VAT	00076/107/20/051/22	Desember/ December 2020	26 April 2022	7,370,755
STP PPN/ VAT	00085/187/21/051/22	April 2021	20 Mei/ May 2022	7,523,395
STP PPh 22	00014/102/21/051/22	Oktober/ October 2021	31 Mei/ May 2022	1,543,815
STP 4 (2)	00021/140/21/051/22	Oktober/ October 2021	31 Mei/ May 2022	517,198
STP PPh 22	00015/102/21/051/22	Desember/ December 2021	31 Mei/ May 2022	27,240,414
STP 4 (2)	00022/140/21/051/22	Desember/ December 2021	31 Mei/ May 2022	22,598,311
STP PPh 23	00107/103/21/051/22	Desember/ December 2021	31 Mei/ May 2022	8,701,491
STP PPN/ VAT	00086/187/21/051/22	Desember/ December 2021	20 Mei/ May 2022	1,791,333
Pajak Penghasilan/ Income Tax	00029/106/21/051/22	2021	22 Junii/ June 2022	1,000,000
STP PPN/ VAT	00061/107/22/051/22	Maret/ March 2022	13 Junii/ June 2022	500,000
STP PPN/ VAT	00125/107/22/051/22	April 2022	4 Agustus/ August 2022	4,046,307
Total				6,213,020,105

Pada tanggal 24 Agustus 2020 Perusahaan memperoleh surat ketetapan pajak kurang bayar atas pajak pertambahan nilai masa Desember 2018 sebesar Rp12.424.262.277, Nomor 00312/207/18/051/20 atas hal itu Perusahaan mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak dengan No. 4298/KU.07/020900/2020, pada tanggal 14 Oktober 2021 perusahaan menerima surat keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-00826/KEB/WPJ.19/2021 berupa mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dan mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar yang semula Rp12.424.262.277 menjadi Rp12.282.823.637, berdasarkan keputusan tersebut Perusahaan mengajukan banding. Pengajuan banding atas keputusan tersebut ditolak oleh pengadilan pajak dan Perusahaan sedang dalam proses persiapan pengajuan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Pada tahun 2023 Direktur Jendral Pajak memotong penerimaan lebih bayar pajak penghasilan Tahun Pajak 2021 sebesar Rp1.925.861.524 sebagai pengurang SKPKB tersebut (Catatan 23.a).

On August 24, 2020 the Company received an underpayment tax assessment letter for value added tax for the December 2018 period of Rp12,424,262,277, Number 00312/207/18/051/20 on this matter the Company submitted an objection request to the Director General of Taxes with NO. 4298/KU.07/020900/2020, on October 14, 2021 the Company received a Director General of Tax Decree No. KEP-00826/KEB/WPJ.19/2021 in the form of granting part of the taxpayer's objection and reducing the amount of accrued tax which was originally Rp12,424,262,277 to Rp12,282,823,637, based on this decision the Company filed an appeal. The appeal against this decision was rejected by the tax court and the Company is in the process of preparing a judicial review application at the Supreme Court. In 2023, the Director General of Tax Decree deducts income tax overpayments for the 2021 Fiscal Year amounting to Rp1,925,861,524 as a deduction from the SKPKB (Note 23.a).



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

24. Provisi Masa Pemeliharaan

Provisi masa pemeliharaan merupakan cadangan yang digunakan untuk mengantisipasi terjadinya biaya pemeliharaan selama masa garansi. Berdasarkan evaluasi manajemen, pada 31 Desember 2023 dan 2022 cadangan masa garansi ditetapkan sebesar maksimal 2% dari penjualan peralatan yaitu masing-masing sebesar Rp503.775.559 dan Rp503.211.181.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan tersebut cukup untuk mengantisipasi terjadinya klaim beban garansi dari para pelanggan.

24. Guarantees Period Provision

Guarantees period provision is a reserve that is used to anticipate maintenance costs during the warranty period. Based on management's evaluation, as of December 31, 2023 and 2022 the reserve guarantee period is set at a maximum of 2% of equipment sales each amounting to Rp503,775,559 and Rp503,211,181, respectively.

Management believes that these reserves are sufficient to anticipate the occurrence of claims for warranty expenses from customers.

25. Pendapatan Diterima di Muka

Pihak Berelasi/ *Related Parties* (Catatan/ *Note* 36)
Pihak Ketiga/ *Third Parties*
Jumlah/ *Total*

Pendapatan diterima di muka adalah uang muka penjualan yang telah diterima dari pelanggan. Penyelesaian dan pengiriman barang atas kontrak tersebut diperkirakan terjadi pada tahun 2024.

25. Unearned Revenues

2023 Rp	2022 Rp
34,818,832,149	25,602,436,267
16,664,528,822	12,776,385,613
51,483,360,971	38,378,821,880

Unearned revenue is sales advances received from customers. The completion and delivery of goods for these contracts is expected to occur in 2024.

26. Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan kerja tanpa pendanaan. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut adalah 35 dan 70 orang masing-masing pada 31 Desember 2023 dan 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, perhitungan imbalan kerja Grup dihitung oleh KKA Indra Katarya Situmeang aktuaris independen. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

26. Employee Benefit Liabilities

Other post-employment and other long-term benefits are accounted as unfunded defined benefit plan. The number of employees entitled to the benefit is 35 and 70 persons on December 31, 2023 and 2022, respectively.

As of December 31, 2023 and 2022, Group's employee benefits is calculated by KKA Indra Katarya Situmeang, an independent actuary. The actuarial calculations were carried out using the following key assumptions:

	2023	2022	
Asumsi Ekonomis			Economic Assumptions
Tingkat Diskonto	5,82% - 6,90%	3,71% - 7,40%	Discount Rate
Tingkat Kenaikan Gaji	6.00%	6.00%	Future Salary Increase
Asumsi Demografi			Demographic Assumptions
Pensiun	55 tahun/ years		Retirement
Mortalitas	Tabel Mortalita Indonesia TMI-2019/ Indonesian Mortality Table TMI-2019		Mortality
Cacat	0,01% dari tabel mortalitas/ 0.01% of mortality table		Disability
Pengunduran Diri	2% usia/ age 18 - 54 tahun/ years		Resignation

Jumlah yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2023				
	Program Pesangon/ Pension Plan	Imbalan Jangka Panjang Lain/ Other Long Term Employee Benefit	Masa Persiapan Pensiun/ Retirement Preparation Period	Program Manfaat Pensiun/ Pension Benefit Program	Jumlah/ Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Nilai Kini Liabilitas/ Present Value of Obligation	78,490,494,914	51,318,110	10,016,032,556	211,336,478,244	299,894,323,824
Nilai Wajar Aset Program/ Fair Value of Plan Assets	--	--	--	(158,804,919,157)	(158,804,919,157)
Jumlah/ Total	78,490,494,914	51,318,110	10,016,032,556	52,531,559,087	141,089,404,667

	2022				
	Program Pesangon/ Pension Plan	Imbalan Jangka Panjang Lain/ Other Long Term Employee Benefit	Masa Persiapan Pensiun/ Retirement Preparation Period	Program Manfaat Pensiun/ Pension Benefit Program	Jumlah/ Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Nilai Kini Liabilitas/ Present Value of Obligation	76,823,626,065	154,645,273	12,797,729,044	210,686,388,200	300,462,388,582
Nilai Wajar Aset Program/ Fair Value of Plan Assets	--	--	--	(164,784,963,534)	(164,784,963,534)
Jumlah/ Total	76,823,626,065	154,645,273	12,797,729,044	45,901,424,666	135,677,425,048

Perusahaan menyelenggarakan program dana imbalan pasti untuk sebagian besar karyawan yang memenuhi persyaratan. Aset program Perusahaan dikelola oleh Dana Pensiun Inti dimana perhitungannya mengacu pada Surat Keputusan Direksi Perusahaan No.KN.018/2017 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Inti yang telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP13/NB.11/2018 tanggal 22 Januari 2018.

Imbalan jangka panjang lain merupakan program penghargaan masa kerja karyawan.

Mutasi nilai wajar dari aset program adalah sebagai berikut:

The Company has a defined reward plan for most of its employees who meet the requirements. The Company's program assets are managed by the Dana Pensiun Inti where the calculations refer to the Decree of the Company's Directors No.KN.018/2017 concerning the Pension Fund Regulation from the Dana Pensiun Inti which was approved by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) through the Decree of the OJK Board of Commissioners No. KEP13/NB.11/2018 January 22, 2018.

Another long-term benefit is an employee service reward program.

Movements in the fair value of plan assets were as follows:



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

	2023 Rp	2022 Rp
Saldo Awal Nilai Wajar Aset Program/ <i>Beginning Balance of Fair Value of Plan Asset</i>	164,784,963,534	181,868,582,610
Bunga Neto atas Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto <i>Net Interest on Net Defined Benefit Liabilities (Assets)</i>	11,346,836,013	12,762,417,441
Imbalan Hasil atas Aset Program/ <i>Benefit yield on Program Assets</i>	6,030,803,069	(6,440,003,048)
Pembayaran iuran Pemberi Kerja/ <i>Employer contribution payment</i>	410,176,899	190,084,157
Pembayaran iuran Peserta Program/ <i>Employee contribution payment</i>	76,853,302	--
Pembayaran Manfaat/ <i>Benefit Paid</i>	(23,844,713,660)	(23,596,117,626)
Saldo Akhir Nilai Wajar Aset Program/ <i>Ending Balance of Fair Value of Plan Assets</i>	158,804,919,157	164,784,963,534

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movements in long term employee benefit liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2023				
	Program Pesangon/ <i>Pension Plan</i>	Imbalan Jangka Panjang Lain/ <i>Other Long Term Employee Benefit</i>	Masa Persiapan Pensiun/ <i>Retirement Preparation Period</i>	Program Manfaat Pensiun/ <i>Pension Benefit Program</i>	Jumlah/ <i>Total</i> Rp
Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Beban Diakui di Laba Rugi (Catatan 30, 31 dan 32)/ <i>Expense Recognized in Profit Loss (Notes 30, 31 and 32)</i>	76,823,626,065	154,645,273	12,797,729,044	45,901,424,666	135,677,425,048
Pembayaran Manfaat/ <i>Payment of Benefit</i>	4,004,019,926	(7,702,163)	893,252,995	3,686,585,254	8,576,156,012
Jumlah Diakui di Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Amount Recognized in Other Comprehensive Income</i>	(3,018,239,313)	(95,625,000)	--	(410,176,899)	(3,524,041,212)
Saldo pada Akhir Periode/ <i>Ending Balance at The End of Period</i>	681,088,236	--	(3,674,949,483)	3,353,726,066	359,864,819
	78,490,494,914	51,318,110	10,016,032,556	52,531,559,087	141,089,404,667

	2022				
	Program Pesangon/ <i>Pension Plan</i>	Imbalan Jangka Panjang Lain/ <i>Other Long Term Employee Benefit</i>	Masa Persiapan Pensiun/ <i>Retirement Preparation Period</i>	Program Manfaat Pensiun/ <i>Pension Benefit Program</i>	Jumlah/ <i>Total</i> Rp
Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Beban Diakui di Laba Rugi (Catatan 30, 31 dan 32)/ <i>Expense Recognized in Profit Loss (Notes 30, 31 and 32)</i>	84,835,146,825	208,676,526	13,523,962,279	32,841,164,153	131,408,949,783
Pembayaran Manfaat/ <i>Payment of Benefit</i>	(1,020,851,577)	(21,531,253)	517,355,917	3,183,924,200	2,658,897,287
Jumlah Diakui di Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Amount Recognized in Other Comprehensive Income</i>	(3,536,053,975)	(32,500,000)	(105,105,415)	(190,084,156)	(3,863,743,546)
Saldo pada Akhir Periode/ <i>Ending Balance at The End of Period</i>	(3,454,615,208)	--	(1,138,483,737)	10,066,420,469	5,473,321,524
	76,823,626,065	154,645,273	12,797,729,044	45,901,424,666	135,677,425,048

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements of present value of defined benefit liabilities are as follows:

	2023				
	Program Pesangon/ <i>Pension Plan</i>	Imbalan Jangka Panjang Lain/ <i>Other Long Term Employee Benefit</i>	Masa Persiapan Pensiun/ <i>Retirement Preparation Period</i>	Program Manfaat Pensiun/ <i>Pension Benefit Program</i>	Jumlah/ <i>Total</i> Rp
Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Bunga/ <i>Interest Expense</i>	76,823,626,065	154,645,273	12,797,729,044	210,686,388,200	300,462,388,582
Biaya Jasa Kini/ <i>Current Service Cost</i>	1,181,708,395	4,598,333	272,996,441	14,743,541,439	16,202,844,608
Biaya Jasa Lalu/ <i>Past Service Cost</i>	3,772,169,380	20,595,887	774,271,712	366,733,130	4,933,770,109
Pembayaran Imbalan Kerja/ <i>Payment of Benefit</i>	(949,857,849)	--	(154,015,158)	--	(1,103,873,007)
(Keuntungan) Kerugian Aktuarial/ <i>(Gain) Loss Actuary</i>	(3,018,239,313)	(95,625,000)	--	(23,844,713,660)	(26,958,577,973)
Saldo pada Akhir Periode/ <i>Ending Balance Period</i>	681,088,236	(32,896,383)	(3,674,949,483)	9,384,529,135	6,357,771,505
	78,490,494,914	51,318,110	10,016,032,556	211,336,478,244	299,894,323,824

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

	2022				
	Program Pesangon/ Pansion Plan	Imbalan Jangka Panjang Lain/ Other Long Term Employee Benefit	Masa Persiapan Pensiun/ Retirement Preparation Period	Program Manfaat Pensiun/ Pension Benefit Program	Jumlah/ Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo Awal/ Beginning Balance	84,835,146,825	208,676,526	13,523,962,279	214,709,746,763	313,277,532,393
Biaya Bunga/ Interest Expense	1,420,698,185	5,962,857	251,724,998	15,225,504,753	16,903,890,793
Biaya Jasa Kini/ Current Service Cost	1,196,202,246	39,528,243	265,630,919	720,836,888	2,222,198,296
Biaya Jasa Lalu/ Past Service Cost	(3,637,752,008)	--	--	--	(3,637,752,008)
Pembayaran Imbalan Kerja/ Payment of Benefit (Keuntungan) Kerugian Aktuarial (Gain) Loss Actuary	(3,536,053,975)	(32,500,000)	(105,105,415)	(23,596,117,625)	(27,269,777,015)
Saldo pada Akhir Periode/ Ending Balance Period	76,823,626,065	154,645,273	12,797,729,044	210,686,388,200	300,462,388,582

Komponen biaya imbalan kerja jangka panjang yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Component of long term employee benefit expense recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2023				
	Program Pesangon/ Pansion Plan	Imbalan Jangka Panjang Lain/ Other Long Term Employee Benefit	Masa Persiapan Pensiun/ Retirement Preparation Period	Program Manfaat Pensiun/ Pension Benefit Program	Jumlah/ Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Jasa Kini/ Current Service Cost	3,772,169,380	20,595,887	774,271,712	366,733,130	4,933,770,109
Biaya Jasa Lalu/ Past Service Cost	(949,857,849)	--	(154,015,158)	--	(1,103,873,007)
Biaya Bunga/ Interest Cost	1,181,708,395	4,598,333	272,996,441	3,319,852,124	4,779,155,293
Imbal Hasil Ekspektasi Aset Program/ Expected Return on Plan Assets	--	(32,896,383)	--	--	(32,896,383)
Beban Tahun Berjalan Diakui di Laba Rugi/ Expense for the Year Recognized in Profit Loss	4,004,019,926	(7,702,163)	893,252,995	3,686,585,254	8,576,156,012
Perubahan Asumsi/ Experience Adjustments	681,088,236	--	(3,674,949,483)	9,384,529,135	6,390,667,888
Perubahan atas Dampak atas Aset di Luar Bunga/ Changes in the Impact on Assets excluding Interest	--	--	--	(26,723,039)	(26,723,039)
Imbal Hasil Ekspektasi Aset Program/ Expected Return on Plan Assets	--	--	--	(6,004,080,030)	(6,004,080,030)
Jumlah Diakui di Penghasilan Komprehensif Lain/ Amounts Recognized in Other Comprehensive Income	681,088,236	--	(3,674,949,483)	3,353,726,066	359,864,819

	2022				
	Program Pesangon/ Pansion Plan	Imbalan Jangka Panjang Lain/ Other Long Term Employee Benefit	Masa Persiapan Pensiun/ Retirement Preparation Period	Program Manfaat Pensiun/ Pension Benefit Program	Jumlah/ Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Jasa Kini/ Current Service Cost	1,196,202,246	39,528,243	265,630,919	720,836,888	2,222,198,296
Biaya Bunga/ Interest Cost	(3,637,752,008)	--	--	--	(3,637,752,008)
Biaya Jasa Lalu/ Past Service Cost	1,420,698,185	5,962,857	251,724,998	2,463,087,312	4,141,473,352
Imbal Hasil Ekspektasi Aset Program/ Expected Return on Plan Assets	--	(67,022,353)	--	--	(67,022,353)
Beban Tahun Berjalan Diakui di Laba Rugi/ Expense for the Year Recognized in Profit Loss	(1,020,851,577)	(21,531,253)	517,355,917	3,183,924,200	2,658,897,287
Penilaian Kembali Liabilitas (Keuntungan) Kerugian Aktuarial/ (Gain) Loss Actuary	(3,454,615,208)	--	--	--	(3,454,615,208)
Perubahan Asumsi/ Experience Adjustments	--	--	(1,138,483,737)	3,626,417,421	2,487,933,684
Perubahan atas Dampak atas Aset di Luar Bunga/ Changes in the Impact on Assets excluding Interest	--	--	--	303,696,163	303,696,163
Imbal Hasil Ekspektasi Aset Program/ Expected Return on Plan Assets	--	--	--	6,136,306,885	6,136,306,885
Jumlah Diakui di Penghasilan Komprehensif Lain/ Amounts Recognized in Other Comprehensive Income	(3,454,615,208)	--	(1,138,483,737)	10,066,420,469	5,473,321,524

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

The defined benefits plan gives the Group exposure of interest rate risk and salary risk.

Risiko Tingkat Bunga

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah yang berlaku pada periode perhitungan. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Interest Rate Risk

The present value of the defined benefits obligation is calculated using the interest rate of government bond applicable at the time of calculation. A decreased in the bond interest rate will increased the plan liability.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu asumsi gaji kenaikan di masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the assumption of future salary increase of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis dibawah ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan dan semua asumsi lain akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined benefit obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible change of the respective assumption occur at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

	2023 Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti/ Present Value of Defined Benefit Obligation Rp	2022 Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti/ Present Value of Defined Benefit Obligation Rp	
Analisa Sensitivitas Tingkat Diskonto			Sensitivity Analysis of Discount Rate
Jika Tingkat + 1%	285,328,211,170	297,119,454,580	If Rate + 1%
Jika Tingkat - 1%	316,444,291,484	304,332,183,238	If Rate - 1%
Analisa Sensitivitas Kenaikan Gaji			Sensitivity Analysis of Salary Increase
Jika Tingkat + 1%	301,212,199,382	302,253,225,380	If Rate + 1%
Jika Tingkat - 1%	298,716,885,535	298,831,566,420	If Rate - 1%

Jatuh Tempo Profil Liabilitas Manfaat Pasti adalah sebagai berikut:

Maturity Profile of the Defined Benefit Obligation are as follow:

	2023 Rp	2022 Rp	
Nilai kini Manfaat Diharapkan akan Dibayar di:			Present Value of Benefits Expected to be Paid in:
dibawah 1 tahun	80,085,909,152	73,083,621,121	Below 1 year
1 - 2 tahun	207,097,223,955	212,049,578,838	1 - 2 years
2 - 5 tahun	4,775,271,407	7,997,010,116	2 - 5 years
di atas 5 tahun	7,935,919,307	7,332,178,503	Above 5 years

27. Modal Saham

Berdasarkan perubahan terakhir keputusan rapat Perusahaan dengan Akta No.40 tanggal 20 Oktober 2020, notaris Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0401202 tanggal 23 Oktober 2020, dijelaskan bahwa modal dasar Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000.000 terbagi atas 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 999.999 lembar saham seri B dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000.000. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 35% atau sejumlah 350.000 lembar saham yang terbagi atas 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 349.999 lembar saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp350.000.000.000, dengan komposisi sebagai berikut:

Pemegang Saham/ Shareholders	2023 dan/ and 2022		
	Lembar Saham/ Shares	Persentase/ Percentage	Nilai Modal Saham/ Value of Shares
Negara Republik Indonesia/ Republic of Indonesia	350,000	100%	350,000,000,000
Jumlah/ Total	350,000	100%	350,000,000,000

27. Share Capital

Based on the latest changes to the Deed of the Company's Decision Meeting No.40, dated October 20, 2020, of Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta and was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-AH.01.03-0401202 dated October 23, 2020, it was explained that the Company's authorized capital of Rp1,000,000,000,000 is divided into 1 series A Dwiwarna share and 999,999 series B shares with a normal value of Rp1,000,000 each. From which the subscribed and paid-up capital are 35% or 350,000 shares, consisting of 1 series A Dwiwarna share and 349,999 series B shares, have been issued and paid up with a total nominal value of Rp350,000,000,000, with the following composition:

28. Pendapatan

a. Berdasarkan Jenis Pendapatan

	2023 Rp	2022 Rp
Sistem Integrator	248,352,531,577	17,960,019,439
Jasa	202,870,538,090	120,263,648,502
Perakitan	52,456,704,833	163,699,666,533
Manage Service	--	6,741,052,947
Smart Device	--	364,714,091
Jumlah	503,679,774,500	309,029,101,512

a. By Nature of Revenue

Integrator System
Services
Assembly
Manage Services
Smart Device
Total

b. Berdasarkan Pelanggan

	2023 Rp	2022 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties (Catatan/ Note 36)	418,976,407,234	249,858,482,878
Pihak Ketiga/ Third Parties	84,703,367,266	59,170,618,634
Jumlah/ Total	503,679,774,500	309,029,101,512

b. By Customers



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

29. Beban Pokok Pendapatan

29. Cost of Revenues

	2023	2022	
	Rp	Rp	
Pemakaian Material	278,323,731,312	243,682,169,355	Usage of Material
Biaya Proyek	99,412,051,625	6,574,513,719	Project Cost
Niaga	50,630,888,871	496,079,329	Commerce
Jasa Telekomunikasi	10,855,631,847	507,013,366	Telecommunication Service
Pemeliharaan dan Perbaikan	7,256,983,082	5,658,852,881	Maintenance and Repairs
Umum	4,348,224,121	2,401,407,402	General
Personel	2,695,063,781	2,356,520,321	Personnel
Produksi	1,188,999,938	3,280,926,802	Production
Material Tambahan	988,844,724	239,987,994	Additional Material
Pengangkutan	883,280,559	221,045,444	Transportation
Alat Kerja Produksi	874,424,661	--	Production Work Tools
Amortisasi Aset Takberwujud			Amortization of Intangible Assets
(Catatan 13)	764,235,478	437,174,303	(Notes 13)
Perjalanan Dinas	470,439,750	438,604,296	Travel
Asuransi Produksi dan Proyek	242,765,321	323,272,764	Production and Project Insurance
Penyusutan Aset Tetap			Depreciation of Fixed Asset
(Catatan 9)	234,600,159	428,185,300	(Note 9)
Penyusutan Aset Hak Guna			Depreciation of Right-of-Use
(Catatan 14)	--	147,903,624	Assets (Note 14)
Lainnya	2,090,021	54,107,047	Others
Jumlah	459,172,255,250	267,247,763,947	Total

30. Beban Penjualan

30. Selling Expenses

	2023	2022	
	Rp	Rp	
Tenaga Kerja Tidak Langsung	15,973,411,442	8,916,195,132	Indirect Labor
Imbalan Pascakerja (Catatan 26)	4,116,554,887	1,276,270,698	Employee Benefit (Note 26)
Administrasi dan Rumah Tangga	1,491,291,022	1,141,948,971	Administration and Household
Perjalanan Dinas	1,227,906,847	678,456,073	Travel
Perbaikan dan Pemeliharaan	728,969,541	433,801,573	Repair and Maintenance
Beban Sewa	462,491,534	275,716,994	Rent Expense
Sertifikasi Produk	112,332,236	58,229,569	Product Certification
Uji Coba Lapangan	79,855,150	82,959,851	Field Trial
Penyusutan Aset Hak Guna			Depreciation of Right-of-Use
(Catatan 14)	--	34,736,789	Assets (Note 14)
Lainnya	316,300,948	121,167,390	Others
Jumlah	24,509,113,607	13,019,483,040	Total

31. Beban Umum dan Administrasi

31. General and Administrative Expenses

	2023	2022	
	Rp	Rp	
Tenaga Kerja Tidak Langsung	33,479,439,707	31,166,889,060	Indirect Labor
Konsultan	5,861,910,989	1,268,757,067	Consultant
Pemeliharaan dan Perbaikan	4,329,752,857	3,648,141,566	Maintenance and Repairs
Administrasi dan Rumah Tangga	3,785,925,067	3,133,885,230	Administration and Household
Imbalan Pascakerja (Catatan 26)	2,487,085,243	771,080,213	Employee Benefit (Note 26)
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 9)	2,091,105,230	2,379,809,841	Depreciation of Fixed Assets (Note 9)
Kesejahteraan Pegawai	1,365,504,685	273,365,150	Employee Welfare
Sewa	1,319,076,927	1,260,058,326	Rent
Asuransi	1,186,538,225	649,665,343	Insurance
Pengurusan dan Perizinan	1,102,500,156	72,296,504	Arrangement and Licensing
Amortisasi Aset Takberwujud (Catatan 13)	1,013,026,321	1,762,244,075	Amortization of Intangible Assets (Note 13)
Perjalanan Dinas	720,557,061	570,335,638	Travel
Sertifikasi	508,037,985	193,049,500	Certificate
Seminar dan Pelatihan	492,273,879	706,001,195	Workshop and Training
Kehumasan	249,134,503	85,083,280	Public Relation
Administrasi Bank	236,213,568	425,541,586	Bank Administration
Sumbangan	115,488,593	90,403,739	Donation
Alat Kerja	22,052,642	8,459,095	Work Equipment
Pengangkutan	21,794,534	8,962,246	Transportation
Penyusutan Properti Investasi (Catatan 12)	15,272,803	53,767,778	Depreciation of Investment Properties (Note 12)
Penyusutan Aset Hak Guna (Catatan 14)	--	432,971,153	Depreciation of Right-of-Use Assets (Note 14)
Jumlah	60,402,690,975	48,960,767,585	Total

32. Beban Pengembangan

32. Development Expenses

	2023	2022	
	Rp	Rp	
Imbalan Pascakerja (Catatan 26)	1,972,515,882	611,546,376	Employee Benefit (Note 26)
Tenaga Kerja Tidak Langsung	1,707,331,454	1,626,132,949	Indirect Labor
Pemeliharaan dan Perbaikan	133,947,512	252,706,350	Maintenance and Repairs
Administrasi dan Rumah Tangga	104,820,421	2,082,511,873	Administration and Household
Sertifikasi	34,500,000	51,616,000	Certification
Penyusutan Aset Hak Guna (Catatan 14)	--	17,276,239	Depreciation of Right-of-Use Assets (Note 14)
Kesejahteraan Pegawai	--	85,000	Employee Welfare
Jumlah	3,953,115,269	4,641,874,787	Total



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

33. Pendapatan Lain-Lain

33. Other Income

	2023	2022	
	Rp	Rp	
Optimalisasi Aset	5,887,713,184	9,875,090,401	Asset Optimization
Pendapatan Restitusi Pajak	1,265,488,880	--	Tax Restitution Income
Penjualan Persediaan Usang (Catatan 15)	1,058,540,099	287,387,388	Sales of Deadstock (Note 15)
Selisih Pembayaran Utang Piutang	827,837,752	--	Difference in Payables and Receivables Payments
Pemulihan Nilai Piutang Usaha (Catatan 5)	315,739,730	1,168,364,702	Recovery of Trade Receivable (Note 5)
Bunga Jasa Giro	244,359,641	272,004,470	Giro Interest
Denda dan Diskon	81,017,650	1,591,420,516	Penalty and Discounts
Lainnya	1,349,791,650	1,528,700,938	Others
Jumlah	11,030,488,586	14,722,968,415	Total

34. Beban Lain-Lain

34. Other Expenses

	2023	2022	
	Rp	Rp	
Beban Pajak	6,760,712,695	3,665,685,332	Tax Expense
Penurunan Nilai Piutang Usaha (Catatan 5)	2,026,946,146	351,021,257	Impairment of Trade Receivables (Note 5)
Denda Keterlambatan	714,746,254	3,325,355,993	Late Penalties
Rugi Selisih Kurs	598,387,045	442,187,625	Bank Administration Expense
Penurunan Nilai Persediaan Usang (Catatan 15)	5,300,000	--	Impairment of Obsolete Inventories (Note 15)
Lainnya	1,927,305,328	1,460,225,388	Others
Jumlah	12,033,397,468	9,244,475,595	Total

35. Beban Keuangan

35. Financial Expenses

	2023	2022	
	Rp	Rp	
Beban Pendanaan	48,863,255,259	54,103,949,632	Finance Expense
Bunga Liabilitas Sewa (Catatan 22)	--	8,161,637	Interest of Lease Liability (Note 22)
Jumlah	48,863,255,259	54,112,111,269	Total

36. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

36. Related Parties Transactions

a. Sifat Pihak Berelasi

a. Nature of Related Parties

Pihak-pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ The Nature of the Relationship	Jenis Transaksi/ Type of Transaction
Pemerintah Republik Indonesia/ Government of Republic of Indonesia ("Pemerintah")	Pemegang Saham Akhir/ Ultimate Shareholder	Modal Saham/ Share Capital
PT Inti Krida Eka Jasa	Memiliki Pengendalian atau Pengendalian Bersama/ Have Control or the Same Controlling	Piutang Lain-lain/ Other Receivables

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Pihak-pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>	Sifat Hubungan/ <i>The Nature of the Relationship</i>	Jenis Transaksi/ <i>Type of Transaction</i>
PT Widya Bhakti Inti	Memiliki Pengendalian atau Pengendalian Bersama/ <i>Have Control or the Same Controlling</i>	Piutang Usaha, Utang Usaha dan Pendapatan Diterima di Muka/ <i>Trade Payables, Trade Receivables and Unearned Revenues</i>
PT Inti Bumi Perkasa	Memiliki Pengendalian atau Pengendalian Bersama/ <i>Have Control or the Same Controlling</i>	Utang Usaha dan Pendapatan Diterima di Muka/ <i>Trade Payables and Unearned Revenues</i>
PT Mitra Graha Inti Utama	Memiliki Pengendalian atau Pengendalian Bersama/ <i>Have Control or the Same Controlling</i>	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Utang Usaha, Pendapatan Diterima di Muka dan Pendapatan/ <i>Trade Receivables, Other Receivables, Trade Payables and, Unearned Revenues and Revenues</i>
PT Inti Global Optical Communication	Entitas Asosiasi/ <i>Associates</i>	Piutang Lain-lain, Utang Usaha Utang Lain-lain dan Pendapatan/ <i>Other Receivables, Trade Payables Other Payables and Unearned Revenue</i>
PT Mitrabhakti Inti Perdana	Entitas Asosiasi/ <i>Associates</i>	Piutang Usaha, Utang Usaha dan Pendapatan/ <i>Trade Receivables, Trade Payables and Revenues</i>
Koperasi Inti	Mempunyai Anggota Manajemen Kunci yang Sama dengan Perusahaan/ <i>Have the Same Key Management Member as the Company/</i>	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, dan Utang Usaha/ <i>Trade Receivables, Other Receivables, and Trade Payables</i>
Dana Pensiun Inti	Mempunyai Anggota Manajemen Kunci yang Sama dengan Perusahaan/ <i>Have the Same Key Management Member as the Company/</i>	Piutang Lain-lain, Utang Lain-lain dan Pendapatan Diterima di Muka/ <i>Other Receivables, Other Payables and Unearned Revenues</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Utang Bank, Utang Bunga Bank dan Pendapatan <i>Cash and Cash Equivalent, Trade Receivables, Bank Loans, Accrued Interest Payables, and Revenues</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Kas dan Setara Kas, Piutang Lain-lain, Utang Bank, Pendapatan Diterima di Muka dan Pendapatan/ <i>Cash and Cash Equivalent, Other Receivables, Bank Loans, Unearned Revenue and Revenue</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Kas dan Setara Kas, Utang Bank, Utang Bunga Bank, Pendapatan Diterima di Muka dan Pendapatan/ <i>Cash and Cash Equivalent, Bank Loans, Accrued Interest Payables, Unearned Revenue and Revenues</i>
PT Pindad (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Usaha, Utang Usaha dan Pendapatan/ <i>Trade Receivables Trade Payables and Revenues</i>
PT Telkom Akses	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Usaha dan Pendapatan/ <i>Trade Receivable and Revenue</i>
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Usaha, Utang Usaha, Pendapatan Diterima di Muka dan Pendapatan/ <i>Trade Receivables, Trade Payables, Unearned Revenue and Revenues</i>
Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Usaha dan Pendapatan Diterima di Muka/ <i>Trade Receivables and Unearned Revenue</i>
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Utang Usaha/ <i>Trade Payables</i>
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Utang Usaha/ <i>Trade Payables</i>
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Kas dan Setara Kas dan Utang Bank/ <i>Cash and Cash Equivalent and Bank Loans</i>
PT Dayamitra Telekomunikasi	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Pendapatan Diterima di Muka/ <i>Unearned Revenues</i>
PT Indah Karya (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Utang Usaha/ <i>Trade Payables</i>

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Pihak-pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ The Nature of the Relationship	Jenis Transaksi/ Type of Transaction
PT Infomedia Solusi Humanika	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Lain-lain dan Utang Usaha/ <i>Other Receivables and Trade Payables</i>
PT Jasaraharja Putera (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Utang Usaha/ <i>Trade Payables</i>
PT Administrasi Medika	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Usaha/ <i>Trade Receivables</i>
SBU DDS PT INTI	Mempunyai Anggota Manajemen Kunci yang Sama dengan Perusahaan/ <i>Have the same key Management Member as the Company</i>	Utang Usaha/ <i>Trade Payables</i>
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Utang Usaha dan Utang Lembaga Keuangan Non- Bank/ <i>Trade Payables and Non-Bank Financial Service Institutions</i>
PT Pos Indonesia (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Utang Usaha/ <i>Trade Payables</i>
PT Pos Logistik Indonesia	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Utang Usaha/ <i>Trade Payables</i>
PT Sucofindo (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Utang Usaha/ <i>Trade Payables</i>
PT Telekomunikasi Selular	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Usaha, Utang Usaha, Pendapatan Diterima di Muka dan Revenue/ <i>Trade Receivables, Trade Payables, Unearned Revenue and Revenue</i>
PT Virama Karya (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Usaha/ <i>Account Receivables</i>
PT Indonesia Comnets Plus	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Utang Usaha, Pendapatan Diterima di Muka dan Pendapatan/ <i>Trade Payables, Unearned Revenues and Revenues</i>
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Usaha/ <i>Account Receivables</i>
PT Inti Bisa Fintech	Memiliki Pengendalian atau Pengendalian Bersama/ <i>Have Control or the Same Controlling</i>	Piutang Usaha/ <i>Trade Receivables</i>
BBPPT Ditjen Sumber Daya	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Usaha dan Pendapatan Diterima di Muka/ <i>Trade Receivables and Unearned Revenue</i>
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Usaha dan Pendapatan/ <i>Trade Receivables and Revenue</i>
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Usaha dan Pendapatan/ <i>Trade Receivables and Revenue</i>
PT Biofarma (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Usaha dan Pendapatan/ <i>Trade Receivables and Revenue</i>
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Usaha dan Pendapatan/ <i>Trade Receivables and Revenue</i>
PT Perkebunan Nasional VIII (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Usaha dan Pendapatan/ <i>Trade Receivables and Revenue</i>
Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Usaha/ <i>Trade Receivable</i>
Pusat Pelayanan Teknologi BPPT	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Utang Usaha/ <i>Trade Payables</i>
Kementerian Komunikasi dan Informatika	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Pendapatan Diterima di Muka dan Pendapatan/ <i>Unearned Revenue and Revenues</i>
Korps Lalu Lintas Polri	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Pendapatan/ <i>Revenues</i>
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Pendapatan/ <i>Revenues</i>
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Pendapatan/ <i>Revenues</i>
PT Indonesia Power	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Pendapatan/ <i>Revenues</i>

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Pihak-pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>	Sifat Hubungan/ <i>The Nature of the Relationship</i>	Jenis Transaksi/ <i>Type of Transaction</i>
PT PLN Indonesia Power	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Pendapatan/ <i>Revenues</i>
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Pendapatan/ <i>Revenues</i>
PT Bank Kalteng	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Entities Related with Government</i>	Piutang Usaha/ <i>Trade Receivable</i>

b. Transaksi dengan Pihak Berelasi

b. Transaction with Related Parties

	2023 Rp	2022 Rp	Persentase Terhadap Total Aset (Liabilitas)/ Percentage of Total Assets (Liabilities)	
			%	%
Kas dan Setara Kas/ Cash and Cash Equivalents (Catatan/ Note 4)				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11,256,894,319	19,933,270,484	0.895	1.683
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12,136,010,480	7,264,626,846	0.965	0.613
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	443,310,482	398,448,606	0.035	0.034
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1,239,647	654,647	--	0.000
Jumlah/ Total	23,837,454,928	27,597,000,583	1.629	2.330
Piutang Usaha/ Trade Receivables (Catatan/ Note 5)				
BBPPT Ditjen Sumber Daya	39,417,989,584	--	3.134	--
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	34,764,833,304	46,035,199,763	2.764	3.660
Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM	31,588,949,517	3,955,145,517	2.511	0.314
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	25,192,000,000	--	2.003	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4,390,109,542	5,097,526,952	0.349	0.405
PT Telekomunikasi Selular	3,967,192,469	20,748,120	0.315	0.002
PT Mitrabhakti Inti Perdana	1,129,628,712	2,273,040,000	0.090	0.181
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	871,200,000	--	0.069	--
PT Biofarma (Persero)	821,400,000	--	0.065	--
PT Telkom Akses	650,424,213	4,139,643,768	0.052	0.329
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	165,000,000	16,282,800	0.013	0.001
Koperasi Inti	93,277,693	93,277,693	0.008	0.007
PT Pindad (Persero)	83,719,700	625,320,435	0.007	0.050
PT Virama Karya (Persero)	9,233,400	9,233,400	0.001	0.001
PT Administrasi Medika	8,460,000	8,460,000	0.001	0.001
PT Widya Bhakti INTI	7,855,215	--	0.001	--
Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur	--	707,736,496	--	0.056
PT Inti Bisa Fintech	--	618,942,500	--	0.049
PT Perkebunan Nasional VIII (Persero)	--	210,109,125	--	0.017
PT Mitra Graha Inti Utama	--	100,000,000	--	0.008
PT Bank Kalteng	--	18,637,500	--	0.001
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	--	16,000,000	--	0.001
Jumlah	143,161,273,349	63,945,304,069	11.382	5.084
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai <i>Less: Allowance for Impairment Losses</i>	(4,256,119,041)	(4,256,119,041)	(0.338)	(0.353)
Jumlah - Bersih/ Total - Net	138,905,154,308	59,689,185,028	11.044	4.730
Piutang Lain-lain/ Other Receivable (Catatan/ Note 6)				
PT Inti Global Optical Communication	3,669,858,000	1,050,480,000	0.297	0.084
PT Mitra Graha Inti Utama	688,928,870	15,853,200	0.056	0.001
PT Infomedia Solusi Humanika	90,856,676	90,856,676	0.007	0.007
Dana Pensiun Inti	65,834,175	65,834,175	0.005	0.005
Koperasi Inti	8,834,760	8,834,760	0.001	0.001
PT Inti Krida Eka Jasa	6,435,000	6,435,000	0.001	0.001
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	144,000,000	--	0.011
Jumlah - Bersih/ Total - Net	4,530,747,481	1,382,293,811	0.367	0.111

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

	2023 Rp	2022 Rp	Persentase Terhadap Total Aset (Liabilitas)/ Percentage of Total Assets (Liabilities) %	%
Utang Usaha/ Trade Payables (Catatan/ Note 16)				
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	155,090,058,235	146,773,639,971	7.855	8.110
PT Widya Bhakti Inti	9,454,813,557	9,532,591,306	0.479	0.527
PT Inti Global Optical Communication	7,611,645,903	11,625,536,515	0.386	0.642
Koperasi INTI	5,998,226,426	6,189,154,726	0.304	0.342
PT Inti Bumi Perkasa	5,481,309,423	5,807,424,369	0.278	0.321
PT Infomedia Solusi Humanika	2,811,594,140	--	0.142	--
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	2,480,000,000	2,480,000,000	0.126	0.137
PT Pos Logistik Indonesia	2,275,091,080	2,469,806,186	0.115	0.136
Pusat Pelayanan Teknologi BPPT	1,953,000,000	--	0.099	--
PT Mitra Graha Inti Utama	781,502,507	1,260,168,486	0.040	0.070
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	588,000,000	588,000,000	0.030	0.032
PT Pindad (Persero)	382,791,443	382,791,443	0.019	0.021
PT Mitrabhakti Inti Perdana	--	1,174,349,865	--	0.065
SBU DDS PT INTI	--	615,642,500	--	0.034
PT Indah Karya (Persero)	--	176,425,000	--	0.010
PT Sucofindo (Persero)	--	67,895,000	--	0.004
PT Jasaraharja Putera (Persero)	--	97,711,888	--	0.005
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	--	10,141,500	--	0.001
PT Indonesia Comnets Plus	--	1,096,000	--	0.000
PT Telekomunikasi Selular	--	333,000	--	0.000
PT Pos Indonesia (Persero)	--	212,870	--	0.000
Jumlah - Bersih/ Total - Net	194,908,032,714	189,252,920,625	9.872	10.457
Utang Lain-lain/ Other Payables (Catatan/ Note 17)				
Dana Pensiun Inti	34,957,370,501	24,062,989,817	1.771	1.330
PT Inti Global Optical Communication	712,487,505	712,487,505	0.036	0.039
Jumlah - Bersih/ Total - Net	35,669,858,006	24,775,477,322	1.807	1.369
Utang Bank/ Bank Loans (Catatan/ Note 19.a)				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	563,119,179,317	561,868,050,325	28.521	31.046
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	275,988,821,001	275,988,821,001	13.978	15.250
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	21,119,383,153	21,179,383,153	1.070	1.170
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	2,743,710,582	2,797,383,587	0.139	0.155
Jumlah - Bersih/ Total - Net	862,971,094,053	861,833,638,066	43.708	47.621
Utang Bunga Bank/ Accrued Interest Loans (Catatan/ Note 19.b)				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	141,995,279,294	109,427,269,614	7.192	6.046
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	63,167,743,964	51,782,598,537	3.199	2.861
Jumlah - Bersih/ Total - Net	205,163,023,258	161,209,868,151	10.391	8.907
Pendapatan Diterima di Muka/ Unearned Revenues (Catatan/ Note 25)				
Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM	13,615,805,676	12,403,610,392	0.690	0.685
BBPPT Ditjen Sumber Daya	13,545,288,417	--	0.686	--
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	3,777,549,683	11,888,949,762	0.191	0.657
PT Widya Bhakti Inti	1,192,585,800	--	0.060	--
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	900,000,003	--	0.046	--
PT Mitra Graha Inti Utama	908,828,641	--	0.046	--
PT Indonesia Comnets Plus	390,329,963	--	0.020	--
PT Inti Bumi Perkasa	176,328,000	--	0.009	--
Dana Pensiun Inti	117,960,750	--	0.006	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	144,000,000	--	0.007	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	44,874,987	--	0.002	--
PT Telekomunikasi Selular	5,280,229	--	0.000	--
Kementerian Komunikasi dan Informatika	--	1,309,876,113	--	0.072
Jumlah - Bersih/ Total - Net	34,818,832,149	25,602,436,267	1.761	1.414

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

	2023 Rp	2022 Rp	Persentase Terhadap Total Liabilitas, Pendapatan/ Percentage of Total Liabilities, Revenue %	%
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank/ Non-Bank Financial Service Institutions (Catatan/ Note 20)				
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	34,988,862,090	11,019,620,355	1.772	0.609
Jumlah - Bersih/ Total - Net	34,988,862,090	11,019,620,355	1.772	0.609
Pendapatan/ Revenues (Catatan/ Note 28)				
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	101,819,282,442	173,986,619,952	20.215	56.301
Korps Lalu Lintas Polri	93,673,521,194	--	18.598	--
Kementerian Komunikasi dan Informatika	66,508,580,652	10,180,881,080	13.205	3.294
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI	49,737,181,310	3,955,145,517	9.875	1.280
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	40,341,969,743	--	8.009	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	18,949,163,708	32,688,086,747	3.762	10.578
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)	18,580,563,777	--	3.689	--
PT Indonesia Comnets Plus	14,694,481,786	14,345,787,531	2.917	4.642
PT Telekomunikasi Selular	4,940,585,870	26,817,000	0.981	0.009
PT Telkom Akses	4,257,574,140	13,033,392,700	0.845	4.218
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1,628,639,226	449,923,260	0.323	0.146
PT Adhi Karya (Persero)	871,200,000	--	0.173	--
PT Biofarma (Persero)	740,000,000	--	0.147	--
PT Indonesia Power	622,630,427	--	0.124	--
PT Pindad (Persero)	573,397,500	533,452,500	0.114	0.173
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	486,905,455	364,714,091	0.097	0.118
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	212,612,612	--	0.042	--
PT PLN Indonesia Power	174,398,950	--	0.035	--
PT Mitrahakti Inti Perdana	94,594,595	--	0.019	--
PT Mitra Graha Inti Utama	66,123,847	--	0.013	--
PT Inti Global Optical Communication	3,000,000	--	0.001	--
PT Perkebunan Nasional VIII (Persero)	--	189,287,500	--	0.061
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	--	104,375,000	--	0.034
Jumlah - Bersih/ Total - Net	418,976,407,234	249,858,482,878	83.183	80.853

37. Perikatan

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom)

- Pada tanggal 16 September 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian dengan Telkom No K.TEL.006846/HK.810/SSP-10400000/2022 dalam rangka Pengadaan dan Pemasangan Fiberisasi Node-B Telkomsel Tahap 4 antara PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp54.061.270.059 belum termasuk PPN.
- Pada tanggal 26 April 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian dengan Telkom No. K.TEL.002211/HK.810/OPS-10050000/2022 dalam rangka Pengadaan dan Pemasangan OSP FO NODE B Telkomsel TREG-1 PHASE-2 PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dengan nilai kontrak sebesar Rp28.528.051.754 belum termasuk PPN.

37. Agreements

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom)

- On September 16, 2022, the Company signed an Agreement with Telkom No. K. TEL.006846/HK.810/SSP-10400000/2022 for Procurement and Installation of Phase-4 Telkomsel Node-B Fiberization Between PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk and a Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia with a contract value of Rp54,061,270,059 excluding VAT.
- On April 26, 2022, the Company signed an Agreement with Telkom No. K. TEL.002211/HK.810/OPS-10050000/2022 Procurement and Installation of OSP FO NODE B Telkomsel TREG-1 PHASE-2 Between PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk and PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) with a contract value of Rp28,528,051,754 excluding VAT.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT)

Pada tanggal 10 Februari 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian dengan BBPPT No: 234/SPK-PAUCH10M/BBPPT/31/02/2023 dalam rangka Pengadaan Alat Ukur EMC (Chamber 10m) antara BBPPT dengan Perusahaan dengan nilai kontrak sebesar Rp75.176.350.713 sudah termasuk PPN.

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE)

Pada tanggal 20 Juli 2023, Perusahaan, PT Matra Mandiri Prima menandatangani Perjanjian kerja sama operasi (KSO) dengan Ditjen EBTKE No: 03.SP/PPK.APDAL.PJUTS-5/DJE/2023 dalam rangka Pengadaan pekerjaan konstruksi untuk Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 5 antara Ditjen EBTKE dengan Perusahaan dengan nilai kontrak sebesar Rp156.976.852.647 sudah termasuk PPN.

Examination Center of Telecommunication Equipment (BBPPT)

On February 10, 2023, the Company signed an Agreement with BBPPT No: 234/SPK-PAUCH10M/BBPPT/31/02/2023 for the procurement of EMC Measuring Equipment (10m Chamber) between BBPPT and the Company with a contract value of Rp75,176,350,713, including VAT.

Directorate General of New and Renewable Energy and Energy Conservation (Ditjen EBTKE)

On July 20, 2023, the Company, PT Matra Mandiri Prima signs a cooperation agreement (KSO) with the Directorate General of EBTKE No: 03.SP/PPK.APDAL.PJUTS-5/DJE/2023 in the context of Procurement of construction work for the Development of PJUTS Indonesia Region 5 between the Directorate General of EBTKE and the Company with a contract value of Rp156,976,852,647 including VAT.

38. Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang Asing

38. Assets and Liabilities in Foreign Currencies

	2023		2022		
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Mata Uang Rupiah/ IDR	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Mata Uang Rupiah/ IDR	
Aset					Asset
Kas dan Setara Kas					Cash and Cash Equivalents
Dolar Amerika Serikat	71,503.72	1,102,301,276	5,615.81	88,342,306	United States Dollar
Liabilitas					Liabilities
Utang Usaha					Account Payables
Dolar Amerika Serikat	225,826.31	3,481,338,403	222,341.14	3,497,648,473	United States Dollar
Jumlah Liabilitas - Bersih		(2,379,037,127)		(3,409,306,167)	Total - Net Liabilities

39. Manajemen Risiko Keuangan dan Modal

39. Financial and Capital Risks Managements

a. Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Grup menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang dan risiko suku bunga. Grup mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

- Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dikarenakan debitur tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Grup.
- Risiko likuiditas merupakan risiko atas ketidakmampuan Grup membayar

a. Financial Risk Management Policy

In its operating, investing and financing activities, the Group is exposed to the following financial risks, credit risk, liquidity risk, currency risk and interest rate risk. The Group define those risks as follows:

- Credit risk is possibility that a customer will not pay the whole or part of a receivable or will not pay in timely manner and hence, the Group will incur loss.
- Liquidity risk is the risk of the Group's inability to pay its liabilities at maturity.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Saat ini Grup berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo.

- Risiko mata uang merupakan risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Grup telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Grup secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan berfokus untuk meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak buruk pada kinerja keuangan Grup. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Grup.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Dalam mengelola risiko likuiditas Grup selalu menjaga dan menyediakan jumlah kas dan setara kas dalam jumlah yang memadai. Manajemen juga melakukan perencanaan setiap bulan dan pemantauan yang ketat terhadap realisasi serta saldo kas secara rutin; dan
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten dan mengikuti praktik pasar terbaik.

i. Risiko Kredit

Risiko kredit Grup terutama melekat pada kas dan bank, piutang usaha, aset keuangan lancar lainnya, aset keuangan tidak lancar lainnya dan uang jaminan. Grup mengelola risiko kredit terkait penempatan saldo rekening di bank hanya dengan menggunakan bank-bank yang memiliki reputasi dan predikat yang baik untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank. Grup mengendalikan eksposur risiko kredit terkait dengan piutang dengan menetapkan kebijakan, dimana persetujuan atau penolakan kontrak kredit baru dan kepatuhan atas kebijakan tersebut dipantau oleh Direksi. Sebagai bagian dari proses dalam persetujuan atau penolakan tersebut, reputasi dan jejak rekam pelanggan menjadi bahan pertimbangan. Saat ini tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Hal ini dikarenakan seluruh pendapatan usaha Grup dapat ditagihkan secara tepat waktu.

Currently, the Group expects to pay all liabilities at due date.

- *Currency risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments due to changes in foreign currency exchange rates.*

To manage these risks effectively, the Group's Directors have approved several strategies for financial risk management, which are in line with the Group's overall objectives, a financial risk management program that focuses on minimizing potential losses that adversely affect the Group's financial performance. This guideline sets out the objectives and actions that must be taken in order to manage the financial risks faced by the Group.

The main guidelines for this policy are as follows:

- *In managing liquidity risk, the Group always maintains and provides adequate amounts of cash and cash equivalents. Management also conducts monthly planning and close monitoring of cash realization and balances on a regular basis; and*
- *All financial risk management activities are carried out prudently, consistently and in accordance with best market practices.*

i. Credit Risk

The Group's credit risk is inherent in cash on hand and in banks, trade receivables, other current financial assets, other non-current financial assets and security deposits. The Group manages credit risk related to placement of bank account balances only in reputable banks and has good predicate to reduce the possibility of losses due to bank bankruptcy. The Group manages credit risk exposure related to trade receivables by implement policies whereby the approval or rejection of new credit contracts and compliance with these policies is monitored by the Board of Directors. As part of the process of approval or rejection, the customer's reputation and track record are taken into consideration. Currently, there are no significant credit risks. This is because of all the Group's revenues can be collected on time.



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

At the reporting date, the Group's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets presented in the consolidated statements of financial position.

	2023 Rp	2022 Rp	
Kas dan Setara Kas	25,051,425,522	27,770,920,175	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	185,161,936,241	73,128,665,697	Trade Receivables
Piutang Lain-lain	6,820,605,909	3,761,350,973	Other Receivables
Jumlah	217,033,967,672	104,660,936,845	Total

ii. Risiko Likuiditas

Pada saat ini Grup berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Grup berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup. Selain itu, Grup memiliki kas dan bank (Catatan 4) yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

ii. Liquidity Risk

Currently, the Group expect able to pay all liabilities at due date. To fulfill commitments on cash, the Group Expect its operating activities to generate sufficient cash inflows. In addition, the Group has cash on hand and in bank equivalents (Note 4) which are sufficient to meet liquidity requirements.

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

The following table analyzes financial liabilities measured at amortized cost based on their remaining maturity:

	2023			
	< 1 Tahun/ Years Rp	1-5 Tahun/ Years Rp	> 5 Tahun/ Years Rp	Total Rp
Utang Usaha/ Trade Payables	326,292,454,637	--	--	326,292,454,637
Beban Akrua/ Accrued Expenses	222,891,293,568	--	--	222,891,293,568
Utang Bank/ Bank Loan	53,009,707,837	809,961,386,216	--	862,971,094,053
Liabilitas Sewa/ Lease Liabilities	2,838,346,601	--	--	2,838,346,601
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank/ Financial Institution Loan	39,763,846,097	--	--	39,763,846,097
Utang Bunga Bank/ Accrued Interest Loans	--	--	205,163,023,258	205,163,023,258
Utang Lain-lain/ Other Payables	84,356,470,693	--	--	84,356,470,693
Liabilitas Keuangan Lancar Lainnya Other Current Financial Liabilities	1,882,835,662	--	--	1,882,835,662
Jumlah	731,034,955,095	809,961,386,216	205,163,023,258	1,746,159,364,569

	2022			
	< 1 Tahun/ Years Rp	1-5 Tahun/ Years Rp	> 5 Tahun/ Years Rp	Total Rp
Utang Usaha/ Trade Payables	304,619,005,994	--	--	304,619,005,994
Beban Akrua/ Accrued Expenses	178,598,345,741	--	--	178,598,345,741
Utang Bank/ Bank Loans	51,872,251,850	809,961,386,216	--	861,833,638,066
Liabilitas Sewa/ Lease Liabilities	2,838,346,601	--	--	2,838,346,601
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank/ Financial Institution Loans	15,794,604,362	--	--	15,794,604,362
Utang Bunga Bank/ Accrued Interest Loans	--	--	161,209,868,151	161,209,868,151
Utang Lain-lain/ Other Payables	74,828,923,048	--	--	74,828,923,048
Liabilitas Keuangan Lancar Lainnya Other Current Financial Liabilities	2,267,315,250	--	--	2,267,315,250
Jumlah	630,818,792,846	809,961,386,216	161,209,868,151	1,601,990,047,213

iii. Risiko Mata Uang

Grup secara signifikan terekspos risiko mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) karena sebagian besar pembelian material dalam mata uang USD. Tidak ada aktivitas lindung nilai mata uang per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Grup mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan melakukan pengawasan secara periodik terhadap pergerakan nilai tukar mata uang asing sehingga dapat mengambil tindakan yang diperlukan.

Aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan jenis mata uang disajikan pada Catatan 38.

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat pertukaran Rupiah terhadap mata uang asing dengan asumsi variabel lain konstan, dampak terhadap laba sebelum beban pajak penghasilan sebagai berikut:

Dampak Terhadap Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan

Impact on Profit Before Income Tax Expense

Kenaikan/ Increase (1%)

Penurunan/ Decrease (-1%)

iii. Currency Risk

The Group is significantly exposed to currency risk in United States Dollars (USD) due to the majority of material purchases denominated in USD. There was no currency hedging activity as of December 31, 2023 and 2022.

The Group manages its exposure to foreign currencies by periodically monitoring movements in foreign currency exchange rates so that it can take necessary actions.

Asset and liabilities in foreign currency as of December 31, 2023 and 2022 by currency represented in Note 38.

The following table shows the sensitivity of possible changes in the exchange rate of Rupiah against foreign currencies with other variable assumptions, the impact on profit before tax expense is as follows:

	2023 Rp	2022 Rp
Kenaikan/ Increase (1%)	(45,836,397)	(168,143,159)
Penurunan/ Decrease (-1%)	45,836,397	168,143,159

b. Estimasi Nilai Wajar

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

b. Fair Value Measurements

The table below illustrates the carrying values and fair values of financial assets and liabilities:

	2023		2022	
	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Nilai Wajar/ Fair Value Rp	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Nilai Wajar/ Fair Value Rp
Aset Keuangan/ Financial Assets				
Kas dan Setara Kas/ Cash and Cash Equivalents	25,051,425,522	25,051,425,522	27,770,920,175	27,770,920,175
Piutang Usaha/ Trade Receivables	185,161,936,241	185,161,936,241	73,128,665,697	73,128,665,697
Piutang Lain-lain/ Other Receivables	6,820,605,909	6,820,605,909	3,761,350,973	3,761,350,973
Jumlah/ Total	217,033,967,672	217,033,967,672	104,660,936,845	104,660,936,845



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

	2023		2022	
	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Nilai Wajar/ Fair Value Rp	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Nilai Wajar/ Fair Value Rp
Liabilitas Keuangan/ Financial Liabilities				
Utang Usaha/ Trade Payables	326,292,454,637	326,292,454,637	304,619,005,994	304,619,005,994
Beban Akrua/ Accrued Expenses	222,891,293,568	222,891,293,568	178,598,345,741	178,598,345,741
Utang Bank/ Bank Loans	862,971,094,053	862,971,094,053	861,833,638,066	861,833,638,066
Liabilitas Sewa/ Lease Liabilities	2,838,346,601	2,838,346,601	2,838,346,601	2,838,346,601
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank/ Financial Institution Loans	39,763,846,097	39,763,846,097	15,794,604,362	15,794,604,362
Utang Bunga Bank/ Accrued Interest Loans	205,163,023,258	205,163,023,258	161,209,868,151	161,209,868,151
Utang Lain-lain/ Other Payables	84,356,470,693	84,356,470,693	74,828,923,048	74,828,923,048
Liabilitas Keuangan Lancar Lainnya Other Current Financial Liabilities	1,882,835,662	1,882,835,662	2,267,315,250	2,267,315,250
Jumlah/ Total	1,746,159,364,569	1,746,159,364,569	1,601,990,047,213	1,601,990,047,213

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

Fair values of the most financial assets and liabilities approximate their carrying values because the effect of discounting is not significant.

40. Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan kasnya. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

40. Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Liabilities

Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities

The table below detail changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	Arus Kas/ Cash Flow		Perubahan Nonkas/ Non-cash Changes		2023 Rp	
	Penambahan/ Additional	Pembayaran/ Payment	Penambahan Bunga Ditangguhkan/ Additional Deferred Interest	Penambahan Lainnya/ Others		
	2022 Rp	Rp	Rp	Rp		
Utang Bank	861,833,638,066	--	(143,673,000)	1,281,128,987	--	862,971,094,053 Bank Loans
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank	15,794,604,362	1,250,000,000	(7,104,620,389)	--	29,823,862,124	39,763,846,097 Financial Institutions Loan Non-Bank
Liabilitas Sewa	2,838,346,601	--	--	--	--	2,838,346,601 Lease Liabilities
Jumlah Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan	880,466,589,029	1,250,000,000	(7,248,293,389)	1,281,128,987	29,823,862,124	905,573,286,751 Total Liabilities from Financing Activities

	Arus Kas/ Cash Flow		Perubahan Nonkas/ Non-cash Changes		2022 Rp	
	Penambahan/ Additional	Pembayaran/ Payment	Penambahan Bunga Ditangguhkan/ Additional Deferred Interest	Penambahan Lainnya/ Others		
	2021 Rp	Rp	Rp	Rp		
Utang Bank	861,491,493,325	--	(1,105,178,759)	1,447,323,500	861,833,638,066	Bank Loans
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank	7,779,984,007	21,844,993,055	(14,175,256,529)	344,883,829	15,794,604,362	Financial Institutions Loan Non-Bank
Liabilitas Sewa	3,061,026,601	--	--	(222,680,000)	2,838,346,601	Lease Liabilities
Jumlah Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan	872,332,503,933	21,844,993,055	(15,280,435,288)	1,569,527,329	880,466,589,029	Total Liabilities from Financing Activities

Transaksi Non Kas

Pengungkapan tambahan atas aktivitas investasi dan pendanaan non-kas:

Non Cash Transaction

Supplemental disclosures on non-cash investing and financing activities:

	2023 Rp	2022 Rp	
Penambahan Utang Lembaga Keuangan Non Bank melalui Pembayaran Langsung kepada Vendor	29,823,862,124	--	Increase in Non-Bank Financial Service Institutions through Direct Payment to Vendors
Penambahan Utang Lembaga Keuangan Non Bank melalui Bunga	--	344,883,829	Increase in Non-Bank Financial Service Institutions through Interest
Penambahan Utang Bank melalui Bunga	1,281,128,987	1,447,323,500	Increase in Bank Loan through Interest
Penambahan Aset Takberwujud melalui Utang Lainnya	2,046,293,985	2,999,253,858	Purchase of Intangible Assets from Other Payables
Penambahan Aset Tetap dari Utang Usaha	3,038,909,206	--	Increase Fixed Assets from Account Payables

41. Reklasifikasi Akun

41. Account Reclassification

Manajemen Grup telah mereklasifikasi beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2022 agar sesuai dengan ketentuan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Reklasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

The Group's management has reclassified several accounts in the 2022 financial statements to comply with the provision and presentation of financial statements for the year ended December 31, 2023. The reclassification is as follows:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Desember 2022

Consolidated Statement of Financial Position as of December 31, 2022

	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Setelah Reklasifikasi After Reclassification Rp	
Aset				Assets
Pajak Dibayar di Muka				Prepaid Taxes
Entitas Anak				Subsidiaries
Pajak Penghasilan:				Income Tax:
Pasal 22	--	1,230,000	1,230,000	Article 22
Pasal 23	--	445,208,602	445,208,602	Article 23
Pasal 28A - 2022	450,718,868	(450,718,868)	--	Article 28A - 2022
Pasal 25	--	4,280,266	4,280,266	Article 25
Liabilitas				Liabilities
Utang Usaha				Trade Payables
Pihak Ketiga	139,429,075,186	(24,062,989,817)	115,366,085,369	Third Parties
Utang Lain-lain				Other Payables
Pihak Berelasi	712,487,505	24,062,989,817	24,775,477,322	Related Parties
Pihak Ketiga	52,320,760,976	(2,267,315,250)	50,053,445,726	Third Parties
Liabilitas Keuangan Lancar Lainnya	--	2,267,315,250	2,267,315,250	Other Current Financial Liabilities

Laporan Arus Kas Konsolidasian Tanggal
31 Desember 2022

Consolidated Statements of Cash Flows as of
December 31, 2022

	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Setelah Reklasifikasi After Reclassification Rp	
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi				Cash Flows From Operating Activities
Penerimaan Lainnya	1,218,165,467	(1,218,165,467)	--	Other Receipts
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan				Cash Flows From Financing Activities
Liabilitas Keuangan Lancar Lainnya - Bersih	--	1,218,165,467	1,218,165,467	Other Current Financial Liabilities - Net

42. Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan anggapan dari Perusahaan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha.

Dalam tahun buku 2023 Grup mengalami rugi sebesar Rp96.280.122.589 dan mencatat kerugian komprehensif tahun berjalan sebesar Rp96.560.817.148. Hal ini menyebabkan akumulasi kerugian dan defisiensi modal per tanggal 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.807.251.010.628 dan Rp716.562.713.188. Selain itu total liabilitas lancar pada tanggal 31 Desember 2023 melampaui total aset lancarnya Grup sebesar Rp818.183.001.458. Untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, Grup telah mempersiapkan rencana usaha untuk tahun-tahun mendatang. Manajemen Grup telah menyusun rencana sebagai berikut:

Operasional

1. Penerapan protokol kesehatan yang ketat, baik di lingkungan proyek konstruksi maupun kantor;
2. Menjalankan *Transformation Optimism Positivity Strategy* dan *Strategic Programs* meliputi:
 - a. *Financial Improvement*
 - *Debts & capital restructuring*
 - *Streamlining subsidiaries towards their execution in accordance with the parent company's management direction*
 - *Optimizing dead stock inventory*
 - b. *Digitalization*
 - *Business alignment with new digital product portfolio*
 - *Improvement of business processes and policies*
 - c. *Human Capital and Organization Transformation*
 - *New positive habit*
 - *Efficiency Manpower Cost*
 - *Build, Borrow, and Buy*
 - *Character CHANGE (Contribute, Humble, Agile, Network, Growing Mindset, and Endurance)*
3. Menginisiasi beberapa potensi besar untuk meningkatkan value Perusahaan dan memperbaiki portfolio bisnis serta struktur keuangan, diantaranya: *INTI Cloud, Smartcard, IT Device (Laptop), Green Energy & Power*

42. Going Concern

The consolidated financial statements have been prepared assuming the Company has the ability to sustain business as a going concern.

In year 2023 the Group incurred a loss of Rp96,280,122,589 and recorded a comprehensive loss for the year amounting to Rp96,560,817,148. This causes accumulated losses and capital deficiencies as of December 31, 2023 amounting to Rp1,807,251,010,628 and Rp716,562,713,188, respectively. In addition, the Group current liabilities exceeded its total assets by Rp818,183,001,458. To sustain the Group going concern, the Group has prepared a business plan for the coming years. The Group's management sets up plans as follows:

Operational

1. *Adoption of strict health protocols, in both construction project and office environments;*
2. *Carrying out Transformation Optimism Positivity Strategy and Strategic Programs includes:*
 - a. *Financial Improvement*
 - *Debts & capital restructuring*
 - *Streamlining subsidiaries towards their execution in accordance with the parent company's management direction*
 - *Optimizing dead stock inventory*
 - b. *Digitalization*
 - *Business alignment with new digital product portfolio*
 - *Improvement of business processes and policies*
 - c. *Human Capital and Organization Transformation*
 - *New positive habit*
 - *Efficiency Manpower Cost*
 - *Build, Borrow, and Buy*
 - *Character CHANGE (Contribute, Humble, Agile, Network, Growing Mindset, and Endurance)*
3. *Initiating several large potentials to increase Company value and improve the business portfolio and financial structure, among others: INTI Cloud, Smartcard, IT Device (Laptop), Green Energy & Power Solution*

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Solution (PJUTS), Green Energy & Power Solution (Battery, Rectifier), Infrastruktur Fiber Optic, Security & Collaboration Space (INTI-Key, I-Office/Virtual Desk).

4. Memfokuskan bisnis Perusahaan pada segmen *Government, Telco, Small Medium Enterprise (SME), Retail, dan Private*. Sedangkan dari sisi Portofolio Bisnis, tahun 2024 Perusahaan memfokuskan pada *Manufacture, System Integrator*, dan Digital dengan melakukan *Marketing Strategy* secara *direct* atau *Go to Market Alignment* bersama Telkom, BUMN ataupun *Private*.
5. Menetapkan *Project initiatives* pada tahun 2024 sebagai berikut:
 - a. Penguatan industri dalam negeri melalui peningkatan kandungan lokal dan sertifikasi produk Perangkat *IT Smart Card*.
 - b. Digitalisasi pelayanan publik, administrasi perkantoran dan kawasan industri terintegrasi.
 - c. Memberikan layanan berkualitas tinggi melalui Perangkat *IT* dengan Solusi Inovasi Digital komprehensif.
 - d. Menyediakan *Infra Solution* untuk Penyedia Telekomunikasi dan sektor Energi Ramah Lingkungan.
6. Melakukan *Human Capital Transformation* dengan menetapkan *roadmap* karyawan menjadi berjumlah 117 orang, *Asset Occupancy Plan* melakukan upaya-upaya optimalisasi asset melalui penyewaan atau KSO lahan dan bangunan tetap dilakukan.

Restrukturisasi Keuangan

Rencana relaksasi dan restrukturisasi pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan masa mendatang akan dilakukan dengan para Kreditor oleh Perusahaan melalui proses perundingan baik secara langsung maupun melalui Proses Penundaan Pembayaran Utang (PKPU).

Proses PKPU telah dimulai pada tanggal 18 Juli 2023 dan berakhir dengan keputusan homologasi pada tanggal 25 Januari 2024.

Manajemen berkeyakinan bahwa langkah-langkah tersebut di atas dan dukungan yang terus menerus dari pemegang saham dapat secara efektif meningkatkan kinerjanya dan Grup dapat terus berkembang serta beroperasi sesuai prinsip kelangsungan usaha sampai dengan masa mendatang.

(PJUTS), Green Energy & Power Solution (Battery, Rectifier), Infrastruktur Fiber Optic, Security & Collaboration Space (INTI-Key, I-Office/Virtual Desk).

4. Focusing the Company's business on the *Government, Telco, Small Medium Enterprise (SME), Retail and Private* segments. Meanwhile, in terms of Business Portfolio, in 2024 the Company will focus on *Manufacturing, System Integrator and Digital* by carrying out *direct Marketing Strategy* or *Go to Market Alignment* together Telkom, BUMN or *Private*.
5. Determine *Project initiatives* in 2024 as follows:
 - a. Strengthening domestic industry through increasing local content and certification of *Smart Card IT Device* products.
 - b. Digitalization of public services, office administration and integrated industrial areas.
 - c. Providing high quality services through *IT Devices* with comprehensive *Digital Innovation Solutions*.
 - d. Providing *Infra Solutions* for *Telecommunication Providers* and the *Environmentally Friendly Energy* sector.
6. Carrying out *Human Capital Transformation* by determining the employee roadmap to 117 people, the *Asset Occupancy Plan* makes efforts to optimize assets through leasing or KSO of land and buildings.

Financial Restructuring

Plans for relaxation and restructuring of overdue and future debt payments will be carried out with creditors by the Company through a negotiation process both directly and through the Debt Payment Postponement Process (PKPU).

The PKPU process began on July 18, 2023 and ended with the homologation decision on January 25, 2024.

Management believes that the above steps and continuous support from the shareholders can effectively improve the performance and the Group can continue to grow its business and operates in the future on going concern basis.



43. Peristiwa Penting Lainnya dan Kontinjensi

- a. Penanganan permohonan Peninjauan Kembali PK Danny Harjono terhadap putusan pengadilan tinggi Bandung melawan Perusahaan yang didaftarkan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor Register Akta Permohonan PK No. 15/PDT.PK/2022/PN.BDG atas Putusan Perkara Banding No. 500/PDT/2022/PT.BDG Jo. Perkara No. 19/Pdt.G/2022/PN.Bdg. Berdasarkan putusan pengadilan permohonan banding dari pembanding semula diterima dan menguatkan putusan sela pengadilan No. 19/Pdt.G/2022/PN.Bdg.
- b. Penanganan perkara atas gugatan wanprestasi terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 yang terdaftar dalam register No.288/Pdt.G/2023/PN.Bdg Tanggal 26 Juni 2023, perkara belum diputus dan masih dalam proses.

43. Other Significant Events and Contingencies

- a. Handling PK Danny Harjono's request for judicial review against the Bandung high court decision against a company registered through the Bandung District Court clerkship, No. PK Application Deed Register No. 15/PDT.PK/2022/PN.BDG on Appeal Case Decision No. 500/PDT/2022/PT. BDG Jo. Case No. 19/Pdt.G/2022/PN.Bdg. Based on the court decision, the appeal request from the appellant was initially accepted and confirmed the court's interim decision No. 19/Pdt.G/2022/PN.Bdg.
- b. Handling of the case regarding the breach of contract lawsuit against the Bumi Putera 1912 Joint Life Insurance which was registered in register No.288/Pdt.G/2023/PN.Bdg dated June 26, 2023, the case has not been decided and is still in process.

44. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU")

Pada tanggal 5 Juni 2023, PT Redision Teknologi Indonesia sebagai kreditor, mengajukan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") terhadap Perusahaan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena gagal bayar oleh Perusahaan atas pokok pinjaman yang jatuh tempo.

Pada tanggal 18 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan PKPU oleh PT Redision Teknologi Indonesia terhadap Perusahaan telah mengeluarkan keputusan yang mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara terhadap Perusahaan untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan tersebut, serta menunjuk dan mengangkat Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang Perusahaan, menetapkan tentang imbalan jasa Pengurus dalam pengurusan harta Perusahaan akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir, serta menanggung biaya perkara permohonan ini sampai dengan PKPU berakhir.

44. Suspension Of Debt Payment Obligations ("PKPU")

On June 5, 2023, PT Redision Teknologi Indonesia as creditor filed for a Suspension of Debt Repayment ("PKPU") file a lawsuit against the Company to the Commercial Court at the Central Jakarta District Court due to non-payment by the Company of its outstanding principal amount on due dates.

On July 18, 2023, the judges of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court, also examine and adjudicate the PT Redision Teknologi Indonesia petition against the Company, had issued a decision officially approving a petition for the Suspension of Debt Repayment (PKPU) and stipulating a Temporary Suspension of Debt Repayment (PKPU) of the Company for a maximum of 45 (forty-five) days from the date of the decision and appointed the Administrators of the Suspension of Debt Repayment Process of the Company's, stipulates the remuneration of the Administrators to administer of the assets Company's to be determined after PKPU expires and suspends the application fee until the termination of the PKPU.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Pada tanggal 31 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengabulkan PKPU Tetap kepada Debitor/PT Industri Telekomunikasi Indonesia (dalam PKPU) selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) berakhir. Adapun pertimbangan adanya perpanjangan waktu di antaranya terdapat beberapa nilai tagihan Kreditor yang belum sesuai dengan dokumen yang disampaikan kepada tim Pengurus serta berbeda juga dengan nilai pada catatan Debitor, selain itu Debitor memerlukan waktu untuk menyusun rencana perdamaian bersama-sama dengan penasihat keuangan Debitor yang kemudian akan disesuaikan dengan nilai tagihan Kreditor yang terverifikasi.

Pada tanggal 30 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengabulkan perpanjangan PKPU Tetap kepada debitor/PT Industri Telekomunikasi Indonesia (dalam PKPU) selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPUT) berakhir pada 30 Oktober 2023.

Pada tanggal 13 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengabulkan Perpanjangan PKPU Tetap kepada Debitor/PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Dalam PKPU) selama 44 (empat puluh empat) hari kalender terhitung sejak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap ("PKPUT") yaitu berakhir pada tanggal 25 Januari 2024.

Kreditur PKPU dalam Rencana Perdamaian diklasifikasi menjadi kreditur separatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren.

Jumlah utang Perusahaan didasarkan pada kreditur yang telah melakukan verifikasi pada batas akhir pengajuan tagihan kreditur tanggal 17 November 2023 dengan *cut-off* tanggal 5 Desember 2023 yang disampaikan kepada Tim Pengurus Perusahaan (Dalam PKPU) ("Kreditur Terverifikasi") maupun tagihan kreditur yang belum melakukan verifikasi berdasarkan Laporan Keuangan Internal Perusahaan tanggal 5 Desember 2023 ("Kreditur Tidak Terverifikasi").

On August 31, 2023, the judges of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court, granted a Permanent PKPU to the Debitor/PT Indonesian Telecommunication Industry (In PKPU) for 60 (sixty) calendar days starting from the end of the Temporary Postponement of Debt Payment Obligations (PKPUS). The considerations for this time extension include that there are several values of creditor claims that are not in accordance with the documents submitted to the management team and are also different from the values in the debtor's records. Apart from that, the debtor needs time to prepare a peace plan together with the debtor's financial advisor, which will then be adjusted to the value of verified Creditor claims.

On October 30, 2023, the judges of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court, granted an extension of the Permanent PKPU to the debtor/PT Indonesian Telecommunication Industry (In PKPU) for 45 (forty-five) calendar days starting from the Postponement of Fixed Debt Payment Obligations (PKPUT) ends on October 30, 2023.

On December 13, 2023, the judges of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court, granted the extension of the Permanent PKPU to the Debitor/PT Industrial Telekomunikasi Indonesia (In PKPU) for 44 (forty-four) calendar days starting from the Postponement of Fixed Debt Payment Obligations ("PKPUT"), which ends on January 25, 2024.

PKPU creditors under the Composition Plan are classified as follows secured creditors, preferred creditors and unsecured creditors.

The Company's debt is based on creditors who have verified the deadline for billing creditors on November 17, 2023 with a cut-off on December 5, 2023 which is submitted to the Management Team of the Company (In PKPU) ("Verified Creditors") and billing creditors who have not verify based on the Company's Internal Financial Statements on December 5, 2023 ("Unverified Creditors").



Kreditur PKPU dalam Rencana Perdamaian yang telah mendaftarkan tagihannya yaitu 579 Kreditor Preferen, 3 Kreditor Separatis dan 373 Kreditor Konkuren.

PKPU creditors in the peace plan who have registered their claims are 579 Preferred Creditors, 3 Secured Creditors and 373 Unsecured Creditors.

45. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Penyelesaian kewajiban melalui proses PKPU
Pada tanggal 24 Januari 2024, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dilaksanakan rapat pembahasan proposal perdamaian dan pemungutan suara (*voting*) yang telah dihadiri oleh 3 kreditor separatis dan 358 kreditor konkuren. Kreditor separatis menyatakan setuju dengan proposal perdamaian sebanyak 3 kreditor atau setara dengan 100% kehadiran dan dengan jumlah suara 98.672 yang mewakili 100% seluruh tagihan yang diakui yang hadir dalam rapat tersebut dan kreditor konkuren yang menyatakan setuju dengan proposal perdamaian sebanyak 351 kreditor setara dengan 98,04% dengan total suara sebesar 31.541 atau setara 94,10%, sedangkan kreditor konkuren menyatakan tidak setuju atau abstain dengan proposal perdamaian sebanyak 7 kreditor setara dengan 2,96% dengan total suara sebesar 1.976 suara atau setara dengan 5,90%.

Pada tanggal 24 Januari 2024, Perusahaan telah mendapatkan keputusan homologasi atas Rencana Perdamaian yang disampaikan dalam PKPU Perusahaan.

Kewajiban-kewajiban Perusahaan yang penyelesaiannya dilakukan melalui PKPU meliputi:

- Utang usaha
- Pinjaman jangka pendek
- Utang lain-lain
- Pinjaman jangka panjang
- Liabilitas sewa

Kewajiban-kewajiban Perusahaan yang masuk dalam PKPU adalah kewajiban Perusahaan yang terutang pada tanggal 18 Juli 2023. Kewajiban-kewajiban entitas anak Perusahaan tidak termasuk dalam penyelesaian PKPU Perusahaan.

45. Event After Reporting Period

Settlement of liabilities through PKPU process
On January 24, 2024, at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court, a meeting to discuss peace proposals and voting was held which was attended by 3 secured creditors and 358 unsecured creditors. Secured creditors stated that they agreed with the peace proposal as many as 3 creditors or the equivalent of 100% attendance and with a total of 98,672 votes representing 100% of all recognized claims present at the meeting and unsecured creditors who agreed with the peace proposal were 351 creditors equivalent to 98.04% with a total vote of 31,541 or equivalent to 94.10%, while unsecured creditors stated that they did not agree or abstained from the peace proposal, 7 creditors equivalent to 2.96% with a total vote of 1,976 votes or equivalent to 5.90%.

On January 24, 2024, the Company obtained a homologation decision on the Company's Composition Plan which was proposed in the Company's PKPU.

The Company's liabilities that are settled through PKPU comprised the following:

- Trade payables
- Short-term loans
- Other payables
- Long-term loans
- Lease liabilities

The Company's obligations included in the PKPU are the Company's obligations owed on July 18, 2023. The obligations of the Company's subsidiaries are not included in the Company's PKPU settlement.

Dalam putusan homologasi atas Rencana Perdamaian, terdapat 3 skema penyelesaian dengan para kreditur, yaitu:

- Dilunasi bertahap melalui arus kas operasional;
- Dimodifikasi menjadi ketentuan pembayaran baru jangka panjang; dan
- Percepatan pembayaran melalui distribusi kelebihan EBITDA cash sweep.

Rincian skema restrukturisasi yang diajukan Perusahaan kepada kreditur dalam proposal perdamaian antara lain:

a. Preferen

Kreditur/ Creditors	Pokok/ Principle	Pembayaran/ Payment	Pembayaran Pertama/ First payment	Jangka Waktu/ Period
Karyawan	93,658,674,447	Tahunan/ Annually	Akhir tahun ke-3/ End of 3rd year	11 tahun/ Years
BPJS Ketenagakerjaan	3,947,534,013	Tahunan/ Annually	Akhir tahun ke-3/ End of 3rd year	5 tahun/ Years
Total	97,606,208,460			

Pembayaran pokok utang karyawan akan dilakukan pemotongan berdasarkan kewajiban karyawan terkait dengan perpajakan, jaminan sosial, dana pensiun, keanggotaan koperasi, serta kewajiban ketenagakerjaan lainnya

Bunga dan denda yang tertunggak akan dilakukan penghapusan yang efektif pada tanggal efektif perjanjian perdamaian.

Apabila Perusahaan tidak memiliki cukup dana untuk membayar tagihan pokok utang, maka sisa jumlah yang belum dibayar dapat ditangguhkan dan wajib dibayar bersamaan dengan jumlah yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran berikutnya dan mekanisme ini akan berlanjut hingga jadwal pelunasan akhir.

b. Separatis

Kreditur/ Creditors	Pokok/ Principle	Pembayaran/ Payment	Pembayaran Pertama/ First payment	Jangka Waktu/ Period
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	558,255,788,787	Tahunan (Tahun ke 3-5) dan 6 bulanan (Tahun ke 6-18)/ Annual (Year 3-5) and 6 months (Years 6-18)	Akhir tahun ke-3/ End of 3rd year	18 tahun/ Years
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	275,988,821,001	Tahunan (Tahun ke 3-5) dan 6 bulanan (Tahun ke 6-18)/ Annual (Year 3-5) and 6 months (Years 6-18)	Akhir tahun ke-3/ End of 3rd year	18 tahun/ Years

In the homologation decision on the Peace Plan, there are 3 settlement schemes with the directors, namely:

- Paid off in stages through operational cash flow;*
- Modified to new long-term payment terms; and*
- Accelerated payments through distribution of excess EBITDA cash sweeps.*

Details of the restructuring scheme proposed by the Company to creditors in the peace proposal include:

a. Preferred

The principal payment of employee debt will be deducted based on the employee's obligations related to taxation, social security, pension funds, cooperative membership and other employment obligations.

The outstanding interest and fines will be written-off effective on the effective date of the peace agreement.

If the Company does not have sufficient funds to pay the principal debt, the remaining unpaid amount can be deferred and must be paid along with the amount that must be paid on the next payment date and this mechanism will continue until the final repayment schedule.

b. Secured



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

Kreditur/ Creditors	Pokok/ Principle	Pembayaran/ Payment	Pembayaran Pertama/ First payment	Jangka Waktu/ Period
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	10,414,999,967	Tahunan (Tahun ke 3-5) dan 6 bulanan (Tahun ke 6-18)/ Annual (Year 3-5) and 6 months (Years 6-18)	Akhir tahun ke-3/ End of 3rd year	18 tahun/ Years
Total	844,659,609,755			

Pembayaran bunga atas pokok utang dilakukan dalam suku bunga tahunan dan akan dilakukan bersama dengan pembayaran pokok utang.

Interest payments on principal debt are made at an annual interest rate and will be made together with principal debt payments.

Seluruh bunga dan denda yang tertunggak serta bunga dan denda yang timbul sampai dengan perjanjian perdamaian yang dihomologasi berkekuatan hukum tetap ("tunggakan bunga dan denda") ditangguhkan pembayarannya hingga tanggal jatuh tempo terakhir.

All outstanding interest and fines as well as interest and fines that arise until the peace agreement is homologated and has permanent legal force ("arrears of interest and fines") are deferred until the final due date.

c. Konkuren

c. Unsecured

Kreditur/ Creditors	Pokok/ Principle	Pembayaran/ Payment	Pembayaran Pertama/ First payment	Jangka Waktu/ Period
Terverifikasi/ Verified				
Vendor dengan Nilai Tagihan Hingga/ Vendors with Bill Value Up to Rp1M	6,692,561,036	Tahunan/ Annually	Akhir tahun ke-3/ End of 3rd year	5 tahun/ Years
Vendor Aktif Kategori 1/ Category 1 Active Vendors	33,299,989,670	Tahunan/ Annually	Akhir tahun ke-3/ End of 3rd year	9 tahun/ Years
Vendor Aktif Kategori 2/ Category 2 Active Vendors	37,487,850,312	Tahunan/ Annually	Akhir tahun ke-7/ End of 7th year	12 tahun/ Years
Vendor Terdahulu/ Previous Vendors	32,667,291,659	Tahunan/ Annually	Akhir tahun ke-10/ End of 10th year	13 tahun/ Years
Vendor dengan Nilai Tagihan Lebih Dari/ Vendors with Invoice Value More Than Rp100M	150,687,696,878	Tahunan/ Annually	Akhir tahun ke-5/ End of 5th year	18 tahun/ Years
Dana Pensiun/ Pension fund	29,464,014,064	Tahunan/ Annually	Akhir tahun ke-7/ End of 7th year	13 tahun/ Years
Karyawan/ Employee	804,551,591	Tahunan/ Annually	Akhir tahun ke-3/ End of 3rd year	11 tahun/ Years
Tidak Terverifikasi yang Teridentifikasi/ Identified Unverified	62,841,661,835	Bertahap/ Gradually	Bertahap berdasarkan diskresi Perseroan/ Gradually based on the Company's discretion	16 tahun/ Years
Total	353,945,617,045			

Bunga dan denda yang tertunggak kreditor konkuren akan dihapus efektif pada tanggal efektif perjanjian perdamaian.

Interest and fines owed by concurrent creditors will be written off effective on the effective date of the settlement agreement.

Apabila Perusahaan tidak memiliki cukup dana untuk membayar tagihan pokok utang Kreditor Konkuren, maka sisa jumlah yang belum dibayar dapat ditangguhkan dan wajib dibayar bersamaan dengan jumlah yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran berikutnya dan mekanisme ini akan berlanjut hingga jadwal pelunasan akhir.

If the Company does not have sufficient funds to pay the principal debt of the Concurrent Creditors, the remaining unpaid amount can be deferred and must be paid along with the amount that must be paid on the next payment date and this mechanism will continue until the final repayment schedule.

46. Dampak Konsolidasi Entitas Anak

Pada tahun 2023, INTENS, entitas anak, melakukan konsolidasi laporan keuangan PT Inti Smart Teknologi ("PT ISTEK"). Manajemen INTENS berkeyakinan bahwa PT ISTEK seharusnya dikonsolidasi sejak awal pendiriannya, namun di tingkat konsolidasi Perusahaan jumlah item-item PT ISTEK tidak material, sehingga Perusahaan mencatat saldo awal kepentingan nonpengendali ditahun berjalan yang terdiri dari bagian saldo rugi sebesar Rp2.155.152.392 dan modal disetor sebesar Rp5.500.000.000.

46. Impact of Subsidiary Consolidation

In 2023, INTENS, a subsidiary, will consolidate the financial statements of PT Inti Smart Teknologi ("PT ISTEK"). Management INTENS believes that PT ISTEK should be consolidated from the start of its establishment, however at the Company's consolidation level the number of PT ISTEK items is not material, so the Company recorded an initial balance of non-controlling interests in the current year consisting of a loss balance of Rp2,155,152,392 and paid-in capital amounting to Rp5,500,000,000.

47. Informasi Keuangan Tersendiri Perusahaan

Perusahaan menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan laporan keuangan utama. Informasi keuangan tambahan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) (Entitas Induk) ini, dimana investasi pada Entitas Anak dicatat dengan metode harga perolehan, disajikan untuk menganalisa hasil usaha entitas induk saja. Informasi keuangan tambahan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) (Entitas Induk) berikut ini (Lampiran I – Lampiran IV) harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan Entitas Anak.

47. Financial Information of the Company

The Company published the consolidated financial statements as its primary financial statements. The supplementary financial statements of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) (Parent Entity) which account for investment in Subsidiaries using the cost method and have been prepared in order that the parent entity's result of operations can be analyzed. The supplementary financial information of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) (Parent Entity) (Attachment I – Attachment IV) should be read in conjunction with the consolidated financial statements of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) and Subsidiaries.

48. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amendemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2023.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang Dengan Kovenan;
- Amendemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik;

48. New Accounting and Interpretation Standards Issued but Not Yet Effective

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2023.

New standard and amendment to standard which effective for periods beginning on or after January 1, 2024, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements related to Non-Current Liabilities with Covenants;
- Amendments PSAK 73: Lease Liability in a Sale and Leaseback;

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

- Amendemen PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang pengaturan pembiayaan pemasok;
- Revisi PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah; dan
- Revisi PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi;
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif;
- Amendemen PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang kekurangan ketertukaran.

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 74: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 2: Laporan Arus Kas;
- PSAK 13: Properti Investasi;
- PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 16: Aset Tetap;
- PSAK 19: Aset Takberwujud;
- PSAK 22: Kombinasi Bisnis;
- PSAK 24: Imbalan Kerja;
- PSAK 48: Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 50: Instrumen Keuangan Penyajian;
- PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi;
- PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
- PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
- PSAK 71: Instrumen Keuangan;
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

- *Amendments PSAK 2: Statement of Cash Flows and PSAK 60: Financial Instrument: Disclosure regarding supplier finance agreement;*
- *Revised PSAK 101: Presentation of Shariah Financial Statements; and*
- *Revised PSAK 109: Accounting of Zakah, Infak, and Sadaqah.*

New standard and amendment to standard which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- *PSAK 74: Insurance Contract;*
- *Amendments PSAK 74: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 – Comparative Information;*
- *Amendments PSAK 10: Foreign Exchange Rate regarding lack of exchangeability*

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 74: Insurance Contracts, as follows:

- *PSAK 1: Presentation of Financial Statements;*
- *PSAK 2: Statement of Cash Flows;*
- *PSAK 13: Investment Property;*
- *PSAK 15: Investment in Associated Entities and Joint Ventures;*
- *PSAK 16: Fixed Assets;*
- *PSAK 19: Intangible Assets;*
- *PSAK 22: Business Combinations;*
- *PSAK 24: Employee Benefits;*
- *PSAK 48: Impairment of Asset;*
- *PSAK 50: Financial Instruments: Presentation;*
- *PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets;*
- *PSAK 58: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;*
- *PSAK 60: Financial Instruments: Disclosures;*
- *PSAK 71: Financial Instruments;*
- *PSAK 72: Income from Contracts with Customers.*

Until the date of the consolidated financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards. 527

DSAK-IAI juga mengesahkan perubahan penomoran PSAK dan ISAK yang berlaku efektif pada 1 Januari 2024, dimana perubahan ini tidak memengaruhi substansi pengaturan dalam masing-masing PSAK dan ISAK tersebut.

DSAK-IAI also ratified changes in PSAK and ISAK numbering which will be effective on January 1, 2024. This change does not affect the substance of the requirement in each PSAK and ISAK.

49. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan telah menyetujui laporan keuangan konsolidasian yang berakhir 31 Desember 2023 untuk diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2024.

49. Responsibility for Consolidated Financial Statements

The Company's management is responsible for the preparation of consolidated financial statements and has approved the consolidated financial statements ended December 31, 2023 to be published on March 18, 2024.



LAMPIRAN I

APPENDIX I
ANNUAL REPORTPT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
(INDUK)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
(PARENT)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

As of December 31, 2023 and 2022

(In Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

	2023 Rp	2022 Rp
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Bank	20,766,320,240	26,479,385,355
Piutang Usaha		
Pihak Berelasi	162,453,780,469	80,799,511,635
Pihak Ketiga	7,335,122,358	8,284,789,140
Piutang Lainnya		
Pihak Berelasi	10,657,340,984	8,197,042,183
Pihak Ketiga	1,258,045,795	1,583,805,465
Persediaan	101,873,688,901	165,670,308,456
Pajak Dibayar di Muka	21,299,586,734	2,535,849,052
Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka	1,916,472,225	795,811,900
Jumlah Aset Lancar	327,560,357,706	294,346,503,186
ASET TIDAK LANCAR		
Aset Tetap	763,713,285,698	764,179,156,560
Investasi pada Entitas Anak	26,800,582,000	26,800,582,000
Properti Investasi	62,821,059,320	62,836,332,123
Aset Takberwujud	14,131,884,993	13,720,495,712
Aset Pajak Tangguhan	54,672,179,110	53,090,542,720
Aset Lain-lain	236,549,839	186,550,072
Jumlah Aset Tidak Lancar	922,375,540,960	920,813,659,187
JUMLAH ASET	1,249,935,898,666	1,215,160,162,373

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Usaha		
Pihak Berelasi	194,525,241,271	189,856,604,807
Pihak Ketiga	125,821,151,223	109,292,115,817
Utang Lain-lain		
Pihak Berelasi	34,957,370,501	24,062,989,817
Pihak Ketiga	38,166,967,625	39,421,114,945
Beban Akrua	183,565,070,424	172,836,006,112
Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang:		
Utang Bank	25,767,175,741	25,767,175,741
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank	39,763,846,097	15,794,604,362
Liabilitas Sewa	2,838,346,601	2,838,346,601
Utang Pajak	29,705,081,133	28,322,626,845
Provisi Masa Pemeliharaan	503,775,559	503,211,181
Pendapatan Diterima di Muka	45,139,719,401	34,544,305,945
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	720,753,745,576	643,239,102,173

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas Jangka Panjang:		
Utang Bank	808,477,434,047	808,477,434,047
Utang Bunga Bank	205,163,023,258	161,209,868,151
Liabilitas Imbalan Kerja	141,089,404,667	135,677,425,048
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1,154,729,861,972	1,105,364,727,246

JUMLAH LIABILITAS

1,875,483,607,548 1,748,603,829,419

EKUITAS

Modal Saham - Nilai Nominal		
Rp 1.000.000 (Rupiah Penuh) per Saham		
Modal Dasar - 1.000.000 Saham		
Modal Ditempatkan dan		
Disetor Penuh 350.000 Saham	350,000,000,000	350,000,000,000
Saldo Laba		
Ditentukan Penggunaannya	79,471,118,142	79,471,118,142
Belum Ditentukan Penggunaannya	(1,799,608,425,827)	(1,707,785,078,550)
Komponen Ekuitas Lainnya		
Revaluasi Aset Tetap	802,524,611,135	802,524,611,135
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	(57,935,012,332)	(57,654,317,773)

JUMLAH DEFISIENSI MODAL

(625,547,708,882) (533,443,667,046)

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

1,249,935,898,666 1,215,160,162,373

ASSETS

CURRENT ASSETS

Cash on Hand and Cash in Banks	
Trade Receivables	
Related Parties	
Third Parties	
Other Receivables	
Related Parties	
Third Parties	
Inventories	
Prepaid Taxes	
Prepaid Expense and Advance	

Total Current Asset

NON-CURRENT ASSETS

Fixed Assets	
Investment in Subsidiaries	
Investment Properties	
Intangible Assets	
Deferred Tax Assets	
Other Assets	

Total Non-Current Assets

TOTAL ASSETS

LIABILITIES AND EQUITY

CURRENT LIABILITIES

Trade Payables	
Related Parties	
Third Parties	
Other Payables	
Related Parties	
Third Parties	
Accrued Expenses	
Current Maturities of Long-Term Liabilities:	
Bank Loans	
Financial Institutions Loans	
Lease Liabilities	
Taxes Payable	
Guarantee Period Provision	
Unearned Revenue	

Total Current Liabilities

NON-CURRENT LIABILITIES

Long-Term Liabilities:

Bank Loans	
Accrued Interest Payable	
Employee Benefit Liabilities	

Total Long-Term Liabilities

TOTAL LIABILITIES

EQUITY

Capital Stock - Par Value of	
Rp 1,000,000 (Full Rupiah) per Share	
Authorized Capital - 1,000,000 Shares	
The Issued and Fully Paid Capital -	

350,000 Shares

Retained Earnings

Appropriated

Unappropriated

Other Equity Components

Fixed Assets Revaluations

Remeasurements of Defined Benefits Plan

TOTAL CAPITAL DEFICIENCY

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
(INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
(PARENT)
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

	2023 Rp	2022 Rp	
PENDAPATAN	337,309,550,347	293,322,789,247	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(299,834,518,215)	(253,603,400,428)	COST OF REVENUE
LABA BRUTO	37,475,032,132	39,719,388,819	GROSS PROFIT
Beban Pemasaran	(22,380,914,176)	(11,055,511,983)	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	(54,574,493,536)	(46,047,169,889)	General and Administrative Expenses
Beban Pengembangan	(3,953,115,269)	(4,641,874,787)	Development Expenses
Pendapatan Lain-lain	8,725,912,682	15,740,319,933	Other Income
Beban Pajak Final	(2,863,141,690)	(5,790,844,121)	Final Tax Expense
Beban Lain-lain	(9,930,008,601)	(9,035,986,917)	Other Expenses
Total Beban Usaha	(84,975,760,590)	(60,831,067,764)	Total Operating Expenses
RUGI USAHA	(47,500,728,458)	(21,111,678,945)	OPERATING LOSS
Beban Keuangan	(45,800,433,774)	(53,044,156,675)	Financial Charges
RUGI SEBELUM PAJAK	(93,301,162,232)	(74,155,835,620)	LOSS BEFORE TAX
Manfaat (Beban) Pajak	1,477,814,955	(2,994,397,172)	Tax Benefit (Expense)
RUGI SETELAH PAJAK	(91,823,347,277)	(77,150,232,792)	LOSS AFTER TAX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Kerugian Aktuarial atas Program Imbalan Pasti	(280,694,559)	(4,269,190,789)	Item that Will Not be Reclassified Actuarial Loss of Defined Benefit Plan
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(92,104,041,836)	(81,419,423,581)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR



LAMPIRAN III

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

(INDUK)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

(PARENT)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

For The Years Ended

December 31, 2023 and 2022

(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

	Saldo Laba/ Retained Earnings					
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid in Capital Rp	Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated Rp	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated Rp	Komponen Ekuitas Lainnya/ Other Equity Components Rp	Total Defisiensi Modal/ Capital Deficiency Rp	
SALDO PER 31 DESEMBER 2021	350,000,000,000	79,471,118,142	(1,630,634,845,758)	749,139,484,151	(452,024,243,465)	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2021
Rugi Tahun Berjalan	--	--	(77,150,232,792)	--	(77,150,232,792)	Loss for The Year
Rugi Komprehensif Lain	--	--	--	(4,269,190,789)	(4,269,190,789)	Other Comprehensive Loss
SALDO PER 31 DESEMBER 2022	350,000,000,000	79,471,118,142	(1,707,785,078,550)	744,870,293,362	(533,443,667,046)	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2022
Rugi Tahun Berjalan	--	--	(91,823,347,277)	--	(91,823,347,277)	Loss for The Year
Rugi Komprehensif Lain	--	--	--	(280,694,559)	(280,694,559)	Other Comprehensive Loss
SALDO PER 31 DESEMBER 2023	350,000,000,000	79,471,118,142	(1,799,608,425,827)	744,589,598,803	(625,547,708,882)	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2023

APPENDIX III

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
(INDUK)**

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
(PARENT)**

STATEMENT OF CASH FLOWS

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Fully Rupiah, unless Otherwise stated)

	2023 Rp	2022 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari Pelanggan	286,472,552,871	368,646,401,943
Penerimaan Restitusi Pajak	416,110,800	5,370,130,704
Penerimaan Bunga Jasa Giro	305,273,785	256,618,901
Pembayaran Kepada Pemasok dan Beban Operasional	(204,406,217,640)	(299,043,815,573)
Pembayaran Kepada Karyawan	(38,865,804,061)	(47,604,452,151)
Pembayaran Beban Pendanaan	(2,451,899,056)	(1,014,366,474)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(41,184,326,472)	(39,718,527,231)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	285,690,227	(13,108,009,881)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan Aset Tetap	--	(200,548,124)
Perolehan Aset Takberwujud	(142,357,095)	--
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(142,357,095)	(200,548,124)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank	1,250,000,000	21,844,993,055
Pembayaran Utang Bank	--	(800,000,000)
Pembayaran Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank	(7,104,620,389)	(14,175,256,529)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(5,854,620,389)	6,869,736,526
PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS	(5,711,287,257)	(6,438,821,479)
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs yang Belum Direalisasi	(1,777,858)	8,246,096
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	26,479,385,355	32,909,960,738
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	20,766,320,240	26,479,385,355

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Cash Received from Customers
Cash Received from Tax Restitution
Interest Income from Current Account
Cash Paid to Suppliers and Operational Expenses
Cash Paid for Employees
Cash Paid for Financing Expenses
Corporate Income Tax Paid

Net Cash Flow Provided by (Used in) Operating Activities

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Purchase of Fixed Assets
Purchase of Intangible Assets

Net Cash Flow Used in Investing Activities

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Cash Received from Financial Institution Loans
Repayment for Bank Loans
Payment for Financial Institution Loans

Net Cash Flow Provided by (Used in) Financing Activities

NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

Unrealized Gain (Loss) from Foreign Exchange

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT ENDING OF YEAR



LAMPIRAN V

APPENDIX V
ANNUAL REPORTPT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
(INDUK)

PENGUNGKAPAN LAINNYA

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)
(PARENT)

OTHER DISCLOSURE

For The Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Full Rupiah, unless Otherwise stated)

1. Laporan Keuangan Tersendiri

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas entitas induk adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian.

1. Separate Financial Statements

Statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows of parent entity is a separate financial statements which represents additional information to the consolidated financial statements.

2. Investasi pada Entitas Anak

Informasi mengenai entitas anak yang dimiliki Perusahaan diungkapkan pada Catatan 1 atas laporan keuangan konsolidasian.

2. Investment in Subsidiaries

Information regarding the Company's subsidiaries is disclosed in Note 1 of the consolidated financial statements.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 investasi pada entitas anak dicatat pada nilai perolehan sebagai berikut:

On December 31, 2023 and 2022 investment in subsidiaries stated at cost as follows:

Investasi pada entitas anak**Investments in subsidiaries**

Nama Entitas/ Entity Name	Persentase Kepemilikan/ Ownership Percentage %	2023 dan/ and 2022		
		Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan (Pelepasan)/ Addition (Deduction) Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp
PT Inti Pindad Mitra Sejati	86.15426%	16,800,582,000	--	16,800,582,000
PT Inti Konten Indonesia	99.99999%	10,000,000,000	--	10,000,000,000



PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Pengurus

Laporan Auditor Independen

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Penghasilan Komprehensif	2
Laporan Perubahan Aset Neto	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

**SURAT PERNYATAAN PENGELOLA TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1.	Nama	:	Edi Witjara
	Alamat Kantor	:	Jl. Moch. Toha No. 77 Bandung
	Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu Identitas Lain	:	Jl. Kalijati Indah 7-A Antapani Bandung NIP. DD.2207001
	Nomor Telepon	:	0811-1225-828
	Jabatan	:	Direktur Utama
2.	Nama	:	Dharma Harianda
	Alamat Kantor	:	Jl. Moch. Toha No. 77 Bandung
	Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu Identitas Lain	:	CG Masjid No.95 Bojongsoang Bandung NIP. PP.0711003
	Nomor Telepon	:	0813-2033-2811
	Jabatan	:	Manager TJSL

Menyatakan bahwa:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PUMK PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) ("Program");
- Laporan keuangan Program telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK – ETAP);
- Semua informasi dalam laporan keuangan Program telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - Laporan keuangan Program tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dan aplikasinya di dalam Program.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Bandung, 15 Maret 2024
Atas Nama dan Mewakili Pengurus Unit PUMK

Direktur Utama

Manager TJSL



Edi Witjara

Dharma Harianda

PT.Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Kantor Pusat :
Jl. Moch. Toha No. 77
Bandung 40253
Tlp. : (62-22) 5201501
Fax. : (62-22) 5202444
E-mail : info@inti.co.id

Pabrik :
Jl. Moch. Toha No. 225
Palasari - Bandung 40258

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Registered Public Accountants

Nomor : 00346/2.1030/AU.2/12/1155-2/0/III/2024

RSM Indonesia

Plaza ASIA, Level 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340

F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta
Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Program"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program tanggal 31 Desember 2023, serta hasil aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Program berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Pengelola dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Pengelola bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh pengelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, pengelola bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali pengelola memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan, termasuk pelaporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.



Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Program.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh pengelola.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh pengelola dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Program untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Program tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Eishennoraz

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1155

Jakarta, 15 Maret 2024



PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2023 Rp	2022 Rp
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank	3	249.614.247	184.199.859
Piutang Pinjaman Mitra Binaan	4	2.355.665.944	3.442.988.995
Total Aset Lancar		<u>2.605.280.191</u>	<u>3.627.188.854</u>
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	5	--	--
Piutang Kolaborasi	6	1.700.000.000	--
Aset Lain-lain	7		
Aset Tetap Tidak Berfungsi		28.477.750	28.477.750
Akumulasi Penurunan Nilai		(28.477.750)	(28.477.750)
Piutang Bermasalah		4.696.443.536	4.728.037.597
Akumulasi Penurunan Nilai		(4.696.443.536)	(4.728.037.597)
Total Aset Tidak Lancar		<u>1.700.000.000</u>	<u>--</u>
TOTAL ASET		<u>4.305.280.191</u>	<u>3.627.188.854</u>
LIABILITAS DAN ASET NETO			
Liabilitas Jangka Pendek			
Angsuran Belum Teridentifikasi		131.913.588	132.847.588
Kelebihan Pembayaran Angsuran		4.627.769	4.627.769
TOTAL LIABILITAS		<u>136.541.357</u>	<u>137.475.357</u>
ASET NETO			
Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	8	4.168.738.834	3.489.713.497
Total Aset Neto		<u>4.168.738.834</u>	<u>3.489.713.497</u>
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO		<u>4.305.280.191</u>	<u>3.627.188.854</u>

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

	Catatan	2023 Rp	2022 Rp
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
PENDAPATAN	9		
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman		205.300.340	192.906.755
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro		8.021.209	7.468.427
Pemulihan Penyisihan Piutang	4, 9	436.747.967	--
Pemulihan Nilai Piutang Bermasalah	7, 9	31.594.061	--
Lainnya		1.684.000	5.010.000
TOTAL PENDAPATAN		683.347.577	205.385.182
BEBAN LAINNYA	4, 10		
Beban Penyisihan Piutang Bermasalah		--	411.600.274
Beban Penyisihan Piutang	4, 10	--	68.479.976
Beban Administrasi dan Umum	10	4.322.240	4.211.684
Beban Lain-lain		--	1.652.710
TOTAL BEBAN		4.322.240	485.944.644
SURPLUS (DEFISIT)		679.025.337	(280.559.462)
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		--	--
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		--	--
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF		679.025.337	(280.559.462)



PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2023 Rp	2022 Rp
ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo Awal	3.489.713.497	3.770.272.959
Surplus (Defisit)	679.025.337	(280.559.462)
Saldo Akhir	4.168.738.834	3.489.713.497
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--
ASET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	--	--
TOTAL ASET NETO	4.168.738.834	3.489.713.497

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
LAPORAN ARUS KAS

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2023 Rp	2022 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
PENERIMAAN KAS DARI:		
Penerimaan Pengembalian Pinjaman dari Mitra Binaan	1.874.731.079	1.971.425.831
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	205.300.340	192.906.755
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro	8.021.209	7.468.427
Pendapatan Lainnya	1.684.000	5.010.000
SUB TOTAL	2.089.736.628	2.176.811.013
PENGELUARAN KAS UNTUK:		
Penyaluran Pinjaman Kemitraan	(320.000.000)	(2.315.000.000)
Pengembalian Kelebihan Angsuran	--	(100.000)
Penyaluran Kerjasama Bank BRI	(1.700.000.000)	--
Beban Administrasi dan Umum	(4.322.240)	(4.211.684)
SUB TOTAL	(2.024.322.240)	(2.319.311.684)
KAS NETO YANG DITERIMA DARI AKTIVITAS OPERASI	65.414.388	(142.500.671)
Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas	65.414.388	(142.500.671)
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	184.199.859	326.700.530
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	249.614.247	184.199.859



542
 Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
 laporan keuangan secara keseluruhan



PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Informasi Umum

1.1 Pendirian dan Informasi Umum

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil ("PUMK") merupakan program kemitraan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) ("Perusahaan") merupakan salah satu BUMN yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai sebuah BUMN, Perusahaan merupakan salah satu pelaku ekonomi nasional di samping usaha swasta dan koperasi yang mengemban misi pemerintah dalam mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat. Dalam mengemban misi tersebut bentuk partisipasi Perusahaan dilakukan melalui PUMK. Dengan PUMK diharapkan peran aktif BUMN dapat memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi Perusahaan, serta dapat berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel dan membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

Untuk melaksanakan tujuan pendirian BUMN guna turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 serta atas perubahannya Nomor PER-6/MBU/09/2022 tanggal 8 September 2022, tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara. Semua peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Program TJSL (dahulu PKBL) sebagai bentuk kepedulian Perusahaan dan tanggung jawab sosial BUMN yang di dalamnya mengandung unsur tanggung jawab sosial dan turut membantu/mendorong pengembangan peningkatan ekonomi kerakyatan dalam lingkungan wilayah kerja maupun masyarakat pada umumnya, dibentuk pada tanggal 28 Juli 2008 berdiri sebagai bagian tersendiri dalam Perusahaan sesuai arahan dari Kementerian BUMN agar dapat secara mandiri mampu mengembangkan serta berkiprah sejalan dengan tujuan BUMN di lingkungannya dan sebagai implementasi kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

Perusahaan menyelenggarakan Program PUMK dengan membentuk unit kerja khusus di bawah pembinaan Direktur Utama. Pembentukan unit kerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha Mitra Binaan serta pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi Perusahaan. Unit kerja khusus ini berlokasi di Jalan Mohammad Toha No. 77 Bandung dan wilayah kerjanya meliputi kabupaten dan kotamadya di Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun 2023 dan 2022 didasarkan pada Surat Keputusan Direksi No. KN.024/2022 Tanggal 30 November 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

1.2 Kegiatan Utama

Program PUMK dilakukan dalam bentuk pembiayaan dan pendanaan usaha mikro dan usaha kecil dan bantuan kegiatan lainnya. BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan UMK. Program Pendanaan UMK pada pokoknya dilakukan dalam bentuk pinjaman pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil binaan BUMN.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KD.003/KP.09/030300/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Penempatan Ulang Karyawan di Lingkungan Perusahaan dan Surat Keputusan Direksi Nomor: KD.033/KP.09/030300/2023 tentang Mutasi Karyawan di Lingkungan Perusahaan untuk tahun 2023 dan Nomor: SK-256/MBU/11/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Pemberhentian,

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia untuk tahun 2022. Susunan pengurus TJSL adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Direktur Utama	Edi Witjara	Edi Witjara
Vice President Corporate Secretary	Delvia Damayanti	Rizqi Ayunda Pratama
Manajer TJSL	Dharma Harianda	Ujang Krisno
Senior Officer	Wagiyati A. Iskan	Wagiyati A. Iskan
	Ahmad Santosa B.	Ahmad Santosa B.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris tanggal 31 Oktober 2022, Rahmadi Murwantoro melaksanakan pengawasan dibidang Keuangan, Manajemen Risiko dan Hukum.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pengelolaan dana program PUMK disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 sesuai dengan Surat Edaran BUMN Nomor: SE02/MBU/Wk/2012 yang bentuk penyajiannya mengacu pada pernyataan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35, "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba" (ISAK 35) yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan Program PUMK, kecuali untuk laporan arus kas disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, dan disajikan dengan menggunakan metode langsung. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsionalnya. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus.

b Kas dan Bank

Kas dan Bank adalah saldo kas dan saldo rekening bank PUMK Perusahaan untuk membiayai kegiatan PUMK Perusahaan.

c Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Piutang Pinjaman Mitra Binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Unit TJSL kepada Mitra Binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang Pinjaman Mitra Binaan diakui pada saat pinjaman tersebut disalurkan kepada Mitra Binaan melalui transfer maupun diserahkan secara tunai kepada Mitra Binaan dan diukur serta dicatat sebesar jumlah bersih/pokok yang diharapkan dapat ditagih dari Mitra Binaan, yaitu pokok piutang Mitra Binaan dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/03/2023, penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

- Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

d Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif. Pinjaman kemitraan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi nasabah (mitra binaan) dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa depan dari kelompok pinjaman tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur (mitra binaan) untuk membayar seluruh pinjaman yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut didalam bank. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman diakui saat akhir periode akuntansi dan diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Metode perhitungan yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan persentase tertentu keterlambatan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun).

Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang didebet ketika terjadi jumlah alokasi penyisihan piutang tahun berjalan lebih kecil daripada jumlah alokasi penyisihan piutang pada tahun sebelumnya atau ketika direklasifikasi menjadi alokasi penyisihan piutang bermasalah.

Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria:

- 1) Mitra binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
- 2) Usaha mitra binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha;
- 3) Mitra binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo.

Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

e Piutang Bermasalah

Piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*) namun tidak terpulihkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang bermasalah diakui pada saat piutang pinjaman macet dipindahkan sebagai piutang bermasalah, diukur dan disajikan sebesar nihil yaitu nilai pokok pinjaman dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman bermasalah yang nilainya sama dengan nilai pokok pinjaman.

f Piutang Jasa Administrasi Pinjaman

Berdasarkan peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023, jasa administrasi pinjaman adalah sebesar 3% (tiga persen) efektif pertahun dengan suku bunga flat (tetap) yang setara dengan 3% efektif per tahun dari saldo pinjaman awal tahun. Jangka waktu/tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun.

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

g Aset Tetap

Aset tetap diukur sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan berdasarkan atas harga beli ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan.

Biaya perolehan aset tetap meliputi:

- 1) Harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya;
- 2) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Biaya-biaya ini termasuk biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan, dan biaya pengujian fungsionalitas;
- 3) Estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu bukan untuk menghasilkan persediaan.

Biaya-biaya berikut ini bukan merupakan biaya perolehan aset tetap dan harus diakui sebagai beban ketika terjadi:

- 1) Biaya pembukaan fasilitas baru;
- 2) Biaya pengenalan produk atau jasa baru (termasuk biaya aktivitas iklan dan promosi);
- 3) Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staf);
- 4) Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.

Pendapatan dan beban yang terkait dengan kegiatan insidental selama masa konstruksi atau pengembangan aset tetap diakui dalam laporan aktivitas jika operasional tersebut tidak diperlukan untuk membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi operasi yang dimaksud.

Aset tetap yang dibangun sendiri, nilai perolehannya didasarkan atas seluruh biaya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset yang bersangkutan. Aset tetap yang diperoleh melalui transaksi sewa beli (*purchase leasing*), nilai perolehannya dicatat berdasarkan seluruh nilai tunai biaya yang dibebankan dalam kontrak sewa beli.

Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan aset nonmoneter, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali (a) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Dalam kasus tersebut, biaya perolehan diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan.

Aset tetap dihentikan pengakuannya ketika:

- 1) Dilepaskan, atau
- 2) Ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pengeluaran Setelah Pengakuan Awal

Pengeluaran setelah pengakuan awal suatu aset tetap yang memperpanjang umur manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap tersebut

Penyusutan

Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan, misalnya aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana maksud manajemen. Penyusutan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaan aktifnya, kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh.



PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Aset tetap disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan menggunakan metode dan tarif penyusutan sebagai berikut:

Keterangan	Metode Penyusutan	Tarif Penyusutan
Inventaris dan peralatan	Garis lurus	25%

Jika terdapat suatu indikasi bahwa telah terjadi perubahan signifikan sejak tanggal pelaporan tahunan sebelumnya dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset, maka entitas harus menelaah ulang metode penyusutan saat ini dan (jika ekspektasi sekarang berbeda) mengubah metode penyusutan untuk mencerminkan pola yang baru. Entitas harus memperlakukan perubahan metode penyusutan sebagai perubahan estimasi akuntansi.

h Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain dalam laporan posisi keuangan terdiri dari: aset tetap tidak berfungsi dan piutang bermasalah.

Aset Tetap Tidak Berfungsi

Aset tetap yang sudah tidak digunakan atau tidak dioperasikan karena rusak atau sebab lain direklasifikasi menjadi aset tetap tidak produktif dan diturunkan nilainya sama dengan Rp1 (satu rupiah).

Piutang Bermasalah

Piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*) namun tidak terpulihkan atau sebab lain yang menyebabkan piutang dapat dikategorikan menjadi piutang bermasalah, diakui pada saat piutang pinjaman yang dikategorikan macet dan telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan. Piutang bermasalah diukur dan dicatat sebesar jumlah pokok pinjaman. Penyisihan piutang bermasalah diukur dan dicatat sebesar 100%.

i Penurunan Nilai**Pinjaman yang Diberikan dan Piutang**

Penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Dengan mempertimbangkan karakteristik PUMK maka metode perhitungan yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan prosentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun).

Aset Lainnya

Manajemen harus menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset. Jika indikasi tersebut ada, manajemen harus mengestimasi nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset tersebut. Juga mengindikasikan bahwa manajemen harus menelaah ulang sisa umur manfaat aset atau metode penyusutan (amortisasi) untuk aset.

Indikasi adanya kemungkinan penurunan nilai aset, dipengaruhi:

1) Sumber informasi eksternal

- Selama periode tertentu, nilai pasar aset menurun secara signifikan lebih dari yang diekspektasikan akibat berlalunya waktu atau penggunaan normal.
- Terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif dalam periode tertentu atau dalam waktu dekat dalam bidang lingkungan teknologi, pasar, ekonomi atau hukum dimana entitas beroperasi atau dalam pasar dimana aset tersebut diperuntukkan.
- Tingkat suku bunga pasar atau tingkat kembalian investasi pasar mengalami kenaikan selama periode berjalan, dan kenaikan tersebut akan berpengaruh secara material terhadap tingkat diskonto untuk menghitung nilai aset dan menurunkan nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual.
- Jumlah tercatat dari aset bersih entitas lebih besar dibandingkan kapitalisasi pasarnya.

2) Sumber informasi internal

- Tersedianya bukti keusangan atau kerusakan fisik dari aset.
- Terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif pada periode tertentu atau dalam waktu dekat atas cara dan bagaimana aset digunakan atau diharapkan akan digunakan.

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perubahan ini termasuk aset yang tidak digunakan, pabrik yang berhenti beroperasi atau restrukturisasi operasional dimana aset tersebut berlokasi, rencana untuk melepaskan aset sebelum tanggal yang diharapkan sebelumnya, dan penilaian ulang umur aset menjadi terbatas dari tidak terbatas.

- Tersedianya bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomis dari aset (atau akan) memburuk dari yang diharapkan. Dalam konteks kinerja ekonomis ini termasuk hasil operasi dan arus kas.

j Aset Neto

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto tidak terikat dan aset neto terikat. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal.

k PendapatanPendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

Mengungkapkan pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman Program Pendanaan UMK yang disalurkan kepada Mitra Binaan, termasuk Pinjaman Khusus.

Pinjaman yang diberikan kepada mitra binaan dibebankan bunga pinjaman atau jasa administrasi berdasarkan kelompok jumlah penyaluran pokok pinjaman sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN, ditetapkan per tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang berasal dari bunga deposito, jasa giro, bunga tabungan atau bunga simpanan lainnya.

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang tidak dapat digolongkan menurut klasifikasi pendapatan di atas. Termasuk dalam pendapatan lain-lain di antaranya "Piutang Bermasalah Dihapus - Diterima Kembali", diakui pada saat diterima.

l Penyaluran, Beban dan Pengeluaran

Beban diakui pada saat terjadinya, sedangkan pengeluaran diakui pada saat kas keluar.

Program Pendanaan UMK

Program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

Beban Administrasi dan Umum

Merupakan beban-beban yang terjadi karena adanya biaya administrasi dalam transaksi bank dan juga beban yang berkaitan atas Pajak Penghasilan.

3. Kas dan Bank

	2023 Rp	2022 Rp
Kas	4.374.042	21.709.461
Bank		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	184.943.539	107.958.065
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	60.296.666	54.532.333
Total	249.614.247	184.199.859

4. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

	2023 Rp	2022 Rp
Piutang Mitra Binaan	3.295.710.396	4.819.781.414
Penyisihan Penurunan	(940.044.452)	(1.376.792.419)
Jumlah Piutang Mitra Binaan-Bersih	2.355.665.944	3.442.988.995

Kolektibilitas piutang mitra binaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Lancar	1.997.053.000	3.120.806.921
Kurang lancar	413.263.995	352.916.500
Diragukan	55.549.000	125.677.993
Macet	829.844.401	1.220.380.000
Jumlah	3.295.710.396	4.819.781.414

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman per 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung menggunakan *migration analysis method* berdasarkan data historis minimal 2 (dua) tahun, sebagai berikut:

2023			
Kolektibilitas Piutang Mitra Binaan	Piutang Rp	Persentase (%)	Akumulasi Penyisihan Rp
Lancar	1.997.053.000	3,20%	63.943.446
Kurang lancar	413.263.995	8,10%	33.492.069
Diragukan	55.549.000	22,98%	12.764.536
Macet	829.844.401	100,00%	829.844.401
Total	3.295.710.396		940.044.452

2022			
Kolektibilitas Piutang Mitra Binaan	Piutang Rp	Persentase (%)	Akumulasi Penyisihan Rp
Lancar	3.120.806.921	3,31%	103.168.850
Kurang lancar	352.916.500	8,14%	28.712.035
Diragukan	125.677.993	19,52%	24.531.534
Macet	1.220.380.000	100,00%	1.220.380.000
Total	4.819.781.414		1.376.792.419

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Saldo Awal	1.376.792.419	1.308.312.443
Beban (Pemulihan) Penyisihan Piutang (Catatan 9 dan 10)	(436.747.967)	68.479.976
Saldo Akhir	940.044.452	1.376.792.419

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

5. Aset Tetap

	2023 dan 2022			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan				
Inventaris dan Peralatan Kantor	40.478.000	--	--	40.478.000
	40.478.000	--	--	40.478.000
Akumulasi Penyusutan				
Inventaris dan Peralatan Kantor	40.478.000	--	--	40.478.000
	40.478.000	--	--	40.478.000
Nilai Buku	--			--

6. Piutang Kolaborasi

Akun ini merupakan penyaluran program pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) senilai Rp1.700.000.000 yang dilakukan melalui kerjasama dengan Divisi *Micro Business* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Penyaluran pendanaan ini dilakukan sesuai dengan surat Menteri BUMN No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022, yang merekomendasikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada BUMN sebagai pengelola kerja sama program UMK.

7. Aset Lain-lain

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang bermasalah:

	2023 Rp	2022 Rp
Aset Tetap Tidak Berfungsi	28.477.750	28.477.750
Akumulasi Penurunan Nilai Aset Tetap Tidak Berfungsi	(28.477.750)	(28.477.750)
Piutang Bermasalah	4.696.443.536	4.728.037.597
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Bermasalah	(4.696.443.536)	(4.728.037.597)
Total	--	--
	2023 Rp	2022 Rp
Saldo Awal	4.728.037.597	4.316.437.323
Penyisihan (Pemulihan) (Catatan 9 dan 10)	(31.594.061)	411.600.274
Saldo Akhir	4.696.443.536	4.728.037.597

Aset tetap tidak berfungsi merupakan aset tetap tidak berfungsi inventaris dan peralatan kantor yang telah dilakukan penurunan nilai sebesar nilai perolehannya.

Piutang bermasalah merupakan piutang pinjaman mitra binaan kategori macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*) namun tidak terpulihkan.

Alokasi penyisihan piutang bermasalah yang mungkin tidak tertagih dihitung 100% dari saldo piutang bermasalah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Program TJSL BUMN.

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

ANNUAL REPORT



Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

8. Aset Neto

	2023 Rp	2022 Rp
ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo Awal	3.489.713.497	3.770.272.959
Surplus (Defisit)	679.025.337	(280.559.462)
Saldo Akhir	4.168.738.834	3.489.713.497
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--
ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	--	--
TOTAL ASET NETO	4.168.738.834	3.489.713.497

9. Pendapatan

	2023 Rp	2022 Rp
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	205.300.340	192.906.755
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro	8.021.209	7.468.427
Pendapatan Lain-lain :		
Pemulihan Penyisihan Piutang (Catatan 4)	436.747.967	--
Pemulihan Nilai Piutang Bermasalah (Catatan 7)	31.594.061	--
Lainnya	1.684.000	5.010.000
Total	683.347.577	205.385.182

Pendapatan jasa administrasi pinjaman merupakan pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana program kemitraan yang disalurkan kepada mitra binaan termasuk pengakuan/akrualisasi pendapatan jasa administrasi pinjaman dengan status lancar dan kurang lancar sebesar nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak.

10. Beban

	2023 Rp	2022 Rp
Beban Administrasi dan Umum	4.322.240	4.211.684
Beban Penyisihan Piutang (Catatan 4 dan 7)	--	480.080.250
Beban Lain-lain	--	1.652.710
Total	4.322.240	485.944.644

11. Informasi Tambahan

Kinerja Program Kemitraan

Penilaian kinerja TJSL berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.Kep.100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 mencakup program kemitraan dengan indikator Tingkat Efektivitas Penyaluran dan Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman.

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1) Efektivitas Penyaluran Dana

Tingkat efektivitas penyaluran dana dihitung dengan cara membagi jumlah dana yang disalurkan dengan jumlah dana yang tersedia. Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari pinjaman kerja dan hibah. Sedangkan jumlah dana yang tersedia terdiri dari saldo awal periode ditambah dengan pengembalian pinjaman (pokok ditambah bunga) dan pendapatan bunga.

	2023 Rp	2022 Rp
Dana yang Disalurkan		
Penyaluran Dana Mandiri	320.000.000	2.315.000.000
Penyaluran Dana Kerjasama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.700.000.000	--
Total Penyaluran Dana	2.020.000.000	2.315.000.000

Tabel penilaian tingkat penyerapan dana pinjaman kemitraan:

Tingkat Penyerapan (%)	>90	85 s.d 90	80 s.d 85	<80
Skor	3	2	1	0
Formula	$\frac{\text{Jumlah Dana yang Disalurkan}}{\text{Jumlah Dana yang Tersedia}} \times 100\%$			

Perhitungan efektivitas penyaluran sebagai berikut:

	2023	2022
Jumlah Dana yang Disalurkan	2.020.000.000	2.315.000.000
Jumlah Dana yang Tersedia	2.269.614.247	2.499.199.859
Hasil	89,00	92,63
Skor	2	3

2) Tingkat Kolektibilitas Penyaluran Pinjaman

Indikator lain dalam penilaian kinerja PUMK yaitu tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman yang mana memberi indikasi kemungkinan tertagihnya suatu pinjaman. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman merupakan perbandingan antara rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman terhadap jumlah pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman).

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman berdasarkan kualitas pinjaman (lancar, kurang lancar, ragu-ragu, dan macet). Bobot kolektibilitas dengan kualitas lancar (100%), kurang lancar (75%), ragu-ragu (25%), dan macet (0%).

Kategori Kolektibilitas Saldo Pinjaman	2023		Rata-rata Tertimbang Kolektibilitas Rp
	Jumlah Rp	Bobot Kolektibilitas	
Lancar	1.997.053.000	1,00	1.997.053.000
Kurang lancar	413.263.995	0,75	309.947.996
Ragu-ragu	55.549.000	0,25	13.887.250
Macet	829.844.401	--	--
	3.295.710.396		2.320.888.246



Kategori Kolektibilitas Saldo Pinjaman	2022		
	Jumlah Rp	Bobot Kolektibilitas	Rata-rata Tertimbang Kolektibilitas Rp
Lancar	3.120.806.921	1,00	3.120.806.921
Kurang lancar	352.916.500	0,75	264.687.375
Ragu-ragu	125.677.993	0,25	31.419.498
Macet	1.220.380.000	--	--
	4.819.781.414		3.416.913.794

Tabel penilaian:

Tingkat Penyerapan (%)	>70	40 s.d 70	10 s.d 40	<10
Skor	3	2	1	0
Formula	$\frac{\text{Rata - Rata Tertimbang Kolektabilitas Pinjaman}}{\text{Saldo Pinjaman yang di Salurkan Sampai Akhir Periode}} \times 100\%$			

	2023	2022
Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman	2.320.888.246	3.416.913.794
Saldo pinjaman yang disalurkan sampai dengan akhir periode	3.295.710.396	4.819.781.414
Hasil	70,42	70,89
Skor	3	3

3) Variabel Utama Pelaksanaan PUMK

Laporan utama pelaksanaan PUMK menyajikan informasi sumber dana dan penyaluran dana dan biaya operasional tahun 2023 dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

No	Uraian Dana Tersedia:	Program Kemitraan
1	Saldo Awal per 31 Desember 2022	184.199.859
2	Alokasi laba dari BUMN pembina	--
3	Pengembalian pinjaman dari mitra binaan	1.874.731.079
4	Pengembalian dana dari BUMN pembina lain/lembaga penyalur	--
5	Pendapatan jasa administrasi pinjaman	205.300.340
6	Pendapatan lain	1.684.000
7	Jasa giro	8.021.209
8	Kelebihan pembayaran angsuran	--
9	Angsuran yang belum teridentifikasi	--
10	Biaya administrasi dan umum	(4.322.240)
11	Dana tersedia (Jumlah 1 s.d 10)	2.269.614.247
	Penyaluran dana dan biaya operasional	
12	Penyaluran pinjaman mitra binaan secara mandiri	(320.000.000)
13	Penyaluran pinjaman melalui BRI	(1.700.000.000)
14	Penyaluran hibah/dana pembinaan	--
15	Penyaluran dana bina lingkungan	--
16	Penyaluran dana bina lingkungan BUMN peduli	--
17	Penyaluran dana pembinaan kemitraan	--
18	Jumlah Penyaluran Dana dan Biaya Operasional (Jumlah 12 s.d 17)	(2.020.000.000)
	Dana Tersedia per 31 Desember 2023 (11-18)	249.614.247

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- 4) Realisasi Akumulasi Penyaluran Dana Program TJSL Non PUMK
 Laporan realisasi akumulasi penyaluran dana program TJSL non PUMK berdasarkan jenis bantuan yang disalurkan menyajikan informasi realisasi penyaluran dana program TJSL non PUMK sampai dengan tahun 2023 dan 2022. Mulai tahun 2021 Pendanaan program non PUMK diambil dari anggaran perusahaan dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

Jenis Bantuan	Sampai dengan Tahun 2022	Penyaluran Tahun 2023	Sampai dengan Tahun 2023
Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum	445.296.800	7.000.000	452.296.800
Bantuan sarana ibadah	342.602.307	2.000.000	344.602.307
Bantuan peningkatan kesehatan	296.729.011	4.500.000	301.229.011
Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan	146.580.900	5.640.200	152.221.100
Bantuan korban bencana alam	143.069.013		143.069.013
Bantuan pelestarian alam	133.602.307	1.000.000	134.602.307
Pengentasan kemiskinan	69.579.840	73.805.386	143.385.226
Sub Jumlah	1.577.460.178	93.945.586	1.671.405.764
BL BUMN Peduli	583.794.418	19.896.081	603.690.499
Total	2.161.254.596	113.841.667	2.275.096.263

- 5) Realisasi Akumulasi Penyaluran Dana Bergulir Program PUMK
 Laporan realisasi akumulasi penyaluran dana PUMK berdasarkan sektor usaha mitra binaan menyajikan informasi realisasi penyaluran program kemitraan sampai dengan tahun 2023 dan 2022 dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

Sektor Usaha Mitra Binaan	Realisasi Sampai Dengan Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023		Realisasi Sampai Dengan Tahun 2023	
	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah
1	2	3	4	5		
Sektor Perdagangan	423	11.772.965.134	3	220.000.000	426	11.992.965.134
Sektor Industri	138	3.806.541.040	--	--	138	3.806.541.040
Sektor Usaha Jasa	60	2.349.185.000	1	100.000.000	61	2.449.185.000
Sektor Perikanan/Peternak	79	1.599.696.060	--	--	79	1.599.696.060
Sektor Pertanian/Perkebun	20	660.373.000	--	--	20	660.373.000
Sektor Usaha Lainnya	4	80.666.000	--	--	4	80.666.000
Dana Pembinaan Kemitraan	22	10.127.000	--	--	22	10.127.000
Penyaluran Melalui BRI	--	--	--	1.700.000.000	--	1.700.000.000
Total	746	20.279.553.234	4	2.020.000.000	750	22.299.553.234

- 6) Rencana dan Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Program PUMK
 Laporan rencana dan realisasi penyaluran program kemitraan berdasarkan sektor usaha mitra binaan menyajikan informasi prosentase realisasi tahun berjalan terhadap rencana dan realisasi tahun sebelumnya penyaluran program kemitraan tahun 2023 dan 2022 dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

Sektor Usaha Mitra Binaan	Realisasi 2022	Rencana 2023	Realisasi 2023	Persentase Dibandingkan Tahun Sebelumnya	Persentase Dibandingkan Dengan Rencana
	Rp	Rp	Rp	Persentase Jumlah Rupiah	Persentase Jumlah Rupiah
Sektor Perdagangan	1.445.000.000	1.100.000.000	220.000.000	15%	20%
Sektor Industri	460.000.000	460.000.000	--	0%	0%
Sektor Usaha Jasa	390.000.000	100.000.000	100.000.000	26%	100%
Sektor Perikanan/Peternakan	20.000.000	50.000.000	--	0%	0%
Sektor Pertanian/Perkebunan	--	90.000.000	--	0%	0%
Penyaluran Dana Pinjaman melalui BRI	--	--	1.700.000.000	100%	100%
Total	2.315.000.000	1.800.000.000	2.020.000.000	87%	112%



PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

ANNUAL REPORT



Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

7) Posisi Piutang Program Kemitraan

Laporan posisi piutang program kemitraan berdasarkan sektor mitra binaan menyajikan informasi presentase posisi piutang dan jumlah mitra binaan terhadap tahun sebelumnya dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

Sektor Usaha Mitra Binaan	Lancar		Kurang Lancar		Diragukan		Macet		Total	
	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah
Sektor Perdagangan	47	1.205.821.500	11	318.539.995	4	47.982.000	33	400.166.381	95	1.972.509.876
Sektor Industri	12	265.399.000	3	57.650.000	2	7.567.000	7	114.160.000	24	444.776.000
Sektor Usaha Jasa	9	284.291.500	3	32.189.000	--	--	7	103.331.500	19	419.812.000
Sektor Perikanan/Peternakan	11	227.166.000	2	4.885.000	--	--	10	123.688.020	23	355.739.020
Sektor Pertanian/Perkebunan	0	14.375.000	-	--	--	--	3	88.498.500	3	102.873.500
Total	79	1.997.053.000	19	413.263.995	6	55.549.000	60	829.844.401	164	3.295.710.396

12. Peraturan Menteri Negara BUMN yang Berlaku Sampai Dengan Tahun Buku

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 yang diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2023, tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

13. Tanggung Jawab Pengurus Unit TJSL atas Laporan Keuangan

Pengurus Unit TJSL bertanggung jawab atas laporan keuangan yang diselesaikan dan diotorisasi oleh Pengurus untuk terbit pada tanggal 15 Maret 2024.



PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)



@ptintiofficial

Head Office

Jl. Moch. Toha No. 77 Bandung 40253

Tlp : (022) 5201501 | Fax : (022) 5202444

E-mail : info@inti.co.id

Representative Office

Jl. Balitung 1 No. 17 (Senopati)

Jakarta Selatan 12110

Production Facilities

Jl. Moch. Toha No. 225 Bandung

Tlp : (022) 5206510



Katalog Produk